RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN GRESIK

TAHUN 2027

GRESIK
KOTA INDUSTRI YANG MAJU, MANDIRI DAN BERKELANJUTAN



PONDASI PEMBANGUNAN KABUPATEN GRESIK

- INFRASTRUKTUR BERKUALITAS
- AIR BERSIH & SANITASI
- PENDIDIKAN BERKUALITAS
- KESEHATAN UNTUK SEMUA
- PERLINDUNGAN SOSIAL DAN LAYANAN DASAR
- INDUSTRI KUAT EKONOMI HEBAT
- PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

BERSINERGI | BERINOVASI | BERDAYA SAING | BERKELANJUTAN

BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah sebagai instrumen untuk menjamin kesinambungan pembangunan yang terencana, terpadu, dan sistematis;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

BAGIAN HUKUM

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2027;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

BAGIAN HU

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 Nomor 9 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 6);

BAGIAN HUKUM

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.

BAGIAN HUKUM

9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pasal 2

RKPD tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2027 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2027.

Pasal 3

RKPD tahun 2027 dimaksudkan sebagai pedoman bagi :

a. Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2027;
b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Angggaran 2027; dan
c. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

Pasal 4

Penetapan RKPD ini bertujuan untuk :

a. menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027 serta mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2027; dan
b. sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS Tahun 2027 bersama DPRD.

BAGIAN HUKUM

Pasal 5

(1) RKPD tahun 2027 terdiri atas:
   a. narasi RKPD tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini;
   b. matriks Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini;
   c. matriks Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini; dan
   d. matriks Penyelarasan dan Dukungan terhadap Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

(2) Sistematika narasi RKPD tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
   a. bab I pendahuluan, memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan;
   b. bab II gambaran umum kondisi Daerah, memuat kondisi umum Daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, permasalahan pembangunan Daerah, isu strategis pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2027;
   c. bab III kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, memuat arah kebijakan ekonomi Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah;
   d. bab IV sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, memuat tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2027, keselarasan dokumen perencanaan, keselarasan dengan program kerja prioritas nasional, dan pokok-pokok pikiran DPRD;

BAGIAN HUKUM

e. bab V rencana kerja dan pendanaan Daerah, memuat kerangka pendanaan pembangunan, rencana program, kegiatan Perangkat Daerah dan prakiraan maju 2027, dan program prioritas pembangunan tahun 2027;
f. bab VI kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah, memuat penetapan indikator kinerja utama, dan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan perinatal Daerah; dan
g. bab VII Penutup, memuat penegasan bahwa RKPD tahun 2027 merupakan acuan penyusunan kebijakan publik dan APBD Tahun Angggaran 2027.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 8 Juli 2026

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 8 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026 NOMOR 32

BAGIAN HUKUM

D A F T A R I S I

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Dasar Hukum I-4

1.3 Hubungan Antar Dokumen I-11

1.4 Maksud dan Tujuan I-13

1.5 Sistematika Penulisan I-14

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah II-1

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah II-1

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam II-9

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup II-26

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan II-30

2.1.1.5 Lingkungan Berkualitas II-35

2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim II-45

2.1.1.7 Demografi II-54

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-58

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi II-58

2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua II-76

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang merata II-82

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif II-86

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju II-90

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Keseteraan Gender, dan Masyarakat Inklusif II-93

2.1.3 Aspek Pelayanan UmumII-103

2.1.3.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adapti fII-103

2.1.3.2 Hukum, Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demografi Substantial II-113

2.1.3.3 Ketangguhan Diplokasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan II-117
2.1.3.4 Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah II-118
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah II-269
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun II-321
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah II-325
2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran II-325
2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah II-333
2.3.2.1 Urusan Wajib Dasar II-333
2.3.2.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar II-342
2.3.2.3 Urusan Pilihan II-367
2.3.2.4 Penunjang Urusan Perencanaan II-376
2.4 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Gresik 2027 ..... II-381

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-2
3.1.1 Perkembangan Perekonomian Daerah III-4
3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi III-4
3.1.1.2 Kinerja Perdagangan III-5
3.1.1.3 Kinerja Investasi III-5
3.1.1.4 Tingkat Inflasi III-6
3.1.1.5 Kinerja Perbankan III-7
3.1.2 Perkiraan Makro Ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2026 dan 2027 ..... III-8
3.1.3 Analisis Investasi III-9
3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah III-10
3.1.4.1 Tantangan Perekonomian Daerah III-10
3.1.4.2 Prospek Perekonomian Daerah III-12
3.1.5 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi III-13

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-14
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan III-18
3.2.2 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah III-20
3.2.2.1 Sumber Pendanaan APBD III-22
3.2.2.2 Sumber Pendanaan Non APBD III-24
3.2.3 Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah III-27
3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-29

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
4.1 Pendapatan Asli Daerah II-304
4.1.1 Strategi Umum IV-7
4.1.2 Strategi Khusus IV-8
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027 ..... IV-19
4.3 Keselarasan Dokumen Perencanaan IV-46
4.3.1 Keselarasan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Nasional ... IV-49
4.4 Keselarasan dengan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) IV-52
4.5 Pokok-Pokok Pikiran DPRD IV-63

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
5.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan V-1
5.2 Rencana Program, Kegiatan Perangkat Daerah dan Prakiraan Maju 2027 .... V-1
5.3 Program Prioritas Pembangunan Tahun 2027 ..... V-3

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama VI-1

BAB VII PENUTUP

D A F T A R G A M B A R

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen I-11
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Gresik II-3
Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Gresik..... II-5
Gambar 2.3 Peta Geologi Kabupaten Gresik..... II-8
Gambar 2.4 Tingkat Inflasi Kabupaten Gresik Bulan April 2025-April 2026 ..... II-307
Gambar 3.1 Tingkat Inflasi Year On Year Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2025 ..... III-7
Gambar 3.2 Hirarki Prioritas Pendanaan Pembangunan Kabupaten Gresik III-23

D A F T A R T A B E L

Tabel 2.1 Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan II-2
Tabel 2.2 Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut II-10
Tabel 2.3 Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman II-12
Tabel 2.4 Produksi Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman Tahun 2021 2025 ..... II-13
Tabel 2.5 Produksi Buah-buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025 Jenis Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan (Kuintal) II-14
Tabel 2.6 Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025 Jenis Produksi Perkebunan Rakyat (Ton) II-16
Tabel 2.7 Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Gresik II-17
Tabel 2.8 Populasi Ternak Unggas di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025 ... II-18
Tabel 2.9 Produksi Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025 ..... II-19
Tabel 2.10 Jumlah Wisatawan Mancanegara Dan Domestik Di Kabupaten Gresik Dari Tahun 2020-2025 ..... II-22
Tabel 2.11 Destinasi Wisata Kabupaten Gresik Tahun 2026 ..... II-23
Tabel 2.12 Luas Area dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian di Kabupaten Gresik Luas Usaha Produksi II-25
Tabel 2.13 Ketersediaan dan Kebutuhan Daya Dukung Pangan Kabupaten Gresik II-27
Tabel 2.14 Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Gresik II-28
Tabel 2.15 Distribusi Listrik PT.PLN (Persero) Kabupaten Gresik II-30
Tabel 2.16 Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan di Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2025 ..... II-32
Tabel 2.17 Kapasitas Air Baku Di Kabupaten Gresik II-34
Tabel 2.18 Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Kabupaten Gresik II-35
Tabel 2.19 Penggunaan Lahan Kabupaten Gresik II-36

Tabel 2.20 Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) II-37
Tabel 2.21 Rumah Tangga Sanitasi Aman (%) Tahun 2021 – 2025..... II-41
Tabel 2.22 Capaian Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah II-42
Tabel 2.23 Capaian Persentase Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah II-44
Tabel 2.24 Indikator Penurunan Emisi GRK Kumulatif II-46
Tabel 2.25 Persentase Indeks Risiko Bencana..... II-48
Tabel 2.26 Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025..... II-54
Tabel 2.27 Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Gresik Tahun 2022 -2025 ..... II-55
Tabel 2.28 Kelompok Umur Kabupaten Gresik Tahun 2024..... II-56
Tabel 2.29 Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Gresik Tahun 2025 ..... II-57
Tabel 2.30 Laju Pertumbuhan Ekonomi Laju Pertumbuhan Ekonomi (y-on-y) Tahunan Nasional, Jawa Timur, dan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025..... II-59
Tabel 2.31 Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan Kabupaten Gresik II-61
Tabel 2.32 Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK Nasional, Jawa Timur dan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025 Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga..... II-63
Tabel 2.33 PDRB Per Kapita ADHK Nasional, Jawa Timur dan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Ribu Rupiah .....)II-64
Tabel 2.34 Capaian Indikator Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2021-2025 Tingkat Tahun II-66
Tabel 2.35 Tingkat Kemiskinan Gerbangkertasusila Tahun 2021 – 2025..... II-67
Tabel 2.36 Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka.... II-68
Tabel 2.37 Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis II-70

Tabel 2.38 Capaian Indikator Gini II-73
Tabel 2.39 Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gresik II-75
Tabel 2.40 Capaian Indikator Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Gresik .. II-77
Tabel 2.41 Capaian Indikator Prevalensi Stunting Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025 ..... II-78
Tabel 2.42 Capaian Indikator Insidensi Tuberkulosis Kabupaten Gresik II-80
Tabel 2.43 Capaian Indikator Persentase Penduduk Yang Menjadi Peserta Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dengan Kepesertaan Mandiri Kabupaten Gresik II-81
Tabel 2.44 Capaian Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025 Angka Kematian Tahun II-82
Tabel 2.45 Capaian Indikator Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Gresik II-83
Tabel 2.46 Capaian Indikator Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik..... II-84
Tabel 2.47 Capaian Indikator Rata-rata APM Perempuan Terhadap Laki Laki Pada Jenjang SD dan SMP di Wilayah Rentan Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2025 ..... II-85
Tabel 2.48 Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Penerima Upah Kabupaten Gresik II-87
Tabel 2.49 Capaian Indikator Persentase Partisipasi Perlindungan Sosial Bagi Keluarga Miskin Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025..... II-89
Tabel 2.50 Capaian Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021 2025..... II-91
Tabel 2.51 Capaian Indikator Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Gresik ... II-93
Tabel 2.52 Capaian Indikator Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Gresik II-95
Tabel 2.53 Capaian Indikator Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Gresik II-96
Tabel 2.54 Indikator Sasaran Kepemudaan dan Olahraga Kabuapaten Gresik Tahun 2021-2025..... II-98

Tabel 2.55 Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025 ..... II-99
Tabel 2.56 Pekerja Penyandang Disabilitas Kabupaten Gresik Pekerja Penyandang Disabilitas Kabupaten Gresik II-102
Tabel 2.57 Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik ... II-104
Tabel 2.58 Capaian Indikator Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Gresik II-106
Tabel 2.59 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Gresik II-108
Tabel 2.60 Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Tahun 2025 ..... II-109
Tabel 2.61 Capaian Indikator Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Gresik..... II-112
Tabel 2.62 Capaian Indikator Persentase Pemenuhan Kebijakan Peduli HAM yang difasilitasi Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025 ..... II-114
Tabel 2.63 Capaian Indikator Indeks Demokrasi Indonesia Kabupaten Gresik II-116
Tabel 2.64 Capaian Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perbup II-116
Tabel 2.65 Realisasi Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025 ..... II-118
Tabel 2.66 Indikator Urusan Pendidikan Kabupaten Gresik II-119
Tabel 2.67 Indikator Urusan Kesehatan Kabupaten Gresik II-123
Tabel 2.68 Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-129
Tabel 2.69 Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman..... II-133
Tabel 2.70 Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025 ..... II-135
Tabel 2.71 Indikator Persentase Urusan Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021- 2025 ..... II-139
Tabel 2.72 Capaian Indikator Sasaran Ketenagakerjaan Kabupaten Gresik Tahun 2024-2025 ..... II-141
Tabel 2.73 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Gresik II-147
Tabel 2.74 Indikator Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Gresik..... II-153
Tabel 2.75 Indikator Hubungan Industrial Kabupaten Gresik II-154

Tabel 2.76 Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025 ..... II-155
Tabel 2.77 Indikator Pola Pangan Harapan Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2025..... II-157
Tabel 2.78 Indikator Urusan Pertanahan II-161
Tabel 2.79 Indikator Urusan Lingkungan Hidup II-163
Tabel 2.80 Indikator Sasaran Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2021-2025..... II-167
Tabel 2.81 Indikator Sasaran Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2025 ..... II-170
Tabel 2.82 Status Desa Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024 ..... II-172
Tabel 2.83 Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2021-2025..... II-174
Tabel 2.84 Indikator Urusan Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2024-2025..... II-175
Tabel 2.85 Indikator Urusan Perhubungan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2023..... II-176
Tabel 2.86 Indikator Persentase Ruas Jalan di Dalam Kota Kabupaten Gresik II-176
Tabel 2.87 Indikator urusan Komunikasi dan Informatika II-178
Tabel 2.88 Indikator Sasaran Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2020-2025 ..... II-181
Tabel 2.89 Capaian Indikator Sasaran Penanaman Modal Kabupaten Gresik... II-182
Tabel 2.90 Pertumbuhan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik..... II-187
Tabel 2.91 Indikator Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal Kabupaten Gresik II-189
Tabel 2.92 Indikator Sasaran Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik Tahun 2022-2025 ..... II-192
Tabel 2.93 Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025 ..... II-193
Tabel 2.94 Indikator urusan Statistik II-196

Tabel 2.95 Indikator urusan Persandian II-198
Tabel 2.96 Indikator Kebudayaan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025 ..... II-200
Tabel 2.97 Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan di Kabupaten Gresik II-204
Tabel 2.98 Indikator Sasaran Perpustakaan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025..... II-207
Tabel 2.99 Indikator Sasaran Kearsipan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025..... II-208
Tabel 2.100 Pertumbuhan Kunjungan Wisata Kabupaten Gresik Tahun 2021 -2025 ..... II-211
Tabel 2.101 Indikator Sasaran Pariwisata Tahun 2021-2025 ..... II-212
Tabel 2.102 Indikator urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025 ..... II-215
Tabel 2.103 Perkembangan Hasil Laut di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025..... II-219
Tabel 2.104 Perkembangan Perikanan Budidaya di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025 ..... II-223
Tabel 2.105 Indikator Kinerja Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025... II-226
Tabel 2.106 Data Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025..... II-228
Tabel 2.107 Data Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025 ..... II-233
Tabel 2.108 Data Produksi Peternakan Tahun 2021-2025..... II-234
Tabel 2.109 Indikator Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan (USD)..... II-238
Tabel 2.110 Laporan Neraca Perdagangan Luar Negeri Kabupaten Gresik Tahun 2020-025 ..... II-240
Tabel 2.111 Indikator Urusan Perdagangan Tahun 2020 – 2025 ..... II-242
Tabel 2.112 Indikator Sasaran Perindustrian Tahun 2020-2025 ..... II-244
Tabel 2.113 Rekapitulasi Data Jumlah IMKM Beserta Pembinaan yang Pernah Dilakukan dari Tahun 2020-2025 ..... II-246
Tabel 2.114 Indikator Urusan Perencanaan Kabupaten Gresik..... II-249

Tabel 2.115 Capaian Indikator Sasaran Keuangan Kabupaten Gresik Tahun 2024-2025 ..... II-249
Tabel 2.116 Kemandirian Fiskal Kabupaten Gresik Kemandirian Fiskal Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025 ..... II-252
Tabel 2.117 Capaian Sasaran Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021-2025 ..... II-253
Tabel 2.118 Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan
Tabel 2.119 Capaian Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politk Tahun 2021-2025 ..... II-257
Tabel 2.120 Capaian Indikator Urusan Pengawasan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025 ..... II-259
Tabel 2.121 Indikator Urusan Sekretariat DPRD Tahun 2021-2025 ..... II-261
Tabel 2.122 Capaian Indikator Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025 ..... II-264
Tabel 2.123 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025 ..... II-267
Tabel 2.124 Capaian Sasaran Kecamatan Pendanaan Program Prioritas Daerah Ditingkat Desa/Kelurahan Tahun 2021-2025 ..... II-268
Tabel 2.125 Capaian Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025 ..... II-270
Tabel 2.126 Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025 ..... II-271
Tabel 2.127 Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025 ..... II-273
Tabel 2.128 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Gresik Tahun 2022-2025 ..... II-273
Tabel 2.129 Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Gresik II-276

Tabel 2.130 Distribusi PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Sektor Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman Kabupaten Gresik II-278
Tabel 2.131 Pertumbuhan Kunjungan Wisata Kabupaten Gresik Tahun 2021 2025..... II-281
Tabel 2.132 Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif Unggulan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2025 ..... II-284
Tabel 2.133 Pertumbuhan Usaha Mikro di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025..... II-286
Tabel 2.134 Capaian Indikator ICOR Kabupaten Gresik II-288
Tabel 2.135 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahunan Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Jawa Timur (Miliar Rupiah) II-290
Tabel 2.136 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahunan Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Timur (Miliar Rupiah) II-291
Tabel 2.137 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahunan Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Timur (Persen)..... II-292
Tabel 2.138 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Gresik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten II-293
Tabel 2.139 Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Gresik Incremental Capital Output Ratio (ICOR) II-295
Tabel 2.140 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan Kabupaten Gresik II-298
Tabel 2.141 Indikator Sasaran Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2025 ..... II-300
Tabel 2.142 Status Desa Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2024 ..... II-301
Tabel 2.143 Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Gresik Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Gresik..... II-304

Tabel 2.144 Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik Rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik II-304
Tabel 2.145 Capaian Indikator pStandar Pelayanan Minimal Pendidikan Kabupaten Gresik II-308
Tabel 2.146 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan II-309
Tabel 2.147 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021 – 2025 ..... II-311
Tabel 2.148 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 – 2025..... II-314
Tabel 2.149 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022 – 2025..... II-316
Tabel 2.150 Mutu Minimal Layanan Dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Tahun 2025..... II-317
Tabel 2.151 Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial II-319
Tabel 2.152 Rincian Target dan Realisasi Kinerja BUMD Tahun 2025 ..... II-320
Tabel 2.153 Tabel Rekapitulasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Triwulan IV Tahun 2025..... II-321
Tabel 2.154 Permasalahan Setiap Program Daerah..... II-377
Tabel 3.1 Perbandingan Target Indikator Makro Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik Tahun 2027..... III-3
Tabel 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Laju Pertumbuhan Ekonomi (y-on-y) Tahunan Nasional, Jawa Timur, dan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025..... III-4
Tabel 3.3 PDRB ADHK (Miliar Rp.)..... III-5
Tabel 3.4 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2021 2025..... III-5

Tabel 3.5 Perkembangan Realisasi Investasi Gresik III-6
Tabel 3.6 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Gresik III-9
Tabel 3.7 Incremental Capital Ratio (ICOR) Incremental Capital Output Ratio (Persen) III-9
Tabel 4.1 Pentahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025- 2029 ..... IV-2
Tabel 4.2 Keselarasan Visi Misi Nasional, Jawa Timur dan Kabupaten Gresik IV-5
Tabel 4.3 Strategi Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2026 ..... IV-8
Tabel 4.4 Target Tujuan Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2027 ..... IV-15
Tabel 4.5 Target Sasaran Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2027 ..... IV-16
Tabel 4.6 Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Gresik Nawakarsa Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029 ..... IV-19
Tabel 4.7 Program Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2027 ..... IV-24
Tabel 4.8 Keselarasan dan Konsistensi RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2027 dengan RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2025-2029 ..... IV-46
Tabel 4.9 Cascading Permasalahan – Permasalahan, Isu Strategis dan Program dan Program Prioritas IV-48
Tabel 4.10 Keselarasan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Provinsi dan Pembangunan Nasional Tahun 2027 ..... IV-50
Tabel 4.11 Keselarasan Indikator Makro Kabupaten Gresik dalam Rancangan RKPD Provinsi Jawa Timur dengan RKPD Kabupaten Gresik IV-52
Tabel 4.12 Keselarasan dengan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Tahun 2027 ..... IV-53
Tabel 4.13 Pokok Pokok Pikiran IV-63
Tabel 5.1 Rekapitulasi Anggaran Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2027 ..... V-1
Tabel 5.2 Rekapitulasi Anggaran Program Prioritas Tahun 2027 ..... V-4

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2027

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. RKPD disusun untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan, RKPD menjadi instrumen penting yang menjembatani antara arah kebijakan jangka menengah dengan implementasi tahunan, sehingga mampu memastikan kesinambungan pembangunan daerah secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2027 disusun sebagai bagian dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 yang memasuki tahun ketiga. Pada tahapan ini, pembangunan daerah diarahkan tidak hanya untuk menjaga kesinambungan capaian pembangunan, tetapi juga untuk memperkuat fondasi pembangunan yang menjadi prasyarat bagi percepatan kemajuan di tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, tema pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2027 ditetapkan sebagai “Penguatan infrastruktur dan layanan dasar serta fondasi pembangunan yang menjadi prasyarat bagi kemajuan di tahun-tahun berikutnya.” Tema ini menegaskan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan penyediaan infrastruktur yang memadai sebagai landasan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Penguatan infrastruktur dan layanan dasar menjadi fokus utama dalam RKPD Tahun 2027, mengingat perannya yang sangat penting dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang andal dan merata, meliputi jaringan jalan, transportasi, air bersih, sanitasi, perumahan, serta infrastruktur digital, menjadi faktor penentu dalam meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta membuka akses terhadap peluang ekonomi. Sementara itu, layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial menjadi fondasi dalam membentuk sumber daya manusia yang sehat,

cerdas, produktif, dan berdaya saing. Selain penguatan infrastruktur dan layanan dasar, pembangunan tahun 2027 juga diarahkan pada penguatan fondasi tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Dengan tata kelola yang kuat, pembangunan daerah diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjamin keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah. RKPD menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2027, yang selanjutnya dijabarkan dalam dokumen penganggaran daerah, seperti Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Dengan demikian, RKPD berperan sebagai instrumen utama dalam memastikan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2027 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tahapan penyusunan dilakukan secara sistematis dan partisipatif, mulai dari persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), hingga penetapan RKPD. Proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan bahwa dokumen yang dihasilkan bersifat aspiratif, transparan, dan akuntabel.

Dalam penyusunannya, RKPD Tahun 2027 juga memperhatikan keterpaduan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional. Sinkronisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan Kabupaten Gresik selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2025–2029 serta kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur, sehingga mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian target pembangunan yang lebih luas. Visi pembangunan Kabupaten Gresik sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025–2029 adalah “Pembangunan Gresik Maju yang Berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan

Masyarakat." Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1) Memperkuat insan Gresik unggul yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah;
2) Percepatan pembangunan perekonomian daerah yang merata, berbasis potensi keunggulan lokal yang berkualitas dan berdaya saing;
3) Menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan serta terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
4) Meningkatkan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan terbaik bagi masyarakat; dan
5) Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Dalam konteks RKPD Tahun 2027, tema penguatan infrastruktur dan layanan dasar menjadi sangat relevan terutama dalam mendukung pelaksanaan misi ketiga dan misi kelima, tanpa mengabaikan keterkaitan dengan misi lainnya. Penguatan fondasi pembangunan melalui penyediaan infrastruktur dan layanan dasar yang berkualitas diharapkan mampu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh. RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2027 juga disusun dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis yang berkembang, antara lain kebutuhan peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur, penguatan layanan dasar yang inklusif, pengurangan ketimpangan antarwilayah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, tantangan perubahan iklim, kebutuhan pembangunan berkelanjutan, serta percepatan transformasi digital juga menjadi perhatian penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan RKPD sangat ditentukan oleh sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah perlu memastikan keterlibatan aktif dari perangkat daerah, DPRD, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Pendekatan partisipatif ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, prinsip transparansi dan akuntabilitas harus dijunjung tinggi guna meningkatkan efektivitas pembangunan dan kepercayaan publik.

Dengan demikian, RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2027 merupakan dokumen strategis yang tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perencanaan tahunan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat fondasi pembangunan daerah. Melalui fokus pada penguatan infrastruktur dan layanan dasar, RKPD Tahun 2027 diharapkan mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi percepatan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya, sehingga visi pembangunan daerah dapat terwujud secara optimal dan berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum

Landasan perundang-undangan yang digunakan dalam menyusun RKPD tahun 2027 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaiamana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6313);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
22. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
24. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
25. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19) ;
26. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmsigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 269);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1030);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
31. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868)
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
38. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
41. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 100 Seri E);
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);

47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
48. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2027;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 6);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 4)
52. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 3);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 3).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional maka dokumen perencanaan terdiri atas:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) berdimensi panjang 20 tahunan;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berdimensi menengah 5 tahunan;
3. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) berdimensi pendek 1 tahunan; dan
5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Gresik meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Dua landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

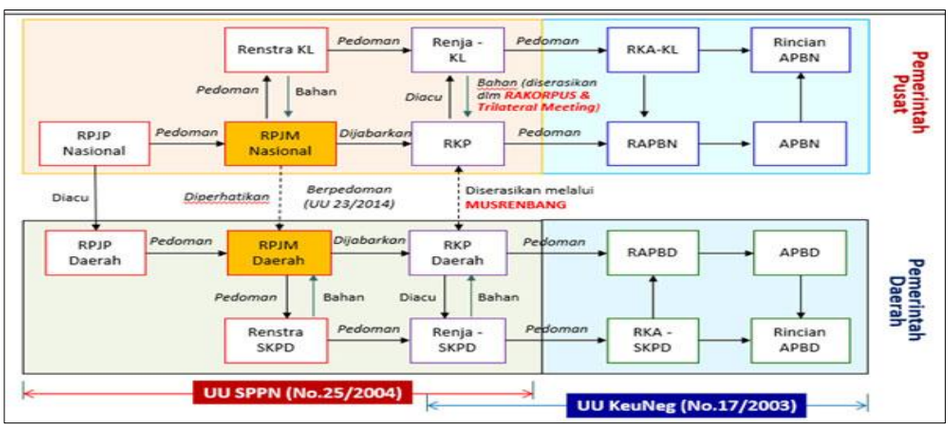

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen

Sumber : UU No. 25 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014

RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2027 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan sistem perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara berjenjang dan berkesinambungan. Dokumen ini hadir sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029, yang pada pelaksanaannya telah memasuki tahun ketiga. Dalam posisi tersebut, RKPD Tahun 2027 tidak hanya melanjutkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, tetapi juga memperkuat pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar tetap berada pada jalur yang telah direncanakan.

Di sisi lain, RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 sendiri disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2045 sebagai arah pembangunan jangka panjang daerah. Oleh karena itu, RKPD Tahun 2027 sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan RPJMD juga harus tetap menjaga keselarasan dengan tujuan dan arah pembangunan jangka panjang tersebut. Keterkaitan ini menjadi penting agar pembangunan daerah tidak berjalan secara terputus, melainkan terus berlanjut secara bertahap dan konsisten menuju sasaran jangka panjang yang telah ditetapkan.

Selain keterkaitan dengan dokumen perencanaan daerah, penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2027 juga memperhatikan arah kebijakan pembangunan di tingkat provinsi dan nasional. Hal ini dilakukan agar pembangunan di Kabupaten Gresik tetap selaras dengan kebijakan yang lebih luas, serta mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan di tingkat yang lebih tinggi. Keselarasan ini tercermin dalam penyesuaian prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Dalam konteks tersebut, RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2027 mengusung tema *"Penguatan infrastruktur dan layanan dasar serta fondasi pembangunan yang menjadi prasyarat bagi kemajuan di tahun-tahun berikutnya."* Tema ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari kesinambungan arah pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, sekaligus menjadi respons terhadap kebutuhan pembangunan saat ini. Melalui tema tersebut, pembangunan diarahkan untuk memperkuat aspek-aspek mendasar yang akan menjadi pijakan bagi percepatan pembangunan pada periode selanjutnya.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD juga memiliki peran penting dalam menghubungkan antara perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan. RKPD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2027, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam dokumen penganggaran daerah, seperti Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Melalui alur tersebut, setiap rencana yang telah disusun dapat diterjemahkan secara konkret ke dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Dengan demikian, RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2027 tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, tetapi juga menjadi penghubung yang memastikan keterpaduan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan pembangunan, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan. Melalui keterpaduan tersebut, pembangunan daerah diharapkan dapat berjalan secara lebih terarah, konsisten, dan berkelanjutan dalam mendukung terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Gresik.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Gresik tahun 2027 adalah untuk menentukan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2027 dan untuk mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan terhadap seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Gresik.

Tujuan dari penyusunan RKPD ini adalah :

1. memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027;
2. menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2027;
3. menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan; dan
4. sebagai petunjuk operasional bagi penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Gresik pada tahun anggaran 2027.

1.5 Sistematika Penulisan

RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Memberikan pengertian ringkas mengenai RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan.

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional maupun lokal.

1.3. Hubungan antar Dokumen.

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Gresik, RKP/program strategis nasional.

1.4. Maksud dan Tujuan.

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5. Sistematika Penulisan.

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah.

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian

target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Permasalahan Pembangunan Daerah Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Gresik.

Memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang bertujuan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

Memuat uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Kabupaten Gresik berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

4.2. Prioritas Pembangunan.

Menjelaskan tentang prioritas pembangunan daerah tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah pada RPJMD.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Menegaskan bahwa RKPD merupakan acuan penyusunan Kebijakan Publik dan APBD Kabupaten Gresik.

BAB 2
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kondisi fisik suatu wilayah menggambarkan karakteristik alamiah dan lingkungan yang membentuk suatu area geografis tertentu. Kondisi fisik suatu wilayah dapat mempengaruhi adanya perbedaan mata pencaharian dari masyarakat di wilayah tersebut (Santoso, 2019). Aspek-aspek yang akan dibahas terkait dengan kondisi fisik meliputi Letak dan Kondisi Geografis, Batas Wilayah Fungsional, Iklim, Topografi, Geologi, Jenis Tanah, Hidrologi, Sumber Daya Alam, Kebencanaan, Penggunaan Lahan, dan Perwujudan Wilayah.

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang secara administratif memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Kota Surabaya sebagai pusat kegiatan nasional. Secara geografis, Kabupaten Gresik terletak di bagian utara Provinsi Jawa Timur dan termasuk dalam kawasan metropolitan Gerbangkertosusila yang berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, industri, dan jasa di wilayah Jawa Timur.

Secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112˚ sampai 113˚ Bujur Timur dan 7˚ sampai 8˚ Lintang Selatan merupakan dataran rendah dengan ketinggian <200 sampai >500 meter di atas permukaan air laut. Batas-batas Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa
Sebelah Timur : Selat Madura dan Kota Surabaya
Sebelah Barat : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Mojokerto
Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo

Letak geografis tersebut menjadikan Kabupaten Gresik memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas regional, baik melalui jalur darat, laut, maupun kawasan industri dan pelabuhan.

Kabupaten Gresik memiliki luas wilayah sebesar 126.039,84 Ha. Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai dengan

panjang pantai 140 km, 69 km di daratan Pulau Jawa memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng serta 71 km di Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang berada di Pulau Bawean. Kabupaten Gresik terdiri dari 18 kecamatan, 330 desa dan 26 kelurahan. Dua kecamatan yang berada di Pulau Bawean adalah Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)
Kecamatan Balongpanggang	6.437,63
Kecamatan Benjeng	6.223,11
Kecamatan Bungah	8.458,78
Kecamatan Cerme	7.118,47
Kecamatan Driyorejo	5.371,60
Kecamatan Duduksampeyan	8.235,49
Kecamatan Dukun	6.399,91
Kecamatan Gresik	758,54
Kecamatan Kebomas	3.477,14
Kecamatan Kedamean	7.008,61
Kecamatan Manyar	10.383,08
Kecamatan Menganti	6.985,22
Kecamatan Panceng	6.111,30
Kecamatan Sangkapura	12.796,12
Kecamatan Sidayu	5.354,57
Kecamatan Tambak	7.173,65
Kecamatan Ujungpangkah	11.651,20
Kecamatan Wringinanom	6.095,40
Luas Wilayah Kab. Gresik	126.039,84

Sumber : Badan Informasi Geospasial, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Sangkapura dengan luas sebesar 12.796,12 Ha dan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil yaitu Kecamatan Gresik dengan luas sebesar 758,54 Ha. Terdapat perubahan luas wilayah pada tahun sebelumnya dikarenakan perubahan garis pantai.

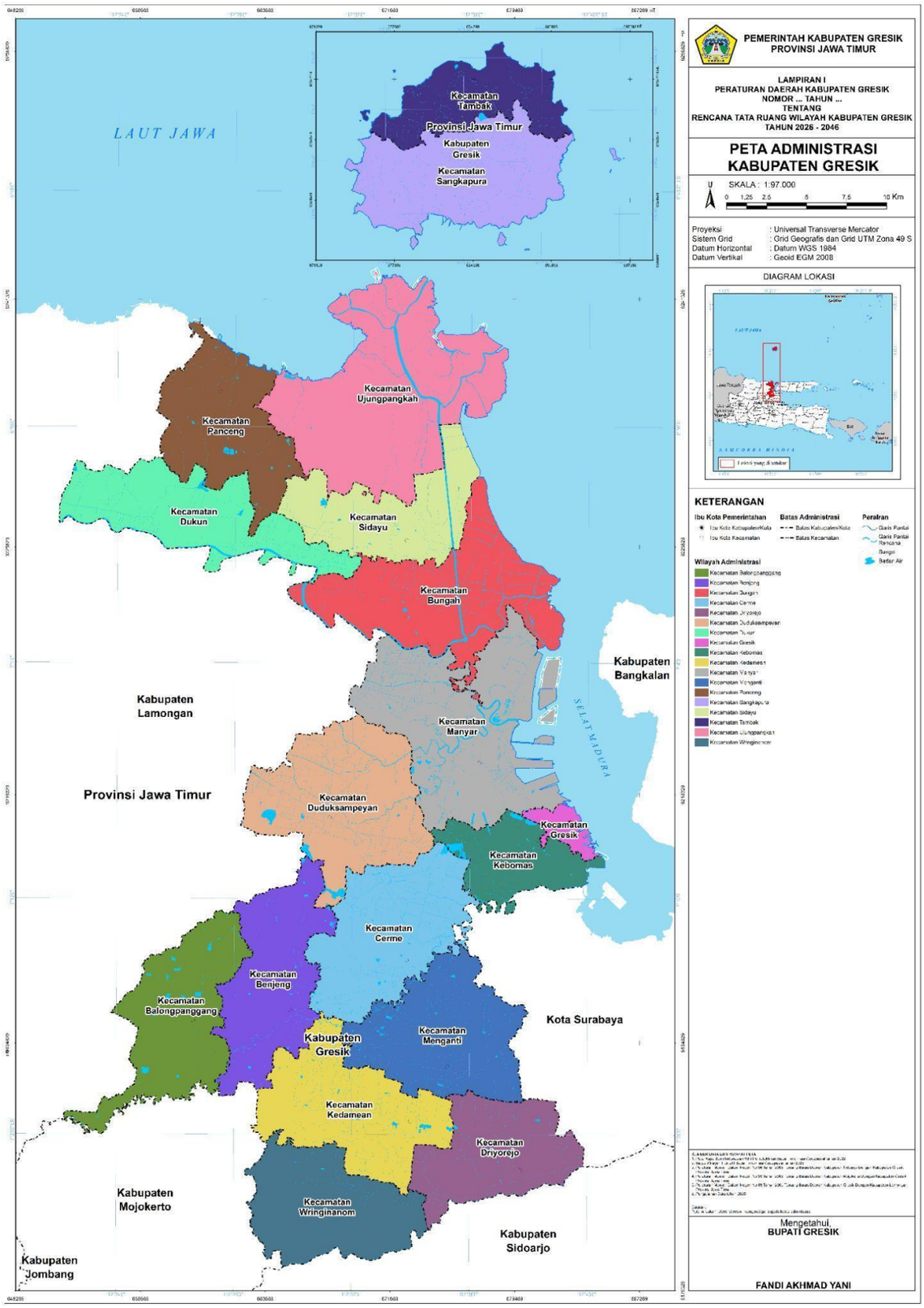

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Gresik

Sumber : Materi teknis draft Revisi RTRW Kab Gresik Tahun 2026-2046

b. Topografi

Topografi merupakan data/ peta yang menggambarkan permukaan bumi melalui garis – garis ketinggian yang dihitung dari permukaan laut. Topografi pada Kabupaten Gresik berada pada ketinggian 0-1.500 meter dari permukaan laut. 96,42 % wilayah di Kabupaten Gresik berada pada ketinggian 0-200 meter dari permukaan laut, sedangkan persentase ketinggian wilayah di Kota Padang paling kecil berada pada ketinggian 500-1.500 meter dari permukaan laut dengan persentase 0,18% yang berada di sebagian Kecamatan Sangkapura. Kemiringan lereng lainnya yang cukup dominan di Kabupaten Gresik adalah kemiringan lereng antara 5-8% yaitu seluas 2.599,05 Ha atau sebesar 2,08%. Kecamatan dengan kemiringan 5-8% terdapat pada enam kecamatan yaitu Kecamatan Bungah, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Panceng, Kecamatan Sangkapura, Kecamatan Tambak, dan Kecamatan Ujungpangkah. Dalam perencanaan permukiman umumnya kemiringan lereng yang aman untuk dapat dimanfaatkan adalah wilayah dengan kemiringan lereng antara 0-15%, saat
ini di Kabupaten Gresik kemiringan lereng tersebut memiliki luas 125.120,60 hektar. Kecamatan dengan tingkat kemiringan yang cukup tersebut hampir tersebar pada 18 kecamatan di Kabupaten Gresik karena pada kemiringan lereng 0-15 mencapai 99% dari seluruh wilayah di Kabupaten Gresik.

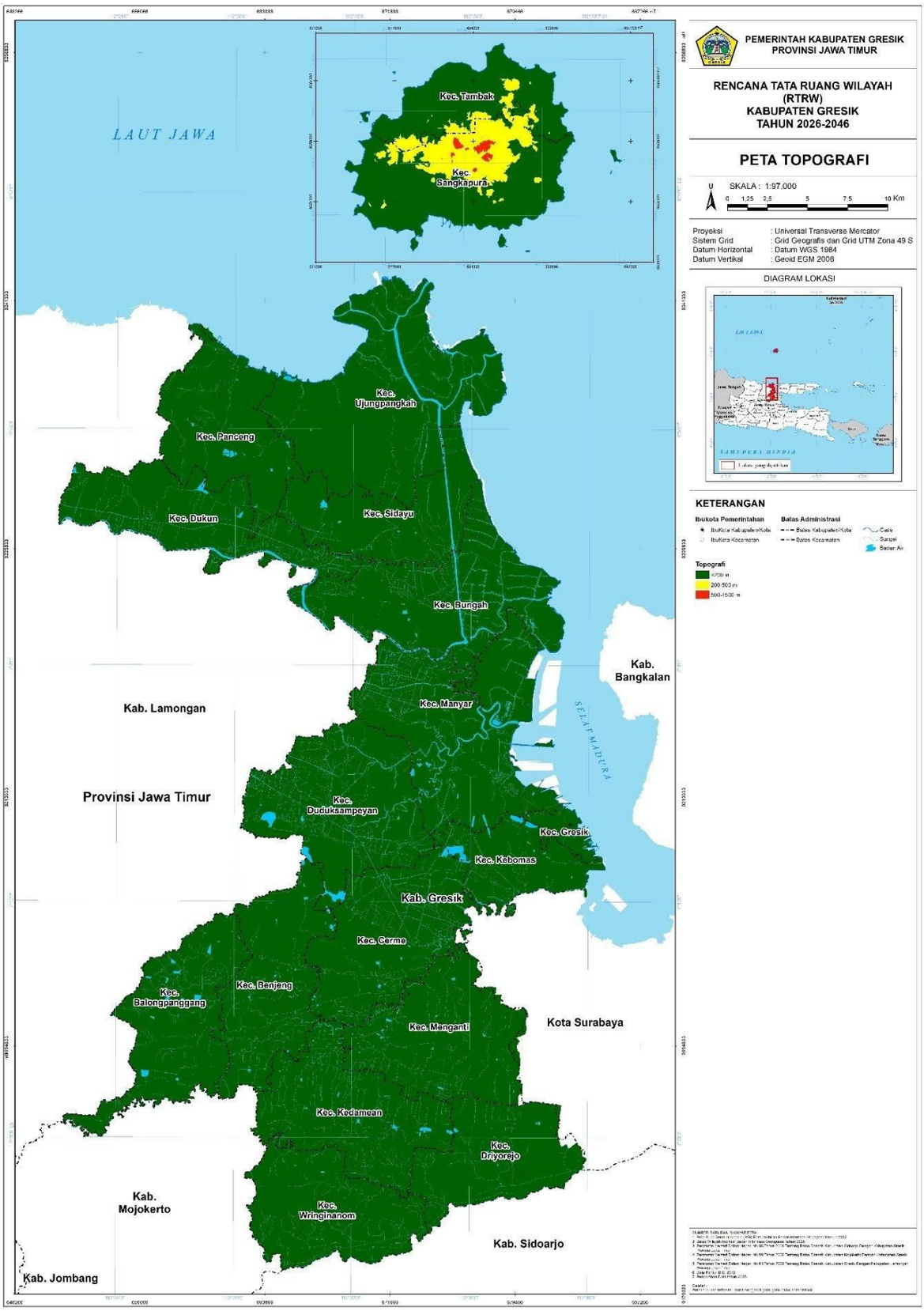

Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Gresik

Sumber : Materi teknis draft Revisi RTRW Kab Gresik Tahun 2026-2046

c. Geologi

Sebagian besar geologi di wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari jenis Aluvial, Grumusol, Mediteran Merah, dan Litosol. Curah Hujan di Kabupaten Gresik relatif rendah, yaitu rata-rata 2.245 mm per tahun. Berdasarkan ciri-ciri fisik tanahnya, Kabupaten Gresik dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu:

A. Kabupaten Gresik Bagian Utara

Kabupaten Gresik bagian utara meliputi wilayah Panceng, Ujung Pangkah, Sidayu, Bungah, Dukun, Manyar adalah bagian dari daerah pegunungan Kapur Utara yang memiliki tanah relative kurang subur (wilayah Kecamatan Panceng). Sebagian dari daerah ini adalah daerah hilir aliran Bengawan Solo yang bermuara di pantai Utara Kabupaten Gresik/Kecamatan Ujungpangkah. Daerah hilir Bengawan Solo tersebut sangat potensial karena mampu menciptakan lahan yang cocok untuk industry, perikanan, perkebunan, dan permukiman. Potensi bahan-bahan galian di wilayah ini cukup potensial terutama dengan adanya beberapa jenis bahan galian mineral non logam. Sebagian dari bahan mineral non logam ini telah dieksplorasi, dan sebagian lainnya sudah dalam taraf eksploitasi.

B. Kabupaten Gresik Bagian Tengah

Kabupaten Gresik bagian tengah meliputi wilayah Duduk Sampeyan, Balongpanggang, Benjeng, Cerme, Gresik, Kebomas yang merupakan kawasan dengan tanah relative subur. Di wilayah ini terdapat sungai-sungai kecil, antara lain Kali Lamong, Kali Corong, Kali Manyar, sehingga di bagian tengah wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk pertanian dan perikanan.

C. Kabupaten Gresik Bagian Selatan

Kabupaten Gresik bagian selatan meliputi wilayah Menganti, Kademan, Driyorejo, dan Wringin Anom yang merupakan sebagian dataran rendah yang cukup subur dan sebagian merupakan daerah berbukit sehingga di bagian selatan wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk industry, permukiman dan pertanian. Potensi bahan-bahan galian di wilayah ini cukup potensial terutama dengan adanya beberapa jenis bahan galian mineral non logam. Sebagian dari bahan mineral non

logam ini telah dieksplorasi, dan sebagian lainnya sudah dalam taraf eksploitasi.

D. Wilayah Kepulauan Kabupaten Gresik

Wilayah Kepulauan Kabupaten Gresik berada di Pulau Bawean dan pulau kecil sekitarnya yang meliputi wilayah Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang merupakan sebagian dataran rendah yang cukup subur dengan jenis tanah mediteran coklat kemerahan dan sebagian merupakan daerah berbukit sehingga di bagian wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk pertanian, pariwisata, dan perikanan. Potensi bahan-bahan galian di wilayah ini cukup potensial dengan adanya jenis bahan galian mineral non logam spesifik (batu onyx).

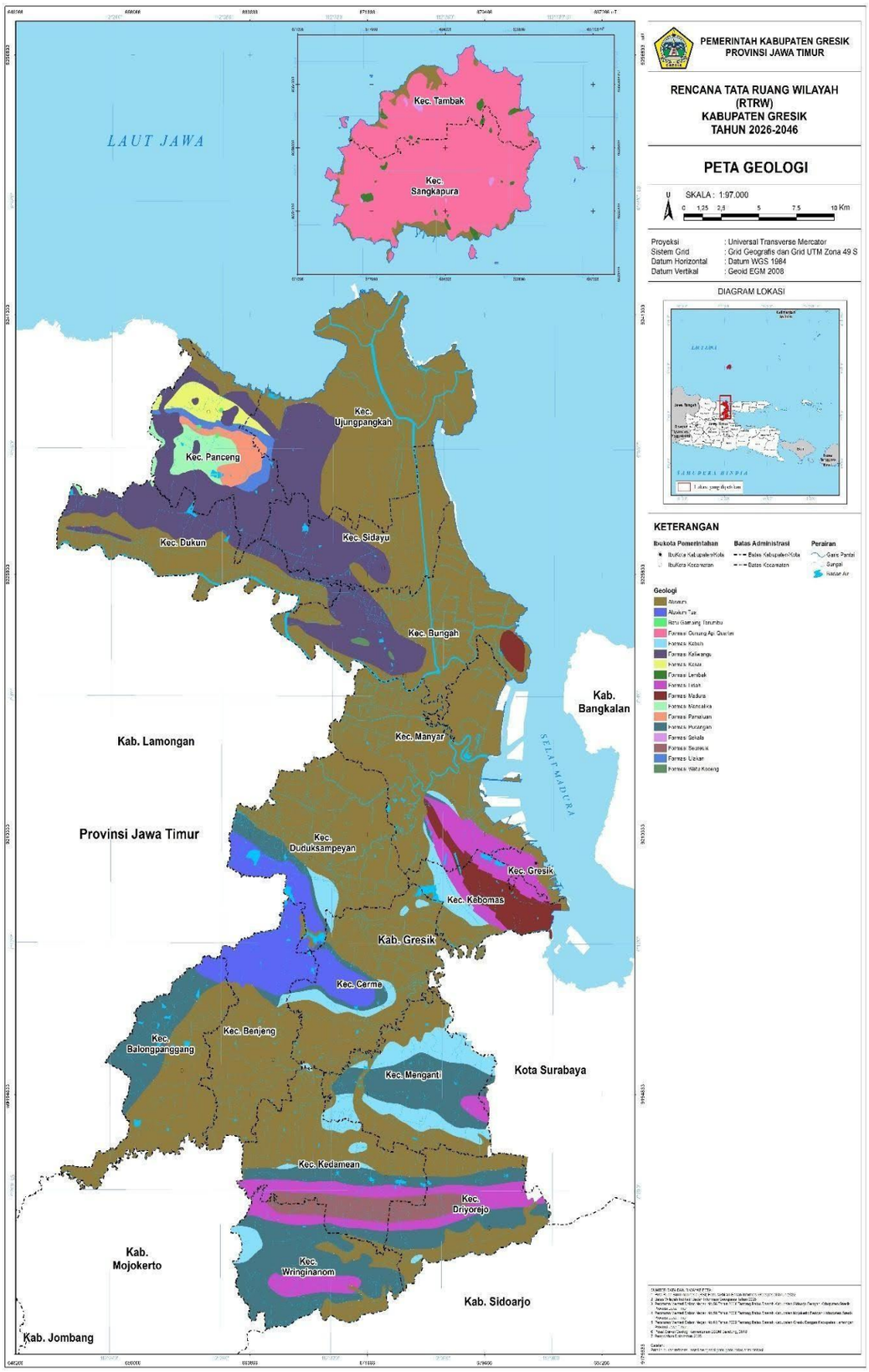

Gambar 2.3 Peta Geologi Kabupaten Gresik

Sumber : materi teknis draft Revisi RTRW Kab Gresik 2026-2046

d. Hidrologi

Keadaan permukaan air tanah di Wilayah Kabupaten Gresik pada umumnya relatif dalam, hanya daerah-daerah tertentu di sekitar sungai atau rawa-rawa saja yang mempunyai pemukaan air tanah agak dangkal. Pola aliran sungai di Kabupaten Gresik memperlihatkan wilayah Gresik merupakan daerah muara Sungai Bengawan Solo dan Kali Lamong dan juga dilalui oleh Kali Surabaya di Wilayah Selatan. Sungai-sungai ini memiliki sifat aliran dan kandungan unsur hara yang berbeda. Sungai Bengawan Solo mempunyai debit air yang cukup tinggi dengan membawa sedimen lebih banyak dibandingkan dengan Kali Lamong, sehingga pendangkalan di Sungai Bengawan Solo lebih cepat. Dengan adanya peristiwa tersebut mengakibatkan timbulnya tanah-tanah oloran yang seringkali oleh penduduk dimanfaatkan untuk lahan perikanan. Selain dialiri oleh sungai-sungai tersebut diatas keadaan hidrologi Kabupaten Gresik juga ditentukan oleh adanya waduk, embung, mata air, pompa air dan sumur bor.

e. Klimatologi

Iklim Kabupaten Gresik termasuk ke dalam iklim tropis dengan temperatur rata-rata 28,5°C dan kelembaban udara rata-rata 2.245 mm per tahun. Temperatur minimum terjadi pada bulan Juli sedangkan temperatur tertinggi terjadi pada bulan Oktober. Radiasi matahari terbesar 84 % terjadi pada bulan Maret, kecepatan angin berkisar antara 4-6 per detik dengan arah rata-rata ke Selatan.

Temperatur minimum terjadi pada bulan Juli sedangkan temperatur tertinggi terjadi pada bulan Oktober. Iklim di Kabupaten Gresik terdiri dari musim kering yang terjadi pada bulan Juni sampai dengan bulan September, musim penghujan basah yang terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret, musim peralihan dari musim kemarau sampai musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan November serta musim peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau terjadi pada bulan April dan Mei.

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam merupakan seluruh kekayaan alam yang dimiliki daerah dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Kabupaten

Gresik memiliki potensi sumber daya alam yang beragam meliputi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, dan pertambangan yang menjadi modal penting dalam pembangunan daerah. Sektor pertanian dan perkebunan berperan dalam mendukung ketahanan pangan serta penyediaan komoditas unggulan daerah, sementara peternakan dan perikanan menjadi sumber produksi pangan hewani dan penggerak ekonomi masyarakat. Potensi pariwisata yang didukung oleh kekayaan alam, budaya, dan religi turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi lokal. Di sisi lain, sektor pertambangan menjadi salah satu penopang industri dan pembangunan melalui pemanfaatan sumber daya mineral yang tersedia.

a. Potensi Pertanian dan Perkebunan

Potensi sektor pertanian dan perkebunan merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi Kabupaten Gresik, khususnya dalam menjaga ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan, serta memperkuat struktur ekonomi daerah yang berkelanjutan. Selain subsektor tanaman pangan dan perkebunan, Kabupaten Gresik juga memiliki potensi pengembangan hortikultura yang mencakup sayuran, buah-buahan, tanaman biofarmaka, serta tanaman hias yang tersebar di beberapa kecamatan dengan karakteristik agroklimat yang mendukung. Keberadaan komoditas hortikultura dan biofarmaka tidak hanya berperan dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga memiliki peluang pengembangan nilai tambah dan diversifikasi usaha tani. Sementara itu, tanaman hias mulai berkembang sebagai kegiatan ekonomi alternatif yang berorientasi pasar, terutama di wilayah dengan keterbatasan lahan pertanian konvensional. Pengembangan sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Gresik dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya lahan, kondisi iklim, sistem irigasi, serta kapasitas dan pola usaha petani. Di sisi lain, sektor ini juga menghadapi tantangan berupa perubahan iklim, alih fungsi lahan, serta fluktuasi harga komoditas.

Tabel 2.2
Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman Tahun 2021 -2025

Jenis Tanaman	Produksi tanaman sayuran dan Buah-Buahan Semusim (Kuintal)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Sayuran					
Bawang Daun	-	-	-	-	-
Bawang Merah	658	1.056,00	1.796,80	543,00	1.265,00
Bawang Putih	-	-	-	-	-
Bayam	3.831	4.233,00	3.341,00	3.008,00	6.131,00
Buncis	-	-	-	-	-
Cabai Besar	48.554	49.240,00	28.797,00	33.991,00	23.660,00
Cabai Keriting	-	-	-	-	107,00
Cabai Rawit	229.568	208.456,00	119.260,50	206.238,50	221.008,50
Jamur Tiram	1	-	7,05	11,90	119,35
Jamur Merang	-	-	-	-	-
Jamur Lainnya	-	-	-	-	-
Kacang Panjang	3.172	565,00	2.963,00	394,00	798,50
Kangkung	6.461	8.182,00	10.456,00	11.842,00	7.186,25
Kembang Kol	-	-	-	-	-
Kentang	-	-	-	-	-
Ketimun	131	-	-	940,00	1.514,00
Kubis	-	-	-	-	-
Labu Siam	-	-	-	-	-
Petsai	3.220	4.427,00	10.977,00	31.142,00	8.372,50
Terung	2.791	2.947,00	5.199,00	1.351,00	1.906,00
Tomat	1.523	2.179,00	4,336,00	1.715,00	2.581,00
Wortel	-	-	-	-	-
Buah - Buahan					
Melon	82	120,00	574,00	-	1.000,00
Semangka	1.240	204,00	1.223,00	199,00	995,00

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, 2026

Berdasarkan tabel produksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim di Kabupaten Gresik tahun 2021–2025, kinerja produksi hortikultura menunjukkan dinamika antar komoditas dengan cabai rawit sebagai penyumbang produksi terbesar dari 229.568 kuintal pada tahun 2021 menjadi 221.008,50 kuintal pada tahun 2025, sementara cabai besar berfluktuasi dengan kecenderungan menurun dari 48.554,00 kuintal menjadi 23.660,00 kuintal pada Tahun 2025. Produksi bayam menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2025 mencapai 6.213,00 kuintal, sedangkan kangkung relatif stabil pada kisaran 7.186,25–11.842,00 kuintal. Komoditas petsai meningkat tajam hingga 31.142,00 kuintal pada tahun 2024 sebelum menurun pada tahun 2025, dan produksi terung serta tomat menunjukkan fluktuasi moderat. Pada kelompok buah-buahan semusim, produksi melon dan

semangka meningkat pada tahun 2025 masing-masing sekitar 1.000,00 kuintal dan 995,00 kuintal.

Secara umum, perkembangan tersebut mencerminkan variasi produktivitas yang dipengaruhi oleh pola tanam, luas panen, dan kondisi iklim, serta menunjukkan peran subsektor hortikultura dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian daerah.

Tabel 2.3
Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman
Tahun 2021-2025

Jenis Tanaman	Produksi Tanaman Biofarmaka (kg)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Jahe	106.570	800.977	347	1.338	5.168
Jeruk Nipis	9.669.810	19.193.400	18.543.860	23.098.150	24.060.585
Kapulaga	-	-	-	-	-
Kencur	130	239	240	411	298
Kunyit	23.118.596	24.817.192	19.709.250	1.996.290	3.580.215
Laos	250	199	384	671	95
Lempuyang	1.200.000	650.000	-	-	-
Lidah Buaya	7	-	-	-	15
Mahkota Dewa	120	150	-	-	-
Mengkudu	830	1.100	578	85	20
Temuireng	5.184	3.682	4.855	2.710	190
Temukunci	2.139	2.582	165	429	40
Temulawak	11.946.05	9.389.172	4.526.231	530.353	930.170
Sambiloto	-	-	-	-	-
Serai	1.650	123.600	922.253	1.411.200	1.081.050

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, 2026

Berdasarkan tabel produksi tanaman biofarmaka menurut jenis tanaman di Kabupaten Gresik Tahun 2021–2025, secara umum menunjukkan dinamika produksi yang beragam antar komoditas. Komoditas jeruk nipis menjadi penyumbang produksi terbesar dengan tren meningkat dari 9.669.810 kg pada tahun 2021 menjadi 24.060.585 kg pada tahun 2025. Produksi kunyit menunjukkan fluktuasi dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 24.817.192 kg, kemudian menurun hingga 3.580.215 kg pada tahun 2025. Komoditas temulawak mengalami penurunan dari 11.946.050 kg pada tahun 2021 menjadi 930.170 kg pada tahun 2025, sementara serai menunjukkan tren peningkatan signifikan dari 1.650 kg pada tahun 2021 menjadi 1.081.050 kg pada tahun 2025. Produksi jahe juga meningkat dari 106.570 kg pada tahun 2021 menjadi 5.168 kg pada tahun 2025, sedangkan komoditas lain seperti kencur, laos, mengkudu, temuireng,

dan temukunci cenderung berfluktuasi dengan volume relatif lebih kecil.

Secara keseluruhan, perkembangan produksi biofarmaka mencerminkan potensi pengembangan tanaman obat sebagai bagian dari diversifikasi komoditas pertanian daerah yang mendukung ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal.

Tabel 2.4

Produksi Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman Tahun 2021-2025

Jenis Tanaman	Produksi Tanaman Hias (Tangkai)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Aglonema	3.600	2.700	620	1.093	1.156
Anggrek Pot	-	1.890	1.725	43	-
AnggrekPotong	-	-	-	-	-
Anthurium Bunga	-	-	-	39	-
Bromelia	-	-	-	-	-
Bougenville	870	1.439	1.017	34	109
Cordyline	-	-	-	-	-
Dracaena	-	-	-	-	-
Gerbera	-	-	-	-	-
Heliconia	-	-	-	-	-
Ixora	-	-	-	-	-
Krisan	-	-	-	-	-
Mawar	-	-	-	-	-
Melati (Kg)	45.600	42.225	33.005	2.410	960
Pakis	-	-	-	-	-
Palem	1.020	1.020	90	15	106
Phylodendron	-	-	-	-	-
Puring	-	-	-	64	666
Sansevieria	-	-	-	82	2.598
Sedap Malam	-	-	-	-	-

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2026

Berdasarkan tabel produksi tanaman hias di Kabupaten Gresik Tahun 2021–2025, perkembangan produksi menunjukkan variasi capaian antar komoditas dengan kontribusi utama berasal dari beberapa jenis tanaman tertentu. Komoditas melati menjadi penyumbang produksi terbesar dengan kecenderungan menurun dari 45.600 tangkai pada tahun 2021 menjadi 960 tangkai pada tahun 2025. Produksi aglaonema mengalami fluktuasi dari 3.600 tangkai pada tahun 2021, menurun hingga 620 tangkai pada tahun 2023, kemudian meningkat kembali menjadi 1.156 tangkai pada tahun 2025.

Bougenville juga menunjukkan dinamika produksi dengan capaian 870 tangkai pada tahun 2021, meningkat pada tahun 2022 menjadi 1.439 tangkai, kemudian menurun dan tercatat 109 tangkai pada tahun 2025. Komoditas palem relatif stabil pada awal periode dengan produksi 1.020 tangkai pada tahun 2021–2022, kemudian menurun dan tercatat 106 tangkai pada tahun 2025. Sementara itu, komoditas lain seperti purin dan sansevieria menunjukkan peningkatan pada periode akhir pengamatan dengan produksi masing-masing 666 tangkai dan 2.598 tangkai pada tahun 2025.

Secara umum, perkembangan produksi tanaman hias mencerminkan potensi subsektor hortikultura non pangan yang tetap berkembang meskipun menghadapi fluktuasi produksi pada beberapa komoditas.

Tabel 2.5

Produksi Buah-buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

Jenis Tanaman	Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan(Kuintal)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Buah-Buahan					
Alpukat	1.253,00	1.272,00	2.072,00	1.047,65	2.277,20
Anggur	-	-	1,10	3,40	-
Apel	-	-	-	-	-
Belimbing	6.896,00	7.074,00	6.978,59	20.796,75	21.941,33
Buah Naga	4.765,00	4.688,00	3.054,85	1.908,00	2.243,25
Duku	-	-	-	-	-
Durian	7.053,00	6.405,00	1.644,00	3.518,00	3.367,00
Jambu Air	9.389,60	9.337,00	10.032,72	5.968,17	8.375,40
Jambu Biji	15.497,00	16.957,00	14.280,11	25.930,61	20.888,75
Jeruk Pamelo	177,00	172,00	50,00	96,50	160,00
Jeruk Lemon	1.661,00	1.735,00	191,60	198,90	151,30
Jeruk Siam	4.600,00	4.880,00	6.653,00	20.192,48	2.194,21
Lengkeng	2,00	37,00	376,70	566,00	337,70
Mangga	871.346,40	786.538,88	831.044,57	763.122,75	607.657,03
Manggis	621,00	580,00	900,00	95,78	128,00
Nanas	-	-	-	-	3,00
Nangka	17.192,00	17.853,00	9.501,60	13.977,28	15.970,79
Pepaya	20.091,30	26.752,00	68.299,22	47.517,42	67.052,50
Pisang	311.148,00	384.351,00	313.122,59	305.298,64	496.428,99
Rambutan	11.535,00	11.337,00	511,60	1.198,90	301,20
Salak	-	-	6,70	58,00	14,00
Sawo	9.872,00	9.956,00	11.369,55	45.098,06	19.523,14
Sirsak	5.651,00	6.032,00	3.371,70	2.533,58	2.876,90
Sukun	7.342,00	6.694,00	3.952,70	5.447,29	7.055,20
Sayuran					
Melinjo	-	-	-	-	-
Petai	-	-	-	-	-

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, 2026

Berdasarkan tabel produksi buah-buahan dan sayuran tahunan menurut jenis tanaman di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025, perkembangan produksi menunjukkan dinamika yang cukup beragam antar komoditas dengan kontribusi utama berasal dari beberapa jenis buah unggulan daerah. Komoditas pisang menjadi penyumbang produksi terbesar dengan tren meningkat dari 311.148,00 kuintal pada tahun 2021 menjadi 498.428,99 kuintal pada tahun 2025. Produksi pepaya menunjukkan peningkatan signifikan dari 20.091,30 kuintal pada tahun 2021 menjadi 67.052,50 kuintal pada tahun 2025, meskipun sempat mengalami fluktuasi pada tahun 2023. Komoditas jeruk siam juga mengalami peningkatan dari 4.500,00 kuintal pada tahun 2021 menjadi 2.104,21 kuintal pada tahun 2025 dengan capaian tertinggi pada tahun 2024 sebesar 20.192,48 kuintal. Produksi mangga relatif fluktuatif dengan kecenderungan menurun dari 871.346,40 kuintal pada tahun 2021 menjadi 607.657,03 kuintal pada tahun 2025. Sementara itu, komoditas jambu biji dan belimbing menunjukkan peningkatan pada beberapa tahun pengamatan, dengan jambu biji mencapai 20.888,75 kuintal dan belimbing 21.941,33 kuintal pada tahun 2025. Komoditas lain seperti durian, jeruk lemon, jeruk pamelo, sawo, sirsak, dan sukun menunjukkan perkembangan produksi yang fluktuatif dengan kontribusi relatif lebih kecil.

Secara umum, perkembangan produksi buah-buahan mencerminkan potensi subsektor hortikultura yang tetap berkembang dan berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pangan serta penguatan ekonomi berbasis pertanian daerah.

Di sisi perkebunan, Kabupaten Gresik memiliki berbagai komoditas potensial yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Produksi perkebunan mencakup berbagai hasil panen yang diperoleh dari beragam jenis tanaman, termasuk tanaman tahunan dan tanaman semusim. Tanaman tahunan merupakan tanaman yang secara berkelanjutan dapat ditanam setiap tahun seperti karet, kelapa, kopi, kakao, teh, jambu mete, pala, dan lada. Sedangkan tanaman semusim biasanya ditanam dalam satu musim dan kemudian dipanen sebelum musim berikutnya seperti tebu, tembakau, dan nilam.

Tabel 2.6

Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

Jenis Tanaman	Produksi Perkebunan Rakyat (Ton)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Tanaman Tahunan					
Kelapa Sawit	-	-	-		
Kelapa	5.050,56	5.049,77	5.044,73	5 044,75	5.027,15
Karet	-	-	-		
Kopi	-	-	-		
Kakao	-	-	-		
Teh	-	-	-		
Cengkeh					
Jambu Mete	-	-	-		
Pala	-	-	-		
Sagu	-	-	-		
Tanaman Semusim					
Tebu	159.790,50	159.805,45	159.622,71	158.589,19	159.521,60
Tembakau	375,00	900,00	1.629,00	3.248,89	1.448,44

Sumber: BPS Kabupaten Gresik, 2026

Berdasarkan tabel diatas, perkembangan produksi perkebunan rakyat di Kabupaten Gresik periode 2021–2025 menunjukkan bahwa komoditas kelapa dan tebu masih menjadi penopang utama subsektor perkebunan. Produksi kelapa relatif stabil dengan kecenderungan menurun tipis dari 5.050,56 ton pada tahun 2021 menjadi sekitar 5.027,15 ton pada tahun 2025. Sementara itu, produksi tebu tercatat sangat dominan dengan capaian di atas 158 ribu ton setiap tahun dan mengalami kenaikan pada tahun 2024 158.589,19 menjadi 159.521,60 ton pada tahun 2025. Adapun komoditas tembakau menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, meningkat dari 375,00 ton pada tahun 2021 hingga mencapai puncak sekitar 3.248,9 ton pada tahun 2024, kemudian menurun menjadi 1.448,44 ton pada tahun 2025. Komoditas perkebunan lainnya belum menunjukkan produksi yang tercatat secara signifikan. Secara umum, kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja subsektor perkebunan rakyat masih bertumpu pada komoditas utama dengan dinamika produksi yang dipengaruhi oleh faktor iklim, luas areal tanam, serta produktivitas lahan.

b. Potensi Peternakan dan Perikanan

Potensi sektor peternakan dan perikanan merupakan bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan struktur ekonomi Kabupaten Gresik. Dengan karakteristik wilayah yang mencakup kawasan daratan, pesisir, dan perairan laut, Kabupaten Gresik memiliki peluang pengembangan peternakan dan perikanan yang beragam, baik peternakan rakyat, perikanan tangkap, maupun perikanan budidaya. Sub-sektor peternakan berperan dalam penyediaan sumber protein hewani melalui komoditas ternak besar, ternak kecil, dan unggas, yang sebagian besar diusahakan oleh masyarakat skala rumah tangga. Sementara itu, subsektor perikanan didukung oleh keberadaan wilayah pesisir dan perairan laut di bagian utara serta perairan tambak dan budidaya di wilayah daratan, yang menghasilkan komoditas perikanan tangkap dan budidaya dengan nilai ekonomi yang cukup signifikan. Pengembangan sektor peternakan dan perikanan di Kabupaten Gresik dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam, sarana dan prasarana produksi, teknologi budidaya, serta akses pasar dan rantai distribusi. Di sisi lain, sektor ini juga menghadapi tantangan berupa perubahan iklim, fluktuasi harga pakan dan hasil produksi, serta tekanan lingkungan.

Tabel 2.7

Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Gresik

Tahun 2021-2025

Jenis Ternak	Populasi				
	2021	2022	2023	2024	2025
Sapi Potong	59.259	57.347	54.352	24.853	24.681
Sapi Perah	499	375	299	260	254
Kerbau	234	198	63	57	67
Kuda	239	195	149	149	127
Kambing	79.059	80.100	75.746	61.174	62.209
Kambing Perah	-	-	-	-	580
Domba	37.899	39.900	42.135	23.129	24.514

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, Tahun 2026

Tabel 2.8

Populasi Ternak Unggas di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

Jenis Unggas		Populasi			
	2021	2022	2023	2024	2025
Ayam Ras Petelur	260.140	266.005	266.938	344.993	344.900
Ayam Buras	759.629	733.050	768.020	203.528	202.700
AyamRas Pedaging	24.612.357	24.256.355	24.438.606	24.314.449	23.076.024
Itik Pedaging	31.890	31.906	32.322	76.851	71.650
Itik Petelur	-	-	-	-	12.100
Entok	32.081	32.097	32.210	10.332	10.500
Burung Puyuh	10.330	10.478	10.050	30.679	36.300
Burung Dara	16.362	16.362	16.062	5.627	5.685

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, Tahun 2026

Perkembangan populasi ternak dan unggas selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika yang cukup beragam, baik pada ternak besar, ternak kecil, maupun unggas, Pada kelompok ternak besar, populasi sapi potong masih menjadi yang terbesar meskipun menunjukkan tren penurunan dari 59.259 ekor pada tahun 2021 menjadi 24.681 ekor pada tahun 2025. Penurunan yang cukup signifikan ini perlu menjadi perhatian karena sapi potong merupakan salah satu sumber utama penyediaan daging bagi masyarakat. Sementara itu, populasi sapi perah juga mengalami penurunan dari 499 ekor pada tahun 2021 menjadi 254 ekor pada tahun 2025. Kondisi serupa terjadi pada populasi kerbau dan kuda yang cenderung menurun selama periode tersebut.

Pada kelompok ternak kecil, kambing menjadi komoditas dengan populasi terbesar. Meskipun sempat mencapai 80.100 ekor pada tahun 2022, jumlahnya menurun menjadi 62.209 ekor pada tahun 2025. Populasi domba menunjukkan perkembangan yang relatif fluktuatif, meningkat hingga 42.135 ekor pada tahun 2023 sebelum turun menjadi 24.514 ekor pada tahun 2025. Di sisi lain, usaha budidaya kambing perah mulai berkembang yang ditandai dengan munculnya populasi sebanyak 580 ekor pada tahun 2025, menunjukkan adanya diversifikasi usaha peternakan yang berpotensi mendukung peningkatan nilai tambah subsektor peternakan.

Pada subsektor unggas, perkembangan yang lebih positif terlihat pada ayam ras petelur. Populasinya meningkat secara konsisten dari

260.140 ekor pada tahun 2021 menjadi 344.900 ekor pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan tingginya permintaan telur sebagai sumber protein masyarakat serta berkembangnya usaha peternakan ayam petelur di Kabupaten Gresik. Sebaliknya, populasi ayam buras mengalami penurunan cukup tajam dari 759.629 ekor pada tahun 2021 menjadi 202.700 ekor pada tahun 2025.

Komoditas unggas pedaging masih didominasi oleh ayam ras pedaging dengan populasi yang sangat besar, meskipun mengalami sedikit penurunan dari 24,61 juta ekor pada tahun 2021 menjadi 23,08 juta ekor pada tahun 2025. Populasi itik pedaging menunjukkan peningkatan hingga mencapai 71.650 ekor pada tahun 2025, sedangkan itik petelur mulai tercatat sebanyak 12.100 ekor pada tahun yang sama. Sementara itu, populasi entok dan burung dara mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Berbeda dengan kedua komoditas tersebut, populasi burung puyuh menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari 10.330 ekor pada tahun 2021 menjadi 36.300 ekor pada tahun 2025, yang mengindikasikan adanya peningkatan minat masyarakat terhadap usaha budidaya puyuh sebagai sumber telur dan daging alternatif. Secara umum, perkembangan populasi ternak dan unggas di Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa subsektor peternakan masih memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan dan penyediaan protein hewani di Kabupaten Gresik

Tabel 2.9

Produksi Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

Sub Sektor	Produksi Perikanan (Ton)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Penangkapan di Laut	10.869,30	10.861,90	12.482,00	12.751,40	17.001,60
Budidaya					
Tambak Payau	63.885,76	68.664,95	71.210,02	88.222,43	82.978,37
Tambak tawar	67.610,49	66.267,61	64.237,68	63.959,45	64.252,44
Perairan Umum	11.240,65	16.766,34	17.469,78	3.790,14	13.208,27
Jumlah	153.606,20	162.560,80	165.399,48	168.723,42	177.440,68

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, Tahun 2026

Berdasarkan tabel diatas, Produksi perikanan di Kabupaten Gresik selama periode 2021–2025 menunjukkan kecenderungan meningkat dengan fluktuasi pada beberapa subsektor. Secara keseluruhan, total produksi perikanan meningkat dari 153.606,20 ton pada tahun 2021 menjadi 177.440,68 ton pada tahun 2025. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kontribusi subsektor perikanan budidaya, khususnya budidaya tambak payau yang menjadi penyumbang produksi terbesar. Produksi tambak payau meningkat dari 63.885,76 ton pada tahun 2021 menjadi 82.978,37 ton pada tahun 2025, dengan capaian tertinggi pada tahun 2024 sebesar 88.222,43 ton. Sementara itu, produksi tambak air tawar cenderung relatif stabil dengan sedikit penurunan dari 67.610,49 ton pada tahun 2021 menjadi 64.252,44 ton pada tahun 2025. Pada subsektor perairan umum, produksi mengalami fluktuasi cukup signifikan, yaitu dari 11.240,65 ton pada tahun 2021, meningkat hingga 17.469,78 ton pada tahun 2023, kemudian menurun pada tahun 2024 menjadi 3.790,14 ton, dan kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 13.208,27 ton. Adapun pada subsektor penangkapan di laut, produksi menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan dalam dua tahun terakhir, dari 12.751,40 ton pada tahun 2024 menjadi 17.001,60 ton pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor perikanan di Kabupaten Gresik masih memiliki potensi yang besar untuk terus dikembangkan, baik melalui optimalisasi kegiatan penangkapan di laut maupun peningkatan produktivitas budidaya perikanan.

c. Potensi Pariwisata

Kabupaten Gresik memiliki posisi geografis yang strategis sebagai wilayah pesisir di bagian utara Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Sidoarjo, serta memiliki wilayah kepulauan berupa Pulau Bawean dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Kondisi geografis tersebut memberikan potensi yang besar bagi pengembangan sektor pariwisata berbasis wisata religi, wisata budaya, wisata sejarah, wisata bahari, wisata alam, dan wisata minat khusus.

Secara kewilayahan, potensi pariwisata Kabupaten Gresik tersebar pada kawasan daratan maupun kepulauan. Pada wilayah daratan, potensi wisata didominasi oleh wisata religi dan sejarah yang didukung keberadaan situs-situs peninggalan penyebaran agama Islam, antara lain kawasan wisata religi Makam Sunan Giri dan Makam Maulana Malik Ibrahim yang telah menjadi salah satu tujuan wisata ziarah berskala nasional. Selain itu terdapat berbagai situs cagar budaya, tradisi lokal, dan kegiatan budaya masyarakat yang menjadi daya tarik wisata berbasis kearifan lokal.

Sementara itu, wilayah Kepulauan Bawean memiliki karakteristik geografis yang mendukung pengembangan wisata bahari dan wisata alam. Keberadaan pantai, pulau-pulau kecil, kawasan perbukitan, danau, serta keanekaragaman hayati yang khas menjadikan Bawean sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Kabupaten Gresik. Potensi tersebut didukung oleh keberadaan ekosistem pesisir dan laut yang memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai konservasi.

Dari aspek demografi, jumlah penduduk yang besar serta didominasi kelompok usia produktif menjadi modal penting dalam pengembangan sektor pariwisata. Kondisi ini mendukung tersedianya sumber daya manusia yang dapat berperan sebagai pelaku usaha pariwisata, pengelola destinasi, pelaku ekonomi kreatif, maupun penyedia jasa pendukung pariwisata. Selain itu, keberadaan masyarakat yang memiliki karakter religius dan budaya yang kuat menjadi bagian dari daya tarik wisata yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Gresik juga didukung oleh infrastruktur transportasi yang relatif baik, kedekatan dengan kawasan metropolitan Gerbangkertosusila, serta pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa yang mampu menunjang aktivitas wisatawan. Dengan potensi geografis dan demografis tersebut, sektor pariwisata memiliki peluang yang besar untuk menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan identitas dan daya saing daerah.

Oleh karena itu, Kabupaten Gresik menjadi salah satu tujuan wisata yang populer bagi wisatawan baik dari mancanegara maupun domestik. Berikut ini adalah tabel jumlah wisatawan domestik dan mancanegara yang mengunjungi Kabupaten Gresik dari tahun 2020 hingga 2025.

Tabel 2.10
Jumlah Wisatawan Mancanegara Dan Domestik Di Kabupaten Gresik
Dari Tahun 2020-2025

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Mancanegara	Orang	4.986	4.986	12.599	18.281	361	1.284
2	Domestik	Orang	2.070.567	2.002.078	4.120.683	4.280.847	4.513.723	4.828.786
3	Jumlah	Orang	2.075.553	2.007.064	4.133.282	4.299.128	4.514.084	4.830.070

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Gresik, Tahun 2026

Berdasarkan data Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik, jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Gresik selama periode 2020–2025 menunjukkan tren yang cenderung meningkat, terutama didorong oleh pertumbuhan wisatawan nusantara (domestik). Kondisi ini mengindikasikan semakin meningkatnya daya tarik destinasi wisata, khususnya wisata religi, budaya, sejarah, dan wisata bahari yang menjadi unggulan daerah.

Pada kategori wisatawan mancanegara, jumlah kunjungan pada tahun 2020 tercatat sebanyak 4.986 orang dan relatif stagnan pada tahun 2021 dengan jumlah yang sama, yaitu 4.986 orang. Selanjutnya terjadi peningkatan signifikan menjadi 12.599 orang pada tahun 2022 atau tumbuh 152,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 jumlah kunjungan kembali meningkat menjadi 18.281 orang atau tumbuh 45,1 persen. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan tajam menjadi 361 orang atau turun 98,0 persen, sebelum kembali meningkat menjadi 1.284 orang pada tahun 2025 atau tumbuh 255,7 persen dibandingkan tahun 2024.

Sementara itu, wisatawan domestik menunjukkan tren pertumbuhan yang lebih stabil. Jumlah kunjungan pada tahun 2020 tercatat sebanyak 2.070.567 orang dan sedikit menurun menjadi 2.002.078 orang pada tahun

2021 atau turun 3,3 persen. Pada tahun 2022 jumlah kunjungan meningkat signifikan menjadi 4.120.683 orang atau tumbuh 105,8 persen, kemudian meningkat menjadi 4.280.847 orang pada tahun 2023 atau tumbuh 3,9 persen. Selanjutnya pada tahun 2024 meningkat menjadi 4.513.723 orang atau tumbuh 5,4 persen dan kembali meningkat menjadi 4.828.786 orang pada tahun 2025 atau tumbuh 7,0 persen.

Secara keseluruhan, jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Gresik pada tahun 2020 mencapai 2.075.553 orang dan menurun menjadi 2.007.064 orang pada tahun 2021 atau turun 3,3 persen. Pada tahun 2022 jumlah kunjungan meningkat signifikan menjadi 4.133.282 orang atau tumbuh 106,0 persen. Tren peningkatan berlanjut pada tahun 2023 menjadi 4.299.128 orang atau tumbuh 4,0 persen, meningkat menjadi 4.514.084 orang pada tahun 2024 atau tumbuh 5,0 persen, dan mencapai 4.830.070 orang pada tahun 2025 atau tumbuh 7,0 persen.

Tabel 2.11

Destinasi Wisata Kabupaten Gresik Tahun 2026

No.	Destinasi Wisata	No.	Destinasi Wisata
1	Air Panas Kepuh	42	Makam Sunan Prapen
2	Air Panas Sawah Mulya	43	Museum Sunan Giri
3	Air Panas Sungai Rujing	44	Wisata Alam Gosari (Wagos)
4	Air Terjun Kuduk-Kuduk	45	Pantai Dalegan
5	Air Terjun Laccar	46	Putri Cempo
6	Danau Kastoba	47	Kolam Renang Malindo
7	Kuburan Panjang	48	Dynasti Water World
8	Makam Cokrokusumo	49	Makam Siti Fatimah Binti Maimun
9	Makam Jujuk Campa	50	Mangrove Kalimireng
10	Makam Jujuk Tampo	51	Wisata Goa Lowo
11	Makam Pangeran Purbonegoro	52	Edu Wisata Lontar Sewu
12	Makam Waliyah Zainab	53	Wisata Telaga Pelem Watu
13	Mangrove Hijau Daun	54	Bukit Surowiti
14	Mayang Kara Kepuh	55	Doudo Eduwisata
15	Pantai Kerrong Mombhul	56	Wisata Kebun Pak Inggih
16	Pantai Labuhan	57	Kolam Renang Bajak Laut
17	Pantai Ria	58	Kolam Renang Raya Dewi Cerme
18	Pantai Terusan	59	Pesanggrahan
19	Pasir Putih Sukoneng	60	Makam Kanjeng Sepuh Sidayu
20	Penangkaran Rusa	61	Petilasan Sunan Kalijaga
21	Pulau Cina	62	Water Boom Sambipondok
22	Pulau Gili	63	Banyu Urip Mangrove Center

No.	Destinasi Wisata	No.	Destinasi Wisata
23	Pulau Gili Barat	64	Muara Bengawan Solo
24	Pulau Noko	65	Wisata Jati Sewu
25	Pulau Noko Gili	66	Kolam Renang Ocean Kids
26	Pulau Selayar	67	Wisata Desa Pandanan
27	Tanjung Geen	68	Wisata Gunung Pundut (Wgp)
28	Pusat Restorasi Dan Pembelajaran Mangrove Mengare	69	Wisata Selo Tirto Giri
29	Telaga Sharma Desa Kemangi	70	Wisata Desa Mojotengah
30	Lasem	71	Kampung Kreasi Sidokumpul
31	Wisata Banyu Biru Lowayu	72	Kampung Markisa
32	Kampung Kemasan	73	Kampung Siba
33	Kampung Kreasi	74	Taman Keluarga Siwalan (Takesi) Desa Siwalan
34	Makam Malik Ibrahim	75	Kolam Renang Desa Baron
35	Makam Nyai Ageng Pinatih	76	Wisata Desa Mentaras
36	Makam Pusponegoro	77	Klenteng Kim Hin Kiong
37	Makam Raden Santri	78	Gresik Universal Science (Gus)
38	Pepustakaan Daerah	79	Wisata Desa Suci Kec. Manyar
39	Giri Kedaton	80	Wisata Desa Wotansari Kec. Balongpanggang
40	Makam Dewi Sekardadu	81	Wisata Kuliner Desa Betoyoguci Kec. Manyar
41	Makam Sunan Giri		

Sumber : Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gresik, Tahun 2026

Secara umum, sektor pariwisata Kabupaten Gresik memiliki potensi yang besar dan beragam dengan karakter religius-maritim yang khas. Dengan perencanaan yang terarah, penguatan tata kelola destinasi, serta integrasi dengan sektor ekonomi kreatif dan UMKM, pariwisata diharapkan mampu menjadi salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan identitas daerah dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

d. Potensi Pertambangan

Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan sumber daya alam yang dilakukan dengan menggali atau menambang dari dalam tanah atau perut bumi. Selain itu, pertambangan juga berperan dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara (Fahris Suritno et al., 2022). Kawasan pertambangan di Kabupaten Gresik sendiri

memiliki luas sebesar 817,25 hektar. Berikut merupakan tabel luas areal dan produksi pertambangan menurut jenis bahan galian di Kabupaten Gresik.

Tabel 2.12

Luas Area dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian di Kabupaten Gresik

No	Galian	Luas Usaha Penambangan (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
1	Batu Gamping	124,35	2.400.000
2	Dolomit	36,13	528.960
3	Tanah Urug	26,54	270.000
4	Fosfat	4,13	39.600
5	Batu Gamping	8,50	54.720
6	Dolomit	309,13	6.000.000
7	Batu Gamping	2,60	95.625
8	Batu Gamping	5,00	112.500
9	Sirtu	6,94	432.000
10	Sirtu	22,82	72.000
11	Andesit	7,63	102.000
12	Batu Gamping	4,13	10.560

Sumber: ESDM Prov Jatim, Tahun 2022

Luas Area dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian di Kabupaten Gresik, seperti yang tercantum dalam Tabel 2.12, memberikan gambaran rinci mengenai sektor pertambangan. Berdasarkan data tersebut, jenis bahan galian yang paling banyak ditambang adalah dolomit, dengan luas usaha penambangan mencapai 309,13 hektar dan produksi mencapai 6 juta ton per tahun. Ini menunjukkan bahwa dolomit menjadi salah satu komoditas utama dalam sektor pertambangan di Kabupaten Gresik. Selain dolomit, batu gamping juga menjadi bahan galian yang cukup signifikan, dengan beberapa lokasi penambangan yang tersebar di wilayah ini. Produksi batu gamping di Kabupaten Gresik bervariasi, mulai dari 2.400.000 ton per tahun hingga 112.500 ton per tahun, tergantung pada lokasi dan ukuran usaha penambangannya. Sementara itu, jenis bahan galian lain seperti tanah urug, fosfat, sirtu, dan andesit juga memiliki kontribusi penting terhadap sektor pertambangan di Kabupaten Gresik, meskipun dengan luas usaha dan produksi yang lebih kecil dibandingkan dengan dolomit dan batu gamping.

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

a. Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan

Analisis daya dukung pangan dilakukan untuk menilai kemampuan wilayah Kabupaten Gresik dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Ketersediaan pangan dihitung berdasarkan total produksi pangan tahunan yang dikonversi ke satuan kilokalori (kkal) dan didistribusikan ke setiap grid. Sementara itu, kebutuhan pangan ditentukan dengan mengalikan jumlah penduduk di setiap grid dengan Angka Kecukupan Energi (AKE). Status daya dukung penyedia pangan ditentukan melalui perhitungan ambang batas, yang dilakukan dengan mengurangkan kebutuhan pangan dari ketersediaan pangan. Jika selisihnya negatif, hal ini mengindikasikan bahwa daya dukung lingkungan hidup (DDLH) pangan wilayah tersebut telah melampaui ambang batas yang ditentukan. Kebutuhan pangan dihitung berdasarkan jumlah penduduk di setiap grid dikalikan dengan kebutuhan energi individu, yang diasumsikan sebesar 2.150 kkal per orang per hari. Ketersediaan pangan dihitung berdasarkan hasil produksi tanaman pangan dan peternakan, yang kemudian dikonversi ke dalam satuan kilokalori.

Berdasarkan analisis, kebutuhan pangan di wilayah Kabupaten Gresik mencapai 1.135,75 Juta.kkal/tahun. Di sisi lain, jumlah ketersediaan pangan tercatat sebesar 1.338,77 Juta.kkal/tahun. Dengan demikian, secara keseluruhan, kondisi daya dukung pangan di Kabupaten Gresik masih berada dalam status belum terlampaui dan terlampaui. Berikut adalah rincian lengkap perhitungan daya dukung pangan. Berikut adalah rincian lengkap perhitungan daya dukung pangan. Adapun untuk proyeksi daya dukung daya tampung pangan berdasarkan asumsi ketersediaan dari pola ruang tanaman pangan sedangkan untuk kebutuhan berdasarkan proyeksi penduduk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.13

Ketersediaan dan Kebutuhan Daya Dukung Pangan Kabupaten Gresik

NO	KECAMATAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	SELISIH	AMBANG	STATUS AMBANG
		JUTA. KKAL/TAHUN			RIBU. JIWA	
1	KEC. BALONGPANGGANG	70,97	44,47	26,50	90	34
2	KEC. BENJENG	76,58	55,83	20,76	98	27
3	KEC. BUNGAH	102,24	54,93	47,31	130	60
4	KEC. CERME	88,62	69,02	19,60	113	25
5	KEC. DRIYOREJO	51,08	84,54	-33,46	65	- 43
6	KEC. DUDUKSAMPEYAN	99,90	46,05	53,84	127	69
7	KEC. DUKUN	69,86	52,73	17,13	89	22
8	KEC. GRESIK	5,06	63,70	-58,63	7	75
9	KEC. KEBOMAS	29,58	113,62	-84,04	38	- 108
10	KEC. KEDAMEAN	81,46	58,58	22,88	104	29
11	KEC. MANYAR	104,76	110,66	-5,89	133	- 8
12	KEC. MENGANTI	74,38	114,23	-39,85	95	- 51
13	KEC. PANCENG	53,14	46,44	6,69	68	9
14	KEC. SANGKAPURA	114,39	42,95	71,44	146	91
15	KEC. SIDAYU	66,48	44,16	22,33	85	29
16	KEC. TAMBAK	65,42	26,03	39,39	83	50
17	KEC. UJUNGPANGKAH	124,83	44,76	80,06	159	102
18	KEC. WRINGINANOM	60,02	63,05	-3,03	77	- 4
GRAND TOTAL		1.338,77	1.135,75	203,02	1.706	259

Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2026-2046

Tabel diatas menyajikan perbandingan antara ketersediaan energi pangan (dalam juta kkal per tahun) dan kebutuhan energi pangan penduduk (berdasarkan jumlah penduduk dalam ribu jiwa) pada 18 kecamatan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui status kecukupan energi pangan serta posisi masing-masing kecamatan terhadap ambang batas kecukupan.

Secara total, wilayah kajian memiliki ketersediaan energi pangan sebesar 1.338,77 juta kkal per tahun, sedangkan kebutuhan energi pangan mencapai 1.135,75 juta kkal per tahun. Dengan demikian, terdapat surplus energi pangan sebesar 203,02 juta kkal per tahun, yang menunjukkan bahwa secara agregat wilayah masih berada pada kondisi cukup pangan. Nilai ambang total sebesar 1.706 juta kkal menghasilkan status ambang positif sebesar 259, yang mengindikasikan tingkat ketahanan pangan wilayah secara umum masih relatif baik.

Namun, jika ditinjau secara spasial, kondisi antar kecamatan menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Sejumlah kecamatan mengalami surplus ketersediaan energi pangan, antara lain Kecamatan Ujungpangkah, Sangkapura, Bungah, Duduksampeyan, dan Tambak, dengan selisih positif

yang cukup besar antara ketersediaan dan kebutuhan. Kondisi ini menunjukkan peran kecamatan-kecamatan tersebut sebagai lumbung pangan wilayah.

Sebaliknya, beberapa kecamatan mengalami defisit energi pangan, ditandai dengan nilai selisih negatif. Kecamatan Kebomas, Gresik, Menganti, dan Driyorejo menunjukkan defisit yang cukup tinggi, mencerminkan tekanan kebutuhan penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan pangan lokal. Kecamatan Manyar dan Wringinanom berada pada kondisi relatif seimbang, namun cenderung menuju defisit.

Ditinjau dari status ambang, kecamatan dengan nilai ambang positif menandakan tingkat kecukupan energi pangan yang masih aman (belum terlampaui), sedangkan kecamatan dengan nilai ambang negatif menunjukkan kerentanan pangan (terlampuai) yang perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan. Kecamatan Kebomas tercatat memiliki status ambang terendah, mengindikasikan tingkat kerentanan tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya.

Secara keseluruhan, tabel ini menegaskan bahwa meskipun wilayah secara umum berada dalam kondisi surplus pangan, diperlukan strategi pemerataan dan penguatan ketahanan pangan lokal, khususnya pada kecamatan dengan defisit, melalui perlindungan LP2B, pengendalian alih fungsi lahan, serta penguatan distribusi dan akses pangan.

Tabel 2.14

Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Gresik

NO	KECAMATAN	STATUS DAYA DUKUNG PANGAN				Total (Ha)
		Belum Terlampaui (Ha)	%	Terlampaui (Ha)	%	
1	KEC. BALONGPANGGANG	5.410,03	4,29	1.027,60	0,82	6.437,63
2	KEC. BENJENG	4.827,55	3,83	1.395,56	1,11	6.223,11
3	KEC. BUNGAH	7.341,93	5,83	1.116,84	0,89	8.458,78
4	KEC. CERME	5.536,82	4,39	1.581,65	1,25	7.118,47
5	KEC. DRIYOREJO	2.223,46	1,76	3.148,14	2,50	5.371,60
6	KEC. DUDUKSAMPEYAN	7.830,55	6,21	404,94	0,32	8.235,49
7	KEC. DUKUN	4.901,43	3,89	1.498,48	1,19	6.399,91
8	KEC. GRESIK	18,34	0,01	740,19	0,59	758,54
9	KEC. KEBOMAS	719,47	0,57	2.757,67	2,19	3.477,14
10	KEC. KEDAMEAN	5.734,96	4,55	1.273,65	1,01	7.008,61
11	KEC. MANYAR	7.186,87	5,70	3.196,21	2,54	10.383,08
12	KEC. MENGANTI	2.620,13	2,08	4.365,09	3,46	6.985,22
13	KEC. PANCENG	4.567,90	3,62	1.543,39	1,22	6.111,30
14	KEC. SANGKAPURA	11.777,54	9,34	1.018,58	0,81	12.796,12
15	KEC. SIDAYU	4.244,16	3,37	1.110,41	0,88	5.354,57
16	KEC. TAMBAK	6.573,04	5,22	600,61	0,48	7.173,65

NO	KECAMATAN	STATUS DAYA DUKUNG PANGAN				Total (Ha)
		Belum Terlampaui (Ha)	%	Terlampaui (Ha)	%	
17	KEC. UJUNGPANGKAH	11.040,46	8,76	610,74	0,48	11.651,20
18	KEC. WRINGINANOM	3.778,25	3,00	2.317,15	1,84	6.095,41
GRAND TOTAL		96.332,91	76,43	29.706,93	23,57	126.039,84

Sumber: Materi Teknis Revisi RTRW Kabupaten Gresik Tahun 2026-2046

b. Daya Dukung dan Daya Tampung Air

Ketersediaan air di suatu wilayah dihitung berdasarkan jasa lingkungan yang menyediakannya, dengan mempertimbangkan selisih antara ketersediaan dan kebutuhan air. Metode perhitungan ketersediaan air menggunakan data debit Daerah Aliran Sungai (DAS), sementara kebutuhan air mencakup kebutuhan domestik dan kebutuhan berbasis lahan. Kebutuhan air domestik dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009, yaitu dengan mengalikan kebutuhan air minimum per orang dengan jumlah penduduk di setiap wilayah. Adapun kebutuhan air berbasis lahan mencakup aktivitas ekonomi yang melibatkan penggunaan lahan, seperti sawah, perkebunan, kebun campuran, dan ladang.

Ambang batas daya dukung air ditentukan melalui perbandingan antara ketersediaan air dengan kebutuhan minimum air yang diperlukan untuk memenuhi kehidupan layak. Status daya dukung air kemudian dikategorikan ke dalam dua kondisi, yaitu "Terlampaui" dan "Belum Terlampaui". Status terlampaui menunjukkan bahwa kebutuhan air telah melebihi ketersediaan yang ada, sedangkan status belum terlampaui menunjukkan bahwa kebutuhan air sama dengan atau masih di bawah ketersediaan.

Berdasarkan hasil analisis, ketersediaan air di Kabupaten Gresik diperkirakan mencapai 5.092,25 Juta.m^3/tahun. Sementara itu, kebutuhan air terbagi menjadi dua kategori, yaitu kebutuhan domestik dan kebutuhan berbasis lahan. Berdasarkan standar yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.916/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2025 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidip Nasional dan Pulau/Kepulauan, kebutuhan air domestik adalah sebesar 43,2 m^3 per orang per tahun. Hasil analisis menunjukkan

bahwa kebutuhan air domestik pada tahun 2025 mencapai 133,61 Juta.m³/tahun, sedangkan kebutuhan air berbasis lahan tercatat sebesar 2.050,22 Juta.m³/tahun. Dengan demikian, terdapat selisih antara kebutuhan total air dan ketersediaan air sebesar 958,50 juta.m³/tahun, yang menunjukkan bahwa kondisi daya dukung air di Kabupaten Gresik berada dalam status terlampaui. Berikut adalah rincian perhitungan daya dukung air secara lengkap.

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

a. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik untuk kebutuhan rumah tangga dasar.

Ketahanan energi di Kabupaten Gresik menjadi aspek krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan daerah. Salah satu indikator penting dalam mengukur ketahanan energi adalah Salah satu indikator penting dalam mengukur ketahanan energi adalah distribusi listrik (kWh), yang mengukur jumlah energi listrik yang disalurkan kepada konsumen. Pemakaian tenaga listrik ini mencakup jumlah kWh (kilowatt hours) energi listrik yang digunakan baik secara langsung, seperti untuk kebutuhan rumah tangga dan industri, maupun secara tidak langsung, seperti untuk sektor komersial dan layanan publik.

Tabel 2.15

Distribusi Listrik PT.PLN (Persero) Kabupaten Gresik

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Listrik yang terjual (kWh)	2.457.057.361	2.511.110.794	2.644.528.132	2.958.834.111	3.150.000.000*

*proyeksi estimasi.

Sumber : BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2024

Pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi rumah tangga merupakan salah satu indikator prioritas dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, penataan kawasan permukiman, serta pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Gresik. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap indikator "Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik untuk kebutuhan rumah tangga dasar", capaian realisasi di Kabupaten Gresik pada tahun 2024 menunjukkan performa

yang sangat progresif dengan menyentuh angka 99,53%. Peningkatan ini didorong oleh keberhasilan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi masyarakat miskin non-PLN yang bersumber dari sinergi APBD dan APBN, serta optimalisasi perluasan jaringan listrik tegangan rendah di wilayah pedesaan.

Memasuki tahun 2025 dan tahun berjalan 2026, Pemerintah Kabupaten Gresik konsisten melakukan penyisiran (sweeping) terhadap sisa rumah tangga terpencil dan keluarga baru (pecah KK). Melalui kolaborasi aktif bersama PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Gresik, realisasi capaian pada tahun berjalan 2026 berhasil ditingkatkan dan dipertahankan secara stabil pada angka 99,91%. Akselerasi ini didorong oleh penguatan sistem kelistrikan di wilayah kepulauan melalui openalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal dan optimalisasi PLTD di Pulau Bawean (Kecamatan Sangkapura dan Tambak), sehingga disparitas akses energi antara wilayah daratan dan kepulauan dapat ditekan seminimal mungkin.

Berdasarkan basis capaian dan evaluasi berkelanjutan tersebut, target kinerja dalam dokumen RKPD Tahun 2027 ditetapkan secara optimis menuju 100% (seratus persen) / *Universal Access*. Strategi utama pada tahun perencanaan 2027 tidak lagi sekadar berfokus pada kuantitas sambungan baru, melainkan dititikberatkan pada aspek keandalan suplai energi (*zero down-time*) di wilayah pesisir dan kepulauan, integrasi data kemiskinan (P3KE) untuk akurasi subsidi listrik, serta pemeliharaan infrastruktur energi terbarukan secara swadaya dan partisipatif guna menjamin keadilan akses energi yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Gresik.

b. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Konsumsi Air Siap Minum Perpipaan.

Akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum adalah kemampuan rumah tangga untuk mendapatkan air minum yang layak dari sumber yang baik. Air minum yang layak adalah air yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur ketahanan air adalah akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum

perpipaan. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan;
2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halam rumah (*on premises*);
3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan
4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.

Tabel 2.16
Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan di Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2025

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	26,81	26,70	28,69	31,09	40,24

Sumber : Bappeda Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Indikator Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan diukur berdasarkan jumlah sambungan rumah tangga yang terlayani oleh jaringan perpipaan PDAM. Jaringan perpipaan PDAM merupakan sistem distribusi air bersih yang menyalurkan air dari instalasi pengolahan menuju rumah tangga maupun pelanggan lain di kawasan perkotaan, dengan ketersediaan layanan yang berkelanjutan serta kualitas air minum yang terjaga. Data tersebut selanjutnya dibandingkan dengan jumlah total rumah tangga di Kabupaten Gresik.

Berdasarkan data Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2026, capaian Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan di Kabupaten Gresik pada tahun 2025 mencapai 40,24%. Angka tersebut menunjukkan bahwa dari seluruh rumah tangga yang berada di kawasan perkotaan Kabupaten Gresik, sebanyak 40,24%

telah memperoleh layanan air siap minum melalui jaringan perpipaan PDAM. Dengan kata lain, sekitar empat dari sepuluh rumah tangga perkotaan telah terhubung dan terlayani oleh sistem perpipaan air minum yang memenuhi standar pelayanan.

c. Kapasitas Air Baku

Sumber-sumber air yang dimanfaatkan sebagai sumber air baku pada sistem penyediaan air minum Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik saat ini terdiri dari air permukaan dan mata air yang berasal dari mata air Umbulan. Air baku ini disalurkan melalui jaringan perpipaan yang berasal dari sembilan lokasi berbeda dengan kapasitas yg bervariasi sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.17

Kapasitas Air Baku Di Kabupaten Gresik

Nama SPAM	Sumber Air Baku	Lokasi	Kapasitas Air Baku (lps)
IPA Legundi	Air Permukaan	Legundi	600
IPA Petiken	Air Permukaan	Cangkir	100
Air Curah (PT Dewata Bangun Tirta)	Air Permukaan	Legundi	240
Air Curah (PT. Adaro Tirta Gresik)	Air Permukaan	Krikilan	400
Air Curah : PT. PPKT (Bendungan Gerak Sembayat)	Air Permukaan	Sidomukti	1000
Air Curah (Segoromadu)	Air Permukaan	Segoromadu	30
Air Curah (Gadung)	Air Permukaan	Gadung	15
SPAM Mojolagres	Air Permukaan	Mojokerto	100
SPAM Umbulan	Mata Air Umbulan	Pasuruan	1000

IPA Legundi yang berlokasi di Desa Legundi memiliki kapasitas yaitu 600 L/detik. Diikuti oleh Air Curah-PT Drupadi di Desa Krikilan dengan kapasitas 400 L/detik, dan Air Curah (PT Dewata Bangun Tirta) di Desa Legundi sebesar 240 L/detik, keduanya juga mengambil sumber dari Kali Surabaya. IPA Petiken yang berada di Desa Cangkir, Kecamatan Driyorejo memiliki kapasitas 100 L/detik. Sementara itu, Air Curah Segoromadu dan Air Curah-Gadung yang mengambil sumber dari Air Curah PDAM Surabaya masing-masing memiliki kapasitas 30 L/detik dan 15 L/detik. Sumber pelayanan Jaringan perpipaan Kabupaten Gresik juga berasal dari SPAM Regional Umbulan dan Mojolagres yang masing masing memiliki kapasitas 1000 L/detik dan

100 L/detik serta Bendungan Gerak Sembayat (BGS) dengan kapasitas 1000 L/detik.

d. Prevalensi Ketidakcukupan Pangan

Prevalensi ketidakcukupan pangan (*Prevalence of Undernourishment* - PoU) di Kabupaten Gresik menggambarkan persentase penduduk yang mengonsumsi pangan kurang dari standar yang dibutuhkan untuk hidup sehat.

Tabel 2.18
Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Kabupaten Gresik
Tahun 2021 - 2025

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Prevalensi Ketidakcukupan Pangan	4,59	6,60	3,67	2,9	3,51

Sumber : Badan Pangan Nasional, Tahun 2025

Angka prevalensi ketidakcukupan pangan yang baik (rendah) umumnya berada di bawah 5-7% menunjukkan ketahanan pangan yang kuat di suatu wilayah. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional pada Tabel diatas, prevalensi ketidakcukupan pangan di Kabupaten Gresik selama periode 2021–2025 menunjukkan tren menurun dengan fluktuasi terbatas. Nilai tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 6,60 persen, lalu menurun signifikan pada tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2025, prevalensi tercatat sebesar 3,51 persen. Kondisi ini menunjukkan perbaikan akses dan kecukupan pangan, meskipun upaya penguatan ketahanan pangan tetap diperlukan agar penurunan bersifat konsisten.

2.1.1.5 Lingkungan Berkualitas

Penggunaan Lahan

Wilayah Kabupaten Gresik memiliki 19 jenis penggunaan lahan yang beragam. Untuk lebih jelasnya penggunaan lahan pada Kabupaten Gresik

Tahun 2025 sesuai revisi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gresik 2026-2046 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19

Penggunaan Lahan Kabupaten Gresik

Rencana Pola Ruang	Tahun 2025
Badan Air	2.306,19
Kawasan Perlindungan Setempat	919,51
Cagar Alam	532,59
Suaka Marga Satwa	4.023,79
Kawasan Ekosistem Mangrove	2.265,71
Kawasan Lindung	10.047,78
Badan Jalan	327,41
Kawasan Hutan Produksi Tetap	1.032,84
Kawasan Tanaman Pangan	39.883,22
Kawasan Hortikultura	3.784,24
Kawasan Perkebunan	7.966,29
Kawasan Perikanan Tangkap	1,34
Kawasan Perikanan Budidaya	20.341,13
Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	112,53
Kawasan Peruntukan Industri	10.993,58
Kawasan Permukiman Perdesaan	14.928,53

Rencana Pola Ruang	Tahun 2025
Kawasan Permukiman Perkotaan	15.281,13
Kawasan Pertanahan dan Keamanan	452,70
Kawasan Pariwisata	99,57
Kawasan Trannsportasi	787,54
Kawasan Budidaya	115.992,06
Total	126.039,84

Sumber: Hasil Analisis, 2025

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH merupakan konsep Environmental Performance Index (EPI) dengan kriteria kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan untuk memberikan gambaran secara umum atas pencapaian kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam periode tertentu serta merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menggambarkan kondisi kualitas lingkungan hidup suatu wilayah. IKLH disusun dari beberapa komponen utama, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).

Berdasarkan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Gresik dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan tren peningkatan bertahap. Berikut capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2025:

Tabel 2.20

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Kualitas Lingkung	53,72	58,15	58,51	60,12	65,81

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
an Hidup (IKLH)					
Indeks Kualitas Air (IKA)	47,78	48,24	49,38	50,00	73,07
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	32,25	32,86	32,17	35,30	49,19
Indeks Kualitas Udara (IKU)	68,79	81,24	81,24	82,94	74,45

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada Tahun 2021 adanya evaluasi terhadap target capaian IKLH provinsi, kabupaten dan kota melalui Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan, didalamnya memuat pedoman tentang muatan RPJMD terutama dalam aspek Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dijadikan pedoman dalam penetapan target IKLH pada RPJMD Kabupaten Gresik serta terdapat pembaharuan dalam perhitungan IKLH berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang didalamnya memuat pengaturan pada aspek pemilihan lokasi pemantauan, metode pengambilan data, dan perhitungan kualitas lingkungan hidup. Capaian IKLH mengalami kenaikan yang signifikan di tahun 2022 - 2025, meskipun masing-masing indeks penyusunnya menunjukkan dinamika capaian yang berbeda, termasuk adanya penurunan pada Indeks Kualitas Udara (IKU) di tahun 2025.

Pada Tahun 2025 Nilai IKLH mencapai nilai sebesar 65.81, nilai tersebut berada pada kategori Sedang sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik

Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup. Peraturan tersebut juga mengatur adanya penambahan analisis dan pemantauan parameter *Particulate Matter* PM2.5 untuk Indeks Kualitas Udara (IKU). Hal tersebut juga yang menjadi salah satu penyebab penurunan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Gresik, dari 82,94 pada tahun 2024 menjadi 74,45 pada tahun 2025. Penurunan ini terjadi karena parameter PM2,5 bersifat jauh lebih sensitif dalam mendeteksi pencemar hasil aktivitas industri, pembakaran, dan transportasi dibandingkan parameter SO2 dan NO2 yang digunakan pada metode perhitungan sebelumnya. Dengan demikian, penurunan capaian IKU tahun 2025 tidak sepenuhnya mencerminkan perburukan kualitas udara secara riil, melainkan juga merupakan konsekuensi dari metode pengukuran yang lebih komprehensif dan turut merepresentasikan beban pencemar partikulat halus dari aktivitas industri serta kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor di Kabupaten Gresik, yang sebelumnya belum terhitung dalam indeks.

Secara keseluruhan, peningkatan capaian pada Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) disebabkan oleh membaiknya kualitas air melalui pengurangan tingkat pencemaran air akibat peningkatan pengawasan terhadap limbah industri dan perbaikan sistem sanitasi masyarakat, serta optimalisasi dan penambahan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta penguatan pengendalian pencemaran, pengawasan kegiatan usaha, serta upaya rehabilitasi dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sementara itu, pada aspek kualitas udara, upaya penurunan tingkat polusi dan emisi gas buang tetap terus didorong melalui peningkatan penggunaan energi ramah lingkungan dan penerapan uji emisi kendaraan yang lebih ketat, meskipun capaian indeksnya pada tahun 2025 terkoreksi akibat perubahan metode perhitungan sebagaimana dijelaskan di atas.

Sebagai upaya peningkatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik yaitu perlunya menggeser fokus kebijakan dari sekadar pengendalian pencemaran menuju intervensi struktural,

khususnya pada peningkatan infrastruktur berbasis lingkungan, termasuk penguatan sistem pemantauan kualitas udara mandiri (khususnya untuk parameter PM2,5) serta penguatan koordinasi lintas OPD dalam pengendalian sumber-sumber emisi industri dan transportasi.

b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Rumah tangga dengan akses sanitasi aman adalah rumah tangga yang memiliki fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan. Fasilitas tersebut terhubung ke septic tank yang disedot secara berkala. Indikator ini digunakan untuk mengukur akses sanitasi layak dan aman, serta persentase praktik buang air besar sembarangan, yang penting untuk mengetahui sejauh mana kebutuhan masyarakat terkait pengelolaan air limbah domestik terpenuhi, yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan pencemaran air akibat limbah domestik.

Perhitungan rumah tangga sanitasi aman Tahun 2025 didasarkan pada jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T ditambahkan dengan jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) dibagi dengan jumlah rumah tangga keseluruhan di Kabupaten Gresik. Hal ini berbeda dengan indikator sanitasi aman pada tahun tahun sebelumnya yang didefinisikan sebagai fasilitas sanitasi layak yang sudah tersambung ke dalam jaringan perpipaan pengolahan air limbah terpusat kota, atau yang tangki septiknya sudah dilakukan penyedotan berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan dibuang ke IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja).

Capaian akses sanitasi aman pada tahun 2021 - 2025 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.21

Rumah Tangga Sanitasi Aman (%) Tahun 2021 - 2025

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Rumah Tangga Sanitasi Aman (%)	1,51	0,99	1,71	1,72	24,22

Sumber : Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Capaian akses sanitasi aman Kabupaten Gresik berdasarkan Tabel 2.20 pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 0,99% disebabkan adanya *double counting* dari tahun 2020-2021, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam peningkatan akses sanitasi, capaian sanitasi aman masih belum optimal.

Upaya yang perlu ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik dalam meningkatkan akses sanitasi salah satunya melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi aman, peningkatan infrastruktur dan armada penyedotan serta layanan penyedotan lumpur tinja terjadwal belum berjalan optimal.

Saat ini hanya terdapat 1 unit IPLT dengan kapasitas 45 m^3/hari, yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk dan kebutuhan pengolahan di Kabupaten Gresik. Upaya lain yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik diantaranya pembangunan SPALD-T melalui berbagai sumber pendanaan, adanya kolaborasi dengan pihak swasta salah satunya dengan pengusaha sedot tinja, serta kampanye sanitasi aman dilakukan melalui berbagai media dan kegiatan, seperti STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), penyuluhan di tingkat desa, serta kerja sama dengan kader kesehatan dan sekolah.

c. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Indikator Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah merupakan Indikator Utama Pembangunan (IUP) berdasarkan

RPJPD Kabupaten Gresik. berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) capaian timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah Tahun 2023 dan 2024 berturut – turut sebesar 9,17% dan 24,44%. Peningkatan persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Gresik bekerjasama dengan stakeholder terkait dalam melakukan pengolahan sampah melalui bank sampah, komposting skala kecil atau RT/RW, pusat olah organik, rumah kompos, Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS 3R), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), daur ulang produk kreatif dan pengepul/pelapak.

Kenaikan capaian ini tergolong cukup tinggi, menunjukkan bahwa sebagian besar timbulan sampah di Gresik sudah ditangani secara lebih berkelanjutan sehingga mampu menekan volume sampah yang berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Dengan capaian tersebut, risiko pencemaran lingkungan akibat sampah dapat ditekan, sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi melalui praktik reduce, reuse, recycle (3R). Namun demikian, masih terdapat sampah yang belum tertangani melalui fasilitas pengolahan. Bagian sampah ini berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan, khususnya di kawasan perkotaan dengan timbulan sampah tinggi serta wilayah perdesaan yang belum sepenuhnya memiliki akses ke fasilitas pengolahan sampah.

Tabel 2.22
Capaian Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	-	-	-	24,98	25,66

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Capaian 24,98% di tahun 2024 dapat dijadikan tolok ukur positif untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pengelolaan sampah di tahun tahun berikutnya. Hal ini terbukti melalui peningkatan capaian tahun 2025 sebesar 25,66% sekaligus menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dukungan infrastruktur, serta peran pemerintah daerah dan sektor swasta mulai menunjukkan hasil yang nyata. Kedepan, tantangan utamanya adalah memastikan konsistensi capaian dan mengurangi disparitas pengelolaan antarwilayah, agar pengelolaan sampah di Kabupaten Gresik semakin merata dan berkelanjutan.

Faktor pendorong dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Gresik antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat pada sektor persampahan melalui kegiatan PROKLIM (Program Kampung Iklim), GKMS (Gresik Kawasan Merdeka Sampah), adanya inovasi program berbasis komunitas seperti bank sampah dan TPS3R, dukungan regulasi daerah, serta keterlibatan sektor swasta dalam pengolahan dan pemanfaatan sampah. Sementara itu, faktor penghambat yang masih dihadapi meliputi keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan sampah, rendahnya kapasitas kelembagaan di tingkat desa/kelurahan, belum meratanya layanan pengangkutan sampah, serta masih rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dalam penerapan pola hidup bersih dan ramah lingkungan.

d. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, serta sampah dikumpulkan paling sedikit 3 (tiga) atau lebih yang terpisah misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah

sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu. Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengolahan sampah dihitung berdasarkan proporsi jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah (JRTLA) terhadap jumlah total rumah tangga seluruhnya (JRTS) dikalikan dengan 100 persen.

Tabel 2.23

Capaian Persentase Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	-	-	-	58,7	58,8

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah di Kabupaten Gresik tercatat sebesar 58,7 % pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 28,8% di tahun 2025. Artinya, dari setiap 100 rumah tangga, hanya sekitar 58 rumah tangga yang telah terlayani secara rutin oleh sistem pengumpulan sampah, baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pihak ketiga, maupun pengelola lingkungan setempat. Sementara itu, 43% rumah tangga lainnya masih belum memperoleh layanan penuh, sehingga berpotensi membuang sampah secara mandiri, membakar, atau bahkan membuang ke lingkungan sekitar. Capaian ini menunjukkan bahwa layanan pengumpulan sampah belum menjangkau seluruh masyarakat, meskipun lebih dari setengah rumah tangga telah terlayani. Kondisi ini berimplikasi pada dua hal utama:

1. Lingkungan, masih adanya potensi pencemaran akibat sampah yang tidak terkelola dengan baik.

2. Kesehatan masyarakat, rumah tangga tanpa layanan penuh berisiko lebih tinggi terhadap masalah sanitasi dan penyakit berbasis lingkungan.

Dengan capaian 58,8 % di tahun 2025, posisi ini dapat dijadikan sebagai acuan penting untuk meningkatkan kinerja layanan persampahan di Gresik. Perlu adanya strategi untuk memperluas cakupan layanan, antara lain:

1. Perluasan jaringan pengumpulan ke kawasan perdesaan dan permukiman padat yang belum terlayani.
2. Peningkatan kapasitas armada dan SDM persampahan agar layanan lebih merata.
3. Kemitraan dengan swasta dan masyarakat (misalnya bank sampah dan pengelola lingkungan) untuk mendukung layanan yang berkelanjutan.
4. Edukasi dan partisipasi warga dalam membayar retribusi atau biaya layanan sampah, agar sistem bisa berjalan konsisten.

2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

a. Penurunan Emisi GRK Kumulatif

Indikator Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif merupakan salah satu indikator penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pengendalian dampak perubahan iklim di Kabupaten Gresik. Indikator ini menggambarkan upaya pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat emisi GRK melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan, efisiensi energi, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta pengurangan pencemaran lingkungan.

Pelaksanaan upaya penurunan emisi GRK dilakukan melalui berbagai sektor pembangunan, antara lain pengelolaan persampahan, peningkatan ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah, efisiensi penggunaan energi, pengembangan

transportasi ramah lingkungan, serta rehabilitasi lingkungan dan konservasi sumber daya air. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian target penurunan emisi GRK secara berkelanjutan.

Capaian persentase kumulatif penurunan emisi GRK menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung agenda pembangunan rendah karbon dan implementasi kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan. Upaya tersebut tidak hanya diarahkan untuk memenuhi target pembangunan daerah, tetapi juga mendukung kebijakan nasional dalam pengendalian perubahan iklim serta pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs).

Penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, swasta serta perusahaan pada Tahun 2021–2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.24

Indikator Penurunan Emisi GRK Kumulatif

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	15.331,25	16.814	25.731,52	40.177,72	57.261.3

Sumber: Aplikasi AKSARA Bappenas,

Berdasarkan capaian indikator penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) kumulatif Kabupaten Gresik Tahun 2021–2025, menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan rendah karbon serta pengendalian dampak perubahan iklim melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dan pengurangan emisi GRK.

Berdasarkan Data dari aplikasi aksara pada bulan Juli tahun 2026, capaian penurunan emisi GRK kumulatif pada tahun 2021 sebesar 15.331,25 tonCO_2eq dan meningkat menjadi 16.814 tonCO_2eq pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2023 capaian meningkat cukup signifikan menjadi 25.731,52 tonCO_2eq, kemudian terus meningkat menjadi 40.177,72 tonCO_2eq pada tahun 2024 dan mencapai 57.261,3 tonCO_2eq pada tahun 2025. Peningkatan capaian tersebut menunjukkan semakin optimalnya implementasi program pengurangan emisi GRK di berbagai sektor pembangunan daerah.

Peningkatan penurunan emisi GRK tersebut didukung oleh pelaksanaan berbagai program strategis, antara lain pengelolaan persampahan dan limbah yang lebih baik, peningkatan ruang terbuka hijau, rehabilitasi lingkungan, efisiensi penggunaan energi, pengendalian pencemaran lingkungan, serta penguatan upaya konservasi sumber daya alam dan sumber daya air. Selain itu, dukungan dari dunia usaha, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan juga menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian target penurunan emisi GRK.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik terus berupaya mendukung agenda pembangunan berkelanjutan dan kebijakan nasional terkait pengendalian perubahan iklim. Upaya penurunan emisi GRK tidak hanya diarahkan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup, tetapi juga untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap dampak perubahan iklim, seperti peningkatan suhu, banjir, penurunan kualitas udara, dan degradasi lingkungan.

Peningkatan capaian penurunan emisi GRK mencerminkan semakin optimalnya pelaksanaan program pengelolaan lingkungan hidup dan meningkatnya kesadaran berbagai pihak terhadap pentingnya pembangunan yang ramah lingkungan. Meskipun capaian menunjukkan perkembangan yang positif, tantangan dalam pengendalian emisi GRK masih cukup besar seiring dengan meningkatnya aktivitas industri, pertumbuhan penduduk, peningkatan aktivitas transportasi, kebutuhan energi, dan perkembangan kawasan

perkotaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan pembangunan rendah karbon, peningkatan pemanfaatan inovasi teknologi ramah lingkungan, penguatan sistem monitoring emisi, penguatan kolaborasi lintas sektor serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung pengurangan emisi GRK secara berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Gresik akan terus mendorong implementasi program penurunan emisi GRK secara terintegrasi melalui sinergi lintas sektor dan optimalisasi perencanaan pembangunan berwawasan lingkungan. Dengan demikian, diharapkan capaian penurunan emisi GRK dapat terus meningkat dan mendukung terwujudnya pembangunan Kabupaten Gresik yang berkelanjutan, tangguh terhadap perubahan iklim, dan ramah lingkungan.

b. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap bencana. Indeks Risiko Bencana dapat digunakan untuk memberikan gambaran perbandingan capaian penurunan tingkat kerentanan di suatu kabupaten/kota dari waktu ke waktu. IRB dihitung berdasarkan tiga komponen utama, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas daerah. Hasil perhitungan IRB dikelompokkan dalam tiga kategori: tinggi (>144), sedang (13-144), dan rendah (<13).

Berdasarkan capaian Indeks Resiko Bencana di Kabupaten Gresik dalam beberapa tahun terakhir, terdapat trend penurunan yang cukup baik. Berikut merupakan tabel capaian Indeks Resiko Bencana di Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024.

Tabel 2.25

Persentase Indeks Risiko Bencana

No	Indikator	Capaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Resiko Bencana	96.5	94.89	91.42	105,07	119,66

Sumber: RPJMD Kab. Gresik Tahun 2021-2025

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana (IRB) tahun 2021–2023, terlihat adanya tren penurunan risiko bencana secara konsisten, yang ditunjukkan oleh menurunnya nilai IRB dari 96,50 pada tahun 2021 menjadi 91,42 pada tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan kapasitas daerah dalam pengurangan risiko bencana, baik melalui upaya mitigasi struktural maupun non-struktural, peningkatan kesiapsiagaan, serta penguatan kelembagaan penanggulangan bencana.

Namun demikian, pada tahun 2024 dan 2025 terjadi peningkatan nilai IRB yang cukup signifikan menjadi 105,07 dan 119,66. Kenaikan ini menunjukkan meningkatnya tingkat risiko bencana, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

- Meningkatnya potensi ancaman bencana,
- Bertambahnya tingkat kerentanan wilayah dan masyarakat
- Serta belum optimalnya kapasitas penanggulangan bencana dalam menghadapi dinamika risiko terbaru.

Kondisi tersebut menjadi catatan bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap komponen pembentuk IRB (ancaman, kerentanan, dan kapasitas), memperkuat program pengurangan risiko bencana yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah, serta meningkatkan sinergi lintas sektor dan lintas wilayah dalam penanggulangan bencana.

Secara keseluruhan, capaian IRB menunjukkan bahwa upaya pengurangan risiko bencana telah memberikan hasil positif hingga tahun 2024, namun memerlukan penguatan kebijakan dan program yang lebih adaptif pada tahun 2025 guna menekan kembali tingkat risiko bencana di daerah.

c. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Rawan bencana adalah daerah yang berpotensi tinggi mengalami bencana karena karakteristik alam dan/atau aktivitas

manusia. Secara geografis dan topografis, Kabupaten Gresik didominasi oleh wilayah dataran rendah (±79%), kawasan pesisir, serta wilayah kepulauan (Pulau Bawean), sehingga memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi terhadap bencana.

Pada Tahun 2025, BPBD Kabupaten Gresik telah menyusun Kajian Resiko Bencana, Kajian Risiko Bencana (KRB) disusun sebagai dasar perencanaan penanggulangan dan pengurangan risiko bencana daerah untuk periode Tahun 2025–2029. Kajian ini mempertimbangkan komponen bahaya, kerentanan, dan kapasitas daerah, dengan mengacu pada data kejadian bencana, kondisi fisik wilayah, kependudukan, serta kapasitas kelembagaan daerah.

Berdasarkan analisis sejarah kejadian bencana dan indeks risiko, Kabupaten Gresik dikategorikan sebagai daerah dengan multi ancaman bencana. Kondisi tersebut tercermin dari keragaman jenis bencana yang pernah terjadi di wilayah Kabupaten Gresik. Berdasarkan portal Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh BNPB terdapat 5 (lima) jenis bencana yang terjadi dan tercatat di DIBI yaitu banjir, kekeringan, tanah longsor, cuaca ekstrim, serta Gempabumi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dimulai tahun 2014 hingga 2024

Hasil kajian menunjukkan bahwa banjir dan gempabumi merupakan bencana dengan tingkat risiko tertinggi dan menjadi prioritas utama penanganan, diikuti oleh kekeringan, cuaca ekstrem, epidemi/wabah penyakit, dan kegagalan teknologi. Berdasarkan analisis tingkat bahaya dan risiko, lima bencana utama yang berpotensi dan diprioritaskan di Kabupaten Gresik adalah:

1. Banjir
2. Gempabumi
3. Kekeringan
4. Cuaca Ekstrem
5. Tanah Longsor

Dari kelima bencana tersebut, banjir dan gempa bumi memiliki nilai bahaya dan risiko paling tinggi sehingga menjadi prioritas utama penanggulangan.

- Rawan Banjir

Bencana banjir di Kabupaten Gresik disebabkan oleh luapan Kali Lamong yang mengakibatkan beberapa wilayah di sekitarnya terendam (Aulady et al., 2022). Faktor penyebab luapan Kali Lamong antara lain tingginya curah hujan di wilayah hulu yang meningkatkan debit air hingga melonjak. Selain itu, kondisi air pasang laut yang memperburuk kondisi dengan menghambat aliran air sungai ke muara, menciptakan backflow yang memperpanjang genangan, serta intensitas hujan musiman yang sering berulang terutama pada musim penghujan. Wilayah rawan banjir umumnya berada di dataran rendah, kawasan aliran sungai, dan wilayah pesisir, terutama di sekitar DAS Kali Lamong dan Bengawan Solo. Kecamatan rawan banjir antara lain: Balongpanggang, Benjeng, Cerme, Duduksampeyan, Menganti, Driyorejo, Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Wringinanom, Ujungpangkah

- Gempabumi

Gempabumi didefinisikan sebagai getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuhan batuan teoritis, akar masalah dari kondisi Gempabumi yakni Indonesia berada di zona tumbukan tiga lempeng besar (Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik) yang aktif bergerak. Kondisi ini menjadikan wilayah Indonesia sangat rawan terhadap gempa tektonik. Selain itu, karakteristik geologi tertentu, seperti tanah aluvial yang lepas, meningkatkan risiko kerusakan akibat fenomena likuefaksi. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Gresik bahwa wilayah ini berdekatan dengan Laut Jawa yang menjadi sumber gempa karena adanya patahan atau sesar aktif yakni Sesar Bawean yang dapat menimbulkan gempa tektonik (Saputra et al., 2010). Gempa-gempa tersebut sering terasa di Kabupaten Gresik ketika getaran sistemik dari sesar ini. Peristiwa gempa di Laut Jawa dan di Pulau Bawean telah mencatat bahwa guncangan gempa terasa kuat hingga ke wilayah Gresik karena pusat gempa relatif dekat secara geografis. Gempa ini adalah jenis gempa dangkal yang disebabkan

oleh aktivitas sesar aktif di laut. Gempa Bumi berpotensi terjadi hampir di seluruh wilayah Kabupaten Gresik, termasuk wilayah daratan dan Pulau Bawean, dengan tingkat kerentanan tinggi pada wilayah berpenduduk padat dan kawasan pesisir.Kecamatan rawan gempa bumi meliputi : Seluruh kecamatan di daratan Gresik dan Kecamatan Sangkapura dan Tambak (Pulau Bawean)

- Kekeringan

  Kekeringan dominan terjadi di wilayah pertanian lahan tadah hujan dan wilayah dengan ketersediaan air terbatas terbatas. Kecamatan rawan kekeringan antara lain: Balongpanggang, Benjeng, Kedamean, Cerme, Dukun, Panceng, Sidayu

- Cuaca Esktrem

  Cuaca ekstrem berpotensi terjadi secara merata, terutama pada wilayah pesisir dan wilayah terbuka. Wilayah terdampak cuaca ekstrem pesisir terdapat di Manyar, Bungah, Ujungpangkah, dan wilayah kepulauan: Sangkapura dan Tambak

- Tanah longsor

  Tanah longsor memiliki risiko relatif rendah namun tetap berpotensi terjadi pada wilayah dengan kemiringan lereng sedang hingga curam. Wilayah potensi longsor: Panceng dan Wringinanom (wilayah tertentu)

Selain itu berdasarkan data rencana revisi tata ruang Kabupaten Gresik Tahun 2026-2046 terdapat bencana lain yang berpotensi terjadi di Kabupaten Gresik seperti rawan bencana gelombang ekstrim, rawan bencana kebakaran hutan dan lahan, lahan bencana likueafaksi.

1. Gelombang ekstrim adalah gelombang laut dengan tinggi melebihi kondisi normal akibat pengaruh angin kencang, badai tropis, tekanan rendah, maupun anomali iklim (misalnya La Nina atau perubahan iklim global). Tingkat Kerentanan: Kabupaten Gresik memiliki tingkat kerentanan yang relatif tinggi terhadap bencana gelombang ekstrem, khususnya pada wilayah pesisir utara dan wilayah kepulauan yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa, seperti Kecamatan

Ujungpangkah, Panceng, serta Pulau Bawean. Faktor utama kerentanan meliputi kondisi geografis pantai yang terbuka, pengaruh angin musiman, serta meningkatnya intensitas cuaca ekstrem akibat perubahan iklim.

2. Kebakaran hutan dan lahan adalah peristiwa terbakarnya vegetasi hutan atau lahan, baik secara alami maupun akibat aktivitas manusia, yang menyebabkan hilangnya penutupan vegetasi, kerusakan ekosistem, serta menimbulkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi.Tingkat Kerentanan Kabupaten Gresik memiliki tingkat kerentanan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan yang tergolong sedang hingga tinggi, terutama pada wilayah dengan tutupan lahan kering, semak belukar, kawasan hutan produksi, serta area peralihan hutan–pertanian dan lahan terbuka.
3. Likuefaksi merupakan fenomena geologi yang umumnya terjadi pada wilayah yang tersusun oleh endapan aluvium, yaitu material sedimen muda yang masih bersifat lepas atau belum terkonsolidasi dengan baik (loose unconsolidated material).Lapisan tanah tersebut biasanya didominasi oleh pasir halus hingga sedang yang berada dalam kondisi jenuh air tanah. Pada daerah dengan kemiringan lereng yang memadai, kondisi ini menjadi semakin rentan ketika terjadi guncangan kuat akibat aktivitas gempa bumi. Getaran gempa akan menyebabkan peningkatan tegangan air pori di dalam tanah, sehingga kontak antar butiran pasir melemah. Akibatnya, lapisan pasir kehilangan kekuatan gesernya dan berperilaku seperti cairan atau bubur. Kondisi ini menyebabkan daya dukung tanah menurun secara signifikan, sehingga tanah tidak lagi mampu menopang beban di atasnya dan dapat mengalami pergerakan atau meluncur mengikuti bidang gelincir yang terbentuk. Berdasarkan tingkat kerentanannya, kawasan rawan bencana likuifaksi di Kabupaten Gresik diklasifikasikan ke dalam dua tingkatan, yaitu rawan likuifaksi tinggi dan rawan likuifaksi sedang. Secara umum, wilayah Kabupaten Gresik didominasi oleh kawasan dengan tingkat kerawanan likuifaksi sedang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun potensi likuifaksi tidak berada pada tingkat paling ekstrem, namun tetap perlu mendapatkan perhatian dalam

perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur, serta upaya mitigasi bencana. Kecamatan Manyar merupakan wilayah dengan luasan kerentanan likuifaksi terbesar di Kabupaten Gresik, dengan total area terdampak mencapai ±8.320,67 hektar

2.1.1.7 Demografi

Karakteristik Kependudukan ialah penjelasan mengenai kondisi kependudukan suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Karakteristik penduduk berpengaruh penting terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk sehingga merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan. Karakteristik kependudukan pada Kabupaten Gresik dapat dilihat dari pertumbuhan penduduk, jumlah dan persebaran penduduk dan kepadatan penduduk. Data kependudukan tersebut diperoleh dari Kabupaten Gresik Dalam Angka Tahun 2025. Berikut merupakan Karakteristik Kependudukan Kabupaten Gresik.

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2025 sebanyak 1.343.465 jiwa yang terdiri dari 675.387 laki-laki dan 668.078 perempuan, Sedangkan angka jenis kelamin perempuan dibanding laki-laki pada tahun 2025 sebesar 1:1 Adapun rincian jumlah penduduk Kabupaten Gresik dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.26

Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No	Kecamatan	Jml Desa/Kel	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Dukun	26	33.580	33.009	66.589
2	Balongpanggang	25	28.087	28.414	56.501
3	Panceng	14	27.119	27.049	54.168
4	Benjeng	23	33.649	33.342	66.991
5	Duduksampeyan	23	24.854	24.976	49.832
6	Wringinanom	16	37.564	37.006	74.570
7	Ujungpangkah	13	26.731	26.190	52.921
8	Kedamean	15	32.846	32.121	64.967
9	Sidayu	21	22.665	22.418	45.083
10	Manyar	23	62.891	61.861	124.752
11	Cerme	25	42.870	42.075	84.945

No	Kecamatan	Jml Desa/Kel	Laki-Laki	Perempuan	Total
12	Bungah	22	35.514	34.696	70.210
13	Menganti	22	69.257	68.028	137.285
14	Kebomas	21	58.466	58.371	116.837
15	Driyorejo	16	55.959	55.081	111.040
16	Gresik	21	39.687	40.323	80.010
17	Sangkapura	17	27.959	27.385	55.344
18	Tambak	13	15.689	15.731	31.420
	JUMLAH	356	675.387	668.078	1.343.465

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2025 mengalami kenaikan jumlah penduduk sebesar 1.19% dibandingkan pada tahun 2024. Jumlah penduduk pada Tahun 2025 sebanyak 1.343.465 Jiwa naik 15.968 jiwa dibandingkan tahun 2024 sebanyak 1.327.497 jiwa. Berikut Jumlah Penduduk Kabupaten Gresik Tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 berdasarkan Kecamatan:

Tabel 2.27

Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Gresik Tahun 2022 -2025

No.	Kecamatan	Desa	2022	2023	2024	2025
1	Dukun	26	65.618	65.628	66.086	65.589
2	Balongpanggang	25	56.340	56.397	56.862	56.501
3	Panceng	14	52.340	52.831	53.606	54.168
4	Benjeng	23	65.424	65.904	66.608	66.991
5	Duduksampeyan	23	49.407	49.597	49.736	49.832
6	Wringinanom	16	72.308	73.047	74.154	74.570
7	Ujungpangkah	13	51.720	51.808	52.359	52.921
8	Kedamean	15	63.138	63.709	64.213	64.967
9	Sidayu	21	43.594	43.835	44.542	45.083
10	Manyar	23	117.475	119.730	122.645	124.752
11	Cerme	25	81.093	82.048	83.903	84.945
12	Bungah	22	67.983	68.598	69.581	70.210

No.	Kecamatan	Desa	2022	2023	2024	2025
13	Menganti	22	126.806	129.230	133.875	137.285
14	Kebomas	21	111.531	112.665	115.078	116.837
15	Driyorejo	16	103.718	105.501	108.294	111.040
16	Gresik	21	80.136	79.457	80.005	80.010
17	Sangkapura	17	52.732	53.663	54.311	55.344
18	Tambak	13	30.155	30.555	31.009	31.420
	JUMLAH	356	1.291.518	1.304.203	1.327.497	1.343.465

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2025

Selain itu berdasarkan kelompok umur dijelaskan bahwa kelompok umur 40-44 tahun mendominasi piramida penduduk dengan persentase 7,99% kemudian kelompok umur 20 – 24 tahun mecapai 7,84% dan selanjutnya kelompok umur 45–49 tahun mencapai 7,76%. Adapun rincian kelompok umur disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.28
Kelompok Umur Kabupaten Gresik Tahun 2024

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki Laki	Perempuan	
1	0 - 4 Th	41.706	39.541	81.247
2	5 - 9 Th	52.399	48.757	101.156
3	10 - 14 Th	53.409	50.326	103.735
4	15 - 19 Th	53.324	49.628	102.952
5	20 - 24 Th	54.031	51.326	105.357
6	25 - 29 Th	52.829	51.168	103.997
7	30 - 34 Th	49.819	49.171	98.990
8	35 - 39 Th	45.745	45.161	90.906
9	40 - 44 Th	53.382	53.909	107.291
10	45 -49 Th	52.123	52.100	104.223
11	50 - 54 Th	47.779	48.086	95.865
12	55 - 59 Th	39.730	40.776	80.506
13	60 - 64 Th	30.850	32.472	63.322
14	65 - 69 Th	22.853	25.048	47.901
15	70 - 74 Th	14.184	13.933	28.117

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki Laki	Perempuan	
16	>75 Th	11.224	16.676	27.900
	JUMLAH	675.387	668.078	1.343.465

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2025

Kepadatan penduduk merupakan salah satu indikator strategis yang menggambarkan tingkat persebaran penduduk dalam suatu wilayah. Indikator ini memiliki keterkaitan yang erat dengan penyediaan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, penyediaan perumahan, pengembangan kawasan perkotaan, sistem transportasi, serta pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, analisis kepadatan penduduk menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pemerataan pelayanan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Tabel 2.29

Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Gresik Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah	Luas (km²)	Kepadatan Penduduk
1	Dukun	66.589	59,09	1.126,91
2	Balongpanggang	56.501	63,88	884,49
3	Panceng	54.168	62,59	865,44
4	Benjeng	66.991	61,26	1.093,55
5	Duduksampeyan	49.832	74,29	670,78
6	Wringinanom	74.570	62,62	1.190,83
7	Ujungpangkah	52.921	94,82	558,12
8	Kedamean	64.967	65,95	985,09
9	Sidayu	45.083	47,13	956,57
10	Manyar	124.752	95,42	1.307,40
11	Cerme	84.945	71,73	1.184,23
12	Bungah	70.210	79,44	883,81
13	Menganti	137.285	68,72	1.997,74
14	Kebomas	116.837	30,06	3.886,79
15	Driyorejo	111.040	51,29	2.164,94
16	Gresik	80.010	5,54	14.442,24
17	Sangkapura	55.344	118,72	466,17
18	Tambak	31.420	78,7	399,24
	JUMLAH	1.343.465	1.191,25	1.127,78

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada tahun 2025 mencapai 1.343.465 jiwa dengan luas wilayah sekitar 1.191,25 km², sehingga tingkat kepadatan penduduk mencapai 1.127.78 jiwa per km². Angka tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi di Provinsi Jawa Timur, terutama karena berkembangnya kawasan industri, perdagangan, jasa, serta permukiman yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan kapasitas produksi suatu wilayah yang tercermin dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam jangka panjang. Kinerja perekonomian daerah Kabupaten Gresik dan Jawa Timur menunjukkan dinamika yang relatif sejalan dengan perkembangan perekonomian Nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik dan Jawa Timur bergerak mengikuti siklus pemulihan dan stabilisasi ekonomi Indonesia, dengan perbedaan kinerja yang mencerminkan karakteristik struktur ekonomi regional. Pada periode ini, Kabupaten Gresik mampu menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dan kompetitif, bahkan pada tahun 2022 mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur dan Nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, laju pertumbuhan ekonomi baik secara Nasional dan Regional tumbuh positif dengan laju pertumbuhan yang fluktuatif.

Tabel 2.30
Laju Pertumbuhan Ekonomi

Uraian	Laju Pertumbuhan Ekonomi (y-on-y) Tahunan Nasional, Jawa Timur, dan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025 (Persen)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Nasional	3,70	5,31	5,05	5,03	5,11
Jawa Timur	3,56	5,34	4,95	4,93	5,33
Kabupaten Gresik	3,79	7,38	4,62	4,79	4,91

Sumber: Tabel Dinamis BPS Gresik, Jawa Timur, Nasional 2026
Tahun 2024: Angka Sementara
Tahun 2025: Angka Sangat Sementara

Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mengalami pertumbuhan sebesar 3,56 persen, menunjukkan perbedaan sedikit di bawah capaian Kabupaten Gresik sebesar 3,79 dan Nasional sebesar 3,70 persen. Kondisi ini mencerminkan fase awal pemulihan ekonomi daerah pascapandemi COVID-19, di mana aktivitas ekonomi mulai bergerak kembali namun belum sepenuhnya pulih. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga sebagai kontributor utama PDRB mulai menunjukkan perbaikan seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, meskipun masih tertahan oleh kehati-hatian belanja dan pemulihan pendapatan yang belum merata. Dari sisi produksi, sektor industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi mulai tumbuh positif, namun kapasitas produksi dan permintaan belum berada pada tingkat optimal. Kinerja ekonomi Jawa Timur mengalami akselerasi signifikan pada tahun 2022 dengan pertumbuhan mencapai 5,34 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,31 persen, namun tidak lebih tinggi dari Kabupaten Gresik sebesar 7,38 persen. Pencapaian ini menunjukkan efektivitas pemulihan ekonomi daerah yang ditopang oleh penguatan permintaan domestik dan meningkatnya aktivitas sektor produksi utama. Konsumsi rumah tangga tumbuh kuat seiring normalisasi aktivitas sosial dan ekonomi, sementara investasi menunjukkan peningkatan sejalan dengan percepatan proyek infrastruktur dan mulai pulihnya investasi sektor swasta. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur melambat menjadi 4,95 persen, lebih tinggi dari Kabupaten Gresik sebesar 4,62 persen. Sementara itu, Nasional tumbuh sebesar 5,05

persen. Perlambatan ini mencerminkan proses normalisasi pertumbuhan setelah fase pemulihan cepat pada tahun sebelumnya. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama, namun dengan laju pertumbuhan yang lebih moderat. Investasi masih tumbuh positif, meskipun menghadapi tantangan ketidakpastian global dan penyesuaian kebijakan moneter. Dari sisi produksi, industri pengolahan tetap berkontribusi besar, namun mengalami perlambatan seiring melemahnya permintaan eksternal dan penyesuaian kinerja ekspor, mengingat Jawa Timur memiliki keterkaitan yang kuat dengan pasar nasional dan global. Stabilitas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berlanjut pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 4,93 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan nasional sebesar 5,03 persen namun lebih tinggi dari Kabupaten Gresik sebesar 4,79. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah berada pada fase pertumbuhan yang stabil namun belum menunjukkan percepatan yang signifikan. Konsumsi rumah tangga tetap terjaga sebagai motor pertumbuhan utama, didukung oleh stabilitas harga dan kebijakan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat. Namun demikian, kontribusi net ekspor terhadap pertumbuhan relatif terbatas, seiring meningkatnya impor bahan baku dan barang modal serta melemahnya permintaan global. Dari sisi produksi, sektor industri pengolahan, perdagangan, dan jasa pemerintahan menjadi penopang utama, namun belum cukup untuk mendorong pertumbuhan di atas rata-rata nasional.

Memasuki tahun 2025, kinerja perekonomian Jawa Timur menunjukkan penguatan dengan pertumbuhan mencapai 5,33 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen dan Kabupaten Gresik sebesar 4,91 persen. Peningkatan ini mengindikasikan membaiknya kinerja ekonomi daerah, terutama dari sisi produksi dan permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga kembali menguat seiring meningkatnya pendapatan masyarakat dan stabilnya aktivitas ekonomi. Investasi mulai menunjukkan akselerasi, khususnya pada sektor-sektor

unggulan daerah yang memiliki keterkaitan kuat dengan industri pengolahan, perdagangan, dan logistik. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya daya saing ekonomi Jawa Timur serta efektivitas kebijakan pembangunan daerah dalam mendorong aktivitas ekonomi produktif.

Tabel 2.31
Laju Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan Kabupaten Gresik
Tahun 2021-2025

Tahun	Laju Pertumbuhan (y-on-y) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan Kabupaten Gresik (Persen)				
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tahunan
2021	-	-	-	-	3,79
2022	6,47	9,43	9,95	3,88	7,38
2023	3,69	5,4	3,92	5,48	4,62
2024	5,18	4,06	5,82	4,11	4,79
2025	3,92	4,62	4,12	6,95	4,91

Sumber: Tabel Dinamis BPS Jawa Timur, 2026
Tahun 2024: Angka Sementara
Tahun 2025: Angka Sangat Sementara

Pada tahun 2021, perekonomian Kabupaten Gresik berada pada fase pemulihan awal setelah mengalami kontraksi cukup dalam pada tahun 2020 akibat pandemi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik yang tercatat sekitar 3,79 persen pada tahun 2021 mencerminkan mulai pulihnya aktivitas produksi dan konsumsi seiring dengan pelonggaran pembatasan sosial, meningkatnya mobilitas masyarakat, serta adaptasi pelaku usaha terhadap kondisi *new normal*. Namun demikian, laju pertumbuhan ekonomi masih relatif terbatas karena daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih, aktivitas industri masih menghadapi gangguan rantai pasok akibat adanya pembatasan di beberapa wilayah, dan investasi belum kembali ke tingkat optimal. Tahun 2022 menjadi periode akselerasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik dengan laju pertumbuhan yang meningkat secara signifikan mencapai 7,38 persen lebih tinggi dari Jawa Timur dan Nasional. Kinerja ini dipengaruhi oleh pulihnya aktivitas industri secara masif. Sejumlah sub sektor industri besar di Kabupaten Gresik kembali beroperasi optimal, didukung oleh meningkatnya permintaan domestik dan ekspor barang, serta adanya realisasi investasi baru di kawasan industri dan kawasan ekonomi

strategis seperti JIIPE. Memasuki tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik mengalami normalisasi dan melambat ke nilai 4,62 persen. Perlambatan ini bukan merupakan indikasi pelemahan struktural, melainkan penyesuaian setelah pertumbuhan tinggi pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik kembali mengalami kenaikan yang relatif stabil di 4,79 persen. Stabilitas ini mencerminkan kondisi ekonomi daerah yang cukup resilien di tengah tantangan global, termasuk perlambatan ekonomi dunia dan tekanan geopolitik. Struktur ekonomi Gresik yang didominasi industri tetap memberikan kontribusi besar, meskipun ketergantungan yang tinggi terhadap sektor ini juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi sangat sensitif terhadap dinamika eksternal. Pada tahun 2025, kinerja pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik dipengaruhi dengan turunnya pertumbuhan pada lapangan usaha sektor primer yang berlangsung selama triwulan I hingga III dengan rentang minus 6-11 persen. Sebaliknya, lapangan usaha sektor sekunder terus mengalami penguatan di rentang 5-7 persen.

Secara keseluruhan, kinerja perekonomian Kabupaten Gresik selama periode 2021–2025 menunjukkan ketahanan dan daya adaptasi yang baik terhadap dinamika ekonomi Jawa Timur dan Nasional. Fluktuasi pertumbuhan yang terjadi bersifat moderat dan lebih mencerminkan penyesuaian siklus ekonomi dibandingkan kontraksi struktural. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah, sementara sektor industri pengolahan berperan strategis dalam menentukan arah dan kecepatan pertumbuhan PDRB Kabupaten Gresik. Ke depan, tantangan utama pembangunan ekonomi daerah terletak pada upaya meningkatkan kualitas pertumbuhan melalui penguatan investasi produktif, peningkatan nilai tambah industri, serta diversifikasi struktur ekonomi agar pertumbuhan yang dicapai lebih berkelanjutan dan inklusif.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Laju pertumbuhan PDRB per kapita merupakan indikator penting untuk menggambarkan dinamika peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, karena indikator ini mencerminkan pertumbuhan nilai tambah ekonomi yang telah memperhitungkan perubahan jumlah penduduk. Dalam teori pembangunan ekonomi, peningkatan PDRB per kapita menunjukkan kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan output ekonomi yang lebih besar secara rata-rata bagi penduduknya, sekaligus menjadi proksi awal untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi daerah.

Tabel 2.32
Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK Nasional, Jawa Timur dan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

Uraian	Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Nasional	2,52	4,15	3,93	3,95	4,06
Jawa Timur	2,76	4,55	4,19	4,21	4,64
Kabupaten Gresik	2,72	6,23	3,54	3,74	3,9

Sumber: Tabel Dinamis BPS Jawa Timur, 2026
Tahun 2024: Angka Sementara
Tahun 2025: Angka Sangat Sementara

Pada periode 2021–2024, Provinsi Jawa Timur menunjukkan pola pemulihan dan stabilisasi pertumbuhan PDRB per kapita pasca pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan PDRB per kapita Jawa Timur tercatat sebesar 2,76 persen, mencerminkan fase awal pemulihan ekonomi yang masih dibayangi oleh keterbatasan aktivitas produksi dan konsumsi. Seiring dengan pelonggaran pembatasan mobilitas dan membaiknya aktivitas ekonomi, pertumbuhan PDRB per kapita meningkat signifikan pada tahun 2022 menjadi 4,55 persen. Pada tahun 2023 dan 2024, laju pertumbuhan relatif stabil masing-masing sebesar 4,19 persen dan 4,21 persen, yang menunjukkan bahwa perekonomian Jawa Timur telah memasuki fase normalisasi dengan struktur pertumbuhan yang lebih terkendali dan berkelanjutan. Memasuki tahun 2025 laju

pertumbuhan PDRB per kapita Jawa Timur kembali mengalami penguatan sebesar 4,64 persen.

Tabel 2.33
PDRB Per Kapita ADHK Nasional, Jawa Timur dan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

Uraian	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Ribu Rupiah)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Nasional	40.780,75	42.471,45	44.139,37	45.881,06	47.744,98
Jawa Timur	40.779,82	42.635,84	44.423,32	46.295,19	48.443,74
Kabupaten Gresik	76.637,8	81.411,3	84.291,4	87.443,4	90.849,5

Sumber: Tabel Dinamis BPS Jawa Timur, 2026
Tahun 2024: Angka Sementara
Tahun 2025: Angka Sangat Sementara

Kabupaten Gresik sebagai salah satu pusat industri utama di Jawa Timur menunjukkan dinamika pertumbuhan PDRB per kapita yang relatif lebih fluktuatif. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Gresik sebesar 2,72 persen, relatif sejalan dengan capaian Provinsi Jawa Timur. Kondisi ini mengindikasikan bahwa dampak pandemi terhadap perekonomian Gresik hampir setara dengan rata-rata regional, terutama akibat perlambatan sektor industri pengolahan dan perdagangan. Namun, pada tahun 2022 terjadi lonjakan pertumbuhan yang sangat signifikan hingga mencapai 6,23 persen, jauh melampaui pertumbuhan Jawa Timur. Dalam perspektif teori basis ekonomi, lonjakan ini menunjukkan kuatnya peran sektor basis Kabupaten Gresik, khususnya industri pengolahan skala besar, petrokimia, semen, dan aktivitas logistik, yang mengalami pemulihan dan ekspansi lebih cepat seiring meningkatnya permintaan domestik dan global. Memasuki tahun 2023, laju pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Gresik menurun menjadi 3,54 persen dan kembali meningkat secara moderat menjadi 3,75 persen pada tahun 2024 dan menjadi 3,9 persen pada tahun 2025 atau sebesar 90.849,5 ribu rupiah. Perlambatan relatif dibandingkan tahun 2022 mencerminkan

berkurangnya efek *rebound* pasca pandemi serta adanya proses penyesuaian struktural dalam perekonomian daerah. Ketergantungan Gresik yang tinggi terhadap sektor industri besar menjadikan pertumbuhan PDRB per kapita lebih sensitif terhadap fluktuasi harga energi, dinamika pasar global, dan perubahan permintaan industri nasional. Dalam kerangka teori pertumbuhan regional, kondisi ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi yang terkonsentrasi pada sektor kapital-intensif cenderung menghasilkan pertumbuhan yang cepat pada periode tertentu, namun kurang stabil dalam jangka menengah apabila tidak diimbangi dengan diversifikasi ekonomi.

Secara komparatif, meskipun Kabupaten Gresik mampu mencatat pertumbuhan PDRB per kapita yang lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur pada periode pemulihan ekonomi, laju pertumbuhannya cenderung berada di bawah rata-rata provinsi pada periode stabilisasi. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Gresik belum sepenuhnya bersifat inklusif, karena peningkatan nilai tambah ekonomi masih terpusat pada sektor-sektor tertentu dan belum sepenuhnya menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan strategi pembangunan yang tidak hanya berfokus pada akselerasi sektor industri unggulan, tetapi juga pada pengembangan sektor pendukung, UMKM, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, agar pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Gresik dapat lebih stabil, berkelanjutan, dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c. Tingkat Kemiskinan

Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi

kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Tabel di bawah ini memperlihatkan perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin wilayah Gerbangkertosusila, Jawa Timur, dan Nasional tahun 2021 – 2025.

Fenomena angka kemiskinan yang meningkat terjadi hampir di semua wilayah Jawa Timur hingga tahun 2021. Hal ini dikarenakan Pandemi Covid-19 yang menyebabkan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga berdampak menurunnya perekonomian wilayah. Kelompok paling rentan yang terjun di bawah garis kemiskinan ialah pekerja informal.

Tabel 2.34

Capaian Indikator Tingkat Kemiskinan Kabupaten Gresik, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2021-2025

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Gresik	12,42	11,06	10,96	10,32	9,95
2	Jawa Timur	11,40	10,38	10,35	9,56	9,30
3	Nasional	10,14	9,54	9,36	8,57	8,25

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2025

Tingkat kemiskinan Kabupaten Gresik mengalami penurunan secara konsisten dari 12,42% pada tahun 2021 menjadi 11,06% pada tahun 2022, 10,96% pada tahun 2023, 10,32% pada tahun 2024, dan kembali turun menjadi 9,95% pada tahun 2025. Penurunan sebesar 2,47 poin persentase dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta efektivitas program penanggulangan kemiskinan.

Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan kondisi Provinsi Jawa Timur dan nasional, tingkat kemiskinan Kabupaten Gresik masih berada pada tingkat yang lebih tinggi. Pada tahun 2025, tingkat kemiskinan Kabupaten Gresik sebesar 9,95%, sedangkan Jawa Timur sebesar 9,30% dan nasional sebesar 8,25%. Selisih tersebut menunjukkan bahwa percepatan penurunan kemiskinan di

Kabupaten Gresik masih perlu terus diupayakan agar dapat menyamai bahkan lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional.

Tabel 2.35

Tingkat Kemiskinan Gerbangkertasusila Tahun 2021 - 2025

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kabupaten Gresik	12,42	11,06	10,96	10,32	9,95
2	Kabupaten Bangkalan	21,57	21,57	21,57	21,57	18,25
3	Kabupaten Mojokerto	10,62	10,62	10,62	10,62	8,79
4	Kota Mojokerto	6,39	6,39	6,39	6,39	5,05
5	Kota Surabaya	5,02	5,02	5,02	5,02	3,56
6	Kabupaten Sidoarjo	5,59	5,59	5,59	5,59	4,40
7	Kabupaten Lamongan	13,85	13,85	13,85	13,85	12,03

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2025

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2025, tingkat kemiskinan di wilayah Gerbangkertasusila selama periode 2021–2025 menunjukkan tren penurunan pada sebagian besar kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Gresik.

Jika dibandingkan dengan daerah lain di kawasan Gerbangkertasusila, tingkat kemiskinan Kabupaten Gresik berada pada posisi menengah. Angka kemiskinan Gresik masih lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan seperti Kota Surabaya (3,56% pada 2025), Kota Mojokerto (5,05%), dan Kabupaten Sidoarjo (4,40%). Namun, kondisi Gresik lebih baik dibandingkan Kabupaten Bangkalan yang masih mencatat angka kemiskinan cukup tinggi sebesar 18,25% pada tahun 2025 serta Kabupaten Lamongan sebesar 12,03%.

Sementara itu, Kabupaten Mojokerto juga menunjukkan penurunan signifikan menjadi 8,79% pada tahun 2025. Secara umum, wilayah dengan karakteristik perkotaan dan basis industri serta perdagangan yang kuat cenderung memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah dibandingkan wilayah dengan dominasi sektor pertanian dan kepulauan.

Penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik mengindikasikan bahwa intervensi kebijakan daerah, termasuk

perluasan perlindungan sosial, penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan lapangan kerja, memberikan dampak positif. Namun demikian, dengan posisi kemiskinan yang masih berada di atas rata-rata beberapa daerah penyangga perkotaan, diperlukan strategi yang lebih terarah untuk mempercepat penurunan kemiskinan, terutama pada kelompok rentan dan wilayah kantong kemiskinan.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Kondisi ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator fundamental dalam menilai kualitas pembangunan ekonomi suatu daerah, karena secara langsung mencerminkan kemampuan perekonomian dalam menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Gresik, dinamika ketenagakerjaan dalam periode 2021–2025 menunjukkan adanya perbaikan yang cukup signifikan, namun masih menyisakan tantangan struktural apabila dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Timur dan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Gresik menurun dari 8,00 persen pada tahun 2021 menjadi 5,47 persen pada tahun 2025. Penurunan ini sejalan dengan tren nasional yang turun dari 6,49 persen menjadi 4,85 persen, serta tren Jawa Timur yang menurun lebih cepat dari 5,74 persen menjadi 3,88 persen. Meskipun arah pergerakan TPT Kabupaten Gresik bersifat positif, secara konsisten tingkat pengangguran di Gresik masih berada di atas rata-rata provinsi dan nasional, yang menunjukkan bahwa proses pemulihan ketenagakerjaan di Kabupaten Gresik belum sepenuhnya optimal dan inklusif.

Tabel 2.36
Tingkat Pengangguran Terbuka

Uraian	Tingkat Pengangguran Terbuka				
	2021	2022	2023	2024	2025
Nasional	6,49	5,86	5,32	4,91	4,85
Jawa Timur	5,74	5,49	4,88	4,19	3,88
Kabupaten Gresik	8,00	7,84	6,82	6,45	5,47

Sumber: Tabel Dinamis BPS Jawa Timur 2026.

Tingginya TPT Kabupaten Gresik tidak dapat dilepaskan dari karakteristik struktur ekonominya yang sangat didominasi oleh sektor industri pengolahan skala besar. Sebagai salah satu pusat industri utama di Jawa Timur, Gresik memiliki konsentrasi industri semen, petrokimia, pupuk, logam, serta kawasan pergudangan dan logistik yang berorientasi pada pasar regional dan nasional. Dari perspektif teori pembangunan ekonomi, khususnya konsep *jobless growth*, pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sektor padat modal dan berteknologi tinggi cenderung menghasilkan peningkatan output yang besar, tetapi tidak selalu diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja yang sebanding. Kondisi ini relevan dengan realitas ketenagakerjaan di Kabupaten Gresik, di mana pertumbuhan PDRB yang relatif tinggi belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi penciptaan lapangan kerja baru dalam jumlah besar, terutama bagi tenaga kerja lokal dengan tingkat pendidikan menengah dan rendah. Selain itu, tantangan ketenagakerjaan di Kabupaten Gresik juga dipengaruhi oleh adanya ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Kualitas dan relevansi keterampilan tenaga kerja merupakan faktor kunci dalam menentukan peluang kerja. Di Gresik, industri besar cenderung membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian spesifik, pengalaman kerja, serta sertifikasi tertentu, sementara sebagian besar angkatan kerja lokal masih didominasi oleh lulusan pendidikan menengah yang belum sepenuhnya siap memasuki pasar kerja industri modern. Kondisi ini menyebabkan terjadinya *mismatch* tenaga kerja, di mana lowongan kerja tersedia namun tidak dapat diakses secara optimal oleh pencari kerja lokal, sehingga tingkat pengangguran tetap relatif tinggi meskipun aktivitas industri terus berjalan.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, struktur perekonomian Gresik relatif kurang terdiversifikasi. Jawa Timur memiliki komposisi ekonomi yang lebih seimbang antara sektor industri, perdagangan, pertanian, jasa, serta sektor informal dan UMKM yang berperan penting sebagai penyangga ketenagakerjaan. Keberadaan sektor-sektor padat karya dan usaha mikro di Jawa

Timur memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menyerap tenaga kerja, terutama pada masa pemulihan pascapandemi COVID-19. Hal ini menjelaskan mengapa penurunan TPT Jawa Timur berlangsung lebih cepat dan mampu mencapai tingkat yang lebih rendah dibandingkan Kabupaten Gresik. Di sisi lain, ketergantungan Gresik pada sektor formal modern menyebabkan pasar tenaga kerjanya cenderung lebih rigid dan selektif. Dampak pandemi COVID-19 pada periode 2020–2021 juga memberikan tekanan yang relatif lebih besar terhadap ketenagakerjaan di Kabupaten Gresik. Gangguan rantai pasok global, pembatasan aktivitas industri, serta penyesuaian produksi menyebabkan peningkatan pengangguran yang cukup tajam pada tahun 2021. Meskipun pemulihan ekonomi mulai terjadi sejak 2022, terutama melalui kembali beroperasinya industri dan meningkatnya aktivitas konstruksi serta logistik, proses pemulihan ketenagakerjaan di Gresik berlangsung secara bertahap dan belum sepenuhnya merata. Penurunan TPT hingga tahun 2025 menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja kembali berjalan, namun masih bersifat sektoral dan belum mampu menjangkau seluruh kelompok angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Gresik selama tahun 2021-2024 didominasi oleh perempuan, namun pada tahun 2025 dominasi perempuan yang menyumbang tingkat pengangguran di Kabupaten Gresik lebih rendah dari laki-laki. Hal ini mengindikasikan adanya penyerapan tenaga kerja perempuan yang cukup masih selama tahun 2025 di Kabupaten Gresik.

Tabel 2.37
Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin

Uraian	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin (Persen)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Laki-Laki	7,95	6,23	6,42	6,26	5,67
Perempuan	8,08	10,42	7,44	6,75	5,15
Kabupaten Gresik	8,00	7,84	6,82	6,45	5,47

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Gresik, 2026.

Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Gresik menunjukkan dominasi sektor formal modern dengan tingkat upah dan persyaratan masuk yang relatif tinggi, sementara sektor informal dan usaha kecil

yang biasanya berfungsi sebagai penyangga ketenagakerjaan belum berkembang secara optimal. Akibatnya, pencari kerja yang tidak dapat terserap di sektor formal menghadapi keterbatasan pilihan kerja alternatif, yang pada akhirnya tercermin dalam tingkat pengangguran yang masih relatif tinggi dibandingkan wilayah lain. Berbeda dengan kondisi nasional dan Jawa Timur yang memiliki basis sektor informal dan UMKM yang lebih luas, sehingga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menekan TPT secara lebih efektif. Dengan demikian, kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Gresik mencerminkan paradoks pembangunan daerah industri, yaitu pertumbuhan ekonomi yang kuat namun belum sepenuhnya inklusif dari sisi penyerapan tenaga kerja. Tantangan utama yang dihadapi bukan semata-mata pada penciptaan lapangan kerja, melainkan pada peningkatan kualitas dan relevansi tenaga kerja lokal, diversifikasi struktur ekonomi, serta penguatan sektor-sektor padat karya. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, kondisi ini menuntut adanya kebijakan ketenagakerjaan yang lebih terarah, antara lain melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri, pengembangan UMKM dan ekonomi lokal di sekitar kawasan industri, serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan.

e. Gini

Gini merupakan salah satu indikator strategis yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran antar kelompok masyarakat. Indikator ini tidak hanya menunjukkan kondisi kesenjangan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah, tetapi juga menjadi tolok ukur efektivitas pembangunan dalam menciptakan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Nilai Gini berada pada rentang 0 sampai 1, dimana semakin mendekati angka 0 menunjukkan distribusi pendapatan yang semakin merata, sedangkan semakin mendekati angka 1 menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Semakin rendah nilai Gini, semakin merata distribusi pengeluaran

penduduk, yang berarti manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh kelompok masyarakat secara lebih luas. Sebaliknya, nilai yang semakin tinggi menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan cenderung terkonsentrasi pada kelompok tertentu sehingga kesenjangan sosial ekonomi menjadi lebih besar. Indikator ini memiliki peran penting karena tidak hanya menggambarkan keberhasilan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menunjukkan sejauh mana hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, capaian Gini menjadi salah satu ukuran utama dalam menilai kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Perkembangan Gini Kabupaten Gresik selama periode Tahun 2021–2025 menunjukkan pola yang fluktuatif, namun secara umum memperlihatkan kecenderungan menuju kondisi yang lebih baik dibandingkan periode puncak ketimpangan yang terjadi pasca pandemi. Pada Tahun 2021 Gini Kabupaten Gresik tercatat sebesar 0,313. Selanjutnya pada Tahun 2022 meningkat menjadi 0,371 atau naik sebesar 0,058 poin. Peningkatan yang cukup signifikan tersebut menunjukkan terjadinya pelebaran kesenjangan distribusi pendapatan masyarakat. Kondisi ini tidak terlepas dari dampak lanjutan pandemi Covid-19, di mana proses pemulihan ekonomi berlangsung secara tidak merata antar kelompok masyarakat dan sektor usaha. Kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap modal, teknologi, dan peluang usaha relatif lebih cepat pulih dibandingkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pekerjaan dan sumber pendapatan yang stabil. Memasuki Tahun 2023, Gini Kabupaten Gresik mengalami perbaikan dengan menurun menjadi 0,330. Tren perbaikan tersebut berlanjut pada Tahun 2024 yang mencapai 0,322, sebelum kembali mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,327 pada Tahun 2025. Meskipun terjadi kenaikan sebesar 0,005 poin dibandingkan Tahun 2024, capaian Tahun 2025 masih berada dalam rentang target RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 yang ditetapkan sebesar 0,311–0,351. Dengan demikian,

kinerja indikator Gini pada Tahun 2025 dapat dinilai berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Tabel 2.38

Capaian Indikator Gini

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kabupaten Gresik	0,313	0,371	0,330	0,33	0,327
2	Provinsi Jawa Timur	0,374	0,371	0,387	0,372	0,359
3	Nasional	0,384	0,384	0,388	0,379	0,363

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, dan BPS, Profil Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia, berbagai tahun publikasi, 2026

Jika dilihat dari perspektif komparatif, capaian Gini Kabupaten Gresik menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan tingkat provinsi maupun nasional. Pada Tahun 2025, Gini Kabupaten Gresik sebesar 0,327, sedangkan Provinsi Jawa Timur mencapai 0,359 dan nasional sebesar 0,363. Selisih sebesar 0,032 poin terhadap Jawa Timur dan 0,036 poin terhadap nasional menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di Kabupaten Gresik relatif lebih rendah dibandingkan wilayah pembanding. Bahkan selama lima tahun terakhir, Gini Kabupaten Gresik secara konsisten berada di bawah capaian Provinsi Jawa Timur dan nasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran masyarakat di Kabupaten Gresik relatif lebih merata dibandingkan rata-rata wilayah lainnya.

Keunggulan relatif Kabupaten Gresik dalam menjaga tingkat ketimpangan dapat dikaitkan dengan karakteristik struktur ekonominya yang cukup kuat dan beragam. Sebagai salah satu pusat industri utama di Jawa Timur, Kabupaten Gresik memiliki basis ekonomi yang mampu menciptakan kesempatan kerja dalam jumlah besar, baik pada sektor industri pengolahan, perdagangan, logistik, konstruksi, maupun jasa. Aktivitas ekonomi tersebut menghasilkan efek berganda (multiplier effect) yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan usaha pendukung, serta berkembangnya sektor ekonomi lokal. Kondisi ini memungkinkan manfaat pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu tetapi juga mengalir ke berbagai lapisan masyarakat.

Namun demikian, capaian Gini sebesar 0,327 juga menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masih berada pada kategori ketimpangan sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kesenjangan tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat yang perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan pembangunan ke depan. Keberadaan kawasan industri modern dengan produktivitas tinggi di satu sisi telah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, namun di sisi lain masih terdapat kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya mampu mengakses peluang ekonomi yang tersedia akibat keterbatasan pendidikan, kompetensi kerja, kepemilikan aset produktif, maupun akses terhadap sumber pembiayaan usaha. Selain itu, tantangan lain yang perlu diantisipasi adalah potensi meningkatnya kesenjangan akibat transformasi ekonomi dan perkembangan teknologi. Kebutuhan tenaga kerja industri yang semakin mengarah pada keterampilan teknis dan digital berpotensi menciptakan kesenjangan baru apabila peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak mampu mengimbangi perubahan kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan perlu disertai dengan kebijakan pemerataan yang mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, pelatihan kerja, kesempatan usaha, dan lapangan kerja yang layak.

f. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu indikator dalam pengukuran untuk mencapai pembangunan manusia dalam suatu wilaya. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Selain itu, IPM dapat digunakan untuk menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah.

IPM mencakup tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang

dan hidup sehat diukur melalui Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yang merujuk pada jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS mencerminkan rata-rata lama pendidikan formal bagi penduduk usia 25 tahun ke atas, sedangkan HLS menggambarkan lamanya sekolah formal yang diharapkan akan ditempuh oleh anak pada umur tertentu di masa depan. Standar hidup layak tercermin dalam pengeluaran per kapita yang disesuaikan, yang dihitung dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Untuk data capaian IPM kami sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.39

Capaian Indikator Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gresik

Tahun 2021-2025

Indeks Pembangunan Manusia	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Gresik	77.18	77.74	78.44	78.93	79,69
Jawa Timur	72.14	72.75	73.54	74.37	75.35
Nasional	72.29	72.91	73.93	75.02	75.90

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2025

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gresik menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021 IPM Kabupaten Gresik tercatat sebesar 77,18 dan meningkat menjadi 79,69 pada tahun 2025. Dengan demikian, selama lima tahun terakhir terjadi peningkatan sebesar 2,51 poin atau rata-rata tumbuh sekitar 0,81 persen per tahun. Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya capaian pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak yang merupakan komponen pembentuk IPM.

Dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Timur, IPM Kabupaten Gresik secara konsisten berada pada tingkat yang lebih tinggi. Pada tahun 2025, IPM Gresik mencapai 79,69, sedangkan Jawa Timur sebesar 75,35. Selisih sebesar 4,34 poin tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Gresik berada

di atas rata-rata provinsi. Demikian pula jika dibandingkan dengan IPM nasional yang mencapai sekitar 75,90 pada tahun 2025, IPM Kabupaten Gresik masih lebih tinggi sebesar 3,79 poin.

Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Gresik relatif lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional, serta mengalami pertumbuhan yang stabil setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat. selain itu, capaian tersebut juga menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Gresik terus mengalami perbaikan secara berkelanjutan pada seluruh dimensi pembentuk IPM, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Peningkatan yang terjadi mencerminkan adanya perbaikan akses dan kualitas layanan kesehatan, peningkatan capaian pendidikan masyarakat, serta penguatan daya beli masyarakat.

2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

Kesehatan untuk semua merupakan tujuan untuk mencapai masyarakat yang sehat dan sejahtera. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, terdapat beberapa indikator utama yang menjadi tolak ukur, di antaranya adalah Usia Harapan Hidup (UHH), kesehatan ibu dan anak, serta penanganan tuberkulosis. UHH yang tinggi mencerminkan kualitas hidup yang baik. Kesehatan ibu dan anak diukur melalui Angka Kematian Ibu (AKI) dan prevalensi stunting pada balita, yang harus ditekan melalui layanan kesehatan yang optimal dan terjangkau.

a. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah indikator yang mengukur rata-rata umur yang diharapkan dapat dicapai oleh seorang individu dalam suatu wilayah. Angka ini mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat pada suatu waktu, dan biasanya dihitung berdasarkan Angka Kematian menurut umur (Age Specific Death Rate/ASDR). Perhitungan UHH dapat dilakukan melalui catatan registrasi mortalitas yang dikumpulkan selama periode waktu tertentu atau

dengan menggunakan program analisis data seperti MortpakLite. Grafik perkembangan Usia Harapan Hidup di Kabupaten Gresik dari tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.40

Capaian Indikator Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Gresik

Tahun 2021- 2025

No	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
-	Gresik	72,67	72,99	74,24	74,48	74,90

Sumber: satudata.gresikkab.go.id, Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.38 mengenai Capaian Indikator Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Gresik Tahun 2021–2025, terlihat bahwa UHH menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 UHH tercatat sebesar 72,67 tahun, kemudian meningkat menjadi 72,99 tahun pada tahun 2022. Tren kenaikan berlanjut pada tahun 2023 menjadi 74,24 tahun dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 74,48 tahun. Pada tahun 2025, target UHH ditetapkan sebesar 74,57 tahun, sedangkan realisasinya mencapai 74,90 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa capaian tahun 2025 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, dengan selisih sebesar 0,33 tahun.

Secara umum, peningkatan Usia Harapan Hidup ini mencerminkan perbaikan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Gresik, yang dipengaruhi oleh meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan, perbaikan gizi, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat. Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan dalam penguatan layanan kesehatan promotif dan preventif agar tren peningkatan UHH dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

b. Prevalensi Stunting

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun

2005. Data tinggi badan pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010 adalah sebagai berikut:

1. Sangat pendek : Zscore <-3.0
2. Pendek : Zscore ≥- 3.0 s/d Zscore < -2.0.

Indikator ini mengukur persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek yang luas dari kekurangan gizi yang kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk. Stunting pada anak-anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak. Dan bukti menunjukkan bahwa efek dari stunting pada usia muda, khususnya pada perkembangan otak, sulit untuk memperbaikinya pada usia lanjut walaupun jika anak menerima gizi yang tepat. Selain itu anak yang mengalami stunting beresiko lebih besar menderita penyakit menular dan tidak menular pada usia dewasa seperti jantung, diabetes, dan penyakit pembuluh darah. Oleh karena itu. indikator ini menunjukan bahwa betapa pentingnya memberikan gizi yang cukup untuk anak-anak.

Tabel 2.41

Capaian Indikator Prevalensi Stunting Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

No	Prevalensi Stunting	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
-	Gresik	23	10,7	15,4	8,14	8,07

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas mengenai Capaian Indikator Prevalensi Stunting Kabupaten Gresik Tahun 2021–2025, terlihat bahwa angka prevalensi stunting mengalami fluktuasi namun menunjukkan tren penurunan secara umum berdasarkan hasil

publikasi pada Laporan Laporan program gizi (Sigizi). Pada tahun 2021 prevalensi stunting tercatat sebesar 23 persen, kemudian menurun signifikan pada tahun 2022 menjadi 10,7 persen. Namun pada tahun 2023 terjadi kenaikan kembali menjadi 15,4 persen, sebelum akhirnya turun cukup tajam pada tahun 2024 menjadi 8,14 persen.

Pada tahun 2025, target prevalensi stunting ditetapkan sebesar 11,03 persen, sedangkan realisasinya tercapai sebesar 8,07 persen. Hal ini menunjukkan bahwa capaian tahun 2025 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, dengan selisih sebesar 2,96 persen lebih rendah dari target.

Secara umum, kondisi ini mencerminkan adanya efektivitas intervensi penanganan stunting yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, meskipun masih terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi penurunan angka dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, diperlukan penguatan upaya pencegahan dan penanganan stunting secara berkelanjutan melalui intervensi spesifik dan sensitif, serta sinergi lintas sektor agar tren penurunan dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

c. Insidensi Tuberkulosis

Insidensi Tuberkulosis merupakan indikator yang menggambarkan jumlah kasus baru Tuberkulosis (TB) yang ditemukan dalam satu tahun per 100.000 penduduk. Indikator ini mencerminkan tingkat penularan penyakit TB di masyarakat sekaligus menjadi tolok ukur efektivitas upaya pengendalian penyakit menular di daerah.

Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan penanganan berkelanjutan. Tingginya insidensi menunjukkan masih adanya penularan aktif di masyarakat, sedangkan penurunan insidensi

mengindikasikan keberhasilan program pencegahan dan pengendalian TB.

Tabel 2.42

Capaian Indikator Insidensi Tuberkulosis Kabupaten Gresik

Tahun 2021-2025

No	Insidensi Tuberkulosis	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
-	Gresik	-	-	-	265	238,87

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025

Dalam rangka menekan insidensi Tuberkulosis, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui perangkat daerah terkait telah melaksanakan berbagai strategi, antara lain peningkatan penemuan kasus secara aktif (active case finding), penguatan layanan diagnosis dan pengobatan sesuai standar DOTS, peningkatan pelacakan kontak serumah, serta edukasi masyarakat terkait pencegahan dan kepatuhan minum obat. Selain itu, penguatan jejaring layanan kesehatan dan kolaborasi lintas sektor juga terus dioptimalkan guna memastikan pengendalian TB berjalan secara komprehensif dan berkelanjutan.

d. Persentase penduduk yang menjadi peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan kepesertaan mandiri.

Persentase penduduk yang menjadi peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan kepesertaan mandiri merupakan indikator yang menggambarkan proporsi masyarakat yang secara aktif terdaftar dan membayar iuran secara mandiri dalam program JKN. Indikator ini mencerminkan tingkat kesadaran, kemampuan, dan partisipasi masyarakat dalam menjamin perlindungan kesehatan bagi dirinya dan keluarganya.

Kepesertaan mandiri dalam JKN menunjukkan kemandirian masyarakat dalam mengakses jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan tanpa bergantung pada skema bantuan pemerintah. Semakin tinggi persentase kepesertaan aktif mandiri, semakin baik tingkat literasi dan komitmen masyarakat terhadap perlindungan sosial di bidang kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Gresik terus mendorong peningkatan kepesertaan aktif JKN melalui sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, serta koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemangku kepentingan terkait. Upaya tersebut juga diarahkan untuk menekan angka kepesertaan nonaktif akibat tunggakan iuran, sehingga cakupan perlindungan kesehatan masyarakat dapat terjaga secara berkelanjutan.

Tabel 2.43
Capaian Indikator Persentase penduduk yang menjadi peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan kepesertaan mandiri Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025.

No	Persentase penduduk yang menjadi peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan kepesertaan mandiri	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
-	Gresik	-	-	-	-	38,22

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025

e. Angka Kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)

Keberhasilan program esehatan ibu dapat dinilai melalui indicator utama Angka Kematian Ibu (AKI). Kematian ibu dalam esehatan ini didefinisikan sebagai semua kematian selama periode kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan atau kesehatan. Angka Kematian Ibu (AKI) eseha semua kematian dalam ruang lingkup tersebut di setiap 100.000 kelahiran hidup. Selain untuk menilai program esehatan ibu, esehatan ini juga mampu menilai derajat Kesehatan esehatan, karena sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan esehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas.

Tabel 2.44
Capaian Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

No	Angka Kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Gresik	316,37	94,18	79,5	77,59	70,21

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2025

Pada tahun 2021, AKI tercatat sebesar 316,37, yang kemudian mengalami penurunan drastis pada tahun 2022 menjadi 94,18. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan layanan kesehatan ibu, khususnya dalam peningkatan akses dan kualitas pelayanan antenatal, persalinan oleh tenaga kesehatan, serta penguatan sistem rujukan maternal.

Tren positif tersebut terus berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian 79,5, kemudian turun kembali pada tahun 2024 menjadi 77,59, dan pada tahun 2025 mencapai 70,21 per 100.000 kelahiran hidup. Secara keseluruhan, dalam kurun waktu lima tahun terjadi penurunan sebesar 246,16 poin, atau sekitar 77,8% dibandingkan tahun 2021.

Capaian ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menurunkan risiko kematian ibu melalui penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, peningkatan deteksi dini faktor risiko kehamilan, serta optimalisasi kolaborasi lintas sektor.

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang merata

a. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator yang menggambarkan jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Indikator ini menjadi salah satu komponen penting dalam pembentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia suatu daerah.

Tabel 2.45
Capaian Indikator Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Gresik
Tahun 2021 – 2025

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Rata-rata Lama Sekolah	9,68	9,77	9,90	10,03	10,13

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2025

Berdasarkan data tahun 2021–2025, capaian RLS Kabupaten Gresik menunjukkan tren yang terus meningkat. Pada tahun 2021 RLS tercatat sebesar 9,68 tahun dan meningkat menjadi 10,13 tahun pada tahun 2025. Dengan demikian, selama periode lima tahun terjadi peningkatan sebesar 0,45 tahun atau sekitar 4,65 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan tingkat pendidikan penduduk serta semakin meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan formal.

Peningkatan RLS tersebut mengindikasikan bahwa secara rata-rata penduduk Kabupaten Gresik telah menempuh pendidikan hingga jenjang kelas X atau tahun pertama pendidikan menengah atas. Capaian ini didukung oleh berbagai program pembangunan pendidikan, antara lain peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah, pemberian bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, penguatan pendidikan kesetaraan, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.

Meskipun menunjukkan perkembangan positif, masih diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan capaian RLS agar masyarakat dapat menyelesaikan pendidikan minimal 12 tahun. Tantangan yang masih dihadapi meliputi potensi putus sekolah, kesenjangan akses pendidikan antarwilayah, serta keterbatasan kesempatan melanjutkan pendidikan pada kelompok masyarakat tertentu.

Peningkatan RLS perlu didorong melalui strategi penguatan wajib belajar 12 tahun, perluasan akses pendidikan menengah dan vokasi, peningkatan kualitas layanan pendidikan, penguatan pendidikan

nonformal dan kesetaraan, serta pemberian bantuan pendidikan yang tepat sasaran. Dengan meningkatnya RLS, diharapkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Gresik semakin baik sehingga mampu mendukung peningkatan daya saing daerah, produktivitas tenaga kerja, dan percepatan pencapaian target pembangunan daerah secara berkelanjutan.

b. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan salah satu indikator penting dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM). HLS menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak usia 7 tahun ke atas di suatu daerah, dengan asumsi pola partisipasi sekolah saat ini tetap. Indikator ini menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan sektor pendidikan dalam meningkatkan akses dan kesempatan belajar masyarakat.

Tabel 2.46

Capaian Indikator Harapan Lama Sekolah Kabupaten Gresik
Tahun 2021 - 2025

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Harapan Lama Sekolah (Persen)	13,77	13,96	13,97	13,97	13,99

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2025

Berdasarkan tabel diatas, capaian Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Gresik pada Tahun 2025 adalah sebesar 13,99 tahun, mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2024 yang sebesar 13,98 tahun. Capaian tersebut menunjukkan bahwa rata- rata anak usia sekolah memiliki peluang menempuh pendidikan hingga jenjang Perguruan Tinggi. Target Harapan Lama Sekolah dalam RPJMD Tahun 2025 ditetapkan sebesar 13,99 tahun. Realisasi pada Tahun 2025 mencapai 13,99 tahun atau sebesar 100 % dari target yang telah ditetapkan, hal ini menunjukkan adanya peningkatan akses dan partisipasi pendidikan.

Untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah, Pemerintah Daerah telah melaksanakan beberapa program, antara lain: Peningkatan akses

pendidikan dasar dan menengah, Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu, Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, Program wajib belajar 12 tahun, Penguatan pendidikan nonformal dan kesetaraan (Paket A, B, dan C), Kerja sama dengan berbagai pihak dalam mendukung keberlanjutan pendidikan. Secara umum capaian Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Gresik menunjukkan tren yang naik setiap tahunnya. Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan akses pendidikan guna mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

c. Rata-rata APM Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Jenjang SD dan SMP di Wilayah Rentan.

Rata-rata Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan terhadap Laki-Laki pada jenjang SD dan SMP di wilayah rentan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesetaraan akses pendidikan antara peserta didik perempuan dan laki-laki. ini diperoleh dari perbandingan APM perempuan terhadap APM laki-laki pada jenjang pendidikan tertentu. Nilai yang mendekati 100 menunjukkan bahwa akses pendidikan antara perempuan dan laki-laki relatif setara, sedangkan nilai di bawah atau di atas 100 menunjukkan adanya kesenjangan partisipasi pendidikan berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 2.47

Capaian Indikator Rata-rata APM Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Jenjang SD dan SMP di Wilayah Rentan Kabupaten Gresik
Tahun 2021 – 2025

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Rata-rata APM Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Jenjang SD dan SMP di Wilayah Rentan	-	-	-	93,07	93,84

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa Rata-rata APM Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Jenjang SD dan SMP di Wilayah Rentan Kabupaten Gresik tahun 2024 sebesar 93,07 mengalami kenaikan 0,77 persen di tahun 2025 sebesar 93,84. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar bagi anak perempuan di wilayah rentan telah terjaga dengan baik melalui berbagai program perluasan akses pendidikan, bantuan biaya pendidikan, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bagi seluruh anak tanpa membedakan jenis kelamin.

Dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan gender, Pemerintah Kabupaten Gresik perlu terus memperkuat kebijakan peningkatan akses pendidikan bagi kelompok rentan melalui pemberian bantuan pendidikan, pencegahan putus sekolah, penguatan pendidikan kesetaraan, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan di wilayah yang memiliki risiko ketertinggalan. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga kesetaraan akses pendidikan antara perempuan dan laki-laki sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Gresik secara berkelanjutan.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

a. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Penerima Upah

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Penerima Upah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pekerja penerima upah yang telah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan dengan jumlah total pekerja penerima upah yang ada di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai yang dihasilkan, semakin besar pula proporsi pekerja formal yang telah memperoleh perlindungan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Indikator ini memiliki peran strategis dalam menilai keberhasilan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kepesertaan pekerja penerima upah pada program jaminan sosial ketenagakerjaan memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko sosial

ekonomi yang dapat terjadi selama masa kerja, seperti kecelakaan kerja, kematian, kehilangan pekerjaan, maupun risiko pada saat memasuki usia pensiun. Dengan demikian, peningkatan ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerjanya, tetapi juga menunjukkan semakin kuatnya sistem perlindungan tenaga kerja di daerah. Tingginya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Penerima Upah menjadi indikator penting dalam mewujudkan ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan. Pekerja yang terlindungi oleh program jaminan sosial cenderung memiliki rasa aman yang lebih baik dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas, loyalitas, dan kesejahteraan tenaga kerja. Di sisi lain, perusahaan juga memperoleh manfaat melalui terciptanya hubungan industrial yang lebih harmonis dan berkurangnya potensi kerugian akibat risiko ketenagakerjaan yang tidak tertangani.

Tabel 2.48
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Penerima Upah Kabupaten Gresik

Uraian	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Penerima Upah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Gresik	-	-	-	47,64	47,64

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, Tahun 2026

Jaminan sosial penerima upah pada tahun 2024 dan tahun 2025 memiliki capaian yang sama yakni sebesar 47,64 persen. Perkembangan jaminan sosial ketenagakerjaan penerima upah dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pertumbuhan sektor formal, tingkat kepatuhan pemberi kerja dalam mendaftarkan pekeranya, efektivitas pengawasan ketenagakerjaan, serta intensitas sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, asosiasi pengusaha, dan organisasi pekerja menjadi faktor penting dalam memperluas cakupan kepesertaan, khususnya pada perusahaan skala kecil dan menengah yang masih memiliki tingkat kepatuhan yang beragam. Oleh karena itu, peningkatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Penerima Upah perlu terus didorong melalui penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi pemanfaatan data ketenagakerjaan, peningkatan pengawasan kepatuhan perusahaan, serta integrasi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan

dengan berbagai layanan perizinan dan program pembangunan daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat mempercepat terwujudnya perlindungan sosial yang menyeluruh bagi seluruh pekerja penerima upah sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pembangunan ketenagakerjaan secara berkelanjutan.

b. Persentase Partisipasi Perlindungan Sosial oleh Keluarga Miskin

Persentase partisipasi perlindungan sosial bagi keluarga miskin adalah indikator penting untuk menilai efektivitas program dan memastikan bahwa keluarga miskin mendapatkan manfaat yang mereka butuhkan. Pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi dan penggunaan data yang akurat dapat membantu perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi adalah sebagaimana berikut:

1. Program Perlindungan Sosial: Jenis program yang tersedia, seperti bantuan sosial tunai (Program Keluarga Harapan, PKH), bantuan pangan, subsidi beras, dan jaminan kesehatan, serta bagaimana program tersebut dirancang dan diimplementasikan;

2. Akses: Kemudahan akses keluarga miskin terhadap program, termasuk informasi, persyaratan, dan proses pendaftaran;

3. Kondisi Geografis: Wilayah tempat tinggal keluarga miskin dapat mempengaruhi akses mereka terhadap program, terutama di daerah terpencil atau sulit dijangkau;

4. Kondisi Sosial Ekonomi: Tingkat pendidikan, pekerjaan, dan kondisi sosial ekonomi keluarga miskin juga dapat mempengaruhi partisipasi mereka dalam program; dan

5. Kualitas Data: Akurasi dan kelengkapan data mengenai keluarga miskin dapat mempengaruhi identifikasi penerima manfaat dan memastikan bahwa program tepat sasaran.

Pentingnya persentase partisipasi adalah untuk:

1. Mengukur Efektivitas: Persentase partisipasi yang rendah dapat menunjukkan bahwa program perlindungan sosial belum efektif dalam mencapai target sasaran dan memerlukan evaluasi serta perbaikan;

2. Identifikasi Kesenjangan: Persentase partisipasi yang berbeda antar kelompok keluarga miskin dapat membantu mengidentifikasi kesenjangan dalam akses dan manfaat program; dan

3. Penyusunan Kebijakan: Data persentase partisipasi dapat digunakan untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengurangi kemiskinan dan kerentanan.

Persentase Perlindungan Sosial Warga Miskin merupakan jumlah penerima bantuan asistensi sosial berbasis keluarga dan siklus hidup yang komprehensif dalam mewujudkan kemandirian yang mensejahterakan dibanding dengan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gresik yang masuk DTKS.

Tabel 2.49

Capaian Indikator Persentase partisipasi perlindungan sosial bagi keluarga miskin Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

No	Persentase partisipasi perlindungan sosial bagi keluarga miskin	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
-	Gresik	89,97	90,66	111.12	118.96	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Persentase partisipasi perlindungan sosial bagi keluarga miskin di Kabupaten Gresik selama periode 2021–2024 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021 capaian sebesar 89,97%, meningkat menjadi 90,66% pada tahun 2022. Pada tahun 2023 terjadi lonjakan capaian menjadi 111,12%, dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 118,96%. Capaian yang melebihi 100% tersebut dikarenakan satu orang warga miskin bisa mendapatkan lebih dari satu layanan jaminan sosial (numerator) sementara yang menjadi pembandingnya (denominator) adalah seluruh warga miskin yang ada di DTKS. Contohnya satu orang Penyandang

Disabilitas miskin bisa mendapatkan jaminan sosial berupa PBI-JK (BPJS), BLT dan alat bantu bagi disabilitas..

Pada tahun 2025, target indikator ditetapkan pada rentang 80–95%, dengan realisasi sebesar 100%. Dengan demikian, capaian tahun 2025 telah melampaui batas atas target yang ditetapkan, yang menunjukkan komitmen dan kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik dalam memastikan keluarga miskin memperoleh akses terhadap program perlindungan sosial.

Secara umum, capaian ini mencerminkan semakin luasnya jangkauan perlindungan sosial serta meningkatnya efektivitas koordinasi dan validasi data penerima manfaat. Ke depan, diperlukan penguatan akurasi basis data dan pengawasan penyaluran bantuan agar program perlindungan sosial tetap tepat sasaran dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Gresik.

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

a. Indeks Kesalehan Sosial

Dalam kehidupan sosial, setiap individu secara alami terlibat dalam berbagai interaksi dengan orang lain, lingkungan, serta aspek spiritual. Hubungan antara manusia dan Tuhan diwujudkan melalui praktik ibadah yang menunjukkan tingkat kepatuhan seseorang terhadap ajaran agamanya. Selain menjalankan kewajiban spiritual, individu juga harus berinteraksi dengan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Interaksi ini sebaiknya dilandasi dengan nilai-nilai agama yang diyakini, seperti sikap saling peduli, tolong-menolong, menghargai perbedaan, serta menjaga harmoni dan ketertiban sosial. Konsep yang menggambarkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial ini disebut kesalehan sosial. Kesalehan sosial merupakan bagian integral dari kehidupan bermasyarakat yang tidak hanya mencerminkan ketaatan seseorang terhadap ajaran agama, tetapi juga bagaimana nilai-nilai agama diterapkan dalam interaksi sosialnya.

Tabel 2.50

Capaian Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Kesalehan Sosial	76,94	79,16	80,32	82,43	81,10

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tahun 2025

Indeks Kesalehan Sosial berfokus pada perilaku dan praktik sosial keagamaan yang nyata di masyarakat yang mana mengukur sejauh mana seseorang/kelompok mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial. Beberapa indikator dalam penilaian indeks Kesalehan Sosial diantaranya (1) Kepedulian pada tetangga dan masyarakat; (2) Gotong royong, solidaritas sosial; (3) Toleransi terhadap perbedaan agama/suku; (4) Partisipasi dalam kegiatan sosial keagamaan. Jadi indeks ini lebih menilai aspek praktik/perilaku.

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kesalehan Sosial (IKS) Kabupaten Gresik Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesalehan sosial masyarakat secara umum berada pada kategori tinggi. Capaian indeks yang berada pada angka di atas delapan puluh menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Gresik telah memiliki fondasi sosial dan spiritual yang relatif kuat dalam kehidupan bermasyarakat. Kesalehan sosial tidak hanya tercermin dalam praktik ritual keagamaan, tetapi juga dalam bentuk solidaritas sosial, relasi antar manusia, etika dan budi pekerti, kepedulian terhadap lingkungan, serta pengalaman spiritual yang mendalam.

Namun demikian, adanya beberapa dimensi yang relatif lebih rendah dibandingkan dimensi lainnya, seperti kepatuhan terhadap pemerintah, etika digital, dan pelestarian budaya. Hal ini mengindikasikan bahwa internalisasi nilai kesalehan sosial masih lebih dominan pada aspek interpersonal dan spiritual dibandingkan aspek struktural dan kontekstual. Kesadaran hukum, literasi digital, serta keterlibatan aktif dalam pelestarian budaya lokal masih memerlukan penguatan agar kesalehan sosial dapat terwujud secara lebih komprehensif.

Hasil dari perhitungan Indeks Kesalehan Sosial ini menunjukkan perlunya upaya Pemerintah Kabupaten Gresik dalam meningkatkan nilai indikator Indeks Kesalehan sosial yang tinggi diantaranya:

1. Penguatan Solidaritas Sosial Berbasis Komunitas
2. Integrasi Nilai Keagamaan dengan Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Publik
3. Penguatan Literasi dan Etika Digital
4. Revitalisasi Pelestarian Budaya Lokal
5. Penguatan Habituasi dalam Lingkungan Keluarga
6. Transformasi Pengetahuan Menjadi Praktik Sosial Nyata
7. Pendekatan Kebijakan Berbasis Wilayah (Area-Based Policy)
8. Penguatan Dialog dan Kolaborasi Lintas Agama.

b. Indeks Harmoni

Indeks Harmoni merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk menggambarkan tingkat keharmonisan kehidupan masyarakat dalam suatu wilayah. Indeks ini menekankan pada bagaimana individu maupun kelompok mampu hidup berdampingan secara damai, saling menghargai, serta bekerja sama meskipun berada dalam keberagaman suku, agama, budaya, maupun latar belakang sosial. Kehidupan yang harmonis tercermin dari adanya toleransi yang tinggi, kerukunan sosial yang terjaga, serta kemampuan menyelesaikan perbedaan atau konflik tanpa menimbulkan pertentangan yang merugikan.

Selain itu, Indeks Harmoni juga mencerminkan adanya rasa keadilan dan inklusivitas, di mana setiap orang memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan pembangunan. Dengan demikian, Indeks Harmoni tidak hanya menjadi cerminan kondisi hubungan antarindividu dan kelompok, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat evaluasi sejauh mana masyarakat memiliki ketahanan sosial serta dukungan terhadap pembangunan yang damai, adil, dan berkelanjutan.

Nilai Indeks Harmoni Kabupaten Gresik Tahun 2025 mencapai 3,56 yang maknanya masuk dalam kategori Indeks Harmoni Tinggi (Inklusif) yang menunjukkan kohesi sosial relatif baik, meski variasi

antarkawasan tetap menuntut penguatan berkelanjutan agar stabilitas sosial tetap terjaga. Terdapat tiga simpul perbaikan yang harus dipacu diantaranya keadilan kesejahteraan, mutu pendidikan (kualitas tenaga pendidik), dan akuntabilitas layanan kewarganegaraan.

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Keseteraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

a. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan indikator komposit yang mengukur capaian pembangunan di bidang perlindungan anak, meliputi aspek pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak, lingkungan keluarga dan pengasuhan, kesehatan, pendidikan, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Indeks ini menjadi tolok ukur komitmen dan efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Tabel 2.51
Capaian Indikator Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Gresik
Tahun 2021-2025

No	Indeks Perlindungan Anak	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
-	Gresik	67,07	71,85	71,57	81,39	81,39*

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.49 mengenai Capaian Indikator Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Gresik Tahun 2021–2025, terlihat bahwa capaian indeks menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 nilai indeks tercatat sebesar 67,07, kemudian meningkat menjadi 71,85 pada tahun 2022. Pada tahun 2023 capaian relatif stabil di angka 71,57, sebelum mengalami lonjakan cukup tinggi pada tahun 2024 menjadi 81,39.

Pada tahun 2025, target Indeks Perlindungan Anak ditetapkan pada kisaran 71,62–72,00, sedangkan realisasinya mencapai 81,39. Hal ini menunjukkan bahwa capaian tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan dan mampu mempertahankan peningkatan signifikan sebagaimana capaian tahun sebelumnya.

Secara umum, peningkatan ini mencerminkan penguatan komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak, melalui penguatan regulasi, kelembagaan Gugus Tugas KLA, peningkatan layanan pengaduan dan pendampingan kasus, serta perluasan akses anak terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga konsistensi capaian, memperkuat sinergi lintas sektor, serta memastikan seluruh anak di Kabupaten Gresik memperoleh perlindungan yang optimal dan berkelanjutan.

Upaya preventif dan responsif juga terus ditingkatkan melalui sosialisasi pencegahan perkawinan anak, penguatan pola asuh keluarga, pembentukan forum anak, serta penyediaan layanan ramah anak di fasilitas publik. Capaian ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

b. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan indikator komposit yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mengukur tingkat kualitas pembangunan keluarga di suatu wilayah. Indeks ini menggambarkan kondisi keluarga dari aspek ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia. Pengukuran iBangga disusun berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu:

1. Dimensi Ketenteraman, yang mencerminkan kondisi keluarga yang harmonis, aman, dan terbebas dari kekerasan.
2. Dimensi Kemandirian, yang menggambarkan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sosial.
3. Dimensi Kebahagiaan, yang menunjukkan tingkat kepuasan dan kesejahteraan subjektif keluarga.

Tabel 2.52
Capaian Indikator Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Gresik
Tahun 2021-2025

No	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
-	Gresik	54,44	60,09	64,81	65,72	76,9

Sumber: Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak, Tahun 2025

Berdasarkan data capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melalui Pendataan Keluarga dan Sistem Informasi Keluarga (SIGA), nilai iBangga Kabupaten Gresik menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama periode 2021–2025.

Pada tahun 2021, nilai iBangga tercatat sebesar 54,44, kemudian meningkat menjadi 60,09 pada tahun 2022 dan kembali naik menjadi 64,81 pada tahun 2023. Peningkatan berlanjut pada tahun 2024 menjadi 65,72, dan mengalami lonjakan cukup tinggi pada tahun 2025 menjadi 76,9.

Secara kumulatif, selama lima tahun terakhir terjadi kenaikan sebesar 22,46 poin, yang menunjukkan adanya perbaikan kualitas pembangunan keluarga di Kabupaten Gresik. Kenaikan paling signifikan terjadi pada periode 2024–2025, yang mengindikasikan adanya penguatan intervensi program pembangunan keluarga serta peningkatan kualitas pendataan keluarga.

Capaian ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan Program Bangga Kencana, optimalisasi pembinaan kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL), serta integrasi lintas sektor dalam mendukung ketahanan keluarga.

Dengan tren yang terus meningkat, iBangga Kabupaten Gresik menunjukkan arah pembangunan keluarga yang semakin berkualitas. Namun demikian, konsistensi pemutakhiran data keluarga serta penguatan intervensi pada keluarga rentan tetap menjadi faktor kunci

dalam menjaga keberlanjutan peningkatan indeks pada tahun-tahun mendatang.

c. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah indikator yang mengukur tingkat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam pencapaian pembangunan manusia pada tiga dimensi utama, yaitu:

1. Kesehatan reproduksi, yang diukur melalui:
   - Angka Kematian Ibu (AKI);
   - Angka Kelahiran Remaja.
2. Pemberdayaan, yang diukur melalui:
   - Persentase keterwakilan perempuan dan laki-laki di parlemen;
   - Proporsi penduduk usia 25 tahun ke atas yang berpendidikan minimal SMA.
3. Partisipasi ekonomi, yang diukur melalui:

   Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan dan laki-laki.

Tabel 2.53
Capaian Indikator Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Gresik
Tahun 2021-2025.

No	Indeks Ketimpangan Gender	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
-	Gresik	0,404	0,407	0,409	0,335	0,310

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2026

Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Gresik selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Pada tahun 2021 nilai IKG tercatat sebesar 0,404, kemudian mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2022 menjadi 0,407, dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 0,409. Kenaikan nilai tersebut menunjukkan bahwa pada periode 2021–2023 ketimpangan gender di Kabupaten Gresik cenderung meningkat, meskipun dalam skala yang relatif kecil.

Namun demikian, pada tahun 2024 dan 2025 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 0,335 dan 0,310, yang berarti terjadi perbaikan kondisi ketimpangan gender. Penurunan ini mengindikasikan adanya peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam aspek kesehatan reproduksi, pemberdayaan (pendidikan dan keterwakilan), serta partisipasi ekonomi. Semakin kecil nilai IKG semakin baik, hal ini menunjukkan bahwa upaya pengarusutamaan gender dan program pemberdayaan perempuan di Kabupaten Gresik

d. Persentase Pemuda Berprestasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda merupakan aset strategis pembangunan bangsa yang memiliki peran penting sebagai agen perubahan, penggerak inovasi, serta penjaga keberlanjutan nilai-nilai kebangsaan. Dalam konteks pembangunan daerah, pemuda berprestasi di bidang kepemudaan dan olahraga tidak hanya menjadi simbol keberhasilan pembinaan, tetapi juga menjadi inspirasi dan teladan bagi generasi muda lainnya dalam membangun karakter, daya saing, serta semangat kebersamaan.

Bidang kepemudaan dan olahraga memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan sumber daya manusia yang unggul, sehat jasmani dan rohani, berkarakter kuat, serta berorientasi pada prestasi dan sportivitas. Prestasi yang diraih oleh pemuda, baik pada tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional, merupakan hasil dari proses pembinaan yang terencana, berkelanjutan, dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, dan pemangku kepentingan terkait.

Seiring dengan dinamika tantangan global dan perkembangan sosial budaya, diperlukan perencanaan program yang komprehensif dan adaptif dalam rangka menjaring, membina, serta mengembangkan pemuda berprestasi. Perencanaan ini diarahkan tidak hanya pada pencapaian prestasi semata, tetapi juga pada penguatan karakter kepemimpinan, integritas, kreativitas, serta kepedulian sosial pemuda sebagai bagian dari pembangunan manusia seutuhnya.

Program pengembangan pemuda berprestasi bidang kepemudaan dan olahraga disusun sebagai upaya strategis untuk menciptakan ekosistem pembinaan yang kondusif, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui program ini diharapkan tercipta mekanisme seleksi yang objektif, pembinaan yang terarah, serta sistem penghargaan dan apresiasi yang adil dan transparan, sehingga mampu memotivasi pemuda untuk terus berprestasi dan berkontribusi positif bagi daerah.

Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga (Dinas Parekrafbudpora) memberikan pembinaan kepada semua pemuda yang bertujuan meningkatkan pemberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah. Sasaran urusan kepemudaan dan olahraga "Meningkatkan Prestasi Pemuda di Bidang Kepemudaan dan Olahraga" dinilai berdasarkan persentase pemuda berprestasi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.54

Indikator Sasaran Kepemudaan dan Olahraga Kabuapaten Gresik

Tahun 2021-2025

INDIKATOR	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase pemuda berprestasi dibidang kepemudaan dan olahraga	41%	39,98%	42,91%	42,98%	44,38%

Sumber: Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Gresik 2026

Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik, indikator persentase pemuda berprestasi di bidang kepemudaan dan olahraga selama periode 2021–2025 menunjukkan kecenderungan meningkat dan mencerminkan perkembangan kualitas sumber daya manusia daerah, khususnya generasi muda. Pada tahun 2021 capaian indikator tercatat sebesar 41 persen. Selanjutnya pada tahun 2022 mengalami sedikit penurunan menjadi 39,98 persen atau turun 1,02 poin persentase. Namun demikian, pada tahun 2023 capaian kembali meningkat menjadi 42,91 persen, kemudian naik menjadi 42,98 persen

pada tahun 2024, dan mencapai 44,38 persen pada tahun 2025 sebagai capaian tertinggi selama periode pengamatan.

Peningkatan persentase pemuda berprestasi tersebut menunjukkan semakin baiknya efektivitas pembinaan kepemudaan dan olahraga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, baik melalui pengembangan bakat, peningkatan kompetensi, pembinaan atlet dan organisasi kepemudaan, maupun fasilitasi keikutsertaan pemuda dalam berbagai ajang kompetisi dan penghargaan. Kondisi ini juga mengindikasikan meningkatnya partisipasi dan kapasitas pemuda dalam menghasilkan prestasi di bidang kepemudaan maupun olahraga.

Capaian tersebut menggambarkan adanya peningkatan kualitas pembangunan manusia, khususnya pada dimensi pengembangan potensi generasi muda. Semakin tingginya persentase pemuda berprestasi menjadi salah satu indikator positif yang menunjukkan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, daya saing daerah, serta keberhasilan pembangunan sosial yang mendukung terwujudnya masyarakat Kabupaten Gresik yang produktif, kreatif, sehat, dan berdaya saing. Oleh karena itu, keberlanjutan program pembinaan kepemudaan dan olahraga perlu terus diperkuat guna menjaga tren peningkatan prestasi dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel 2.55
Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik
Tahun 2021-2025

INDIKATOR SASARAN	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Pemuda yang Meraih Penghargaan	39,61%	33%	27,78%	41,67%	35%
Persentase Cabor Berprestasi	96,55%	96%	87,88%	84,21%	85%
Persentase Sarana Prasarana Keolahragaan yang Terpelihara	100,00%	100%	100,00%	100%	100%
Persentase Partisipasi Anggota Pramuka	59,46%	96,63%	96,51%	94,02%	96,39%
Jumlah Organisasi Pemuda Aktif	-	36	36	36	36
Jumlah Wirausaha Muda	-	-	-	40.287	25.644
Jumlah Atlet Berprestasi	22	515	494	870	600
Jumlah Prestasi Olahraga	22	515	494	870	600

Sumber: Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Gresik 2026.

Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik, kondisi pembangunan kepemudaan dan olahraga sebagai bagian dari aspek kesejahteraan masyarakat menunjukkan capaian yang relatif baik meskipun beberapa indikator mengalami fluktuasi selama periode 2021–2025. Hal ini mencerminkan upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, partisipasi pemuda, serta prestasi olahraga daerah.

Pada indikator persentase pemuda yang meraih penghargaan, capaian tahun 2021 sebesar 39,61 persen, kemudian menurun menjadi 33 persen pada tahun 2022 dan 27,78 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan menjadi 41,67 persen sebelum kembali menurun menjadi 35 persen pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prestasi kepemudaan masih cukup baik meskipun dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dan kompetisi yang diikuti setiap tahunnya.

Indikator persentase cabang olahraga (cabor) berprestasi menunjukkan capaian yang masih tinggi meskipun cenderung menurun. Pada tahun 2021 tercatat sebesar 96,55 persen, menjadi 96 persen pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 87,88 persen pada tahun 2023 dan 84,21 persen pada tahun 2024. Pada tahun 2025 capaian kembali meningkat menjadi 85 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar cabang olahraga di Kabupaten Gresik masih mampu menghasilkan prestasi dalam berbagai kejuaraan olahraga.

Pada indikator persentase sarana dan prasarana keolahragaan yang terpelihara, capaian konsisten sebesar 100 persen selama periode 2021–2025. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan fasilitas olahraga guna mendukung aktivitas olahraga masyarakat maupun pembinaan atlet berprestasi.

Sementara itu, persentase partisipasi anggota Pramuka menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2021 sebesar 59,46 persen, meningkat tajam menjadi 96,63 persen pada tahun 2022

dan relatif stabil pada tahun 2023 sebesar 96,51 persen. Pada tahun 2024 sedikit menurun menjadi 94,02 persen, kemudian meningkat kembali menjadi 96,39 persen pada tahun 2025. Tingginya partisipasi tersebut mencerminkan keberhasilan pembinaan karakter, kepemimpinan, dan keterlibatan generasi muda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pada indikator jumlah organisasi pemuda aktif, sejak tahun 2022 hingga tahun 2025 tercatat stabil sebanyak 36 organisasi. Kondisi ini menunjukkan keberlanjutan aktivitas organisasi kepemudaan sebagai wadah pengembangan kapasitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah.

Selanjutnya, jumlah wirausaha muda mulai tercatat pada tahun 2024 sebanyak 40.287 orang dan pada tahun 2025 sebanyak 25.644 orang. Keberadaan wirausaha muda tersebut menunjukkan kontribusi pemuda dalam penguatan ekonomi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja, meskipun terjadi penurunan jumlah pada tahun 2025.

Pada bidang olahraga prestasi, jumlah atlet berprestasi meningkat dari 22 atlet pada tahun 2021 menjadi 515 atlet pada tahun 2022. Selanjutnya tercatat 494 atlet pada tahun 2023, meningkat signifikan menjadi 870 atlet pada tahun 2024, dan mencapai 600 atlet pada tahun 2025. Pola yang sama juga terjadi pada indikator jumlah prestasi olahraga, yaitu sebanyak 22 prestasi pada tahun 2021, meningkat menjadi 515 prestasi pada tahun 2022, menurun menjadi 494 prestasi pada tahun 2023, meningkat menjadi 870 prestasi pada tahun 2024, dan mencapai 600 prestasi pada tahun 2025.

Secara umum, capaian indikator kepemudaan dan olahraga tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembangunan sosial masyarakat Kabupaten Gresik terus berkembang. Tingginya partisipasi kepemudaan, terjaganya sarana olahraga, aktifnya organisasi pemuda, tumbuhnya wirausaha muda, serta meningkatnya jumlah atlet dan prestasi olahraga menjadi faktor pendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembangunan kepemudaan dan olahraga

telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan daya saing daerah dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Gresik.

e. Pekerja penyandang disabilitas

Pekerja Penyandang Disabilitas merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam dunia kerja. Indikator ini menggambarkan proporsi pekerja penyandang disabilitas yang bekerja dibandingkan dengan jumlah seluruh pekerja yang ada di suatu wilayah pada periode tertentu. Semakin tinggi nilai yang dihasilkan, semakin besar tingkat keterlibatan penyandang disabilitas dalam aktivitas ekonomi dan pasar kerja, yang sekaligus mencerminkan semakin terbukanya akses kesempatan kerja yang inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Pekerja Penyandang Disabilitas dihitung dengan membandingkan jumlah pekerja penyandang disabilitas terhadap jumlah seluruh pekerja, kemudian dikalikan 100 persen. Dengan demikian, indikator ini menunjukkan persentase tenaga kerja penyandang disabilitas dari total tenaga kerja yang bekerja.

Tabel 2.56

Pekerja Penyandang Disabilitas Kabupaten Gresik

Uraian	Pekerja Penyandang Disabilitas Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Gresik	-	-	-	0,0012	0,01

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, Tahun 2026

Pekerja penyandang disabilitas memiliki peran penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif serta implementasi kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan. Pada tahun 2024 penyandang disabilitas di Kabupaten Gresik terealisasi sebesar 0,0012 dan mengalami peningkatan pada tahun 2025 dengan realisasi sebesar 0,01 Peningkatan pekerja penyandang disabilitas menunjukkan adanya perbaikan akses terhadap kesempatan kerja, meningkatnya penerimaan dunia usaha terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas, serta semakin efektifnya program pelatihan, penempatan kerja, dan

pemberdayaan ekonomi yang ditujukan bagi kelompok tersebut. Sebaliknya, yang masih rendah dapat mengindikasikan adanya berbagai hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam memasuki pasar kerja, seperti keterbatasan akses pendidikan dan pelatihan, kurangnya sarana dan prasarana yang ramah disabilitas di tempat kerja, rendahnya kesadaran pemberi kerja terhadap pentingnya keberagaman tenaga kerja, maupun masih adanya stigma sosial yang memengaruhi proses rekrutmen dan pengembangan karier. Peningkatan Pekerja Penyandang Disabilitas tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas dan keluarganya, tetapi juga mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, upaya peningkatan indikator ini perlu didukung melalui penguatan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, perluasan akses informasi lowongan kerja yang ramah disabilitas, fasilitasi penempatan kerja, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha untuk mendorong pemenuhan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

a. Indeks Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik dalam kurun waktu tahun 5 Tahun kebelakang menunjukkan tren peningkatan sebagai berikut:

Tabel 2.57
Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik
Tahun 2021-2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Reformasi Birokrasi	69.47	68.93	86.84	85.55	88.01

Sumber : Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Gresik Tahun 2025

Peningkatan capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 didukung oleh perbaikan pada sejumlah komponen Reformasi Birokrasi general. Hal ini tercermin dari meningkatnya beberapa indikator kinerja, antara lain tingkat digitalisasi arsip yang meningkat dari 90,19 menjadi 92,91, indeks reformasi hukum dari 96,24 menjadi 99,70, indeks tata kelola pengadaan dari 76,93 menjadi 85,66, indeks pelayanan publik dari 4,16 menjadi 4,35, capaian IKU makro dari 83,28 menjadi 86,97, survei penilaian integritas dari 59,78 menjadi 75,75, serta survei kepuasan masyarakat dari 88,19 menjadi 90,97. Peningkatan pada berbagai indikator tersebut menunjukkan adanya penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perbaikan sistem pengawasan dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sementara untuk Komponen RB tematik juga mengalami peningkatan di tahun 2025 di bandingkan dengan tahun 2024, yaitu Pengentasan Kemiskinan dari skor 0.67 menjadi 0.75 dan Realisasi investasi dari skor 0.5 menjadi 0.73.

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik pada tahun 2025 kembali mengalami peningkatan mencapai 88,01, Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, yang pada tahun 2025 memiliki Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 93,82, capaian Kabupaten Gresik menunjukkan kesenjangan yang relatif kecil dan mencerminkan bahwa implementasi reformasi birokrasi di tingkat kabupaten telah berjalan cukup efektif dan selaras dengan arah kebijakan reformasi birokrasi di tingkat provinsi. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian reformasi birokrasi secara nasional, nilai IRB

Kabupaten Gresik juga menunjukkan posisi yang relatif baik karena telah berada pada kategori A (sangat baik), yang menggambarkan bahwa tata kelola pemerintahan daerah telah semakin efektif, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Gresik terus menunjukkan progres yang sangat positif dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Sejak beberapa tahun terakhir, Gresik berhasil meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi secara signifikan, menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan pelayanan publik yang lebih baik. Dalam upaya meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi (RB), Pemerintah Kabupaten Gresik dihadapkan pada berbagai tantangan. Proses reformasi birokrasi bukan sekadar perubahan administratif, namun merupakan transformasi menyeluruh terhadap pola pikir, tata kelola, serta budaya kerja yang telah mengakar kuat selama bertahun tahun.

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Gresik adalah perlunya memastikan seluruh indikator keberhasilan dapat mendukung tercapainya dampak tematik, memastikan Rencana aksi telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi Pemerintah, serta memastikan intervensi berupa Rencana aksi memenuhi sebagian besar dari pengawasan, penganggaran, dan inovasi. Guna menjawab tantangan yang ada, Pemerintah kabupaten Gresik berupaya untuk menguatkan Komitmen Pimpinan dan Kepemimpinan Perubahan, menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dengan indikator keberhasilan yang lebih berdampak pada capaian indikator RB tematik, serta melakukan penguatan Monitoring dan Evaluasi Indeks RB

b. Indeks Reformasi Hukum

Reformasi Hukum merupakan upaya perubahan secara terstruktur untuk mewujudkan penataan regulasi yang berkualitas, bersih, dan akuntabel di instansi pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) digunakan sebagai

instrumen untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan reformasi hukum melalui empat variabel utama yang meliputi identifikasi dan pemetaan regulasi, simplifikasi serta deregulasi aturan, penguatan sistem regulasi nasional, hingga peningkatan kompetensi aparatur hukum daerah. Peningkatan nilai IRH secara berkelanjutan mencerminkan optimalnya komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tata kelola regulasi yang akomodatif, harmonis, dan berkepastian hukum.

Tabel 2.58
Capaian Indikator Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Gresik
Tahun 2021-2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Reformasi Hukum	0*	0*	0*	96,24	99.70

Sumber : RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

**Berdasarkan periodisasi sebelumnya, belum dilakukan penilaian indeks di tingkat Kabupaten oleh Pemerintah Pusat.*

Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, capaian Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Gresik pada tahun 2024 mencapai 96,24 dan meningkat menjadi 99,70 pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan dalam pelaksanaan reformasi hukum daerah, terutama pada aspek penataan regulasi, harmonisasi produk hukum daerah, serta penguatan tata kelola pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun pada tahun 2021–2023 belum tersedia hasil penilaian karena pelaksanaan pengukuran Indeks Reformasi Hukum masih dilakukan secara bertahap oleh pemerintah pusat.

Mengacu pada arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, Indeks Reformasi Hukum telah ditetapkan sebagai salah satu sub-indikator kinerja utama yang krusial bagi daerah. Oleh karena itu, guna mempertahankan sekaligus mengakselerasi tren positif tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik memprioritaskan langkah strategis pada

penguatan kualitas dan akuntabilitas produk hukum daerah, pelaksanaan harmonisasi serta sinkronisasi regulasi secara berkala, penguatan kapasitas aparatur perancang peraturan perundang-undangan, serta pengendalian regulasi yang efektif agar senantiasa selaras dengan ketentuan yang lebih tinggi. Melalui komitmen integratif tersebut, diharapkan target capaian nilai indeks dapat terealisasi secara maksimal guna mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, transparan, dan akuntabel.

c. Indeks Pemerintah Digital

Transformasi digital pemerintahan merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pemerintah digital tidak hanya dimaknai sebagai pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, namun juga sebagai perubahan cara kerja pemerintahan yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis data. Dalam mendukung arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, penguatan pemerintahan digital menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat pengambilan keputusan berbasis data dan bukti.

Pada tahun 2027, pengukuran capaian transformasi digital pemerintahan mengalami perubahan dari sebelumnya menggunakan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi Indeks Pemerintah Digital. Perubahan ini merupakan bagian dari penguatan kebijakan transformasi digital nasional yang tidak hanya menilai aspek penerapan sistem elektronik, namun juga menitikberatkan pada integrasi layanan digital, tata kelola pemerintahan, interoperabilitas data, keamanan informasi, serta pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indeks Pemerintah Digital menggambarkan tingkat kematangan transformasi digital pada instansi pemerintah melalui penerapan tata kelola digital yang terintegrasi dan berkelanjutan. Penilaian dilakukan terhadap berbagai aspek strategis, antara lain tata kelola pemerintahan

digital, layanan digital, penguatan arsitektur dan infrastruktur digital, interoperabilitas data, keamanan siber, serta pengembangan budaya kerja digital. Dengan adanya indeks ini diharapkan transformasi digital pemerintah daerah tidak berjalan secara parsial, tetapi terintegrasi antar perangkat daerah dan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.

Kabupaten Gresik terus mendorong penguatan transformasi digital melalui pengembangan layanan pemerintahan berbasis elektronik, peningkatan kualitas tata kelola data, penguatan integrasi sistem informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang digital. Upaya tersebut dilakukan guna menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, responsif, dan transparan, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.59
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Gresik
Tahun 2020 - 2025

Indikator	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025*
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,18	3,31	3,27	4,28	4,32	4,65

Sumber: Kementerian PANRB dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025

(*) Menunjukkan hasil penilaian mandiri (*self assessment*)

Berdasarkan tabel di atas, capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Gresik menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 nilai indeks SPBE Kabupaten Gresik sebesar 3,18, meningkat menjadi 3,31 pada tahun 2021, kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 3,27 pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2023 capaian indeks meningkat signifikan menjadi 4,28 dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 4,32 dengan predikat “Baik”. Capaian tersebut menunjukkan adanya penguatan tata kelola pemerintahan digital, peningkatan

integrasi layanan elektronik, serta semakin optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Gresik.

Pada tahun 2025, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) tidak melaksanakan penilaian nasional terhadap Indeks Pemerintah Digital sehubungan dengan masa transisi kebijakan dari evaluasi SPBE menuju pengukuran Pemerintah Digital. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Gresik melaksanakan Penilaian Mandiri Evaluasi SPBE sebagai upaya untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE secara internal sekaligus menjaga keberlanjutan transformasi digital pemerintahan daerah. Penilaian mandiri tersebut dilakukan untuk menjaga konsistensi pengukuran capaian SPBE sebagaimana pelaksanaan evaluasi pada tahun-tahun sebelumnya, sekaligus menjadi dasar dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan area perbaikan dalam penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Dengan pelaksanaan penilaian mandiri tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik tetap dapat memantau perkembangan implementasi SPBE secara berkelanjutan serta memastikan kesiapan daerah dalam mendukung implementasi Indeks Pemerintah Digital pada tahun berikutnya.

Tabel 2.60

Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Tahun 2025

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Nilai Tahun 2025
Domain Kebijakan SPBE	13%	5,00
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%	5,00
Domain Tata Kelola SPBE	25%	4,60
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%	4,50
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%	4,50
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%	5,00
Domain Manajemen SPBE	16,5%	3,82
Aspek 5 - Penerapan manajemen SPBE	12%	4,13
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%	3,00
Domain Layanan SPBE	45,5%	4,88

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Nilai Tahun 2025
Aspek 7 - Layanan Administrasi	27,5%	4,80
Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	18%	5,00
Indeks SPBE - Pemerintah Kabupaten Gresik		4,65

Sumber : Kementrerian PAN RB, Tahun 2026

Berdasarkan hasil Penilaian Mandiri Evaluasi SPBE Tahun 2025, Kabupaten Gresik memperoleh nilai indeks sebesar 4,65 dengan predikat "Memuaskan". Hasil tersebut menunjukkan bahwa implementasi SPBE di Kabupaten Gresik telah berjalan sangat baik dan didukung oleh tata kelola, layanan, serta kebijakan internal yang semakin matang. Nilai tersebut juga menggambarkan peningkatan dibanding capaian tahun 2024 sebesar 4,32 sehingga menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat transformasi digital secara berkelanjutan.

Secara rinci, capaian penilaian mandiri menunjukkan bahwa Domain Kebijakan SPBE memperoleh nilai 5,00 yang mencerminkan bahwa kebijakan internal terkait arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, manajemen data, pembangunan aplikasi, layanan pusat data, keamanan informasi, audit TIK, hingga tim koordinasi SPBE telah diterapkan secara optimal. Domain Tata Kelola SPBE memperoleh nilai 4,60 yang menunjukkan bahwa aspek perencanaan strategis, teknologi informasi dan komunikasi, serta penyelenggaraan SPBE telah berjalan dengan baik dan terintegrasi.

Selanjutnya, Domain Manajemen SPBE memperoleh nilai 3,82. Pada domain ini masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, khususnya pada penerapan manajemen keamanan informasi serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang SPBE. Selain itu, pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memperoleh nilai 3,00 yang menunjukkan bahwa audit telah dilaksanakan secara memadai, namun masih memerlukan penguatan terutama melalui pelaksanaan audit eksternal agar kualitas tata kelola teknologi informasi dapat semakin optimal.

Adapun Domain Layanan SPBE memperoleh nilai 4,88 yang terdiri atas layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebesar 4,80 dan layanan publik berbasis elektronik sebesar 5,00. Capaian tersebut menunjukkan bahwa layanan digital Pemerintah Kabupaten Gresik telah berjalan sangat baik dalam mendukung efektivitas, transparansi, dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa layanan strategis seperti layanan perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, pengaduan pelayanan publik, data terbuka, serta layanan publik sektoral telah mencapai tingkat kematangan optimal.

Hasil penilaian mandiri SPBE Tahun 2025 menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menyusun langkah strategis peningkatan kualitas pemerintahan digital ke depan, terutama dalam mendukung implementasi Indeks Pemerintah Digital pada tahun 2027. Selain itu, hasil evaluasi tersebut juga menjadi acuan dalam memperkuat interoperabilitas sistem, integrasi layanan digital, keamanan informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna mewujudkan pemerintahan digital yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas.

d. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh predikat Pelayanan Sangat Baik.

Indeks pelayanan publik merupakan indikator baru yang digunakan oleh Kabupaten Gresik mengacu pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 sehingga belum ada realisasi maupun capaian

yang bisa ditampilkan. Penerapan Indeks Pelayanan Publik berdasarkan Permen PANRB No. 4 Tahun 2023 merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa pemerintah dapat menyediakan layanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya penilaian yang komprehensif melalui IPP, pemerintah dapat terus mendorong perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan layanan publik, sekaligus memberikan dorongan kepada instansi pemerintah untuk berinovasi dan meningkatkan profesionalisme. Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, IPP berperan penting dalam membangun pemerintahan yang lebih responsif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Berdasarkan hasil penilaian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perkembangan Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Gresik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kebelakang menunjukkan tren peningkatan sebagai berikut:

Tabel 2.61
Capaian Indikator Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Gresik
Tahun 2021– 2025.

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	-	-	-	4.16	4.35

Sumber : Kementerian PAN-RB, 2025

Capaian peningkatan Indeks Pelayanan Publik Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 tersebut mencerminkan keberhasilan pelaksanaan berbagai langkah strategis dalam reformasi pelayanan publik, yang meliputi penguatan kualitas sumber daya manusia, penyempurnaan mekanisme pelayanan, peningkatan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, serta konsistensi dalam mewujudkan pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Peningkatan tersebut juga menunjukkan adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik dalam memperkuat tata kelola pelayanan publik secara berkelanjutan. Melalui peningkatan kualitas pelayanan,

penguatan pengawasan internal, serta pengembangan inovasi pelayanan publik, diharapkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin optimal dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat

Capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Gresik tersebut diperoleh berdasarkan hasil sampling kualitas pelayanan pada beberapa perangkat daerah strategis, yaitu RSUD Ibnu Sina, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Pendidikan. Ketiga unit pelayanan ini merepresentasikan sektor layanan dasar yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga hasil pengukuran mencerminkan persepsi publik terhadap kualitas layanan kesehatan, administrasi kependudukan, dan pendidikan. Adapun faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian indeks pelayanan publik antara lain :

1. Melakukan reviu standar pelayanan, menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat dan menjalankan maklumat pelayanan.
2. Optimalisasi peningkatan profesionalisme SDM dengan cara memberikan motivasi kerja seperti capacity building, bimbingan teknis dan pemberian penghargaan bagi petugas layanan yang berprestasi

2.1.3.2 Hukum, Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demografi Substantial

a. Persentase Pemenuhan Kebijakan Peduli HAM yang difasilitasi

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, akuntabel, dan transparan, Pemerintah Kabupaten Gresik secara konsisten berkomitmen melakukan penguatan terhadap instrumen penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah. Pelaksanaan program strategis ini dikoordinasikan secara terpadu melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap indikator kinerja utama yaitu *"Persentase Pemenuhan Kebijakan Peduli HAM yang Difasilitasi"*, capaian target pada tahun 2022 dan 2023 berhasil terealisasi secara optimal sebesar

100%, selaras dengan pagu indikatif perencanaan tata kelola hukum daerah. Adapun pada tahun 2024 dan 2025, penilaian terhadap indikator tersebut tidak dilaksanakan (tercatat 0% atau nihil) dikarenakan adanya kebijakan penataan ulang dan evaluasi menyeluruh terhadap instrumen penilaian oleh Kementerian HAM Republik Indonesia.

Tabel 2.62

Capaian Indikator Persentase Pemenuhan Kebijakan Peduli HAM yang difasilitasi Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Pemenuhan Kebijakan Peduli HAM yang difasilitasi	100%	100%	100%	0*	0*

**Keterangan: Tidak dilakukan penilaian sehubungan dengan agenda evaluasi ulang instrumen indikator oleh Kementerian HAM RI*

Berdasarkan tren capaian historis serta hasil evaluasi berkelanjutan tersebut, target kinerja dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 ditetapkan secara konsisten sebesar 100%. Strategi pencapaian target mutlak ini akan diakselerasi melalui optimalisasi pemenuhan seluruh kriteria penilaian Kabupaten Peduli HAM (KKP HAM). Upaya tersebut didukung penuh oleh penguatan sinergitas dan integrasi pengumpulan data capaian implementasi antara Pemerintah Kabupaten Gresik, instansi vertikal, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait. Melalui komitmen dan kolaborasi lintas sektor yang berkesinambungan ini, Kabupaten Gresik optimis dapat mempertahankan predikat sebagai Kabupaten Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

b. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat perkembangan dan kualitas demokrasi di Indonesia secara komprehensif dan terukur. IDI disusun berdasarkan berbagai indikator yang mencerminkan prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti kebebasan sipil, hak-hak politik, serta kinerja lembaga demokrasi.

IDI dikembangkan dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik sebagai instrumen pemantauan kondisi demokrasi di tingkat nasional maupun provinsi. Pengukurannya dilakukan melalui pendekatan berbasis data, yang mencakup analisis dokumen, berita media massa, serta informasi dari instansi terkait untuk menghasilkan skor yang menggambarkan capaian demokrasi pada periode tertentu.

Secara umum, Indeks Demokrasi Indonesia bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai dinamika demokrasi di Indonesia, menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan, serta mendukung perumusan kebijakan yang memperkuat nilai-nilai demokrasi seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

. Indeks Demokrasi Indonesia merupakan indikator baru yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Untuk realisasi Tahun 2025 masih dalam proses perhitungan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, sehingga angka pada realisasi tahun 2025 masih menggunakan realisasi Tahun 2024.

Tabel 2.63

Capaian Indikator Indeks Demokrasi Indonesia Kabupaten Gresik

Tahun 2021– 2025.

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Demokrasi Indonesia	-	-	-	7,95	7,95*

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tahun 2025

c. Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perbup

Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) merupakan rangkaian proses penegakan hukum daerah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gresik terhadap setiap bentuk pelanggaran atas ketentuan yang telah ditetapkan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, pelaku usaha, maupun lembaga yang berada di wilayah kabupaten mematuhi regulasi daerah sebagai bagian dari tertib administrasi dan ketenteraman umum.

Perda merupakan peraturan yang dibentuk bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan serta pengaturan kehidupan masyarakat di daerah. Sementara itu, Perbup adalah peraturan yang ditetapkan oleh bupati sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Perda atau sebagai pedoman teknis dalam menjalankan kebijakan daerah.

Tabel 2.64

Capaian Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perbup

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perbup	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1

Sumber : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Tahun 2025

Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perbup yang mencapai target 1:1, menandakan setiap pelanggaran yang ditangani telah ditindaklanjuti dan diselesaikan secara proporsional. Seluruh

pelanggaran Perda telah ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui mekanisme pembinaan, peringatan, penutupam/penyegelan sesuai tingkat pelanggaran. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan efektivitas penegakan peraturan serta komitmen yang kuat dalam menjaga ketertiban, ketenteraman, dan kepastian hukum di masyarakat.

Keberhasilan penyelesaian pelanggaran Perda/Perbup mencerminkan efektivitas sistem pengawasan dan penegakan hukum daerah. Selain itu, penyelesaian yang tepat dan konsisten juga berkontribusi pada peningkatan kepatuhan masyarakat, terciptanya ketertiban umum, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

2.1.3.3 Ketangguhan Diplokasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

a. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)merupakan instrumen yang dirancang untuk menilai tingkat daya saing pada level provinsi maupun kabupaten/kota, yang pada hakikatnya mencerminkan tingkat produktivitas daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Pengukuran IDSD 2025 tetap mengacu pada kerangka konseptual *Global Competitiveness Index* (GCI) dari *World Economic Forum* (WEF), disertai dengan penyesuaian pada level indikator serta metode pengukuran agar selaras dengan karakteristik daerah di Indonesia dan ketersediaan data nasional. Sejumlah indikator serta tata cara penghitungan skor diperbarui untuk meningkatkan akurasi representasi kondisi daya saing daerah. Pada tingkat nasional, skor rata-rata IDSD yang dihitung dari seluruh provinsi berada pada angka 3,50 dari skala 5,00.

IDSD 2025 disusun berdasarkan empat komponen utama daya saing yang kemudian dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. Struktur kerangka ini secara umum masih mempertahankan pendekatan yang digunakan pada IDSD 2024. terdiri atas empat komponen utama pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen tersebut

dijabarkan lebih lanjut ke dalam dua belas pilar daya saing yang mencakup berbagai aspek strategis pembangunan daerah. Setiap pilar diukur melalui sejumlah indikator yang disusun secara sistematis guna menggambarkan performa dan potensi daya saing suatu daerah secara komprehensif. Setiap pilar daya saing diukur melalui serangkaian indikator yang berfungsi sebagai pembentuk indeks. Indikator-indikator tersebut dikelompokkan ke dalam sejumlah dimensi yang bersifat konseptual semata dan tidak digunakan secara langsung dalam proses penghitungan indeks. Dengan demikian, IDSD berfungsi sebagai acuan penting bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berbasis data, terukur, dan berorientasi pada peningkatan daya saing wilayah secara berkelanjutan.

Tabel 2.65

Realisasi Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Gresik

Tahun 2021-2025

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Daya Saing Daerah	2,59	3,42	3,38	3,73	3,76

Sumber : Publikasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Tahun 2025

2.1.3.4 Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah

a. Urusan Wajib

1) Pendidikan

Pendidikan merupakan sektor fundamental dalam pembangunan daerah karena berperan strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan. Melalui pendidikan, individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang menjadi dasar bagi peningkatan produktivitas, daya saing, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi. Dalam konteks pembangunan daerah, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan hak dasar warga negara, tetapi juga sebagai instrumen utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 2.66

Indikator Urusan Pendidikan Kabupaten Gresik

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Angka Partisipasi Sekolah (5-6) PAUD	88,94	91,00	84,23	77,79	80.76
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 SD/SMP	99,34	99,32	99,10	99,29	99.40
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	6,35	9,40	23,74	24,54	29.51
4	Rata-rata Kemampuan Literasi	61.79	64.69	66.40	75.62	77.42
5	Rata-rata Kemampuan Numerasi	47.19	50.86	51.77	64.66	66.86
6	Iklim Inklusivitas SD	69,68	77,78	57,87	62,30	78.90
7	Iklim Inklusivitas SMP	67,19	76,65	58,31	61,11	74.50
8	Iklim Kebinekaan SD	64,98	91,76	74,31	75,57	76.57
9	Iklim Kebinekaan SMP	65,56	85,58	74,03	72,67	73.67
10	Iklim Keamanan SD	74,27	85,60	74,66	78,00	64.8
11	Iklim Keamanan SMP	79,34	82,36	71,53	73,00	63.51
12	Angka Putus Sekolah	-	-	-	1.44	1.41
13	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	91,04	91,44	91,50	91,51	94.28
14	Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	85.16	96.25	95.58	98.78	98.83
15	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	93,42	91,10	91,35	91,36	91.77
16	Rata-rata satuan pendidikan SD, SMP yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	83.75	87.00	95.58	98.78	98.83

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik

Secara keseluruhan, indikator-indikator pendidikan diatas menunjukkan bahwa pendidikan merupakan sistem yang saling terhubung antara aspek akses, mutu pembelajaran, lingkungan pendidikan, dan tata kelola. Oleh karena itu, pendidikan menjadi sektor kunci dalam pembangunan daerah, karena peningkatan pada satu indikator akan memberikan dampak penguatan terhadap indikator lainnya, serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada berbagai kelompok usia menjadi indikator awal yang merepresentasikan pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap layanan pendidikan. Keberlangsungan partisipasi pendidikan pada seluruh jenjang merupakan prasyarat bagi terbentuknya sumber daya manusia yang berpengetahuan dan berdaya saing, serta berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan proses pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. dilihat dari tabel diatas bahwa disetiap indikator urusan pendidikan capaian setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, pada indikator Angka Partisipasi Sekolah (5-6) PAUD capaian tahun 2024 sebesar 77.79 meningkat menjadi 80.76 di tahun 2025, Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 SD/SMP capaian tahun 2024 sebesar 99.29 meningkat menjadi 99.40 di tahun 2025, Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan capaian tahun 2024 sebesar 24.54 meningkat menjadi 29.51 di tahun 2025,

Angka Putus Sekolah merupakan indikator baru yang mulai digunakan pada tahun 2024 sebagai bagian dari indikator urusan pendidikan di Kabupaten Gresik. Oleh karena itu, data realisasi untuk periode Tahun 2021–2023 belum tersedia karena pengukuran belum dilaksanakan pada periode tersebut. capaian anagka putus sekolah mengalami peningkatan pada tahun 2025 sebesar 1.41 menurun dari tahun 2024 sebesar 1.44, hal ini menunjukkan bahwa angka putus sekolah mengalami kondisi capaian yang semakin baik dikarenakan anak putus sekolah di Kabupaten Gresik semakin berkurang.

Keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh akses, tetapi juga oleh kualitas proses pembelajaran yang diukur melalui kemampuan literasi dan numerasi. Indikator ini mencerminkan kapasitas peserta didik dalam memahami, mengolah, dan menerapkan pengetahuan dasar yang menjadi fondasi bagi pengembangan keterampilan lanjutan. Literasi dan numerasi yang memadai berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kesiapan memasuki dunia kerja maupun pendidikan lanjutan. Rata-rata Kemampuan Literasi

capaian tahun 2024 sebesar 75.62 meningkat menjadi 77.42 di tahun 2025, Rata-rata Kemampuan Numerasi capaian tahun 2024 sebesar 64.66 meningkat menjadi 66.86 di tahun 2025,

Indikator iklim inklusivitas, kebinekaan, dan keamanan pada satuan pendidikan menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada hasil akademik, tetapi juga pada penciptaan lingkungan belajar yang kondusif dan berkeadilan. Lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan menghargai keberagaman berperan dalam meningkatkan keterlibatan peserta didik, menjaga keberlanjutan kehadiran, serta meminimalkan risiko terjadinya putus sekolah. Dengan demikian, indikator lingkungan belajar menjadi faktor pendukung utama bagi efektivitas pembelajaran. Iklim Inklusivitas SD capaian tahun 2024 sebesar 62.30 meningkat menjadi 78.90 di tahun 2025, Iklim Inklusivitas SMP capaian tahun 2024 sebesar 61.11 meningkat menjadi 74.50 di tahun 2025, Iklim Kebinekaan SD capaian tahun 2024 sebesar 75.57 meningkat menjadi 76.57 di tahun 2025, Iklim Kebinekaan SMP capaian tahun 2024 sebesar 72.67 meningkat menjadi 73.67 di tahun 2025, Iklim Keamanan SD capaian tahun 2024 sebesar 78.00 menurun menjadi 64.8 di tahun 2025, Iklim Keamanan SMP capaian tahun 2024 sebesar 73.00 menurun menjadi 63.51 di tahun 2025.

Pentingnya pendidikan juga tercermin dari indikator kualifikasi pendidik, khususnya pada jenjang PAUD, yang berpengaruh terhadap kesiapan peserta didik pada jenjang pendidikan selanjutnya. Pendidikan anak usia dini yang didukung oleh pendidik berkualifikasi menjadi fondasi bagi perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak, yang pada akhirnya memengaruhi kemampuan literasi dan numerasi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Capaian Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 tahun 2024 sebesar 91.51 meningkat menjadi 94.28 di tahun 2025, Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B capaian tahun 2024 sebesar 91.36 meningkat menjadi 91.77 di tahun 2025.

Selain itu, indikator akreditasi satuan pendidikan dan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) menggambarkan kualitas tata kelola dan mutu layanan pendidikan secara menyeluruh. Capaian Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP tahun 2024 sebesar 98.78 meningkat menjadi 98.83 di tahun 2025, Rata-rata satuan pendidikan SD, SMP yang memiliki Standar Isi sesuai SNP capaian tahun 2024 sebesar 98.78 meningkat menjadi 98.83 di tahun 2025. Pemenuhan standar mutu menjadi landasan bagi penyelenggaraan pendidikan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta mendukung terciptanya iklim pembelajaran yang berkualitas dan merata.

2) Kesehatan

Kinerja urusan kesehatan difokuskan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan cakupan jaminan kesehatan semesta, penguatan pelayanan kesehatan primer berbasis siklus hidup, peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan, pengembangan infrastruktur kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Selain itu, pembangunan kesehatan diarahkan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, mempercepat penurunan prevalensi stunting, meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin, serta memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Pengendalian penyakit menular dilakukan melalui peningkatan deteksi dini, pengobatan, dan pemantauan kasus penyakit seperti HIV/AIDS, tuberkulosis, dan penyakit menular lainnya. Sementara itu, pengendalian penyakit tidak menular dilaksanakan melalui skrining faktor risiko, deteksi dini, serta peningkatan pelayanan kesehatan terhadap penyakit seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, dan penyakit kronis lainnya.

Tabel 2.67

Indikator Urusan Kesehatan Kabupaten Gresik

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup (Per 1000)	3,22	4,34	4,62	4,29	7,40
2	Angka Kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	316.37	94,18	79.5	77,59	70,21
3	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	-	-	-	100	93,04
4	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	23	10,7	15,4	8,14	8,07
5	Cakupan ODHIV on ART (%)	-	46	51	70	70
6	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	154	237	292	265	238,87
7	Cakupan Deteksi Dini Diabetes Melitus (%)	-	-	-	103,3	104,3
8	Cakupan Deteksi Dini Hipertensi (%)	-	-	-	93,4	96,1
9	Cakupan Universal Health Coverage (%)	78,08	99,65	101,38	100	100
10	Net Death Rate (NDR) (per 1.000 pasien keluar)	139,25	105,04	102.04	99,1	121,05
11	Gross Death Rate (GDR) (per 1.000 pasien keluar)	91,53	63,63	66.59	65,57	77,83
12	Persentase Posyandu Siklus Hidup Aktif (%)	-	-	-	91,9	97,56
13	Persentase Desa/Kelurahan STBM (%)	17,69	18,25	21,35	21,91	25
14	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah dengan Nilai SKM >=80% (%)	100	100	100	100	100
15	Puskesmas Ramah Anak	-	-	-	18:32	27:32
16	Persentase Perlindungan Sosial untuk Kelompok Rentan (%)	-	-	-	100	100
17	Realisasi Belanja Infrastruktur Urusan Kesehatan (%)	-	-	-	100	100
18	Persentase Kematian Ibu dari Keluarga Miskin (%)	-	-	-	0,130	0,10
19	Persentase Kematian Bayi dari Keluarga Miskin (%)	-	-	-	0,698	0,680
20	Angka Kasus Stunting dari Keluarga Miskin (Angka)	-	-	-	317	317
21	Persentase Keluarga Miskin yang telah dijamin dalam UHC dengan status PBIJK dan PBPU BP Pemda (%)	-	-	-	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Gresik Tahun 2026

Beberapa indikator pada Urusan Kesehatan merupakan indikator baru yang mulai digunakan sebagai bagian dari penyempurnaan sistem pengukuran kinerja daerah. Oleh karena itu, data realisasi untuk periode Tahun 2021–2023 belum tersedia karena pengukuran terhadap indikator-indikator tersebut belum dilaksanakan pada periode tersebut. Penyajian data realisasi dimulai pada tahun 2024 sesuai dengan mekanisme pengukuran dan ketersediaan data yang telah ditetapkan.

Capaian urusan kesehatan Kabupaten Gresik menunjukkan kinerja yang relatif baik pada aspek akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya Universal Health Coverage (UHC) sebesar 100% sejak tahun 2023 dan mampu mempertahankannya hingga tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan seluruh penduduk telah memiliki akses terhadap jaminan kesehatan sehingga mendukung peningkatan akses pelayanan kesehatan yang lebih merata.

Cakupan fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar sebesar 100%, serta perlindungan kesehatan bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin yang juga telah mencapai 100%. Selain itu, jumlah Posyandu Siklus Hidup Aktif terus meningkat yang menunjukkan semakin kuatnya layanan kesehatan primer berbasis masyarakat.

Pada aspek kesehatan ibu dan anak, angka kematian bayi relatif rendah dan berada pada kisaran 3–5 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Tahun 2025 terjadi peningkatan menjadi 7,40 per 1.000 kelahiran hidup, atau naik sekitar 72,5% dibandingkan tahun 2024. Kenaikan tersebut mengindikasikan masih terdapat tantangan dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi, terutama terkait kualitas pelayanan neonatal, penanganan bayi berat lahir rendah (BBLR), prematuritas, infeksi neonatal, maupun keterlambatan rujukan.

Pada indikator angka kematian ibu menunjukkan tren penurunan yang sangat signifikan selama lima tahun terakhir. Tahun

2021 masih sangat tinggi, kemudian turun drastis menjadi 70,21 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan semakin baiknya kualitas pelayanan kesehatan ibu, meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan, pelayanan antenatal care, serta efektivitas sistem rujukan obstetri.

Prevalensi stunting mengalami penurunan yang cukup signifikan selama lima tahun terakhir meskipun sempat meningkat pada tahun 2023. Tahun 2025 prevalensi stunting mencapai 8,07%, jauh di bawah target nasional sebesar 14%, sehingga menunjukkan keberhasilan intervensi spesifik dan sensitif dalam percepatan penurunan stunting. Keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi lintas sektor melalui peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, sanitasi, air minum, serta perlindungan sosial.

Dalam pengendalian penyakit, capaian deteksi dini penyakit tidak menular seperti diabetes melitus dan hipertensi telah melampaui target cakupan, yang menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat serta akses terhadap layanan skrining kesehatan.

Sementara itu, untuk penyakit menular, insidensi tuberkulosis masih cukup tinggi sehingga diperlukan peningkatan upaya penemuan kasus, pengobatan, dan pencegahan penularan secara berkelanjutan. Insidensi tuberkulosis (TB) di Kabupaten Gresik menunjukkan tren yang fluktuatif selama periode 2021–2025. Angka insidensi meningkat dari 154 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2021 menjadi 237 kasus pada tahun 2022 dan mencapai puncaknya pada 292 kasus pada tahun 2023. Peningkatan tersebut tidak selalu menunjukkan memburuknya situasi TB, tetapi dapat mencerminkan semakin optimalnya upaya penemuan kasus (case finding) melalui skrining aktif, investigasi kontak, dan penguatan sistem surveilans pascapandemi COVID-19. Selanjutnya, insidensi TB mengalami penurunan menjadi 265 kasus per 100.000 penduduk pada tahun 2024 dan kembali menurun menjadi 238,87 kasus pada tahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan mulai efektifnya berbagai upaya pengendalian TB, seperti peningkatan keberhasilan

pengobatan, perluasan cakupan deteksi dini, pelacakan kontak erat, serta penguatan kolaborasi layanan TB di fasilitas kesehatan. Meskipun menunjukkan tren penurunan dalam dua tahun terakhir, tuberkulosis masih menjadi salah satu penyakit menular prioritas yang memerlukan perhatian karena penularannya dipengaruhi oleh kepadatan penduduk, kondisi lingkungan, status gizi, penyakit penyerta, serta kepatuhan pasien dalam menyelesaikan pengobatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengendalian yang berkesinambungan untuk menurunkan angka insidensi sekaligus mendukung pencapaian target eliminasi TB nasional.

Cakupan Orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan terapi antiretroviral (ART) di Kabupaten Gresik menunjukkan tren yang meningkat selama periode 2022–2025. Capaian meningkat dari 46% pada tahun 2022 menjadi 51% pada tahun 2023, kemudian mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 70% pada tahun 2024 dan berhasil dipertahankan pada angka 70% pada tahun 2025.

Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan akses terhadap layanan pengobatan HIV melalui perluasan layanan ART, peningkatan deteksi kasus, penguatan mekanisme rujukan, serta pendampingan bagi ODHIV untuk memulai dan mempertahankan terapi. Capaian ini juga mencerminkan semakin baiknya koordinasi antara fasilitas pelayanan kesehatan, laboratorium, dan program penanggulangan HIV/AIDS dalam memastikan ODHIV memperoleh pengobatan secara berkesinambungan.

Namun demikian, masih terdapat sekitar 30% ODHIV yang belum mendapatkan terapi antiretroviral, sehingga berpotensi meningkatkan risiko progresivitas penyakit, penularan HIV kepada orang lain, serta tingginya angka putus obat (lost to follow-up). Selain itu, stigma dan diskriminasi terhadap ODHIV, keterlambatan diagnosis, serta kepatuhan pengobatan yang belum optimal masih menjadi tantangan dalam meningkatkan cakupan ART.

Oleh karena itu, upaya peningkatan cakupan ART perlu terus diperkuat melalui perluasan skrining HIV pada kelompok berisiko, percepatan inisiasi terapi segera setelah diagnosis (test and treat), peningkatan kepatuhan minum obat melalui pendampingan yang berkelanjutan, serta pengurangan stigma di masyarakat agar semakin banyak ODHIV yang dapat mengakses layanan pengobatan.

Pada indikator Net Death Rate (NDR) (per 1.000 pasien keluar) menunjukkan tren menurun hingga tahun 2024, namun kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 121,05 per 1.000 pasien keluar. Peningkatan ini dapat mengindikasikan meningkatnya kompleksitas kasus yang ditangani rumah sakit atau tingginya kasus rujukan dengan kondisi berat. Lalu untuk indikator Gross Death Rate (GDR) menurun cukup signifikan dibanding tahun 2021, namun meningkat kembali pada tahun 2025. Kenaikan tersebut perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan mutu pelayanan klinis dan keselamatan pasien, khususnya pada kasus-kasus kegawatdaruratan dan penyakit kronis.

Persentase Desa/Kelurahan yang telah menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menunjukkan tren meningkat selama periode 2021–2025, dari 17,69% menjadi 25,00%. Kenaikan sebesar 7,31 poin persentase ini mencerminkan semakin luasnya implementasi lima pilar STBM, yaitu stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengamanan sampah rumah tangga, serta pengamanan limbah cair rumah tangga. Peningkatan capaian tersebut menunjukkan adanya penguatan intervensi sanitasi berbasis masyarakat melalui peran pemerintah desa, puskesmas, kader kesehatan, dan masyarakat. Namun demikian, cakupan 25% pada tahun 2025 mengindikasikan bahwa sebagian besar desa/kelurahan masih memerlukan pendampingan untuk mencapai status STBM secara menyeluruh.

Indikator Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah dengan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ≥80% menunjukkan capaian 100% secara konsisten selama periode 2021–

2025. Hal ini menandakan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah di Kabupaten Gresik telah memenuhi standar kepuasan masyarakat dengan kategori baik. Konsistensi capaian tersebut mencerminkan semakin baiknya kualitas pelayanan kesehatan, kemudahan akses layanan, responsivitas petugas, serta peningkatan tata kelola pelayanan publik di sektor kesehatan. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa upaya peningkatan mutu pelayanan melalui akreditasi fasilitas kesehatan, penguatan kompetensi SDM kesehatan, dan digitalisasi layanan mulai memberikan dampak positif terhadap kepuasan masyarakat.

Secara keseluruhan, kinerja urusan kesehatan Kabupaten Gresik menunjukkan perkembangan yang positif, terutama dalam peningkatan akses layanan kesehatan, penurunan angka kematian ibu, percepatan penurunan stunting, serta penguatan pelayanan kesehatan dasar. Ke depan, tantangan yang perlu menjadi perhatian adalah penurunan angka kematian bayi, pengendalian penyakit menular khususnya tuberkulosis dan HIV/AIDS, serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara berkelanjutan guna mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang sehat dan produktif.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Pelaksanaan urusan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dalam mendukung daya saing Daerah, meningkatkan kualitas infrastruktur irigasi, kapasitas waduk, serta efektivitas penanggulangan banjir untuk mendukung ketahanan sumber daya air dan keselamatan masyarakat. Selanjutnya diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur jalan untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan

strategis yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur dan kinerja ekonomi Daerah.

Penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada Tahun 2021–2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.68
Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Rerata Realisasi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Jalan (%)	-	-	-	72,88	69,29
2	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	47,84	48,17	49,02	49,85	51,03
3	Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten (%)	64,59	65,01	65,36	65,86	66,38
4	Persentase Realisasi Penanggulangan Banjir Kali Lamong (%)	-	-	-	9,82	12,95
5	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten (%)	74,29	74,60	74,73	70,74	71,22
6	Persentase Kemantapan Jalan Poros Desa (%)	-	-	-	69,86	69,88
7	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (%)	-	-	-	1,34	3,37

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik

Berdasarkan capaian indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2021–2025, secara umum menunjukkan adanya tren peningkatan kinerja pada beberapa indikator strategis pembangunan infrastruktur dan penataan ruang daerah. Hal tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan infrastruktur dasar, pengelolaan sumber daya air, pengendalian banjir, peningkatan kemantapan jalan, serta pengendalian pemanfaatan ruang secara berkelanjutan.

Beberapa indikator pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan indikator baru yang mulai digunakan sebagai bagian dari penyempurnaan sistem pengukuran kinerja daerah. Oleh karena itu, data realisasi untuk periode Tahun 2021–2023 belum tersedia karena pengukuran terhadap indikator-indikator tersebut belum dilaksanakan pada periode tersebut. Penyajian data realisasi dimulai pada tahun 2024 sesuai dengan mekanisme pengukuran dan ketersediaan data yang telah ditetapkan.

Pada indikator rerata realisasi pembangunan infrastruktur sumber daya air dan jalan, pada tahun 2024 mencapai sebesar 72,88% dan pada tahun 2025 sebesar 69,29%. Meskipun mengalami sedikit penurunan, capaian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tetap berjalan dengan tingkat realisasi yang relatif tinggi dalam mendukung konektivitas wilayah dan pelayanan publik. Penurunan capaian dapat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran, kondisi teknis lapangan, maupun dinamika kebutuhan infrastruktur daerah.

Indikator persentase panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 capaian sebesar 47,84%, meningkat menjadi 48,17% pada tahun 2022, kemudian 49,02% pada tahun 2023, 49,85% pada tahun 2024, dan mencapai 51,03% pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya upaya berkelanjutan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas jaringan irigasi guna mendukung produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah.

Pada indikator persentase kapasitas daya tampung air waduk kabupaten, capaian juga mengalami peningkatan bertahap dari 64,59% pada tahun 2021 menjadi 66,38% pada tahun 2025. Kondisi ini mencerminkan upaya peningkatan fungsi infrastruktur sumber daya air dalam mendukung konservasi air, pengendalian banjir, serta pemenuhan kebutuhan air masyarakat dan sektor pertanian.

Sementara itu, indikator persentase realisasi penanggulangan banjir Kali Lamong menunjukkan capaian sebesar 9,82% pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 12,95% pada tahun 2025. Peningkatan ini menggambarkan adanya progres pelaksanaan program penanganan banjir secara bertahap melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur pengendali banjir, normalisasi saluran, serta penguatan sistem saluran pembuang di wilayah terdampak.

Pada sektor konektivitas wilayah, indikator persentase kemantapan jalan kabupaten pada tahun 2021 mencapai sebesar 74,60%, selanjutnya pada tahun 2022 sebesar 74,73% dan pada tahun 2023 mencapai sebesar 76,20%. Pada tahun 2024 indikator kemantapan jalan kabupaten mengalami penurunan yaitu 70,74%. Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan jumlah total panjang jalan Kabupaten yang semula 512,16 KM menjadi 566,61 KM. Namun pada tahun 2025 capaian persentase kemantapan jalan kabupaten mengalami peningkatan menjadi 71,22%. Demikian pula persentase kemantapan jalan poros desa meningkat dari 69,86% pada tahun 2024 menjadi 69,88% pada tahun 2025. Meskipun peningkatannya relatif kecil, kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya pemeliharaan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan secara berkelanjutan guna mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang serta jasa.

Di sisi penataan ruang, indikator persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang mengalami peningkatan dari 1,34% pada tahun 2024 menjadi 3,37% pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya penguatan pengendalian pemanfaatan ruang serta peningkatan kepatuhan terhadap rencana tata ruang wilayah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang tertib, aman, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, capaian indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gresik menunjukkan perkembangan yang positif dan mencerminkan arah pembangunan infrastruktur yang semakin baik. Ke depan, diperlukan penguatan sinergi antar perangkat daerah, peningkatan efektivitas pelaksanaan

program, optimalisasi pembiayaan pembangunan, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi. Selanjutnya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan penerapan prinsip efisiensi, ketahanan lingkungan dalam pengelolaan infrastruktur dan tata ruang. Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan saat ini, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan dan kualitas lingkungan bagi generasi mendatang.

Melalui pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang terencana, terintegrasi, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, diharapkan mampu mewujudkan infrastruktur yang handal, tata ruang yang tertib, serta mendukung terciptanya Kabupaten Gresik yang lebih maju, berdaya saing, nyaman, dan berkelanjutan.

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan, serta pengembangan kawasan permukiman yang tertata dan berwawasan lingkungan. Pelaksanaan urusan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas rumah layak huni dan penanganan rumah tidak layak huni guna mendukung kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kawasan kumuh. Selanjutnya, urusan ini juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana permukiman, memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar permukiman, serta mendorong penataan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan infrastruktur dan tata ruang wilayah guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Penyelenggaraan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2021–2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.69
Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase PSU Perumahan dan permukiman tertangani (%)	-	-	-	0,06	2,14
2	Persentase Capaian Penurunan Backlog Perumahan (%)	-	-	-	26,05	16,00
3	Persentase korban bencana atau masyarakat terdampak relokasi yang mendapatkan hunian layak dan aman (%)	-	-	-	100	100
4	Persentase Capaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (%)	-	-	-	11,32	0,6

Sumber: Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik, 2025

Berdasarkan capaian indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik Tahun 2021–2025, secara umum menunjukkan kinerja yang positif dalam upaya peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman. Hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menyediakan hunian yang layak, meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, serta memperluas akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar yang memadai.

Kualitas lingkungan permukiman turut didukung oleh ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan, seperti jalan lingkungan, saluran drainase, dan fasilitas pendukung lainnya. Pada tahun 2025, capaian indikator PSU perumahan dan permukiman tertangani mencapai 2,14%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,06%. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas infrastruktur kawasan permukiman.

Upaya peningkatan kualitas perumahan juga tercermin dari capaian indikator backlog perumahan. Pada tahun 2025, capaian backlog perumahan tercatat sebesar 16,60%, yang menunjukkan perkembangan dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi

masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Gresik juga memberikan perhatian terhadap masyarakat yang terdampak bencana maupun relokasi. Pada tahun 2025, indikator korban bencana atau masyarakat terdampak relokasi yang memperoleh hunian layak dan aman mencapai 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh masyarakat yang menjadi sasaran program telah memperoleh dukungan hunian sesuai kebutuhan.

Di sisi lain, upaya peningkatan kualitas lingkungan permukiman juga dilakukan melalui penanganan kawasan permukiman kumuh. Pada tahun 2025, capaian penanganan kawasan permukiman kumuh sebesar 0,6%. Meskipun masih relatif terbatas, capaian tersebut menunjukkan bahwa penanganan kawasan kumuh tetap dilakukan secara bertahap sesuai prioritas wilayah dan kemampuan pendanaan daerah guna mewujudkan lingkungan permukiman yang lebih layak, sehat, dan berkelanjutan.

5) Kententraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kondisi daerah yang aman, tertib, dan kondusif guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun Capaian Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2021–2025 dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 2.70
Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Penangangan Gangguan Tibumtranmas yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Linmas terhadap RT	1 Per RT	1 Per RT	1 Per RT	1,12 Per RT	1,12 Per RT
3	Rerata respon time rate penanganan kebakaran	-	-	-	48,83 menit	48,82 menit
4	Desa Tangguh Bencana	-	-	-	0.40	0.47
5	Penurunan kerugian pasca bencana	-	-	-	30%	30%
6	Partisipasi Mitigasi Bencana	-	-	-	0.28	0.28

Sumber: Dinas Satpol PP, Dinas Damkar dan BPBD Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Selama periode lima tahun terakhir (2021–2025), Pemerintah Daerah melalui Dinas Satpol PP menunjukkan performa yang sangat stabil dan ekselen dengan konsistensi realisasi sebesar 100%. Pencapaian angka mutlak ini mengindikasikan bahwa seluruh pengaduan, temuan lapangan, maupun potensi gangguan yang teridentifikasi telah diselesaikan secara tuntas sesuai dengan Standar Openal Prosedur (SOP) yang berlaku.

Konsistensi capaian selama lima tahun berturut-turut menunjukkan adanya sistem penanganan pelanggaran yang terstruktur, mulai dari proses pengawasan, penindakan, hingga penyelesaian administrasi maupun yustisial. Selain itu, capaian ini juga mengindikasikan meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap regulasi daerah serta efektivitas upaya pembinaan dan sosialisasi yang dilakukan. Namun demikian, meskipun menunjukkan hasil maksimal, evaluasi tetap perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan kualitas penyelesaian kasus, kecepatan

penanganan, serta dampak jangka panjang terhadap ketertiban umum dan kepatuhan hukum di daerah.

Capaian Linmas terhadap RT selama periode 2021–2025 menunjukkan bahwa pada tahun 2021 hingga 2023 tetap stabil sebesar 1 Linmas per RT, sedangkan pada tahun 2024 dan 2025 mengalami peningkatan menjadi 1,12 Linmas per RT. Stabilitas pada tiga tahun pertama menunjukkan pemenuhan kebutuhan personel Linmas yang sesuai dengan standar minimal untuk mendukung keamanan dan ketertiban di tingkat RT. Peningkatan pada dua tahun terakhir mengindikasikan upaya penguatan kapasitas Linmas guna meningkatkan efektivitas pengawasan, respons terhadap gangguan keamanan, serta pembinaan masyarakat. Tren ini mencerminkan strategi pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan masyarakat serta memastikan kesiapsiagaan Linmas dalam menghadapi berbagai tantangan ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan warga. Ke depan, diperlukan upaya untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas sumber daya Linmas melalui pembinaan berkelanjutan, peningkatan kompetensi, dan penguatan koordinasi dengan perangkat kewilayahan agar yang telah tercapai tetap efektif dan berkelanjutan.

Rerata respon time rate penanganan kebakaran merupakan indikator baru yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Meskipun capaian indikator rerata response time rate penanganan kebakaran tahun 2025 secara administratif telah memenuhi target (48,82 menit dari target 48,83 menit), angka tersebut menyimpan paradoks kinerja berupa disparitas spasial dan hambatan aksesibilitas mikro. Wilayah perkotaan relatif terlayani dengan baik karena berada dalam radius efektif 7,5 km dari pos eksisting, namun wilayah penyangga, kawasan industri, dan kepulauan (seperti Bawean, Duduk Sampeyan, Wringinanom, Manyar, Bungah sisi Pantura, dan Panceng) mengalami waktu tanggap jauh di atas standar SPM 15 menit.

Untuk mengurangi disparitas spasial dan memperkuat capaian response time, Kabupaten Gresik menerapkan strategi dekonsentrasi layanan melalui pembangunan pos penunjang strategis di wilayah blindspot, khususnya Pulau Bawean, Duduk Sampeyan, dan Wringinanom. Langkah ini bertujuan memperkecil radius layanan agar rata-rata waktu tanggap dapat ditekan mendekati standar ideal SPM 15 menit, sehingga capaian administratif selaras dengan perlindungan nyata di lapangan. Strategi ini ditopang oleh optimalisasi unit reaksi cepat berbasis tipologi wilayah melalui pengadaan armada berukuran kecil atau motor pemadam untuk mengatasi kendala aksesibilitas, serta sinkronisasi koordinasi jalur darurat bersama pemerintah kecamatan dan desa demi menjamin mobilitas pasukan yang lebih lincah dan merata.

Indikator urusan Kebencanaan yang diampu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan indikator baru dalam sistem pengukuran kinerja pembangunan daerah Kabupaten Gresik. Pada tahun pelaporan, indikator ini belum memiliki data pembanding pada tahun-tahun sebelumnya sehingga data yang terisi tersedia pada tahun 2024 dan 2025. Urusan kebencanaan diukur melalui beberapa indikator meliputi Desa Tangguh Bencana, Penurunan Kerugian Pasca Bencana, dan Partisipasi Mitigasi Bencana.

Berdasarkan capaian Desa Tangguh Bencana pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,40 dan mengalami peningkatan menjadi 0,47 pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam penguatan kapasitas desa dalam menghadapi potensi bencana, melalui pembentukan dan pembinaan Desa Tangguh Bencana, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, serta penguatan kelembagaan kebencanaan di tingkat desa.

Selanjutnya, indikator Penurunan Kerugian Pasca Bencana pada tahun 2024 dan 2025 masing-masing tercatat sebesar 30%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya penanganan pasca

bencana, termasuk respons darurat dan rehabilitasi, telah berjalan sesuai target, namun belum menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan upaya mitigasi struktural dan nonstruktural guna menekan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana.

Sementara itu, Partisipasi Mitigasi Bencana pada tahun 2024 dan 2025 berada pada angka 0,28. Nilai ini menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam kegiatan mitigasi bencana masih relatif terbatas dan belum mengalami peningkatan. Kondisi tersebut menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti melalui peningkatan edukasi kebencanaan, sosialisasi, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.

6) Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masyarakat korban bencana. Permasalahan PPKS terbanyak di Kabupaten Gresik yaitu fakir miskin, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, anak-anak terlantar, gelandangan/tuna sosial dan pengemis serta perlindungan dan jaminan sosial bagi pada saat tanggap darurat bencana bagi korban bencana. Capaian Kinerja pada urusan Sosial sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.71
Indikator Persentase Urusan Sosial Kabupaten Gresik
Tahun 2021- 2025

NO	INDIKATOR	Realisasi				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Perlindungan Sosial untuk Kelompok Rentan (%)	-	-	-	28	28,64
2	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial sektoral (%)	-	-	-	3	0
3	Persentase penyandang disabilitas yang mendapat Program Perlindungan Sosial (%)	-	-	-	15	19,42
4	Persentase Lansia Miskin yang mendapat Program Perlindungan Sosial (%)	-	-	-	18	22,64
5	Persentase Desil 1-2 dibandingkan dengan jumlah penduduk (%)	-	-	-	21	24,14

Sumber: Dinas Sosial Tahun 2026

Capaian urusan sosial Kabupaten Gresik menunjukkan adanya peningkatan dalam penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi kelompok rentan. Hal ini tercermin dari meningkatnya persentase perlindungan sosial untuk kelompok rentan dari 28,00 persen pada tahun 2024 menjadi 28,64 persen pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses pelayanan sosial bagi masyarakat yang menghadapi kerentanan sosial dan ekonomi.

Pada kelompok sasaran tertentu, capaian perlindungan sosial juga mengalami peningkatan. Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh program perlindungan sosial meningkat dari 15,00 persen menjadi 19,42 persen, sedangkan persentase lanjut usia miskin yang memperoleh program perlindungan sosial meningkat dari 18,00 persen menjadi 22,64 persen. Kondisi ini menunjukkan semakin luasnya jangkauan pelayanan sosial bagi kelompok yang

memerlukan perhatian khusus guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka.

Selain itu, persentase desil 1–2 dibandingkan dengan jumlah penduduk mengalami peningkatan dari 21,00 persen menjadi 24,14 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kelompok masyarakat berpendapatan rendah masih cukup besar sehingga memerlukan penguatan program perlindungan dan pemberdayaan sosial secara berkelanjutan. Sementara itu, indikator persentase keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial sektoral menunjukkan penurunan, yang perlu menjadi perhatian dalam rangka memastikan keberlanjutan dan ketepatan sasaran program bantuan sosial.

Secara umum, kinerja urusan sosial Kabupaten Gresik menunjukkan perkembangan positif dalam peningkatan cakupan perlindungan sosial bagi kelompok rentan, penyandang disabilitas, dan lanjut usia miskin. Ke depan, diperlukan penguatan integrasi data kesejahteraan sosial, peningkatan ketepatan sasaran program, serta pengembangan program pemberdayaan sosial agar masyarakat rentan tidak hanya memperoleh bantuan sosial, tetapi juga mampu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraannya secara berkelanjutan.

b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Ketenagakerjaan

Penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Gresik terdiri dari 7 sasaran dan 13 indikator sasaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.72
Capaian Indikator Sasaran Ketenagakerjaan Kabupaten Gresik
Tahun 2024-2025

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	REALISASI					TARGET	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Meningkatnya Partisipasi Ketenagakerjaan Perempuan	Pencari Kerja Perempuan yang mendapatkan Pekerjaan di sektor formal dan informal (%)	-	-	-	30	30,80	31.21	31.84
	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	53,87	51,42	54,37	56,37	52,54	57,3	57,76
Meningkatnya Partisipasi Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas	Pekerja Penyandang Disabilitas (%)	-	-	-	0,0012	0,01	0.0014	0.0014
Meningkatkan pelatihan tenaga kerja terhadap kebutuhan tenaga kerja bersertifikasi serta mendorong penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur.	Pelatihan Tenaga Kerja terhadap Kebutuhan Tenaga Kerja Bersertifikasi (%)	-	-	-	13	14,1	13.33	13.33
	Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Manufaktur (%)	-	-	-	21,65	45,98	42.78	44.44
Meningkatnya Tingkat Produktivitas Sumber Daya Manusia	Tingkat produktivitas tenaga kerja (%)	-	-	-	1,15	1,21	1.20	1.22
	penempatan kerja terhadap tenaga kerja dilatih (%)	-	-	-	72,12	71,31	70.5-73.5	71-74
Meningkatkan keberdayaan keluarga miskin dalam mendapatkan akses ketenagakerjaan	Pekerja dari Keluarga Miskin yang telah dijamin dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	-	-	-	40,0	40,5	40.8	41.6
Meningkatnya perluasan kesempatan kerja yang inklusif dan berkelanjutan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)				71,61	67,99	72.72	73.28
Meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan	Jaminan Sosial Ketenagakerjaa	-	-	-	47,64	47,64	48.59	49.56

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	REALISASI					TARGET	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
dan penyelesaian hubungan industrial yang adil dan inklusif	n Penerima Upah (%)							
	Persentase Penyelesaian Hubungan Industrial (%)	-	-	-	97,5	100	99.5	100
	Perusahaan yang telah membayar gaji karyawan sesuai Upah Minimum (%)	-	-	-	100	96,83	90-100	90-100
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	-	-	-	52,69	42,06	55.23	59.39

Sumber : LKPJ 2025 dan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

Pencari kerja perempuan yang berhasil memperoleh pekerjaan menunjukkan tren peningkatan yang positif. Dari capaian sebesar 30,00% pada tahun 2024, indikator ini meningkat menjadi 30,80% pada tahun 2025 dan ditargetkan terus meningkat menjadi 31,21% pada tahun 2026 serta 31,84% pada tahun 2027. Kenaikan ini mengindikasikan semakin terbukanya akses perempuan terhadap peluang kerja baik di sektor formal maupun informal. Peningkatan tersebut dapat dipengaruhi oleh semakin berkembangnya sektor jasa, perdagangan, industri pengolahan, dan usaha mikro yang relatif banyak menyerap tenaga kerja perempuan. Selain itu, pelaksanaan program pelatihan keterampilan, peningkatan kompetensi kerja, fasilitasi penempatan tenaga kerja, serta penguatan informasi pasar kerja turut berkontribusi dalam meningkatkan daya saing perempuan di pasar kerja. Meskipun demikian, tingkat keberhasilan penempatan kerja perempuan masih berada pada kisaran sepertiga dari total pencari kerja perempuan. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat tantangan berupa kesenjangan kompetensi, keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal, serta adanya faktor sosial dan domestik yang memengaruhi partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Oleh karena itu, diperlukan penguatan program pelatihan berbasis kebutuhan industri, peningkatan akses terhadap pekerjaan ramah

perempuan, serta perluasan kesempatan kerja yang mendukung keseimbangan antara kehidupan keluarga dan pekerjaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan pada tahun 2024 tercatat sebesar 56,37%, sedangkan target tahun 2025 sebesar 52,54%. Selanjutnya ditargetkan meningkat menjadi 57,30% pada tahun 2026 dan 57,76% pada tahun 2027. Target peningkatan pada periode 2026–2027 menunjukkan adanya komitmen untuk memperbesar keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif.

Pekerja penyandang disabilitas tercatat sebesar 0,0012 pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 0,01 pada tahun 2025. Namun target tahun 2026 dan 2027 ditetapkan sebesar 0,0014. Indikator ini mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif bagi kelompok penyandang disabilitas. Keterlibatan penyandang disabilitas dalam dunia kerja tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga pemenuhan hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Meskipun Kabupaten Gresik merupakan daerah industri yang memiliki potensi penyerapan tenaga kerja yang tinggi, kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas masih relatif terbatas dibandingkan jumlah angkatan kerja secara keseluruhan.

Pelatihan tenaga kerja terhadap kebutuhan tenaga kerja bersertifikasi meningkat dari 13,00% pada tahun 2024 menjadi 14,10% pada tahun 2025. Namun target tahun 2026 dan 2027 ditetapkan sebesar 13,33%. Indikator ini menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja. Kabupaten Gresik sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Jawa Timur memiliki kebutuhan tenaga kerja kompeten yang terus meningkat seiring berkembangnya sektor industri pengolahan, logistik, konstruksi, dan jasa pendukung industri. Oleh karena itu, ketersediaan tenaga kerja bersertifikasi menjadi

faktor penting dalam menjaga daya saing daerah dan menarik investasi.

Penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dari 21,65% pada tahun 2024 menjadi 45,98% pada tahun 2025. Selanjutnya ditargetkan berada pada level 42,78% pada tahun 2026 dan meningkat menjadi 44,44% pada tahun 2027. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor manufaktur masih menjadi penggerak utama perekonomian Kabupaten Gresik sekaligus penyerap tenaga kerja terbesar. Keberadaan kawasan industri besar seperti kawasan industri Gresik dan berkembangnya industri pengolahan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja baru.

Tingkat produktivitas tenaga kerja meningkat dari 1,15 pada tahun 2024 menjadi 1,21 pada tahun 2025. Selanjutnya ditargetkan mencapai 1,20 pada tahun 2026 dan meningkat menjadi 1,22 pada tahun 2027. Indikator ini menggambarkan kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi. Peningkatan produktivitas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak hanya ditopang oleh bertambahnya jumlah tenaga kerja, tetapi juga oleh meningkatnya kualitas dan efisiensi tenaga kerja. Kondisi ini menjadi penting bagi Kabupaten Gresik yang memiliki struktur ekonomi berbasis industri dan jasa modern yang menuntut tingkat produktivitas tinggi.

Penempatan kerja terhadap tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan tercatat sebesar 72,12% pada tahun 2024 dan 71,31% pada tahun 2025. Target tahun 2026 berada pada rentang 70,5–73,5% dan tahun 2027 pada rentang 71–74%. Secara umum, indikator ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta pelatihan kerja berhasil memperoleh pekerjaan setelah mengikuti pelatihan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa program pelatihan yang dilaksanakan relatif relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Pekerja dari Keluarga Miskin yang Telah Dijamin dalam Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) meningkat secara bertahap dari 40,00% pada tahun 2024 menjadi 40,50% pada tahun 2025, kemudian ditargetkan mencapai 40,80% pada tahun 2026 dan 41,60% pada tahun 2027. Peningkatan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan sosial bagi kelompok pekerja rentan dan keluarga miskin. Jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki peran strategis dalam mengurangi risiko kemiskinan akibat kecelakaan kerja, kematian, kehilangan pekerjaan, maupun risiko sosial lainnya. Meskipun tren peningkatan terlihat positif, cakupan perlindungan yang masih berada pada kisaran 40% menunjukkan bahwa masih terdapat pekerja dari keluarga miskin yang belum memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perluasan kepesertaan melalui sinergi pemerintah daerah, dunia usaha, dan program tanggung jawab sosial perusahaan.

TPAK secara keseluruhan tercatat sebesar 71,61% pada tahun 2024, dengan target tahun 2025 sebesar 67,99%, kemudian meningkat menjadi 72,72% pada tahun 2026 dan 73,28% pada tahun 2027. Indikator ini menunjukkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif bekerja maupun mencari pekerjaan. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar potensi sumber daya manusia yang terlibat dalam aktivitas ekonomi.

Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah meningkat dari 47,64% pada tahun 2024–2025 menjadi 48,59% pada tahun 2026 dan 49,56% pada tahun 2027. Peningkatan ini mencerminkan semakin luasnya perlindungan sosial bagi pekerja formal. Namun demikian, masih terdapat sekitar separuh pekerja penerima upah yang belum terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan serta penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Persentase penyelesaian hubungan industrial meningkat dari 97,50% pada tahun 2024 menjadi 100% pada tahun 2025 dan ditargetkan tetap berada pada kisaran 99,5–100% hingga tahun 2027. Capaian yang sangat tinggi ini menunjukkan efektivitas mekanisme mediasi dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Gresik. Kondisi tersebut penting untuk menjaga stabilitas iklim investasi dan hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan perusahaan. Keberhasilan penyelesaian hubungan industrial juga mencerminkan meningkatnya kapasitas kelembagaan ketenagakerjaan dalam memberikan pelayanan penyelesaian perselisihan secara cepat, adil, dan berkelanjutan.

Perusahaan yang membayar upah sesuai ketentuan upah minimum mengalami penurunan dari 100% pada tahun 2024 menjadi 96,83% pada tahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan masih adanya perusahaan yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan pengupahan. Faktor penyebabnya dapat berasal dari kondisi usaha, kemampuan finansial perusahaan, maupun lemahnya pengawasan ketenagakerjaan. Meskipun tingkat kepatuhan masih tergolong tinggi, pemerintah daerah perlu terus memperkuat pembinaan dan pengawasan agar hak-hak pekerja dapat terlindungi serta daya beli masyarakat tetap terjaga.

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan mengalami penurunan dari 52,69% pada tahun 2024 menjadi 42,06% pada tahun 2025. Namun target tahun 2026 dan 2027 meningkat signifikan menjadi 55,23% dan 59,39%. Penurunan pada tahun 2025 menunjukkan adanya tantangan dalam perluasan kepesertaan, terutama pada pekerja informal, pekerja rentan, dan usaha mikro kecil. Sementara itu, target peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2026–2027 menunjukkan adanya kebutuhan percepatan perluasan perlindungan sosial ketenagakerjaan.

A.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Gresik selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif, terutama apabila dilihat dari indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK Kabupaten Gresik tercatat sebesar 69,43 persen pada tahun 2021, kemudian mengalami penurunan menjadi 68,30 persen pada tahun 2022, meningkat kembali menjadi 70,12 persen pada tahun 2023, naik menjadi 71,61 persen pada tahun 2024, dan kembali turun cukup signifikan menjadi 67,99 persen pada tahun 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa partisipasi penduduk usia kerja dalam aktivitas ekonomi belum sepenuhnya stabil dan masih sangat dipengaruhi oleh dinamika ekonomi nasional, regional Jawa Timur, serta kondisi struktural pasar kerja di Kabupaten Gresik.

Tabel 2.73

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Gresik

Uraian	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025 Berdasarkan Jenis Kelamin				
	2021	2022	2023	2024	2025
Laki-Laki	85,55	85,78	85,82	86,80	83,38
Perempuan	53,87	51,42	54,37	56,37	52,54
Kabupaten Gresik	69,43	68,30	70,12	71,61	67,99

Sumber: BPS Gresik, 2026
Tahun 2024: Angka Sementara
Tahun 2025: Angka Sangat Sementara

Secara umum, TPAK merupakan indikator yang menggambarkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Dengan demikian, perubahan TPAK mencerminkan perubahan perilaku masyarakat terhadap pasar kerja dan kemampuan perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Fluktuasi TPAK Kabupaten Gresik dalam lima tahun terakhir erat kaitannya dengan proses pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, perubahan struktur industri, tekanan ekonomi global, serta transformasi sektor ketenagakerjaan di Jawa Timur.

Pada tahun 2021, TPAK Kabupaten Gresik sebesar 69,43 persen dengan Laki-Laki sebesar 85,55 persen dan Perempuan 53,87 persen. Pada periode ini, aktivitas ekonomi nasional dan daerah belum sepenuhnya pulih akibat pembatasan mobilitas, perlambatan investasi, serta penurunan aktivitas industri dan perdagangan yang terjadi sejak tahun 2020. Kabupaten Gresik sebagai wilayah industri manufaktur dan kawasan penyangga metropolitan Surabaya turut mengalami dampak perlambatan ekonomi, khususnya pada sektor pengolahan, perdagangan, transportasi, dan jasa. Banyak perusahaan pada periode tersebut masih menerapkan efisiensi tenaga kerja, pengurangan jam kerja, maupun penundaan ekspansi usaha. Akibatnya, sebagian penduduk usia kerja memilih keluar sementara dari pasar kerja karena rendahnya peluang kerja yang tersedia. Kondisi ini sejalan dengan situasi ketenagakerjaan nasional dan Provinsi Jawa Timur yang pada masa pemulihan pandemi masih menghadapi tingginya pekerja informal dan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja formal.

Pada tahun 2022, TPAK Kabupaten Gresik kembali menurun menjadi 68,30 persen. Penurunan ini berasal dari menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja Perempuan menjadi 51,42 persen. Penurunan ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan partisipasi angkatan kerja secara merata dan bergesernya peran perempuan dalam dunia kerja. Meskipun perekonomian nasional mulai tumbuh positif, kondisi ketenagakerjaan masih menghadapi tantangan berupa mismatch keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri, meningkatnya kelompok usia sekolah dan pendidikan tinggi yang menunda masuk pasar kerja, serta masih besarnya proporsi pekerja informal. Selain itu, pada tahun 2022 terjadi tekanan global akibat kenaikan harga energi dan pangan dunia sebagai dampak konflik geopolitik internasional yang menyebabkan ketidakpastian ekonomi. Kondisi tersebut memengaruhi sektor industri manufaktur dan logistik yang menjadi

tulang punggung ekonomi Kabupaten Gresik. Dunia usaha cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan perekrutan tenaga kerja baru sehingga pertumbuhan kesempatan kerja tidak secepat pertumbuhan jumlah penduduk usia kerja. Situasi tersebut berdampak pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam pasar kerja.

Memasuki tahun 2023, kondisi TPAK Kabupaten Gresik mengalami peningkatan menjadi 70,12 persen. TPAK Laki-Laki dan Perempuan sama-sama mengalami peningkatan pada tahun ini. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi dan pasar tenaga kerja seiring membaiknya aktivitas industri dan perdagangan pascapandemi. Pemulihan sektor manufaktur di Jawa Timur mulai mendorong peningkatan kebutuhan tenaga kerja, termasuk di kawasan industri Gresik yang memiliki konsentrasi industri semen, petrokimia, logam, pergudangan, dan industri pengolahan lainnya. Selain itu, peningkatan investasi nasional dan daerah turut memberikan efek positif terhadap pembukaan lapangan kerja baru. Pada periode ini, aktivitas ekonomi masyarakat kembali normal, mobilitas tenaga kerja meningkat, serta sektor informal kembali tumbuh. Kondisi tersebut menyebabkan semakin banyak penduduk usia kerja yang masuk kembali ke pasar kerja baik sebagai pekerja formal maupun informal. Jawa Timur sendiri pada tahun 2023 mencatat perbaikan indikator ketenagakerjaan yang ditandai dengan meningkatnya TPAK provinsi dan menurunnya tingkat pengangguran terbuka.

Tren positif tersebut berlanjut pada tahun 2024 ketika TPAK Kabupaten Gresik meningkat menjadi 71,61 persen, yang merupakan capaian tertinggi selama periode lima tahun terakhir. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa kondisi pasar kerja di Kabupaten Gresik relatif membaik dan mampu menarik lebih banyak penduduk usia kerja untuk aktif secara ekonomi. Kinerja ekonomi Jawa Timur pada tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan yang cukup stabil didukung oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, dan jasa. Kabupaten Gresik sebagai

salah satu pusat industri strategis di Jawa Timur memperoleh dampak positif dari meningkatnya aktivitas investasi dan ekspansi industri. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik tahun 2024 juga tercatat mencapai 4,79 persen. Peningkatan TPAK tahun 2024 juga dipengaruhi oleh membaiknya optimisme masyarakat terhadap peluang kerja dan usaha. Aktivitas ekonomi domestik yang lebih kuat mendorong peningkatan permintaan tenaga kerja, termasuk pekerja informal dan usaha mikro kecil. Selain itu, meningkatnya kebutuhan tenaga kerja pada sektor konstruksi, pergudangan, transportasi, dan industri pengolahan turut memperluas kesempatan kerja. Secara regional, kondisi Jawa Timur juga menunjukkan peningkatan TPAK hingga mencapai lebih dari 73 persen pada tahun 2024, yang menandakan adanya penguatan aktivitas ekonomi dan pasar tenaga kerja di tingkat provinsi.

Namun demikian, pada tahun 2025 TPAK Kabupaten Gresik mengalami penurunan cukup tajam menjadi 67,99 persen. Penurunan ini menjadi indikasi bahwa pasar tenaga kerja kembali menghadapi tekanan. Secara nasional dan regional, tahun 2025 ditandai dengan meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, perlambatan industri manufaktur tertentu, serta meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor industri padat karya di Indonesia. Data ketenagakerjaan nasional menunjukkan adanya peningkatan jumlah PHK dan meningkatnya klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pada semester pertama tahun 2025. Kondisi ini terutama memengaruhi sektor industri formal yang memiliki keterkaitan dengan rantai pasok global dan tekanan permintaan ekspor.

Sebagai daerah industri, Kabupaten Gresik sangat sensitif terhadap perubahan kondisi ekonomi nasional dan global. Ketika sektor industri mengalami perlambatan produksi atau efisiensi tenaga kerja, maka dampaknya langsung dirasakan terhadap penyerapan tenaga kerja. Penurunan TPAK tahun 2025 mengindikasikan bahwa sebagian penduduk usia kerja memilih

keluar sementara dari pasar kerja, baik karena sulit memperoleh pekerjaan, melanjutkan pendidikan, maupun menurunnya motivasi mencari kerja akibat terbatasnya peluang kerja yang tersedia. Selain itu, transformasi industri menuju otomatisasi dan efisiensi produksi juga berpotensi mengurangi kebutuhan tenaga kerja pada beberapa sektor tertentu. Meskipun demikian, kondisi penurunan TPAK tidak selalu sepenuhnya mencerminkan memburuknya ekonomi daerah. Dalam beberapa kasus, penurunan TPAK juga dapat dipengaruhi oleh meningkatnya penduduk usia sekolah dan pendidikan tinggi, khususnya kelompok usia muda yang menunda masuk pasar kerja untuk meningkatkan kompetensi pendidikan dan keterampilan. Namun secara umum, penurunan TPAK tahun 2025 tetap perlu menjadi perhatian karena menunjukkan adanya pelemahan partisipasi ekonomi masyarakat usia kerja dibanding tahun sebelumnya. Apabila dianalisis secara keseluruhan, fluktuasi TPAK Kabupaten Gresik selama tahun 2021–2025 memperlihatkan bahwa struktur ketenagakerjaan daerah masih sangat dipengaruhi oleh dinamika ekonomi makro dan sektor industri. Pada saat ekonomi mengalami pemulihan dan ekspansi, TPAK cenderung meningkat karena peluang kerja bertambah dan optimisme masyarakat terhadap pasar kerja membaik. Sebaliknya, ketika terjadi perlambatan ekonomi, efisiensi industri, dan meningkatnya ketidakpastian usaha, maka TPAK cenderung menurun akibat berkurangnya penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya kelompok bukan angkatan kerja.

A.2. Tingkat Kesempatan Kerja

Tingkat Kesempatan Kerja merupakan indikator yang menggambarkan kemampuan perekonomian daerah dalam menyerap tenaga kerja yang tersedia. Semakin tinggi tingkat kesempatan kerja, semakin besar proporsi penduduk usia kerja yang memperoleh pekerjaan, sehingga mencerminkan kondisi

pasar kerja yang semakin kondusif. Peningkatan indikator ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi jumlah pengangguran. Sebaliknya, apabila tingkat kesempatan kerja mengalami penurunan, hal tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan kesempatan kerja belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja. Oleh karena itu, peningkatan investasi, pengembangan sektor-sektor produktif, serta penguatan kewirausahaan menjadi faktor penting dalam memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Persentase pencari kerja yang diberi pelatihan menunjukkan tingkat cakupan pelayanan peningkatan kompetensi tenaga kerja yang dilakukan pemerintah daerah. Indikator ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Semakin tinggi persentase pencari kerja yang memperoleh pelatihan, semakin besar peluang tenaga kerja untuk memiliki keterampilan yang relevan dan daya saing yang lebih baik di pasar kerja. Pelatihan yang berorientasi pada kebutuhan industri juga dapat mengurangi kesenjangan kompetensi (skill mismatch) antara pencari kerja dengan kebutuhan pengguna tenaga kerja. Dengan demikian, peningkatan cakupan pelatihan menjadi salah satu strategi penting dalam mendukung penyerapan tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

Persentase pencari kerja yang ditempatkan menggambarkan tingkat keberhasilan layanan penempatan tenaga kerja dalam mempertemukan pencari kerja dengan peluang kerja yang tersedia. Indikator ini mencerminkan efektivitas sistem informasi pasar kerja, layanan antar kerja, serta sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga penempatan tenaga kerja. Semakin tinggi persentase pencari kerja yang berhasil ditempatkan, semakin efektif proses matching antara kebutuhan perusahaan dan kompetensi tenaga kerja. Peningkatan indikator ini juga menunjukkan bahwa pasar kerja daerah semakin responsif

terhadap kebutuhan tenaga kerja yang tersedia. Oleh karena itu, penguatan layanan bursa kerja, pemanfaatan teknologi informasi ketenagakerjaan, serta peningkatan kerja sama dengan sektor industri perlu terus dilakukan untuk memperluas akses kesempatan kerja bagi masyarakat.

Tabel 2.74

Indikator Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Gresik

Uraian	Indikator Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025				
	2021	2022	2023	2024	2025
Tingkat Kesempatan Kerja	91,79%	92,16%	93,18%	93,55%	94,53%
Persentase Pencari Kerja yang diberi Pelatihan	36,91%	7,56%	11,37%	5,55%	15,61%
Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	46.61%	26.82%	39.04%	10,53%	55%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, 2026

Ketiga indikator tersebut saling berkaitan dalam menggambarkan kondisi ketenagakerjaan daerah. Peningkatan persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan akan meningkatkan kompetensi tenaga kerja, yang pada akhirnya memperbesar peluang penempatan kerja. Keberhasilan penempatan tenaga kerja selanjutnya akan berkontribusi terhadap peningkatan tingkat kesempatan kerja secara keseluruhan. Dengan demikian, upaya peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan penguatan layanan penempatan kerja merupakan instrumen penting dalam menciptakan pasar kerja yang produktif, inklusif, dan berdaya saing guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

A.3. Hubungan Industrial

Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial merupakan indikator yang menggambarkan efektivitas penyelenggaraan hubungan industrial di Kabupaten Gresik dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang harmonis, dinamis, dan

berkeadilan. Sebagai daerah yang memiliki konsentrasi industri cukup tinggi, interaksi antara pekerja dan perusahaan berlangsung dalam skala yang besar sehingga berpotensi menimbulkan berbagai perselisihan terkait hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, maupun perselisihan antarserikat pekerja. Oleh karena itu, kemampuan pemerintah daerah dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan perundang-undangan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas hubungan industrial.

Tabel 2.75

Indikator Hubungan Industrial Kabupaten Gresik

Uraian	Indikator Hubungan Industrial Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025				
	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	78,79%	69,70%	97,33%		100%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, 2026

Penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial di kabupaten gresik selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pada Tahun 2025, persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Gresik tercapai 100 persen. Tingginya persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial menunjukkan bahwa mekanisme mediasi, konsiliasi, dan fasilitasi yang dilakukan pemerintah daerah berjalan efektif. Kondisi ini memberikan kepastian hukum bagi pekerja maupun perusahaan, meningkatkan kepercayaan dunia usaha, serta mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif. Sebaliknya, rendahnya tingkat penyelesaian perselisihan berpotensi menimbulkan ketidakpastian usaha, gangguan produktivitas perusahaan, hingga berdampak pada penurunan minat investasi dan penyerapan tenaga kerja.

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan strategi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya

Manusia melalui peningkatan peran perempuan dalam mengembangkan potensi diri agar mampu mandiri dan berkarya, serta upaya pencegahan terhadap kekerasan terhadap anak. Peran perempuan diwujudkan dalam program-program pengarusutamaan gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. indikator urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.76
Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun (%)	-	-	-	9,27	8,21
Total Fertility Rate (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	-	-	-	1,92	1,92
Penurunan Kasus Perkawinan Usia Anak dihitung dari pengajuan dispensasi kawin (%)	-	-	-	10	11,92
anak pekerja migran yang mendapatkan perlindungan pasca pemulangan (%)	-	-	-	100	100
Persentase Kasus Anak Dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Konprehensif (%)	-	-	-	100	100

Sumber: Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik, Tahun 2026

Beberapa indikator pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan indikator baru yang mulai digunakan sebagai bagian dari penyempurnaan sistem pengukuran kinerja daerah. Oleh karena itu, data realisasi untuk periode Tahun 2021–2023 belum tersedia karena pengukuran terhadap indikator-indikator tersebut belum dilaksanakan pada periode tersebut. Penyajian data realisasi dimulai pada tahun 2024 sesuai dengan mekanisme pengukuran dan ketersediaan data yang telah ditetapkan

Secara umum, kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2025 menunjukkan tren positif. Hal ini ditandai dengan menurunnya angka perkawinan usia anak dan unmet need KB, meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga, serta

semakin kuatnya pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan. Selain itu, layanan perlindungan anak tetap terjaga dengan capaian 100% pada penanganan anak dalam situasi khusus dan anak pekerja migran pasca pemulangan.

3) Pangan

Kualitas konsumsi pangan masyarakat dapat tercermin dari besaran skor Pola Pangan Harapan (PPH), skor PPH memiliki nilai maksimal 100, yang berarti memiliki tingkat keberagaman yang optimal. Skor PPH dijadikan sebagai salah satu indikasi keberhasilan dalam program prioritas peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan di Kabupaten Gresik. Ketersediaan dan akses pangan di Kabupaten Gresik menunjukkan perkembangan yang semakin baik, tercermin dari capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang menggambarkan tingkat keberagaman, keseimbangan, dan mutu konsumsi pangan masyarakat. Skor PPH Kabupaten Gresik mengindikasikan bahwa struktur konsumsi pangan masyarakat telah bergerak menuju pola yang lebih beragam dan bergizi seimbang, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan pada kelompok pangan tertentu agar mendekati kondisi ideal. Kondisi ini tidak terlepas dari kontribusi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan yang relatif stabil dalam mendukung ketersediaan pangan pokok maupun pangan sumber protein hewani dan nabati. Ke depan, peningkatan skor PPH perlu terus didorong melalui penguatan produksi pangan lokal, diversifikasi konsumsi pangan, serta edukasi gizi masyarakat, sehingga ketahanan pangan Kabupaten Gresik dapat terwujud secara berkelanjutan dan inklusif.

Indikator urusan pangan di Kabupaten Gresik terdiri dari ketersediaan pangan Per Kapita, Skor Pola Pangan Harapan (Nilai), Indeks Ketahanan Pangan (IKP), Stabilitas Harga Pangan Utama (Beras)(%). Capaian indikator pangan Kabupaten Gresik secara detail sebagai berikut.

Tabel 2.77
Indikator Pola Pangan Harapan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
ketersediaan pangan Per Kapita (kg/kapita/th)	167.38	180,73	183.27	184,04	170,00
Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	83,37	85,80	92,6	93,6	95,85
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	88,25	86,81	90,39	77,82	78,46
Stabilitas Harga Pangan Utama (Beras)(%)	9,89%	9,58%	9,19%	9,39%	3,18%

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Gresik, Tahun 2026

Berdasarkan tabel diatas, ketersediaan pangan per kapita menunjukkan tren peningkatan selama tahun 2021–2024, dari 167,38 kg/kapita/tahun pada tahun 2021 menjadi 184,04 kg/kapita/tahun pada tahun 2024. Peningkatan tersebut mengindikasikan semakin baiknya kemampuan daerah dalam menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat. Namun demikian, pada tahun 2025 ketersediaan pangan per kapita menurun menjadi 170,00 kg/kapita/tahun atau turun sekitar 7,6% dibanding tahun 2024. Penurunan tersebut dikarenakan adanya standar perhitungan konversi Gabah Kering Panen (GKP) ke Gabah Kering Giling dari BPS Gresik sebesar 83,38%. Meskipun masih berada pada tingkat yang relatif tinggi, Penurunan ini mengindikasikan adanya pengaruh faktor produksi, distribusi pangan, perubahan jumlah penduduk, maupun penyesuaian metode perhitungan.

Dari aspek kualitas konsumsi pangan masyarakat, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) menunjukkan peningkatan yang konsisten. Nilai PPH meningkat dari 83,37 pada tahun 2021 menjadi 95,85 pada tahun 2025. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin baiknya pola konsumsi masyarakat yang lebih beragam, bergizi seimbang, dan aman. Capaian ini juga menunjukkan keberhasilan berbagai upaya edukasi dan intervensi pemerintah dalam

mendorong diversifikasi konsumsi pangan serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi yang berkualitas.

Sementara itu, Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Gresik mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 IKP tercatat sebesar 88,25, kemudian menurun menjadi 86,81 pada tahun 2022. pada Tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 90,30. Namun pada Tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 77,82 dan Tahun 2025 sebesar 78,46. Penurunan tersebut dikarenakan terdapat penambahan indikator dalam perhitungan IKP dari awalnya 9 menjadi 12 indikator. Penurunan tersebut bukan sebagai indikasi penurunan kinerja melainkan sebagai tantangan dalam aspek ketahanan pangan yang meliputi ketersediaan, aksesibilitas, maupun pemanfaatan pangan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan daerah melalui peningkatan kapasitas produksi, penguatan akses masyarakat terhadap pangan, serta pengembangan sistem pangan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Pada indikator stabilitas harga pangan utama, khususnya beras, kondisi menunjukkan perbaikan yang cukup baik. Tingkat fluktuasi harga beras yang mencapai 9,89 persen pada tahun 2021 cenderung menurun menjadi 9,58 persen pada tahun 2022 dan 9,19 persen pada tahun 2023. Meskipun sempat meningkat menjadi 9,39 persen pada tahun 2024, pada tahun 2025 tingkat fluktuasi harga beras berhasil ditekan secara signifikan menjadi 3,18 persen. Kondisi ini menunjukkan semakin efektifnya upaya pengendalian inflasi pangan, penguatan distribusi, serta koordinasi antar instansi dalam menjaga pasokan dan keterjangkauan harga pangan di masyarakat.

Secara keseluruhan, Dari keempat indikator tersebut, capaian terbaik Kabupaten Gresik berada pada aspek kualitas konsumsi pangan (PPH) dan stabilitas harga pangan, sedangkan tantangan utama tahun 2025 terdapat pada penurunan ketersediaan pangan

dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Sehingga perlu diperhatikan dalam hal : dimasukkan identifikasi permasalahan

1. Memperkuat produksi dan cadangan pangan daerah untuk meningkatkan ketersediaan pangan per kapita.
2. Meningkatkan intervensi pada wilayah rentan pangan untuk memperbaiki capaian IKP.
3. Melanjutkan program diversifikasi konsumsi pangan yang telah berhasil meningkatkan skor PPH.
4. Mempertahankan upaya pengendalian inflasi dan stabilisasi harga pangan, khususnya beras.
5. Memperkuat sinergi antara sektor pertanian, perdagangan, dan ketahanan pangan guna menjaga keberlanjutan ketahanan pangan daerah

4) Pertanahan

Urusan Pertanahan memiliki peran strategis dalam mendukung tertib administrasi pertanahan, kepastian hukum atas penguasaan dan pemanfaatan tanah, serta mendukung percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Penyelenggaraan urusan pertanahan diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan pertanahan yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna mendukung pembangunan infrastruktur, investasi, pelayanan publik, serta perlindungan hak masyarakat atas tanah.

Pelaksanaan urusan pertanahan di Kabupaten Gresik difokuskan pada fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan, pengamanan aset tanah milik pemerintah daerah, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penanganan konflik dan sengketa pertanahan, serta peningkatan tertib administrasi pertanahan. Selain itu, urusan pertanahan juga mendukung sinkronisasi pemanfaatan ruang dengan status dan peruntukan tanah guna menciptakan pembangunan wilayah yang terarah dan sesuai dengan rencana tata ruang daerah.

Dalam mendukung pembangunan daerah, pengelolaan pertanahan menjadi salah satu aspek penting terutama dalam

pelaksanaan pembangunan infrastruktur strategis, pengembangan kawasan permukiman, kawasan industri, fasilitas umum, serta pembangunan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar perangkat daerah, pemerintah pusat, pemerintah desa, dan masyarakat guna memastikan proses pengadaan tanah dan pengelolaan aset berjalan secara efektif serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seiring meningkatnya kebutuhan lahan akibat pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah, tantangan dalam urusan pertanahan juga semakin kompleks, antara lain terkait sengketa lahan, tumpang tindih kepemilikan, alih fungsi lahan, serta kebutuhan percepatan penyediaan tanah untuk pembangunan. Untuk itu, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan pertanahan, penguatan data dan informasi pertanahan, serta optimalisasi pengamanan aset daerah guna meminimalkan potensi konflik dan mendukung kepastian hukum.

Selain mendukung pembangunan fisik, urusan pertanahan juga memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan ketahanan wilayah melalui pengendalian pemanfaatan lahan yang sesuai dengan fungsi ruang dan daya dukung lingkungan. Pengelolaan pertanahan yang baik diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi, sosial, dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan urusan pertanahan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait agar tercipta tata kelola pertanahan yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan pengelolaan pertanahan yang tertib dan terintegrasi, diharapkan dapat mendukung percepatan pembangunan daerah, meningkatkan kepastian hukum, mengurangi potensi konflik pertanahan, serta mewujudkan pembangunan Kabupaten Gresik yang aman, tertata, dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan urusan Pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada Tahun 2021–2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.78
Indikator Urusan Pertanahan

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Lokasi tanah yang dibebaskan (%)	100	100	100	50	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik

Berdasarkan capaian indikator Urusan Pertanahan Kabupaten Gresik Tahun 2021–2025, indikator persentase lokasi tanah yang dibebaskan menunjukkan perkembangan yang positif dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Indikator ini menggambarkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan proses pengadaan dan pembebasan lahan guna mendukung pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan program strategis daerah.

Pada tahun 2024, persentase lokasi tanah yang dibebaskan mencapai 50%, kemudian meningkat secara signifikan menjadi 100% pada tahun 2025. Peningkatan capaian tersebut menunjukkan adanya percepatan dan optimalisasi pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, penguatan administrasi pertanahan, serta peningkatan komunikasi dan pendekatan kepada masyarakat terdampak.

Keberhasilan pencapaian pembebasan lahan tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan program prioritas daerah. Selain itu, capaian ini juga mencerminkan meningkatnya efektivitas pemerintah daerah dalam menyelesaikan proses administrasi pertanahan, penyediaan dokumen pendukung, serta

penyelesaian berbagai kendala yang muncul dalam proses pengadaan tanah.

Pelaksanaan urusan pertanahan tidak terlepas dari berbagai tantangan, antara lain perbedaan status kepemilikan lahan, keterbatasan dokumen administrasi, potensi sengketa pertanahan, serta kebutuhan sinkronisasi dengan rencana tata ruang wilayah. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan koordinasi antar perangkat daerah, pemerintah desa, instansi pertanahan, dan masyarakat guna memastikan proses pengadaan tanah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Gresik akan terus mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pertanahan melalui penguatan tertib administrasi, optimalisasi pengamanan aset daerah, percepatan penyelesaian permasalahan pertanahan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan tanah. Dengan demikian, urusan pertanahan diharapkan dapat terus mendukung percepatan pembangunan daerah secara efektif, tertib, dan berkelanjutan.

5) Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dasar bidang lingkungan hidup di Kabupaten Gresik dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Fokus layanan lingkungan hidup dilaksanakan melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan persampahan, peningkatan kualitas air dan udara, serta penguatan tata kelola lingkungan hidup yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Pada Tahun Anggaran 2025, capaian indikator kinerja pembangunan daerah urusan Lingkungan Hidup menunjukkan tren yang positif dan cukup efektif terutama pada aspek layanan dasar

persampahan dan perbaikan kualitas komponen lingkungan. Peningkatan persentase sampah terolah, cakupan layanan pengumpulan sampah, serta akses layanan bagi rumah tangga miskin menandakan penguatan fungsi pelayanan publik. Hal ini diperkuat oleh realisasi belanja infrastruktur yang menjaga keberlanjutan openal layanan. Untuk memperjelas uraian di atas, secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.79

Indikator Urusan Lingkungan Hidup

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase RTH (%)	-	-	-	11,65	12,07
Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	-	-	-	24,44	25,66
Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	-	-	-	58,7	58,8
Persentase Infrastruktur Publik Ramah Lingkungan untuk Kelompok Rentan (%	-	-	-	14	14,29
Indeks Kualitas Air (IKA)	47,78	48,24	49,38	50,00	73,07
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	32,25	32,86	32,17	35,30	49,19
Indeks Kualitas Udara (IKU)	68,79	81,24	81,24	82,94	74,45
Perusahaan yang menerapkan Green Industry ()	-	-	-	5,26	6,86
Persentase Rumah Tangga Miskin yang terlayani Pengelolaan Persampahan (%)	-	-	-	67	67,44
Realisasi Belanja Infrastruktur	-	-	-	80	80

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Urusan Lingkungan Hidup (%)					

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Pada aspek kualitas lingkungan hidup, persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) mencapai 12,07% di tahun 2025 yang menunjukkan adanya peningkatan luasan RTH sebesar 0,42 dibanding Tahun 2024 yang menandakan kenaikan positif tetapi jika disandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Gresik, capaian tersebut perlu adanya peningkatan penyediaan RTH melalui optimalisasi lahan publik, revegetasi, dan kewajiban RTH pada pengembangan kawasan.

Sebagai upaya untuk peningkatan kebersihan lingkungan melalui pengelolaan persampahan, telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan berbagai program kegiatan. Dalam hal peningkatan perilaku masyarakat dilakukan melalui pembinaan dan pembentukan Bank Sampah yang berbasis ekonomi sirkuler, kemudian melalui program GKMS (Gresik Kawasan Merdeka Sampah) yang mengusung konsep pentahelix dan desentralisasi dalam pengelolaan persampahan dengan gerakan Zero Waste pada kawasan yang belum memiliki TPS3R dan Pengelolaan Sampah Kawasan pada Desa/Kelurahan yang telah memiliki TPS3R. Untuk mendukung hal tersebut, juga perlu diimbangi dengan infrastruktur persampahan yang memadai. Secara kinerja aspek persampahan, dicapai melalui 3 indikator pada Tahun 2025, yaitu Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah dengan capaian kinerja 25,66% yang menandakan peningkatan kapasitas layanan dan kinerja fasilitas pengolahan, namun kebutuhan akan infrastruktur diperlukan sebagai bagian optimalisasi layanan. Indikator lainnya adalah proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah dengan perolehan realisasi kinerja layanan sebesar 58,72% yang menunjukkan penguatan akses layanan dasar persampahan dan

pengurangan praktik pembuangan telah terkendali tetapi perlu peningkatan perluasan jangkauan ke wilayah yang belum terlayani, optimasi rute angkut, serta perluasan integrasi skema berbasis masyarakat khususnya melalui program GKMS menjadi faktor penentu peningkatan cakupan, serta Persentase Rumah Tangga Miskin yang terlayani Pengelolaan Persampahan.

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Gresik Capaian 67,44% menegaskan keberpihakan layanan pengelolaan persampahan kepada kelompok rentan. Capaian Indeks Kualitas Air (IKA) yang merupakan salah satu komponen utama penyusun IKLH mengalami peningkatan signifikan dari 50 menjadi 73,07 pada tahun 2025 yang menunjukkan optimalisasi pengendalian pencemaran air khususnya pada aktivitas domestik terutama pada peningkatan akses sanitasi, sektor pertanian, hingga industri yang berdampak pada capaian IKA berjalan dengan baik. Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Gresik menunjukkan kenaikan pada Tahun 2025 menjadi 49,19 yang menunjukkan dampak positif dari upaya rehabilitasi lahan tetapi kondisi kualitas lahan masih memerlukan peningkatan secara signifikan. Nilai tersebut menggambarkan adanya keterbatasan daya dukung lingkungan, yang dapat dipengaruhi oleh faktor seperti alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri maupun perumahan, degradasi tanah akibat intensitas pemanfaatan yang tinggi, serta keterbatasan upaya konservasi lahan. Kondisi IKL yang masih rendah ini berimplikasi pada berkurangnya kemampuan lahan dalam mendukung ketahanan pangan, penyediaan ruang untuk kegiatan ekonomi, serta fungsi ekologis. Hal ini menjadi dasar penting bagi Pemerintah Kabupaten Gresik untuk memperkuat kebijakan pengendalian alih fungsi lahan, meningkatkan program rehabilitasi dan konservasi, serta memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan agar keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kebutuhan sosial, dan kelestarian lingkungan dapat tercapai. Indeks Kualitas Udara (IKU) pada tahun 2025 mencapai 74,45 dan lebih rendah dibanding tahun 2024 sebesar 82.94, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemantauan

gas buang Emisi kendaraan bermotor yang beroperasi di Kabupaten Gresik dan masih banyak sumber Emisi fugitif yang belum dikelola dengan baik (Emisi fugitif adalah emisi yang secara teknis tidak dapat melewati cerobong, ventilasi atau sistem pembuangan Emisi yang setara, misalnya debu dari pipa di dalam pabrik yang tidak melalui cerobong, debu kendaraan, dst).

Sebagai upaya meningkatkan capaian tersebut diperlukan Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik berkomitmen dalam meningkatkan pengendalian pencemaran udara khususnya dari sektor industri dan transportasi.

Di sisi lain, dalam hal peningkatan kepatuhan sektor industri terhadap lingkungan melalui Green Industry yang merupakan sebuah konsep menjalankan proses produksi secara efisien dalam penggunaan sumber daya dan minim dampak lingkungan, sekaligus tetap menjaga daya saing ekonomi. Realisasi Tahun 2025 diperoleh sebesar 6,86% industri yang telah menerapkan konsep tersebut, nilai tersebut meningkat jika dibandingkan dengan Tahun 2024 mencapai 5,26%.

Namun demikian, kinerja belum sepenuhnya optimal karena kualitas udara masih dipengaruhi tekanan aktivitas ekonomi dan persentase RTH belum memadai untuk menopang fungsi ekologis wilayah. Dengan demikian, kinerja tahun 2025 dapat dikategorikan baik namun memerlukan penguatan pada pengendalian emisi dan perluasan RTH agar peningkatan kualitas lingkungan berlangsung lebih seimbang dan berkelanjutan.

6) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang bertujuan mewujudkan tertib administrasi kependudukan melalui penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta

pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Tabel 2.80
Indikator Sasaran Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Tahun 2021-2025

INDIKATOR SASARAN	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
Pertumbuhan kepemilikan KIA (%)	-	-	-	0,08	0,066
Persentase pemutakhiran data dan dokumen kependudukan (%)	-	-	-	83,00	98,16
Persentase Kepemilikan e-KTP (%)	98,19	98,88	99,17	99,53	98,6
Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran (%)	-	-	-	61,04	65,93
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (Indeks)	86,48	86,5	89,98	90,60	90,77
Persentase Kepemilikan e-KTP untuk Keluarga Miskin (%)	-	-	-	88,33	99,96
Persentase kepemilikan Akta Kelahiran untuk Keluarga Miskin (%)	-	-	-	88,67	100
Persentase pekerja migran yang terfasilitasi pelayanan Adminduk (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gresik Tahun 2026

Secara garis besar, kinerja penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Gresik menunjukkan perkembangan yang cukup baik, ditandai dengan masih tingginya prosentase kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk wajib dokumen, seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, Akta Kematian, serta dokumen pencatatan sipil lainnya. Peningkatan tersebut didukung oleh optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan melalui

pelayanan tatap muka, pelayanan daring, pelayanan terintegrasi dengan instansi terkait, serta layanan jemput bola yang menyasar masyarakat rentan dan wilayah dengan akses pelayanan terbatas.

Selain peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, pengelolaan database kependudukan juga terus diperkuat melalui pemutakhiran data penduduk secara berkelanjutan. Data kependudukan yang akurat dan mutakhir menjadi instrumen penting dalam mendukung perencanaan pembangunan, penyaluran bantuan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, serta berbagai program pembangunan daerah lainnya yang memerlukan data sasaran yang valid.

Dalam rangka mendukung pembangunan daerah Tahun 2027, arah kebijakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel; peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan; penguatan sistem informasi administrasi kependudukan berbasis digital; peningkatan kualitas dan keamanan data kependudukan; serta optimalisasi pemanfaatan data kependudukan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan upaya tersebut diharapkan terwujud tertib administrasi kependudukan yang mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan Kabupaten Gresik secara berkelanjutan.

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Gresik dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik sebagai perangkat daerah teknis yang memiliki tugas membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Peran perangkat daerah tersebut menjadi strategis dalam mendukung penguatan kapasitas pemerintahan desa, pemberdayaan kelembagaan masyarakat,

pengembangan ekonomi desa, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Dalam mendukung agenda pembangunan daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. Hal tersebut diwujudkan melalui fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, penguatan kelembagaan desa dan lembaga kemasyarakatan desa, serta pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa.

Selain itu, perangkat daerah tersebut juga berperan dalam mendorong peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, penguatan inovasi desa, serta pengembangan potensi unggulan desa berbasis sumber daya lokal. Kebijakan tersebut sejalan dengan arah pembangunan daerah yang menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan basis penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Dalam aspek pemberdayaan masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik juga melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat, penguatan peran lembaga kemasyarakatan desa, pemberdayaan perempuan dan pemuda desa, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Upaya tersebut bertujuan untuk memperkuat modal sosial masyarakat desa sekaligus mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara umum, penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Gresik menunjukkan perkembangan yang cukup baik, ditandai dengan meningkatnya kualitas tata kelola desa, berkembangnya inovasi pelayanan publik desa, serta meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat desa. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan pembangunan, antara lain belum meratanya kapasitas sumber daya

manusia aparatur desa, optimalisasi pengelolaan BUMDes yang masih terbatas, kesenjangan kapasitas antarwilayah desa, serta perlunya penguatan transformasi digital pemerintahan desa.

Untuk menjawab tantangan tersebut, arah kebijakan pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa pada periode mendatang difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan desa berbasis digital, peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa, pengembangan ekonomi desa berbasis potensi lokal, penguatan partisipasi masyarakat, serta peningkatan sinergi pembangunan desa dengan prioritas pembangunan daerah. Melalui kebijakan tersebut diharapkan desa di Kabupaten Gresik mampu tumbuh sebagai desa yang mandiri, maju, inklusif, dan berdaya saing.

Tabel 2.81
Indikator Sasaran Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik
Tahun 2021 – 2025

INDIKATOR	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
Return on Asset Usaha Desa (BUM Desa dan Koperasi Merah Putih)	-	-	-	-	11,47%
Pendapatan Asli Desa	-	-	-	-	0,080
Return on Investment Usaha Desa (BUM Desa dan Koperasi Merah Putih)	-	-	-	-	25,66%
Indeks Profesionalitas Aparatur Pemerintah Desa	-	-	-	-	62,05
Realisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan Desa	-	-	-	-	97,56%
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Ekosistem Desa	-	-	-	-	0,97%

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Gresik, Tahun 2026

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2025, kinerja urusan pemerintahan daerah pada bidang pemberdayaan masyarakat dan desa menunjukkan hasil yang positif dalam mendukung penguatan kemandirian desa, peningkatan tata kelola pemerintahan desa, pengembangan usaha desa, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Indikator-indikator yang diukur pada tahun 2025 menggambarkan semakin

meningkatnya kapasitas desa dalam mengelola sumber daya dan melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan.

Pada indikator Return on Asset (ROA) Usaha Desa (BUM Desa dan Koperasi Merah Putih), capaian tahun 2025 sebesar 11,47 persen. Nilai tersebut menunjukkan bahwa aset yang dimiliki dan dikelola oleh BUM Desa maupun Koperasi Merah Putih telah mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang cukup baik, sehingga mencerminkan meningkatnya efektivitas pengelolaan aset produktif desa.

Indikator Pendapatan Asli Desa (PADes) pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,080. Capaian tersebut menunjukkan bahwa desa telah mampu menghasilkan pendapatan dari potensi dan sumber daya yang dimiliki, meskipun masih diperlukan upaya optimalisasi pengelolaan aset desa, pengembangan unit usaha, dan diversifikasi sumber pendapatan untuk meningkatkan kemandirian fiskal desa.

Pada indikator Return on Investment (ROI) Usaha Desa (BUM Desa dan Koperasi Merah Putih), realisasi mencapai 25,66 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan dalam pengembangan usaha desa mampu memberikan tingkat pengembalian yang cukup baik dan menjadi indikator positif terhadap keberlanjutan usaha ekonomi desa.

Sementara itu, Indeks Profesionalitas Aparatur Pemerintah Desa mencapai 62,05 poin, yang mengindikasikan bahwa kapasitas dan profesionalisme aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan desa terus mengalami peningkatan. Capaian ini mencerminkan semakin baiknya kompetensi aparatur desa dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan akuntabel.

Pada indikator realisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan desa, capaian mencapai 97,56 persen. Tingginya realisasi tersebut menunjukkan bahwa program-program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan secara optimal dan

memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta penurunan tingkat kerentanan sosial ekonomi masyarakat.

Adapun indikator Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Ekosistem Desa mencapai 0,97 persen, yang menunjukkan adanya peningkatan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat yang terlibat dalam aktivitas ekonomi desa. Meskipun demikian, cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan masih perlu terus diperluas agar dapat menjangkau lebih banyak pekerja dan pelaku usaha di tingkat desa.

Persentase Desa Mandiri dan Maju sesuai Permendes No. 2 Tahun 2016 dihitung dari Jumlah Desa dengan Status Mandiri ditambah Jumlah Desa dengan Status Maju / Jumlah Seluruh Desa x 100%. Sedangkan status desa diperoleh dari Indeks Desa Membangun yaitu ukuran pengklasifikasian desa dalam rangka menentukan intervensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan desa. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan komposit dari indeks ketahanan lingkungan (ekologi), indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan sosial. Adapun klasifikasi status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal : < 0,491
2. Desa Tertinggal : > 0,491 dan < 0,599
3. Desa Berkembang : > 0,599 dan < 0,707
4. Desa Maju : > 0,707 dan < 0,815
5. Desa Mandiri : > 0,815

Tabel 2.82

Status Desa Kabupaten Gresik Tahun 2020 - 2024

No.	Status Desa	Jumlah Desa					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Mandiri	47	86	153	222	290	330
2	Maju	152	192	156	108	40	0
3	Berkembang	131	52	21	0	0	0
4	Tertinggal	0	0	0	0	0	0
5	Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Gresik, Tahun 2026

Berdasarkan data diatas, perkembangan status desa periode 2020–2025 menunjukkan peningkatan kualitas pembangunan dan kemandirian desa yang cukup signifikan. Jumlah desa berstatus mandiri mengalami peningkatan secara konsisten dari 47 desa pada tahun 2020 atau sekitar 14,24 persen dari total 330 desa menjadi 86 desa pada tahun 2021 (26,06 persen), 153 desa pada tahun 2022 (46,36 persen), 222 desa pada tahun 2023 (67,27 persen), 290 desa pada tahun 2024 (87,88 persen), hingga mencapai 330 desa atau 100 persen pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan seluruh desa di Kabupaten Gresik telah mencapai status desa mandiri.

Sebaliknya, jumlah desa berstatus maju mengalami penurunan seiring meningkatnya status desa mandiri. Pada tahun 2020 desa maju tercatat sebanyak 152 desa atau 46,06 persen, meningkat menjadi 192 desa pada tahun 2021 (58,18 persen), kemudian menurun menjadi 156 desa pada tahun 2022 (47,27 persen), 108 desa pada tahun 2023 (32,73 persen), 40 desa pada tahun 2024 (12,12 persen), dan menjadi 0 desa pada tahun 2025. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya transformasi status desa maju menjadi desa mandiri.

Sementara itu, desa berkembang mengalami penurunan cukup drastis dari 131 desa atau 39,70 persen pada tahun 2020 menjadi 52 desa pada tahun 2021 (15,76 persen), 21 desa pada tahun 2022 (6,36 persen), dan telah mencapai 0 desa sejak tahun 2023 hingga 2025. Adapun desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal tercatat nihil selama periode 2020–2025.

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diarahkan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang serta meningkatkan kualitas keluarga melalui penguatan program Bangga Kencana. Kinerja urusan ini menunjukkan perkembangan yang positif, meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). Ke depan, upaya pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga akan terus difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas

pelayanan KB, penguatan edukasi kependudukan, pencegahan perkawinan anak, serta penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Tabel 2.83

Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2021-2025

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Pembangunan Keluarga (Indeks)	-	-	-	65,72	76,9
realisasi usulan perempuan yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan (%)	-	-	-	40	73
Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif gender (%)	-	-	-	30,43	96
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	-	-	-	9,18	7,91

Sumber: Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik, Tahun 2026

Berdasarkan capaian indikator tahun 2025, kinerja urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini terlihat dari meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dari 65,72 menjadi 76,9 serta menurunnya persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) dari 9,18% menjadi 7,91%. Capaian tersebut menunjukkan semakin baiknya kualitas pembangunan keluarga dan akses masyarakat terhadap pelayanan keluarga berencana, yang pada akhirnya mendukung terwujudnya keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang lebih terkendali.

9) Perhubungan

Perhubungan berperan sebagai penggerak utama dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan pembangunan melalui penyediaan infrastruktur serta layanan transportasi yang efisien. Kinerja transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik melalui indikator-indikator yang ditetapkan dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2.84

Indikator Urusan Perhubungan Kabupaten Gresik

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Cakupan layanan transportasi (%)	-	-	-	36,31	36,31
2.	Nilai volume to capacity (VC) ratio jalan kabupaten gresik (%)	-	-	-	80,43	80,43
3.	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang ramah energi (%)	-	-	-	50	50

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik

Cakupan Layanan Transportasi adalah penyediaan akses dan layanan (angkutan umum) bagi masyarakat di suatu wilayah. Cakupan layanan transportasi diukur dari cakupan wilayah/ruas jalan yang terlayani angkutan umum, dengan membandingkan antara Jumlah Ruas Jalan yang terlayani angkutan umum setiap tahunnya melalui penetapan Jalur Trayek dengan Total Ruas Jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten. Target tahun 2025 sebesar 36,31% atau dari 179 ruas jalan di Kabupaten Gresik sebanyak 65 Ruas Jalan sudah terlayani angkutan umum. Pada akhir tahun 2025 terealisasi sesuai dengan target yaitu 65 Ruas Jalan sudah terlayani angkutan sehingga capaian kinerja sebesar 100%. Namun sejalan dengan perkembangan kota, masih terdapat ruas jalan yang belum terlayani angkutan umum terutama ruas jalan yang menghubungkan perpindahan antar moda transportasi. Selain itu masih adanya ruas jalan perkotaan yang tidak bisa ditingkatkan kelas jalannya seiring dengan pertumbuhan kota sehingga mengakibatkan hambatan hambatan yang disebabkan karena belum terdapat fasilitas keselamatan lalu lintas serta adanya parkir parkir liar di tepi jalan umum.

Cakupan Layanan Transportasi merupakan indikator baru, sedangkan indikator sebelumnya yang digunakan yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.85

Indikator Urusan Perhubungan Kabupaten Gresik

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase Prasarana Angkutan yang Laik Fungsi (%)	100	100	100		
2.	Persentase Ketersediaan dan Aksesibilitas Trayek (%)	35,29	64,71	66,67		

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik

Nilai Volume to Capacity (VC) ratio jalan Kabupaten Gresik adalah ukuran seberapa padat suatu ruas jalan dibandingkan dengan kemampuan jalan tersebut menampung lalu lintas. Nilai VC ratio memberikan informasi tentang tingkat pelayanan jalan dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kebutuhan perbaikan atau manajemen lalu lintas. Nilai V/C ratio yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kejenuhan yang lebih tinggi pula. Khusus ruas jalan kabupaten di area perkotaan yang berjumlah 46 ruas, sebanyak 37 ruas memiliki nilai VC Ratio <0,50, ini berarti arus stabil dengan volume lalu lintas sedang dan kepadatan lalu lintas relatif masih rendah.

Nilai Volume to Capacity (VC) Ratio Jalan Kabupaten Gresik merupakan indikator baru yang mana sebelumnya menggunakan indikator Persentase Ruas Jalan di Dalam Kota dengan Nilai VC Ratio >0,75 dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 2.86

Indikator Urusan Perhubungan Kabupaten Gresik

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase Ruas Jalan di Dalam Kota dengan Nilai VC Ratio >0,75 (%)	41,67	41,67	50,00	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik

Indikator Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang ramah energi merupakan indikator baru sehingga untuk capaian tahun 2021 sampai dengan 2023 tidak tersedia. Sarana dan prasarana perhubungan yang ramah energi adalah penggunaan sarana prasarana perhubungan untuk mengurangi dampak lingkungan dari penggunaan bahan bakar fossil melalui sarana dan prasarana yang ramah energi meliputi Lampu PJU Ramah Lingkungan (LED) maupun bertenaga surya, Alat Uji Kendaraan Bermotor bertenaga Listrik, Angkutan Umum dengan Bahan Bakar Listrik maupun Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas (APILL) bertenaga Surya. Secara keseluruhan terdapat 8 jenis sarana dan prasarana perhubungan yang ramah energi. Target 4 jenis yang akan diterapkan dan terealisasi sebanyak 4 jenis sarana dan prasaran Perhubungan yang ramah energi telah diterapkan di Kabupaten Gresik pada Tahun 2025 sehingga capaian sebesar 50%.

10) Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika diarahkan untuk mendukung transformasi menuju Pemerintah Digital melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat menuntut pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis digital guna mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Upaya penguatan urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan melalui pengembangan layanan digital, peningkatan interoperabilitas sistem pemerintahan, penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan informasi publik, peningkatan literasi digital masyarakat, serta optimalisasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Berbagai upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan Indeks

Pemerintah Digital (IPD) yang mengukur tingkat kematangan transformasi digital pemerintahan, baik dari aspek tata kelola, layanan digital, pemanfaatan data, maupun kolaborasi antarinstansi pemerintah.

Tabel 2.87

Indikator urusan Komunikasi dan Informatika

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase digitalisasi layanan	-	-	-	41%	43%
Nilai keterbukaan informasi publik	-	-	-	35.77	89.67
persentase pengaduan pelayanan publik yang diselesaikan	-	-	-	97.10%	96.8%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Berdasarkan tabel di atas, kinerja urusan komunikasi dan informatika menunjukkan perkembangan yang positif dalam mendukung transformasi menuju Pemerintah Digital. Persentase digitalisasi layanan meningkat dari 41% pada tahun 2024 menjadi 43% pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin luasnya penerapan layanan berbasis digital pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan publik, efisiensi proses bisnis pemerintahan, serta penguatan ekosistem Pemerintah Digital di Kabupaten Gresik.

Pada aspek keterbukaan informasi publik, terjadi peningkatan yang sangat signifikan dengan naiknya nilai keterbukaan informasi publik dari 35,77 pada tahun 2024 menjadi 89,67 pada tahun 2025. Capaian tersebut mencerminkan semakin baiknya pengelolaan dan penyediaan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat, sekaligus menunjukkan meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat serta mendukung tata kelola Pemerintah Digital yang terbuka dan partisipatif.

Sementara itu, persentase pengaduan pelayanan publik yang diselesaikan tetap terjaga pada tingkat yang sangat tinggi, yaitu sebesar 97,10% pada tahun 2024 dan 96,8% pada tahun 2025. Meskipun mengalami sedikit penurunan, capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan secara efektif oleh perangkat daerah. Tingginya tingkat penyelesaian pengaduan mencerminkan responsivitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian indikator urusan komunikasi dan informatika menunjukkan adanya kemajuan dalam digitalisasi layanan, keterbukaan informasi publik, dan pengelolaan pengaduan masyarakat. Kinerja tersebut menjadi modal penting dalam mendukung peningkatan Indeks Pemerintah Digital Kabupaten Gresik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, transparan, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

11) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pembangunan urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah di Kabupaten Gresik diarahkan untuk memperkuat struktur perekonomian daerah yang inklusif, berdaya saing, serta berbasis pada penguatan ekonomi kerakyatan. Peran koperasi dan UMKM menjadi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, pengurangan tingkat kemiskinan, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Secara umum, kondisi pembangunan koperasi dan UMKM di Kabupaten Gresik menunjukkan perkembangan yang cukup positif, ditandai dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang tersebar pada sektor perdagangan, pengolahan, kuliner, jasa,

perikanan, dan ekonomi kreatif. Selain itu, eksistensi koperasi sebagai lembaga ekonomi masyarakat masih memiliki peran penting dalam mendukung akses pembiayaan, penguatan modal usaha, dan pengembangan usaha berbasis komunitas. Keberadaan kawasan industri di Kabupaten Gresik turut memberikan peluang pasar dan pengembangan rantai pasok bagi UMKM lokal.

Namun demikian, pengembangan koperasi dan UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain rendahnya kualitas kelembagaan koperasi, keterbatasan akses pembiayaan formal, kapasitas manajerial dan literasi digital pelaku usaha yang belum merata, rendahnya daya saing produk, keterbatasan standardisasi dan sertifikasi produk, serta belum optimalnya akses pemasaran berbasis digital dan ekspor. Di sisi lain, sebagian koperasi belum aktif dan belum mampu menjalankan tata kelola kelembagaan secara sehat dan akuntabel.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, arah kebijakan urusan koperasi dan UMKM di Kabupaten Gresik difokuskan pada peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, penguatan kapasitas usaha mikro dan kecil, peningkatan akses pembiayaan dan kemitraan usaha, fasilitasi legalitas dan sertifikasi produk, pengembangan kewirausahaan, digitalisasi UMKM, serta penguatan daya saing produk unggulan daerah. Selain itu, pengembangan UMKM berbasis potensi lokal dan ekonomi kreatif diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Strategi pembangunan dilaksanakan melalui peningkatan pembinaan dan pendampingan usaha, penguatan inkubasi bisnis, perluasan akses pasar melalui promosi dan marketplace digital, fasilitasi kemitraan antara UMKM dengan dunia usaha dan industri, serta penguatan sinergi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Pengembangan koperasi modern dan adaptif terhadap transformasi digital juga menjadi fokus dalam meningkatkan kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah.

Upaya pengembangan koperasi dan UMKM di Kabupaten Gresik diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan kemandirian pelaku usaha, memperluas kesempatan kerja, memperkuat ekonomi masyarakat, serta mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 2.88
Indikator Sasaran Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Tahun 2020-2025

INDIKATOR SASARAN	TAHUN					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (NIB)	-	-	3,6	1,96	33,8	0,64
Pertumbuhan Koperasi Aktif	3,04	8	6,76	4,6	3,16	48,59

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, Tahun 2026

Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, perkembangan indikator urusan koperasi dan usaha mikro menunjukkan dinamika yang fluktuatif namun cenderung positif. Pada indikator Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (NIB), pada tahun 2020 dan 2021 belum terdapat data pengukuran. Selanjutnya pada tahun 2022 tercatat pertumbuhan sebesar 3,6 persen dan mengalami penurunan menjadi 1,96 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang sangat signifikan menjadi 33,8 persen, yang didorong oleh implementasi SIDT (Sistem Informasi Data Tunggal) dari Pemerintah Provinsi sehingga proses pendataan dan integrasi legalitas usaha menjadi lebih optimal. Adapun pada tahun 2025 pertumbuhan tercatat sebesar 0,64 persen, yang menunjukkan kondisi pertumbuhan lebih stabil setelah adanya penyesuaian basis data pelaku usaha.

Sementara itu, indikator Pertumbuhan Koperasi Aktif menunjukkan capaian yang relatif fluktuatif selama periode 2020–2025. Pada tahun 2020 pertumbuhan koperasi aktif sebesar 3,04 persen, kemudian meningkat menjadi 8 persen pada tahun 2021.

Pada tahun 2022 pertumbuhan tercatat sebesar 6,76 persen dan menurun menjadi 4,6 persen pada tahun 2023 serta kembali turun menjadi 3,16 persen pada tahun 2024. Selanjutnya pada tahun 2025 terjadi peningkatan yang sangat signifikan menjadi 48,59 persen yang dipengaruhi oleh pembentukan dan penguatan Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari upaya peningkatan kelembagaan dan keaktifan koperasi di daerah.

Secara umum, capaian indikator tersebut menunjukkan bahwa penguatan sektor koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Gresik terus berkembang melalui dukungan legalitas usaha, penguatan kelembagaan koperasi, serta integrasi sistem pendataan pelaku usaha. Kondisi ini menjadi modal penting dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi kerakyatan sebagai bagian dari urusan wajib non pelayanan dasar di daerah.

12) Penanaman Modal

Penyelenggaraan urusan Penanaman Modal di Kabupaten Gresik terdiri dari 2 sasaran dan 7 indikator sasaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.89
Capaian Indikator Sasaran Penanaman Modal Kabupaten Gresik
Tahun 2024-2025

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	REALISASI					TARGET	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Meningkatkan investasi sektor unggulan manufaktur dan diversifikasi sektor strategis	Realisasi Investasi (triliyun) (Rp)	-	-	-	37,9	29,49	20,20	20,50
	Realisasi investasi sektor manufaktor (triliun rupiah)	-	-	-	32,5	22,62	13.13	13.33
	Pertumbuhan realisasi investasi (%)	-	-	-	22,66	-22,21	1.00	1.49
	Pertumbuhan investasi sektor manufaktur (%)	-	-	-	-28,52	-30,4	65	65

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	REALISASI					TARGET	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	49,96	49,44	50,33	51,25	52,58	51.28	51.29
	Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM ()	-	-	-	0:00	38 : 800	35:800	40:800
Meningkatkan kemudahan layanan investasi	Nilai survey kepuasan masyarakat untuk layanan perijinan dan penanaman modal (Predikat)	-	-	-	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Sumber : LKPJ 2025 dan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

Realisasi investasi Kabupaten Gresik pada tahun 2025 mencapai Rp29,49 triliun, menurun dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar Rp37,90 triliun. Penurunan sebesar Rp8,41 triliun atau sekitar 22,21 persen ini menunjukkan adanya perlambatan arus investasi yang masuk ke Kabupaten Gresik pada tahun 2025. Meskipun mengalami penurunan, nilai investasi yang berhasil direalisasikan masih tergolong tinggi dan menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik tetap menjadi salah satu daerah tujuan investasi utama di Jawa Timur. Capaian tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain dinamika ekonomi global, penyesuaian strategi ekspansi perusahaan, kondisi pasar domestik, serta kehati-hatian investor dalam merealisasikan investasi baru pada sektor-sektor tertentu. Keberadaan kawasan industri yang berkembang, infrastruktur logistik yang relatif lengkap, serta kedekatan dengan pusat perdagangan dan pelabuhan tetap menjadi daya tarik utama bagi investor. Namun demikian, penurunan realisasi investasi perlu menjadi perhatian agar tidak berdampak pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas produksi, maupun pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun-tahun berikutnya.

Investasi pada sektor manufaktur tahun 2025 terealisasi sebesar Rp22,62 triliun, menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp32,50 triliun. Penurunan sebesar Rp9,88 triliun atau

sekitar 30,40 persen menunjukkan bahwa perlambatan investasi lebih banyak terjadi pada sektor manufaktur yang selama ini menjadi sektor unggulan Kabupaten Gresik. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya penundaan ekspansi maupun investasi baru oleh perusahaan industri pengolahan. Faktor yang dapat memengaruhi antara lain penyesuaian kapasitas produksi akibat kondisi pasar, perkembangan harga bahan baku, serta ketidakpastian ekonomi global yang berdampak pada keputusan investasi perusahaan. Meskipun demikian, dominasi sektor manufaktur masih terlihat dari besarnya kontribusi investasi sektor ini terhadap total investasi daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Gresik masih ditopang kuat oleh sektor industri pengolahan sehingga penguatan iklim investasi industri tetap menjadi prioritas pembangunan daerah. Beberapa strategi yang tertuang dalam renstra untuk meningkatkan realisasi sektor manufaktur di Kabupaten Gresik yakni dengan menyusun roadmap pegembangan kawasan industri manufaktur dan meningkatkan pelayanan perizinan dan fasilitasi khusus untuk investasi manufaktur.

Pertumbuhan realisasi investasi pada tahun 2025 tercatat sebesar -22,21 persen, berbalik arah dibandingkan tahun 2024 yang masih tumbuh positif sebesar 22,66 persen. Nilai pertumbuhan negatif tersebut menggambarkan bahwa realisasi investasi tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Kontraksi pertumbuhan investasi menunjukkan bahwa masuknya modal baru ke daerah belum mampu mempertahankan tren peningkatan sebagaimana yang terjadi pada tahun 2024. Kondisi ini perlu dicermati karena investasi merupakan salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan produktivitas daerah. Meski demikian, capaian investasi yang masih berada pada level puluhan triliun rupiah menunjukkan bahwa aktivitas investasi di Kabupaten Gresik tetap berjalan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan promosi investasi,

percepatan perizinan berusaha, penyediaan lahan investasi yang siap bangun, serta peningkatan kepastian usaha untuk mendorong kembali pertumbuhan investasi pada periode mendatang.

Pertumbuhan investasi sektor manufaktur tahun 2025 sebesar -30,40 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang tercatat -28,52 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor manufaktur mengalami kontraksi investasi yang lebih dalam dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan investasi manufaktur menjadi perhatian penting mengingat sektor ini merupakan motor utama perekonomian Kabupaten Gresik. Berkurangnya investasi baru berpotensi mempengaruhi pengembangan kapasitas industri, modernisasi teknologi produksi, serta penciptaan kesempatan kerja baru di sektor industri pengolahan. Meskipun mengalami kontraksi, sektor manufaktur masih menjadi sektor dengan nilai investasi terbesar dibandingkan sektor lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap potensi industri di Kabupaten Gresik masih relatif kuat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus mendorong pengembangan kawasan industri, memperkuat rantai pasok industri lokal, serta meningkatkan sinergi dengan pelaku usaha untuk menjaga keberlanjutan investasi manufaktur.

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Gresik pada tahun 2025 mencapai 52,58 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 51,25 persen. Peningkatan sebesar 1,33 poin persentase ini menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan masih menjadi sektor dominan dalam struktur perekonomian daerah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun investasi manufaktur mengalami penurunan, aktivitas produksi dan nilai tambah yang dihasilkan sektor industri pengolahan tetap mampu memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Hal ini menunjukkan adanya ketahanan sektor industri yang didukung oleh basis industri besar dan menengah yang telah berkembang di Kabupaten Gresik. Besarnya kontribusi sektor industri pengolahan juga mencerminkan

keberhasilan Kabupaten Gresik dalam mempertahankan karakteristik sebagai kawasan industri strategis di Jawa Timur.

Pada tahun 2025 kemitraan usaha besar dengan UMKM mencapai 38:800, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 yang belum tercatat adanya capaian kemitraan (0:00). Capaian ini menunjukkan semakin berkembangnya kolaborasi antara pelaku usaha besar dengan UMKM dalam mendukung penguatan ekonomi daerah. Peningkatan kemitraan tersebut merupakan indikator positif karena menunjukkan adanya keterlibatan UMKM dalam rantai pasok industri maupun kegiatan usaha yang lebih luas. Kemitraan usaha dapat memberikan manfaat berupa peningkatan akses pasar, transfer teknologi, peningkatan kualitas produk, serta penguatan kapasitas usaha UMKM. Keberhasilan pencapaian kemitraan ini juga menunjukkan meningkatnya komitmen dunia usaha dalam mendukung pemberdayaan ekonomi lokal. Namun demikian, untuk mencapai target tahun 2026 dan 2027, diperlukan perluasan jumlah perusahaan yang bermitra dengan UMKM serta peningkatan kualitas kemitraan yang mampu menciptakan hubungan bisnis yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan perizinan dan penanaman modal pada tahun 2025 memperoleh predikat "Sangat Baik", sama dengan capaian tahun 2024. Konsistensi capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan investor mampu dipertahankan dengan baik. Predikat "Sangat Baik" mencerminkan bahwa aspek pelayanan seperti kecepatan, kemudahan prosedur, kepastian waktu, kompetensi petugas, serta keterbukaan informasi telah memenuhi harapan pengguna layanan. Kualitas pelayanan yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Kabupaten Gresik.

Capaian kinerja penanaman modal secara garis besar dapat digambarkan melalui Pertumbuhan realisasi investasi.

Pertumbuhan realisasi investasi merupakan indikator persentase peningkatan nilai penanaman modal, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Asing (PMA), dalam periode tertentu yang berfungsi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan nasional.

Tabel 2.90

Pertumbuhan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik

Uraian	Indikator Pertumbuhan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025				
	2021	2022	2023	2024	2025
Pertumbuhan Realisasi Investasi PMDN (Juta Rupiah)	-42,60%	-18,37%	43,40%	20,86%	29,47%
Pertumbuhan Realisasi Investasi PMA (US$ Ribu)	-99,59%	197,57%	53,88%	-34,39%	
Jumlah Investor	2.584	2.730	4.618	10.246	14.791
Persentase Peningkatan Jumlah Investor	-32,74%	5,65%	69,16%	121,87%	44,36%
Jumlah Promosi Penanaman Modal	4 kali	7 kali	3 kali	3 kali	7 kali
Pertumbuhan Promosi Penanaman Modal	300%	75%	-57,14%	0%	133.33%

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik, 2026

Kinerja investasi Kabupaten Gresik selama tahun 2021-2025 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pertumbuhan realisasi investasi PMDN pada tahun 2021 dan 2022 masih mengalami kontraksi masing-masing sebesar 42,60 persen dan 18,37 persen. Namun sejak tahun 2023 terjadi pemulihan yang signifikan dengan pertumbuhan mencapai 43,40 persen, kemudian tetap tumbuh positif pada tahun 2024 sebesar 20,86 persen dan meningkat menjadi 29,47 persen pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan meningkatnya kepercayaan investor domestik terhadap prospek ekonomi dan iklim investasi di Kabupaten Gresik. Sementara itu, realisasi investasi PMA menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi. Pada tahun 2021 pertumbuhan PMA mengalami penurunan sangat tajam sebesar 99,59 persen. Namun pada tahun

2022 terjadi lonjakan pertumbuhan hingga 197,57 persen dan masih tumbuh positif sebesar 53,88 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2024 kembali mengalami kontraksi sebesar 34,39 persen. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa investasi asing masih sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, kebijakan investasi internasional, serta keputusan ekspansi perusahaan multinasional yang beroperasi di Kabupaten Gresik.

Peningkatan daya tarik investasi daerah juga tercermin dari pertumbuhan jumlah investor. Jumlah investor meningkat secara konsisten dari 2.584 investor pada tahun 2021 menjadi 14.791 investor pada tahun 2025. Pertumbuhan jumlah investor mencapai 69,16 persen pada tahun 2023, meningkat sangat tinggi sebesar 121,87 persen pada tahun 2024, dan tetap tumbuh sebesar 44,36 persen pada tahun 2025. Tren ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik semakin diminati sebagai lokasi investasi karena didukung oleh posisi strategis, kawasan industri yang berkembang, infrastruktur yang memadai, serta kemudahan pelayanan perizinan yang terus ditingkatkan. Upaya promosi penanaman modal yang dilakukan pemerintah daerah juga menunjukkan intensitas yang cukup baik. Jumlah kegiatan promosi investasi tercatat sebanyak 4 kali pada tahun 2021, meningkat menjadi 7 kali pada tahun 2022, menurun menjadi 3 kali pada tahun 2023 dan 2024, kemudian kembali meningkat menjadi 7 kali pada tahun 2025. Pertumbuhan kegiatan promosi mencapai 300 persen pada tahun 2021, 75 persen pada tahun 2022, mengalami penurunan sebesar 57,14 persen pada tahun 2023, stagnan pada tahun 2024, dan meningkat kembali sebesar 133,33 persen pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dari pemerintah daerah dalam memperluas jejaring investasi dan menarik minat investor baru.

Tabel 2.91
Indikator Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal
Kabupaten Gresik

Uraian	Indikator Pelayanan dan Pengendalian Penanaman Modal Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025				
	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Penyelesaian Ijin	13.034	40.335	64.153	39.964	24.967
Persentase Penyelesaian Ijin	15,07%	209,46%	59,05%	-37,71%	-37,53%
Jumlah Kepatuhan Perusahaan	638	635	811	969	1.556
Persentase Kepatuhan Perusahaan	57,14%	-0,47%	27,72%	19,48%	60,58%

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik, 2026

Penyelenggaraan urusan penanaman modal di Kabupaten Gresik selama periode 2021–2025 menunjukkan kinerja yang relatif positif, terutama dalam aspek pelayanan perizinan, peningkatan kepatuhan perusahaan, serta pertumbuhan realisasi investasi dan jumlah investor. Kondisi ini mencerminkan semakin meningkatnya daya tarik investasi Kabupaten Gresik sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Pada aspek pelayanan perizinan, jumlah penyelesaian izin mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Tahun 2021 tercatat sebanyak 13.034 izin yang diselesaikan, kemudian meningkat signifikan menjadi 40.335 izin pada tahun 2022 atau tumbuh sebesar 209,46 persen. Peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2023 menjadi 64.153 izin dengan pertumbuhan 59,05 persen. Namun demikian, pada tahun 2024 dan 2025 jumlah penyelesaian izin mengalami penurunan menjadi masing-masing 39.964 izin dan 24.967 izin, dengan pertumbuhan negatif sebesar 37,71 persen dan 37,53 persen. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perubahan jumlah permohonan izin, penyederhanaan proses perizinan melalui sistem elektronik, maupun dinamika aktivitas investasi pada periode tersebut.

Dari sisi pengendalian penanaman modal, tingkat kepatuhan perusahaan menunjukkan tren yang semakin baik. Jumlah

perusahaan yang memenuhi kewajiban pelaporan dan ketentuan penanaman modal meningkat dari 638 perusahaan pada tahun 2021 menjadi 1.556 perusahaan pada tahun 2025. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2025 dengan pertumbuhan sebesar 60,58 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, peningkatan jumlah perusahaan patuh ini menunjukkan semakin efektifnya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik.

Secara umum, capaian penyelenggaraan urusan penanaman modal Kabupaten Gresik selama periode 2021–2025 menunjukkan arah perkembangan yang positif. Meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa indikator, khususnya penyelesaian izin dan realisasi investasi PMA, peningkatan jumlah investor, membaiknya kepatuhan perusahaan, serta pertumbuhan investasi PMDN menjadi indikator bahwa iklim investasi daerah semakin kondusif. Ke depan, diperlukan penguatan strategi promosi investasi, peningkatan kualitas pelayanan perizinan berbasis digital, serta penguatan pengendalian dan pendampingan investasi guna menjaga keberlanjutan pertumbuhan investasi dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah Kabupaten Gresik.

13) Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Gresik diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, sehat, produktif, serta memiliki karakter dan daya inovasi. Pengembangan kepemudaan dilaksanakan melalui peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah, penguatan kapasitas organisasi kepemudaan, kewirausahaan pemuda, serta pengembangan pemuda pelopor dan berprestasi. Sementara itu, pembangunan olahraga difokuskan pada peningkatan budaya olahraga masyarakat,

pembinaan olahraga prestasi, serta penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Gresik terus mendorong penguatan ekosistem kepemudaan melalui berbagai program pemberdayaan dan pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, serta peningkatan kreativitas pemuda sebagai upaya mendukung bonus demografi. Hal tersebut sejalan dengan amanat Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang menempatkan pemuda sebagai agen perubahan, kekuatan moral, dan kontrol sosial dalam pembangunan nasional. Selain itu, pengembangan kepemudaan juga menjadi bagian penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya pada aspek pekerjaan layak, kesehatan, dan pembangunan masyarakat inklusif.

Pada sektor olahraga, pembangunan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta prestasi olahraga daerah melalui pembinaan atlet, kompetisi olahraga, dan penguatan olahraga masyarakat. Pemerintah Kabupaten Gresik juga terus mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas olahraga melalui penyelenggaraan event olahraga daerah, pembinaan cabang olahraga, serta optimalisasi fungsi fasilitas olahraga publik. Upaya tersebut menjadi penting mengingat olahraga memiliki kontribusi terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, produktivitas tenaga kerja, serta penguatan kohesi sosial masyarakat.

Secara umum, pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Gresik menunjukkan arah yang positif melalui meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial dan ekonomi, berkembangnya komunitas olahraga masyarakat, serta meningkatnya pembinaan atlet daerah. Ke depan, tantangan pembangunan kepemudaan dan olahraga masih berkaitan dengan pemerataan akses sarana prasarana olahraga, peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan, serta penguatan kolaborasi

antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan generasi muda yang unggul dan berdaya saing. Sasaran urusan kepemudaan dan olahraga "Meningkatkan Prestasi Pemuda di Bidang Kepemudaan dan Olahraga" dinilai berdasarkan persentase pemuda berprestasi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.92
Indikator Sasaran Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik
Tahun 2022-2025

INDIKATOR	TAHUN			
	2022	2023	2024	2025
Persentase pemuda berprestasi dibidang kepemudaan dan olahraga	39,98%	42,91%	42,98%	44,38%

Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik, Tahun 2026.

Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik, persentase pemuda berprestasi di bidang kepemudaan dan olahraga selama periode 2022–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2022 capaian persentase pemuda berprestasi tercatat sebesar 39,98 persen, kemudian meningkat menjadi 42,91 persen pada tahun 2023. Selanjutnya pada tahun 2024 capaian kembali meningkat menjadi 42,98 persen dan pada tahun 2025 mencapai 44,38 persen.

Peningkatan capaian tersebut menunjukkan adanya penguatan pembinaan dan pengembangan kapasitas pemuda melalui berbagai program kepemudaan dan olahraga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Kenaikan persentase juga mencerminkan semakin meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan kompetitif, pengembangan bakat dan prestasi olahraga, serta keterlibatan pemuda dalam berbagai ajang kepemudaan di tingkat daerah maupun luar daerah.

Secara umum, kondisi tersebut menggambarkan bahwa pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Gresik terus menunjukkan perkembangan positif dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, sehat, dan produktif. Ke depan, diperlukan penguatan pembinaan berkelanjutan, peningkatan akses sarana dan prasarana olahraga, serta pengembangan ekosistem kepemudaan yang adaptif guna mendorong peningkatan prestasi pemuda secara lebih optimal sebagai bagian dari pembangunan daerah pada urusan wajib non pelayanan dasar.

Tabel 2.93
Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik
Tahun 2021 – 2025

INDIKATOR SASARAN	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Pemuda yang Meraih Penghargaan	39,61%	33%	27,78%	41,67%	35%
Persentase Cabor Berprestasi	96,55%	96%	87,88%	84,21%	85%
Persentase Sarana Prasarana Keolahragaan yang Terpelihara	100,00%	100%	100,00%	100%	100%
Persentase Partisipasi Anggota Pramuka	59,46%	96,63%	96,51%	94,02%	96,39%
Jumlah Organisasi Pemuda Aktif	26	36	36	36	36
Jumlah Wirausaha Muda	-	-	-	40.287	40.083
Jumlah Atlet Berprestasi	22	515	494	870	600
Jumlah Prestasi Olahraga	22	515	494	870	600

Sumber : Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik, Tahun 2026.

Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik diatas, capaian pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis selama periode 2021–2025. Pada indikator persentase pemuda yang meraih penghargaan, capaian pada tahun 2021 sebesar 39,61 persen, kemudian menurun menjadi 33 persen pada tahun 2022 dan kembali turun menjadi 27,78 persen pada tahun 2023. Selanjutnya pada tahun 2024 meningkat signifikan menjadi 41,67 persen,

namun pada tahun 2025 kembali mengalami penurunan menjadi 35 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembinaan dan pengembangan kapasitas pemuda terus berjalan meskipun capaian penghargaan bersifat fluktuatif mengikuti tingkat partisipasi dan kompetisi kepemudaan.

Pada indikator persentase cabang olahraga berprestasi, capaian tahun 2021 sebesar 96,55 persen dan relatif stabil pada tahun 2022 sebesar 96 persen. Selanjutnya terjadi penurunan menjadi 87,88 persen pada tahun 2023 dan 84,21 persen pada tahun 2024, sebelum kembali meningkat menjadi 85 persen pada tahun 2025. Meskipun mengalami penurunan, capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar cabang olahraga di Kabupaten Gresik masih mampu mempertahankan prestasi dalam berbagai kejuaraan olahraga.

Indikator persentase sarana dan prasarana keolahragaan yang terpelihara menunjukkan capaian sangat optimal dengan nilai konsisten sebesar 100 persen pada periode 2021–2025. Hal tersebut menggambarkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan fasilitas olahraga guna mendukung pembinaan olahraga masyarakat maupun olahraga prestasi.

Sementara itu, persentase partisipasi anggota pramuka menunjukkan tren yang relatif tinggi. Pada tahun 2021 capaian sebesar 59,46 persen, kemudian meningkat signifikan menjadi 96,63 persen pada tahun 2022 dan tetap stabil pada tahun 2023 sebesar 96,51 persen. Pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan menjadi 94,02 persen dan kembali meningkat menjadi 96,39 persen pada tahun 2025. Tingginya partisipasi tersebut mencerminkan meningkatnya keterlibatan generasi muda dalam kegiatan pembentukan karakter, kepemimpinan, dan kedisiplinan melalui gerakan pramuka.

Pada indikator jumlah organisasi pemuda aktif, tahun 2021 tercatat 26 organisasi pemuda aktif, tahun 2022 terdapat peningkatan organisasi pemuda aktif menjadi 36 dan hingga tahun

2025 tercatat stabil sebanyak 36 organisasi pemuda aktif. Stabilitas tersebut menunjukkan keberlangsungan aktivitas organisasi kepemudaan dalam mendukung pe mbangunan sosial dan pemberdayaan pemuda di daerah.

Adapun jumlah wirausaha muda merupakan indikator baru di tahun 2024, pada tahun tersebut tercatat sebanyak 40.287 orang dan pada tahun 2025 sebesar 40.083 orang. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya pemuda yang berkontribusi dalam pengembangan ekonomi kreatif dan kewirausahaan, meskipun mengalami penyesuaian data dan dinamika usaha di lapangan.

Pada aspek olahraga prestasi, jumlah atlet berprestasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 22 atlet pada tahun 2021 menjadi 515 atlet pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2023 tercatat sebanyak 494 atlet, meningkat menjadi 870 atlet pada tahun 2024, dan pada tahun 2025 tercatat sebanyak 600 atlet berprestasi. Pola capaian yang sama juga terjadi pada indikator jumlah prestasi olahraga, yakni sebesar 22 prestasi pada tahun 2021, meningkat menjadi 515 prestasi pada tahun 2022, menurun menjadi 494 prestasi pada tahun 2023, meningkat signifikan menjadi 870 prestasi pada tahun 2024, dan tercatat 600 prestasi pada tahun 2025.

Secara umum, capaian indikator urusan kepemudaan dan olahraga Kabupaten Gresik menunjukkan adanya penguatan pembinaan pemuda dan olahraga yang ditandai dengan tingginya partisipasi kepemudaan, terpeliharanya sarana olahraga, berkembangnya organisasi pemuda, serta meningkatnya capaian atlet dan prestasi olahraga daerah. Ke depan, diperlukan penguatan pembinaan berkelanjutan, peningkatan kualitas SDM kepemudaan dan olahraga, serta optimalisasi sinergi lintas sektor guna mendukung terwujudnya generasi muda Kabupaten Gresik yang unggul, produktif, dan berdaya saing.

14) Statistik

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang statistik diarahkan untuk mendukung ketersediaan data sektoral yang berkualitas, akurat, terintegrasi, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai landasan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. Data statistik memiliki peran yang sangat strategis dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga evaluasi pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Gresik terus mendorong penguatan tata kelola statistik sektoral guna mewujudkan perencanaan dan pengambilan keputusan yang berbasis data (*data-driven policy*).

Upaya penguatan statistik sektoral dilakukan melalui peningkatan kualitas pengelolaan data pada perangkat daerah, penyusunan metadata statistik, pengembangan interoperabilitas data, serta optimalisasi pemanfaatan data statistik dalam mendukung proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Langkah tersebut juga sejalan dengan implementasi Satu Data Indonesia yang bertujuan mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya.

Tabel 2.94

Indikator urusan Statistik

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	-	-	97,1%	100%	100%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan menunjukkan tren yang sangat baik. Pada tahun 2023 capaian indikator tercatat sebesar 97,1%, kemudian meningkat menjadi 100% pada tahun 2024 dan dapat dipertahankan hingga tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh perangkat daerah di Kabupaten Gresik telah memanfaatkan data statistik sektoral sebagai dasar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan. Kondisi ini mencerminkan semakin kuatnya penerapan pengambilan keputusan berbasis data serta meningkatnya kualitas tata kelola statistik sektoral dalam mendukung pembangunan daerah yang efektif, terukur, dan berkelanjutan.

15) Persandian

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang persandian diarahkan untuk mendukung keamanan informasi pemerintahan daerah melalui perlindungan data, sistem elektronik, serta komunikasi pemerintahan dari berbagai potensi ancaman siber. Dalam era transformasi digital pemerintahan, keamanan informasi menjadi aspek yang sangat penting guna menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pemerintahan. Berbagai risiko seperti penyadapan, peretasan (*hacking*), penyalahgunaan data, hingga serangan siber lainnya perlu diantisipasi secara berkelanjutan melalui penguatan tata kelola keamanan informasi dan penerapan persandian pada layanan digital pemerintah daerah.

Pelaksanaan urusan persandian juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas keamanan siber daerah melalui penguatan sistem pengamanan informasi, pengelolaan sertifikat elektronik, pengamanan jaringan komunikasi pemerintah, serta peningkatan kesadaran keamanan informasi pada perangkat daerah. Selain itu, penerapan persandian menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi menuju penyelenggaraan pemerintahan digital agar

layanan publik berbasis elektronik dapat berjalan secara aman, andal, terintegrasi, dan terpercaya. Penguatan koordinasi, pemantauan, serta mitigasi terhadap potensi insiden siber terus dilakukan guna menjaga stabilitas layanan pemerintahan dan melindungi data strategis daerah.

Tabel 2.95
Indikator urusan Persandian

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
persentase digitalisasi layanan yang menerapkan persandian	-	-	-	11,11%	15,78%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik Tahun 2025

Pada tahun 2024, capaian indikator persentase digitalisasi layanan yang menerapkan persandian tercatat sebesar 11,11% atau sebanyak 4 dari 36 layanan digital yang tersedia. Selanjutnya pada tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar 15,78% atau sebanyak 6 dari 38 layanan digital. Hingga akhir periode pelaksanaan, realisasi capaian berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 15,78% atau 6 dari 38 layanan digital.

Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan implementasi pengamanan informasi pada layanan digital pemerintah daerah sebagai bagian dari penguatan tata kelola keamanan siber dan transformasi menuju penyelenggaraan pemerintahan digital di Kabupaten Gresik. Selain mendukung keamanan data dan sistem elektronik pemerintah, penerapan persandian juga menjadi upaya strategis dalam mewujudkan layanan pemerintahan yang aman, terintegrasi, andal, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital.

16) Kebudayaan

Urusan kebudayaan di Kabupaten Gresik memiliki peran strategis dalam menjaga identitas daerah, memperkuat karakter masyarakat, serta mendukung pembangunan sosial, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Sebagai salah satu daerah yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan peradaban, perdagangan, dan penyebaran agama Islam di Indonesia, Kabupaten Gresik memiliki kekayaan budaya yang mencakup warisan budaya benda, warisan budaya tak benda, tradisi, adat istiadat, seni pertunjukan, situs cagar budaya, serta berbagai ekspresi budaya masyarakat yang tersebar di wilayah daratan maupun Kepulauan Bawean.

Kinerja penyelenggaraan urusan kebudayaan diarahkan pada upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan melalui inventarisasi objek pemajuan kebudayaan, pelestarian cagar budaya, fasilitasi komunitas seni budaya, penyelenggaraan event budaya, serta pembinaan pelaku seni dan budaya. Upaya tersebut bertujuan untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya daerah sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya lokal.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Gresik juga terus mendorong penguatan ekosistem budaya melalui pengembangan festival budaya, pelestarian tradisi lokal, pengusulan warisan budaya tak benda, serta pemanfaatan budaya sebagai daya tarik wisata daerah. Berbagai tradisi dan kesenian khas Gresik seperti tradisi religi, seni hadrah, damar kurung, pencak macan, pasar bandeng, dan tradisi budaya lainnya menjadi bagian penting dalam memperkuat identitas daerah sekaligus mendukung pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Meskipun demikian, penyelenggaraan urusan kebudayaan masih menghadapi tantangan berupa belum optimalnya

inventarisasi dan digitalisasi data kebudayaan, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan budaya, serta perlunya peningkatan keterlibatan generasi muda dalam pelestarian budaya lokal. Selain itu, pemanfaatan potensi budaya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan penguatan daya saing daerah masih perlu terus ditingkatkan melalui sinergi dengan sektor pariwisata, pendidikan, dan ekonomi kreatif.

Secara umum, kinerja urusan kebudayaan di Kabupaten Gresik menunjukkan arah yang positif melalui meningkatnya upaya pelestarian dan pemanfaatan budaya daerah. Ke depan, diperlukan penguatan tata kelola kebudayaan, peningkatan kapasitas pelaku budaya, pengembangan ruang ekspresi budaya, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam dokumentasi dan promosi budaya guna mendukung terwujudnya pembangunan kebudayaan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Tabel 2.96

Indikator Kebudayaan Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2025

INDIKATOR SASARAN	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Budaya yang Dilestarikan		13,53	1,93	2,67	-
Persentase objek budaya yang dilestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan	100	100	100	100	-
Persentase WBTB berketetapan nasional yang dilestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan	100	100	100	100	-

INDIKATOR SASARAN	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan	100	100	100	-	-
Persentase cagar budaya terkelola lestarikan	100	100	100	100	-
Persentase obyek diduga cagar budaya terdaftar	0	15,15	15,79	13,16	-
Persentase cagar budaya ditetapkan	0	100	100	100	-
Pertumbuhan kunjungan museum	306,09	38,88	35,17	42,03	-
Efektifitas Dokumen Sejarah	-	-	100	-	-
Persentase Kekayaan Budaya terlestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan	95	-	-	-	-
Persentase Warisan Budaya Yang Dilestarikan	-	-	-	-	4,17
Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	-	-	-	-	150000
Persentase warisan budaya yang dilestarikan	-	-	-	-	4,17
Persentase Cagar budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	-	-	-	-	50

INDIKATOR SASARAN	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan ke Museum	-	-	-	-	7,00
Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik, Tahun 2026

Berdasarkan data Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik menunjukkan capaian yang baik dalam mendukung pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah. Hal tersebut tercermin dari berbagai indikator yang secara umum mampu mencapai target yang telah ditetapkan selama periode 2021–2025.

Pada indikator persentase objek yang dilestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan, capaian selama tahun 2021–2024 secara konsisten mencapai 100 persen, yang menunjukkan seluruh objek budaya yang menjadi sasaran program telah memperoleh upaya pelestarian dan pemanfaatan secara optimal. Capaian serupa juga ditunjukkan pada indikator persentase Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan, yang mencapai 100 persen pada tahun 2021–2024. Selain itu, persentase kesenian tradisional yang dilestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan juga mencapai 100 persen pada tahun 2021, 2022, dan 2023, yang mengindikasikan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan seni tradisional sebagai bagian dari identitas budaya daerah.

Indikator persentase cagar budaya terkelola dan lestari menunjukkan capaian yang sangat baik dengan realisasi 100 persen secara konsisten pada tahun 2021–2024. Kondisi ini menggambarkan bahwa seluruh cagar budaya yang menjadi objek pengelolaan telah

memperoleh perlindungan dan pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada indikator persentase objek diduga cagar budaya terdaftar, capaian mengalami peningkatan dari 9 persen pada tahun 2021 menjadi 15,15 persen pada tahun 2022 dan 15,79 persen pada tahun 2023, sebelum sedikit menurun menjadi 13,16 persen pada tahun 2024. Meskipun berfluktuasi, capaian tersebut menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam proses inventarisasi dan registrasi objek yang berpotensi menjadi cagar budaya.

Sementara itu, indikator persentase cagar budaya yang ditetapkan menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Dari kondisi 0 persen pada tahun 2021, meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2022 dan tetap terjaga hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam proses penetapan cagar budaya sebagai bagian dari upaya pelindungan warisan budaya daerah.

Pada indikator pertumbuhan kunjungan museum, capaian menunjukkan tren yang cukup baik. Tahun 2021 tercatat sebesar 306,09 persen, kemudian sebesar 38,88 persen pada tahun 2022, 35,17 persen pada tahun 2023, dan meningkat menjadi 42,03 persen pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan meningkatnya minat masyarakat terhadap museum sebagai sarana edukasi sejarah dan budaya.

Indikator efektivitas dokumen sejarah pada tahun 2023 mencapai 100 persen, yang mengindikasikan bahwa pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian dokumen sejarah telah dilaksanakan secara optimal. Adapun persentase kekayaan budaya yang terlestarikan melalui pemanfaatan dan pengembangan tercatat sebesar 95 persen pada tahun 2021, yang menunjukkan sebagian besar kekayaan budaya daerah telah memperoleh perlindungan dan pengembangan yang memadai.

Pada tahun 2025, kinerja urusan kebudayaan tetap menunjukkan hasil yang positif. Persentase warisan budaya yang

dilestarikan mencapai 4,17 persen, melampaui target sebesar 4 persen. Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan mencapai 150.000 orang, menunjukkan tingginya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya. Selanjutnya, persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan mencapai 50 persen, yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam upaya perlindungan aset budaya daerah. Sementara itu, pertumbuhan kunjungan wisatawan ke museum tercatat sebesar 7 persen, yang menunjukkan keberlanjutan fungsi museum sebagai destinasi edukasi dan wisata budaya.

Tabel 2.97

Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan di Kabupaten Gresik

No.	Objek	Uraian
1	Dhurung	Dhurung adalah bangunan tradisional yang berfungsi sebagai lumbung padi. Bengunan ini terletak di halaman rumah adat Bawean. Ukuran dhurung konon dibuat sesuai dengan luas areal persawahan pemiliknya. Area lumbung di bagian atas bangunan digunakan untuk menyimpan padi. Di Bagian bawah bangunan dhurung terdapat lantai untuk kegiatan keluarga.
2	Babad Sindujoyo	Babad Sindujoyo merupakan hasil kebudayaan yang berbentuk naskah dan gambar di dalamnya. Naskah tersebut berupa tembang macapat dengan huruf Pegon Jawa yang dibagi dalam berbagai jenis tembang yaitu asmaradhana, sinom, dhurma, kinanthi, pucung, dhandanggula, pangkur, mijil, dan megatruh.
3	Damar Kurung	Damar kurung adalah lampu sangkar. Damar kurung berbentuk bujur sangkat dengan hiasan mahkota di atasnya. GambarGambar yang menghiasi Damar Kurung menceritakan kehidupan sehari-hari masyarakat Gresik seperti gambar petani, nelayan dan kegiatan keagamaan.

No.	Objek	Uraian
4	Molod Bhebien	Molod Bhebien adalah istilah yang digunakan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh masyarakat Bawean. Perayaan maulid nabi ini memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri karena menyuguhkan makanan dan dagangan yang berjajar dalam wadah.
5	Kopi Kasar	Kopi kasar adalah biji kopi yang tidak digiling halus, dan saat diseduh, kopi bubuk tersebut mengapung di permukaan cangkir. ada beberapa cara menikmati kopi kasar. Cara pertama adalah dengan mengaduk ampas kopi yang terapung, keluarkan ampas kopi yang terapung dengan sendik, tuang kopi ke dalam cawan/piring kecil, baru kemudian diminum. Cara yang kedua adalah menambahkan krimer dan menikmati secangkir kopi dan cara yang ketiga adalah dengan meminum kopi yang dituangkan ke dalam piring berisi telur ayam kampung setengah matang.
6	Pudak	Pudak adalah makanan khas Gresik yang sudah ada sejak jaman wali songo. Makanan ini dibuat dengan cara memasukkan tepung beras, gula pasik/gula jawa dan santan ke dalam pelepah daun pinang yang disebut “OPE”. Kulit bagian dalam digunakan sebagai pembungkus. Setelah dibersihkan dan dipotong sesuai ukuran, lipat dan jahit membentuk alur seperti huruf L tanpa sudut.
7	Sego Krawu	Sego Krawu adalah makanan khas Gresik yang terdiri dari nasi, daging, sambal, serta serundeng dari parutan kelapa. Lauk utama Sego Krawu yaitu daging suwir dan jeroan, dimasak dengan semur. Kelapa parut kuning dibuat dari bumbu yang diberikan kunyit, yang merah berasal dari cabai merah besar. Sambal terasi agak gelap karena diberi campuran petis. Asal usul sego krawu sebenarnya ada di madura. Berasal dari kosa kata bahawa jawa “Krawuk” artinya meraih/mengambil dengan tangan.

No.	Objek	Uraian
8	Korcak	Salah satu kesenian tradisional Bawean yang kini terancam punah adalah Korcak. Korcak dapat dibagi menjadi dua jenis pertunjukkan. Pertama, korcak dimainkan sebagai arak-arak pengantin bawean. Kedua, Korcak dimainkan di atas panggung atau di pasmoan. Gerakan tari Korcak dibawakan dengan irama yang cenderung lambat. Kesenian tradisional Korcak menggunakan instrumen berupa rebana dan dua kendang (dhung-dhung). Di Korcak, setiap pemain juga berperan menjadi vokalis yang menyanyikan syair-syair ajaran islam atau moral dalam bahawa Bawean, dikuti dari buku Barzanji.
9	Kopiah	Kopiah khas Gresik sudah dikenal sejak zaman Sunan Giri. Tertulis dalam sejarah nasional Indonesia bahwa Kopiah sudah dikenal di Giri. Ketika Zainal Abidin (1486-1500). Raja ternate, belajar islam di madrasah giri. Ia kembali ke Ternate dengan membawa Kopiah sebagai oleh-oleh. Saat itu, kopiah Gresik menjadi salah satu alat tukar utama cengkeh dan rempah-rempah di Kerajaan Ternate

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik, Tahun 2025

17) Perpustakaan

Penyelenggaraan urusan perpustakaan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan budaya baca dan literasi masyarakat. Pelaksanaan urusan perpustakaan diarahkan untuk menjamin tersedianya layanan perpustakaan yang mudah diakses, berkualitas, dan mampu mendukung proses pembelajaran sepanjang hayat.

Tabel 2.98

Indikator Sasaran Perpustakaan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

INDIKATOR	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	tidak ada penilaian	56.30	59.30	67,51	67,04
Tingkat ketercukupan bahan pustaka (%)	-	-	-	0,27	2,02

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik, Tahun 2026.

Kinerja urusan perpustakaan menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah kunjungan perpustakaan, bertambahnya koleksi bahan pustaka, meningkatnya pemanfaatan layanan perpustakaan digital, serta bertambahnya jumlah perpustakaan yang mendapatkan pembinaan. Berbagai program pengembangan budaya baca dan literasi masyarakat juga telah dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, layanan perpustakaan keliling, pembinaan perpustakaan desa/kelurahan, serta transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Dalam rangka meningkatkan kinerja urusan perpustakaan, pemerintah daerah menetapkan arah kebijakan berupa peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan, penguatan budaya baca dan literasi masyarakat, pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi, peningkatan kualitas koleksi perpustakaan, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia perpustakaan. Upaya tersebut dilaksanakan melalui program pengelolaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca, pembinaan perpustakaan, dan pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Target kinerja urusan perpustakaan diarahkan pada peningkatan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM), peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), peningkatan jumlah kunjungan perpustakaan, peningkatan jumlah perpustakaan yang

memenuhi standar nasional, serta peningkatan pemanfaatan layanan perpustakaan digital. Melalui pencapaian target tersebut diharapkan perpustakaan dapat berfungsi sebagai pusat belajar masyarakat, pusat informasi, pusat kegiatan literasi, dan wahana pemberdayaan masyarakat yang mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas, inovatif, dan berdaya saing.

Dengan berbagai program dan kegiatan yang direncanakan, urusan perpustakaan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan, penguatan budaya literasi, serta pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

18) Kearsipan

Penyelenggaraan urusan kearsipan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kearsipan menjadi instrumen penting dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengambilan keputusan, perlindungan hak keperdataan masyarakat, serta pelestarian memori kolektif daerah sebagai bagian dari identitas dan sejarah pembangunan.

Tabel 2.99

Indikator Sasaran Kearsipan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

INDIKATOR	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal (Nilai)	63.70	81.26	88.07	88,41	89,58

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik, Tahun 2026.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai tahun 2025, Pelaksanaan urusan kearsipan telah menunjukkan capaian yang cukup baik melalui peningkatan pengelolaan arsip dinamis pada perangkat daerah, pelaksanaan pengawasan kearsipan internal, pembinaan

kepada pencipta arsip, serta peningkatan pengelolaan arsip statis. Selain itu, upaya pengembangan sistem kearsipan berbasis elektronik terus dilakukan guna mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan transformasi digital pemerintahan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan kearsipan, pemerintah daerah menetapkan arah kebijakan yang berfokus pada penguatan tata kelola kearsipan, peningkatan kualitas pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis, pengembangan sistem kearsipan elektronik, peningkatan kompetensi sumber daya manusia kearsipan, serta penguatan pengawasan dan pembinaan kearsipan pada seluruh perangkat daerah.

Pelaksanaan kebijakan tersebut didukung melalui program pengelolaan arsip dinamis daerah, program perlindungan dan penyelamatan arsip, program pengelolaan arsip statis daerah, serta program pembinaan dan pengawasan kearsipan. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan antara lain penyusunan dan penerapan instrumen kearsipan, akuisisi arsip statis, digitalisasi arsip, pembinaan dan pengawasan kearsipan, penyelamatan arsip vital, serta peningkatan kapasitas arsiparis dan pengelola arsip.

Target kinerja urusan kearsipan diarahkan pada peningkatan nilai hasil pengawasan kearsipan, peningkatan persentase perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai standar, peningkatan jumlah arsip statis yang terselamatkan dan terkelola, peningkatan penggunaan aplikasi kearsipan elektronik, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang kearsipan. Pencapaian target tersebut diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan menjamin ketersediaan arsip sebagai sumber informasi yang autentik, utuh, dan terpercaya.

c. Urusan Pilihan

1) Pariwisata

Pariwisata di Kabupaten Gresik diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan destinasi

wisata, peningkatan daya tarik wisata, penguatan ekonomi kreatif, serta pelestarian budaya lokal yang berkelanjutan. Pengembangan sektor pariwisata dilaksanakan dengan memanfaatkan potensi wisata religi, wisata budaya, wisata bahari, wisata sejarah, dan wisata berbasis masyarakat yang menjadi karakteristik Kabupaten Gresik sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Jawa Timur.

Kabupaten Gresik memiliki potensi wisata religi yang cukup kuat melalui keberadaan kawasan makam Sunan Giri dan Maulana Malik Ibrahim yang menjadi destinasi ziarah nasional dan mendukung pertumbuhan sektor perdagangan, jasa, dan UMKM masyarakat sekitar. Selain itu, pengembangan destinasi wisata alam dan wisata pesisir juga terus didorong melalui optimalisasi potensi kawasan pesisir dan kepulauan, termasuk pengembangan wisata di wilayah Bawean sebagai destinasi unggulan daerah.

Dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah, Pemerintah Kabupaten Gresik melaksanakan berbagai upaya antara lain peningkatan kualitas destinasi wisata, penguatan promosi pariwisata berbasis digital, pengembangan ekonomi kreatif masyarakat, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata. Pengembangan pariwisata juga diarahkan pada konsep pariwisata berkelanjutan melalui pelibatan masyarakat lokal, penguatan kelembagaan desa wisata, dan pelestarian nilai budaya daerah sebagai daya tarik wisata.

Pada aspek ekonomi, sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan sektor usaha mikro dan ekonomi kreatif. Sinergi antara sektor pariwisata dengan perdagangan, kuliner, transportasi, dan ekonomi kreatif menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif. Oleh karena itu, pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Gresik tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan identitas budaya daerah.

Tabel 2.100

Pertumbuhan Kunjungan Wisata Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2025

INDIKATOR SASARAN	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
Pertumbuhan Kunjungan Wisata	3,48%	96,25 %	4%	5%	7%

Sumber : Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik, Tahun 2026.

Berdasarkan data Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik, pertumbuhan kunjungan wisata selama periode tahun 2021–2025 menunjukkan tren yang positif meskipun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, pertumbuhan kunjungan wisata tercatat sebesar 3,48 persen. Kondisi tersebut menunjukkan mulai pulihnya aktivitas pariwisata daerah setelah sebelumnya terdampak oleh perlambatan aktivitas sosial dan ekonomi.

Pada tahun 2022, pertumbuhan kunjungan wisata mengalami peningkatan yang sangat signifikan hingga mencapai 96,25 persen. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan mobilitas masyarakat dan meningkatnya minat kunjungan wisatawan terhadap destinasi wisata di Kabupaten Gresik, khususnya wisata religi, wisata budaya, dan wisata alam. Selain itu, peningkatan kegiatan promosi pariwisata serta penyelenggaraan event daerah turut memberikan kontribusi terhadap kenaikan jumlah kunjungan wisata.

Selanjutnya pada tahun 2023, pertumbuhan kunjungan wisata kembali berada pada kondisi yang lebih stabil dengan capaian sebesar 4 persen. Pada tahun 2024 pertumbuhan kunjungan wisata meningkat menjadi 5 persen, sedangkan pada tahun 2025 diproyeksikan kembali meningkat menjadi 7 persen. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tren pertumbuhan yang berkelanjutan dan mencerminkan semakin membaiknya sektor pariwisata daerah.

Tabel 2.101

Indikator Sasaran Pariwisata Tahun 2021 – 2025

INDIKATOR SASARAN	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
Pertumbuhan Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)	25%	70%	27%	18%	37%
Presentase Fasilitasi di Objek Daya Tarik Wisata	200%	100%	100%	100 %	100%
Pertumbuhan Kelompok Sadar Wisata yang ditetapkan	20%	45%	10,75%	17%	7%
Presentase Destinasi Wisata yang Dikembangkan	100%	100%	100%	100 %	100%
Pertumbuhan kunjungan wisata Dalam Negeri	4%	95,65 %	3,89 %	5%	7%
Pertumbuhan kunjungan wisata Mancanegara	0%	33951,35%	45,10%	2%	246%
Pertumbuhan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	7%	2,45%	30,54%	47%	3%

Sumber : Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik, Tahun 2026.

Berdasarkan data Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik, kinerja sektor pariwisata selama periode tahun 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis pada berbagai indikator pembangunan pariwisata daerah. Pertumbuhan Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) pada tahun 2021 tercatat sebesar 25 persen dan meningkat signifikan menjadi 70 persen pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2023 pertumbuhan ODTW menurun menjadi 27 persen dan kembali melambat menjadi 18 persen pada tahun 2024, namun pada tahun 2025 diproyeksikan meningkat kembali menjadi 37 persen. Kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya pengembangan dan penambahan daya tarik wisata secara bertahap di Kabupaten Gresik.

Persentase fasilitas di objek daya tarik wisata pada tahun 2021 tercatat sebesar 200 persen dan selanjutnya berada pada angka 100 persen selama periode tahun 2022–2025. Hal tersebut menunjukkan bahwa fasilitas pendukung pada destinasi wisata secara umum telah

terpenuhi dan tetap dipertahankan keberlanjutannya dalam mendukung pelayanan wisata.

Pada indikator pertumbuhan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang ditetapkan, capaian tahun 2021 sebesar 20 persen dan meningkat menjadi 45 persen pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2023 mengalami perlambatan menjadi 10,75 persen, kemudian meningkat kembali menjadi 17 persen pada tahun 2024, dan pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar 7 persen. Kondisi tersebut mencerminkan adanya penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata daerah meskipun pertumbuhannya masih fluktuatif.

Sementara itu, persentase destinasi wisata yang dikembangkan selama tahun 2021–2025 tercatat konsisten sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan pengembangan destinasi wisata yang menjadi prioritas daerah.

Pada indikator pertumbuhan kunjungan wisata domestik, capaian tahun 2021 sebesar 4 persen dan meningkat sangat signifikan pada tahun 2022 menjadi 95,65 persen. Selanjutnya pertumbuhan kunjungan wisatawan domestik pada tahun 2023 sebesar 3,89 persen, meningkat menjadi 5 persen pada tahun 2024, dan diproyeksikan mencapai 7 persen pada tahun 2025. Adapun pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2021 tercatat 0 persen, kemudian meningkat sangat tinggi pada tahun 2022 sebesar 33951,35 persen seiring kembali meningkatnya mobilitas wisata internasional. Pada tahun 2023 pertumbuhan wisatawan mancanegara sebesar 45,10 persen, menurun menjadi 2 persen pada tahun 2024, dan diproyeksikan kembali meningkat menjadi 246 persen pada tahun 2025.

Selain itu, pertumbuhan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Pada tahun 2021 pertumbuhannya sebesar 7 persen, kemudian menurun menjadi 2,45 persen pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2023 meningkat

signifikan menjadi 30,54 persen dan kembali meningkat menjadi 47 persen pada tahun 2024, sedangkan pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar 3 persen. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan aktivitas usaha sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang turut mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Secara umum, perkembangan indikator sektor pariwisata Kabupaten Gresik menunjukkan adanya tren pertumbuhan positif meskipun masih mengalami dinamika pada beberapa indikator. Pengembangan destinasi wisata, penguatan peran masyarakat melalui Pokdarwis, peningkatan kunjungan wisatawan, serta pertumbuhan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan sektor pariwisata daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan promosi wisata, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung, pengembangan event pariwisata, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia guna mendukung keberlanjutan dan daya saing sektor pariwisata Kabupaten Gresik.

2) Kelautan dan Perikanan

Sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya merupakan salah satu penopang penting perekonomian daerah serta ketahanan pangan di Kabupaten Gresik. Secara geografis, Kabupaten Gresik memiliki potensi perikanan tangkap yang cukup besar, didukung oleh wilayah pesisir dan perairan laut yang menjadi sumber produksi berbagai jenis ikan. Aktivitas perikanan tangkap memberikan kontribusi nyata terhadap penyediaan protein hewani bagi masyarakat serta menjadi sumber mata pencaharian bagi nelayan, meskipun masih dihadapkan pada tantangan berupa fluktuasi hasil tangkapan, kondisi cuaca, dan keberlanjutan sumber daya ikan.

Tabel 2.102

Indikator urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Gresik
Tahun 2021-2025

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	42,86	43,25	55,67	56,6	-
Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/KAP/TH)	-	-	-	-	33,73
Pertumbuhan produksi perikanan tangkap (%)	3,08	1,60	1,92	3,22	4,17
Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya (%)	3,01	2,99	3,02	3,05	3,06
Pertumbuhan produksi usaha garam rakyat (%)	-11,94	-2,67	882,90	-31,2	0,97
Persentase penurunan konflik nelayan (%)	-	-	-	-18,29	2,78
Pengawasan pengelolaan perairan umum dan darat (jumlah pelaku usaha) (Angka)	-	-	-	15	21
Persentase pelatihan terhadap kelompok nelayan (%)	-	-	-	42,8	43
Persentase fasilitasi kebijakan peningkatan kesejahteraan nelayan (%)	-	-	-	58,8	17,84

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Gresik, Tahun 2026

Berdasarkan tabel diatas selama periode 2021–2025 menunjukkan kecenderungan yang positif pada sebagian besar indikator kinerja. Hal ini mencerminkan meningkatnya produktivitas sektor perikanan serta penguatan program pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan.

Indikator angka konsumsi ikan mengalami peningkatan secara konsisten dari 42,86 kg/kapita/tahun pada tahun 2021 menjadi 56,6 kg/kapita/tahun pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin baiknya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi protein hewani yang bersumber dari ikan, sekaligus mencerminkan keberhasilan upaya pemerintah daerah dalam mendorong gerakan konsumsi ikan di masyarakat. Pada Tahun 2025, Indikator kinerja utama dalam pelaksanaan program peningkatan konsumsi ikan yang semula berupa Angka Konsumsi Ikan (AKI) berganti istilah menjadi Konsumsi Ikan Masyarakat (KIM) dengan capaian Kabupaten Gresik sebesar 33,73. Data konsumsi ikan masyarakat Tahun 2025 menggunakan reformulasi dengan pendekatan konsumsi ikan di rumah tangga berbasis serapan tertimbang setara utuh. Reformulasi tersebut menyebabkan adanya penyesuaian angka, capaian dibandingkan metode sebelumnya, namun secara substansi bertujuan untuk menghasilkan data yang lebih representatif dan dapat dijadikan dasar perumusan yang lebih tepat sasaran.

Pada subsektor perikanan tangkap, pertumbuhan produksi perikanan tangkap menunjukkan tren meningkat dari 3,08 persen pada tahun 2021 menjadi 4,17 persen pada tahun 2025, meskipun sempat mengalami perlambatan pada tahun 2022 dan 2023. Kondisi ini mengindikasikan adanya perbaikan produktivitas usaha penangkapan ikan yang didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana serta pengelolaan sumber daya perikanan yang lebih baik.

Sementara itu, pertumbuhan produksi perikanan budidaya relatif stabil pada kisaran 3 persen selama periode 2021–2025. Stabilitas tersebut menunjukkan bahwa sektor budidaya mampu mempertahankan kapasitas produksinya secara berkelanjutan dan tetap menjadi salah satu penopang utama perekonomian perikanan daerah.

Pada sektor pendukung masyarakat pesisir, pertumbuhan produksi garam di Kabupaten Gresik pada tahun 2023 meningkat terutama karena kondisi musim kemarau yang lebih panjang dan

intensitas sinar matahari yang tinggi akibat fenomena El Niño, sehingga proses penguapan air laut berlangsung lebih cepat dan produksi garam menjadi lebih optimal. Faktor cuaca ini juga mendorong peningkatan produksi garam di berbagai daerah penghasil garam di Jawa Timur dan Indonesia.

Selain faktor cuaca, peningkatan produksi juga didukung oleh:

1. Meningkatnya produktivitas tambak garam rakyat.
2. Perbaikan pengelolaan dan teknologi produksi garam di beberapa sentra garam.
3. Dukungan program pemerintah untuk pengembangan usaha garam rakyat.

Indikator pertumbuhan produksi usaha garam rakyat mulai tercatat pada tahun 2024 dengan capaian negatif sebesar 31,2 persen, namun berhasil berbalik tumbuh positif sebesar 0,97 persen pada tahun 2025. Perbaikan ini menunjukkan adanya upaya pemulihan produksi garam rakyat melalui peningkatan kualitas pengelolaan usaha dan dukungan fasilitasi pemerintah daerah.

Selanjutnya, indikator persentase penurunan konflik nelayan menunjukkan perbaikan dari kondisi tahun 2024 sebesar -18,29 persen menjadi 2,78 persen pada tahun 2025. Capaian tersebut mengindikasikan meningkatnya efektivitas pembinaan dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam menciptakan hubungan yang harmonis di kawasan pesisir dan perairan.

Dalam aspek pengawasan sumber daya perikanan, jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pengawasan pengelolaan perairan umum dan darat meningkat dari 15 pelaku usaha pada tahun 2024 menjadi 21 pelaku usaha pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan semakin optimalnya fungsi pengawasan dalam mendukung pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

Di sisi pemberdayaan nelayan, persentase pelatihan terhadap kelompok nelayan meningkat dari 42,8 persen pada tahun 2024 menjadi 43 persen pada tahun 2025. Meskipun peningkatannya relatif

kecil, capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha perikanan.

Adapun persentase fasilitasi kebijakan peningkatan kesejahteraan nelayan mengalami penurunan dari 58,8 persen pada tahun 2024 menjadi 17,84 persen pada tahun 2025. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan tahun berikutnya melalui penguatan program perlindungan dan pemberdayaan nelayan agar manfaat kebijakan dapat menjangkau lebih banyak sasaran.

Secara keseluruhan, kinerja urusan kelautan dan perikanan Kabupaten Gresik selama periode 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang cukup baik, terutama pada peningkatan konsumsi ikan, pertumbuhan produksi perikanan tangkap dan budidaya, serta penguatan pengawasan dan pemberdayaan masyarakat perikanan. Namun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan pada aspek kesejahteraan nelayan dan pengembangan usaha garam rakyat agar pembangunan sektor kelautan dan perikanan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Gresik.

Tabel 2.103

Perkembangan Hasil Laut di Kabupaten Gresik Tahun 2021 s.d 2025

NO	JENIS IKAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		P	NP	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP
		(Ton)	(Rp. 000,-)	(Ton)	(Rp. 000,-)	(Ton)	(Rp. 000,-)	(Ton)	(Rp. 000,-)	(Ton)	(Rp. 000,-)
1	Garam	745.0	-	725.0	-	7,126.0	-	4,903	-	4,978	
2	Teri	31.7	658,500	131.0	1.137.900	138.5	1,246,000	149.5	897,000	42.6	383,310
3	Belanak	314.8	4,722,000	278.9	3.508.700	269.8	3,238,000	318.5	6.688.500	381.8	4.581.480
4	Kembung	168.2	3,027,600	159.0	2.922.700	178.9	3,220,300	188.4	3.579.600	474.8	8.545.500
5	Layang deles	316.7	6,334,000	272.4	5.350.800	256.2	5,125,000	304.6	5.635.100	290.0	5.800.600
6	Tembang	275.2	3,027,200	229.2	2.549.650	252.3	2,776,000	254.1	3.049.200	189.1	2.079.660
7	Pelagis kecil lainnya	10.5	-	10.7	16,750	11.5	-	12.0	24,000	14.6	
8	Tongkol komo (KAW)	449.9	8,998,000	362.4	6,859,000	354.2	7,084,000	411.4	9,050,800	437.2	8.744.800
9	Lemadang	36.5	1,095,000	10.8	324,400	17.7	532,200	12.6	403,200	41.2	1.236.300
10	Tenggiri (COM)	593.0	17,790,000	490.0	14.271.000	477.4	14,321,000	556.1	18,351,300	589.7	17.690.700
11	Tenggiri Papan	21.2	318,000	61.0	973,350	62.0	930,000	111.1	3,555,200	45.8	687,150
12	Cucut lainnya	46.2	485,100	59.7	635,700	64.7	680,000	66.2	794,400	53.6	562,485
13	Manyung	157.2	2,672,400	151.0	2,605,600	155.5	2,463,000	200.8	4,518,000	336.8	5.725.090

NO	JENIS IKAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		P	NP	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP
		(Ton)	(Rp. 000,-)	(Ton)	(Rp. 000,-)	(Ton)	(Rp. 000,-)	(Ton)	(Rp. 000,-)	(Ton)	(Rp. 000,-)
14	Bawal Hitam	14.7	588,000	12.1	1,550,500	16.6	2,323,200	13.2	-	-	-
15	Bawal Putih	14.7	518,000	16.1	417,900	20.2	464,500	19.2	720,000	38.6	888,490
16	Kakap putih	131.6	4,606,000	119.9	3,724,000	122.7	3,682,000	144.4	6,498,000	301.9	9.056.400
17	Kakap merah/Bambangan	45.1	2,255,000	41.1	1,519,000	41.2	1,442,500	48.6	2,575,000	54.9	1.921.150
18	Kurisi	105.6	1,425,600	136.2	1,464,500	170.0	1,700,000	168.1	3,193,900	78.1	780,700
19	Layur	104.8	3,406,000	105.3	2,099,000	110.8	1,662,000	110.7	2,988,900	233.4	3.500.250
20	Pari lainnya	42.3	952,000	59.7	986,800	73.4	1,101,000	67.2	1,276,800	164.0	2.460.600
21	Sembilang	2.4	84,000	4.9	102,000	8.4	-	5.4	199,800	88.7	569,600
22	Ikan demersal lainnya	819.8	7,378,200	820.4	9,811,400	791.6	10,291,000	899.7	10,796,400	738.9	9,606,960
23	Kerapu lumpur	146.3	9,509,500	135.5	6,621,100	138.7	6,240,500	159.3	11,947,500	160.1	7,204,950
24	Ikan karang lainnya	363.6	6,181,200	314.2	4,754,400	317.3	5,394,500	366.8	4,401,600	518.5	8,814,160
25	Udang Putih / jerbung	72.3	7,591,500	60.1	6,272,900	81.4	8,548,500	79.1	8,305,500	203.6	21,372,750
26	Udang krosok	40.5	810,000	58.5	1,168,750	62.6	1,251,600	83.5	1,837,000	9.6	191,200
27	Udang windu	35.1	3,510,000	67.2	6,869,500	67.1	6,713,500	89.5	12,082,500	227.2	22,717,000
28	Udang ketak	83.9	10,361,650	68.2	8,405,100	70.1	8,653,000	83.9	-	381.9	47,163,145

NO	JENIS IKAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		P	NP	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP
		(Ton)	(Rp. 000,-)	(Ton)	(Rp. 000,-)	(Ton)	(Rp. 000,-)	(Ton)	(Rp. 000,-)	(Ton)	(Rp. 000,-)
29	Udang lainnya	498.3	9,966,000	403.5	12,238,500	397.4	12,717,500	468.4	15,925,600	632.2	20,230,080
30	Lobster Mutiara	76.9	7,690,000	65.4	6,587,300	-	-	74.4	-	6.1	612,000
31	Lobster pasir	1.1	-	1.1	192,500	10.8	-	1.3	240,500	1.3	-
32	Kepiting	64.1	9,935,500	55.1	8,490,800	57.6	8,935,000	67.4	9,773,000	77.3	11,975,300
33	Rajungan	149.2	5,222,000	137.0	5,136,700	162.2	5,678,500	157.0	7,850,000	349.9	12,246,500
34	Kerang darah	1,960.7	13,724,900	1,364.7	9,510,600	1,478.3	10,347,800	1,669.6	125,220,000	4,775.7	33,429,620
35	Cumi - cumi	239.8	14,388,000	214.2	8,843,800	225.4	8,788,500	257.4	12,870,000	501.1	19,544,070
36	Sotong	13.7	479,500	42.1	1,487,300	43.1	1,507,000	61.8	2,904,600	57.0	198,100
37	Teripang	769.7	1,000,610	560.7	798,800	568.4	738,900	576.9	1,038,420	97.9	142,120
SUB JUMLAH		9,062	170,710,960	7,804	120,467,950	14,400	149,796,500	13,161	280,238,920	17,573	219,319,690

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik tahun 2026

Berdasarkan tabel perkembangan hasil laut di Kabupaten Gresik Tahun 2021 s.d 2025 produksi hasil laut menunjukkan tren yang cenderung meningkat baik dari sisi volume produksi maupun nilai produksi. Total produksi hasil laut pada Tahun 2021 tercatat sebesar 9.062 ton dengan nilai produksi mencapai Rp170,71 miliar. Pada Tahun 2025, total produksi meningkat menjadi 17.573 ton dengan nilai produksi sebesar Rp219,31 miliar. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa subsektor perikanan dan hasil laut masih menjadi salah satu sektor strategis dalam mendukung perekonomian masyarakat pesisir di Kabupaten Gresik. Beberapa komoditas yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap produksi hasil laut antara lain ikan tembang, kembung, tongkol komo, rajungan, kerang darah, cumi-cumi, serta udang windu dan udang vaname. Selain peningkatan volume produksi, nilai produksi hasil laut juga mengalami pertumbuhan yang dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas penangkapan, permintaan pasar, serta nilai ekonomis beberapa komoditas unggulan perikanan laut. Kondisi tersebut mencerminkan potensi sektor kelautan dan perikanan yang masih cukup besar untuk terus dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Tabel 2.104

Perkembangan Perikanan Budidaya di Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2025

NO	JENIS IKAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		P	NP	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP
		(Kg)	(Rp. 000,-)	(Kg)	Rp. 000,-)	(Kg)	Rp. 000,-)	(Kg)	Rp. 000,-)	(Kg)	Rp. 000,-)
1	Bandeng	90,397,836.0	1,437,679,059.0	90,398,940.0	1,623,481,125.0	90,504,550.0	1,832,581,667.0	90,416,118.0	1,780,448,887.0	91,398,858.0	1,979,620,017.0
2	Gracilaria verrucosa	-	-	14,500.0	870,000.0	147,920.0	861,076.0	1,965,402.0	10,133,821.0	4,242,224.0	12,822,728.0
3	Gurame, Gurami	2,491.0	50,795.0	2,456.0	51,215.0	2,982.0	70,990.0	3,526.0	93,165.0	4,399.0	117,473.0
4	Kakap Putih	9,851.0	289,321.0	9,812.0	294,018.0	12,389.0	390,881.0	38,381.0	1,232,635.0	33,060.0	1,036,129.0
5	Kepiting Bakau	122,141.0	4,744,759.0	123,139.0	4,726,655.0	131,182.0	7,248,656.0	246,877.0	12,145,816.0	345,628.0	15,584,890.0
6	Kerang Hijau	11,240,652.0	57,040,230.0	11,854,514.0	58,273,317.0	17,469,780.0	66,211,409.0	15,582,549.0	63,394,404.0	13,740,679.0	53,413,466.0
7	Kerapu	131,431.0	15,328,353.0	127,448.0	14,063,571.0	134,922.0	16,665,410.0	141,841.0	17,048,867.0	147,793.0	16,494,296.0
8	Lele	1,215,415.0	17,160,346.0	1,278,759.0	18,408,392.0	1,469,704.0	22,505,333.0	1,611,588.0	26,593,381.0	1,640,329.0	26,274,158.0
9	Mas,Ikan Mas,Karper	2,326,095.0	26,504,787.0	2,352,537.0	25,998,090.0	2,381,957.0	30,953,756.0	2,289,080.0	29,943,577.0	2,290,637.0	25,219,450.0
10	Mujair	9,847,172.0	101,060,288.0	9,579,902.0	96,582,571.0	8,973,172.0	71,351,679.0	8,867,487.0	74,090,948.0	9,776,868.0	85,375,401.0
11	Nila	5,432,185.0	69,877,088.0	5,486,251.0	70,118,399.0	5,052,316.0	74,280,961.0	5,109,253.0	74,232,657.0	4,807,591.0	72,681,180.0

NO	JENIS IKAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		P	NP	P	NP	P	NP	P	NP	P	NP
		(Kg)	(Rp. 000,-)	(Kg)	Rp. 000,-)	(Kg)	Rp. 000,-)	(Kg)	Rp. 000,-)	(Kg)	Rp. 000,-)
12	Patin	10,443.0	146,136.0	10,330.0	52,079,005.0	11,409.0	14,675,724.0	31,604.0	582,478.0	18,352.0	348,168.0
14	Tawes	4,946,744.0	52,490,001.0	5,036,984.0	56,662,594.0	4,383,675.0	56,191,852.0	4,128,852.0	53,657,329.0	4,002,267.0	51,129,446.0
15	Udang Vaname	11,185,709.0	558,182,396.0	14,077,790.0	703,889,496.0	15,747,825.0	793,388,658.0	17,568,894.0	878,444,659.0	18,401,979.0	905,885,654.0
16	Udang Windu	2,381,527.0	190,522,131.0	2,402,217.0	198,530,534.0	2,542,834.0	235,222,069.0	2,645,022.0	242,120,714.0	2,921,896.0	266,867,020.0
17	Udang Putih	580.0	29,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Ikan Lainnya	3,486,636.0	14,367,556.0	3,942,393.0	17,150,959.0	3,950,859.0	16,200,955.0	5,325,537.0	21,337,755.0	6,666,514.0	27,878,119.0
SUB JUMLAH		142,736,908.0	2,545,472,246.0	146,697,972.0	2,941,179,941.0	152,917,476.0	3,238,801,076.0	155,972,011.0	3,285,501,093.0	160,439,074.0	3,540,747,595.0

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Gresik tahun 2026

Berdasarkan tabel perkembangan perikanan budidaya di Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2025, produksi perikanan budidaya menunjukkan tren yang terus meningkat baik dari sisi volume maupun nilai produksi. Total produksi perikanan budidaya pada Tahun 2021 tercatat sebesar 142.736.908 kg dengan nilai produksi mencapai Rp2,545,472,246. Pada Tahun 2025, total produksi meningkat menjadi 160.489.074 kg dengan nilai produksi sebesar Rp3,540,747,595. Komoditas perikanan budidaya yang memberikan kontribusi terbesar antara lain bandeng, nila, lele, mujair, kerang hijau, udang vaname, dan udang windu. Komoditas tersebut menjadi unggulan subsektor perikanan budidaya karena memiliki permintaan pasar yang tinggi serta didukung oleh potensi kawasan tambak dan budidaya yang cukup luas di Kabupaten Gresik. Peningkatan produksi dan nilai produksi perikanan budidaya menunjukkan semakin berkembangnya aktivitas budidaya perikanan masyarakat serta meningkatnya produktivitas usaha perikanan budidaya. Selain itu, kondisi tersebut mencerminkan peran strategis subsektor perikanan budidaya dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan ekonomi daerah berbasis potensi kelautan dan perikanan.

3) Pertanian

Sektor pertanian menjadi salah satu komponen penting dalam pembangunan daerah terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan. Dalam pembangunan daerah Kabupaten Gresik, sektor pertanian memiliki peran yang cukup besar, diantaranya : penyerap tenaga kerja, penyumbang PDRB, sumber devisa, bahan baku industri, sumber bahan pangan dan gizi, serta pendorong bergeraknya sektor-sektor ekonomi lainnya. Indikator urusan pertanian di Kabupaten Gresik terdiri dari Pertumbuhan produksi komoditas unggulan pertanian, Pertumbuhan produksi komoditas unggulan Perkebunan, Pertumbuhan Produksi Komoditas Unggulan Peternakan, Pertumbuhan PDRB Pertanian,Kehutanan, dan Perikanan. Capaian indikator pangan Kabupaten Gresik secara detail sebagai berikut.

Tabel 2.105
Indikator Kinerja Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Pertumbuhan produksi komoditas unggulan pertanian (%)	0,44	0,435	0,450	2,87	7,51
Pertumbuhan produksi komoditas unggulan perkebunan (%)	0,35	0,32	0,33	0,46	0,07
Pertumbuhan Produksi Komoditas Unggulan Peternakan (%)	2,01	1,33	1,74	2,02	1,85
Pertumbuhan PDRB Pertanian,Kehutanan, dan Perikanan (%)	-	3,17	3,20	1,63	3,37

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, Tahun 2026

Berdasarkan tabel indikator kinerja pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2021–2025, kinerja sektor pertanian menunjukkan tren yang cenderung meningkat pada beberapa subsektor strategis, meskipun masih terdapat fluktuasi pada komoditas tertentu. Pertumbuhan produksi komoditas unggulan pertanian mengalami peningkatan signifikan, terutama pada tahun 2024 sebesar 2,87 persen dan meningkat tajam menjadi 7,51 persen pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan produktivitas dan optimalisasi pengelolaan sektor pertanian yang didukung oleh penguatan sarana produksi, pemanfaatan teknologi budidaya, serta meningkatnya kapasitas petani dalam mengembangkan komoditas unggulan daerah.

Pada Pertumbuhan produksi komoditas unggulan perkebunan, cenderung relatif stabil dengan pertumbuhan pada rentang 0,07–0,46 persen selama periode 2021–2025. Meskipun pertumbuhannya tidak terlalu tinggi, kondisi ini menunjukkan bahwa subsektor perkebunan masih mampu mempertahankan keberlanjutan produksi di tengah berbagai tantangan, seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan dinamika pasar komoditas.

Sementara itu, produksi komoditas unggulan peternakan menunjukkan perkembangan yang cukup baik dengan capaian pertumbuhan yang relatif konsisten. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 2,02 persen, sedangkan pada tahun 2025 tercatat sebesar 1,85 persen. Capaian tersebut mencerminkan bahwa subsektor peternakan masih menjadi salah satu penopang sektor primer melalui peningkatan populasi ternak, produktivitas hasil ternak, serta penguatan sistem budidaya dan kesehatan hewan.

Dari sisi makro sektoral, pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menunjukkan perbaikan dengan capaian sebesar 3,37 persen pada tahun 2025, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 1,63 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian dalam arti luas masih memiliki kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan menjadi sektor strategis dalam mendukung ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gresik.

Secara keseluruhan, perkembangan indikator kinerja sektor pertanian Kabupaten Gresik periode 2021–2025 menunjukkan arah yang positif, terutama pada peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian dan penguatan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah.

3.1) Produksi Komoditas Unggulan Pertanian

Komoditas unggulan pertanian di Kabupaten Gresik didominasi oleh tanaman pangan dan hortikultura, yang secara konsisten memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat serta mendukung stabilitas pasokan pangan daerah. Kinerja produksi komoditas unggulan menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi penopang penting bagi perekonomian wilayah perdesaan, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan seperti fluktuasi iklim, ketersediaan air irigasi, dan alih fungsi lahan. Secara keseluruhan, pengembangan produksi komoditas unggulan pertanian Kabupaten Gresik perlu terus diarahkan pada peningkatan produktivitas dan kualitas hasil, pemanfaatan teknologi pertanian,

serta penguatan akses pasar dan nilai tambah, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Tabel 2.106

Data Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
Produksi tanaman pangan dan hortikultura (Ton)		Ton	700.123,85	785.165,43	788.678,42	811.295,75	872.247,41
1.Produksi tanaman pangan (ton)		Ton	531.942,20	616.853,60	624.593,37	633.868,36	688.326,53
1	Padi	Ton	391.460,60	422.680,40	422.685,97	419.961,29	481.408,72
2	Jagung	Ton	125.041,00	176.773,10	185.961,82	202.071,41	193.626,77
3	Kedelai	Ton	164,50	433,60	1.030,63	427,26	44,26
4	Kacang Tanah	Ton	2.058,30	1.569,00	1.912,05	1.823,10	1.634,08
5	Kacang Hijau	Ton	332,40	684,60	1.656,78	1.131,30	1.165,20
6	Ubi kayu	Ton	11.914,50	14.712,90	11.281,00	7.934,00	10.215,00
7	Ubi jalar	Ton	970,90	-	65,12	47,00	160,00
8	Talas	Ton	-	-	-	421,00	50,00
9	Porang	Ton	-	-	-	52,00	22,50
2. Produksi hortikultura (ton)		Ton	168.181,65	168.311,83	164.085,05	177.427,39	183.920,88
a. Sayur (ton)		Ton	29.925,10	30.055,27	18.533,80	29.062,23	27.298,53
1	Sawi	Ton	322,00	323,40	1.097,70	3.114,20	837,25
2	Kacang panjang	Ton	317,20	318,58	296,30	39,40	79,85
3	Cabe	Ton	27.812,20	27.933,18	14.805,70	24.022,95	24.459,20
4	*Tomat*	Ton	152,30	152,96	433,60	171,50	258,10
5	Terong	Ton	279,10	280,31	519,90	135,18	190,60
6	Ketimun	Ton	13,10	13,16	-	94,00	141,80
7	Kangkung	Ton	646,10	648,91	1.046,50	1.184,20	718,63
8	Bayam	Ton	383,10	384,77	334,10	300,80	613,10
b. Buah (Ton)		Ton	114.930,63	114.930,63	125.841,70	123.269,38	129.368,82
1	Jambu Biji	Ton	1.556,44	1.556,44	1.428,00	2.593,06	5.187,68
2	Jeruk	Ton	628,82	628,82	689,50	2.048,79	249,35
3	Mangga	Ton	78.706,69	78.706,69	83.104,50	76.312,28	63.241,27
4	Pepaya	Ton	2.017,84	2.017,84	6.829,90	4.751,74	6.496,05

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN				
			2021	2022	2023	2024	2025
5	Pisang	Ton	28.255,48	28.255,48	31.312,30	30.529,86	49.540,90
6	Belimbing	Ton	692,60	692,60	697,80	2.079,68	2.193,13
7	Sawo	Ton	991,49	991,49	1.137,00	4.509,81	1.951,15
8	Sirsak	Ton	567,66	567,66	337,20	253,36	285,29
9	Buah Naga	Ton	1.513,61	1.513,61	305,50	190,80	224,00
c. Obat (Ton)		Ton	23.325,92	23.325,92	19.709,55	25.095,78	27.253,54
1	Kunyit	Ton	23.219,16	23.219,16	19.709,25	1.996,29	3.580,22
2	Jahe	Ton	106,76	106,76	0,30	1,34	5,14
3	Jeruk Nipis	Ton	-	-	-	23.098,15	23.668,19

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Gresik, Tahun 2026

1) Tanaman Pangan

Produksi tanaman pangan meningkat dari 531.942,2 ton pada tahun 2021 menjadi 688.326,5 ton pada tahun 2025, atau tumbuh sekitar 29,4 persen selama lima tahun terakhir. Padi merupakan komoditas utama dengan kontribusi terbesar terhadap total produksi tanaman pangan. Produksi padi meningkat dari 391.460,6 ton pada tahun 2021 menjadi 481.408,7 ton pada tahun 2025. Meskipun sempat mengalami fluktuasi pada tahun 2024, produksi kembali meningkat pada tahun 2025.Produksi jagung menunjukkan tren peningkatan yang sangat positif dari 125.041 ton pada tahun 2021 menjadi 193.626,8 ton pada tahun 2025. Kenaikan produksi mencapai sekitar 54,9 persen, tertinggi dibandingkan komoditas pangan utama lainnya. Produksi kedelai mengalami perkembangan yang tidak stabil. Produksi meningkat hingga mencapai 1.030,6 ton pada tahun 2023, namun menurun drastis menjadi 44,3 ton pada tahun 2025. kondisi ini menunjukkan bahwa: Budidaya kedelai masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi produktivitas maupun daya saing usaha tani. Minat petani untuk menanam kedelai masih relatif rendah dibandingkan komoditas lain yang lebih menguntungkan. Diperlukan penguatan program pengembangan kedelai guna mendukung swasembada pangan berbasis protein nabati.Produksi kacang tanah cenderung stabil pada kisaran 1.500–2.000 ton per tahun, sedangkan kacang hijau menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2021 meskipun masih berfluktuasi. Produksi ubi kayu berada pada tingkat yang cukup tinggi, yaitu antara 7.934–14.713

ton selama periode pengamatan.Walaupun mengalami penurunan pada tahun 2024, produksi kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 10.215 ton. Produksi ubi jalar relatif kecil dan berfluktuasi, namun masih menunjukkan keberadaan usaha budidaya di tingkat petani. Talas dan porang mulai tercatat produksinya pada tahun 2024.

Kemunculan kedua komoditas ini menunjukkan adanya upaya diverifikasi komoditas pangan dan pengembangan tanaman bernilai ekonomi tinggi. Namun demikian, penurunan produksi pada tahun 2025 mengindikasikan bahwa pengembangan komoditas tersebut masih memerlukan pendampingan dan penguatan budidaya.

Secara umum Kinerja subsektor tanaman pangan Kabupaten Gresik menunjukkan perkembangan yang positif, ditandai dengan peningkatan produksi sebesar 29,4 persen selama periode pengamatan. Padi dan jagung tetap menjadi komoditas unggulan yang berkontribusi besar terhadap ketahanan pangan daerah. Jagung merupakan komoditas dengan laju pertumbuhan terbaik, sehingga berpotensi menjadi motor penggerak peningkatan produksi tanaman pangan di masa mendatang. Kedelai masih menjadi komoditas yang perlu mendapatkan perhatian khusus, karena produksinya belum stabil dan cenderung menurun pada akhir periode. Pengembangan diversifikasi pangan melalui ubi kayu, talas, porang, dan komoditas lainnya perlu terus didorong guna mengurangi ketergantungan terhadap komoditas tertentu. capaian produksi tanaman pangan selama periode 2021–2025 menunjukkan bahwa pembangunan sektor pertanian Kabupaten Gresik berjalan cukup baik dan memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan serta perekonomian daerah.

2) Sayur

Kontribusi cabai mencapai sekitar 89,6 persen dari total produksi sayuran pada tahun 2025, Produksi sawi meningkat cukup signifikan dari 322 ton pada tahun 2021 menjadi 837,3 ton pada tahun 2025.Meskipun sempat mencapai puncak produksi pada tahun 2024 sebesar 3.114,2 ton, produksi tahun 2025 masih lebih tinggi dibandingkan awal periode,Produksi sempat meningkat hingga 1.184,2 ton pada tahun 2024 sebelum kembali menurun pada tahun 2025, Produksi bayam meningkat

dari 383,1 ton pada tahun 2021 menjadi 613,1 ton pada tahun 2025, Produksi tomat berfluktuasi antara 152–434 ton dan mencapai 258,1 ton pada tahun 2025, Produksi terong meningkat hingga 519,9 ton pada tahun 2023, namun kemudian menurun menjadi 190,6 ton pada tahun 2025. Produksi menurun cukup tajam dari 317,2 ton pada tahun 2021 menjadi 79,9 ton pada tahun 2025. Produksi relatif rendah dan berfluktuasi, meskipun pada tahun 2025 meningkat menjadi 141,8 ton.

Produksi sayuran Kabupaten Gresik selama tahun 2021–2025 cenderung berfluktuasi, dengan penurunan sebesar 8,8 persen dibandingkan tahun 2021. Cabai masih menjadi komoditas unggulan dan penyumbang terbesar produksi sayuran, sehingga sangat menentukan kinerja subsektor sayuran secara keseluruhan. Sawi, kangkung, dan bayam menunjukkan perkembangan yang cukup positif, sehingga berpotensi menjadi komoditas pendukung diversifikasi produksi sayuran. Kacang panjang, terong, dan mentimun masih memerlukan upaya peningkatan produktivitas dan stabilitas produksi agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar. Secara umum, pengembangan subsektor sayuran perlu diarahkan pada diversifikasi komoditas, peningkatan produktivitas, pengendalian risiko budidaya, serta penguatan pemasaran hasil, sehingga ketergantungan terhadap komoditas cabai dapat dikurangi dan struktur produksi sayuran menjadi lebih seimbang.

3) Buah

Produksi buah-buahan Kabupaten Gresik menunjukkan tren yang positif, dengan peningkatan sebesar 12,6 persen selama tahun 2021–2025. Mangga masih menjadi komoditas unggulan utama, meskipun mengalami kecenderungan penurunan produksi pada dua tahun terakhir. Pisang merupakan komoditas dengan pertumbuhan terbaik, sehingga berpotensi menjadi komoditas strategis baru dalam pengembangan hortikultura daerah. Jambu biji, pepaya, dan belimbing menunjukkan perkembangan yang sangat baik, mencerminkan keberhasilan diversifikasi komoditas buah. Jeruk, sawo, sirsak, dan buah naga masih menghadapi fluktuasi produksi, sehingga memerlukan upaya peningkatan produktivitas dan penguatan budidaya. Secara umum, pengembangan subsektor buah perlu

diarahkan pada peningkatan produktivitas tanaman unggulan, diversifikasi komoditas, peremajaan tanaman, penguatan pascapanen, serta pengembangan agroindustri, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk hortikultura Kabupaten Gresik.

4) Biofarmaka

Produksi biofarmaka Kabupaten Gresik menunjukkan perkembangan positif, ditandai dengan peningkatan produksi sebesar 16,8 persen selama periode 2021–2025. Terjadi perubahan struktur komoditas biofarmaka, dari yang sebelumnya didominasi kunyit menjadi didominasi jeruk nipis sejak tahun 2024. Jeruk nipis menjadi komoditas biofarmaka unggulan baru, dengan kontribusi hampir 87 persen terhadap total produksi biofarmaka tahun 2025. Produksi kunyit dan jahe mengalami penurunan yang cukup signifikan, sehingga memerlukan perhatian dalam upaya pemulihan dan pengembangan budidaya. Secara umum, subsektor biofarmaka memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan sebagai bagian dari diversifikasi pertanian dan peningkatan nilai tambah produk pertanian. Ke depan, pengembangan biofarmaka perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas jeruk nipis, revitalisasi komoditas kunyit dan jahe, penguatan hilirisasi produk biofarmaka, serta pengembangan kemitraan usaha dan pasar, sehingga pertumbuhan subsektor biofarmaka dapat berlangsung secara berkelanjutan.

3.2) Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan

Di sisi perkebunan, Kabupaten Gresik memiliki berbagai komoditas potensial yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Produksi perkebunan mencakup berbagai hasil panen yang diperoleh dari beragam jenis tanaman, termasuk tanaman tahunan dan tanaman semusim. Berdasarkan data produksi perkebunan tahun 2021–2025, subsektor perkebunan Kabupaten Gresik menunjukkan kinerja yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat. Peningkatan produksi terjadi secara bertahap setiap tahun, meskipun laju pertumbuhannya tidak terlalu besar karena struktur produksi masih didominasi oleh komoditas tebu yang cenderung stabil.

Tabel 2.107

Data Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

No	Komoditas (Ton)	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Tembakau	375,00	900,00	1.628,4	3.248,91	1.448,44
2.	Tebu	159.790,50	159.805,45	159.622,71	158.589,19	159.521,6
3.	Kelapa	5.050,58	5.049,77	5.044,76	5.044,75	5.027,2
4.	Cengkeh	10,96	10,96	11,65	11,6	33
5.	Kenanga	9,47	8,74	8,82	11	11,1
6.	Jambu mete	14,46	13,84	13,24	55,1	8,53
7.	siwalan	15,34	15,33	15,41	110,1	1.041,59
8.	Aren	277,06	277,17	276,52	321,9	425,2
Jumlah kumulatif		165.543,37	166.081,26	166.621,51	167.392,55	167.516,55

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Gresik, Tahun 2026

Produksi komoditas unggulan perkebunan terdiri dari tanaman tembakau, tebu, kelapa, cengkeh, kenanga, jambu mete, siwalan, aren. Produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Gresik selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika yang fluktuatif namun cenderung stabil, dengan pertumbuhan sebesar 1,19 persen. Total produksi kumulatif meningkat dari 165.543,37 ton pada tahun 2021 menjadi 167.516,55 ton pada tahun 2025. Komoditas tebu merupakan penyumbang terbesar produksi perkebunan dan relatif stabil di kisaran 158–160 ribu ton per tahun, sementara tembakau menunjukkan peningkatan signifikan hingga tahun 2024 sebelum mengalami penurunan pada tahun 2025. Produksi kelapa relatif stabil, sedangkan komoditas rempah seperti cengkeh dan kenanga menunjukkan kecenderungan meningkat meskipun dengan volume yang terbatas. Komoditas aren dan siwalan mengalami peningkatan produksi yang cukup menonjol pada periode akhir, khususnya pada tahun 2024–2025, mencerminkan potensi pengembangan komoditas lokal berbasis perkebunan rakyat. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa sektor perkebunan Kabupaten Gresik memiliki peran penting dalam menopang struktur ekonomi pertanian daerah.

3.3) Produksi Komoditas Unggulan Peternakan

Potensi sektor peternakan merupakan bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan struktur ekonomi Kabupaten Gresik. Dengan karakteristik wilayah yang mencakup kawasan daratan, pesisir, dan perairan laut, Kabupaten Gresik memiliki peluang pengembangan peternakan dan perikanan yang beragam, baik peternakan rakyat, perikanan tangkap, maupun perikanan budidaya. Sub-sektor peternakan berperan dalam penyediaan sumber protein hewani melalui komoditas ternak besar, ternak kecil, dan unggas, yang sebagian besar diusahakan oleh masyarakat skala rumah tangga. Pengembangan sektor peternakan di Kabupaten Gresik dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam, sarana dan prasarana produksi, teknologi budidaya, serta akses pasar dan rantai distribusi. Di sisi lain, sektor ini juga menghadapi tantangan berupa perubahan iklim, fluktuasi harga pakan dan hasil produksi, serta tekanan lingkungan.

Populasi ternak di Kabupaten Gresik terdiri dari sapi potong, kambing, domba, itik, ayam ras petelur, ayam buras, ayam ras pedaging, babi, entok. Komoditas ayam ras pedaging merupakan kelompok komoditas yang memberikan kontribusi terbesar terhadap angka populasi ternak di Kabupaten Gresik. Peningkatan populasi ternak terbesar berasal dari sapi potong sejumlah 2.652.918 Kg tahun 2024 menjadi 3.674.334 Kg pada tahun 2025.

Tabel 2.108

Data Produksi Peternakan Tahun 2021-2025

No.	Komoditas	Realisasi				
		2021	2022	2023	2024	2025
a	Produksi Daging/KG	11.134.312	11.468.491	11.868.275	11.997.485	12.308.915
1.	Sapi potong	2.434.826	2.521.392	2.521.392	2.652.918	3.674.334
2.	Kambing	846.860	1.072.341	1.139.075	1.048.124	1.004.182
3.	Domba	121.680	141.492	148.278	139.507	145.725
4.	Itik	107.150	107.050	107.875	174.543	221.685

No.	Komoditas	Realisasi				
		2021	2022	2023	2024	2025
5.	Ayam ras petelur	332.750	332.970	338.250	145.274	87.351
6.	Ayam ras pedaging	5.889.293	5.890.500	6.154.200	6.450.880	6.358.178
7.	Ayam buras	1.301.400	1.300.800	1.359.650	1.325.245	769.905
8.	Babi	1.711	2.979	-	-	-
9.	Entok	98.450	98.775	99.359	60.798	47.555
10.	Puyuh	30	30	32	48	-
11.	Burung Dara	162	162	164	148	-
b	Produksi Susu/KG konversi dari liter	974.390	807.110	645.362,72	541.382	512.650
1	Susu sapi	974.390	807.110	645.362,72	541.382	500.864
2	Kambing Perah	-	-	-	-	11.786
c	Produksi Telur	3.349.487	3.388.314	3.423.288	3.708.762	3.726.176
1.	Telur entok	16.328	38.521	38.598,49	12.242	12.222
2.	Telur burung puyuh	12.497	12.574	12.260,40	36.367	40.065
3.	Telur ayam buras	270.498	418.120	439.416,57	115.502	115.845
4.	Telur ayam ras petelur	2.827.019	2.668.534	2.703.038,91	3.467.027	3.475.343
5.	Telur itik	223.145	250.565	229.973,39	77.624	82.701
Jumlah kumulatif		15.458.189	15.663.915	15.936.925	16.247.629	16.547.741

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Gresik, Tahun 2025

Produksi peternakan di Kabupaten Gresik selama periode 2021–2025 menunjukkan kecenderungan meningkat dengan total produksi kumulatif naik dari sekitar 15,46 juta pada tahun 2021 menjadi 16,55 juta pada

tahun 2025. Komoditas unggas mendominasi struktur produksi, terutama ayam ras pedaging yang meningkat dari sekitar 1,30 juta ekor pada tahun 2021 menjadi 1,38 juta ekor pada tahun 2025, serta ayam ras petelur yang meningkat dari 2,83 juta ekor menjadi 3,48 juta ekor pada periode yang sama, diikuti produksi telur ayam ras yang naik dari sekitar 3,35 juta butir pada tahun 2021 menjadi 3,73 juta butir pada tahun 2025. Pada kelompok ternak besar, produksi daging sapi meningkat dari sekitar 11,13 ribu ton pada tahun 2021 menjadi 12,31 ribu ton pada tahun 2025, meskipun produksi kambing dan domba mengalami fluktuasi. Produksi susu juga menunjukkan tren meningkat dari sekitar 2,83 juta liter pada tahun 2021 menjadi 3,48 juta liter pada tahun 2025. Secara keseluruhan, capaian tersebut menegaskan peran strategis subsektor peternakan dalam mendukung ketahanan pangan, pemenuhan kebutuhan protein hewani, serta stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Gresik.

Berdasarkan data produksi daging ternak dan unggas tahun 2021–2025, secara umum subsektor peternakan Kabupaten Gresik menunjukkan kinerja yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat, terutama didukung oleh komoditas ayam ras pedaging yang mendominasi produksi daging daerah. Produksi ternak dan unggas Kabupaten Gresik menunjukkan tren meningkat, dengan pertumbuhan sekitar 10,6 persen selama tahun 2021–2025. Ayam ras pedaging masih menjadi komoditas dominan, dengan kontribusi lebih dari separuh total produksi peternakan. Sapi potong menunjukkan pertumbuhan paling signifikan, sehingga berpotensi menjadi motor penggerak pengembangan peternakan daerah. Kambing, domba, dan itik mengalami perkembangan positif, yang menunjukkan semakin beragamnya sumber produksi protein hewani. Ayam buras dan ayam ras petelur mengalami penurunan produksi, sehingga perlu mendapat perhatian melalui peningkatan produktivitas dan penguatan usaha peternakan rakyat. Secara umum, pembangunan subsektor peternakan perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas ternak unggulan, penguatan kesehatan hewan, pengembangan bibit berkualitas, peningkatan ketersediaan pakan, serta penguatan rantai pemasaran, sehingga mampu mendukung ketahanan pangan dan

kesejahteraan peternak secara berkelanjutan. Berdasarkan data produksi susu tahun 2021–2025, subsektor peternakan penghasil susu di Kabupaten Gresik menunjukkan tren penurunan produksi yang cukup signifikan. Penurunan tersebut terutama terjadi pada produksi susu sapi perah yang selama ini menjadi sumber utama produksi susu daerah. Produksi susu Kabupaten Gresik selama tahun 2021–2025 menunjukkan tren menurun, dengan penurunan sekitar 47,4 persen. Sapi perah masih menjadi sumber utama produksi susu, namun produksinya terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan produksi susu mengindikasikan perlunya perhatian terhadap aspek populasi ternak, produktivitas, ketersediaan pakan, kesehatan hewan, dan keberlanjutan usaha peternak. Munculnya produksi susu kambing perah pada tahun 2025 merupakan perkembangan positif yang menunjukkan adanya diversifikasi usaha peternakan perah. Secara umum, pengembangan subsektor susu perlu diarahkan pada:

1. Peningkatan populasi dan produktivitas sapi perah.
2. Perbaikan manajemen pakan dan kesehatan ternak.
3. Penguatan kelembagaan peternak dan akses pemasaran.
4. Pengembangan kambing perah sebagai komoditas alternatif.
5. Peningkatan kualitas dan nilai tambah produk susu melalui pengolahan hasil peternakan.

Dengan langkah tersebut, diharapkan produksi susu Kabupaten Gresik dapat kembali meningkat dan berkontribusi lebih besar terhadap pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat serta peningkatan pendapatan peternak.

5) Perdagangan

Urusan pemerintahan pilihan bidang perdagangan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan aktivitas distribusi barang dan jasa, penguatan pasar rakyat, pengembangan perdagangan antar daerah, serta peningkatan perlindungan konsumen. Kinerja urusan perdagangan juga menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, perkembangan sektor perdagangan ditunjukkan melalui kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan usaha perdagangan, peningkatan sarana distribusi perdagangan, serta penguatan pengawasan barang beredar dan jasa. Selain itu, keberadaan pasar rakyat yang representatif dan fungsional turut mendukung kelancaran distribusi kebutuhan pokok masyarakat serta aktivitas ekonomi pelaku usaha mikro dan kecil.

Pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan perdagangan melalui penataan dan pengelolaan sarana perdagangan, peningkatan efektivitas distribusi barang, penguatan promosi perdagangan, serta fasilitasi pengembangan usaha perdagangan dan ekspor daerah. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing perdagangan daerah, memperluas akses pasar, serta menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, urusan perdagangan masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain belum optimalnya sarana dan prasarana perdagangan, terbatasnya kapasitas sumber daya aparatur, serta perlunya peningkatan pengawasan terhadap barang beredar dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendukung pengembangan sektor perdagangan yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan urusan perdagangan dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan. Sasaran kinerja urusan perdagangan “Meningkatnya sistem distribusi usaha perdagangan” dapat digambarkan melalui indikator sebagaimana berikut:

Tabel 2.109

Indikator Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan (USD)

INDIKATOR SASARAN	TAHUN					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan	-13,91	2,4	56,07	-35,4	33,17	33,25

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2026

Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, indikator pertumbuhan nilai neraca perdagangan selama periode tahun 2020–2025 menunjukkan kondisi yang fluktuatif seiring dinamika aktivitas perdagangan dan perekonomian daerah. Pada tahun 2020 pertumbuhan nilai neraca perdagangan mengalami kontraksi sebesar -13,91 persen yang dipengaruhi oleh perlambatan aktivitas ekonomi dan perdagangan. Selanjutnya pada tahun 2021 kondisi perdagangan mulai mengalami pemulihan dengan capaian pertumbuhan sebesar 2,4 persen.

Pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang sangat signifikan dengan pertumbuhan mencapai 56,07 persen. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penguatan aktivitas perdagangan daerah serta meningkatnya distribusi dan nilai transaksi perdagangan. Namun demikian, pada tahun 2023 pertumbuhan kembali mengalami penurunan hingga mencapai -35,4 persen yang mengindikasikan adanya perlambatan kinerja perdagangan akibat dinamika ekonomi dan pasar.

Selanjutnya pada tahun 2024 kondisi perdagangan kembali membaik dengan pertumbuhan positif sebesar 33,17 persen dan pada tahun 2025 diproyeksikan tetap stabil pada angka 33,25 persen. Capaian tersebut menunjukkan adanya optimisme terhadap peningkatan aktivitas perdagangan daerah yang didukung oleh penguatan distribusi barang, stabilitas pasar, serta peningkatan daya dukung sektor perdagangan di Kabupaten Gresik.

Secara umum, perkembangan indikator pertumbuhan nilai neraca perdagangan menunjukkan bahwa sektor perdagangan di Kabupaten Gresik memiliki potensi yang cukup kuat namun masih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro dan dinamika perdagangan regional maupun nasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan perdagangan daerah melalui peningkatan daya saing usaha, pengembangan pasar, penguatan distribusi barang, serta optimalisasi promosi dan perlindungan perdagangan guna menjaga stabilitas pertumbuhan sektor perdagangan secara berkelanjutan.

Tabel 2.110

Laporan Neraca Perdagangan Luar Negeri Kabupaten Gresik Tahun 2020 – 2025

NO.	TAHUN	US$		
		NILAI EKSPOR	NILAI IMPOR	NERACA PERDAGANGAN
1	2020	1.457.587.407,84	25.802.552,75	1.431.784.855,09
2	2021	2.126.543.293,48	660.432.589,16	1.466.110.704,32
3	2022	2.353.590.878,17	65.360.880,62	2.288.229.997,55
4	2023	2.265.127.951,92	787.010.169,33	1.478.117.782,59
5	2024	1.983.269.542,48	14.927.532,66	1.968.342.009,82
6	2025	4.171.441.253,18	1.548.556.005,00	2.622.885.248,18

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, Tahun 2026

Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, perkembangan kinerja perdagangan daerah selama tahun 2020–2025 menunjukkan kondisi yang dinamis dengan tren surplus neraca perdagangan yang relatif tinggi. Nilai ekspor Kabupaten Gresik pada tahun 2020 tercatat sebesar US$1.457.587.407,84 dengan nilai impor sebesar US$25.802.552,75 sehingga menghasilkan neraca perdagangan sebesar US$1.431.784.855,09. Pada tahun 2021 nilai ekspor meningkat menjadi US$2.126.543.293,48 atau tumbuh sekitar 45,9 persen dibanding tahun sebelumnya. Di sisi lain, nilai impor juga meningkat signifikan menjadi US$660.432.589,16 sehingga neraca perdagangan tetap mengalami surplus sebesar US$1.466.110.704,32.

Pada tahun 2022, kinerja perdagangan daerah kembali menunjukkan penguatan dengan nilai ekspor meningkat menjadi US$2.353.590.878,17 atau tumbuh sekitar 10,7 persen dibanding tahun 2021. Sementara itu, nilai impor mengalami penurunan drastis menjadi US$65.360.880,62 atau turun sekitar 90,1 persen. Kondisi tersebut berdampak pada peningkatan surplus neraca perdagangan menjadi US$2.288.229.997,55 atau meningkat sekitar 56,1 persen dibanding tahun sebelumnya.

Selanjutnya pada tahun 2023, nilai ekspor mengalami penurunan menjadi US$2.265.127.951,92 atau turun sekitar 3,8 persen. Namun demikian, nilai impor meningkat cukup tinggi menjadi

US$787.010.169,33 sehingga surplus neraca perdagangan turun menjadi US$1.478.117.782,59 atau mengalami kontraksi sekitar 35,4 persen dibanding tahun 2022. Pada tahun 2024, nilai ekspor kembali menurun menjadi US$1.983.269.542,48 atau turun sekitar 12,4 persen, sedangkan nilai impor menurun sangat signifikan menjadi US$14.927.532,66. Kondisi tersebut mendorong surplus neraca perdagangan kembali meningkat menjadi US$1.968.342.009,82 atau tumbuh sekitar 33,2 persen dibanding tahun sebelumnya.

Pada tahun 2025, kinerja perdagangan diproyeksikan mengalami peningkatan yang cukup kuat. Nilai ekspor diperkirakan meningkat menjadi US$4.171.441.253,18 atau tumbuh sekitar 110,3 persen dibanding tahun 2024. Nilai impor juga diproyeksikan meningkat menjadi US$1.548.556.005,00, sehingga neraca perdagangan tetap mencatat surplus sebesar US$2.622.885.248,18 atau tumbuh sekitar 33,3 persen.

Secara umum, perkembangan perdagangan Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa sektor perdagangan luar negeri masih menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah yang ditandai dengan konsistensi surplus neraca perdagangan selama periode 2020–2025. Kondisi tersebut mencerminkan daya saing produk daerah yang cukup baik, meskipun masih dipengaruhi oleh dinamika perdagangan global, fluktuasi permintaan pasar, serta perubahan aktivitas ekspor dan impor. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan perdagangan melalui peningkatan daya saing produk unggulan daerah, pengembangan pasar ekspor, penguatan sistem distribusi perdagangan, serta optimalisasi fasilitasi perdagangan guna menjaga stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan sektor perdagangan di Kabupaten Gresik. Dalam menunjang Indikator Sasaran tersebut didukung dengan indikator dibawahnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.111

Indikator Urusan Perdagangan Tahun 2020 – 2025

Indikator	Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Prasarana Pasar Kabupaten yang dipelihara	100	100	100	0	0	28
ersentase IHK (Indeks Harga Konsumen)	104.243	106.105	111.334	116.589	105.131	106.658
Pertumbuhan Nilai Impor	-13,83	45,89	10,68	-3,76	-12,44	110,33
Persentase Alat UTTP Bertera Sah	96	92	99	100	99	100

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, Tahun 2026.

6) Perindustrian

Sektor perindustrian merupakan salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik. Sebagai salah satu kawasan industri utama di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik memiliki keunggulan lokasi yang strategis karena berada dalam kawasan metropolitan Gerbangkertosusila, didukung akses transportasi darat dan laut yang memadai, serta kedekatan dengan pusat perdagangan dan jasa di wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Perkembangan sektor industri di Kabupaten Gresik didukung oleh keberadaan berbagai kawasan industri dan sentra industri yang menjadi pusat aktivitas manufaktur, pengolahan, dan distribusi barang. Struktur industri daerah didominasi oleh industri besar dan sedang yang bergerak pada sektor semen, petrokimia, pupuk, pengolahan logam, makanan dan minuman, serta industri pengolahan lainnya. Selain itu, industri kecil dan menengah (IKM) juga berkembang pada berbagai subsektor, seperti makanan olahan, kerajinan, konveksi, produk hasil perikanan, serta industri kreatif berbasis potensi lokal.

Dalam aspek pelayanan umum, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan daya saing sektor industri melalui pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah, peningkatan kualitas sumber daya manusia industri, fasilitasi sertifikasi produk, penguatan penggunaan teknologi tepat guna, serta perluasan akses pemasaran produk industri daerah. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan kemampuan bersaing pelaku industri di tengah dinamika perekonomian global dan nasional.

Sektor perindustrian juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan investasi daerah. Keberadaan industri besar dan menengah menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi, sedangkan industri kecil dan menengah berperan dalam memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Sinergi antara industri besar dengan IKM melalui kemitraan usaha diharapkan mampu menciptakan struktur ekonomi daerah yang lebih kuat dan inklusif.

Secara umum, kondisi sektor perindustrian di Kabupaten Gresik menunjukkan perkembangan yang positif dan menjadi salah satu sektor unggulan daerah. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian, antara lain peningkatan daya saing industri, transformasi teknologi industri, penguatan rantai pasok industri lokal, peningkatan kualitas tenaga kerja industri, serta penerapan industri yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan kebijakan dan pelayanan pada urusan perindustrian perlu terus dilakukan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Tabel 2.112

Indikator Sasaran Perindustrian Tahun 2020-2025

INDIKATOR SASARAN	TAHUN					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pertumbuhan Industri Mikro, Kecil, dan Menengah	0,76	0,79	0,83	0,82	1,14	1,26
Persentase IKM yang Terdata dan Terbina	0,28	0,7	2,03	3,18	2,7	2,9
Persentase IKM yang Mendapat Fasilitasi	1,29	1,61	2,24	1,85	0,77	0,29
Persentase IKM ber KBLI Kategori Industri yang telah Verifikasi Teknis melalui SIINas	0,04	0,18	0,26	0,56	0,72	1,07

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, Tahun 2025.

Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2020–2025, kinerja urusan pemerintahan bidang perindustrian menunjukkan tren yang relatif positif, terutama pada aspek pertumbuhan industri dan peningkatan legalitas pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Pada indikator Pertumbuhan Industri Mikro, Kecil, dan Menengah (IMKM), capaian meningkat dari 0,76% pada tahun 2020 menjadi 1,26% pada tahun 2025. Secara kumulatif terjadi peningkatan sebesar 65,79% dibandingkan tahun 2020. Meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 menjadi 0,82%, pertumbuhan kembali meningkat menjadi 1,14% pada tahun 2024 dan 1,26% pada tahun 2025, yang menunjukkan semakin berkembangnya aktivitas industri skala mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Gresik.

Indikator persentase IKM yang terdata dan terbina juga menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Capaian meningkat dari 0,28% pada tahun 2020 menjadi 2,90% pada tahun 2025 atau mengalami kenaikan sekitar 935,71% selama periode tersebut. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan capaian 3,18%,

kemudian sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi 2,70%, namun kembali meningkat pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan semakin luasnya jangkauan pendataan dan pembinaan terhadap pelaku IKM.

Sementara itu, indikator persentase IKM yang mendapatkan fasilitasi menunjukkan tren yang fluktuatif. Capaian meningkat dari 1,29% pada tahun 2020 hingga mencapai puncaknya sebesar 2,24% pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 1,85% pada tahun 2023, 0,77% pada tahun 2024, dan 0,29% pada tahun 2025. Dibandingkan tahun 2020, capaian tahun 2025 mengalami penurunan sekitar 77,52%. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya perubahan kebijakan, prioritas program, maupun keterbatasan kapasitas fasilitasi yang diberikan kepada pelaku IKM.

Adapun indikator persentase IKM berkategori industri yang telah terverifikasi teknis melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) menunjukkan peningkatan yang sangat baik. Capaian meningkat dari 0,04% pada tahun 2020 menjadi 1,07% pada tahun 2025, atau tumbuh sekitar 2.575%. Peningkatan terjadi secara konsisten setiap tahun, yaitu 0,18% pada tahun 2021, 0,26% pada tahun 2022, 0,56% pada tahun 2023, dan 0,72% pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan semakin meningkatnya kepatuhan dan validitas data industri melalui sistem informasi nasional sebagai bagian dari penguatan tata kelola sektor industri.

Secara umum, kinerja urusan perindustrian Kabupaten Gresik selama periode 2020–2025 menunjukkan perkembangan yang positif, ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan IMKM, semakin banyaknya IKM yang terdata dan terbina, serta meningkatnya jumlah IKM yang telah terverifikasi melalui SIINas. Namun demikian, penurunan pada indikator IKM yang memperoleh fasilitasi perlu menjadi perhatian dalam rangka menjaga keberlanjutan pengembangan dan daya saing pelaku industri kecil dan menengah di Kabupaten Gresik. Berikut merupakan rekapitulasi data jumlah IMKM beserta pembinaan yang pernah dilakukan dari tahun 2020 sampai dengan 2025 :

Tabel 2.113

Rekapitulasi Data Jumlah IMKM Beserta Pembinaan yang Pernah Dilakukan dari Tahun 2020-2025

NO	TAHUN	JUMLAH IKM	PEMBINAAN	MEREK	HALAL	KETERANGAN
1	2020	7331	20	75	15	
2	2021	7389	50	72	40	
3	2022	7450	145	105	50	
4	2023	7511	225	20	106	
5	2024	7597	187	33	19	
6	2025	7693	198	20	0	Tahun 2025 untuk sertifikasi merk langsung melalui Kemenag/KUA Kecamatan

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, Tahun 2025.

Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2020–2025, jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) menunjukkan tren peningkatan yang relatif stabil. Jumlah IKM meningkat dari 7.331 unit pada tahun 2020 menjadi 7.693 unit pada tahun 2025 atau bertambah 362 unit (4,94 persen) selama periode tersebut. Pertumbuhan tahunan masing-masing sebesar 0,79 persen pada tahun 2021, 0,83 persen pada tahun 2022, 0,82 persen pada tahun 2023, 1,15 persen pada tahun 2024, dan 1,26 persen pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor industri kecil dan menengah di Kabupaten Gresik masih berkembang dan memiliki daya tahan yang cukup baik dalam mendukung perekonomian daerah.

Dari aspek pembinaan IKM, jumlah pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi pembinaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2020 pembinaan diberikan kepada 20 IKM atau sekitar 0,27 persen dari total IKM. Cakupan tersebut meningkat menjadi 50 IKM (0,68 persen) pada tahun 2021, 145 IKM (1,95 persen) pada tahun 2022, dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebanyak 225 IKM atau 3,00 persen dari total IKM. Selanjutnya pada tahun 2024 jumlah IKM yang dibina sebanyak 187 unit (2,46 persen) dan meningkat kembali menjadi 198 unit (2,57 persen) pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dan daya

saing pelaku IKM melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan usaha.

Pada aspek perlindungan dan legalitas usaha melalui fasilitasi pendaftaran merek, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan 105 merek yang difasilitasi atau setara 1,41 persen dari total IKM. Pada tahun 2020 terdapat 75 merek (1,02 persen), tahun 2021 sebanyak 72 merek (0,97 persen), tahun 2023 sebanyak 20 merek (0,27 persen), tahun 2024 sebanyak 33 merek (0,43 persen), dan tahun 2025 sebanyak 20 merek (0,26 persen). Menurunnya jumlah fasilitasi merek pada periode akhir disebabkan semakin meningkatnya akses pelaku usaha untuk mengurus pendaftaran merek secara mandiri melalui mekanisme yang tersedia di tingkat pusat.

Sementara itu, fasilitasi sertifikasi halal menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2020 sebanyak 15 IKM memperoleh sertifikasi halal atau sekitar 0,20 persen dari total IKM. Jumlah tersebut meningkat menjadi 40 IKM (0,54 persen) pada tahun 2021, 50 IKM (0,67 persen) pada tahun 2022, dan mencapai capaian tertinggi pada tahun 2023 sebanyak 106 IKM atau 1,41 persen dari total IKM. Namun demikian, pada tahun 2024 jumlah fasilitasi sertifikasi halal menurun menjadi 19 IKM (0,25 persen), dan pada tahun 2025 tidak terdapat fasilitasi sertifikasi halal dari perangkat daerah karena proses sertifikasi halal telah dilaksanakan secara langsung melalui Kementerian Agama/KUA Kecamatan.

Secara umum, kinerja urusan perindustrian di Kabupaten Gresik menunjukkan perkembangan yang positif, ditandai dengan meningkatnya jumlah IKM dan konsistensi pelaksanaan program pembinaan. Di sisi lain, fasilitasi legalitas usaha berupa merek dan sertifikasi halal masih perlu terus diperkuat melalui sinergi dengan pemerintah pusat, lembaga sertifikasi, serta pemangku kepentingan terkait guna meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk IKM Kabupaten Gresik.

d. Urusan Penunjang Pemerintahan

1) Perencanaan

Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif. Indeks ini mencerminkan sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi, partisipatif, dan berbasis kinerja, mulai dari tahap perumusan dokumen hingga keterkaitannya dengan penganggaran dan pelaksanaan pembangunan. IPPD memiliki keterkaitan erat dengan kualitas dokumen perencanaan daerah, khususnya konsistensi antara RPJMD, RKPD, Renja Perangkat Daerah, serta dokumen penganggaran. Perencanaan yang selaras antar dokumen menunjukkan adanya kesinambungan kebijakan dan arah pembangunan daerah, yang menjadi prasyarat utama dalam mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan berkelanjutan. Ketidakselarasan antar dokumen perencanaan berpotensi menurunkan kualitas implementasi kebijakan dan efektivitas penggunaan sumber daya daerah.

Selain itu, IPPD juga berkaitan dengan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam perencanaan pembangunan. Penguatan perencanaan berbasis data, pemanfaatan sistem informasi perencanaan, serta pelaksanaan forum koordinasi dan partisipasi pemangku kepentingan menjadi faktor penting yang memengaruhi kualitas perencanaan dan berkontribusi terhadap pembentukan nilai IPPD. Capaian IPPD Tahun 2025 ditopang melalui tiga aspek yaitu sinergi, kualitas perencanaan, serta keterhubunngan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja. Secara substantif, capaian tersebut mengindikasikan bahwa keterkaitan antara dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan, khususnya RPJMD, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah, telah terbangun dengan lebih konsisten. Hal ini mencerminkan adanya kejelasan arah kebijakan,

tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang diterjemahkan secara sistematis ke dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah

Tabel 2.114

Indikator Urusan Perencanaan Kabupaten Gresik

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	-	-	-	-	80,76

Sumber: Bappeda Kabupaten Gresik

2) Keuangan

Penyelenggaraan urusan Keuangan di Kabupaten Gresik terdiri dari 3 sasaran dan 4 indikator sasaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.115

Capaian Indikator Sasaran Keuangan Kabupaten Gresik Tahun 2024-2025

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	REALISASI					TARGET	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Meningkatnya Pemanfaatan Aset	Persentase Realisasi Pendapatan Pemanfaatan Aset Daerah (%)	-	-	-	70	112,13	70	70
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,71	0,72	0,70	0,81	0.84	0,70	0,70
	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (%)	-	-	-	85	94,08	85	85
Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber : LKPJ 2025 dan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang menggambarkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi menjadi penerimaan pajak daerah. Pada tahun 2024 ini tercatat sebesar 0,70%, kemudian

meningkat menjadi 0,84% pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak daerah berlangsung lebih cepat dibandingkan pertumbuhan aktivitas ekonomi daerah yang tercermin dalam PDRB. Hal tersebut mengindikasikan adanya peningkatan efektivitas pemungutan pajak daerah, perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, maupun optimalisasi pelayanan perpajakan daerah. Sebagai salah satu daerah industri utama di Jawa Timur, aktivitas ekonomi Kabupaten Gresik yang terus berkembang memberikan peluang yang besar bagi peningkatan penerimaan pajak daerah.

Capaian tersebut juga mencerminkan semakin kuatnya kapasitas fiskal daerah dalam memanfaatkan potensi ekonomi yang tersedia. Namun demikian, nilai yang masih berada di bawah 1 persen menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang cukup besar untuk meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan berupa digitalisasi layanan perpajakan, pemutakhiran basis data objek dan subjek pajak, penguatan pengawasan, serta sinergi dengan sektor usaha agar potensi penerimaan pajak dapat tergali secara lebih optimal tanpa menghambat iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator yang mengukur kemampuan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam merealisasikan target PAD yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024 realisasi PAD tercatat sebesar 85%, kemudian meningkat menjadi 94,08% pada tahun 2025. Peningkatan realisasi PAD menunjukkan adanya perbaikan kinerja pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun lain-lain PAD yang sah. Tingginya capaian ini mengindikasikan bahwa strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan yang dilaksanakan pemerintah daerah mampu meningkatkan efektivitas pencapaian target pendapatan.

Indikator Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah merupakan ukuran utama dalam menilai tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Gresik memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan berhasil mempertahankan opini yang sama pada tahun 2025, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan mempertahankan opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Capaian ini mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang baik, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga pengendalian internal. Selain itu, opini WTP juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada tahun-tahun sebelumnya sehingga kualitas tata kelola keuangan terus mengalami perbaikan. Dari sisi tata kelola pemerintahan, keberhasilan mempertahankan opini WTP memberikan dampak positif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat, pemerintah pusat, maupun pemangku kepentingan lainnya terhadap pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, opini WTP tidak hanya harus dipandang sebagai capaian administratif semata, melainkan harus diiringi dengan peningkatan kualitas belanja daerah yang mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, selain mempertahankan kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi, Pemerintah Kabupaten Gresik perlu terus memperkuat efektivitas penggunaan anggaran, memperbaiki sistem pengendalian internal, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah agar kualitas tata kelola pemerintahan dapat terus terjaga secara berkelanjutan.

Capaian kinerja keuangan daerah secara garis besar dapat diukur dari kemandirian fiskal. Kemandirian fiskal merupakan indikator dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dengan mengandalkan sumber pendapatan daerah

tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi. Kemandirian fiskal dapat menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah seperti pajak dan retribusi daerah dari masyarakat serta pendapatan daerah lainnya. Tingginya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat.

Tabel 2.116
Kemandirian Fiskal Kabupaten Gresik

Uraian	Kemandirian Fiskal Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025				
	2021	2022	2023	2024	2025
Pendapatan Asli Daerah	1.031.387.734.236,41	1.191.799.202.154,29	1.171.022.355.999,09	1.385.028.684.600,76	1.475.313.412.879,28
Pendapatan Transfer	1.995.151.051.675,00	2.154.340.660.571,00	2.241.478.601.966,00	2.345.205.328.325,00	2.333.406.670.464,00
Kemandirian Fiskal	51,69	55,32	52,24	59,06	63,23

Sumber: BPPKAD Kabupaten Gresik (Audited), 2026.

Kinerja kemandirian fiskal Kabupaten Gresik menunjukkan kecenderungan yang terus membaik dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2025 kemandirian fiskal Kabupaten Gresik meningkat menjadi 63,23 persen hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan di Kabupaten Gresik dalam kategori sedang dengan pola hubungan partisipatif, dimana Kabupaten Gresik dianggap semakin mampu menjalankan otonomi daerahnya. Hal ini tercermin dari meningkatnya kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Sebagai salah satu pusat industri dan perdagangan utama di Jawa Timur, Kabupaten Gresik memiliki basis ekonomi yang relatif kuat sehingga memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Meskipun demikian, struktur pendapatan daerah masih menunjukkan adanya ketergantungan yang cukup signifikan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah secara nominal terus mengalami peningkatan, namun pendapatan transfer masih menjadi komponen dominan dalam

struktur APBD. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kemandirian fiskal Kabupaten Gresik berada pada kategori sedang hingga tinggi dengan pola hubungan partisipatif menuju delegatif. Di sisi lain, tingkat ketergantungan terhadap dana transfer masih perlu menjadi perhatian. Meskipun porsi PAD meningkat, dana transfer pemerintah pusat tetap memegang peranan penting dalam mendukung pembiayaan program pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, penguatan kemandirian fiskal perlu terus dilakukan melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah, peningkatan efektivitas retribusi daerah, penguatan tata kelola aset daerah, pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pemanfaatan potensi ekonomi lokal yang berasal dari sektor industri, perdagangan, jasa, logistik, dan kawasan ekonomi strategis yang berkembang di Kabupaten Gresik.

3) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Penyelenggaranan Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pada Tahun 2025 dengan Sasaran ”Meningkatnya Keterwakilan Perempuan dalam Pemerintahan” dan ”Meningkatkan profesionalitas aparatur sipil negara” dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 2.117
Capaian Sasaran Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021-2025

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Perempuan dalam Jabatan Pemerintah Daerah)	-	-	-	30,57	34
2	Indeks Profesionalitas ASN	49,62	53,08	89,71	88,87	89,75

Sumber : BKPSDM Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Perempuan dalam Jabatan Pemerintah Daerah merupakan indikator baru yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun

2025-2029. Realisasi indikator persentase Perempuan dalam Jabatan Pemerintah Daerah di Kabupaten Gresik menunjukkan tren perkembangan yang positif dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2024, keterwakilan perempuan pada pos jabatan struktural tercatat sebesar 30,57%, dan angka ini berhasil mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2025 menjadi sebesar 34%, berhasil melampaui ambang batas minimal afirmasi keterwakilan Perempuan sebesar 30%. Peningkatan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mewujudkan kesetaraan gender serta memberikan kesempatan yang lebih luas bagi aparatur sipil negara perempuan untuk menduduki posisi strategis dan mengambil peran dalam pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan daerah.

Perkembangan angka ini juga mengindikasikan bahwa sistem mutasi, promosi, dan manajemen karier ASN di daerah telah berjalan secara adil dan berbasis kompetensi (*merit system*), tanpa adanya pembatasan gender dalam proses pengambilan keputusan.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Pengukuran indeks diatur dalam Permenpan-RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran dilakukan berdasarkan data yang bersumber dari Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), hasil Pendataan Ulang PNS (e-PUPNS), Penilaian Prestasi Kerja PNS, dan data mengenai hukuman disiplin PNS. Indeks profesionalitas ASN Nasional dihitung rata-rata dari hasil pengukuran seluruh ASN. Selanjutnya hasil pengukuran diklasifikasi dengan kategori mulai sangat tinggi sampai dengan sangat rendah.

Capaian Indeks Profesionalitas ASN tahun 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan dan progresif, dari 49,62 pada tahun 2021 menjadi 53,08 pada tahun 2022 yang mencerminkan perbaikan awal, kemudian melonjak tajam menjadi 89,71 pada tahun 2023 sebagai titik balik peningkatan profesionalitas.

Hal ini didorong oleh penguatan tata kelola manajemen ASN dan optimalisasi sistem penilaian berbasis digital yang terintegrasi dengan sistem nasional seperti Badan Kepegawaian Negara.

Pada tahun 2024 nilai sedikit menurun menjadi 88,87 namun tetap berada pada kategori sangat tinggi. Penurunan capaian Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Kabupaten Gresik dari 89,71 pada tahun 2023 menjadi 88,87 pada tahun 2024 dipengaruhi oleh adanya penyesuaian instrumen pengukuran IP ASN sebagaimana diatur dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024. Pada tahun 2024, pengukuran dimensi kompetensi tidak lagi semata-mata didasarkan pada riwayat pengembangan kompetensi, tetapi menggunakan bobot dasar yang merupakan hasil konversi dari nilai penilaian kinerja dan pemenuhan pengembangan kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran (JP). Perubahan metode pengukuran tersebut menyebabkan sebagian ASN belum memenuhi kriteria baru, khususnya terkait pemenuhan pengembangan kompetensi dan konversi nilai kinerja, sehingga berdampak pada penurunan capaian IP ASN.

Indeks Profesionalitas ASN kembali meningkat menjadi 89,75 pada tahun 2025, sehingga secara keseluruhan terjadi kenaikan sebesar 40,13 poin dalam lima tahun yang menunjukkan keberhasilan transformasi manajemen ASN serta konsistensi dalam menjaga kualitas profesionalitas aparatur.

4) Penelitian dan Pengembangan

Penyelenggaraan Urusan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ditunjang melalui Indikator Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah merupakan salah satu instrumen strategis dalam mengukur tingkat pemanfaatan hasil penelitian, kajian akademik, analisis data, serta rekomendasi ilmiah dalam proses penyusunan kebijakan dan penyelesaian berbagai permasalahan pembangunan daerah. Indikator ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah

dalam menerapkan pendekatan *evidence-based policy* sebagai landasan utama pengambilan keputusan, sehingga setiap kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga didukung oleh data yang valid, metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta analisis yang komprehensif terhadap kondisi dan kebutuhan daerah. Target capaian sebesar 100% pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan adanya arah kebijakan yang menekankan bahwa seluruh proses penyelesaian permasalahan daerah diharapkan telah menggunakan hasil kajian dan penelitian sebagai dasar pertimbangan utama, baik dalam perencanaan program, penentuan prioritas pembangunan, maupun evaluasi kebijakan daerah.

Kondisi tersebut selaras dengan arah kebijakan dalam Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID) yang menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan berbasis data untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Melalui pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang terintegrasi dengan kebutuhan pembangunan, pemerintah daerah dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang mampu menjawab isu prioritas daerah secara lebih tepat sasaran, efektif, dan terukur.

Selain itu, pencapaian indikator ini juga mendukung implementasi Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID) dalam aspek peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong sinkronisasi antara hasil kajian akademik, kebutuhan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah. Dengan demikian, keberadaan kajian berbasis bukti tidak hanya menjadi instrumen penyelesaian masalah daerah, tetapi juga menjadi fondasi dalam menciptakan kebijakan pembangunan yang inovatif, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.118

Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	-	-	100	100	100

Sumber: Badan Perencanaam Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2025

5) Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada tahun 2024, urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Gresik diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik. Capaian urusan Kesatuan Bangsa Politik sebagaimana berikut :

Tabel 2.119
Capaian Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politk Tahun 2021-2025

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Kesadaran Berbangsa	-	-	-	72,89	79,4
2	Indeks Kemandirian Partisipatif	-	-	-	3,96	4

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Indeks Kesadaran Berbangsa dan Indeks Kemandirian Partisipatif merupakan indikator baru yang digunakan mengacu pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

Indeks Kesadaran Berbangsa adalah ukuran atau instrumen penilaian yang digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman, sikap, dan perilaku individu maupun kelompok masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Indeks ini umumnya mengukur sejauh mana masyarakat memiliki komitmen terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Melalui pengukuran tersebut, pemerintah dapat menilai tingkat nasionalisme, rasa persatuan, toleransi, kepatuhan terhadap hukum, serta partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil indeks ini menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembinaan

wawasan kebangsaan dan penguatan karakter kebangsaan di berbagai sektor.

Capaian Indeks Kesadaran Berbangsa Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebesar 79,4 menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan telah berada pada kategori baik. Upaya pembinaan wawasan kebangsaan, penguatan persatuan, serta penanaman nilai Pancasila dan nasionalisme telah berjalan cukup efektif, namun tetap memerlukan penguatan dan optimalisasi program agar target yang direncanakan dapat tercapai secara maksimal pada periode berikutnya.

Badan Narkotika Nasional melalui Direktorat Peran Serta Masyarakat Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan pengukuran Indeks Kemandirian Partisipiasi (IKP) Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh seluruh BNNP dan BNNK kepada Penggiat P4GN. Indeks Kemandirian Partisipatif (IKP) adalah instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika). Indeks ini menggambarkan sejauh mana masyarakat, instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, swasta, dan komunitas memiliki kesadaran, inisiatif, serta kemampuan untuk melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba secara mandiri dan berkelanjutan.

Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) Kabupaten Gresik Tahun 2025 mencapai nilai 4,00 dengan kategori Sangat Mandiri. Pengukuran IKP umumnya mencakup aspek kebijakan, kelembagaan, kegiatan pencegahan, partisipasi aktif, serta keberlanjutan program. Hasil indeks ini menjadi dasar bagi BNN dalam menentukan tingkat kemandirian suatu wilayah atau institusi serta merumuskan strategi penguatan peran serta masyarakat dalam mendukung Indonesia Bersinar (Bersih Narkoba).

6) Pengawasan

Fungsi pengawasan pada Pemerintah Daerah diampu oleh Inspektorat Kabupaten Gresik memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, akuntabel, transparan, dan berintegritas. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2026, fungsi pengawasan diarahkan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan perangkat daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tepat sasaran, efisien, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pengawasan tidak hanya dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dan evaluasi, tetapi juga melalui pendampingan, pembinaan, serta mitigasi risiko guna mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas tata kelola pemerintahan berbasis digital dan tuntutan reformasi birokrasi, pengawasan internal pemerintah daerah dituntut semakin adaptif, profesional, dan berbasis risiko. Oleh karena itu, Inspektorat Kabupaten Gresik terus memperkuat pengawasan preventif melalui optimalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta penguatan sinergi pengawasan dengan perangkat daerah lainnya. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya budaya kerja yang patuh, responsif, dan berorientasi pada hasil pembangunan.

Tabel 2.120
Capaian Indikator Urusan Pengawasan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

INDIKATOR	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal (%)	78,3	80,98	90,02	90,66	90,26
Rata-rata kategori hasil Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	82,75	72,47	85,8	86,37	86,88

INDIKATOR	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai maturitas SPIP (Nilai)	3	3	3	3,343	3,343
Nilai kapabilitas APIP (Nilai)	3	3	3	3	3,085

Sumber : Inspektorat Kabupaten Gresik, 2026

Pada indikator Rata-rata kategori nilai evaluasi SAKIP OPD Tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan evaluasi pada saat itu terdapat 2 OPD (kecamatan) yang tidak memenuhi dokumen sama sekali dan terdapat beberapa OPD yg kurang lengkap dokumennya sehingga nilai nya langsung turun signifikan. Selanjutnya pada indikator Nilai maturitas SPIP dan Nilai Kapabilitas APIP pada tahun 2021-2023 memiliki capaian yang stagnan nilai 3 dikarenakan pada tahun berkenaan nilai yang dimaksud masih satuan level. Satuan level (tingkat) digunakan dalam penilaian hampir di semua instansi Inspektorat seluruh Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, BPKP sebagai lembaga pembina dan penilai untuk 2 (dua) tahun terakhir menganalisa jika satuan level kurang tepat untuk menggambarkan progres capaian kinerja. Maka untuk penilaian Tahun 2024-2025 sesuai arahan dari BPKP nilai yang muncul memiliki satuan nilai tidak lagi level. Sebagai catatan bahwa pada indikator Nilai maturitas SPIP pada Tahun 2022 memiliki nilai skor sebesar 3,175 (termasuk dalam level 3), dan pada Tahun 2023 menurun sedikit dengan nilai 3,146 (tetap dalam level 3). Jadi nilai yang ditampilkan dalam tabel 2.107 tetap stagnan di level 3 agar lebih jelas untuk mengukur tingkat kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik

Selain itu, pengawasan juga diarahkan untuk mendukung tercapainya target pembangunan daerah melalui pengawalan terhadap pelaksanaan program prioritas, pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dengan pengawasan yang efektif, diharapkan potensi penyimpangan dapat diminimalkan, kualitas pelaksanaan program meningkat, dan

kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin kuat.

7) Kesekretariatan DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian;
b. Pengelolaan administrasi keuangan;
c. Fasilitasi kegiatan persidangan dan rapat-rapat DPRD;
d. Penyusunan risalah, dokumentasi, dan publikasi kegiatan DPRD;
e. Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah;
f. Fasilitasi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD

Tabel 2.121

Indikator Urusan Sekretariat DPRD Tahun 2021-2025

No	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	2021	2022	2023	2024	2025	SUMBER DATA
1	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan dan Keuangan (%)	(Jumlah Pelayanan Administrasi Kesekretariatan dan Keuangan yang diselenggarakan / Jumlah Pelayanan Administrasi Kesekretariatan dan Keuangan sesuai Renja) x 100%	-	-	-	100	100	Laporan Monitoring dan Evaluasi Sekretariat DPRD
2	Persentase Dukungan Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Fungsi DPRD (%)	(Jumlah Fasilitasi Kegiatan DPRD sesuai Fungsinya yang dipenuhi/Jumlah Kegiatan DPRD sesuai Fungsinya Berdasarkan Renja DPRD) x 100%	-	-	-	100	100	Laporan Monitoring dan Evaluasi Sekretariat DPRD

No	INDIKATOR SASARAN	Formulasi	2021	2022	2023	2024	2025	SUMBER DATA
3	Persentase Dukungan Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Tugas DPRD (%)	(Jumlah Fasilitasi Kegiatan DPRD sesuai Tugasnya yang dipenuhi/Jumlah Kegiatan DPRD sesuai Tugasnya Berdasarkan Renja DPRD) x 100%	-	-	-	100	100	Laporan Monitoring dan Evaluasi Sekretariat DPRD
4	Nilai Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Nilai)	Nilai Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (DPRD)	-	-	-	96,25	99	Laporan Hasil Survey Semester I Bulan Agustus Semester II Bulan Desember

Sumber: Sekretariat DPRD, Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPRD telah menetapkan sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas pelayanan terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Capaian kinerja diukur melalui beberapa indikator utama sebagai berikut:

1. Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan dan Keuangan

   Indikator ini diukur melalui perbandingan jumlah pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan yang diselenggarakan dengan jumlah pelayanan administrasi yang direncanakan, dikalikan 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh pelayanan administrasi dan keuangan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Pelayanan meliputi pengelolaan surat-menyurat, kepegawaian, penatausahaan keuangan, serta dukungan administratif lainnya yang menunjang kelancaran tugas DPRD.

2. Persentase Dukungan Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Fungsi DPRD

   Indikator ini dihitung dari jumlah fasilitasi kegiatan DPRD sesuai fungsi (legislasi, anggaran, dan pengawasan) dibandingkan

dengan jumlah kegiatan yang direncanakan dalam Renja DPRD. Realisasi 100% menunjukkan bahwa seluruh agenda kegiatan DPRD yang meliputi rapat paripurna, rapat alat kelengkapan, pembahasan rancangan peraturan daerah, pembahasan anggaran, serta kegiatan pengawasan telah difasilitasi secara optimal.

3. Persentase Dukungan Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Tugas DPRD

Pengukuran indikator ini didasarkan pada jumlah kegiatan DPRD sesuai tugas yang dipenuhi dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang direncanakan dalam Renja DPRD. Capaian tersebut menggambarkan konsistensi Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan teknis dan administratif terhadap seluruh tugas DPRD secara tepat waktu, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Nilai Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD

Indikator ini diperoleh dari hasil survei Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD. Hasil survei menunjukkan adanya peningkatan tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap kualitas pelayanan Sekretariat DPRD. Realisasi tahun 2024 telah melampaui target sebesar 96,25%, dan pada tahun 2025 kembali meningkat menjadi 99%. Hal ini mencerminkan perbaikan berkelanjutan dalam aspek ketepatan waktu pelayanan, kualitas administrasi, responsivitas, serta profesionalisme aparatur.

Secara umum, seluruh indikator kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2024 dan 2025 telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Capaian 100% pada indikator pelayanan administrasi serta dukungan fasilitasi menunjukkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program kerja. Peningkatan signifikan pada Indeks Kepuasan Anggota DPRD menjadi 99% pada Tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan pemangku kepentingan. Keberhasilan ini didukung oleh:

a. Peningkatan koordinasi internal;
b. Optimalisasi sistem administrasi dan pelaporan;
c. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
d. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap kinerja pelayanan

8) Kesekretariatan Daerah

Penyelenggaraan urusan kesekretariatan daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang memiliki tugas membantu bupati/wali kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Guna menjalankan tugas tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik memiliki fungsi:

1. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Pada tataran program, Sekretariat Daerah melaksanakan 3 program dengan 31 indikator kinerja program dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 2.122

Capaian Indikator Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

SASARAN	INDIKATOR	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP â‰¥ 80 (Persentase)	77	79	89	86,96	0,96
Meningkatnya kualitas kelembagaan dalam mendukung meritokrasi	Hasil Evaluasi Kelembagaan (Angka)	-	-	-	96,8	96,7

SASARAN	INDIKATOR	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya mutu pelayanan publik	Hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik (Angka)	-	-	-	95,88	91,59
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD (Nilai)	3,3121	3,3121	3,07	3,07	3,4093
Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan daerah	Indeks Kualitas Kebijakan (Indeks (Skala 0-100))	-	-	-	84,45	82,85
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah (Indeks (Skala 0-100))	-	-	-	88,19	89,85
Meningkatnya tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks (Skala 0-100))	-	-	-	76,93	85,66
Meningkatnya kinerja pengendalian inflasi daerah	Angka Inflasi (Angka)	-	-	-	1,85	2,44
Terpenuhinya HAK masyarakat	Nilai Peduli HAM (Nilai)	-	-	-	90,95	90,95

SASARAN	INDIKATOR	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
atas bantuan hukum						
Meningkatnya akses keuangan daerah yang inklusif, merata dan berkelanjutan	Indeks Akses Keuangan Daerah	-	-	-	-	4,58

Sumber: Sekretariat Daerah Kab. Gresik, Tahun 2025

Capaian indikator sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021–2025 secara umum menunjukkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang berjalan selaras dengan arah kebijakan dan perencanaan yang telah ditetapkan. Khususnya pada tahun 2024-2025, indikator strategis yang mencakup aspek akuntabilitas kinerja, kualitas kelembagaan, mutu pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, pengendalian inflasi, serta pemenuhan hak masyarakat mencerminkan upaya berkelanjutan dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penguatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dilaksanakan melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang terintegrasi. Di sisi lain, pembinaan kelembagaan dan penyempurnaan tata laksana organisasi terus dilakukan untuk mendukung penerapan sistem merit dan optimalisasi kinerja internal.

Dalam bidang pelayanan publik, berbagai langkah perbaikan prosedur, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan pengawasan terus diupayakan guna menjaga kualitas layanan dan mencegah terjadinya maladministrasi. Peningkatan kepuasan masyarakat menjadi salah satu indikator bahwa upaya perbaikan pelayanan berjalan secara konsisten. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tata kelola pengadaan barang dan jasa juga menunjukkan penguatan melalui koordinasi lintas perangkat daerah serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sementara itu,

pengendalian inflasi daerah dilaksanakan melalui sinergi kebijakan dan monitoring yang berkesinambungan untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Komitmen terhadap pemenuhan hak masyarakat atas bantuan hukum serta peningkatan akses keuangan yang inklusif tetap menjadi bagian dari prioritas, sebagai bentuk dukungan terhadap perlindungan hak masyarakat dan penguatan ekonomi daerah. Secara keseluruhan, capaian indikator sasaran pada periode ini menunjukkan kinerja yang relatif stabil dengan kecenderungan peningkatan pada beberapa aspek, meskipun tetap diperlukan evaluasi dan penguatan berkelanjutan guna memastikan tercapainya sasaran strategis secara optimal.

9) Kewilayahan

Penyelenggaraan urusan Kewilayahan dilaksanakan oleh 18 Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Capaian urusan Kecamatan diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan sesuai dengan Permen PAN No. 14 Tahun 2017 dan Pendanaan program prioritas daerah ditigkat desa/kelurahan:

Tabel 2.123

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatandi Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

NO	INDIKATOR	NILAI IKM				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Gresik	85,19	85,28	89,08	90,50	92,34
2	Kebomas	91,30	82,63	82,63	87,84	93,52
3	Manyar	90,19	88,68	89,72	92,23	93,08
4	Cerme	90,83	82,32	87,67	88,88	91,78
5	Benjeng	79,53	84,41	96,25	88,98	98,10
6	Balongpanggang	98,00	99,00	97,00	89,73	98,73
7	Duduksampeyan	89,01	89,01	97,24	92,92	96,50
8	Driyorejo	95,36	88,40	90,70	93,25	97,31

NO	INDIKATOR	NILAI IKM				
		2021	2022	2023	2024	2025
9	Wringinanom	97,36	92,00	92,00	99,99	94,25
10	Kedamean	91.53	82.18	85.90	98,87	93,54
11	Menganti	86,49	83,31	93,56	92,92	94,10
12	Sidayu	98,90	84,83	98,77	98,02	98,51
13	Ujungpangkah	97,67	96,55	96,40	96,50	93,72
14	Panceng	98,66	84,74	88,11	95,95	92,43
15	Bungah	98,00	87,55	88,86	93,04	90,19
16	Dukun	92,64	92,64	92,20	86,77	95,00
17	Sangkapura	92,00	82,71	100	92,67	96,50
18	Tambak	90,00	88.24	100	95,29	97,63

Sumber : Bagian Ortala Setda Kabupaten Gresik, 2025

Tabel 2.124

Capaian Sasaran Kecamatan Pendanaan program prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan Tahun 2021-2025

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	-	-	-	1:1	1:1
2	Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan	-	-	-	1:1	1:1
3	Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	-	-	-	1:1	1:1
4	Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan	-	-	-	1:1	1:1
5	Belanja Infrastruktur Desa	-	-	-	1:1	1:1
6	Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa	-	-	-	1:1	1:1

Sumber : Laporan Monitoring Evaluasi Program Prioritas daerah pada desa/kelurahan

Pendanaan program prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan merupakan indikator baru yang digunakan mengacu pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

Tercapainya 1:1 ini mencerminkan keberhasilan sinkronisasi pendanaan antara program prioritas pemerintah daerah dengan realisasi anggaran di tingkat desa/kelurahan untuk mendukung pembangunan yang merata dan terintegrasi. Capaian indikator pendanaan program prioritas daerah di tingkat desa/kelurahan pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan hasil optimal dengan keberhasilan mencapai target ideal 1:1 secara menyeluruh pada seluruh bidang prioritas, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga infrastruktur dan penanggulangan bencana. Angka ini merefleksikan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah dengan realisasi anggaran di tingkat desa, sehingga memastikan program-program strategis kabupaten terakomodasi secara proporsional dalam APBDes. Konsistensi capaian ini menjadi bukti nyata adanya sinkronisasi kebijakan yang efektif dan penguatan tata kelola keuangan desa dalam mendukung pemerataan standar pelayanan publik serta ketahanan wilayah bagi seluruh masyarakat di tingkat perdesaan maupun kelurahan.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

- Daya Saing Sumber Daya Manusia

a. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi merupakan indikator yang menunjukkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi, meliputi Diploma I–IV, Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3). Indikator ini digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia, tingkat akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi, serta kapasitas daerah dalam mendukung pembangunan berbasis pengetahuan dan inovasi.

Tabel 2.125

Capaian Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	-	-	-	10.45	12.77

Sumber : Sakernas 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi Kabupaten Gresik meningkat 2,32 persen dari tahun 2024 sebesar 10,45 menjadi 12,77 di tahun 2025. Perkembangan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi terus mengalami peningkatan, meskipun masih diperlukan upaya yang lebih kuat untuk memperbesar jumlah lulusan perguruan tinggi. Kondisi ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional dalam mendukung perkembangan sektor industri, perdagangan, jasa, serta transformasi ekonomi daerah.

Keberadaan kawasan industri yang berkembang pesat di Kabupaten Gresik menuntut tersedianya sumber daya manusia dengan kompetensi yang lebih tinggi dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Oleh karena itu, peningkatan proporsi penduduk yang memiliki pendidikan tinggi menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat daya saing daerah, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tantangan yang masih dihadapi antara lain keterbatasan akses pendidikan tinggi bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, kesenjangan kesempatan melanjutkan pendidikan antarwilayah, serta masih tingginya proporsi penduduk yang berpendidikan menengah ke bawah. Kondisi tersebut memerlukan intervensi kebijakan yang berfokus pada perluasan akses pendidikan tinggi melalui program

beasiswa, peningkatan kerja sama dengan perguruan tinggi, penguatan pendidikan vokasi, serta penyelarasan kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah, peningkatan proporsi penduduk berkualifikasi pendidikan tinggi perlu diarahkan untuk mendukung terwujudnya sumber daya manusia Kabupaten Gresik yang unggul, berdaya saing, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan ekonomi dan sosial di masa mendatang.

- IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

a. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah. Data Indeks Inovasi Daerah merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun.

Tabel 2.126
Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Inovasi Daerah	43,04	48.4	45.92	54,43	57,98

Sumber : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2024), Tahun 2025

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Gresik selalu mengalami peningkatan di setiap tahun. Pada Tahun 2025, Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Gresik mengalami kenaikan sebesar 3.55 mencapai 57,98 dari tahun 2024 dengan predikat Inovatif sebagaimana Keputusan. Peningkatan nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) pada tahun 2025 merupakan hasil dari penguatan tata kelola inovasi daerah yang semakin sistematis dan terintegrasi. Penyempurnaan regulasi,

optimalisasi peran perangkat daerah, serta peningkatan koordinasi dalam ekosistem inovasi telah mendorong pelaksanaan inovasi yang lebih terarah dan selaras dengan indikator penilaian Indeks Inovasi Daerah. Di samping itu, perbaikan dalam mekanisme pendokumentasian dan pelaporan inovasi turut meningkatkan akurasi serta kelengkapan data yang dinilai secara nasional. Selain itu, kenaikan nilai Indeks Inovasi Daerah juga dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas dan kuantitas inovasi yang dihasilkan, baik dalam aspek pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, maupun transformasi digital. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan berkelanjutan, serta komitmen pimpinan daerah dalam membangun budaya inovasi menjadi faktor pendukung utama yang secara kolektif berkontribusi terhadap perbaikan capaian indeks secara berkelanjutan.

b. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah melalui penyediaan bahan pangan, penciptaan lapangan kerja, serta pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kinerja sektor ini menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kemampuan daerah dalam menjaga ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat struktur ekonomi yang inklusif.

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencerminkan perkembangan aktivitas ekonomi yang berasal dari subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, serta perikanan tangkap dan budidaya. Dinamika pertumbuhan sektor ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi iklim, produktivitas usaha, ketersediaan sarana dan prasarana produksi, akses pasar, serta dukungan kebijakan pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk.

Tabel 2.127

Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025

Lapangan Usaha/Industry (Miliar Rupiah)	Tahun				
	2021	2022	2023	2024*	2025**
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.823,54	6.007,94	6.200,21	6.301,05	6.513,17

Sumber: Kabupaten Gresik dalam Angka, 2026
**Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*

Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menunjukkan kinerja yang positif selama periode 2021–2025. Nilai PDRB sektor ini meningkat dari Rp5,82 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp6,51 triliun pada tahun 2025. Peningkatan tersebut mencerminkan terjaganya aktivitas produksi dan kontribusi sektor primer dalam mendukung perekonomian daerah.

Secara bertahap, nilai PDRB sektor ini terus mengalami kenaikan, yaitu menjadi Rp6,01 triliun pada tahun 2022, Rp6,20 triliun pada tahun 2023, Rp6,30 triliun pada tahun 2024, dan mencapai Rp6,51 triliun pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan nilai tambah yang dihasilkan dari kegiatan pertanian, peternakan, serta perikanan, yang didukung oleh pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan produktivitas usaha.

Tabel 2.128

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Harga Konstan
2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Gresik Tahun 2022-2025

Lapangan Usaha/Industri (Persen)	Tahun				
	2021	2022	2023	2024*	2025**
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-3.01	3,17	3,20	1,63	3,37

Sumber: Kabupaten Gresik dalam Angka, 2026
**Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menunjukkan tren yang positif .Pada tahun 2021 sektor ini mengalami kontraksi sebesar -3,01 persen. Namun pada tahun 2022 dan 2023 berhasil tumbuh positif masing-masing sebesar 3,17 persen dan 3,20 persen. Pada tahun 2024 pertumbuhan melambat menjadi 1,63 persen, kemudian kembali meningkat menjadi 3,37 persen pada tahun 2025 yang merupakan capaian tertinggi selama periode 2022–2025.

Pemulihan dari pertumbuhan negatif pada tahun 2021 menuju pertumbuhan positif pada tahun-tahun berikutnya menunjukkan meningkatnya aktivitas ekonomi sektor pertanian. Kenaikan PDRB pada tahun 2025 sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan produksi komoditas unggulan pertanian yang mencapai 7,51 persen, sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan produksi pertanian memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi sektor pertanian secara keseluruhan.

Secara umum terdapat hubungan yang cukup kuat antara pertumbuhan produksi komoditas unggulan pertanian dengan pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

- Tahun 2021 sektor pertanian mengalami kontraksi ekonomi (-3,01%), sementara pertumbuhan produksi seluruh subsektor masih relatif rendah.
- Tahun 2022–2023 PDRB mulai tumbuh di atas 3%, sejalan dengan mulai membaiknya kinerja produksi subsektor pertanian dan peternakan.
- Tahun 2024 terjadi perlambatan PDRB menjadi 1,63% meskipun produksi pertanian meningkat, yang mengindikasikan adanya faktor lain seperti harga komoditas, biaya produksi, atau kontribusi subsektor lain yang memengaruhi nilai tambah sektor.
- Tahun 2025 menunjukkan kondisi paling baik, dimana pertumbuhan produksi komoditas unggulan pertanian meningkat tajam menjadi 7,51% dan diikuti peningkatan PDRB menjadi 3,37%.

Sementara itu, subsektor perkebunan belum menjadi faktor utama penggerak pertumbuhan sektor pertanian karena pertumbuhannya relatif rendah bahkan menurun pada tahun 2025. Sebaliknya, subsektor peternakan berperan sebagai penopang yang menjaga stabilitas kinerja sektor pertanian melalui pertumbuhan yang konsisten. Dengan demikian, penguatan produktivitas perkebunan dan keberlanjutan peningkatan produksi pertanian menjadi faktor penting untuk menjaga pertumbuhan sektor pertanian Kabupaten Gresik pada tahun-tahun mendatang.

c. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan salah satu komponen penting dalam penguatan daya saing daerah Kabupaten Gresik. Keberadaan IKM tidak hanya berperan sebagai pendukung sektor industri besar yang berkembang di Kabupaten Gresik, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah produk, serta pengembangan usaha berbasis potensi wilayah.

Sebagai salah satu pusat industri di Provinsi Jawa Timur, struktur perekonomian Kabupaten Gresik didominasi oleh sektor industri pengolahan. Dalam struktur tersebut, IKM memiliki proporsi yang signifikan dari sisi jumlah unit usaha dan persebaran kegiatan ekonomi masyarakat. Karakteristik IKM yang relatif fleksibel, adaptif terhadap perubahan pasar, serta mampu memanfaatkan sumber daya lokal menjadikan sektor ini memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Selain itu, IKM juga menjadi media pengembangan kewirausahaan, inovasi produk, dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Perkembangan jumlah IKM di Kabupaten Gresik menunjukkan kecenderungan positif yang didukung oleh berbagai program pembinaan, fasilitasi perizinan usaha, peningkatan kualitas produk, sertifikasi, digitalisasi pemasaran, serta penguatan akses permodalan. Pertambahan jumlah IKM tersebut mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan tumbuhnya pelaku usaha baru pada

berbagai subsektor industri, khususnya industri makanan dan minuman, kerajinan, konveksi, pengolahan hasil perikanan, serta industri kreatif berbasis potensi lokal.

Dari perspektif daya saing daerah, tingginya proporsi IKM memberikan kontribusi terhadap diversifikasi struktur ekonomi, peningkatan penyerapan tenaga kerja, dan penguatan rantai pasok industri daerah. Keberadaan IKM juga menjadi faktor pendukung bagi pengembangan industri yang inklusif karena mampu menjangkau pelaku usaha skala kecil yang tersebar di berbagai kecamatan. Di sisi lain, sinergi antara industri besar dan IKM berpotensi meningkatkan produktivitas, kualitas produk, serta daya saing industri daerah secara keseluruhan.

Meskipun demikian, pengembangan IKM masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan akses teknologi, kapasitas sumber daya manusia, inovasi produk, akses pasar, dan pembiayaan usaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan dan program pemberdayaan IKM secara berkelanjutan agar mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya saing Kabupaten Gresik. Berikut tabel indikator terkait jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Gresik:

Tabel 2.129

Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Gresik

Tahun 2020 - 2025

INDIKATOR SASARAN	TAHUN					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Industri Kecil	1498	1498	6320	6382	6394	6484
Industri Menengah	119	119	1130	1130	1203	1209

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, Tahun 2025.

Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, jumlah Industri Kecil dan Industri Menengah menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan

selama periode 2020–2025. Kondisi ini mencerminkan semakin kuatnya daya saing sektor industri daerah yang didukung oleh bertambahnya jumlah pelaku usaha industri serta berkembangnya aktivitas produksi di Kabupaten Gresik.

Pada kelompok Industri Kecil, jumlah unit usaha tercatat sebanyak 1.498 unit pada tahun 2020 dan 2021, kemudian meningkat tajam menjadi 6.320 unit pada tahun 2022 atau tumbuh sekitar 321,9 persen dibanding tahun sebelumnya. Selanjutnya jumlah Industri Kecil terus bertambah menjadi 6.382 unit pada tahun 2023 (naik 0,98 persen), 6.394 unit pada tahun 2024 (naik 0,19 persen), dan 6.484 unit pada tahun 2025 (naik 1,41 persen). Secara kumulatif, jumlah Industri Kecil selama periode 2020–2025 meningkat sebesar 332,8 persen.

Sementara itu, Industri Menengah tercatat sebanyak 119 unit pada tahun 2020 dan 2021, kemudian meningkat menjadi 1.130 unit pada tahun 2022 atau tumbuh sekitar 849,6 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 jumlah Industri Menengah relatif tetap sebanyak 1.130 unit, kemudian meningkat menjadi 1.203 unit pada tahun 2024 (naik 6,46 persen) dan 1.209 unit pada tahun 2025 (naik 0,50 persen). Secara keseluruhan, jumlah Industri Menengah selama periode 2020–2025 mengalami peningkatan sebesar 916,0 persen.

Dari sisi struktur industri, pada tahun 2025 terdapat 6.484 Industri Kecil dan 1.209 Industri Menengah, sehingga total industri mencapai 7.693 unit usaha. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa Industri Kecil masih mendominasi dengan kontribusi sekitar 84,3 persen, sedangkan Industri Menengah sebesar 15,7 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penguatan sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM) menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing daerah melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan kewirausahaan, serta peningkatan nilai tambah ekonomi lokal.

d. PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum merupakan salah satu lapangan usaha dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang berperan sebagai sektor jasa konsumtif dan

penunjang aktivitas ekonomi riil. Di Kabupaten Gresik, sektor ini memiliki keterkaitan erat dengan dinamika industri pengolahan, perdagangan, mobilitas tenaga kerja, serta tingkat daya beli masyarakat. Pertumbuhan sektor ini sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang sebagian besar bersumber dari sektor industri pengolahan sebagai sektor basis daerah. Dengan dominasi sektor industri dalam struktur PDRB, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkembang sebagai sektor turunan, yang pertumbuhannya mengikuti peningkatan pendapatan tenaga kerja industri dan aktivitas ekonomi pendukung lainnya. Peningkatan peran sektor jasa merupakan salah satu karakteristik ekonomi yang berkembang menuju struktur yang lebih berimbang. Di Kabupaten Gresik, penguatan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran sektor industri pengolahan sebagai sektor basis, melainkan sebagai sektor penunjang strategis yang menjaga stabilitas konsumsi, memperkuat ekonomi lokal, serta meningkatkan inklusivitas pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 Kabupaten Gresik periode 2021–2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menunjukkan kecenderungan peningkatan kontribusi secara bertahap dan konsisten dalam struktur perekonomian daerah.

Tabel 2.130
Distribusi PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Sektor Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman Kabupaten Gresik

Uraian	Distribusi PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Sektor Penyediaan Akomodasi Makanan dan Minuman Kabupaten Gresik (Persen)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Gresik	1,35	1,36	1,42	1,44	1,48

Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka, 2026
Tahun 2024: Angka Sementara
Tahun 2025: Angka Sangat Sementara

Pada tahun 2021, kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap total PDRB ADHK Kabupaten Gresik tercatat sebesar 1,35 persen. Angka ini merefleksikan kondisi ekonomi yang

masih berada dalam fase pemulihan awal pascapandemi COVID-19, di mana pembatasan aktivitas sosial dan mobilitas masyarakat masih berdampak signifikan terhadap sektor-sektor berbasis layanan dan interaksi langsung. Memasuki tahun 2022, kontribusi sektor ini meningkat menjadi 1,36 persen. Meskipun kenaikan relatif kecil, peningkatan tersebut mengindikasikan mulai pulihnya aktivitas konsumsi rumah tangga, khususnya konsumsi makan dan minum di luar rumah, seiring dengan pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat dan meningkatnya kepercayaan konsumen. Peningkatan kontribusi yang lebih nyata terjadi pada tahun 2023, di mana sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mencatatkan kontribusi sebesar 1,42 persen terhadap PDRB ADHK Kabupaten Gresik (angka sementara). Kenaikan sebesar 0,06 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya mencerminkan fase pemulihan ekonomi yang lebih kuat dan merata. Pada periode ini, aktivitas ekonomi masyarakat telah kembali mendekati kondisi normal, ditandai dengan meningkatnya mobilitas tenaga kerja, aktivitas perkantoran, serta kegiatan industri dan perdagangan. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap meningkatnya permintaan jasa penyediaan makan dan minum, terutama di kawasan industri, pusat perdagangan, dan wilayah perkotaan di Kabupaten Gresik.

Pada tahun 2024, kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum kembali meningkat menjadi 1,44 persen (angka sangat sementara), kontribusi yang sama juga mengalami kenaikan kembali pada tahun 2025 menjadi 1,48 persen (angka sangat sementara). Kenaikan ini menunjukkan bahwa sektor tersebut mulai mengalami penguatan struktural dalam perekonomian daerah. Secara kumulatif, selama periode 2021–2025, kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum meningkat sebesar 0,09 poin persentase atau tumbuh sekitar 6,7 persen secara struktural. Tren ini mengindikasikan adanya pergeseran perilaku konsumsi masyarakat serta semakin kuatnya peran sektor jasa dalam mendukung aktivitas ekonomi utama Kabupaten Gresik.

Kinerja sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Gresik secara keseluruhan selama periode 2021–2025 menunjukkan tren positif dan konsisten. Meskipun kontribusinya terhadap PDRB ADHK masih relatif kecil, sektor ini memiliki peran strategis dalam mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah berbasis konsumsi. Oleh karena itu, dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, sektor ini perlu diposisikan sebagai sektor pendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan fokus kebijakan pada peningkatan produktivitas usaha, penguatan UMKM, serta integrasi dengan pengembangan kawasan industri dan pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik.

e. Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan

Pertumbuhan kunjungan wisatawan merupakan salah satu indikator yang mencerminkan tingkat daya saing daerah, khususnya dalam sektor pariwisata. Kabupaten Gresik memiliki potensi pariwisata yang beragam, meliputi wisata religi, wisata budaya, wisata sejarah, wisata alam, dan wisata bahari yang tersebar di wilayah daratan maupun Kepulauan Bawean. Keberadaan destinasi wisata unggulan seperti kawasan wisata religi Sunan Giri dan Maulana Malik Ibrahim, Situs Giri Kedaton, Bukit Surowiti, serta berbagai destinasi wisata alam dan bahari di Pulau Bawean menjadi faktor utama yang mendukung peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Gresik.

Perkembangan kunjungan wisatawan yang cenderung meningkat menunjukkan semakin baiknya daya tarik destinasi wisata daerah serta efektivitas promosi pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan. Pertumbuhan kunjungan wisatawan juga didukung oleh pengembangan infrastruktur destinasi, peningkatan kualitas layanan wisata, penyelenggaraan event daerah, serta promosi digital yang semakin luas. Khusus di Pulau Bawean, pengembangan kawasan wisata terpadu terus dilakukan untuk mengoptimalkan potensi wisata alam, budaya, religi, edukasi, dan wisata keluarga sebagai penggerak ekonomi masyarakat setempat.

Dari perspektif daya saing daerah, peningkatan kunjungan wisatawan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan aktivitas perdagangan, jasa, transportasi, akomodasi, kuliner, serta pengembangan usaha mikro dan ekonomi kreatif masyarakat. Tingginya kunjungan wisatawan juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Berbagai kajian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pengunjung pada destinasi wisata unggulan di Kabupaten Gresik memiliki keterkaitan positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan penerimaan daerah dari subsektor pariwisata.

Selain wisata religi yang menjadi identitas utama Kabupaten Gresik, perkembangan destinasi wisata di Pulau Bawean turut memperkuat daya saing pariwisata daerah. Beberapa destinasi wisata di Bawean mencatat jumlah kunjungan yang cukup tinggi dan menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor pariwisata Kabupaten Gresik memiliki peluang yang besar untuk terus berkembang sebagai salah satu sektor unggulan daerah.

Tabel 2.131

Pertumbuhan Kunjungan Wisata Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2025

INDIKATOR SASARAN	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
Pertumbuhan Kunjungan Wisata	3,48	96,25	4,00	5,00	7,00

Sumber : Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik, Tahun 2026.

Berdasarkan data Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik, pertumbuhan kunjungan wisata selama periode tahun 2021–2025 menunjukkan tren yang positif meskipun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, pertumbuhan kunjungan wisata tercatat sebesar 3,48 persen. Kondisi tersebut menunjukkan mulai pulihnya aktivitas pariwisata daerah setelah sebelumnya terdampak oleh perlambatan aktivitas sosial dan ekonomi.

Pada tahun 2022, pertumbuhan kunjungan wisata mengalami peningkatan yang sangat signifikan hingga mencapai 96,25 persen. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan mobilitas masyarakat dan meningkatnya minat kunjungan wisatawan terhadap destinasi wisata di Kabupaten Gresik, khususnya wisata religi, wisata budaya, dan wisata alam. Selain itu, peningkatan kegiatan promosi pariwisata serta penyelenggaraan event daerah turut memberikan kontribusi terhadap kenaikan jumlah kunjungan wisata.

Selanjutnya pada tahun 2023, pertumbuhan kunjungan wisata kembali berada pada kondisi yang lebih stabil dengan capaian sebesar 4 persen. Pada tahun 2024 pertumbuhan kunjungan wisata meningkat menjadi 5 persen, sedangkan pada tahun 2025 diproyeksikan kembali meningkat menjadi 7 persen. Kondisi tersebut menunjukkan adanya tren pertumbuhan yang berkelanjutan dan mencerminkan semakin membaiknya sektor pariwisata daerah.

Secara umum, pertumbuhan kunjungan wisatawan mencerminkan meningkatnya daya saing Kabupaten Gresik sebagai daerah tujuan wisata di Jawa Timur. Ke depan, penguatan promosi pariwisata, peningkatan aksesibilitas destinasi, pengembangan amenitas wisata, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu terus dilakukan guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah.

f. Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif unggulan daerah

Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur daya saing daerah karena mencerminkan kemampuan masyarakat dalam menciptakan nilai tambah berbasis kreativitas, inovasi, budaya, dan pemanfaatan teknologi. Di Kabupaten Gresik, perkembangan ekonomi kreatif menunjukkan tren yang positif seiring dengan meningkatnya perhatian pemerintah daerah terhadap pengembangan sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi lokal.

Kabupaten Gresik memiliki berbagai subsektor ekonomi kreatif unggulan yang berkembang dan menjadi identitas daerah, antara lain subsektor kuliner, kriya, dan fashion. Produk-produk unggulan seperti pudak, nasi krawu, otak-otak bandeng, songkok, sarung tenun, batik khas Gresik, serta kerajinan rotan telah menjadi bagian dari ekosistem ekonomi kreatif yang tidak hanya memenuhi pasar lokal, tetapi juga mampu menjangkau pasar nasional dan internasional. Keberadaan produk-produk tersebut menunjukkan bahwa ekonomi kreatif di Kabupaten Gresik memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing daerah melalui pemanfaatan kearifan lokal dan inovasi produk.

Perkembangan jumlah pelaku ekonomi kreatif juga didukung oleh berbagai program pemerintah daerah melalui fasilitasi pelatihan, promosi produk, penguatan kelembagaan, digitalisasi pemasaran, pengembangan desa kreatif, serta sinergi antara sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha kreatif agar mampu menghasilkan produk yang lebih kompetitif, adaptif terhadap perkembangan pasar, dan memiliki nilai tambah yang tinggi.

Dari perspektif daya saing daerah, pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif memberikan kontribusi terhadap diversifikasi struktur ekonomi daerah, peningkatan kesempatan kerja, penguatan usaha mikro dan kecil, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, ekonomi kreatif juga berperan dalam memperkuat identitas daerah melalui produk-produk berbasis budaya lokal yang mampu menjadi daya tarik wisata sekaligus media promosi Kabupaten Gresik di tingkat nasional maupun internasional. Penguatan ekonomi kreatif berbasis budaya dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam membangun citra daerah yang kompetitif dan berkelanjutan.

Tabel 2.132

Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif Unggulan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2025

INDIKATOR SASARAN	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	0	0	0	212	225

Sumber : Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik, Tahun 2026.

Berdasarkan data Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik, jumlah pelaku ekonomi kreatif menunjukkan perkembangan yang positif dalam mendukung peningkatan daya saing daerah. Pada periode tahun 2021–2023 belum tercatat pelaku ekonomi kreatif unggulan yang terdata atau difasilitasi oleh pemerintah daerah, yaitu sebanyak 0 pelaku. Selanjutnya pada tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan menjadi 212 pelaku ekonomi kreatif, yang kemudian kembali meningkat menjadi 225 pelaku pada tahun 2025 atau bertambah 13 pelaku dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara persentase, jumlah pelaku ekonomi kreatif mengalami pertumbuhan sebesar 6,13 persen pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin berkembangnya ekosistem ekonomi kreatif di Kabupaten Gresik yang ditandai dengan bertambahnya pelaku usaha pada berbagai subsektor kreatif. Kondisi ini menjadi modal penting dalam memperkuat daya saing daerah melalui penciptaan nilai tambah ekonomi, peningkatan inovasi produk dan jasa, serta perluasan peluang kerja berbasis kreativitas masyarakat.

Perkembangan jumlah pelaku ekonomi kreatif tersebut juga mencerminkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peluang usaha kreatif serta efektivitas berbagai program pembinaan, fasilitasi, dan pengembangan ekonomi kreatif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Dengan tren pertumbuhan yang positif, sektor ekonomi kreatif diharapkan dapat menjadi salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Secara umum, perkembangan pelaku ekonomi kreatif unggulan daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik memiliki modal yang kuat dalam meningkatkan daya saing ekonomi berbasis kreativitas dan inovasi. Ke depan, diperlukan penguatan ekosistem ekonomi kreatif melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, akses pembiayaan, pemanfaatan teknologi digital, perlindungan kekayaan intelektual, serta perluasan jaringan pemasaran guna mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

g. Pertumbuhan Usaha Mikro

Pertumbuhan usaha mikro merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur daya saing daerah karena mencerminkan tingkat kewirausahaan masyarakat, kemampuan menciptakan lapangan kerja, serta ketahanan ekonomi lokal. Di Kabupaten Gresik, usaha mikro memiliki peran strategis dalam mendukung struktur perekonomian daerah karena mampu menjangkau berbagai sektor usaha, mulai dari perdagangan, industri pengolahan, kuliner, jasa, kerajinan, hingga ekonomi kreatif berbasis potensi lokal.

Perkembangan usaha mikro di Kabupaten Gresik menunjukkan kecenderungan yang positif seiring dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha yang memperoleh legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB), perluasan akses pemasaran digital, serta berbagai program pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah daerah. Dalam dokumen RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026 disebutkan bahwa pertumbuhan usaha mikro terus mengalami peningkatan, dengan capaian yang semakin tinggi terutama setelah adanya penguatan sistem pendataan dan legalisasi usaha melalui integrasi data pelaku usaha.

Dari perspektif daya saing daerah, pertumbuhan usaha mikro memberikan kontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, penciptaan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, serta penguatan ekonomi berbasis lokal. Keberadaan usaha mikro juga berperan sebagai penopang utama ekonomi daerah yang memiliki kemampuan adaptasi tinggi terhadap perubahan kondisi ekonomi. Selain itu, usaha

mikro menjadi sarana pengembangan inovasi produk dan kewirausahaan masyarakat yang mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.

Kabupaten Gresik juga memiliki basis usaha mikro yang didukung oleh berkembangnya industri mikro dan kecil pada berbagai subsektor, seperti makanan dan minuman, kerajinan, konveksi, pengolahan hasil perikanan, serta produk unggulan daerah. Pengembangan usaha mikro tersebut didukung melalui pembinaan, pelatihan, fasilitasi sertifikasi produk, digitalisasi pemasaran, dan penguatan akses permodalan yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan daya saing pelaku usaha.

Tabel 2.133

Pertumbuhan Usaha Mikro di Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2025

INDIKATOR SASARAN	TAHUN						KETERANGAN
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Usaha Mikro	-	-	3,6	1,96	33,8	0,64	Di tahun 2024 terdapat SIDT (Sistem Informasi Data Tunggal) dari provinsi

Sumber : Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, Tahun 2026.

Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, indikator pertumbuhan usaha mikro menunjukkan perkembangan yang fluktuatif selama periode 2022–2025. Pada tahun 2020 dan 2021 belum tersedia data pengukuran sehingga capaian belum dapat dianalisis. Selanjutnya pada tahun 2022 pertumbuhan usaha mikro tercatat sebesar 3,6 persen, kemudian mengalami penurunan menjadi 1,96 persen pada tahun 2023 atau turun sebesar 45,56 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang sangat signifikan dengan capaian sebesar 33,8 persen atau meningkat 1.624,49 persen dibandingkan tahun 2023. Lonjakan pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh implementasi SIDT (Sistem Informasi Data Tunggal) Provinsi Jawa Timur yang memperkuat proses pendataan, validasi, dan integrasi data pelaku

usaha mikro sehingga jumlah usaha mikro yang teridentifikasi dan tercatat mengalami peningkatan yang cukup besar.

Selanjutnya pada tahun 2025 pertumbuhan usaha mikro tercatat sebesar 0,64 persen, atau mengalami penurunan sebesar 98,11 persen dibandingkan tahun 2024. Penurunan tersebut lebih mencerminkan kondisi normalisasi data pasca implementasi SIDT pada tahun sebelumnya, sehingga pertumbuhan usaha mikro yang tercatat pada tahun 2025 menggambarkan perkembangan riil yang lebih stabil.

Secara umum, perkembangan indikator pertumbuhan usaha mikro di Kabupaten Gresik menunjukkan adanya peningkatan kapasitas pendataan dan legalitas pelaku usaha yang didukung oleh penguatan sistem informasi. Kondisi ini menjadi indikator positif dalam upaya pengembangan sektor usaha mikro sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah, peningkatan kesempatan kerja, serta penguatan daya saing ekonomi masyarakat. Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan dalam pembinaan usaha mikro, peningkatan akses pembiayaan, penguatan pemasaran, dan pemanfaatan teknologi digital agar pertumbuhan usaha mikro dapat berlangsung lebih optimal dan berkelanjutan.

h. ICOR

Incremental Capital Output Ratio (ICOR) merupakan indikator ekonomi makro yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara penambahan modal dengan penambahan output yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu. Dalam kerangka perencanaan pembangunan, ICOR berfungsi sebagai alat analisis untuk menilai efisiensi investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Secara konseptual, ICOR berangkat dari pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi pada dasarnya ditentukan oleh dua komponen utama, yaitu akumulasi modal dan produktivitas faktor produksi. ICOR mengukur seberapa besar tambahan investasi, yang direpresentasikan oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil. Semakin rendah nilai ICOR, semakin efisien proses transformasi modal menjadi output ekonomi, sedangkan nilai ICOR yang

tinggi menunjukkan bahwa tambahan modal yang masuk belum sepenuhnya menghasilkan peningkatan output yang proporsional.

Tabel 2.134

Capaian Indikator ICOR Kabupaten Gresik*Sumber: Kabupaten Gresik Dalam Angka 2026, Data Diolah Bappeda*

Uraian	*Incremental Capital Output Ratio* (ICOR)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Gresik	6,22	3,27	5,13	4,96	490

Tahun 2024: Angka Sementara
Tahun 2025: Angka Sangat Sementara

Kinerja *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) Kabupaten Gresik selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika efisiensi investasi yang berfluktuasi, dengan nilai berada pada kisaran 3,27 hingga 6,22. Kondisi ini mencerminkan bahwa proses transformasi investasi menjadi output ekonomi di Kabupaten Gresik belum berlangsung secara stabil, namun masih berada dalam koridor yang wajar bagi daerah dengan struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor industri pengolahan padat modal. Capaian ICOR dalam RPJMD memiliki implikasi langsung terhadap realistis atau tidaknya target pertumbuhan ekonomi daerah. ICOR merupakan indikator kunci yang menggambarkan hubungan antara kebutuhan investasi dengan kemampuan daerah dalam menghasilkan tambahan output. Dengan demikian, target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam RPJMD secara implisit mensyaratkan tingkat efisiensi investasi tertentu. Pada tahun 2025, ICOR Kabupaten Gresik mengalami penurunan dari tahun 2024 dengan capaian 4,90. Meskipun demikian, capaian ICOR di Kabupaten Gresik masih belum memenuhi target sebesar 4,60.

Fluktuasi ICOR di Kabupaten Gresik menunjukkan adanya perbedaan kecepatan antara pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan pertumbuhan PDRB riil. Pada periode tertentu, peningkatan investasi belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan output yang sepadan, yang mengindikasikan adanya jeda waktu antara realisasi investasi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena

itu, dalam penetapan target pertumbuhan ekonomi RPJMD 2025–2029, perlu diperhatikan kapasitas historis daerah dalam mengonversi investasi menjadi output, agar target yang ditetapkan tetap kredibel dan terukur. Nilai ICOR yang relatif tinggi pada beberapa tahun terakhir mengindikasikan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi akan membutuhkan investasi dalam jumlah besar, apabila tidak disertai dengan perbaikan efisiensi. Implikasi langsungnya adalah bahwa penetapan target pertumbuhan ekonomi yang agresif tanpa diimbangi strategi peningkatan kualitas dan produktivitas investasi berpotensi meningkatkan tekanan kebutuhan modal, baik dari sektor swasta maupun belanja modal pemerintah daerah.

Sebaliknya, capaian ICOR yang sempat membaik pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi pemanfaatan investasi yang sudah ada, tanpa semata-mata bergantung pada peningkatan volume PMTB. Hal ini menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah perlu memberikan perhatian pada peningkatan keterkaitan antar sektor, pemanfaatan kapasitas produksi, serta penguatan rantai nilai ekonomi daerah, sehingga investasi yang masuk dapat lebih cepat dan lebih efektif mendorong pertumbuhan PDRB.

i. Kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota terhadap Provinsi

Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Provinsi Jawa Timur menunjukkan persentase sumbangan nilai ekonomi Kabupaten/Kota terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur. Angka ini digunakan untuk mengukur seberapa besar peran atau dominasi suatu daerah dalam menggerakkan perekonomian secara regional. Persentase ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi Kabupaten/Kota yang menjadi motor penggerak perekonomian Provinsi Jawa Timur melalui pemetaan potensi ekonomi dan sektor unggulan. Lebih jauh, angka ini dapat menggambarkan kesenjangan kapasital fiskal dan potensi ekonomi antara wilayah pusat dan wilayah pinggiran untuk membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan alokasi anggaran dan pemerataan infrastruktur. Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk

mengukur pertumbuhan ekonomi daerah secara riil dari tahun ke tahun dapat dilihat dari PDRB Tahunan Atas Dasar Harga Konstan. Indikator ini dihitung menggunakan harga dasar pada tahun tertentu sebagai acuan dasar sehingga mampu menghilangkan pengaruh inflasi dan mencerminkan pertambahan produksi barang dan jasa yang sebenarnya.

Tabel 2.135
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahunan Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Jawa Timur (Miliar Rupiah)

Uraian	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahunan Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Jawa Timur (Miliar Rupiah)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Gresik	101318,7	108796,88	113825,43	119274,42	125125,9

Sumber: Tabel Dinamis BPS Jawa Timur,026
Tahun 2023: Angka Sementara
Tahun 2024: Angka Sangat Sementara

Berdasarkan Tabel di atas, perkembangan PDRB Kabupaten Gresik atas dasar harga konstan menunjukkan tren peningkatan selama periode 2021–2025. Perkembangan ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Kabupaten Gresik terus mengalami ekspansi secara riil karena menggunakan perhitungan berdasarkan harga konstan yang telah menghilangkan pengaruh perubahan harga atau inflasi. Peningkatan nilai PDRB tersebut menggambarkan adanya penguatan kapasitas produksi dan kontribusi sektor-sektor ekonomi daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik di tingkat regional Provinsi Jawa Timur.

Indikator makro ekonomi lainnya yang digunakan yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku. Angka yang disajikan pada tabel ini merupakan nilai nominal yang sangat dipengaruhi oleh perubahan harga atau inflasi dari tahun ke tahun sehingga sangat cocok digunakan untuk melihat struktur perekonomian wilayah pada satu tahun tertentu.

Tabel 2.136
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahunan Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Timur
(Miliar Rupiah)

Uraian	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahunan Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Timur (Miliar Rupiah)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Gresik	144656,1	163907,91	176261	188604,51	202004,5

Sumber: Tabel Dinamis BPS Jawa Timur, 2026
Tahun 2023: Angka Sementara
Tahun 2024: Angka Sangat Sementara

Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Tahunan Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021-2025 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku tersebut menunjukkan adanya perkembangan aktivitas ekonomi Kabupaten Gresik secara nominal, yang mencerminkan peningkatan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi daerah. Namun demikian, karena menggunakan harga berlaku, perubahan nilai PDRB ini masih dipengaruhi oleh faktor perubahan harga atau inflasi sehingga lebih tepat digunakan untuk menggambarkan struktur dan besaran perekonomian daerah pada tahun berjalan. Tren peningkatan tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik memiliki kapasitas ekonomi yang terus berkembang dan menjadi salah satu daerah dengan kontribusi penting terhadap perekonomian Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya, distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gresik atas dasar harga berlaku terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur menunjukkan kontribusi yang relatif stabil selama periode 2021–2025 seperti tabel di bawah. Pada tahun 2021, kontribusi PDRB Kabupaten Gresik terhadap perekonomian Provinsi Jawa Timur sebesar 5,89 persen. Nilai tersebut mengalami peningkatan menjadi 6,00 persen pada tahun 2022, kemudian sedikit menurun menjadi 5,96 persen pada tahun 2023. Selanjutnya, kontribusi Kabupaten Gresik tercatat sebesar 5,94 persen pada tahun 2024 dan 5,93 persen pada tahun 2025.

Tabel 2.137
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahunan Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Timur (Persen)

Uraian	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahunan Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Timur (Persen)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Gresik	5,89	6	5,96	5,94	5,93

Sumber: Tabel Dinamis BPS Jawa Timur, 2026
Tahun 2023: Angka Sementara
Tahun 2024: Angka Sangat Sementara

Meskipun mengalami sedikit fluktuasi, kontribusi PDRB Kabupaten Gresik tetap berada pada kisaran 5–6 persen yang menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik memiliki peran ekonomi yang cukup signifikan dalam struktur perekonomian Provinsi Jawa Timur. Stabilnya kontribusi tersebut menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik berjalan searah dengan perkembangan ekonomi regional, dengan dukungan dari sektor-sektor unggulan daerah yang menjadi penggerak aktivitas produksi dan nilai tambah ekonomi.

j. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan merupakan indikator yang menggambarkan persentase penduduk perempuan usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif dalam pasar kerja, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan, terhadap total penduduk perempuan usia kerja. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi dan menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai inklusivitas pembangunan ketenagakerjaan. Semakin tinggi nilai TPAK Perempuan, semakin besar proporsi perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif.

Tabel 2.138
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Gresik

Uraian	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025				
	2021	2022	2023	2024	2025
TPAK Perempuan	53,87	51,42	54,37	56,37	52,54

Sumber: BPS Gresik, 2026
Tahun 2024: Angka Sementara
Tahun 2025: Angka Sangat Sementara

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), TPAK Perempuan Kabupaten Gresik selama periode 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2021 TPAK Perempuan tercatat sebesar 53,87 persen, kemudian mengalami penurunan menjadi 51,42 persen pada tahun 2022 atau turun sebesar 2,45 poin persentase. Pada tahun 2023 indikator ini kembali meningkat menjadi 54,37 persen dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 56,37 persen pada tahun 2024. Capaian tersebut merupakan nilai tertinggi selama lima tahun terakhir yang menunjukkan semakin besarnya keterlibatan perempuan dalam pasar kerja. Namun demikian, pada tahun 2025 TPAK Perempuan kembali mengalami penurunan menjadi 52,54 persen atau berkurang 3,83 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pasar kerja Kabupaten Gresik belum sepenuhnya stabil. Meskipun sempat mengalami peningkatan selama dua tahun berturut-turut pada periode 2023–2024, penurunan yang terjadi pada tahun 2025 mengindikasikan masih adanya dinamika yang memengaruhi keputusan perempuan usia kerja untuk masuk atau keluar dari angkatan kerja. Kondisi ini juga sejalan dengan penurunan TPAK Kabupaten Gresik secara keseluruhan yang turun dari 71,61 persen pada tahun 2024 menjadi 67,99 persen pada tahun 2025, sehingga penurunan partisipasi perempuan tidak dapat dipandang sebagai fenomena yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari dinamika ketenagakerjaan daerah secara umum.

Sebagai salah satu pusat industri di Jawa Timur, struktur perekonomian Kabupaten Gresik didominasi oleh sektor industri

pengolahan, perdagangan, serta berbagai sektor jasa yang menjadi penyerap utama tenaga kerja perempuan. Berdasarkan data ketenagakerjaan BPS, sebagian besar tenaga kerja perempuan di Kabupaten Gresik bekerja pada sektor jasa dan industri pengolahan. Oleh karena itu, perkembangan TPAK Perempuan sangat erat kaitannya dengan kemampuan sektor-sektor tersebut dalam menciptakan dan menyediakan kesempatan kerja yang sesuai dengan karakteristik tenaga kerja perempuan. Tingginya aktivitas industri dan jasa di Kabupaten Gresik pada dasarnya memberikan peluang yang cukup besar bagi peningkatan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi, namun peluang tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja perempuan agar dapat mengakses lapangan kerja yang tersedia. Dari sisi pembangunan ketenagakerjaan, capaian TPAK Perempuan tahun 2025 sebesar 52,54 persen menunjukkan bahwa lebih dari separuh perempuan usia kerja di Kabupaten Gresik telah terlibat dalam pasar kerja. Akan tetapi, tingkat partisipasi tersebut masih lebih rendah dibandingkan partisipasi angkatan kerja laki-laki, sehingga kesenjangan partisipasi berdasarkan jenis kelamin masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan peran perempuan dalam kegiatan ekonomi masih perlu terus diperkuat sebagai bagian dari pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan, Pemerintah Kabupaten Gresik perlu terus memperkuat kebijakan dan program yang mendukung peningkatan akses perempuan terhadap kesempatan kerja. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, khususnya pada sektor industri pengolahan, perdagangan, dan jasa yang menjadi sektor unggulan daerah. Selain itu, perlu diperkuat kerja sama dengan pelaku usaha dan kawasan industri dalam rangka memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja perempuan serta meningkatkan kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja. Di samping itu, pengembangan kewirausahaan perempuan dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu terus didorong sebagai alternatif penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan. Optimalisasi layanan informasi pasar

kerja, fasilitasi penempatan tenaga kerja, serta penguatan perlindungan tenaga kerja perempuan juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pasar kerja formal. Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Gresik dapat meningkat secara berkelanjutan sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

  a. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

  Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan salah satu komponen utama dalam penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) melalui pendekatan pengeluaran, yang merepresentasikan aktivitas investasi riil dalam perekonomian daerah. Secara konseptual, sebagaimana didefinisikan dalam Sistem Neraca Nasional (SNA 2008) dan diadopsi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), PMTB mencerminkan perubahan aset tetap yang digunakan dalam proses produksi dengan umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak bersifat konsumtif. Oleh karena itu, PMTB sering digunakan sebagai indikator kapasitas produksi jangka menengah dan panjang suatu wilayah.

Tabel 2.139
Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Gresik

Uraian	*Incremental Capital Output Ratio* (ICOR)				
	2021	2022	2023	2024	2025
PMTB ADHB (Miliar Rupiah)	34.548,61	39.489,56	41.840,39	44.480,90	48.234,89
PMTB ADHK (Miliar Rupiah)	23.038,88	24.466,84	25.806,50	27.047,97	28.654,74
Pertumbuhan PMTB ADHK (Persen)	1,83	6,20	5,48	4,81	5,94

Sumber: BPS Gresik, 2025
Tahun 2023: Angka Sementara
Tahun 2024: Angka Sangat Sementara

Berdasarkan data BPS Kabupaten Gresik, nilai PMTB atas dasar harga berlaku (ADHB) menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2021–2024, dari Rp34.548,61 miliar pada tahun 2021

menjadi Rp44.480,90 miliar pada tahun 2024. Peningkatan nominal ini sejalan dengan dinamika harga dan aktivitas ekonomi yang tercermin dalam nilai transaksi investasi barang modal di Kabupaten Gresik. Namun demikian, untuk melihat pertumbuhan riil investasi, indikator yang lebih relevan adalah PMTB atas dasar harga konstan (ADHK). Nilai PMTB ADHK Kabupaten Gresik juga mengalami kenaikan secara berkelanjutan, dari Rp23.038,88 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp27.047,97 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan adanya penambahan aset tetap secara riil, baik berupa bangunan, infrastruktur, mesin, maupun peralatan produksi, yang memperluas kapasitas produksi daerah. Dari sisi laju pertumbuhan, PMTB ADHK Kabupaten Gresik tumbuh sebesar 1,83 persen pada tahun 2021, meningkat signifikan menjadi 6,20 persen pada tahun 2022, kemudian melambat menjadi 5,48 persen pada tahun 2023 dan 4,81 persen pada tahun 2024. Pola ini menunjukkan bahwa setelah mengalami percepatan pertumbuhan investasi pascapemulihan ekonomi, laju pertumbuhan PMTB cenderung mengalami normalisasi. Secara teoritis, kondisi ini lazim terjadi dalam fase transisi dari pemulihan menuju stabilisasi ekonomi, di mana ekspansi investasi tetap berlangsung namun dengan laju yang lebih moderat. PMTB ADHK Kabupaten Gresik kembali mengalami kenaikan menjadi Rp. 48.234,89 miliar pada tahun 2025.

PMTB memiliki peran strategis mengingat struktur ekonomi di Kabupaten Gresik ditopang oleh sektor-sektor yang relatif padat modal, seperti industri pengolahan, konstruksi, dan transportasi serta pergudangan. Investasi dalam bentuk bangunan industri, infrastruktur pendukung logistik, serta mesin dan peralatan produksi menjadi prasyarat utama bagi keberlanjutan aktivitas ekonomi sektor-sektor tersebut. Oleh karena itu, peningkatan PMTB secara riil mencerminkan penguatan basis produksi daerah, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap pembentukan output regional. Lebih lanjut, PMTB sebagai persentase terhadap PDRB (share PMTB terhadap PDRB) menggambarkan tingkat intensitas investasi dalam perekonomian daerah. Semakin besar kontribusi PMTB terhadap PDRB, semakin besar pula porsi sumber daya ekonomi yang dialokasikan untuk pembentukan kapasitas produksi masa depan, dibandingkan untuk konsumsi jangka pendek. Struktur PDRB yang ditopang oleh investasi yang

memadai merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun demikian, penting untuk ditegaskan bahwa PMTB hanya mencerminkan kuantitas akumulasi modal, bukan kualitas atau efisiensi pemanfaatannya. Oleh karena itu, peningkatan PMTB perlu dibaca secara paralel dengan indikator lain seperti pertumbuhan PDRB sektoral, produktivitas tenaga kerja, dan penyerapan tenaga kerja, agar dapat memberikan gambaran utuh mengenai efektivitas investasi dalam mendorong kinerja ekonomi daerah.

- Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

  a. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan

     Rumah tangga dengan akses hunian layak merupakan rumah tangga yang menempati rumah dengan standar kelayakan tertentu,ras meliputi kecukupan luas bangunan, ketersediaan akses air minum layak, fasilitas sanitasi yang memadai, serta kondisi lingkungan hunian yang aman dan sehat. Kelayakan hunian menjadi aspek penting dalam mendukung kualitas hidup masyarakat karena berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, seperti kesehatan, kebersihan, kenyamanan, dan keselamatan penghuni. Dengan terpenuhinya aspek-aspek tersebut, masyarakat dapat tinggal di lingkungan yang lebih aman, sehat, dan sejahtera sehingga turut memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial dan ekonomi keluarga.

     Hunian layak memiliki empat kriteria utama, yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses terhadap layanan sumber air minum layak, serta akses terhadap sanitasi layak. Indikator tersebut merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur capaian hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Ketahanan bangunan ditentukan berdasarkan kondisi bahan bangunan atap, dinding, dan lantai yang memenuhi persyaratan kelayakan. Sementara itu, kecukupan luas tempat tinggal diukur berdasarkan luas lantai per kapita minimal sebesar 7,2 m^2. Adapun perhitungan indikator akses terhadap hunian layak dilakukan dengan membandingkan jumlah rumah tangga yang memiliki hunian layak, terjangkau, dan

berkelanjutan terhadap jumlah seluruh rumah tangga, kemudian dikalikan seratus persen.

Tabel 2.140
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan Kabupaten Gresik

INDIKATOR	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
Rumah Tangga dengan Akes Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	71,30	72,00	78,00	81,47	86,24

Sumber: BPS Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Kabupaten Gresik menunjukkan tren peningkatan selama periode tahun 2021 hingga 2025. Kondisi ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas hunian masyarakat serta komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses terhadap tempat tinggal yang memenuhi standar kelayakan, keterjangkauan, dan keberlanjutan lingkungan.

Capaian indikator tersebut menunjukkan kinerja yang semakin baik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, persentase akses rumah tangga terhadap hunian layak tercatat sebesar 71,30%, kemudian terus mengalami peningkatan hingga mencapai 86,24% pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang telah menempati hunian dengan kondisi bangunan yang memadai, memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi layak, serta didukung oleh lingkungan permukiman yang aman dan sehat.

Selain itu, peningkatan capaian tersebut juga mengindikasikan adanya efektivitas program pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, baik melalui penanganan rumah tidak layak huni, penyediaan infrastruktur dasar permukiman, maupun pengembangan kawasan permukiman yang lebih tertata dan berkelanjutan. Dengan meningkatnya akses terhadap hunian layak, diharapkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gresik juga semakin meningkat.

b. Persentase Desa Mandiri

Persentase desa mandiri merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat daya saing daerah dari aspek pembangunan perdesaan. Semakin tinggi proporsi desa berstatus mandiri menunjukkan semakin baiknya kemampuan desa dalam menyelenggarakan pembangunan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan potensi ekonomi secara berkelanjutan. Status desa mandiri ditetapkan berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang mengukur ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan desa.

Kabupaten Gresik menunjukkan perkembangan yang positif dalam peningkatan status desa mandiri. Berdasarkan capaian Indeks Desa Membangun (IDM), pada tahun 2023 jumlah desa berstatus mandiri mencapai 222 desa dari total 330 desa atau sekitar 67,27 persen, sedangkan sisanya sebanyak 108 desa atau 32,73 persen berstatus desa maju. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik telah berhasil menghapus status desa berkembang, tertinggal, maupun sangat tertinggal sehingga seluruh desa berada pada kategori maju dan mandiri. Selain itu, nilai rata-rata IDM Kabupaten Gresik meningkat dari 0,8054 pada tahun 2022 menjadi 0,8386 pada tahun 2023, sehingga status IDM Kabupaten Gresik meningkat dari kategori maju menjadi mandiri.

Peningkatan persentase desa mandiri tersebut mencerminkan keberhasilan pembangunan perdesaan yang didukung oleh penguatan tata kelola pemerintahan desa, peningkatan kualitas pelayanan dasar, pengembangan ekonomi desa, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini juga menunjukkan semakin meningkatnya kapasitas desa dalam mengelola sumber daya dan potensi lokal untuk mendorong kesejahteraan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik telah menetapkan kebijakan percepatan pembangunan desa melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Mandiri sebagai landasan penguatan pembangunan desa yang partisipatif dan berdaya saing.

Dari perspektif daya saing daerah, tingginya persentase desa mandiri memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, pengurangan kesenjangan antarwilayah, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan investasi dan aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa. Desa yang mandiri umumnya memiliki kapasitas yang lebih baik dalam mengembangkan inovasi, mengelola potensi ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan jumlah desa mandiri menjadi salah satu modal penting dalam mendukung daya saing Kabupaten Gresik secara keseluruhan.

Tabel 2.141

Indikator Sasaran Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2025

INDIKATOR	TARGET					REALISASI				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Desa Mandiri	62,42 %	66,96 %	71,51 %	76,06 %	47,58 %	84,24 %	93,64 %	100,00 %	100 %	100 %

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Gresik, Tahun 2026

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik, persentase desa mandiri menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan dalam kurun waktu 2021–2025. Pada tahun 2021 capaian desa mandiri tercatat sebesar 62,42 persen dan meningkat menjadi 66,96 persen pada tahun 2022. Selanjutnya target tahun 2023 ditetapkan sebesar 71,51 persen dan meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 76,06 persen. Adapun pada tahun 2025 target ditetapkan sebesar 47,58 persen dengan realisasi capaian mencapai 100 persen.

Dari sisi realisasi kinerja, capaian persentase desa mandiri menunjukkan performa yang sangat baik. Realisasi tahun 2021 mencapai 84,24 persen, kemudian meningkat menjadi 93,64 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2023 hingga tahun 2025 realisasi indikator berhasil mencapai 100 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintahan desa di Kabupaten Gresik berjalan optimal melalui

peningkatan tata kelola pemerintahan desa, penguatan kelembagaan masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan potensi ekonomi desa secara berkelanjutan.

Secara umum, capaian indikator desa mandiri mencerminkan semakin meningkatnya kemampuan desa dalam memenuhi aspek ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan, sehingga mendukung terwujudnya kemandirian desa sebagai bagian dari penguatan pembangunan daerah pada urusan wajib non pelayanan dasar bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Persentase Desa Mandiri dan Maju sesuai Permendes No. 2 Tahun 2016 dihitung dari Jumlah Desa dengan Status Mandiri ditambah Jumlah Desa dengan Status Maju / Jumlah Seluruh Desa x 100%. Sedangkan status desa diperoleh dari Indeks Desa Membangun yaitu ukuran pengklasifikasian desa dalam rangka menentukan intervensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan desa. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan komposit dari indeks ketahanan lingkungan (ekologi), indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan sosial. Adapun klasifikasi status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal : < 0,491
2. Desa Tertinggal : > 0,491 dan < 0,599
3. Desa Berkembang : > 0,599 dan < 0,707
4. Desa Maju : > 0,707 dan < 0,815
5. Desa Mandiri : > 0,815

Tabel 2.142

Status Desa Kabupaten Gresik Tahun 2020 - 2024

No.	Status Desa	Jumlah Desa					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Mandiri	47	86	153	222	290	330
2	Maju	152	192	156	108	40	0
3	Berkembang	131	52	21	0	0	0

No.	Status Desa	Jumlah Desa					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
4	Tertinggal	0	0	0	0	0	0
5	Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Gresik, Tahun 2026

Berdasarkan data diatas, perkembangan status desa periode 2020–2025 menunjukkan peningkatan kualitas pembangunan dan kemandirian desa yang cukup signifikan. Jumlah desa berstatus mandiri mengalami peningkatan secara konsisten dari 47 desa pada tahun 2020 atau sekitar 14,24 persen dari total 330 desa menjadi 86 desa pada tahun 2021 (26,06 persen), 153 desa pada tahun 2022 (46,36 persen), 222 desa pada tahun 2023 (67,27 persen), 290 desa pada tahun 2024 (87,88 persen), hingga mencapai 330 desa atau 100 persen pada tahun 2025. Kondisi tersebut menunjukkan seluruh desa di Kabupaten Gresik telah mencapai status desa mandiri.

Sebaliknya, jumlah desa berstatus maju mengalami penurunan seiring meningkatnya status desa mandiri. Pada tahun 2020 desa maju tercatat sebanyak 152 desa atau 46,06 persen, meningkat menjadi 192 desa pada tahun 2021 (58,18 persen), kemudian menurun menjadi 156 desa pada tahun 2022 (47,27 persen), 108 desa pada tahun 2023 (32,73 persen), 40 desa pada tahun 2024 (12,12 persen), dan menjadi 0 desa pada tahun 2025. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya transformasi status desa maju menjadi desa mandiri.

Sementara itu, desa berkembang mengalami penurunan cukup drastis dari 131 desa atau 39,70 persen pada tahun 2020 menjadi 52 desa pada tahun 2021 (15,76 persen), 21 desa pada tahun 2022 (6,36 persen), dan telah mencapai 0 desa sejak tahun 2023 hingga 2025. Adapun desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal tercatat nihil selama periode 2020–2025.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Gresik akan berusaha terus mempertahankan status desa mandiri melalui penguatan kapasitas aparatur desa, optimalisasi pemanfaatan dana desa, pengembangan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), digitalisasi pelayanan desa, serta peningkatan kualitas infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

- Stabilitas Ekonomi Makro

a. Pajak Daerah terhadap PDRB

Pajak terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun penerimaan pajak dibandingkan dengan total nilai aktivitas ekonomi yang terjadi di suatu wilayah. ini diperoleh dengan membandingkan total penerimaan pajak daerah dengan nilai PDRB pada periode tertentu, kemudian dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi pajak terhadap PDRB, maka semakin besar kontribusi penerimaan pajak terhadap aktivitas ekonomi daerah tersebut. Sebaliknya, yang rendah menunjukkan bahwa potensi ekonomi yang berkembang belum sepenuhnya mampu diterjemahkan menjadi penerimaan pajak daerah.

Pajak terhadap PDRB memiliki peran yang sangat penting dalam menggambarkan kesehatan fiskal dan kemandirian suatu daerah. Indikator ini sering digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai pembangunan dari sumber pendapatan asli daerah tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Daerah dengan pajak yang baik umumnya memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat untuk mendanai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, pengembangan ekonomi daerah, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pengaruh pajak terhadap PDRB bagi suatu wilayah sangat luas, terutama terhadap kemampuan pembangunan daerah. yang tinggi menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi yang tumbuh mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan penerimaan daerah. Dengan meningkatnya penerimaan pajak, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai program prioritas pembangunan, memperluas investasi publik, meningkatkan kualitas jalan, pasar, pelabuhan, pendidikan, kesehatan, serta layanan dasar lainnya.

Tabel 2.143
Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Gresik

Uraian	Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Gresik				
	2021	2022	2023	2024	2025
Pajak Daerah	721.867.807.058,57	783.844.086.372,06	793.322.673.442,23	960.468.393.710,00	1.045.830.755.273,77
PDRB ADHK Miliar Rupiah	101.318,69	108.796,88	113.825,43	119.274,42	125.125,85
Tax Ratio	0,71%	0,72%	0,70%	0,81%	0,84%

Sumber: BPS Gresik, Data Diolah 2026
Tahun 2024: Angka Sementara
Tahun 2025: Angka Sangat Sementara

Pajak daerah Kabupaten Gresik selama lima tahun terakhir terus berfluktuasi ke arah positif dengan realisasi pajak pada tahun 2021 sebesar Rp. 867.143.325.919,57 menjadi Rp. 1.045.830.755.273,77 pada tahun 2025. Selama tahun 2021-2025 instrumen pajak daerah mengalami pertumbuhan penerimaan pajak secara bertahap yang berasal dari pajak Reklame, PBJT Makanan- Minuman, Pajak Barang dan Jasa Tertentu selanjutnya disebut PBJT Tenaga Listrik, PBJT Jasa Perhotelan, PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Sedangkan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), PBJT Jasa Parkir terus masih terus berfluktuasi.

Tabel 2.144
Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik Kabupaten Gresik

Uraian	Rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025				
	2021	2022	2023	2024	2025
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH					
4.1.01 Pajak Daerah	867.143.325.919,57	907.533.604.112,06	942.497.544.442,23	1.101.355.865.221,00	1.045.830.755.273,77
4.1.01.09 Pajak Reklame	3.875.010.190,59	4.030.506.375,63	5.639.185.066,00	7.783.058.019,00	8.403.640.649,00

Uraian	Rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025				
	2021	2022	2023	2024	2025
4.1.01.12 Pajak Air Tanah	1.255.623.557,00	2.125.064.895,00	6.705.992.427,00	6.967.335.242,00	6.097.095.679,00
4.1.01.14 Pajak MBLB	2.218.610.800,00	2.251.649.925,00	3.840.891.875,00	4.352.435.000,00	3.226.328.000,00
4.1.01.15 PBB	132.192.298.604,00	148.984.819.094,00	168.121.466.475,00	204.389.112.455,00	198.931.876.007,00
4.1.01.16 BPHTB	324.489.139.661,00	342.114.201.637,00	309.257.375.637,20	407.576.657.510,00	307.252.562.025,00
4.1.01.19 PBJT					
4.1.01.19.01 PBJT Makanan- Minuman	20.148.003.136,75	26.922.495.355,43	33.311.079.002,03	39.355.268.944,00	46.010.853.387,00
4.1.01.19.02 PBJT Tenaga Listrik	225.094.286.367,23	240.597.551.084,00	246.524.138.974,00	269.653.244.700,00	273.336.696.393,77
4.1.01.19.03 PBJT Jasa Perhotelan	7.907.199.517,00	9.517.372.625,00	11.575.690.413,00	12.973.185.049,00	10.376.095.268,00
4.1.01.19.04 PBJT Jasa Parkir	4.230.162.300,00	5.222.265.470,00	5.175.166.000,00	3.346.693.618,00	3.427.540.292,00
4.1.01.19.05 PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	457.472.925,00	2.078.159.911,00	3.171.687.573,00	4.058.945.384,00	4.296.290.423,00
4.1.01.20 Opsen PKB					
4.1.01.20.01 Opsen PKB	94.644.185.328,00	72.164.342.320,00	95.170.082.800,00	88.657.318.300,00	125.716.470.050,00
4.1.01.21 Opsen BBNKB					
4.1.01.21.01 Opsen BBNKB	50.631.333.533,00	51.525.175.420,00	54.004.788.200,00	52.242.611.000,00	58.755.307.100,00

Sumber: BPPKAD Gresik Audited, Data Diolah 2026

b. Angka Inflasi

Inflasi merupakan suatu kondisi meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu periode tertentu yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Sebagai salah satu indikator makroekonomi yang penting, inflasi mencerminkan tingkat stabilitas harga dan menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pengendalian inflasi menjadi perhatian penting dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi,

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Andil Inflasi *Year-onYear (Y-on-Y)* Menurut kelompok pengeluaran, Tingkat inflasi tiga paling tinggi berada di kelompok perawatan pribadi & jasa lainya sebesar 6,70% yang mengindikasikan adanya peningkatan biaya jasa dan kebutuhan rumah tangga tertentu. Selanjutnya pada kelompok makanan, minuman & tembakau sebesar 4,93%, kelompok tersebut perlu mendapat perhatian utama karena selain mengalami inflasi relatif tinggi , kelompok ini umumnya memiliki bobot terbesar dalam struktur pengeluaran Masyarakat. Kelompok Pendidikan sebesar 4,01% hal tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh kenaikan biaya Pendidikan dan jasa terkait.

Tingkat Inflasi *Year-onYear (Y-on-Y)* Kabupaten Gresik selama periode Mei 2025 hingga Mei 2026 menunjukkan tren yang berfluktuasi. Inflasi meningkat secara bertahap dari 0,60 persen pada Mei 2025 menjadi 2,44 persen pada Desember 2025, kemudian mencapai puncaknya pada Februari 2026 sebesar 3,96 persen. Setelah itu, inflasi mengalami penurunan menjadi 3,05 persen pada Mei 2026, hal tersebut masih menunjukkan adanya tekanan harga yang cukup moderat. Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum harga barang dan jasa di Kabupaten Gresik masih mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, namun relatif terkendali dibandingkan dengan puncak inflasi yang terjadi pada Februari 2026 sebesar 3,96 persen.

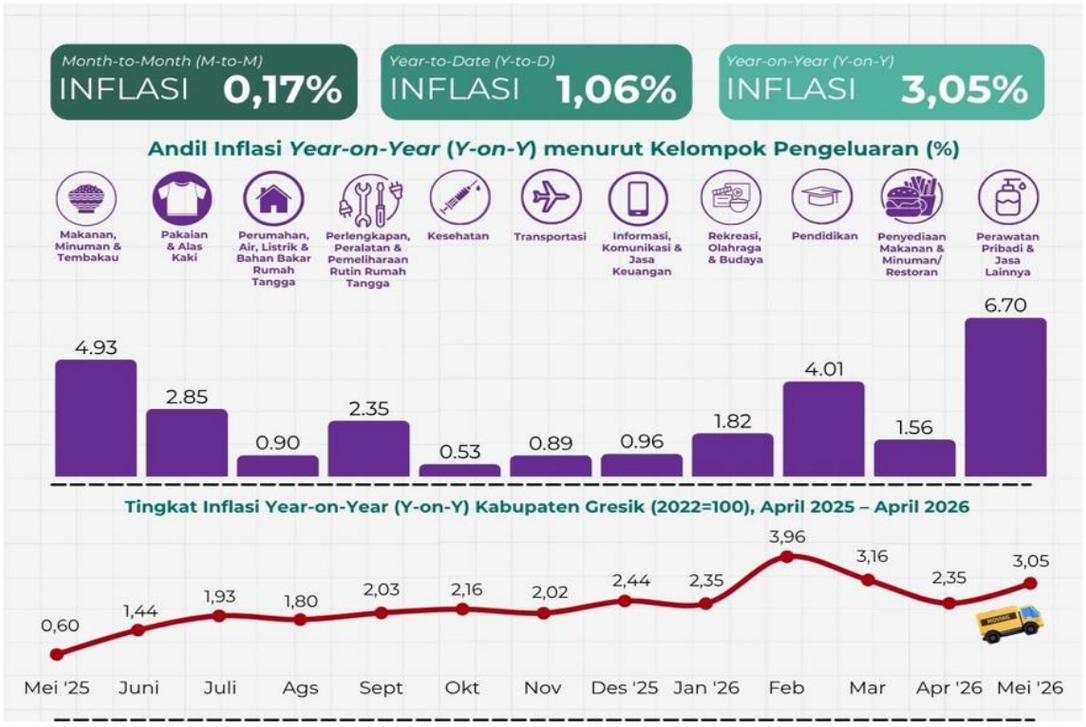

Gambar 2.4 Tingkat Inflasi Kabupaten Gresik Bulan April 2025-April 2026

Sumber: BPS Kabupaten Gresik, 2026

- Standar Pelayanan Minimum

a. Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang wajib diperoleh setiap warga negara secara minimal sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang menjadi pedoman teknis pelaksanaan SPM bidang pendidikan oleh pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Gresik terus berupaya memenuhi target SPM pendidikan guna menjamin akses dan kualitas layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat, khususnya pada jenjang pendidikan dasar. Pelaksanaan SPM pendidikan di Kabupaten Gresik menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan layanan pendidikan. Berbagai program telah dilaksanakan untuk memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh layanan pendidikan yang layak, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan,

peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pemberian bantuan pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.

Tabel 2.145

Capaian Indikator pStandar Pelayanan Minimal Pendidikan Kabupaten Gresik

No.	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Skor Kemampuan Literasi SD	57,29	60,55	61,86	70,47	65,76
2	Skor Kemampuan Literasi SMP	66,28	68,83	70,95	80,76	81,40
3	Skor Kemampuan Numerasi SD	39,01	44,64	45,47	60,19	55,29
4	Skor Kemampuan Numerasi SMP	55,37	57,08	58,07	69,13	69,95
5	Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	88,94	91,00	91,00	77,79	100,00
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 15	99,35	99,32	99,31	99,29	99,22
7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 18	6,35	9,40	9,39	24,54	49,12
8	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	93,42	91,10	91,10	91,36	88,70
9	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	91,04	91,44	91,43	91,51	97,87
10	Iklim Inklusivitas SD	69,68	77,78	57,46	62,30	59,31
11	Iklim Inklusivitas SMP	67,19	76,65	56,07	61,11	63,20
12	Iklim Keamanan SD	74,27	85,60	71,43	78,00	74,37
13	Iklim Keamanan SMP	79,34	82,36	68,26	73,00	73,26
14	Iklim Kebinekaan SD	64,98	91,76	70,51	75,57	67,59
15	Iklim Kebinekaan SMP	65,56	85,58	68,01	72,67	69,32

Sumber : Rapor Pendidikan

b. Kesehatan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan 06 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Hasil capaian adalah realisasi dari target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah. Berikut rincian capaian urusan kesehatan di Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025:

Tabel 2.146
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan
Tahun 2021 – 2025

No	Indikator	2021		2022		2023		2024		2025	
		Sasaran	Realisasi	Sasaran	Realisasi	Sasaran	Realisasi	Sasaran	Realisasi	Sasaran	Realisasi
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	21.993	19.298	22.058	18.856	22.136	17.857	20.032	16.166	16462	15.078
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	20.994	18.941	21.056	18.751	21.130	18.202	20.032	16.687	16462	15.722
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	19.994	18.901	20.053	18.602	20.124	18.415	19.333	16.585	16259	15.492
4	Pelayanan Kesehatan Balita	82.641	84.528	82.914	82.914	83.264	85.051	77.157	89.410	76109	67.488
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar	157.528	108.414	177.669	162.652	178.412	160.501	182.781	182.781	186069	183712
6	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	893.447	178.478	902.513	369.351	908.044	834.813	902.130	921.721	887789	957.822
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	92.471	77.726	96.460	90.501	157.129	154.148	218.742	218.742	170496	173014
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	373.067	55.596	383.331	98.180	236.030	214.749	96.820	97.053	98476	99.916
9	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes melitus	44.071	40.300	45.284	45.284	48.366	48.366	48.407	48.882	46550	48.499
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	2.520	1.889	2.520	2.102	2.601	2.160	2.586	1.394	2.540	2554
11	Pelayanan Kesehatan orang dengan terduga tuberculosis	15.590	7.809	16.416	16.416	18.112	18.091	20.583	24.463	19.217	26.686
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*)	15.468	13.826	26.059	22.613	25.760	26.584	24.154	29.817	19402	22.822

Activate W
Go to Settings

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, Tahun 2026

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang urusan Pekerjaan Umum telah diatur lebih lanjut sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023

Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat. Standar Pelayanan Minimal sub urusan pekerjaan umum yang selanjutnya disebut SPM Pekerjaan Umum adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan pekerjaan umum yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Adapun jenis pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya pada bidang urusan Pekerjaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, yaitu:

1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.
   Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik.
   Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Tahun 2024 capaian SPM urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik mencapai angka 100%. Berikut rincian capaian urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Gresik:

Tabel 2.147
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan
Pekerjaan Umum Tahun 2021 - 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Output	Target					Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari Hari	Jumlah warga negara yang memperolah kebutuhan pokok air minum sehari hari	1.299.547	404.702	55.610	39.367	3.908	838.005	246.191	55.160	39.430	4.284
2.	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	1.299.547	404.702	6.370	2.818	4.392	730.761	390.150	6.370	4.143	7.492

Sumber : Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab.Gresik

Berdasarkan Tabel 2.143 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021–2025, capaian layanan dasar bidang pekerjaan umum menunjukkan fluktuasi pada dua jenis pelayanan utama, yaitu penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik.

Pada pelayanan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari, jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum mengalami penurunan, target pelayanan pada tahun 2021 ditetapkan sebanyak 1.299.547 jiwa dengan realisasi mencapai 838.091 jiwa atau sekitar 64,49% dari target. Pada tahun 2022 target disesuaikan menjadi 404.702 jiwa, dengan realisasi sebanyak 246.191 jiwa atau 60,83%. Selanjutnya pada tahun 2023 target sebanyak 55.610 jiwa hampir sepenuhnya tercapai dengan realisasi 55.160 jiwa atau 99,19%. Kinerja tersebut terus meningkat pada tahun 2024, di mana realisasi mencapai 39.430 jiwa, sedikit melampaui target sebesar 39.367 jiwa 100,16%. Hingga tahun 2025, realisasi pelayanan kembali melebihi target, yaitu 4.284 jiwa dibandingkan target 3.908 jiwa, sehingga capaian mencapai 109,62%. Meskipun capaian pada tahun 2021 dan 2022

masih berada di bawah target, berbagai upaya peningkatan pelayanan dan pembangunan infrastruktur dasar telah memberikan hasil yang signifikan. Hal ini tercermin dari capaian tahun 2024 dan 2025 yang telah memenuhi bahkan melampaui target pada pelayanan Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari.

Sementara itu, pada pelayanan pengelolaan air limbah domestik, target tahun 2021 sebesar 1.299.547 jiwa berhasil direalisasikan sebesar 730.761 jiwa atau sekitar 56,23% dari target. Pada tahun 2022 target pelayanan sebesar 404.702 jiwa dengan realisasi 390.150 jiwa atau 96,40%. Tahun 2023 menunjukkan capaian optimal, di mana target 6.370 jiwa berhasil direalisasikan seluruhnya (100%). Kinerja semakin meningkat pada tahun 2024 dengan realisasi 4.143 jiwa, melampaui target 2.818 jiwa atau sekitar 147,02%. Tren positif tersebut berlanjut pada tahun 2025, ketika realisasi mencapai 7.492 jiwa, jauh melampaui target 4.392 jiwa dengan tingkat capaian sekitar 170,59%.

Meningkatnya capaian pelayanan pengelolaan air limbah domestik pada periode 2023–2025 didukung oleh berbagai faktor, baik dari aspek kebijakan, pendanaan, maupun pelaksanaan program. Dari sisi kebijakan, adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) mendorong penguatan perencanaan dan penganggaran yang lebih terarah pada peningkatan akses sanitasi layak bagi masyarakat.

Dari aspek infrastruktur, peningkatan pembangunan serta rehabilitasi sarana dan prasarana sanitasi, seperti pembangunan tangki septik individual, tangki septik komunal, Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), dan jaringan perpipaan air limbah pada kawasan tertentu, turut memperluas cakupan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, optimalisasi operasi dan pemeliharaan sarana sanitasi yang telah tersedia juga meningkatkan keberlanjutan layanan.

Capaian tersebut juga didukung oleh sinergi pendanaan dari berbagai sumber, baik APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun dukungan program pemerintah pusat dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan percepatan pembangunan infrastruktur sanitasi di wilayah yang masih memiliki tingkat pelayanan rendah.

Secara umum, capaian penerapan SPM bidang pekerjaan umum selama periode 2021–2025 menunjukkan perlunya penguatan program penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah domestik agar pelayanan dasar kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Standar Pelayanan Minimal sub urusan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut SPM Perumahan Rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan Perumahan Rakyat yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Gresik dengan rincian jenis pelayanan terdiri atas: Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten. Penerima layanan dasar SPM Perumahan Rakyat merupakan warga negara yang terkena bencana dan warga negara yang terdampak relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni. Hasil capaian adalah realisasi dari target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan. Tahun 2025 capaian SPM urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Gresik mencapai angka 100% dengan dua jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

Tabel 2.148
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021 - 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Output	Target					Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Rumah Korban Bencana yang berhak memperoleh rumah tidak layak huni	62	4	41	3468	936	62	4	41	3468	864
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten	Jumlah rumah korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	14	141	0	0	0	5	141	0	0

Sumber : Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab.Gresik

Pada indikator penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten, target pelayanan menunjukkan fluktuasi sesuai dengan jumlah kebutuhan penanganan akibat kejadian bencana setiap tahunnya. Pada tahun 2021 ditetapkan target sebanyak 62 unit dan seluruhnya berhasil direalisasikan (100%). Tahun 2022 ditargetkan 4 unit dan juga terealisasi seluruhnya. Pada tahun 2023 target meningkat menjadi 41 unit, yang seluruhnya dapat dipenuhi. Selanjutnya pada tahun 2024 target ditetapkan sebanyak 346 unit, namun realisasi mencapai 3.468 unit, atau jauh melampaui target yang ditetapkan. Kondisi serupa terjadi pada tahun 2025, di mana realisasi 864 unit juga telah memenuhi bahkan melampaui target sebanyak 936 unit. Secara umum, capaian tersebut menunjukkan respons pemerintah daerah yang semakin baik dalam memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat terdampak bencana.

Sementara itu, pada indikator fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten, target

pelayanan bersifat situasional karena sangat bergantung pada adanya program relokasi yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Pada tahun 2022 ditetapkan target 14 unit dan terealisasi 5 unit, sedangkan pada tahun 2023 target meningkat menjadi 141 unit dan seluruhnya berhasil direalisasikan. Pada tahun 2021, 2024, dan 2025 tidak ditetapkan target maupun realisasi karena tidak terdapat kebutuhan relokasi masyarakat yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten

Secara keseluruhan, capaian pelayanan dasar bidang perumahan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terutama bagi korban bencana. Meskipun demikian, keberlanjutan program rehabilitasi rumah dan penyediaan hunian bagi masyarakat terdampak relokasi tetap perlu diperkuat guna memastikan terpenuhinya standar pelayanan dasar bidang perumahan secara optimal.

e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, merupakan manifestasi kehadiran negara dalam menjamin hak dasar warga negara atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman bencana maupun gangguan ketertiban. Melalui standarisasi layanan pada sub-urusan Satpol PP, Penanggulangan Bencana, dan Pemadam Kebakaran, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk tidak hanya merespons gangguan secara reaktif, tetapi juga membangun sistem mitigasi yang terukur dan akuntabel. Dengan penguatan koordinasi lintas sektor dan pengalokasian sumber daya yang tepat, implementasi SPM ini menjadi fondasi krusial bagi terciptanya stabilitas sosial yang mendukung keberlanjutan pembangunan

dan aktivitas ekonomi masyarakat. Tahun 2025 capaian SPM urusan Trantibumlinmas Kabupaten Gresik mencapai angka 100% dengan lima jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

Tabel 2.149

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022 – 2025

No	Pelayanan Dasar	Output	Realisasi			
			2022	2023	2024	2025
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/kota	1.311.215	5.186	997	3.716
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	71.200	137.763	462.807	654.446
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	65.674	42.770	566	91.337
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	297.256	381.421	213.625	161.913
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	580	911	1.034	1.006

Sumber: Dinas Pol-PP, Dinas Damkar dan BPBD Kabupaten Gresik, Tahun 2025

Tabel 2.150

Mutu Minimal Layanan Dasar Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Tahun 2025

No	JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI	REALISASI 2025
1	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP	125 unit
2	Pemenuhan Standar Openal Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta p	1 dokumen
3	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM	105 orang
4	Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	1 Dokumen
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	0
7	Penyusunan Kajian Risiko Bencana	100%
8	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	100%
9	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	100%
10	Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)	100%
11	Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi	100%
12	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%
13	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaaan terhadap Bencana	100%
14	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%
15	Respon Cepat Darurat Bencana	100%
16	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	100%

No	JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI	REALISASI 2025
17	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	173 layanan
18	Pemenuhan Standar Openal Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	2 dokumen
19	Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	100 unit
20	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	2 orang
21	Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	0
22	Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	0

Sumber: Dinas Satpol PP, dinas damkar dan BPBD Kabupaten Gresik, 2026

f. Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahaan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah dibidang Urusan Sosial antara lain:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti sosial;
2. Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di luar panti sosial;
3. Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia terlantar di luar panti sosial;
4. Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti sosial;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 2.151
Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial
Tahun 2021 - 2025

No	Pelayanan Dasar	Output	Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah Warga Kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	1.442	555	737	6.309	2.545
2.	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	7.012	13.953	6.877	7.351	6.063
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	28.977	19.196	17,825	19.529	16.546
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	300	1.024	101	224	120
5.	Perlindungan dan jaminnan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat & pasca	6.419	2.532	5,545	9.829	8.649

Sumber: Dinas Sosial, Tahun 2026

- Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Capaian kinerja BUMD Kabupaten Gresik menunjukkan adanya dukungan nyata BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah, khususnya melalui kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah, pelayanan publik, dan penguatan sektor ekonomi daerah. PT. Gresik Migas menjadi kontributor terbesar dalam pencapaian indikator rata-rata capaian kinerja BUMD, disusul Giri Tirta dan BPR Bank Gresik. Kondisi ini mencerminkan bahwa keberhasilan pengelolaan BUMD turut mendukung target-target kinerja perangkat daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pengelolaan sumber daya daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, sinergi antara perangkat daerah dan BUMD menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, produktif, dan berorientasi pada hasil pembangunan daerah.

Tabel 2.152

Rincian Target dan Realisasi Kinerja BUMD Tahun 2025

NO	BUMD	TARGET	REALISASI	%
1	Giri Tirta	343.992.217.000	275.772.118.970	80,17
2	PT. Gresik Migas	635.000.000	2.633.813.041	414,77
3	BPR Bank Gresik	11.688.219.301	9.327.682.191	79,80
	Rata-Rata Capaian Kinerja BUMD			191,58

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, Tahun 2026

Rata-rata dukungan capaian kinerja BUMD Kabupaten Gresik menunjukkan nilai 191,58%. Angka ini merupakan hasil konsolidasi dari tiga pilar utama BUMD Kabupaten Gresik, yaitu Perumda Giri Tirta, PT Gresik Migas, dan Perumda BPR Bank Gresik. Pencapaian ini berarti target-target yang ditetapkan dalam rencana kerja tahunan berhasil dilampaui jauh di atas ekspektasi awal. Hal ini bisa terjadi karena PT. Gresik Migas berfokus pada penyediaan bahan bakar minyak sektor ritel dan pengelolaan infrastruktur energi daerah melalui openal 2 unit SPBUN dan 1 unit Pertashop. Sedangkan BPR Bank Gresik mampu mempertahankan predikat bank sehat dengan tata kelola yang kuat, dibuktikan dengan raihan penghargaan Indonesian Platinum Award 2025 kategori "*The Best*

Performance Bank with Good Corporate Governance of The Year". Di sisi lain, Giri Tirta menerima penghargaan Radar Surabaya Award Tahun 2025 untuk komitmen pelayanan dan upaya manajemen dalam melakukan digitalisasi layanan serta penanganan keluhan pelanggan secara lebih responsif dibandingkan periode sebelumnya.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD bertujuan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan dan hasil dari program dan kegiatan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD menjadi alat untuk meningkatkan akuntanbilitas dan transparansi pemerintah daerah kepada masyarakat. Dengan memberikan informasi yang jelas dan terukur mengenai pencapaian dan kinerja pemerintah daerah. Secara lebih rinci mengenai rincian evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD serta realisasi anggaran terlampir pada Buku II Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kabupaten Gresik Triwulan IV Tahun 2025. Adapun ringkasan Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kabupaten Gresik Triwulan IV Tahun 2025 berdasarkan urusan tersaji pada Tabel berikut ini :

Tabel. 2.153

Tabel Rekapitulasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Triwulan IV Tahun 2025

No.	Kode	Uraian Bidang Urusan	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.048.491.411.916,00	127,17	115,56	1.114.951.765.994,00	106,34
2	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	756.269.660.586,00	141,98	109,33	684.461.242.283,00	90,5
3	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	262.273.194.651,00	5101,87	117,59	169.690.721.067,00	64,7
4	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	44.967.675.553,00	168,22	100,6	41.581.638.498,00	92,47
5	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	48.911.611.574,00	98,28	81,81	34.521.938.875,00	70,58

No.	Kode	Uraian Bidang Urusan	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
		SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
6	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	25.483.859.325,00	218,24	127,55	27.775.671.999,00	108,99
7	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	15.007.433.590,00	100,1	125,39	10.185.918.493,00	67,87
8	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.275.162.380,00	113,26	116,74	962.142.018,00	75,45
9	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	1.412.299.058,00	126,69	195,45	424.146.520,00	30,03
10	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	64.318.548.535,00	73,23	58,89	10.679.347.851,00	16,6
11	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	57.646.177.200,00	107,71	105,02	48.229.326.553,00	83,66
12	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	12.849.722.515,00	246,67	85,09	10.516.184.804,00	81,84
13	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	17.378.807.017,00	146,77	108,32	17.175.600.308,00	98,83
14	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	21.239.845.927,00	92,48	204,81	18.914.404.263,00	89,05
15	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	69.377.352.924,00	20079,77	95,25	62.067.505.033,00	89,46
16	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	20.669.861.319,00	77,22	239,94	11.985.100.981,00	57,98
17	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	16.532.629.696,00	84	85,37	13.773.875.061,00	83,31
18	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	14.793.777.811,00	341,26	128,76	11.765.825.098,00	79,53
19	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	25.444.679.612,00	147,87	96,67	22.547.373.518,00	88,61
20	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	62.940.400,00	146,97	105,56	62.446.518,00	99,22
21	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	55.338.000,00	50	100	62.483.500,00	112,91
22	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.850.967.354,00	100	100,67	1.530.532.555,00	82,69
23	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	7.316.782.098,00	75,22	102,81	6.267.568.876,00	85,66

No.	Kode	Uraian Bidang Urusan	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja		Realisasi Keuangan	
				Ind Prog	Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
24	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	117.087.400,00	124,4	100	140.523.250,00	120,02
25	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	9.323.371.303,00	114,97	102,27	7.200.899.867,00	77,23
26	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	1.304.508.162,00	164,67	86,46	1.438.793.535,00	110,29
27	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	40.520.661.702,00	106,69	1211,87	35.902.133.962,00	88,6
28	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	30.730.570.842,00	102,86	40,39	27.398.023.927,00	89,16
29	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	21.196.576.336,00	92,91	230	18.280.282.531,00	86,24
30	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	115.301.156.385,00	106,07	187,31	84.632.327.169,00	73,4
31	4.02	SEKRETARIAT DPRD	110.215.690.389,00	135,22	263,9	83.193.711.380,00	75,48
32	5.01	PERENCANAAN	15.571.375.690,00	88,89	97,17	14.236.217.341,00	91,43
33	5.02	KEUANGAN	900.544.999.522,00	103,26	27,67	806.747.060.654,00	89,58
34	5.03	KEPEGAWAIAN	12.289.040.692,00	98,14	98,12	10.714.964.667,00	87,19
35	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	4.704.024.943,00	96,63	100	4.028.307.949,00	85,64
36	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.835.427.780,00	109,33	100	1.946.956.066,00	68,67
37	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	31.072.512.995,00	96,6	193,98	14.998.736.429,00	48,27
38	7.01	KECAMATAN	106.820.475.222,00	75,51	94,59	81.205.059.152,00	76,02
39	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	25.575.108.781,00	83,17	282,21	23.359.918.705,00	91,34
	TOTAL		3.961.752.327.185,00	146,44	147,46	3.535.556.677.250,00	89,24

Sumber: SIPD Modul Pengendalian dan Evaluasi, Tahun 2025

Berdasarkan hasil Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 dihasilkan rata-rata pencapaian kinerja dan hasil penyerapan anggaran sampai tanggal 31 Desember 2025 dengan predikat kinerja outcome rata-rata 146,44 % atau berkategori Sangat Tinggi (ST), sedang untuk predikat kinerja output sebesar 147, 46 %. Berdasarkan hasil evaluasi memperlihatkan beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama, antara lain:

1. Terbatasnya ruang fiskal daerah akibat penyesuaian kebijakan dan dinamika pendapatan, sehingga memerlukan penyesuaian skala prioritas pada tahap pelaksanaan akhir tahun anggaran.

2. Keterlambatan realisasi fisik dan keuangan pada sebagian perangkat daerah, khususnya pada kegiatan pengadaan barang dan jasa, masih menjadi hambatan utama. Proses persiapan dokumen teknis, penyesuaian spesifikasi, serta dinamika pelaksanaan kontrak menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak sepenuhnya optimal hingga akhir tahun anggaran.

3. Kualitas perencanaan kegiatan pada tahap awal masih perlu ditingkatkan, yang tercermin dari adanya perubahan jadwal pelaksanaan, revisi output, serta penyesuaian pagu anggaran pada saat pelaksanaan. Hal ini berdampak pada efektivitas pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah.

4. Kapasitas dan pemerataan kompetensi sumber daya manusia pelaksana kegiatan belum sepenuhnya merata, terutama dalam penguasaan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan berbasis digital, sehingga memengaruhi ketepatan waktu dan akurasi pelaporan kinerja Triwulan IV.

5. Koordinasi lintas perangkat daerah pada kegiatan yang bersifat terintegrasi masih belum optimal, khususnya dalam penyelarasan peran dan tanggung jawab antar sektor, yang berdampak pada belum maksimalnya capaian indikator program lintas urusan.

Adapun tindak lanjut untuk pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik untuk tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kualitas perencanaan berbasis kinerja dan hasil *(outcome-oriented planning)* dengan memastikan setiap program dan kegiatan dalam RKPD memiliki indikator kinerja yang terukur, realistis, dan selaras dengan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

2. Penyelarasan perencanaan dan penganggaran yang lebih konsisten, dengan menekan perubahan kegiatan dan pagu anggaran pada tahap

pelaksanaan melalui perencanaan yang matang dan berbasis kebutuhan riil sejak tahap penyusunan RKPD.

3. Penguatan integrasi dan sinergi program lintas perangkat daerah, khususnya pada program prioritas daerah dan isu strategis, agar pelaksanaan pembangunan lebih efektif, efisien, dan berdampak langsung terhadap masyarakat.

4. Peningkatan efektivitas monitoring dan evaluasi berkala, dengan pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan, penyempurnaan kebijakan, serta penyesuaian program dan kegiatan pada RKPD tahun berikutnya.

5. Penguatan dukungan kebijakan dan kapasitas fiskal daerah, melalui optimalisasi pendapatan daerah dan pemanfaatan sumber pendanaan alternatif, guna menjamin keberlanjutan pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

1. Lemahnya Ketahanan Ekologi dan Mitigasi Bencana Hidrometeorologi

Kabupaten Gresik memiliki karakteristik wilayah yang beragam, mulai dari kawasan pesisir, kepulauan, dataran rendah, hingga wilayah yang dilalui Sungai Bengawan Solo, Kali Lamong, dan Kali Surabaya. Kondisi geografis tersebut menjadikan sebagian wilayah memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, genangan, abrasi pantai, kekeringan, serta cuaca ekstrem. Variasi topografi, jenis tanah, dan distribusi curah hujan antarwilayah turut memengaruhi tingkat risiko bencana dan kualitas daya dukung lingkungan. Di sisi lain, perkembangan kawasan industri, permukiman, dan aktivitas ekonomi meningkatkan tekanan terhadap fungsi lingkungan hidup apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan ruang yang berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketahanan ekologi masih menjadi tantangan penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Selain dipengaruhi oleh faktor alam, kerentanan lingkungan juga disebabkan oleh belum optimalnya upaya konservasi sumber daya alam, pengendalian pencemaran, rehabilitasi kawasan kritis, serta penguatan kapasitas mitigasi bencana di tingkat daerah. Pengelolaan daerah aliran sungai, kawasan pesisir, serta ruang terbuka hijau masih memerlukan sinergi lintas sektor agar mampu mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Adaptasi terhadap perubahan iklim juga perlu diperkuat melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh, sistem peringatan dini, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Upaya tersebut menjadi semakin penting mengingat pembangunan ekonomi Kabupaten Gresik sangat bergantung pada keberlanjutan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, penguatan ketahanan ekologi dan mitigasi bencana hidrometeorologi menjadi salah satu permasalahan utama yang perlu mendapatkan perhatian dalam RPJMD Kabupaten Gresik

2. Keterbatasan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Gresik masih menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, kompetensi, serta produktivitas masyarakat. Meskipun berbagai indikator pembangunan manusia menunjukkan kecenderungan meningkat, kualitas SDM belum sepenuhnya mampu mengikuti dinamika perkembangan kawasan industri, transformasi digital, dan perubahan struktur ekonomi daerah. Masih terdapat kesenjangan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan antarwilayah yang berdampak pada belum meratanya kualitas sumber daya manusia. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing di tengah perkembangan teknologi serta globalisasi ekonomi. Dengan demikian, peningkatan kualitas SDM masih menjadi pekerjaan besar dalam mendukung pembangunan daerah.

Selain kualitas layanan dasar, tantangan juga muncul pada aspek penguasaan keterampilan, inovasi, dan kemampuan adaptasi masyarakat terhadap kebutuhan pembangunan masa depan. Pengembangan kompetensi masyarakat belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebutuhan sektor unggulan daerah sehingga produktivitas tenaga kerja masih dapat

ditingkatkan. Perubahan teknologi yang berlangsung cepat menuntut peningkatan literasi digital, penguasaan ilmu pengetahuan, dan keterampilan baru agar masyarakat mampu bersaing di dunia kerja. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi, maka kesenjangan kualitas SDM berpotensi menghambat peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berkarakter menjadi prioritas utama dalam mendukung pembangunan Kabupaten Gresik.

3. Kemiskinan Kronis Perkotaan dan Kemiskinan Multidimensi

Kemiskinan di Kabupaten Gresik masih menjadi salah satu tantangan pembangunan meskipun pertumbuhan ekonomi daerah relatif tinggi dibandingkan daerah lain di Jawa Timur. Permasalahan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, perumahan, sanitasi, air bersih, dan pelayanan dasar lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menghadapi berbagai bentuk deprivasi yang saling berkaitan sehingga memerlukan penanganan secara komprehensif. Selain itu, karakteristik kemiskinan di kawasan perkotaan semakin kompleks akibat urbanisasi, meningkatnya kebutuhan hidup, serta kesenjangan akses terhadap kesempatan ekonomi. Oleh karena itu, kemiskinan perlu dipandang sebagai permasalahan multidimensi yang memerlukan pendekatan lintas sektor.

Di sisi lain, manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat sehingga masih terdapat kantong-kantong kemiskinan yang memerlukan perhatian khusus. Kelompok masyarakat rentan masih menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pekerjaan produktif, akses pembiayaan, perlindungan sosial, dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Penanganan kemiskinan juga memerlukan integrasi program antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat agar intervensi yang dilakukan lebih efektif dan tepat sasaran. Penguatan basis data kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar menjadi faktor penting dalam mempercepat penurunan kemiskinan. Dengan demikian, percepatan pengurangan kemiskinan kronis perkotaan dan kemiskinan

multidimensi menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan Kabupaten Gresik.

4. Tingkat Pengangguran dan Ketidaksesuaian Keterampilan dengan Kebutuhan Industri

Kabupaten Gresik merupakan salah satu kawasan industri strategis di Jawa Timur yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional. Perkembangan sektor industri, perdagangan, dan jasa telah menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi masyarakat. Namun demikian, pertumbuhan kesempatan kerja tersebut belum sepenuhnya mampu mengurangi tingkat pengangguran secara optimal karena masih terdapat kesenjangan antara ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Sebagian tenaga kerja lokal belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan teknologi, digitalisasi, dan kebutuhan industri berbasis keterampilan tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan penyerapan tenaga kerja lokal belum berlangsung secara maksimal meskipun aktivitas ekonomi daerah terus berkembang.

Ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dipengaruhi oleh belum optimalnya keterkaitan antara dunia pendidikan, pelatihan kerja, dan kebutuhan pasar kerja. Penguatan pendidikan vokasi, sertifikasi kompetensi, serta peningkatan kerja sama antara pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan pelaku usaha masih perlu terus ditingkatkan agar menghasilkan tenaga kerja yang adaptif dan berdaya saing. Selain itu, perkembangan transformasi industri menuntut peningkatan kemampuan digital, inovasi, dan penguasaan teknologi sebagai kompetensi dasar tenaga kerja masa depan. Upaya perluasan kesempatan kerja juga harus didukung oleh pengembangan kewirausahaan, peningkatan investasi, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai penyerap tenaga kerja lokal. Oleh karena itu, penurunan tingkat pengangguran dan peningkatan kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri menjadi salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Gresik.

5. Keterbatasan Pembangunan Konektivitas dan Infrastruktur Daerah

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Gresik masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan konektivitas wilayah yang merata sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Kondisi geografis yang meliputi kawasan perkotaan, perdesaan, pesisir, serta wilayah kepulauan menyebabkan kebutuhan infrastruktur memiliki karakteristik yang berbeda pada setiap wilayah. Ketersediaan jaringan jalan, jembatan, sistem transportasi, sumber daya air, permukiman, sanitasi, air minum, serta infrastruktur pelayanan dasar belum sepenuhnya mampu mengimbangi perkembangan kawasan industri, pertumbuhan penduduk, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Beberapa wilayah masih menghadapi keterbatasan aksesibilitas yang berdampak terhadap mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta pemerataan pelayanan publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur masih perlu diarahkan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Selain mendukung pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing daerah dan menarik investasi. Konektivitas antar pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan industri, sentra pertanian, kawasan perikanan, serta wilayah kepulauan masih memerlukan penguatan agar mampu meningkatkan efisiensi logistik dan memperluas akses pasar. Di sisi lain, penyediaan infrastruktur harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, ketahanan terhadap perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana agar manfaat pembangunan dapat dirasakan dalam jangka panjang. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan sektor swasta menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur strategis. Oleh karena itu, percepatan pembangunan konektivitas dan infrastruktur daerah menjadi salah satu fokus utama dalam mendukung pemerataan pembangunan Kabupaten Gresik.

6. Rendahnya Kemandirian Desa

Desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pembangunan daerah karena menjadi pusat pelayanan masyarakat sekaligus penggerak perekonomian lokal. Meskipun sebagian desa telah menunjukkan

perkembangan yang cukup baik, masih terdapat desa yang menghadapi keterbatasan dalam mengembangkan potensi ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat kelembagaan desa. Pemanfaatan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi sosial ekonomi desa belum sepenuhnya memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, kemampuan desa dalam mengembangkan inovasi, membangun kemitraan, serta menciptakan sumber-sumber pendapatan yang berkelanjutan masih perlu diperkuat. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat kemandirian antar desa masih menunjukkan kesenjangan.

Rendahnya kemandirian desa juga dipengaruhi oleh belum optimalnya kapasitas aparatur desa dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penguatan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dan partisipatif menjadi prasyarat untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kualitas SDM, dan pemanfaatan potensi unggulan desa perlu terus diperluas agar desa mampu tumbuh secara mandiri. Dukungan infrastruktur, akses pembiayaan, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan juga menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan desa. Oleh karena itu, peningkatan kemandirian desa menjadi salah satu agenda strategis dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Gresik yang inklusif dan berkeadilan.

7. Ketidakoptimalan Implementasi Smart City

Transformasi digital menjadi salah satu kebutuhan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk menjawab tuntutan masyarakat yang semakin dinamis. Kabupaten Gresik telah mengembangkan berbagai inovasi berbasis teknologi informasi sebagai bagian dari implementasi Smart City di berbagai sektor pembangunan. Namun demikian, implementasi Smart City belum sepenuhnya berjalan secara optimal karena masih terdapat keterbatasan dalam integrasi data, interoperabilitas sistem informasi, dan pemanfaatan teknologi digital secara

menyeluruh di seluruh perangkat daerah. Digitalisasi pelayanan publik juga masih menghadapi tantangan berupa perbedaan tingkat kematangan sistem, kualitas infrastruktur teknologi informasi, serta kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan layanan digital. Kondisi tersebut menyebabkan efektivitas pemanfaatan teknologi dalam mendukung tata kelola pemerintahan belum memberikan hasil yang optimal.

Di sisi lain, penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik memerlukan dukungan tata kelola data yang berkualitas, aman, terintegrasi, dan mudah diakses sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan. Implementasi Satu Data Indonesia, penguatan keamanan siber, pengembangan pusat data, serta peningkatan literasi digital aparatur menjadi kebutuhan yang harus terus diperkuat untuk mendukung transformasi digital daerah. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital perlu diperluas tidak hanya pada aspek pelayanan publik, tetapi juga pada pengelolaan lingkungan, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi daerah. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan ekosistem Smart City yang berkelanjutan. Oleh karena itu, percepatan implementasi Smart City menjadi salah satu isu strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas pemerintahan, dan daya saing Kabupaten Gresik.

8. Perlambatan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kabupaten Gresik telah melaksanakan berbagai upaya reformasi birokrasi melalui penyederhanaan proses bisnis, peningkatan kualitas pelayanan, penguatan akuntabilitas kinerja, serta penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Namun demikian, pelaksanaan reformasi birokrasi masih menghadapi berbagai tantangan sehingga hasil yang dicapai belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat maupun kebutuhan pembangunan daerah. Efektivitas organisasi, kualitas pelayanan publik, profesionalisme aparatur, serta budaya kerja yang adaptif terhadap perubahan masih memerlukan penguatan secara berkelanjutan. Kondisi

tersebut menunjukkan bahwa transformasi birokrasi masih menjadi agenda penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Selain aspek kelembagaan, reformasi birokrasi juga dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya aparatur, kualitas manajemen kinerja, serta penerapan sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, transparan, mudah diakses, dan bebas dari praktik korupsi semakin meningkat seiring berkembangnya teknologi dan keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada hasil, inovasi, integritas, dan kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penguatan pengawasan internal, pengelolaan risiko, serta pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi bagian penting dalam mendukung percepatan reformasi birokrasi. Dengan demikian, percepatan reformasi birokrasi menjadi salah satu prasyarat utama dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Gresik.

9. Keterbatasan Kapasitas Fiskal untuk Pembangunan Daerah

Pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan dukungan kapasitas fiskal yang memadai agar berbagai program prioritas dapat dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan. Kabupaten Gresik masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan serta dinamika kebijakan fiskal nasional. Di sisi lain, proporsi belanja wajib dan belanja mengikat yang cukup besar menyebabkan ruang fiskal pemerintah daerah menjadi terbatas untuk membiayai program pembangunan yang lebih fleksibel. Kondisi tersebut diperkuat oleh tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan dasar, pengembangan sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, serta penguatan daya saing daerah. Akibatnya, kemampuan pemerintah daerah dalam mengakomodasi seluruh kebutuhan pembangunan masih menghadapi berbagai keterbatasan.

Optimalisasi pendapatan asli daerah masih perlu terus ditingkatkan melalui penguatan basis pajak dan retribusi daerah, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan, serta pemanfaatan aset daerah secara produktif. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan berbagai skema pembiayaan

alternatif melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha, kemitraan investasi, maupun optimalisasi sumber pendanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja juga menjadi faktor penting untuk memastikan setiap belanja daerah memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Efisiensi belanja, penguatan tata kelola keuangan daerah, dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran perlu terus dilakukan agar kapasitas fiskal semakin kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas fiskal menjadi salah satu isu strategis yang menentukan keberhasilan pencapaian target pembangunan Kabupaten Gresik selama periode RPJMD.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

2.3.2.1 Urusan Wajib Dasar

1) Pendidikan

Pembangunan urusan pendidikan di Kabupaten Gresik menunjukkan perkembangan yang cukup baik, namun masih menghadapi sejumlah permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Salah satu permasalahan utama adalah belum meratanya kualitas dan akses layanan pendidikan antarwilayah, khususnya di daerah pesisir, kepulauan, dan wilayah dengan tingkat kerentanan sosial tertentu. Kondisi ini berdampak pada kesenjangan capaian pendidikan antar kelompok masyarakat.

Dari aspek akses pendidikan, masih terdapat anak usia sekolah yang belum berpartisipasi secara optimal pada jenjang pendidikan menengah. Selain itu, masih ditemukan anak yang putus sekolah maupun berisiko putus sekolah akibat faktor ekonomi, kondisi keluarga, maupun rendahnya motivasi belajar. Hal tersebut berpengaruh terhadap capaian indikator pendidikan seperti Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Dari aspek mutu pendidikan, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan masih perlu ditingkatkan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi, implementasi kurikulum, serta kebutuhan pembelajaran abad ke-21. Selain itu, kualitas sarana dan prasarana pendidikan belum sepenuhnya memenuhi Standar Nasional Pendidikan,

terutama terkait ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, fasilitas sanitasi, dan akses teknologi informasi.

Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran dan manajemen pendidikan. Kesenjangan akses internet dan perangkat pembelajaran digital masih menjadi tantangan bagi sebagian satuan pendidikan.

Pada aspek pemerataan dan inklusivitas pendidikan, layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, anak dari keluarga miskin, serta anak di wilayah rentan masih memerlukan penguatan. Upaya pemenuhan hak pendidikan yang setara bagi seluruh anak perlu terus ditingkatkan untuk mendukung terwujudnya pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

2) Kesehatan

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Gresik menunjukkan berbagai capaian yang positif, namun masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang memerlukan perhatian dan penanganan secara berkelanjutan. Tantangan utama yang dihadapi adalah masih adanya kesenjangan status kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh belum optimalnya pencapaian beberapa indikator kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat, serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular.

Upaya penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) masih menjadi prioritas pembangunan kesehatan daerah. Meskipun akses pelayanan kesehatan ibu dan anak terus ditingkatkan, masih terdapat faktor risiko yang memengaruhi keselamatan ibu dan bayi, seperti kehamilan berisiko tinggi, keterlambatan penanganan kasus kegawatdaruratan, kondisi kesehatan ibu sebelum dan selama kehamilan, serta faktor sosial ekonomi dan perilaku masyarakat. Kondisi tersebut menuntut penguatan layanan kesehatan yang komprehensif mulai dari masa prakonsepsi, kehamilan, persalinan, hingga masa nifas dan tumbuh kembang anak.

Permasalahan gizi juga masih menjadi tantangan penting, khususnya dalam upaya percepatan penurunan stunting. Meskipun

prevalensi stunting menunjukkan kecenderungan membaik, masih diperlukan penguatan intervensi spesifik dan sensitif secara terintegrasi. Faktor-faktor seperti pola asuh, asupan gizi, sanitasi lingkungan, akses air minum layak, serta kondisi sosial ekonomi keluarga masih menjadi determinan yang memengaruhi status gizi balita. Oleh karena itu, penanganan stunting memerlukan kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan aktif masyarakat.

Di sisi lain, Kabupaten Gresik juga menghadapi beban ganda penyakit (double burden of disease), yaitu masih tingginya kasus penyakit menular di tengah meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular. Penyakit menular seperti tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan penguatan deteksi dini, penemuan kasus, pengobatan tuntas, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Sementara itu, penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, dan gangguan metabolik lainnya cenderung meningkat seiring perubahan pola hidup, urbanisasi, dan bertambahnya usia harapan hidup penduduk. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dan pembiayaan kesehatan yang lebih besar.

Tantangan lainnya adalah peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Gresik. Pertumbuhan kawasan industri, perkembangan wilayah perkotaan, serta persebaran penduduk yang semakin dinamis memerlukan dukungan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten, serta penguatan sistem rujukan yang efektif. Selain itu, transformasi layanan kesehatan primer perlu terus didorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan promotif dan preventif sebagai upaya menekan beban pelayanan kuratif.

Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat juga masih perlu ditingkatkan. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan penyakit, pemeriksaan kesehatan secara berkala, penerapan pola hidup sehat, aktivitas fisik, konsumsi gizi seimbang, serta pemanfaatan layanan kesehatan belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini

berpengaruh terhadap munculnya berbagai masalah kesehatan yang sebenarnya dapat dicegah sejak dini.

Dengan berbagai tantangan tersebut, penyelenggaraan urusan kesehatan di Kabupaten Gresik ke depan perlu difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang merata dan berkeadilan, percepatan penurunan stunting, penguatan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan peran masyarakat dalam mewujudkan perilaku hidup sehat guna mendukung terciptanya masyarakat Gresik yang sehat, produktif, dan sejahtera.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan pembangunan pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih menghadapi berbagai permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka mendukung pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan kawasan industri, serta meningkatnya kebutuhan pelayanan infrastruktur, diperlukan upaya yang lebih optimal untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Gresik.

Salah satu permasalahan utamanya adalah masih belum optimalnya kondisi infrastruktur jalan dan jembatan pada beberapa wilayah, terutama yang menjadi penghubung antar pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman, kawasan industri, dan sentra pertanian. Tingginya mobilitas masyarakat serta kendaraan angkutan barang menyebabkan kebutuhan peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan terus meningkat, sementara kemampuan pendanaan pembangunan masih terbatas. Selanjutnya pada sektor sumber daya air, masih terdapat jaringan irigasi yang mengalami kerusakan dan penurunan fungsi sehingga mempengaruhi efektivitas pelayanan air irigasi bagi lahan pertanian. Selain itu, sedimentasi pada saluran dan bangunan air serta keterbatasan kapasitas tampungan air pada beberapa waduk dan embung menjadi tantangan dalam mendukung ketahanan air dan produktivitas sektor pertanian. Permasalahan banjir dan genangan

juga masih menjadi isu strategis, khususnya pada wilayah yang berada di daerah hilir dan kawasan yang terdampak luapan Kali Lamong. Tingginya intensitas curah hujan, perubahan tata guna lahan, berkurangnya daerah resapan air, serta keterbatasan kapasitas saluran drainase menyebabkan risiko banjir dan genangan masih terjadi di beberapa wilayah. Kondisi ini berdampak pada aktivitas masyarakat, infrastruktur, serta perekonomian daerah.

Di bidang penataan ruang, masih terdapat tantangan dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang belum sepenuhnya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Perkembangan kawasan industri, perdagangan, jasa, dan permukiman yang cukup pesat memerlukan pengawasan dan pengendalian yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Kinerja penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Gresik dihitung melalui 2 indikator outcome yaitu Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Industri sesuai dengan Peruntukan Ruang (%) dan Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang kegiatan berusaha dan non berusaha (%). Adapun data realisasi tersebut bisa disajikan pada tahun 2025 sebagai indikator baru yang tertuang pada RPJMD. Adapun data realisasi pada indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Industri sesuai dengan Peruntukan Ruang mencapai 1,61 % dan pada indikator Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang kegiatan berusaha dan non berusaha mencapai sebesar 103,92 %. Kedua indikator tersebut menunjukkan tren peningkatan pada setiap triwulan selama tahun 2025. Meskipun capaian indikator kesesuaian pemanfaatan ruang industri secara nominal relatif kecil, nilai tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD sesuai dengan metodologi pengukuran indikator. Sementara itu, capaian indikator kesesuaian pemanfaatan ruang kegiatan berusaha dan non berusaha telah melampaui target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian dan pemanfaatan ruang semakin efektif, ditandai dengan meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang serta tercapainya target pembangunan daerah.

Penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Gresik selama tahun 2025–2026 menunjukkan perkembangan pada aspek perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pada aspek perencanaan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik telah ditetapkan pada tahun 2026 sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang serta acuan bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Selain itu, hingga tahun 2026 telah disusun 3 (tiga) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Namun demikian, seiring dengan adanya penyesuaian kebijakan dan regulasi penataan ruang, seluruh RDTR tersebut direncanakan untuk dicabut dan selanjutnya akan dilakukan penyusunan kembali agar selaras dengan RTRW yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah tersebut diharapkan dapat menghasilkan dokumen RDTR yang lebih adaptif, terintegrasi, dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemanfaatan ruang.

Pada aspek pengendalian pemanfaatan ruang, hasil pengawasan terhadap Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) pada tahun 2025 menunjukkan bahwa 81% pelaku usaha telah mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang, sedangkan 19% masih belum memenuhi ketentuan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap ketentuan tata ruang telah cukup baik, namun masih diperlukan penguatan pembinaan, pengawasan, dan penegakan kepatuhan agar seluruh kegiatan pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang.

Hasil evaluasi pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam pemahaman serta penyebarluasan informasi mengenai kebijakan dan ketentuan terbaru di bidang penataan ruang, termasuk regulasi pelaksanaan KKPR dan pedoman lintas sektor. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi di tingkat pelaksana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, penyempurnaan mekanisme komunikasi regulasi, peningkatan intensitas sosialisasi dan bimbingan teknis, serta penegasan standar operasional prosedur dalam setiap tahapan penyelenggaraan penataan ruang guna mendukung

terwujudnya tata kelola penataan ruang yang efektif, konsisten, dan berkelanjutan.

Selanjutnya, dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, Kabupaten Gresik juga dihadapkan pada kebutuhan peningkatan ketahanan infrastruktur terhadap risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir, kekeringan, abrasi pantai, dan cuaca ekstrem. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan infrastruktur yang adaptif, tangguh, dan berwawasan lingkungan guna menjamin keberlanjutan pembangunan daerah.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, prioritas pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diarahkan pada peningkatan kualitas dan kemantapan infrastruktur jalan dan jembatan, penguatan pengelolaan sumber daya air, percepatan penanganan banjir dan genangan, peningkatan kualitas jaringan irigasi, serta penguatan pengendalian pemanfaatan ruang.

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pelaksanaan pembangunan pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman masih menghadapi berbagai permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan hunian masyarakat, pertumbuhan kawasan permukiman, serta tuntutan peningkatan kualitas lingkungan hunian, diperlukan upaya yang lebih optimal untuk memperkuat penyediaan perumahan dan penanganan kawasan permukiman di Kabupaten Gresik.

Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya ketersediaan dan pemutakhiran data perumahan, khususnya data terkait penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah maupun korban bencana yang belum tersedia secara real time. Kondisi ini berpengaruh terhadap proses perencanaan, penganggaran, dan penetapan sasaran program yang tepat dan terukur.

Dalam pelaksanaan program bantuan perumahan, masih terdapat kendala teknis di lapangan berupa sulitnya akses menuju lokasi

penerima bantuan, terutama pada wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan aksesibilitas. Kondisi tersebut seringkali menyebabkan keterlambatan distribusi material dan pelaksanaan kegiatan konstruksi. Selain itu, kondisi cuaca yang tidak menentu dan kurang mendukung juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan maupun rehabilitasi rumah, sehingga berpotensi mempengaruhi waktu penyelesaian pekerjaan.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan aspek legalitas lahan dan perumahan, khususnya proses sertifikasi tanah dan penyelesaian permasalahan sertifikat pada kawasan perumahan yang masih memerlukan percepatan. Ketersediaan legalitas tanah yang jelas menjadi faktor penting dalam mendukung kepastian hukum, kelancaran pelaksanaan program perumahan, serta peningkatan akses masyarakat terhadap bantuan dan pembiayaan perumahan.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, arah pembangunan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman difokuskan pada penguatan sistem data dan informasi perumahan, peningkatan akses dan kualitas hunian layak bagi masyarakat, percepatan penyelesaian legalitas tanah dan perumahan, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan program perumahan melalui penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dan dukungan infrastruktur yang memadai.

5) Kententraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- Intensitas bencana Kebakaran Gresik sangat tinggi mencapai 580 kejadian sedangkan jumlah personil dan infrastruktur sangat terbatas. Kondisi ini berbenturan dengan fakta bahwa jumlah Industri di Gresik yang beresiko tinggi dalam menyebabkan kebakaran sangat tinggi.
- Intensitas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah terjadi di ranah digital dan konvensional yang membutuhkan penguatan pengawasan dan penindakan.

6) Sosial

Penyelenggaraan urusan sosial di Kabupaten Gresik masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yang berkaitan dengan

kesejahteraan sosial masyarakat, terutama dalam upaya penanggulangan kemiskinan, penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), serta peningkatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Meskipun berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan, masih terdapat penduduk miskin dan rentan miskin yang memerlukan dukungan untuk meningkatkan taraf hidup dan kemandiriannya.

Salah satu tantangan utama adalah masih adanya keluarga miskin dan miskin ekstrem yang membutuhkan intervensi secara terpadu dan berkelanjutan. Dinamika kondisi ekonomi, perubahan struktur lapangan pekerjaan, serta kerentanan sosial menyebabkan sebagian masyarakat masih berisiko mengalami penurunan kesejahteraan. Oleh karena itu, upaya pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan keluarga miskin perlu terus diperkuat melalui sinergi berbagai program lintas sektor.

Selain itu, permasalahan akurasi dan pemutakhiran data kesejahteraan sosial masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan sosial. Perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berlangsung cepat menuntut tersedianya data yang valid, mutakhir, dan terintegrasi agar program bantuan dan pemberdayaan dapat tepat sasaran. Ketidaksesuaian data berpotensi menyebabkan masyarakat yang berhak belum memperoleh layanan, sementara terdapat penerima yang sudah tidak memenuhi kriteria.

Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) juga masih memerlukan perhatian, meliputi lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, anak terlantar, korban bencana, gelandangan dan pengemis, serta kelompok rentan lainnya. Keterbatasan kapasitas layanan sosial, baik dari sisi sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun jangkauan pelayanan, menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan perlindungan dan rehabilitasi sosial secara optimal.

Kabupaten Gresik juga memiliki tantangan dalam meningkatkan keberdayaan sosial masyarakat agar tidak bergantung pada bantuan sosial dalam jangka panjang. Oleh karena itu, program pemberdayaan

sosial perlu terus diperkuat melalui peningkatan keterampilan, pengembangan usaha ekonomi produktif, dan penguatan kapasitas keluarga penerima manfaat sehingga mampu mencapai kemandirian ekonomi dan sosial.

Selain itu, risiko bencana alam maupun nonalam yang dapat menimbulkan kerentanan sosial memerlukan kesiapsiagaan yang lebih baik dalam penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial. Penguatan sistem penanganan korban bencana serta koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak secara cepat dan tepat.

Dengan berbagai permasalahan tersebut, penyelenggaraan urusan sosial di Kabupaten Gresik perlu difokuskan pada peningkatan kualitas dan ketepatan sasaran perlindungan sosial, percepatan penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, penguatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan pelayanan bagi PPKS, serta penguatan sinergi lintas sektor guna mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

2.3.2.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Ketenagakerjaan

- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Gresik pada tahun 2025 sebesar 5,47 persen, lebih tinggi dari Jawa Timur sebesar 3,88% dan Nasional sebesar 4,85%. Proporsi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Gresik berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2025 didominasi oleh laki-laki sebesar 5,67 persen dan perempuan sebesar 5,15 persen.
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Gresik mengalami penurunan menjadi 67,99 persen pada tahun 2025 dengan proporsi laki-laki sebesar 83,38 persen dan perempuan sebesar 52,54 persen. Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menunjukkan adanya perubahan struktur partisipasi penduduk usia kerja dalam pasar kerja. Kondisi ini diduga dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi, seperti melanjutkan pendidikan, mengurus rumah

tangga, atau tidak aktif mencari pekerjaan. Selain itu, karakteristik Kabupaten Gresik sebagai daerah industri juga memungkinkan terjadinya kompetisi tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja dari luar daerah.

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Gresik masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta pemenuhan dan perlindungan hak anak. Implementasi pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah masih perlu diperkuat agar seluruh program dan kegiatan mampu memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Selain itu, partisipasi perempuan dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan juga masih perlu terus ditingkatkan.

Di sisi lain, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi perhatian yang memerlukan upaya pencegahan dan penanganan secara komprehensif. Permasalahan perkawinan anak, pengasuhan yang belum optimal, serta berbagai kerentanan yang dihadapi anak akibat perkembangan teknologi dan perubahan sosial juga menjadi tantangan dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah anak. Ketersediaan layanan perlindungan, pendampingan korban, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antarperangkat daerah, lembaga layanan, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendorong kesetaraan gender, meningkatkan kualitas hidup perempuan, mencegah kekerasan, menurunkan perkawinan anak, serta mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara berkelanjutan.

3) Pangan

Identifikasi Permaslaahan Urusan Pangan:

a. Ketersediaan Pangan per Kapita pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 184,88 kg/kapita/tahun, dengan realisasi sebesar 170 kg/kapita/tahun, hal tersebut dikarenakan adanya standar perhitungan konversi Gabah Kering Panen (GKP) ke Gabah Kering Giling (GKG) dari BPS Gresik sebesar 83,38%, Kondisi ini menunjukkan masih perlunya penguatan pada aspek peningkatan produksi, optimalisasi cadangan pangan daerah, kelancaran distribusi guna menjaga ketersediaan pangan masyarakat.

b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 94,17, dengan realisasi sebesar 95,85. Capaian ini telah melampaui target yang ditetapkan, yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas dan keberagaman konsumsi pangan masyarakat menuju pola konsumsi yang lebih beragam, bergizi seimbang, dan aman. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 2,88 persen, dengan realisasi sebesar 3,51 persen. Hal ini mengindikasikan masih adanya kelompok masyarakat yang rentan terhadap keterbatasan akses pangan, sehingga diperlukan penguatan intervensi melalui perlindungan sosial, optimalisasi daya beli masyarakat dengan program Gerakan Pangan Murah, bantuan pangan untuk masyarakat rentan rawan pangan, bantuan pangan untuk masyarakat rentan rawan pangan.

c. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Tahun 2025 ditargetkan sebesar 80,61, dengan realisasi sebesar 78,46. Capaian tersebut sebenarnya sudah melebihi target, tetapi dikarenakan terdapat penambahan indikator dalam perhitungan IKP dari awalnya cuma 9 indikator menjadi 12 indikator maka seolah-olah angkanya menjadi turun.Upaya yang harus dilakukan adalah komunikasi dan sinergi lintas sektor untuk memperkuat adanya penambahan indikator dalam pilar ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan guna mendukung ketahanan pangan daerah.

d. Stabilitas harga pangan utama pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 4,68 persen, dengan realisasi sebesar 3,18 persen. Capaian ini telah melampaui target yang ditetapkan, yang menunjukkan efektivitas pengendalian inflasi sektor pangan serta keberhasilan menjaga stabilitas harga komoditas pangan strategis di daerah.

e. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada Tahun 2025 ditargetkan berada pada kisaran 0,73–2,30 persen, dengan realisasi sebesar 1,63 persen. Capaian tersebut berada dalam rentang target yang ditetapkan, yang menunjukkan bahwa sektor pertanian dalam arti luas tetap tumbuh positif dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah.

4) Pertanahan

Urusan pertanahan merupakan salah satu urusan yang memiliki peran penting dalam mendukung percepatan pembangunan daerah, terutama dalam penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas pelayanan publik, kawasan strategis, serta pengembangan wilayah. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, pengelolaan pertanahan di Kabupaten Gresik masih menghadapi berbagai permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka mendukung pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Salah satu permasalahan utama adalah masih adanya kendala dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pelaksanaan pembebasan lahan sering kali membutuhkan waktu yang cukup panjang karena harus melalui berbagai tahapan administrasi, identifikasi kepemilikan, inventarisasi aset, penilaian ganti kerugian, serta proses musyawarah dengan masyarakat terdampak. Kondisi tersebut berpotensi menghambat percepatan pelaksanaan proyek pembangunan strategis daerah. Selain itu, masih ditemukan permasalahan terkait status dan legalitas kepemilikan tanah, seperti belum lengkapnya dokumen kepemilikan, tumpang tindih bukti kepemilikan, batas bidang tanah yang belum jelas, serta sengketa pertanahan yang melibatkan masyarakat, badan usaha, maupun

instansi pemerintah. Permasalahan tersebut dapat mempengaruhi kepastian hukum dalam pemanfaatan lahan serta menghambat proses pengadaan tanah untuk pembangunan. Permasalahan lain yang dihadapi adalah belum optimalnya pengamanan dan sertifikasi aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Gresik. Masih terdapat aset tanah yang belum bersertifikat atau belum memiliki dokumen administrasi yang lengkap sehingga berpotensi menimbulkan sengketa, penguasaan oleh pihak lain, maupun kesulitan dalam pemanfaatan aset untuk mendukung pembangunan daerah.

Perkembangan kawasan industri, perdagangan, jasa, dan permukiman yang cukup pesat juga menimbulkan tekanan terhadap ketersediaan lahan. Tingginya kebutuhan lahan untuk investasi dan pembangunan sering kali berdampak pada meningkatnya alih fungsi lahan, terutama lahan pertanian produktif. Kondisi ini memerlukan pengendalian yang lebih efektif agar pemanfaatan tanah tetap selaras dengan kebijakan tata ruang dan mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Di sisi lain, koordinasi dan sinkronisasi data pertanahan antar instansi masih perlu terus ditingkatkan. Ketersediaan data pertanahan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi kebutuhan penting dalam mendukung perencanaan pembangunan, pengelolaan aset daerah, penyelesaian konflik pertanahan, serta pengambilan keputusan yang tepat dalam pelaksanaan pembangunan. Tantangan lainnya adalah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan yang cepat, transparan, dan memiliki kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas tata kelola pertanahan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung penyelenggaraan urusan pertanahan yang lebih efektif dan akuntabel.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, arah prioritas pembangunan urusan pertanahan Kabupaten Gresik difokuskan pada percepatan penyediaan tanah untuk kepentingan umum, peningkatan tertib administrasi pertanahan, percepatan sertifikasi dan pengamanan aset daerah, penyelesaian permasalahan dan sengketa pertanahan, penguatan sistem informasi pertanahan, serta peningkatan koordinasi

dengan instansi terkait. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran pembangunan daerah, meningkatkan kepastian hukum atas tanah, serta mewujudkan tata kelola pertanahan yang tertib, efektif, dan berkelanjutan.

5) Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup merupakan salah satu urusan yang mendukung terkait urusan wajib non pelayanan dasar yang bertujuan untuk menciptakan iklim lingkungan hidup yang mendukung pembangunan berkelanjutan. dilaksanakan melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan persampahan, peningkatan kualitas air dan udara, serta penguatan tata kelola lingkungan hidup yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana di atas, masih menghadapi sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian. salah satu permasalahan yaitu ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Gresik yang hingga Tahun 2025 masih mencapai 12,07%, perlunya peningkatan penyediaan melalui optimalisasi lahan publik, revegetasi, dan kewajiban RTH pada pengembang kawasan sektor swasta serta perluasan wilayah industri dan pemukiman menyebabkan berkurangnya ruang terbuka hijau dan hutan kota.

Selain itu, Aktivitas industri di Gresik, terutama sektor manufaktur, masih menyebabkan pencemaran udara yang berdampak pada kesehatan masyarakat serta Kurangnya pengawasan dan pemantauan terhadap usaha/kegiatan pencemar khususnya udara terutama pada indikator PM2,5 menyebabkan belum tercapainya nilai IKU sesuai target pada tahun 2025, serta stagnasi pada kinerja izin LB3.

Dari sektor persampahan, sistem pengelolaan sampah masih menghadapi kendala, terutama dalam pengumpulan, pemilahan, dan daur ulang serta keterbatasan armada pengangkutan sampah yang dimiliki Kabupaten Gresik tidak sebanding dengan tingginya timbulan sampah yang mencapai 400 ton/hari. Kurang optimalnya pemanfaatan sarana/prasarana persampahan yang tersedia, karena jumlah TPS3R

yang belum mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Gresik, meskipun jumlah bank sampah meningkat, penanganan dan pengurangan sampah tetap rendah. Kemudian belum Terintegrasinya Pengelolaan Sampah dalam Strategi Mitigasi GRK sehingga perlunya rencana aksi mitigasi gas metana di Kabupaten Gresik.

6) Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih menghadapi sejumlah permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Meskipun cakupan kepemilikan dokumen kependudukan terus mengalami peningkatan, masih terdapat sebagian penduduk yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan secara lengkap, terutama pada kelompok rentan seperti penduduk lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat berpenghasilan rendah, serta penduduk yang tinggal di wilayah dengan akses pelayanan yang terbatas.

Selain itu, kesadaran masyarakat dalam melaporkan peristiwa penting kependudukan, seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan perpindahan penduduk, masih belum optimal. Kondisi ini menyebabkan masih ditemukannya data kependudukan yang belum mutakhir sehingga berpengaruh terhadap kualitas basis data kependudukan dan ketepatan sasaran berbagai program pembangunan. Dari permsalahan diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik terus bergerak dan memberikan layanan secara langsung kepada masyarakat melalui Jemput Bola ke Sekolah, Desa dan lembaga-lembaga lainnya dalam rangka percepatan pelayanan administrasi kependudukan sekaligus juga untuk melakukan pemutakhiran data kependudukan.

Adapun hambatan lain yang dihadapi meliputi dinamika regulasi yang terus berkembang, kebutuhan peningkatan kompetensi aparatur dalam pengelolaan sistem administrasi kependudukan berbasis digital,

serta perlunya penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah desa/kelurahan, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan melalui perluasan akses layanan, percepatan digitalisasi pelayanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib administrasi kependudukan guna mendukung terwujudnya pelayanan publik yang efektif, efisien, dan inklusif.

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Gresik menunjukkan perkembangan yang cukup baik, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah desa berstatus mandiri dan meningkatnya kapasitas kelembagaan desa. Namun demikian, dalam pelaksanaan program dan kegiatan sampai tahun berjalan masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam rangka mendukung pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Permasalahan utama yang masih dihadapi adalah belum meratanya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Perbedaan kemampuan tata kelola pemerintahan desa berdampak pada kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan desa, serta efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Kondisi tersebut menyebabkan capaian pembangunan antarwilayah desa masih menunjukkan variasi yang cukup signifikan.

Selain itu, optimalisasi potensi ekonomi desa masih menghadapi berbagai kendala, antara lain terbatasnya inovasi usaha ekonomi produktif, belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta rendahnya keterhubungan produk dan usaha desa

dengan pasar yang lebih luas. Pada beberapa desa, BUMDes belum mampu berfungsi secara optimal sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dan penggerak ekonomi lokal akibat keterbatasan kapasitas manajerial, pengembangan usaha, dan partisipasi masyarakat.

Permasalahan lainnya adalah masih perlunya penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Meskipun berbagai program pemberdayaan telah dilaksanakan, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa belum sepenuhnya merata. Kondisi ini berpengaruh terhadap keberlanjutan program pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan potensi lokal yang dimiliki masing-masing desa.

Di sisi lain, pengembangan ekonomi masyarakat desa masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses permodalan, kapasitas kewirausahaan, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan usaha mikro berbasis potensi desa. Beberapa desa telah berhasil mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan desa wisata, namun keberhasilan tersebut belum sepenuhnya terdistribusi secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Gresik.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Mandiri, tantangan ke depan adalah mempercepat peningkatan kualitas desa melalui penguatan ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur dan lembaga desa, penguatan BUMDes, optimalisasi pemanfaatan potensi lokal, pengembangan ekonomi desa berbasis inovasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna mendukung terwujudnya desa mandiri yang berdaya saing dan berkelanjutan.

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Gresik masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. Meskipun capaian program keluarga berencana menunjukkan perkembangan yang positif, masih terdapat kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (unmet need) sehingga berpotensi memengaruhi pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi masih perlu terus ditingkatkan.

Permasalahan lain yang masih menjadi perhatian adalah terjadinya perkawinan usia anak yang dapat berdampak pada kualitas sumber daya manusia, kesehatan ibu dan anak, serta kondisi sosial ekonomi keluarga. Di samping itu, ketahanan dan kualitas keluarga juga menghadapi tantangan akibat perubahan sosial, ekonomi, dan perkembangan teknologi yang memengaruhi pola pengasuhan serta fungsi keluarga.

Ketersediaan dan pemerataan akses terhadap pelayanan keluarga berencana, edukasi kependudukan, serta penguatan peran keluarga dalam pembangunan juga masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi melalui penguatan program Bangga Kencana, peningkatan kualitas pelayanan KB, pencegahan perkawinan anak, serta penguatan ketahanan keluarga guna mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas dan pembangunan kependudukan yang berkelanjutan.

9) Perhubungan

Permasalahan urusan perhubungan Kabupaten Gresik meliputi :

a. Permasalahan pada sektor Kelalulintasan :

- Kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, adapun faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah faktor kedisipilinan pengendara, kondisi kendaraan yang tidak layak, kondisi jalan

yang rusak dan mental dari pengguna jalan tersebut dan lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas.

- Kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Gresik seperti marka, rambu, RPPJ dan paku jalan, adapun faktor yang mempengaruhinya karena keterbatasan anggaran yang dimiliki dan maraknya aksi pencurian dan perusakan/vandalism;

- Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan di Kabupaten Gresik, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah kemudahan konsumen dalam memiliki kendaraan (fasilitas kredit) sementara Pemerintah Daerah kesulitan dalam pembebasan lahan untuk menambah ruas jalan yang baru.

b. Permasalahan pada sektor Angkutan Umum :

- Kemacetan lalu lintas di Kabupaten Gresik khususnya di wilayah yang dilalui Angkutan Barang sehingga mengakibatkan kemacetan pada area Industri, adapun pada hari kerja terutama pagi hari waktu berangkat kerja dan sore hari waktu pulang kerja, faktor yang mendorong karena kecenderungan pergerakan kendaraan dari daerah pinggiran dan perbatasan Kota menuju ke daerah perkantoran, area industri, sekolah dan sebagainya maupun sebaliknya.

- Rendahnya penggunaan kendaraan angkutan umum oleh masyarakat, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah Besarnya tingkat penggunaan kendaraan pribadi dikarenakan belum adanya sistem transportasi angkutan yang terkoneksi dengan angkutan masal serta angkutan umum yang sekarang bgeroperasi dinilai tidak cukup nyaman.

- Jalan yang tersedia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan pola distribusi angkutan barang, faktor yang mempengaruhinya adalah belum adanya terminal angkutan barang khusus/ Tempat Khusus Parkir Truk yang akan menjadi sentra distribusi barang.

c. Permasalahan pada sektor Angkutan Umum :

- Kecelakaan yang melibatkan Kereta Api dikarenakan Masih adanya Perlintasan Kereta Api yang belum tersedia Sarana Keselamatan Lalu Lintas;

- Pelayanan Angkutan Penyeberangan Gresik Bawean yang sering terhambat dikarenakan Belum adanya Kapal/ Angkutan Penyeberangan yang beroperasi dan melayani pada saat cuaca buruk serta gelombang tinggi.

d. Permasalah pada Pengelolaan dan Pelayanan Parkir :

- Jumlah titik lokasi parkir Tepi Jalan Umum (TJU) dan Tempat Khusus Parkir (TKP) di wilayah Kabupaten Gresik berjumlah 128 titik lokasi dengan jumlah petugas parkir 314 orang terdiri dari 90 Koordinator dan 224 Juru Parkir, sedangkan petugas Dinas Perhubungan dalam melaksanakan pengawasan terdiri dari 4 (empat) PNS dan 15 (lima belas) orang dengan kondisi tersebut pelaksanannya kurang maksimal, sehingga Petugas parkir sering kali lalai dan terlambat dalam menyetorkan pendapatan retribusi jasa parkir;

- Bahwa dalam menetapkan titik lokasi parkir wajib dibentuk Tim Teknis dalam menentukan titik lokasi maupun besaran target pendapatan retribusi jasa parkir disamping Kajian Penetapan Potensi;

- Bahwa Petugas parkir saat ini belum diupah sehingga dalam pelaksanaanya seringkali memungut lebih dari besaran retribusi yang telah ditetapkan sehingga banyak komplain masyarakat Pengguna Jasa Parkir (PJP);

- Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah berpengaruh pada cara pelayanan, penggunaan alat penunjang (Qris) dalam rangka pelaksanaan pembayaran secara non tunai;

- Jumlah sarana / kendaraan openal yang terbatas untuk menjangkau wilayah diluar kecamatan kota;

- Bahwa dalam penyelenggaraan parkir di Kabupaten Gresik belum diberlakukannya Zonasi sehingga besaran tarif pada ruas jalan dengan tingkat pelayan rendah dan tinggi diberlakukan tarif yang sama;

- Masih terdapat penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum (TJU) yang dilaksanakan di ruas jalan Nasional (Jl. Dr. Sutomo, Jl. Usman Sadar dan Jl. Gub. Suryo) hal tersebut bertentangan dengan UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 43 ayat (3).

10) Komunikasi dan Informatika

- Penguatan kapasitas sumber daya manusia pada urusan komunikasi dan informatika masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam pengembangan kompetensi pranata humas, penguatan kelembagaan komunikasi publik, serta pengembangan jenjang karier aparatur di bidang komunikasi dan informatika. Selain itu, dukungan dalam penyusunan strategi komunikasi pemerintah daerah juga belum optimal sehingga pengelolaan komunikasi publik, penyampaian pesan pembangunan, serta manajemen isu strategis belum berjalan secara terarah dan terintegrasi.

- Penyebarluasan informasi pembangunan daerah masih memerlukan penguatan sinergi dengan media mainstream agar distribusi pesan pemerintah dapat tersampaikan secara luas, akurat, dan berimbang kepada masyarakat. Di sisi lain, pemberdayaan media komunitas maupun media alternatif (*homeless media*) serta penguatan eksistensi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) juga masih perlu dioptimalkan dalam mendukung pembentukan opini publik yang positif terhadap kebijakan dan program pembangunan daerah.

- Penguatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa masih diperlukan melalui dukungan pengembangan Sistem Informasi Desa guna meningkatkan keterbukaan informasi publik hingga tingkat desa. Selain itu, aspirasi dan pengaduan masyarakat yang dikelola melalui layanan komunikasi publik juga belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah.

- Belum terlaksananya jajak pendapat atau survei opini publik secara berkala terkait persepsi masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik menyebabkan pengukuran tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat belum dapat dilakukan secara optimal. Di samping itu, belum tersusunnya konsep crisis handling atau manajemen penanganan krisis komunikasi atas isu-isu negatif menyebabkan respons terhadap dinamika informasi publik belum dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan terkoordinasi.

- Sarana dan prasarana pendukung pengelolaan komunikasi publik masih memerlukan pembaruan dan penguatan guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Selain itu, pengembangan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik masih berjalan secara parsial antar perangkat daerah sehingga integrasi data dan interoperabilitas sistem informasi belum optimal.

- Selaras dengan hasil penilaian mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Gresik, inovasi proses bisnis SPBE masih perlu terus ditingkatkan melalui penguatan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang lebih terintegrasi, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, termasuk melalui pelaksanaan audit TIK secara eksternal guna memastikan kualitas tata kelola, keamanan, dan efektivitas implementasi SPBE. Selain itu, kapabilitas manajemen SPBE juga masih memerlukan penguatan melalui penerapan manajemen keamanan informasi secara menyeluruh pada seluruh perangkat daerah, serta peningkatan kompetensi sumber daya

manusia melalui pelatihan teknis, pengembangan kapasitas, dan peningkatan literasi digital di bidang SPBE dan teknologi informasi.

11) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pelaksanaan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Gresik selama periode pelaksanaan RKPD dan RPJMD telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, ditandai dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha yang memiliki legalitas usaha, berkembangnya usaha mikro, serta meningkatnya jumlah koperasi aktif. Namun demikian, masih terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi tantangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan memerlukan perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya kualitas kelembagaan koperasi. Meskipun jumlah koperasi aktif menunjukkan peningkatan, masih terdapat koperasi yang belum mampu menjalankan fungsi usaha dan pelayanan kepada anggota secara optimal. Selain itu, kapasitas tata kelola, manajemen usaha, serta kemampuan adaptasi koperasi terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi masih bervariasi. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya daya saing sebagian koperasi dalam menghadapi dinamika perekonomian yang semakin kompetitif.

Pada sektor usaha mikro, tantangan yang masih dihadapi adalah keterbatasan akses permodalan, rendahnya kapasitas manajerial dan kewirausahaan pelaku usaha, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi usaha. Sebagian pelaku usaha mikro juga masih menghadapi kendala dalam pengembangan produk, standardisasi mutu, sertifikasi produk, dan perluasan akses pasar sehingga mempengaruhi kemampuan usaha untuk berkembang dan naik kelas.

Selain itu, tingkat produktivitas dan daya saing usaha mikro masih perlu ditingkatkan. Hal ini ditunjukkan oleh masih terbatasnya kemampuan pelaku usaha dalam menciptakan inovasi

produk, meningkatkan nilai tambah, serta membangun kemitraan usaha yang berkelanjutan. Di sisi lain, keterhubungan antara usaha mikro dengan sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif masih perlu diperkuat agar tercipta rantai nilai ekonomi yang lebih produktif dan inklusif.

Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya kualitas dan akurasi basis data koperasi dan pelaku usaha mikro sebagai dasar perumusan kebijakan dan program pemberdayaan. Meskipun telah dilakukan penguatan sistem pendataan melalui integrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sistem informasi pelaku usaha, masih diperlukan pembaruan data secara berkelanjutan guna memastikan ketepatan sasaran program pembinaan dan pemberdayaan.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran RPJMD dan prioritas pembangunan daerah, diperlukan upaya penguatan kelembagaan koperasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha, perluasan akses pembiayaan, pengembangan pemasaran berbasis digital, fasilitasi legalitas dan sertifikasi produk, serta penguatan kemitraan usaha. Selain itu, optimalisasi peran koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan, termasuk pengembangan Koperasi Merah Putih, perlu terus didorong untuk meningkatkan kontribusi sektor koperasi dan usaha mikro terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

12) Penanaman Modal

Dalam pelaksanaan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian. Dari aspek kelembagaan dan regulasi, terjadi transformasi kelembagaan pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, dan Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 yang mengharuskan Dinas Penanaman Modal dan PTSP beroperasi secara mandiri. Selain itu, perubahan struktur organisasi dari jabatan struktural ke jabatan fungsional membutuhkan adaptasi

organisasi dan sumber daya manusia agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan secara optimal.

Dari aspek sumber daya manusia, masih diperlukan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur, terutama di bidang pelayanan. Upaya tersebut diperlukan untuk meningkatkan kualitas, kecepatan, dan akurasi pelayanan perizinan dan penanaman modal serta memastikan seluruh proses pelayanan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Peningkatan kapasitas juga menjadi penting dalam menghadapi transformasi digital dan perubahan kelembagaan yang terus berkembang.

Pada aspek ekonomi dan investasi, masih terdapat minimnya kemitraan antara usaha besar dengan UMKM serta keterbatasan akses pembiayaan bagi UMKM lokal. Selain itu, promosi dan pemetaan investasi daerah belum berjalan secara optimal. Berbagai potensi investasi yang dimiliki daerah masih banyak yang belum terdigitalisasi maupun dipromosikan secara aktif melalui berbagai media dan forum investasi, sehingga peluang investasi belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Sementara itu, dari aspek pelayanan publik, implementasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) masih belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut ditandai dengan masih adanya kendala teknis dalam pengoperasian sistem, rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha maupun aparatur, serta belum maksimalnya koordinasi antar perangkat daerah dalam mendukung kelengkapan data dan sinkronisasi proses perizinan.

13) Kepemudaan dan Olahraga

Pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Gresik selama periode RPJMD menunjukkan perkembangan yang cukup baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi pemuda dalam berbagai kegiatan kepemudaan, terjaganya kondisi sarana dan prasarana olahraga, serta meningkatnya jumlah atlet dan prestasi olahraga daerah. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa

permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Pada bidang kepemudaan, permasalahan yang masih dihadapi adalah belum optimalnya pengembangan kapasitas dan daya saing pemuda. Hal ini ditunjukkan oleh masih terbatasnya akses pemuda terhadap pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, inovasi, dan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Selain itu, partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah masih perlu ditingkatkan, terutama dalam bidang ekonomi kreatif, kewirausahaan, dan pemberdayaan sosial kemasyarakatan.

Keberadaan organisasi kepemudaan yang relatif stabil belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kualitas kelembagaan dan kapasitas organisasi. Sebagian organisasi kepemudaan masih menghadapi keterbatasan dalam pengembangan program, jejaring kemitraan, dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana penguatan peran pemuda dalam pembangunan daerah. Di sisi lain, jumlah wirausaha muda masih perlu ditingkatkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi generasi muda serta mendukung penciptaan lapangan kerja baru.

Pada bidang olahraga, permasalahan yang dihadapi antara lain belum meratanya pembinaan olahraga prestasi pada seluruh cabang olahraga, keterbatasan regenerasi atlet pada beberapa cabang olahraga unggulan, serta belum optimalnya sistem pembinaan atlet yang berkelanjutan mulai dari tingkat usia dini hingga tingkat prestasi. Meskipun jumlah atlet dan prestasi olahraga menunjukkan peningkatan, capaian prestasi antar cabang olahraga masih belum merata sehingga memerlukan penguatan pembinaan yang lebih terarah dan berkesinambungan.

Selain itu, pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga yang telah tersedia masih perlu dioptimalkan guna mendukung peningkatan budaya olahraga masyarakat dan pembinaan atlet. Tantangan lainnya

adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas olahraga secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus pembentukan karakter generasi muda.

Dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD, diperlukan penguatan program pemberdayaan pemuda melalui peningkatan kapasitas, kewirausahaan, kepeloporan, dan partisipasi sosial pemuda. Pada sektor olahraga, diperlukan peningkatan kualitas pembinaan atlet, penguatan pembinaan olahraga prestasi dan olahraga masyarakat, pengembangan talenta atlet usia dini, serta optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, produktif, sehat, berprestasi, dan berdaya saing sebagai modal utama pembangunan Kabupaten Gresik.

14) Statistik

- Ketersediaan dan kelengkapan data sektoral masih belum optimal, ditandai dengan lambatnya proses pemutakhiran data, belum terintegrasinya pengembangan Satu Data secara menyeluruh, serta masih terbatasnya pemanfaatan data statistik dalam mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah. Selain itu, koordinasi pengumpulan data antar perangkat daerah masih menghadapi kendala karena beberapa perangkat daerah belum optimal dalam penyampaian data sektoral secara berkala dan tepat waktu.

- Pengembangan standar metodologi pengumpulan data yang konsisten masih perlu diperkuat guna menghasilkan data yang akurat, valid, dan dapat dibandingkan antar waktu maupun antar sektor. Di sisi lain, proses validasi dan verifikasi data juga masih memerlukan penguatan untuk memastikan kualitas dan konsistensi data yang dihasilkan dalam mendukung implementasi kebijakan Satu Data Indonesia.

- Pergantian operator atau pengelola data pada perangkat daerah yang cukup dinamis menyebabkan proses pendampingan dan

peningkatan kapasitas perlu dilakukan secara berulang, sehingga mempengaruhi efektivitas pengelolaan data statistik sektoral. Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan data oleh walidata daerah masih perlu ditingkatkan agar kualitas, keterpaduan, dan keberlanjutan pengelolaan data statistik sektoral dapat berjalan lebih optimal.

15) Persandian

- Pengembangan keamanan informasi, manajemen persandian, serta penerapan teknologi enkripsi dan kriptografi untuk perlindungan data masih belum optimal dalam mendukung keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik, terutama dalam menghadapi peningkatan ancaman siber terhadap sistem dan data pemerintahan daerah.

- Implementasi keamanan pada aplikasi pemerintahan belum sepenuhnya optimal, antara lain belum diterapkannya secara menyeluruh mekanisme *Single Sign On* (SSO), autentikasi berlapis seperti *One Time Password* (OTP), serta pengamanan kode program pada aplikasi yang dikembangkan.

- Keterbatasan teknologi, perangkat, dan aplikasi keamanan informasi yang digunakan menyebabkan proses monitoring dan pengendalian keamanan sistem masih dilakukan secara manual sehingga peningkatan keamanan informasi belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

- Edukasi dan literasi keamanan digital bagi perangkat daerah maupun masyarakat belum dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan sehingga kesadaran terhadap pentingnya keamanan informasi dan kewaspadaan terhadap ancaman siber masih perlu ditingkatkan.

- Regulasi, kebijakan, dan standar openal terkait keamanan informasi dan persandian di lingkungan pemerintah daerah masih terbatas

sehingga diperlukan penguatan tata kelola keamanan informasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

- Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia di bidang keamanan informasi dan persandian, serta tingginya biaya pelatihan dan sertifikasi, menjadi kendala dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur pada bidang keamanan siber.

- Masih terbatasnya tenaga ahli keamanan siber turut meningkatkan risiko terjadinya gangguan sistem, serangan siber, maupun kebocoran informasi pemerintahan daerah apabila tidak diantisipasi secara berkelanjutan.

16) Kebudayaan

Pelaksanaan urusan kebudayaan di Kabupaten Gresik selama periode RPJMD menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Hal ini ditandai dengan meningkatnya upaya pelestarian warisan budaya, penetapan cagar budaya dan warisan budaya tak benda, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan, serta terjaganya eksistensi berbagai tradisi budaya yang menjadi identitas daerah. Kabupaten Gresik sebagai salah satu pusat perkembangan sejarah dan budaya Islam di Indonesia memiliki potensi kebudayaan yang cukup besar, baik berupa warisan budaya benda maupun warisan budaya tak benda yang tersebar di berbagai wilayah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai tahun berjalan, capaian indikator urusan kebudayaan secara umum menunjukkan hasil yang baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan urusan kebudayaan dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya inventarisasi, dokumentasi, dan digitalisasi objek pemajuan kebudayaan. Meskipun telah dilakukan pendataan terhadap berbagai warisan budaya, masih terdapat aset budaya, tradisi lokal, dan

pengetahuan tradisional yang belum terdokumentasikan secara komprehensif sehingga berpotensi mengalami degradasi atau kehilangan nilai budaya. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap proses pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan daerah secara berkelanjutan.

Selain itu, pelestarian cagar budaya dan warisan budaya tak benda masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, kebutuhan pemeliharaan yang berkelanjutan, serta belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana pelestarian budaya. Seiring dengan perkembangan wilayah dan perubahan sosial masyarakat, beberapa aset budaya memerlukan perhatian khusus agar tetap terjaga keaslian dan keberlanjutannya sebagai bagian dari identitas Kabupaten Gresik.

Pada aspek sumber daya manusia, partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebudayaan telah menunjukkan perkembangan yang baik, namun keterlibatan generasi muda dalam pelestarian budaya lokal masih perlu terus ditingkatkan. Perkembangan teknologi informasi, globalisasi budaya, dan perubahan pola hidup masyarakat berpotensi mengurangi minat generasi muda terhadap seni tradisional, tradisi lokal, dan nilai-nilai budaya daerah apabila tidak diimbangi dengan inovasi dan pendekatan pelestarian yang adaptif.

Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya pemanfaatan potensi kebudayaan sebagai penggerak pembangunan ekonomi daerah. Berbagai aset budaya, event budaya, dan produk budaya lokal masih memerlukan penguatan promosi, pengemasan, dan integrasi dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif agar mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat. Sinergi antara pelaku budaya, pelaku ekonomi kreatif, pemerintah, dan masyarakat juga perlu terus diperkuat guna menciptakan ekosistem kebudayaan yang produktif dan berkelanjutan.

Di sisi kelembagaan, kapasitas komunitas budaya, pelaku seni, dan lembaga kebudayaan masih perlu ditingkatkan melalui pembinaan, fasilitasi, dan penguatan jejaring kerja sama. Keterbatasan ruang ekspresi budaya dan sarana pendukung kegiatan seni budaya juga

menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan kebudayaan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penyelenggaraan urusan kebudayaan ke depan perlu difokuskan pada penguatan inventarisasi dan digitalisasi objek pemajuan kebudayaan, pelestarian cagar budaya dan warisan budaya tak benda, peningkatan partisipasi generasi muda, penguatan kapasitas pelaku budaya, serta optimalisasi pemanfaatan kebudayaan sebagai bagian dari pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya pembangunan kebudayaan yang berkelanjutan, memperkuat identitas daerah, serta meningkatkan kontribusi kebudayaan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gresik.

17) Perpustakaan

Penyelenggaraan urusan perpustakaan masih menghadapi berbagai permasalahan yang memengaruhi optimalisasi layanan perpustakaan dan pengembangan budaya literasi masyarakat. Meskipun berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk meningkatkan akses informasi dan minat baca masyarakat, hasil yang dicapai masih perlu ditingkatkan guna mendukung terwujudnya masyarakat yang cerdas, berpengetahuan, dan berdaya saing.

Salah satu permasalahan utama adalah belum optimalnya tingkat kegemaran membaca dan budaya literasi masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan tingginya penggunaan media digital belum sepenuhnya diimbangi dengan pemanfaatan sumber informasi yang berkualitas untuk kegiatan literasi. Kondisi ini berdampak pada masih rendahnya pemanfaatan layanan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat.

Selain itu, ketersediaan dan kualitas sarana serta prasarana perpustakaan masih perlu ditingkatkan. Beberapa perpustakaan belum memiliki fasilitas yang memadai, baik dari sisi gedung, ruang layanan, koleksi bahan pustaka, maupun perangkat teknologi informasi yang mendukung pelayanan perpustakaan modern. Keterbatasan tersebut

menyebabkan layanan perpustakaan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara optimal.

Permasalahan lainnya adalah belum meratanya kualitas pengelolaan perpustakaan pada berbagai jenis perpustakaan, baik perpustakaan desa/kelurahan, sekolah, maupun perpustakaan khusus. Sebagian perpustakaan masih menghadapi keterbatasan dalam pengelolaan koleksi, pelayanan pemustaka, serta penerapan standar nasional perpustakaan. Kondisi ini berpengaruh terhadap kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dari aspek sumber daya manusia, jumlah dan kompetensi tenaga perpustakaan masih perlu ditingkatkan. Ketersediaan pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan yang memiliki kompetensi sesuai standar belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan layanan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan perpustakaan berbasis teknologi informasi masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian.

Transformasi layanan perpustakaan berbasis digital juga masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, koleksi digital yang belum memadai, serta kemampuan pengguna dalam mengakses layanan digital. Padahal, perkembangan teknologi menuntut perpustakaan untuk mampu menyediakan layanan yang lebih cepat, mudah, dan dapat diakses tanpa batas ruang dan waktu.

Di samping itu, implementasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial belum sepenuhnya optimal. Peran perpustakaan sebagai pusat kegiatan masyarakat, pusat pemberdayaan ekonomi, dan pusat pengembangan keterampilan masih perlu diperkuat melalui peningkatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan serta pengembangan program yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

18) Kearsipan

Penyelenggaraan urusan kearsipan memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Arsip tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi dan alat bukti yang sah, tetapi juga sebagai memori kolektif daerah yang memiliki nilai strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Meskipun berbagai upaya pembinaan dan pengelolaan kearsipan telah dilakukan, masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan kearsipan.

Salah satu permasalahan utama adalah belum optimalnya penerapan tata kelola kearsipan pada perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masih terdapat perangkat daerah yang belum melaksanakan pengelolaan arsip secara tertib, mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, hingga penyelamatan arsip. Kondisi tersebut berpotensi menghambat efektivitas administrasi pemerintahan dan ketersediaan informasi yang akurat dalam proses pengambilan keputusan.

Dari aspek kelembagaan dan sumber daya manusia, masih terdapat keterbatasan jumlah arsiparis maupun tenaga pengelola arsip yang memiliki kompetensi sesuai standar. Selain itu, pemahaman aparatur terhadap pentingnya pengelolaan arsip sebagai bagian dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia tersebut berdampak pada belum optimalnya pengelolaan arsip di lingkungan perangkat daerah.

Permasalahan lainnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana kearsipan yang memenuhi standar. Beberapa unit kerja masih belum memiliki ruang penyimpanan arsip yang memadai, peralatan pengelolaan arsip yang sesuai standar, serta fasilitas depo arsip yang mampu menjamin keamanan dan keselamatan arsip. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan kerusakan maupun kehilangan arsip yang memiliki nilai guna penting bagi pemerintah daerah.

Dalam era digital, pengelolaan arsip elektronik juga masih menghadapi berbagai tantangan. Implementasi sistem kearsipan elektronik belum sepenuhnya terintegrasi pada seluruh perangkat daerah, baik dari sisi infrastruktur teknologi informasi, regulasi pendukung, maupun kapasitas sumber daya manusia. Akibatnya, proses pengelolaan arsip digital belum berjalan secara optimal dan berpotensi menimbulkan risiko terhadap keamanan serta keberlanjutan informasi elektronik.

Di sisi lain, penyelamatan dan pelestarian arsip statis sebagai memori kolektif daerah masih perlu diperkuat. Masih terdapat arsip bernilai sejarah yang belum teridentifikasi, terakuisisi, maupun terdokumentasi dengan baik. Apabila tidak segera dilakukan upaya penyelamatan, arsip-arsip tersebut berpotensi mengalami kerusakan atau kehilangan sehingga mengurangi nilai sejarah dan identitas daerah.

Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kearsipan juga masih menghadapi kendala, terutama dalam memastikan kepatuhan seluruh perangkat daerah terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan kearsipan. Hasil pengawasan kearsipan menunjukkan bahwa tingkat kematangan pengelolaan arsip pada sebagian perangkat daerah masih perlu ditingkatkan agar mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

2.3.2.3 Urusan Pili

1) Pariwisata

Pelaksanaan urusan pariwisata di Kabupaten Gresik selama periode RPJMD menunjukkan perkembangan yang cukup baik yang ditandai dengan meningkatnya promosi destinasi wisata, pengembangan daya tarik wisata daerah, serta penguatan sinergi antara sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan kebudayaan. Kabupaten Gresik memiliki potensi wisata yang beragam, meliputi wisata religi, wisata budaya, wisata sejarah, wisata alam, dan wisata bahari yang tersebar di wilayah daratan maupun Kepulauan Bawean. Namun demikian, dalam

penyelenggaraan urusan pariwisata masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya daya saing destinasi wisata daerah dibandingkan dengan daerah tujuan wisata lainnya di Jawa Timur. Meskipun memiliki potensi wisata religi yang kuat dan sejumlah destinasi unggulan, masih terdapat keterbatasan pada aspek amenitas, atraksi, dan kualitas layanan pendukung pariwisata yang mempengaruhi tingkat kunjungan dan lama tinggal wisatawan. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah.

Selain itu, aksesibilitas menuju beberapa destinasi wisata, khususnya di kawasan kepulauan dan destinasi wisata yang berada di luar pusat pertumbuhan wilayah, masih memerlukan peningkatan. Ketersediaan infrastruktur pendukung, konektivitas transportasi, fasilitas umum, serta sarana penunjang wisata pada beberapa lokasi belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan wisatawan. Permasalahan tersebut berpengaruh terhadap kenyamanan, keamanan, dan pengalaman wisata yang diterima pengunjung.

Pada aspek promosi, pemanfaatan teknologi digital dan pemasaran destinasi wisata masih perlu diperkuat agar mampu menjangkau pasar wisata yang lebih luas. Promosi pariwisata daerah belum sepenuhnya terintegrasi dengan pengembangan ekonomi kreatif, event daerah, dan pemasaran produk unggulan lokal sehingga potensi multiplier effect sektor pariwisata belum dapat dioptimalkan secara maksimal.

Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia pariwisata, baik pengelola destinasi, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), pelaku usaha wisata, maupun masyarakat di sekitar kawasan wisata. Kondisi ini berdampak pada kualitas pelayanan wisata dan pengelolaan destinasi yang berkelanjutan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengembangan

desa wisata dan pengelolaan destinasi berbasis komunitas masih perlu ditingkatkan agar manfaat pembangunan pariwisata dapat dirasakan secara lebih merata.

Di sisi lain, pengembangan destinasi wisata berbasis potensi lokal masih menghadapi tantangan dalam aspek investasi, inovasi produk wisata, serta pengelolaan destinasi yang adaptif terhadap perubahan tren dan preferensi wisatawan. Beberapa destinasi wisata juga memerlukan penguatan tata kelola, konservasi lingkungan, dan pelestarian budaya guna menjaga keberlanjutan daya tarik wisata dalam jangka panjang.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran RPJMD dan prioritas pembangunan daerah, diperlukan penguatan daya saing destinasi wisata melalui peningkatan kualitas amenitas, aksesibilitas, dan atraksi wisata, penguatan promosi berbasis digital, peningkatan kapasitas SDM pariwisata, pengembangan desa wisata, serta integrasi sektor pariwisata dengan ekonomi kreatif dan kebudayaan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, memperpanjang lama tinggal wisatawan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

2) Kelautan dan Perikanan

Angka Konsumsi Ikan ditargetkan sebesar 57,73 kg/kapita/tahun, dengan realisasi sebesar 58,36 kg/kapita/tahun sedangkan pertumbuhan produksi perikanan tangkap pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 3,23 persen, dengan realisasi sebesar 4,17 persen. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan dan menunjukkan kinerja yang positif. Sementara itu, pertumbuhan produksi perikanan budidaya ditargetkan sebesar 2,43 persen, dengan realisasi sebesar 2,44 persen, sehingga capaian berada pada kategori memenuhi target, namun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan.Pertumbuhan produksi usaha garam rakyat ditargetkan sebesar 0,96 persen, dengan realisasi sebesar 0,97 persen.

Pada aspek pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, persentase penurunan konflik nelayan pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 2,78 persen, dengan realisasi sebesar 2,78 persen, Hal ini menunjukkan efektivitas koordinasi antar pemangku kepentingan, peningkatan pengawasan, serta mediasi konflik yang berjalan optimal. Pengawasan pengelolaan perairan umum darat ditargetkan sebanyak 20 pelaku usaha, dengan realisasi sebanyak 21 pelaku usaha, Capaian ini menunjukkan peningkatan kepatuhan dan perluasan cakupan pengawasan oleh aparat terkait. Selanjutnya, persentase pelatihan terhadap kelompok nelayan ditargetkan sebesar 43 persen, dengan realisasi sebesar 43 persen, target tercapai sepenuhnya. Adapun persentase fasilitasi kebijakan peningkatan kesejahteraan nelayan ditargetkan sebesar 17,6 persen, dengan realisasi sebesar 17,84 persen, yang menunjukkan capaian sedikit melampaui target.

Identifikasi Permasalahan:

a. Bencana perubahan musim dan banjir dapat menyebabkan air tambak meluap dan bercampur dengan air kotor atau air laut, sehingga kualitas air berubah drastis yang mengakibatkan hasil tambak hanyut dan mati. yang tambak bisa mati, hanyut, atau pertumbuhannya terganggu.
b. Produktivitas tambak belum optimal. Banyak tambak masih dikelola secara tradisional sehingga hasil budidaya ikan belum maksimal.
c. Harga hasil perikanan tidak stabil tergantung musim dan pasar
d. Keterbatasan teknologi dan modal. Nelayan dan pembudidaya masih kekurangan alat modern serta akses pembiayaan.
e. Distribusi dan penyimpanan hasil perikanan yang kurang baik, terutama karena minimnya fasilitas *cold storage*, menyebabkan ikan cepat rusak sehingga kualitas dan nilai jual hasil perikanan menurun.
f. Belum tersedianya dukungan pupuk bersubsidi yang mempengaruhi produktivitas perikanan budidaya

g. Lahan terbatas dan alih fungsi lahan, area tambak berubah menjadi permukiman atau industri.

3) Pertanian

Berdasarkan data Produksi tanaman sayuran dan buah-buahan semusim di Kabupaten Gresik tahun 2022–2025, Data produksi tanaman biofarmaka di Kabupaten Gresik Tahun 2021–2025, Data produksi tanaman hias di Kabupaten Gresik Tahun 2021–2025, Produksi perkebunan rakyat di Kabupaten Gresik periode 2021–2025, Produksi peternakan di Kabupaten Gresik 2021 - 2025 . Identifikasi permasalahan yang didapat yaitu :

a. Dinamika produksi adalah berdasarkan luas panen dan jumlah tanaman produktif dalam periode waktu tertentu, hal ini dapat memengaruhi jumlah dan kualitas hasil panen yang diperoleh petani baik bulanan maupun tahunan. Luas panen dan areal lahan yang semakin berkurang terjadi akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, industri, jalan, dan bangunan lainnya. Hal ini menyebabkan berkurangnya area tanam sehingga produksi pertanian ikut menurun.

b. Perkembangan produksi pertanian masih dipengaruhi oleh kondisi iklim dan pola tanam di suatu daerah. Perubahan cuaca, curah hujan, serta pengaturan waktu tanam dapat memengaruhi jumlah dan kualitas hasil produksi pertanian.

c. Serangan hama/wabah dan penyakit tanaman dapat merusak pertumbuhan tanaman/pertumbuhan hewan ternak serta menurunkan kualitas dan jumlah hasil panen yang diperoleh petani/Peternak.

d. Masalah irigasi dan kekurangan air dapat menghambat kegiatan pertanian, terutama pada musim kemarau. Kondisi ini menyebabkan lahan pertanian sulit mendapatkan pasokan air yang cukup sehingga pertumbuhan tanaman terganggu dan hasil panen menurun.

e. Teknologi pertanian masih terbatas dan kurang modern sehingga proses produksi pertanian menjadi kurang efisien, produktivitas rendah, dan hasil panen belum maksimal

f. Pemasaran hasil panen kurang efektif karena masih banyak perantara dalam proses distribusi, sehingga harga yang diterima petani/peternak menjadi lebih rendah dan keuntungan tidak maksimal.

4) Perdagangan

Pelaksanaan urusan perdagangan di Kabupaten Gresik selama periode RPJMD menunjukkan perkembangan yang cukup baik, didukung oleh posisi strategis Kabupaten Gresik sebagai kawasan industri dan perdagangan di wilayah Gerbangkertosusila. Aktivitas perdagangan didukung oleh keberadaan pasar rakyat, pusat perdagangan modern, kawasan industri, serta jaringan distribusi barang yang terhubung dengan pelabuhan dan kawasan logistik. Namun demikian, dalam penyelenggaraan urusan perdagangan masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian untuk mendukung peningkatan daya saing ekonomi daerah.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya efisiensi sistem distribusi dan pemasaran barang, khususnya dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok masyarakat. Dinamika harga komoditas strategis yang dipengaruhi kondisi pasokan, distribusi, dan faktor eksternal masih berpotensi menimbulkan gejolak harga sehingga memerlukan penguatan sistem pemantauan dan pengendalian perdagangan daerah. Selain itu, pengawasan terhadap rantai distribusi barang dan perlindungan konsumen masih perlu ditingkatkan guna menciptakan perdagangan yang sehat dan berkeadilan.

Pada aspek sarana perdagangan, meskipun telah dilakukan revitalisasi dan pengembangan pasar rakyat, masih terdapat pasar tradisional yang memerlukan peningkatan kualitas infrastruktur, fasilitas pendukung, kebersihan, keamanan, serta tata kelola pasar agar

mampu bersaing dengan perdagangan modern. Pengembangan pasar rakyat sebagai pusat distribusi dan aktivitas ekonomi masyarakat juga masih memerlukan dukungan pengelolaan yang lebih profesional dan berbasis digital. Revitalisasi Pasar Tematik Industri Sidayu menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sarana perdagangan rakyat, namun upaya serupa masih perlu diperluas pada sarana perdagangan lainnya.

Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan perdagangan, khususnya pada pelaku usaha mikro dan perdagangan tradisional. Transformasi perdagangan menuju ekosistem digital masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, literasi digital, serta akses pemasaran yang lebih luas. Kondisi ini berdampak pada kemampuan pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing dan memperluas jaringan pasar.

Di sisi ekspor dan pengembangan pasar, masih diperlukan peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam memenuhi standar perdagangan, pemanfaatan sistem perdagangan elektronik, serta penguatan akses informasi pasar. Adaptasi terhadap perubahan sistem layanan perdagangan dan dokumen ekspor masih menjadi tantangan bagi sebagian pelaku usaha, sehingga memerlukan pembinaan dan pendampingan yang lebih intensif.

Selain itu, sinergi antara sektor perdagangan dengan sektor industri, koperasi, usaha mikro, dan ekonomi kreatif masih perlu diperkuat agar tercipta rantai nilai ekonomi yang lebih terintegrasi. Belum optimalnya kemitraan usaha dan jaringan pemasaran produk lokal menyebabkan sebagian produk unggulan daerah belum memiliki akses pasar yang luas dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, tantangan pembangunan perdagangan ke depan diarahkan pada penguatan sistem distribusi dan stabilisasi harga, revitalisasi dan digitalisasi pasar rakyat, peningkatan perlindungan konsumen, penguatan kapasitas pelaku usaha perdagangan, perluasan akses pasar produk lokal, serta pengembangan

perdagangan berbasis teknologi informasi. Upaya tersebut diperlukan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan, memperkuat daya saing daerah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik yang inklusif dan berkelanjutan.

5) Perindustrian

Pelaksanaan urusan perindustrian di Kabupaten Gresik selama periode RPJMD menunjukkan capaian yang cukup baik, ditandai dengan tetap dominannya sektor industri pengolahan sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi lebih dari 50 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gresik, sehingga menempatkan Kabupaten Gresik sebagai salah satu pusat industri strategis di Provinsi Jawa Timur dan kawasan nasional.

Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraan urusan perindustrian. Permasalahan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM) dibandingkan dengan industri besar. Sebagian IKM masih menghadapi keterbatasan dalam penguasaan teknologi produksi, inovasi produk, standardisasi mutu, sertifikasi produk, serta kemampuan pemasaran yang berdampak pada rendahnya produktivitas dan nilai tambah produk industri lokal.

Selain itu, keterkaitan antara industri besar dengan IKM dalam rantai pasok industri daerah masih perlu diperkuat. Sebagai daerah dengan struktur ekonomi yang didominasi industri pengolahan, peluang kemitraan antara industri besar dan IKM sebenarnya cukup besar, namun pemanfaatannya belum optimal. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian IKM belum mampu memperoleh manfaat yang maksimal dari keberadaan kawasan industri dan investasi yang berkembang di Kabupaten Gresik.

Permasalahan lainnya adalah masih terbatasnya kapasitas sumber daya manusia industri yang adaptif terhadap perkembangan

teknologi dan transformasi industri. Perkembangan digitalisasi industri, otomasi produksi, dan penerapan konsep industri berkelanjutan menuntut peningkatan kompetensi tenaga kerja industri agar mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri yang semakin kompetitif. Di sisi lain, kesenjangan antara kebutuhan tenaga kerja industri dengan kompetensi tenaga kerja yang tersedia masih menjadi tantangan dalam mendukung pertumbuhan sektor industri daerah.

Pada aspek infrastruktur industri, meskipun Kabupaten Gresik memiliki kawasan industri yang berkembang pesat, masih diperlukan penguatan infrastruktur pendukung, konektivitas logistik, serta pengelolaan kawasan industri yang berkelanjutan. Pertumbuhan industri yang tinggi juga berpotensi menimbulkan tekanan terhadap lingkungan hidup, sehingga diperlukan penguatan penerapan industri hijau, efisiensi sumber daya, dan pengelolaan lingkungan yang lebih optimal guna menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Selain itu, akses pembiayaan, hilirisasi produk industri, dan pengembangan industri berbasis inovasi masih menjadi tantangan bagi sebagian pelaku industri, khususnya IKM. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital, riset, dan inovasi menyebabkan kemampuan industri lokal dalam menghasilkan produk berdaya saing tinggi masih perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya kemampuan industri daerah dalam memperluas pasar dan meningkatkan nilai tambah produk.

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan penyelenggaraan urusan perindustrian di Kabupaten Gresik ke depan diarahkan pada peningkatan daya saing IKM, penguatan kemitraan industri besar dan IKM, peningkatan kualitas sumber daya manusia industri, pengembangan industri berbasis teknologi dan inovasi, penguatan hilirisasi industri, serta penerapan industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Upaya tersebut diperlukan untuk mendukung transformasi ekonomi daerah yang lebih inklusif, produktif, dan berdaya saing tinggi.

2.3.2.4 Penunjang Urusan Perencanaan

1) Perencanaan

- Belum harmonisnya kebijakan pemerintah pusat dengan daerah akibat Penerbitan pedoman penyusunan RKPD tidak sesuai dengan timeline yang berdasarkan peraturan perundangan

- Dinamika kebijakan dan regulasi pemerintah pusat yang terus berkembang memerlukan penyesuaian perencanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan

- Perkembangan sistem perencanaan pembangunan berbasis teknologi informasi yang semakin dinamis memerlukan penguatan kapasitas dan kompetensi petugas teknis agar mampu beradaptasi dengan perubahan aplikasi, regulasi, dan mekanisme perencanaan secara berkelanjutan, sehingga dalam implementasinya membutuhkan proses penyesuaian dan pendampingan yang optimal

2) Keuangan

- Struktur pendapatan daerah Kabupaten Gresik masih menunjukkan ketergantungan yang cukup signifikan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah secara nominal terus mengalami peningkatan, namun pendapatan transfer masih menjadi komponen dominan dalam struktur APBD dengan pendapatan transfer tahun 2025 sebesar 2.333.406.670.464,00 dan PAD sebesar 1.475.313.412.879,28.

- Selama pelaksanaan anggaran pada tahun 2021-2025, Kabupaten Gresik melaksanakan beberapa kali recofusing anggaran pada tiap tahun berkenaan. Praktek recofusing anggaran mengindikasikan beberapa potensi kelemahan dalam manajemen anggaran dan pelaksanaan kebijakan fiskal di daerah

- Optimalisasi penyesuaian pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 2022.

Tabel 2.154

Permasalahan Setiap Program Daerah

No	Program	Permasalahan
1	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Pemanfaatan BMD oleh Pihak ketiga belum maksimal dikarenakan keterbatasan SDM 2. Pengamanan BMD Pemagaran terkendala anggaran 3. Adanya keterlambatan dalam pendataan aset daerah 4. Adanya keterlambatan beberapa PD dalam penyampaian laporan Barang Milik Daerah 5. Belum tersedianya Gudang Penyimpanan untuk barang yang akan di lelang/di hapus 6. Pemerintah Kabupaten Gresik belum mempunyai SDM Penilai Barang 7. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah tidak tepat waktu 8. Pencatatan Barang Milik Daerah kurang akurat 9. Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Belum optimal
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Belum tersedianya data potensi pajak daerah yang akurat 2. Belum tercukupinya regulasi dan Sisdur terkait petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak daerah 3. Kurangnya SDM yang menguasai bidang Teknologi informasi 4. Data pajak yang diberikan oleh wajib pajak belum semuanya valid 5. Kurangnya alat yang memadai atau spesifikasi dalam komputer yang kurang sesuai dengan kebutuhan 6. Monitoring evaluasi dan pengawasan kinerja openal pemungutan pajak daerah belum optimal

No	Program	Permasalahan
		7. Sulitnya melakukan penagihan kepada wajib pajak PBB yang kurang jelas 8. Data PBB dan BPHTB belum semuanya valid 9. Monitoring evaluasi dan pengawasan kinerja openal pemungutan PBB dan BPHTB belum optimal 10. Pelaksanaan koordinasi internal maupun dengan instansi lain terkait penertiban obyek PBB dan BPHTB belum optimal 11. Kurangnya kompetensi Sumber daya manusia yang melaksanakan Pelayanan PBB 12. Belum tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan 13. Belum tercukupinya sarana dan informasi yang bisa diakses oleh masyarakat 14. Belum adanya kesesuaian Nilai Jual Objek Pajak PBB dengan kondisi Riil 15. Koordinasi pelaksanaan inventarisasi dan evaluasi terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) belum optimal 16. Pelaksanaan verifikasi surat pemberitahuan dan penetapan Pajak Daerah dengan Subjek dan Objek Pajak daerah belum optimal 17. Sulitnya melakukan Penagihan karena data Wajib Pajak dan Objek Pajak PBB kurang jelas
3	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyampaian KUAPPAS dan Rancangan APBD ke DPRD tidak tepat waktu 2. Penyampaian Rancangan APBD ke DPRD tidak tepat waktu 3. Terdapat Ketidaktepatan dalam penganggaran belanja kegiatan

Sumber : BPPKAD, Tahun 2026

3) Kepegawaian
   - Optimalisasi indeks profesionalitas ASN.
   - Optimalisasi Optimalisasi manajemen sumber daya manusia ASN berbasis sistem Merit yang berfokus pada penilaian, promosi, dan pengembangan ASN berdasarkan kompetensi, kinerja, dan kualifikasi.
   - Subjektivitas dalam penilaian kinerja.
   - Kebutuhan untuk pengembangan budaya ASN berakhlak yang merupakan inisiatif dan pedoman yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan integritas ASN melalui penerapan nilai-nilai akhlak dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Inisiatif ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja ASN dan memastikan bahwa mereka melayani publik dengan cara yang etis dan profesional.
4) Penelitian dan Pengembangan
   - Belum maksimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
   - Belum berkembangnya budaya inovasi perangkat daerah dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
5) Kesatuan Bangsa dan Politik
   - Politisasi identitas dapat memicu ketegangan sosial dan konflik antar kelompok.
   - Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses politik, seperti pemilihan umum atau perencanaan kebijakan.
   - Tantangan dalam memperkuat institusi demokrasi seperti pemilihan yang adil, kebebasan pers, dan hak asasi manusia.
6) Pengawasan
   - Keterbatasan kuantitas dan kapasitas sumber daya aparatur pengawas internal pemerintahan
   - Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan internal masih perlu dioptimalkan untuk mendukung proses audit, pemantauan tindak lanjut, serta analisis data pengawasan yang lebih efektif dan efisien

- Aplikasi pengawasan (e-audit) yang masih dalam pengembangan (belum *running*)
- Perlunya penguatan budaya integritas dan pencegahan korupsi secara berkelanjutan pada seluruh perangkat daerah guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani
- Belum meratanya kompetensi /sertifikasi di bidang pengawasan tertentu

7) Kesekretariatan DPRD
   - Belum optimalnya dukungan administrasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan masih menghadapi kendala dalam aspek administrasi, koordinasi, serta penyediaan data dan informasi yang cepat, akurat, dan terintegrasi.
   - Keterbatasan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur sekretariat DPRD Kompetensi aparatur dalam mendukung tugas persidangan, pengelolaan administrasi, penyusunan risalah, pengelolaan keuangan, serta pemanfaatan teknologi informasi masih perlu ditingkatkan agar pelayanan kepada DPRD lebih profesional dan responsif.
   - Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan kesekretariatan Sistem administrasi persidangan, dokumentasi, pengarsipan, dan pelayanan informasi DPRD belum sepenuhnya terintegrasi secara digital sehingga efisiensi dan efektivitas pelayanan masih perlu ditingkatkan.
8) Kesekretariatan Daerah
   - Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program dan kebijakan daerah.
   - Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi pelayanan administrasi belum optimal.
   - Kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur masih perlu ditingkatkan sesuai perkembangan kebutuhan organisasi.
   - Belum optimalnya sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja perangkat daerah.

- Dukungan kesekretariatan dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan responsif masih perlu ditingkatkan

9) Kewilayahan
   - Penguatan peningkatan kapasitas, manajemen ASN, pendanaan terhadap kecamatan dalam mendukung intermediery penyelenggaraan pelayanan publik.

2.4 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Gresik 2027

1. Penguatan Ketangguhan Daerah terhadap Perubahan Iklim dan Bencana Hidrometeorologi

Kabupaten Gresik sebagai daerah pesisir sekaligus kawasan industri strategis nasional memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap dampak perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi. Fenomena banjir, genangan, abrasi pantai, kekeringan, cuaca ekstrem, serta kenaikan muka air laut berpotensi mempengaruhi aktivitas ekonomi, infrastruktur, dan kehidupan masyarakat.

Perkembangan kawasan industri, pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan tata guna lahan turut meningkatkan tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko kerusakan lingkungan serta memperbesar potensi kerugian ekonomi maupun sosial apabila tidak diantisipasi secara memadai.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh bencana, pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, penguatan sistem peringatan dini, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan kelembagaan daerah dalam menghadapi risiko bencana hidrometeorologi.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis GEDSI dan SDGs

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam mendukung transformasi ekonomi dan peningkatan daya saing daerah. Kabupaten Gresik memiliki peluang besar untuk memanfaatkan bonus

demografi melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Meskipun indikator pembangunan manusia menunjukkan tren yang positif, masih terdapat tantangan berupa stunting, ketimpangan kualitas pendidikan, kesenjangan akses pelayanan dasar, serta ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri yang terus berkembang.

Pembangunan sumber daya manusia perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) agar seluruh kelompok masyarakat memperoleh kesempatan yang setara dalam menikmati hasil pembangunan dan meningkatkan kualitas hidupnya.

3. Penanggulangan Kemiskinan Kronis dan Multidimensi

Penurunan angka kemiskinan masih menjadi salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Gresik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkeadilan. Meskipun tingkat kemiskinan Kabupaten Gresik relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional, masih terdapat kelompok masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan.

Kemiskinan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan layak, sanitasi, kesempatan kerja, dan perlindungan sosial. Selain itu, adanya kelompok masyarakat miskin kronis memerlukan penanganan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara terintegrasi, konvergen, dan berbasis data melalui penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses pelayanan dasar, serta intervensi yang tepat sasaran untuk menurunkan kemiskinan kronis maupun kemiskinan multidimensi.

4. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Keunggulan Daerah dan Mitigasi Eksternalitas Industri Smelter

Kabupaten Gresik memiliki posisi strategis sebagai salah satu pusat industri nasional dengan didukung keberadaan kawasan industri, pelabuhan, serta jaringan logistik yang terintegrasi. Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor industri, perdagangan, jasa, pertanian, dan perikanan.

Di sisi lain, perkembangan industri skala besar, khususnya industri smelter dan hilirisasi mineral, berpotensi menimbulkan berbagai eksternalitas terhadap lingkungan hidup, infrastruktur wilayah, maupun kondisi sosial masyarakat apabila tidak dikelola secara optimal.

Pertumbuhan ekonomi daerah perlu diarahkan agar lebih inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan keterkaitan ekonomi lokal, pengembangan UMKM, peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, serta mitigasi dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas industri sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.

5. Keselarasan Pembangunan Wilayah Didukung Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah

Kabupaten Gresik memiliki karakteristik wilayah yang beragam meliputi kawasan perkotaan, perdesaan, pesisir, kepulauan, dan kawasan industri yang memerlukan pendekatan pembangunan yang terintegrasi dan berkeadilan. Pemerataan pembangunan antarwilayah menjadi salah satu tantangan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Perbedaan tingkat perkembangan wilayah serta kebutuhan infrastruktur dasar masih menimbulkan kesenjangan akses terhadap pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi ini memerlukan peningkatan konektivitas antarwilayah agar distribusi barang, jasa, dan mobilitas masyarakat dapat berjalan lebih efisien.

Untuk itu, diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan strategis melalui peningkatan kualitas jalan, jembatan, transportasi, irigasi, sanitasi, air minum, dan infrastruktur pendukung lainnya guna memperkuat keterhubungan antar pusat pertumbuhan dan meningkatkan daya saing wilayah.

6. Pembangunan Desa Berbasis Kebutuhan Lokal (Village Demand Driven) dan Pengembangan Pariwisata Religi serta Kelestarian Budaya

Desa memiliki peran penting sebagai basis pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Gresik. Keberagaman potensi dan karakteristik desa memerlukan pendekatan pembangunan yang disusun berdasarkan kebutuhan, aspirasi, dan potensi lokal masing-masing wilayah.

Di sisi lain, Kabupaten Gresik memiliki potensi besar pada sektor pariwisata religi, budaya, sejarah, dan kawasan pesisir yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat. Potensi tersebut perlu dikembangkan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga identitas daerah dan kearifan lokal.

Melalui pendekatan *Village Demand Driven,* pembangunan desa diharapkan mampu meningkatkan kemandirian masyarakat desa, memperkuat ekonomi lokal, mengurangi kesenjangan wilayah, serta mendorong pengembangan pariwisata religi dan budaya sebagai bagian dari penguatan identitas Kabupaten Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri.

7. Transformasi Digital dan Implementasi Smart City

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan pola pelayanan publik, aktivitas ekonomi, dan interaksi sosial masyarakat yang semakin berbasis digital. Transformasi digital menjadi kebutuhan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa kesenjangan infrastruktur digital, literasi digital masyarakat, serta integrasi sistem

informasi antar perangkat daerah yang perlu terus ditingkatkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

Implementasi konsep Smart City diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta mendorong terciptanya inovasi daerah yang mampu meningkatkan daya saing Kabupaten Gresik.

8. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Transparan, dan Responsif

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel merupakan prasyarat utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik mendorong perlunya penguatan reformasi birokrasi secara berkelanjutan.

Masih terdapat tantangan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, integrasi perencanaan dan penganggaran, penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika pembangunan yang semakin kompleks.

Penguatan tata kelola pemerintahan perlu dilakukan melalui peningkatan profesionalisme aparatur, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

9. Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah dan Optimalisasi Pendanaan Inovatif

Kebutuhan pendanaan pembangunan Kabupaten Gresik terus meningkat seiring dengan semakin besarnya kebutuhan infrastruktur, pelayanan dasar, dan program pembangunan strategis daerah. Di sisi lain, kapasitas fiskal daerah masih menghadapi keterbatasan sehingga memerlukan strategi pengelolaan keuangan yang lebih adaptif dan inovatif.

Ketergantungan terhadap pendapatan transfer serta meningkatnya kebutuhan belanja pembangunan menuntut pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola keuangan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kualitas belanja daerah, serta pengembangan berbagai alternatif pembiayaan pembangunan melalui skema pendanaan inovatif dan kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan.

BAB 3
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Prioritas pembangunan Kabupaten Gresik pada tahun 2027 merupakan penjabaran Visi Misi dan Tujuan Pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Selain itu juga mencakup kebijakan yang mendukung prioritas daerah yang berdasarkan Tema RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2027 yaitu "Penguatan Infrastruktur dan layanan dasar serta fondasi Pembangunan yang menjadi prasyarat bagi kemajuan di tahun-tahun berikutnya".

Penetapan program dan kegiatan prioritas didasarkan melalui harmonisasi dan keselarasan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2025-2029 diharapkan dapat memacu tercapainya target kinerja utama di tahun 2027 dan mendukung pencapaian target prioritas nasional, provinsi maupun Kabupaten Gresik.

Arah kebijakan ekonomi daerah pada prinsipnya ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai dasar dalam perumusan program, kegiatan dan subkegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana, sehingga arah kebijakan ekonomi daerah perlu disusun berpedoman pada dokumen Rancangan RPJMD 2025-2029. Rancangan Ekonomi Daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan formula bagi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Gresik tahun 2027 yang keberhasilannya dapat dilihat dari berbagai indikator ekonomi makro untuk mencapai tujuan pembangunan serta mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi.

Rancangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah dibangun atas dasar implementasi tema Pembangunan tahun 2027 yaitu "Penguatan Infrastruktur dan layanan dasar serta fondasi Pembangunan yang menjadi prasyarat bagi kemajuan di tahun-tahun berikutnya", penanganan isu-isu strategis memuat kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang mencakup tentang indikator ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian Kabupaten Gresik Tahun 2025 masih didominasi oleh sektor industri pengolahan yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, Kabupaten Gresik juga memiliki potensi yang besar pada sektor perikanan, kelautan, perdagangan, jasa, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah perekonomian, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana disajikan pada Tabel 3.n, disampaikan perbandingan target indikator makro Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik Tahun 2027 yang meliputi antara lain laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Gini Ratio, serta indikator makro lainnya. Perbandingan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keselarasan target pembangunan Kabupaten Gresik dengan target pembangunan Provinsi Jawa Timur, sekaligus menunjukkan kontribusi daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan di tingkat provinsi. Penyajian ini juga menjadi dasar dalam menilai posisi dan arah pembangunan daerah agar tetap selaras dengan kebijakan pembangunan regional dan nasional.

Dalam penyusunan arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2027, selain mengacu pada implementasi target dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, juga mempertimbangkan perkembangan kondisi perekonomian daerah pada Tahun 2026 serta proyeksi ekonomi Tahun 2027. Pendekatan tersebut dilakukan agar arah kebijakan dan target indikator makro yang ditetapkan tetap adaptif terhadap dinamika ekonomi, tantangan pembangunan, serta berbagai peluang yang berkembang, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat berlangsung secara efektif, responsif, dan berkelanjutan.

Tabel 3.1
Perbandingan Target Indikator Makro Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik Tahun 2027

No	Indikator Makro	Satuan	Target Nasional Tahun 2027	Target Provinsi Jawa Timur Tahun 2027	Target Kabupaten Gresik Tahun 2027
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,80–6,50	5,00- 6,10	4,80 - 5,88
2	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	$5.800 - $5.840	83,07 - 107,37	142,14 - 150,01
3	Tingkat Kemiskinan	%	6,0 – 6,5	7,80-8,70	8,26 - 9,21
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,30 – 4,87	3,50-4,47	6,88 - 5,39
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*	Indeks	0,575	0,65 - 0,66	80,17 - 81,07
6	Gini Ratio	Indeks	0,362 – 0,367	0,369-0,379	0,295 - 0,335
7	Tingkat Inflasi	%	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5	3,5

Sumber: BPS Gresik, Jawa Timur, Nasional 2025

*) = Provinsi dan Nasional menggunakan Indeks Modal Manusia

Meskipun memiliki struktur ekonomi yang kuat, pembangunan ekonomi Kabupaten Gresik masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain tingginya ketergantungan pada sektor industri pengolahan dan transfer pemerintah pusat, perlunya diversifikasi struktur ekonomi untuk meningkatkan ketahanan ekonomi daerah, belum optimalnya kontribusi sektor ekonomi maritim, perikanan, dan UMKM, fluktuasi harga dan pasokan bahan pokok yang berpengaruh terhadap inflasi daerah, serta masih adanya kesenjangan kualitas dan daya saing sumber daya manusia lokal terhadap kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2027 difokuskan pada penguatan fondasi ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

3.1.1 Perkembangan Perekonomian Daerah

Perekonomian Kabupaten Gresik tahun 2025 menunjukkan kinerja positif yaitu tumbuh 4.91 persen. Struktur perekonomia Kabupaten Gresik tahun 2025 dari sisi Lapangan Usaha di dominasi oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 52,58 persen. Sementara itu, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mendominasi perekonomian Kabupaten Gresik dari sisi pengeluaran sebesar 61,34 persen.

3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Angka PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten gresik tahun 2025 senilai 202.004,47 miliar rupiah. Kategori Industri Pengolahan masih memberi sumbangan terbesar pada PDRB Kabupaten Gresik, mencapai 52,58 Persen. Pada peringkat kedua yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan peranan sebesar 12,69 Persen. Kemudian disusul dengan kategori konstruksi yang mencapai 8,58 persen.

Sementara itu, dilihat berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Gresik tumbuh positif 4,91 persen. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada kategori Jasa Perusahaan yaitu mencapai 9,01 persen. Tren laju pertumbuhan ekonomi Gresik ditunjukkan pada Tabel 3.1 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi

Uraian	Laju Pertumbuhan Ekonomi (y-on-y) Tahunan Nasional, Jawa Timur, dan Kabupaten Gresik Tahun 2021-2025 (Persen)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Nasional	3,70	5,31	5,05	5,03	5,11
Jawa Timur	3,56	5,34	4,95	4,93	5,33
Kabupaten Gresik	3,79	7,38	4,62	4,79	4,91

Sumber: BPS Gresik, Jawa Timur, Nasional 2025

Sektor Ekonomi Kabupaten Gresik didominasi sektor industri pengolahan yang menyumbang lebih dari 50% terhadap PDRB. Pada tahun 2025, sektor jasa Perusahaan mencatat pertumbuhan tertinggi diantara lapangan usaha.

Beberapa faktor yang ikut berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Gresik antara lain :

1. Dominasi industry manufaktur dan Kawasan industry besar
2. Peran konsumsi rumah tangga yang kuat sebagai penopang permintaan domestic
3. Aktivitas jasa dan layanan yang mulai tumbuh signifikan
4. Realisasi investasi yang cukup tinggi terutama pada Penanaman Modal asing (PMA)

Tabel 3.3

PDRB ADHK (Miliar Rp.)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jawa Timur	1.668.754,36	1.757.874,90	1.844.808,68	1.935.810,15	2.038.961,63
Gresik	101.318,69	108.796,88	113.825,43	119.274,42	125.125,85

Sumber: BPS Gresik, Jawa Timur, Nasional 2025

3.1.1.2 Kinerja Perdagangan

Perdagangan Kabupaten Gresik menunjukkan kinerja yang solid, ditandai oleh *surplus neraca perdagangan*, aktivitas ekspor yang signifikan dari industri dan UMKM, serta perdagangan domestik yang mendukung stabilitas harga. Pemerintah daerah beserta lembaga terkait terus mendorong produktivitas perdagangan agar wilayah semakin kompetitif di pasar nasional dan internasional.

Pada tahun 2024, nilai ekspor Kabupaten Gresik mencapai sekitar USD 2.52 miliar sedangkan nilai impor sekitar USD 2,12 miliar. Surplus neraca perdangan sekitar USD 397,4 juta artinya nilai ekspor lebih besar dari pada impor.

Tabel 3.4

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Gresik Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2021–2025

Jenis Pengeluaran	2021	2022	2023	2024	2025
Net Ekspor Barang dan Jasa	16.206,09	19.376,91	18.598,69	19.053,35	20.748,93

Sumber: BPS Gresik, Jawa Timur, Nasional 2025

3.1.1.3 Kinerja Investasi

Pada Tahun 2024 realisasi Investasi Kabupaten Gresik sekitar 37,9 Triliun. Dengan komposisi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 69,13 % sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 30,87 %. Pada

semester 1 2025 realisasi Investasi mencapai 16,1 Triliun, mencerminkan adanya tren berlanjutnya minat investor masuk ke Gresik. Pada tahun 2024, Pertambangan menjadi Sektor utama penyumbang investasi dengan nilai sebesar 15,5 triliun, industry mineral non logam sebesar 3,55 triliun, industry kimia dan farmasi sebesar 3,32 triliun, perumahan dan Kawasan industry sebesar 2,23 triliun.

Penyebaran investasi yang luas pada sektor-sektor ini menunjukkan Gresik tidak hanya bergantung pada satu komoditas, namun juga sektor manufaktur dan pembangunan kawasan yang mampu menarik modal. Salah satu faktor penting yang mendorong investasi di Gresik adalah keberadaan kawasan industri strategis seperti Java Integrated Industrial Port Estate (JIIPE) dan kawasan ekonomi khusus (KEK). Contohnya, pada *Triwulan I 2025* saja nilai investasi di KEK JIIPE Gresik mencapai lebih dari Rp 87 triliun (termasuk investasi pelaku usaha besar di dalamnya). Ini menegaskan peran infrastuktur industri untuk menarik investor besar.

Tabel 3.5

Perkembangan Realisasi Investasi Gresik

Uraian	PMA (Triliun)	PMDN (Triliun)	TOTAL (Triliun)
2021	8,5	8,2	16,7
2022	24,8	6,7	31,5
2023	39,8	9,7	49,5
2024	26,2	11,7	37,9
2025	14,3	15,1	29,4

Sumber: BPS Gresik, Jawa Timur, Nasional 2025

3.1.1.4 Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten Gresik pada tahun 2025 hingga awal 2026 relatif stabil dan terkendali, berada di kisaran ±2 %–2,5 %. Tren ini menunjukkan bahwa harga kebutuhan pokok dan konsumsi masyarakat tidak mengalami lonjakan signifikan, yang menggambarkan keberhasilan pengendalian inflasi daerah oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama pemerintah dan pelaku usaha

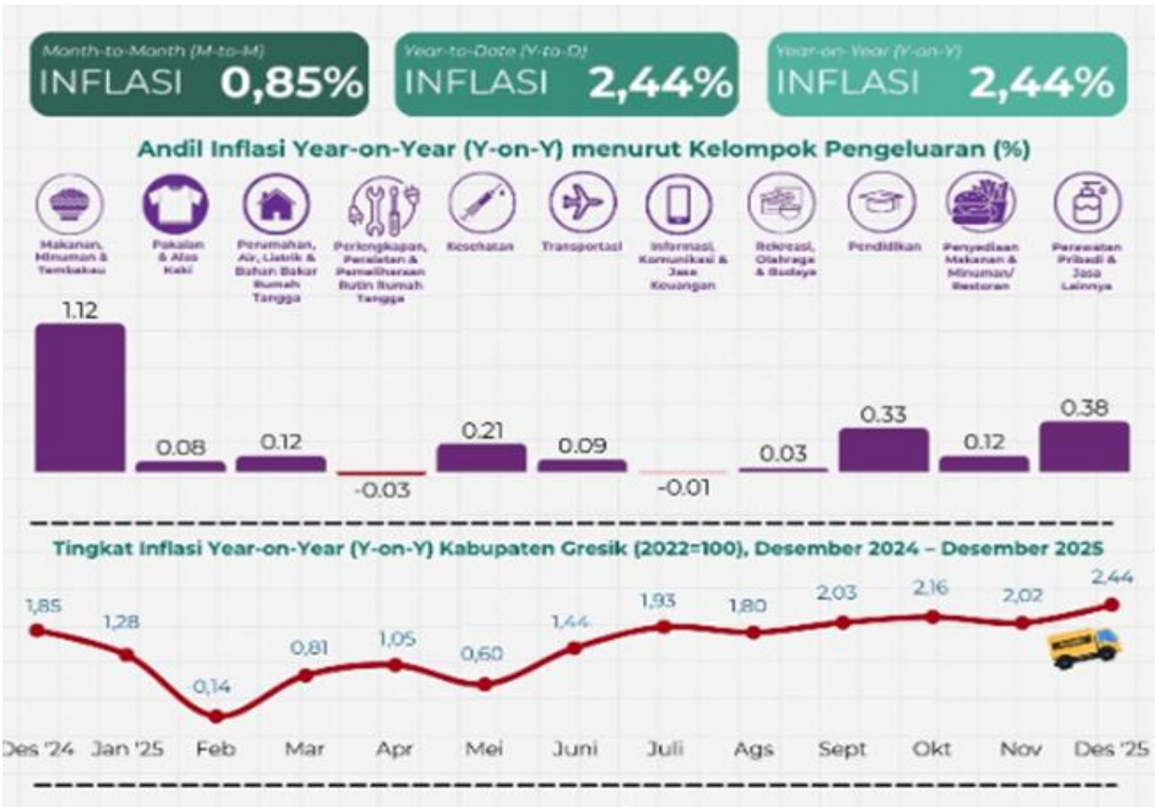

Gambar 3.1 Tingkat Inflasi yoy menurut kelompok pengeluaran tahun 2025
Sumber: BPS Gresik, Jawa Timur, Nasional 2025

3.1.1.5 Kinerja Perbankan

Kekuatan sektor perbankan dan ekosistem keuangan daerah tercermin nyata pada capaian Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) yang menunjukkan nilai sebesar 4,58. Nilai ini menempatkan Kabupaten Gresik pada predikat "Sangat Baik". Capaian luar biasa ini menjadi bukti bahwa Kabupaten Gresik telah berhasil menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif, di mana modal usaha tersedia dengan baik, tabungan masyarakat terjamin, dan instrumen keuangan digital telah terintegrasi menjadi bagian dari gaya hidup ekonomi warga sehari-hari. Sinergi antara kebijakan pemerintah daerah dan sektor perbankan menjadi kunci utama dalam mempertahankan predikat tersebut. Salah satunya ditunjang secara masif melalui Gerakan Gemar Menabung yang diinisiasi oleh Bupati Gresik. Gerakan ini secara khusus menyasar sektor pendidikan dan generasi muda melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR). Dengan mendorong ribuan siswa di Kabupaten Gresik untuk membuka rekening tabungan Simpanan Pelajar (SimPel), Pemerintah Kabupaten Gresik secara langsung berhasil meningkatkan angka inklusi keuangan secara signifikan. Program ini berkontribusi besar pada penguatan pilar "Ketersediaan Akses" dalam dimensi penilaian IKAD.

Di sisi kelembagaan BUMD, dukungan sektor perbankan daerah diperkuat oleh kinerja BPR Bank Gresik sebagai institusi jasa keuangan milik daerah. Berdasarkan capaian kinerja tahun 2025, BPR Bank Gresik mencatat target kinerja sebesar Rp11.688.219.301 dengan realisasi mencapai Rp9.327.682.191 atau sebesar 79,80 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa BPR Bank Gresik tetap mampu menjaga stabilitas kinerja perusahaan di tengah dinamika ekonomi dan persaingan sektor jasa keuangan yang semakin kompetitif. Selain aspek finansial, BPR Bank Gresik juga berhasil mempertahankan predikat bank sehat dengan tata kelola perusahaan yang baik, dibuktikan melalui raihan penghargaan *Indonesian Platinum Award 2025* kategori *"The Best Performance Bank with Good Corporate Governance of The Year"*.

Perkembangan layanan perbankan di Kabupaten Gresik juga terus diarahkan pada penguatan kualitas pelayanan dan transformasi digital guna meningkatkan kemudahan akses transaksi keuangan masyarakat. Melalui modalitas IKAD yang berada pada predikat "Sangat Baik" serta penguatan literasi keuangan sejak dini lewat tabungan SimPel, optimalisasi layanan perbankan diharapkan mampu mendukung pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memperluas inklusi keuangan, serta meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat secara lebih efektif dan efisien. Menuju tahun perencanaan 2027, Pemerintah Kabupaten Gresik berkomitmen untuk terus mendorong sinergi yang lebih erat dengan sektor perbankan daerah. Peran perbankan, khususnya penguatan pilar ketersediaan akses keuangan dan optimalisasi BPR Bank Gresik, diharapkan dapat semakin optimal dalam mendukung pembiayaan sektor produktif, perluasan digitalisasi keuangan, penguatan ekonomi kerakyatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gresik secara menyeluruh.

3.1.2 Perkiraan Makro Ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2026 dan 2027

Pada tahun 2026, Perekonomian Kabupaten Gresik diperkirakan akan tetap tumbuh positif, mengikuti tren pertumbuhan ekonomi nasional dan Jawa Timur yang solid. Secara nasional, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5,2 %–5,8 % tahun 2026. Karena Gresik adalah salah satu *lokomotif ekonomi* di Jatim dengan basis industri pengolahan yang kuat dan investasi tinggi, kemungkinan

pertumbuhan ekonomi Gresik pada 2026 berada di kisaran ~5,0 %–5,5 % YoY — sedikit meningkat dibandingkan pertumbuhan 2025 sebesar 4,91 %.

Pada tahun 2027, Dengan asumsi kondisi makro tetap kondusif secara nasional dan regional (termasuk permintaan luar negeri, investasi, konsumsi domestik), serta implementasi program pembangunan daerah maka Proyeksi pemerintah nasional menunjukkan tren pertumbuhan moderat lanjutan. Di Gresik diperkirakan pertumbuhan akan menjaga tren pertumbuhan yang stabil, mungkin berada di sekitar ~5,2 %–5,7 % YoY, jika investasi, konsumsi rumah tangga, dan ekspor tetap kuat.

Tabel 3.6

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Gresik

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pertumbuhan Ekonomi	4,72-5,32	4,78 – 5,35	4,80-5,88	4,82-5,50	4,85-5,52	4,83-5,43

Sumber: BPS Gresik, Jawa Timur, Nasional 2025

3.1.3 Analisis Investasi

Hubungan antara pembentukan modal dan pertumbuhan output tercermin pada indikator makroekonomi yang dikenal sebagai ICOR (Incremental Capital Output Ratio). Indikator ini menunjukkan besarnya tambahan modal (kapital) baru yang dibutuhkan untuk meningkatkan satu unit output (atau nilai tambah).

Secara umum, selain digunakan untuk menentukan seberapa besar kebutuhan investasi pada tingkat pertumbuhan ekonomi, ICOR juga dapat digunakan untuk melihat efisiensi investasi yang ditanamkan di suatu daerah atau di suatu negara pada periode tertentu. Semakin kecil nilai ICOR berarti investasi semakin efisien dan semakin besar nilai ICOR berarti investasi makin tidak efisien.

Tabel 3.7

Incremental Capital Ratio (ICOR)

Uraian	*Incremental Capital Output Ratio* (Persen)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Gresik	6,22	3,27	5,13	4,96	4,90

Sumber: BPS Gresik, Jawa Timur, Nasional 2025

Kinerja *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) Kabupaten Gresik selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika efisiensi investasi yang berfluktuasi. Kondisi ini mencerminkan bahwa proses transformasi investasi menjadi output ekonomi di Kabupaten Gresik belum berlangsung secara stabil, namun masih berada dalam koridor yang wajar bagi daerah dengan struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor industri pengolahan padat modal. ICOR merupakan indikator kunci yang menggambarkan hubungan antara kebutuhan investasi dengan kemampuan daerah dalam menghasilkan tambahan output. Dengan demikian, target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam RPJMD secara implisit mensyaratkan tingkat efisiensi investasi tertentu.

Hubungan antara pembentukan modal dan pertumbuhan output tercermin pada indikator makroekonomi yang dikenal sebagai ICOR (Incremental Capital Output Ratio). Indikator ini menunjukkan besarnya tambahan modal (kapital) baru yang dibutuhkan untuk meningkatkan satu unit output (atau nilai tambah).

Secara umum, selain digunakan untuk menentukan seberapa besar kebutuhan investasi pada tingkat pertumbuhan ekonomi, ICOR juga dapat digunakan untuk melihat efisiensi investasi yang ditanamkan di suatu daerah atau di suatu negara pada periode tertentu. Semakin kecil nilai ICOR berarti investasi semakin efisien dan semakin besar nilai ICOR berarti investasi makin tidak efisien.

Secara grafis, hasil perkembangan nilai ICOR Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Proyeksi investasi di Gresik pada 2026 dan 2027 tetap kuat karena Peran kawasan industri besar dan KEK yang menarik investasi manufaktur, logistik, dan energi serta adanya Tren realisasi investasi yang tinggi pada 2024–2025, dan potensi lanjutan masuknya modal.
2. Peningkatan penanaman modal akan mendorong pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang positif dan ikut memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah.

3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

3.1.4.1 Tantangan Perekonomian Daerah

Perekonomian Kabupaten Gresik dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kinerja yang relatif kuat dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor industri pengolahan. Namun demikian, dalam kerangka

perencanaan pembangunan tahun berjalan dan proyeksi tahun berikutnya, terdapat sejumlah tantangan strategis yang perlu diantisipasi, yaitu:

1. Ketergantungan pada Sektor Industri Pengolahan
   Struktur ekonomi Kabupaten Gresik masih didominasi oleh sektor industri pengolahan dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB. Ketergantungan ini membuat perekonomian daerah cukup sensitif terhadap fluktuasi permintaan global, harga komoditas, dan dinamika ekspor-impor. Ketika terjadi perlambatan ekonomi global, kinerja industri berpotensi terdampak signifikan.
2. Ketidakpastian Ekonomi Global dan Nasional
   Dinamika geopolitik, kebijakan perdagangan internasional, serta kondisi makro nasional berpotensi mempengaruhi stabilitas investasi, ekspor, serta daya beli masyarakat.
3. Kesenjangan Antarwilayah dan Antar Sektor
   Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya merata antar kecamatan, khususnya antara wilayah industri dan wilayah kepulauan/agraris. Transformasi ekonomi perlu diimbangi dengan pemerataan pembangunan dan penguatan sektor pertanian, perikanan, serta UMKM.
4. Daya Saing Tenaga Kerja
   Masuknya investasi skala besar membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi dan keterampilan yang sesuai kebutuhan industri. Tantangan yang dihadapi adalah peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan vokasi, sertifikasi, dan link and match dengan dunia usaha.
5. Tekanan Inflasi dan Stabilitas Harga
   Walaupun inflasi relatif terkendali, volatilitas harga pangan dan energi tetap menjadi risiko yang harus dikelola melalui penguatan distribusi, ketahanan pangan daerah, dan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
6. Isu Lingkungan dan Keberlanjutan Industri
   Sebagai daerah industri, Gresik menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, termasuk pengelolaan limbah industri, emisi, dan daya dukung lingkungan.

3.1.4.2 Prospek Perekonomian Daerah

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 diprakirakan tetap baik dan terjaga kedepan. Prospek perbaikan kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2026 ditopang oleh potensi kenaikan investasi seiring dengan aktivitas manufaktur yang lebih masif, serta berlanjutnya pembangunan proyek-proyek strategis pemerintah dan swasta. Lebih lanjut, konsumsi dan permintaan eksternal diprakirakan tetap terjaga baik turut mendukung perekonomian.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, Kabupaten Gresik memiliki prospek ekonomi yang positif dengan sejumlah faktor pendorong utama sebagai berikut:

1. Penguatan Investasi dan Kawasan Industri Strategis
   Keberadaan kawasan industri terpadu seperti Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) menjadi keunggulan kompetitif utama. Infrastruktur pelabuhan, logistik, dan kawasan ekonomi terintegrasi mendorong masuknya Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
2. Hilirisasi dan Diversifikasi Industri
   Kebijakan hilirisasi industri nasional memberikan peluang besar bagi Gresik untuk memperkuat rantai nilai industri, khususnya sektor kimia, pupuk, semen, mineral non-logam, dan manufaktur berbasis ekspor
3. Stabilitas Konsumsi Rumah Tangga
   Sebagai bagian dari kawasan metropolitan Surabaya Raya, Gresik memiliki basis konsumsi rumah tangga yang kuat. Stabilitas inflasi dan pertumbuhan pendapatan masyarakat menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah
4. Penguatan UMKM dan Ekonomi Lokal
   Transformasi digital, akses pembiayaan perbankan, serta dukungan promosi produk lokal membuka peluang peningkatan daya saing UMKM dalam rantai pasok industri maupun pasar ekspor
5. Potensi Ekonomi Maritim dan Kepulauan
   Wilayah Bawean dan potensi kelautan/perikanan membuka ruang diversifikasi ekonomi berbasis maritim, pariwisata bahari, dan pengolahan hasil perikanan

6. Stabilitas Makro yang Terkendali

   Dengan pertumbuhan ekonomi yang konsisten di kisaran moderat dan inflasi yang relatif stabil, prospek makro ekonomi Gresik pada 2026–2027 diperkirakan tetap positif dan resilien terhadap tekanan eksternal.

Secara keseluruhan, perekonomian Kabupaten Gresik memiliki fundamental yang kuat berbasis industri dan investasi, didukung infrastruktur strategis dan konektivitas regional. Tantangan utama terletak pada diversifikasi ekonomi, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan daya tahan terhadap gejolak eksternal.

Dengan strategi pembangunan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan, Gresik berpeluang mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata

3.1.5 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi

Isu strategis ekonomi daerah yang menjadi dasar perumusan arah kebijakan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2027 meliputi:

1. Ketahanan dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi di luar sektor industri pengolahan;
3. Penguatan ekonomi kerakyatan dan UMKM;
4. Optimalisasi potensi ekonomi pesisir dan perikanan;
5. Peningkatan daya saing investasi dan iklim usaha;
6. Pengendalian inflasi dan stabilitas harga kebutuhan pokok;
7. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja lokal.

Untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, arah kebijakan ekonomi daerah difokuskan pada:

1. Diversifikasi struktur ekonomi berbasis industri hilir dan ekonomi maritim. Melalui kebijakan :
   a. Penguatan nilai tambah sektor industri melalui hilirisasi;
   b. Pengembangan sektor perdagangan, jasa, dan ekonomi kreatif
   c. Penguatan keterkaitan sektor industri dengan ekonomi lokal
2. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi dan pelatihan berbasis kebutuhan industri.
3. Penguatan ekosistem investasi yang kondusif dan berdaya saing.
4. Pengendalian inflasi daerah dan stabilisasi harga pangan strategis.

5. Penguatan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis digital. Melalui kebijakan :
   a. Peningkatan akses pembiayaan dan pendampingan UMKM;
   b. Digitalisasi UMKM dan penguatan pemasaran produk lokal;
   c. Revitalisasi pasar tradisional dan pusat ekonomi rakyat;
   d. Penguatan kemitraan UMKM dengan industri besar.
6. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dan industri biru. Melalui kebijakan:
   a. Modernisasi budidaya dan pengolahan perikanan (khususnya bandeng);
   b. Pengembangan sentra produksi dan pemasaran hasil perikanan;
   c. Peningkatan akses pasar dan sistem logistik hasil perikanan.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Penyusunan proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan capaian realisasi pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya, target pertumbuhan ekonomi daerah, perkembangan investasi, kondisi perekonomian regional dan nasional, serta kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan. Sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Gresik memiliki peluang untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk pemanfaatan sumber penerimaan baru yang berasal dari kebijakan opsen pajak daerah.

Kebijakan tersebut telah diakomodasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2025. Melalui kebijakan dimaksud, Pemerintah Kabupaten Gresik memperoleh tambahan sumber pendapatan yang berasal dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan.

Proyeksi pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2027 dirumuskan berdasarkan perkembangan potensi objek dan subjek pajak

daerah, tingkat kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat, pertumbuhan investasi, serta efektivitas tata kelola pendapatan daerah. Penyusunan proyeksi PAD dilakukan dengan memperhatikan karakteristik masing-masing sumber pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Pemungutannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2025. Proyeksi penerimaan PBB-P2 dihitung berdasarkan perkembangan objek pajak, pertumbuhan kawasan permukiman, perdagangan, jasa, industri, serta hasil pemutakhiran data objek dan subjek pajak secara berkala.
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2025. Proyeksi penerimaan BPHTB didasarkan pada perkembangan transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan, pembangunan kawasan perumahan, kawasan industri, dan pertumbuhan investasi di Kabupaten Gresik.
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2025. Proyeksi penerimaan PBJT mempertimbangkan perkembangan sektor makanan dan minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa hiburan yang tumbuh seiring perkembangan ekonomi daerah.

4. Pajak Reklame dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2025. Proyeksi penerimaan dihitung berdasarkan perkembangan kegiatan usaha, promosi perdagangan, dan pemanfaatan media reklame di wilayah Kabupaten Gresik.
5. Pajak Air Tanah (PAT) dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2025. Proyeksi penerimaan mempertimbangkan tingkat pemanfaatan air tanah oleh sektor industri, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan aspek konservasi sumber daya air dan keberlanjutan lingkungan hidup.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2025. Proyeksi penerimaan dihitung berdasarkan potensi produksi mineral bukan logam dan batuan, perkembangan sektor konstruksi, serta aktivitas pembangunan yang berlangsung di wilayah Kabupaten Gresik.
7. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis pendapatan yang mulai berlaku efektif sejak implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Pemungutannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2025. Proyeksi penerimaan opsen PKB didasarkan pada perkembangan jumlah kendaraan bermotor, tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan, dan efektivitas koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
8. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan bagian dari kebijakan reformasi perpajakan daerah sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Pemungutannya mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2025. Proyeksi penerimaan didasarkan pada perkembangan penjualan kendaraan bermotor baru maupun transaksi peralihan kepemilikan kendaraan.

9. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) merupakan penerimaan yang berasal dari tambahan pungutan atas Pajak MBLB sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2025. Proyeksi penerimaan mempertimbangkan perkembangan aktivitas pertambangan dan kebutuhan material konstruksi yang mendukung pembangunan daerah.
10. Retribusi Daerah dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2025. Proyeksi penerimaan dilakukan berdasarkan peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta penguatan tata kelola pemungutan retribusi daerah.
11. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan yang bersumber dari bagian laba atas penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan badan usaha lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Proyeksi penerimaan didasarkan pada peningkatan kinerja BUMD, penguatan tata kelola perusahaan, dan optimalisasi investasi daerah.
12. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari jasa giro, pendapatan bunga, hasil pemanfaatan aset daerah, tuntutan ganti kerugian daerah, dan penerimaan sah lainnya sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan pelaksanaannya. Proyeksi penerimaan dilakukan dengan

mempertimbangkan tren realisasi pendapatan dan optimalisasi pengelolaan aset daerah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2027 diharapkan mampu tumbuh secara berkelanjutan, meningkatkan kemandirian fiskal daerah, memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2027 didasarkan pada target pertumbuhan ekonomi daerah Tahun 2027, perkembangan indikator makro ekonomi daerah, realisasi APBD Tahun 2022–2025, serta evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2026. Proyeksi tersebut mempertimbangkan kondisi kapasitas fiskal daerah, perkembangan regulasi keuangan daerah, serta arah kebijakan nasional dan daerah dalam rangka mendukung kesinambungan pembangunan daerah.

Kemandirian fiskal Kabupaten Gresik diproyeksikan tetap berada pada kategori tinggi, yang tercermin dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Daerah yang terus mengalami penguatan. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui mekanisme opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Gresik diarahkan untuk terus mengoptimalkan penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta digitalisasi sistem pengelolaan pendapatan daerah.

Proyeksi komponen Pendapatan Asli Daerah disusun berdasarkan asumsi kebutuhan pendanaan pembangunan daerah untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, target pendapatan daerah diharapkan mampu mendukung prioritas pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

diakui sebagai penambah ekuitas dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran.

a. Pendapatan asli daerah;
    1) pajak daerah;
    2) retribusi daerah;
    3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
    4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
b. Pendapatan Transfer;
    1) Transfer Pemerintah Pusat
        a) dana perimbangan;
        b) dana insentif daerah;
        c) dana otonomi khusus;
        d) dana keistimewaan; dan
        e) dana desa.
    2) Transfer antar-daerah.
        a) pendapatan bagi hasil;
        b) bantuan keuangan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
    1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
    2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
    3) hasil kerja sama daerah;
    4) jasa giro;
    5) hasil pengelolaan dana bergulir;
    6) pendapatan bunga;
    7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
    8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
    9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
    10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
    11) pendapatan denda pajak daerah;
    12) pendapatan denda retribusi daerah; m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

13) pendapatan dari pengembalian;
14) pendapatan dari BLUD; dan
15) pendapatan lainnya sesuai.

3.2.2 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Gresik Tahun 2027 ditujukan untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan kapasitas pendapatan daerah yang berkelanjutan, optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan kualitas pengelolaan pendapatan, serta peningkatan sinergi pendanaan dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan ini disusun dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengenai perencanaan pembangunan daerah.

Tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gresik 2025–2029, sehingga kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk mendukung percepatan pencapaian target pembangunan daerah, penguatan pelayanan publik, serta peningkatan daya saing ekonomi wilayah. Dengan karakteristik Kabupaten Gresik sebagai kawasan industri nasional, pusat logistik Jawa Timur, daerah penyangga Kawasan Strategis Gerbangkertosusila, serta wilayah yang memiliki potensi maritim, perdagangan, jasa, dan industri pengolahan yang kuat, maka pengelolaan pendapatan daerah perlu difokuskan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang selaras dengan perkembangan ekonomi daerah. Adapun arah kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Gresik Tahun 2027 meliputi:

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah serta retribusi daerah, dengan mengedepankan prinsip kemudahan pelayanan, kepatuhan wajib pajak, dan perluasan basis pajak tanpa menambah beban masyarakat maupun dunia usaha secara berlebihan.
2. Penguatan digitalisasi pengelolaan pendapatan daerah, melalui integrasi sistem informasi perpajakan daerah, transaksi non-tunai, pemanfaatan data sektoral, pemutakhiran basis data objek dan subjek

pajak, serta pengembangan dashboard monitoring penerimaan daerah secara real time.

3. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang memiliki nilai ekonomi, baik melalui kerja sama pemanfaatan, sewa, Bangun Guna Serah (BGS), maupun bentuk kerja sama lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kontribusi terhadap PAD.
4. Peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui penguatan tata kelola perusahaan yang baik, peningkatan produktivitas usaha, pengembangan bisnis baru yang sesuai potensi daerah, serta optimalisasi dividen bagi pemerintah daerah.
5. Penguatan kualitas pelayanan perizinan dan investasi daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas basis pajak dan retribusi daerah, serta meningkatkan aktivitas usaha yang berdampak pada peningkatan penerimaan daerah.
6. Optimalisasi penerimaan transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, melalui peningkatan kualitas perencanaan, penguatan kinerja pembangunan daerah, pemenuhan indikator kinerja yang menjadi dasar pengalokasian transfer, serta percepatan pemenuhan persyaratan teknis berbagai skema pendanaan pemerintah.
7. Pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah yang inovatif, termasuk pemanfaatan potensi ekonomi kawasan industri, kawasan pelabuhan, kawasan perdagangan dan jasa, ekonomi kreatif, ekonomi digital, serta kerja sama pendanaan pembangunan dengan pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Penguatan pengawasan, pengendalian, dan penegakan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan daerah, melalui pemanfaatan teknologi informasi, cleansing data piutang daerah, penguatan pengawasan transaksi usaha, serta peningkatan kapasitas aparatur pengelola pendapatan daerah.
9. Mendorong kolaborasi pendanaan pembangunan daerah, melalui pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR), Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), kerja sama pemerintah dengan badan usaha, serta sumber pendanaan sah lainnya guna mendukung pembangunan daerah tanpa meningkatkan tekanan terhadap APBD.

Dengan arah kebijakan tersebut, pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Gresik Tahun 2027 diharapkan mampu memperkuat kapasitas

fiskal daerah, meningkatkan derajat kemandirian keuangan daerah, menjaga keberlanjutan pembangunan, serta mendukung terwujudnya Gresik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi industri-maritim yang maju, inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

3.2.2.1 Sumber Pendanaan APBD

Sumber pendanaan pembangunan yang berasal dari APBD Kabupaten Gresik Tahun 2027 merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah. Pengelolaan dan pengalokasian APBD dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi, serta berorientasi pada hasil sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.

Arah kebijakan pendanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2027 diprioritaskan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan SPM menjadi prioritas utama karena merupakan hak dasar warga negara yang wajib dijamin oleh pemerintah daerah pada urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan urusan sosial.

Selain pemenuhan SPM, pengalokasian APBD juga wajib memperhatikan mandatory spending yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, antara lain pemenuhan anggaran fungsi pendidikan, kesehatan, pengawasan, infrastruktur pelayanan publik, belanja yang mendukung penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, serta berbagai amanat penganggaran lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Pemenuhan mandatory spending tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan pembangunan nasional dan memastikan agenda prioritas nasional dapat diimplementasikan secara efektif di daerah.

Selanjutnya, APBD Kabupaten Gresik Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Timur, khususnya dalam penguatan sumber daya manusia, transformasi ekonomi

yang inklusif dan berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas layanan publik, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, transformasi digital pemerintahan, penguatan reformasi birokrasi, serta pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.

Setelah pemenuhan kewajiban pelayanan dasar, mandatory spending, dan dukungan terhadap prioritas nasional serta prioritas provinsi, kapasitas fiskal daerah selanjutnya diarahkan untuk mendukung pelaksanaan agenda pembangunan daerah yang tertuang dalam Nawakarsa Gresik Maju sebagai prioritas pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2027. Dukungan pendanaan tersebut difokuskan pada program-program yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan daya saing daerah, pemerataan pembangunan wilayah, dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Dengan demikian, arah pendanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2027 dilaksanakan melalui hierarki prioritas yang jelas.



Gambar 3.2 Hirarki Prioritas Pendanaan Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2027

Sumber : RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

Hierarki tersebut menjadi landasan dalam memastikan bahwa setiap rupiah belanja daerah memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, pembangunan provinsi, dan pembangunan Kabupaten Gresik secara terpadu.

3.2.2.2 Sumber Pendanaan Non APBD

Di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan dan keterbatasan kapasitas fiskal daerah, sumber pendanaan non APBD menjadi instrumen strategis untuk memperkuat akselerasi pembangunan daerah. Pendanaan non APBD diarahkan sebagai sumber pembiayaan komplementer yang digunakan untuk mendukung pencapaian target pembangunan yang belum dapat sepenuhnya didanai melalui APBD.

Pemanfaatan sumber pendanaan non APBD dilakukan melalui optimalisasi pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) perusahaan, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), investasi swasta, hibah, filantropi, perguruan tinggi, BUMN, BUMD, serta sumber pendanaan sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan pendanaan non APBD diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan Program Prioritas Nasional yang dilaksanakan di daerah, khususnya yang berkaitan dengan penguatan ketahanan pangan, penurunan kemiskinan dan stunting, pembangunan infrastruktur strategis, pengembangan kawasan industri dan hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, serta penguatan daya saing ekonomi daerah. Sebagai salah satu pusat industri nasional dan kawasan strategis di Jawa Timur, Kabupaten Gresik memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan sinergi pendanaan pembangunan melalui kolaborasi dengan dunia usaha, BUMN, dan investor. Oleh karena itu, pendanaan non APBD diarahkan untuk menjadi instrumen percepatan pembangunan yang mampu menciptakan efek pengungkit terhadap pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pengurangan kesenjangan wilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selaras dengan tema pembangunan daerah, sumber pendanaan non APBD juga dioptimalkan untuk mendukung implementasi Nawakarsa Gresik Maju, terutama pada program-program strategis yang membutuhkan dukungan investasi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan Kabupaten Gresik tidak hanya bertumpu pada kapasitas APBD, tetapi juga memanfaatkan potensi pendanaan eksternal secara terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.

a. Pendanaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

Pendanaan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program strategis yang menjadi prioritas nasional maupun prioritas provinsi di wilayah Kabupaten Gresik.

Sumber pendanaan ini meliputi:

- Belanja kementerian/lembaga melalui APBN;
- Dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- Program strategis nasional;
- Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- Bantuan sektoral lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Optimalisasi pendanaan dilakukan melalui peningkatan kualitas perencanaan, penguatan sinkronisasi program pusat-daerah, serta pengembangan proyek strategis yang memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran pembangunan nasional maupun pembangunan Provinsi Jawa Timur.

b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR)

Keberadaan kawasan industri besar dan perusahaan nasional maupun multinasional di Kabupaten Gresik merupakan potensi strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR). Pemanfaatan TJSL/CSR diarahkan untuk mendukung program pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, antara lain:

- Pengurangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem;
- Penurunan prevalensi stunting;
- Peningkatan kualitas pendidikan;
- Peningkatan kualitas layanan kesehatan;
- Pengembangan UMKM dan ekonomi masyarakat;
- Pemberdayaan desa;
- Pelestarian lingkungan hidup;
- Penguatan ketahanan sosial masyarakat;
- Pengembangan kawasan pesisir dan kepulauan;
- Peningkatan kualitas infrastruktur sosial dan lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Gresik mendorong penguatan sinergi dan integrasi program TJSL/CSR agar lebih selaras dengan prioritas pembangunan daerah sehingga mampu menciptakan dampak pembangunan yang lebih terukur, berkelanjutan, dan tepat sasaran.

c. Penguatan Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

BUMD merupakan instrumen strategis daerah yang tidak hanya berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai agen pembangunan daerah (regional development agent) yang mampu mendukung pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Arah kebijakan Tahun 2027 difokuskan pada penguatan tata kelola, peningkatan kinerja usaha, ekspansi layanan, dan peningkatan kontribusi BUMD terhadap pembangunan daerah.

1. PT Gresik Migas

PT Gresik Migas diarahkan untuk memperkuat perannya dalam sektor energi melalui pengembangan kerja sama usaha, optimalisasi potensi energi daerah, serta pengembangan bisnis yang mendukung ketahanan energi dan kebutuhan kawasan industri. Keberadaan PT Gresik Migas diharapkan mampu menjadi katalisator investasi sektor energi sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

2. Bank Gresik

Bank Gresik diarahkan untuk memperkuat fungsi intermediasi keuangan daerah melalui perluasan akses pembiayaan bagi UMKM, koperasi, sektor produktif, dan pelaku ekonomi lokal. Selain itu, Bank Gresik didorong menjadi penggerak transformasi digital keuangan daerah, peningkatan literasi keuangan masyarakat, dan penguatan ekosistem ekonomi lokal yang inklusif.

3. Perumda Giri Tirta

Perumda Giri Tirta diarahkan untuk memperkuat pelayanan air minum melalui peningkatan cakupan layanan, kualitas pelayanan, keberlanjutan sistem penyediaan air minum, serta pengembangan infrastruktur SPAM. Penguatan Perumda Giri Tirta menjadi penting dalam mendukung pencapaian target SPM bidang pekerjaan umum dan target nasional akses air minum aman.

d. Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakan instrumen pembiayaan strategis yang digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik tanpa membebani kapasitas fiskal daerah secara langsung. Dalam RPJMD Kabupaten

Gresik 2025–2029, KPBU diposisikan sebagai salah satu instrumen utama untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang membutuhkan investasi besar, teknologi tinggi, dan keberlanjutan pengelolaan jangka panjang.

Melalui skema KPBU, Pemerintah Kabupaten Gresik berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, menarik investasi swasta, serta menciptakan efek pengungkit terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

3.2.3 Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.

Pada Tahun 2027, arah kebijakan pengelolaan belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah secara efektif, efisien, terukur, dan berbasis kinerja, dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta kesinambungan fiskal daerah. Belanja daerah juga diarahkan untuk memperkuat kualitas pelayanan publik, pengurangan kemiskinan, peningkatan daya saing daerah, pembangunan infrastruktur, penguatan transformasi digital pemerintahan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan belanja daerah Tahun 2027 difokuskan pada:

A. penguatan belanja prioritas yang mendukung target pembangunan daerah;
B. peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja perangkat daerah;
C. optimalisasi belanja modal yang produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat;
D. pemenuhan mandatory spending sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pada fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari total belanja daerah; belanja fungsi Infrastruktur sebesar 40% dari total belanja daerah diluar Belanja Bagi Hasil dan Belanja Transfer ke Daerah; belanja fungsi pengawasan sebesar minimal 0,3% dari total belanja daerah; belanja pegawai di luar tunjangan guru yang

dialokasikan melalui TKD paling tinggi sebesar 30% dari total belanja daerah; belanja pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan ASN 0,16%; serta Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota atas target pendapatan Pajak Daerah;

E. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
F. penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja; serta
G. pengendalian belanja yang bersifat kurang prioritas.

Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari:

a. Pelayanan umum;
b. Ketertiban dan ketentraman;
c. Ekonomi;
d. Lingkungan hidup;
e. Perumahan dan fasilitas umum;
f. Kesehatan;
g. Pariwisata dan budaya;
h. Pendidikan; dan
i. Perlindungan sosial.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. belanja operasi;

   Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

   1) belanja pegawai;
   2) belanja barang dan jasa;
   3) belanja bunga;
   4) belanja subsidi;
   5) belanja hibah; dan
   6) belanja bantuan sosial.

Penganggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2027 dilakukan secara selektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial diprioritaskan setelah terpenuhinya belanja wajib, belanja mengikat, serta belanja program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas daerah dalam rangka mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator

Kinerja Daerah (IKD).

Selanjutnya, penganggaran Belanja Hibah dan Bantuan Sosial diarahkan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial, serta pencapaian prioritas pembangunan daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan yang berlaku.

b. belanja modal;

   Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. belanja tidak terduga;

   Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. belanja transfer

   Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

   1) belanja bagi hasil; dan
   2) belanja bantuan keuangan.

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah pada hakikatnya meliputi seluruh transaksi keuangan untuk menutup defisit daerah atau memanfaatkan surplus anggaran daerah.

Pada Tahun 2027, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah, mendukung stabilitas APBD, serta memastikan ketersediaan pendanaan dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan. Kebijakan pembiayaan daerah juga diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pengelolaan penyertaan modal daerah secara selektif dan produktif, serta pengendalian pembiayaan daerah secara prudent dan akuntabel.

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan:

1. Penerimaan pembiayaan mencakup:
   a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (silpa);
   b. Pencairan dana cadangan;
   c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
   d. Penerimaan pinjaman daerah;
   e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
   f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran pembiayaan mencakup:
   a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
   b. Penyertaan modal daerah;
   c. Pembentukan dana cadangan;
   d. Pemberian pinjaman daerah;
   e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.

Tabel 3.8

Realisasi dan Proyeksi/Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023-2028

Uraian	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Realisasi Audited			Target APBD	Proyeksi	
Pendapatan Daerah	3.416.390.957.965	3.730.420.012.926	3.808.784.958.343	3.374.538.366.686	3.395.921.136.016	4.085.052.289.927
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.171.022.355.999	1.385.028.684.601	1.475.313.412.879	1.610.976.595.478	1.645.628.448.886	1.781.127.395.927
Pajak Daerah	793.322.673.442	960.468.393.710	1.045.830.755.274	1.115.536.295.275	1.130.320.775.100	1.251.061.672.592
Retribusi Daerah	87.430.225.680	401.465.003.531	322.646.468.457	408.664.472.453	413.220.700.131	431.268.215.888
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13.425.554.336	12.267.234.269	12.053.225.531	12.054.327.489	13.941.112.500	12.498.172.535
Lain-Lain PAD Yang Sah	276.843.902.541	10.828.053.091	94.782.963.618	85.527.994.568	88.145.861.155	86.299.334.911
Pendapatan Transfer	2.241.478.601.966	2.345.205.328.325	2.333.406.670.464	1.738.055.876.900	1.750.292.687.130	2.303.924.894.000
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.891.200.110.945	2.039.610.069.125	2.154.939.261.914	1.593.853.306.000	1.596.085.116.230	2.148.430.324.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	350.278.491.021	305.595.259.200	178.467.408.550	144.202.570.900	154.207.570.900	155.494.570.000
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	0	64.875.000	14.699.400.000	0	0
Belanja Daerah	3.418.637.234.690	3.896.829.809.000	3.445.786.963.672	3.329.507.630.509	3.970.110.342.695	4.049.911.249.000
Belanja Operasi	2.301.561.773.003,90	2.495.362.693.887	2.411.809.366.853	2.592.952.069.764	2.836.370.937.314	2.522.284.725.877

Uraian	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Realisasi Audited			Target APBD	Proyeksi	
Belanja Pegawai	1.009.787.854.449	1.085.548.797.241	1.178.154.662.398	1.219.744.494.409	1.232.276.369.514	1.214.973.374.700
Belanja Barang Dan Jasa	868.397.712.028	1.010.692.655.425	1.000.044.599.636	1.109.938.284.755	1.330.568.261.842	974.003.655.384
Belanja Bunga	0	964.120.371	701.822.916	0	0	809.982.249
Belanja Hibah	303.819.808.882	382.505.675.850	220.697.040.402	253.771.490.600	248.703.405.958	317.918.033.046
Belanja Bantuan Sosial	20.473.066.972	15.651.445.000	12.211.241.500	9.497.800.000	24.822.900.000	14.579.680.496
Belanja Modal	431.340.278.246,35	424.461.947.578,39	284.130.000.829	294.365.861.014	482.895.714.858	656.085.622.338
Belanja Modal Tanah	11.021.176.466	1.727.306.005	9.091.558.797	37.150.000.000	56.500.000.000	93.957.940.977
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	123.664.589.654	86.126.274.741	72.316.878.024	81.798.690.544	82.823.956.906	123.927.284.219
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	149.832.834.297	118.169.885.081	108.317.193.229	50.629.896.902	108.902.623.984	172.931.210.332
Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi	133.679.243.538	208.508.996.189	82.400.847.058	109.968.054.768	220.052.422.068	253.119.453.062
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.142.434.291	9.929.485.563	12.003.523.721	14.819.218.800	14.616.711.900	12.149.733
Belanja Tidak Terduga	1.183.127.722,00	2.026.255.613	744.544.649,00	9.827.324.000	20.000.000.000	21.059.538.494
Belanja Tidak Terduga	1.183.127.722,00	2.026.255.613	744.544.649,00	9.827.324.000	20.000.000.000	21.059.538.494
Belanja Transfer	783.635.386.391	775.725.077.850	749.103.051.342	432.362.375.731	630.843.690.523	850.481.362.290
Belanja Bagi Hasil	96.552.366.600	115.413.727.850	112.318.582.142	126.949.984.393	154.354.147.523	154.706.609.712
Belanja Bantuan Keuangan	687.083.019.791	660.311.350.000	636.784.469.200	305.412.391.337	476.489.543.000	695.774.752.578

Uraian	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Realisasi Audited			Target APBD	Proyeksi	
Surplus/Defisit (Rp)	-2.246.276.725	32.844.037.997	362.997.994.671	45.030.736.177	-238.567.098.827	35.141.040.927
Pembiayaan Daerah	79.048.460.455	76.377.858.730	104.071.896.727	0	337.638.435.000	0
Penerimaan Pembiayaan	79.048.460.455	76.377.858.730	104.071.896.727	0	337.638.435.000	0
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	59.002.535.455	76.370.858.730	89.071.896.727	0	0	0
Penerimaan Pinjaman Daerah	0	7.000.000	15.000.000.000	0	200.000.000.000	0
Pengeluaran Pembiayaan	0	20.150.000.000	15.000.000.000	0	0	0
Penyertaan Modal Daerah	0	20.150.000.000	0	0	0	0
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	0	0	15.000.000.000	0	0	0
Pembiayaan Netto	79.048.460.455	56.227.858.730	89.071.896.727	0	0	0

Sumber : BPPKAD Kabupaten Gresik, Tahun 2025

BAB 4
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan daerah yang dilaksanakan pada tahun 2027 merupakan tahun ketiga dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. sedangkan penyusunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 didasarkan pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2030 dan sebagai dasar dalam merumuskan sasran, arah kebijakan, program prioritas, serta target pembangunan selama 5 (lima) tahun. Dengan demikian, penyusunan RKPD Tahun 2027 diarahkan untuk memastikan konsistensi dan keberlanjutan pencapaian target pembangunan daerah sesuai dengan tahapan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029.

Visi Pembangunan Kabupaten Gresik sebagaimana dalam dokumen RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

“Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat”

Visi pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 merupakan pernyataan aspiratif dengan landasan filosofis yang kuat untuk memastikan arah pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Landasan filosofis ini menjadi pijakan dalam merancang kebijakan dan strategi pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan ke dalam misi pembangunan yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan daerah selama periode 2025-2029. Rumusan misi Kabupaten Gresik dijabarkan sebagaimana berikut:

1. Misi 1 : Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah
2. Misi 2 : Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
3. Misi 3 : Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.

4. Misi 4 : Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat.
5. Misi 5 : Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik menetapkan tahapan pembangunan daerah secara sistematis selama periode 2026-2030. Pentahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah. Pentahapan ini akan menjadi panduan awal dalam menyusun kebijakan per tahunnya. Berikut adalah pentahapan pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 :

Tabel 4.1 Pentahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

Tahap 1 2026	Tahap 2 2027	Tahap 3 2028	Tahap 4 2029	Tahap 5 2030
Penguatan Infrastruktur Ekonomi	Penguatan Pelayanan Dasar	Pemerataan Akses Layanan Dasar	Peningkatan Daya Saing Daerah	Konsolidsasi Menuju Pembangunan Berkelanjutan
Pentahapan Pembangunan				
Pemantapan infrastruktur ekonomi untuk Pengembangan sektor-sektor strategis dan penguatan daya saing daerah	Penguatan infrastruktur dan layanan dasar serta Fondasi pembangunan yang menjadi prasyarat bagi kemajuan di tahun-tahun Berikutnya	Pemerataan akses pelayanan dasar untuk Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Peningkatan daya saing daerah dan keberlanjutan Pembangunan untuk menjamin kualitas hidup generasi mendatang.	Konsolidasi berbagai program pembangunan Berkelanjutan

Sumber : Bappeda Kabupaten Gresik, 2025

Berdasarkan pentahapan pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 tersebut, Arah Kebijakan Tahun 2027 adalah “Penguatan Pelayanan Dasar” yang difokuskan pada penguatan layanan dasar seperti penguatan dalam sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, dan sosial. Berdasarkan arah kebijakan tersebut, maka tema pembangunan untuk RKPD Tahun 2027 adalah sebagaimana berikut :

“Penguatan Infrastruktur dan Layanan Dasar serta Fondasi Pembangunan yang Menjadi Prasyarat Bagi Kemajuan di Tahun-tahun Berikutnya.”

Tema pembangunan tersebut mencerminkan fokus Kabupaten Gresik Tahun 2027 untuk memperkuat berbagai aspek dasar yang mendukung percepatan pembangunan daerah. Penguatan tersebut diarahkan pada peningkatan kualitas dan konektivitas infrastruktur, pemerataan akses pelayanan dasar masyarakat, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan berbasis data dengan pengelolaan dan penguatan Satu Data Indonesia.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan (*goal*) pembangunan adalah pernyataan-pernyataan yang merupakan penjabaran atau implementasi tentang hal-hal yang perlu dilakukan dalam menjawab isu strategis Pembangunan daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Guna merealisasikan pelaksanaan program-program Pembangunan di Kabupaten Gresik tahun 2025-2029, maka ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu dua tahun ke depan. Sedangkan sasaran (*objective*) pembangunan adalah penjabaran dari tujuan, yaitu merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dua tahun kedepan. Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

Tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, dan menjadi tahun ketiga pelaksanaan RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 dan 2045. Dengan memperhatikan hasil evaluasi berbagai bidang pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani serta isu strategis aktual, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Pertama

   Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia yang mencerminkan konsep *inclusive human development*, yang dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran pembangunan, sebagai berikut:

   a. Meningkatnya kualitas dan aksesbilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan;
   b. Meningkatkan kualitas dan aksesbilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan; dan

c. Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif.

2. Tujuan Kedua

Terwujudnya pemerataan pembangunan perekonomian Gresik didukung optimalisasi potensi daerah yang berdaya saing atau yang disebut sebagai *advanced indigenous economy*, yang dijabarkan dalam 3 (tiga) sasaran pembangunan, sebagai berikut:

a. Meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju;
b. Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal; dan
c. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi.

3. Tujuan Ketiga

Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang tangguh dan berkelanjutan yang dijabarkan dalam 4 (empat) sasaran pembangunan, sebagai berikut:

a. Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah;
b. Menguatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas Daerah yang berdaya saing;
c. Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah; dan
d. Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

4. Tujuan Keempat

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntabel, dan melayani (*smart governance*) yang dijabarkan dalam 1 (satu) sasaran pembangunan, sebagai berikut:

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit.

5. Tujuan Kelima

Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dalam berbagai bidang secara berkelanjutan dan inklusif (*sustainable society empowerment*) yang dijabarkan dalam 4 (empat) sasaran pembangunan, sebagai berikut:

a. Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan;
b. Memperluas partisipasi dan inklusivitas perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan;
c. Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi; dan
d. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.

Tabel 4.2 Keselarasan Visi Misi Nasional, Jawa Timur dan Kabupaten Gresik

NASIONAL	KABUPATEN GRESIK	PROVINSI JAWA TIMUR
VISI		
Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045	Pembangunan Gresik Maju yang Berkelanjutan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat	Jawa Timur Yang Adil, Makmur, Unggur, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045
MISI		
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z), dan penyandang disabilitas;	MISI 1 Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah.	Jatim Cerdas, Memperkuat Akses dan Mutu Pendidikan yang Berkualitas, Merata, dan Berkeadilan;
		Jatim Sehat, Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas, Merata, Mudah Diakses dan Berkeadilan.
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.		Jatim Harmoni, Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.
Memantapkan sistem pertahanan keamanan	MISI 2	Jatim Agro, Meningkatkan

NASIONAL	KABUPATEN GRESIK	PROVINSI JAWA TIMUR
negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;	Percepatan pembangunan perekonomian daerah yang merata, berbasis potensi keunggulan lokal yang berkualitas dan berdaya saing.	Kesejahteraan Petani, Penternak dan Nelayan.
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;	MISI 3 Menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan serta terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.	Jatim Akses, Memperkuat Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah dan Intra Aglomerasi yang Berkualitas, Modern, Terpadu, dan Berkeadilan.
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;		Jatim Lestari, Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;	MISI 4 Meningkatkan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.	Jatim Berkah-Amanah, Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif.
Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)		
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi,	MISI 5 Meningkatkan taraf hidup masyarakat Gresik	Jatim Sejahtera, Mempercepat Pengentasan Kemiskinan

NASIONAL	KABUPATEN GRESIK	PROVINSI JAWA TIMUR
pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;	melalui penciptaan lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan dasar.	dan Pengurangan Ketimpangan.
		Jatim Kerja, Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas.

Sumber : Bappeda Kabupaten Gresik, 2026

4.1.1 Strategi Umum

Strategi umum dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam lima tahun mendatang meliputi :

1. Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan dasar pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial guna memperkuat kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
2. Memperluas akses layanan dasar yang inklusif, responsif gender, ramah anak, dan berpihak kepada kelompok rentan untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan.
3. Memperkuat pembangunan karakter, kohesi sosial, serta pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai fondasi kehidupan masyarakat yang harmonis.
4. Mendorong transformasi ekonomi daerah melalui penguatan sektor industri, perdagangan, UMKM, investasi, dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal yang bernilai tambah.
5. Meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja BUMD sebagai instrumen penggerak perekonomian daerah dan pelayanan publik.
6. Mempercepat pembangunan infrastruktur strategis dan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas wilayah, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi.
7. Mengembangkan sistem infrastruktur yang terintegrasi, tangguh terhadap perubahan iklim, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
8. Memperkuat kualitas lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah.
9. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntabel, dan berbasis data melalui transformasi digital serta penguatan kolaborasi pembangunan.

10. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan ketimpangan antarwilayah, serta perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.
11. Meningkatkan peran Satu Data dalam perencanaan pembangunan dan penguatan data untuk pengambilan keputusan.

4.1.2 Strategi Khusus

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran rencana Pembangunan Daerah yang telah dirumuskan, maka diperlukan rumusan strategi, arah kebijakan dan program prioritas Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2027 melalui strategi sebagai berikut:

Tabel 4.3 Strategi Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2026

Tujuan	No	Sasaran	Strategi
Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia (*Inclusive Human Development*)	1.	Meningkatnya kualitas dan aksesbilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan	Penguatan tata kelola pendidikan yang inklusif dan adaptif berbasis data spasial, perluasan akses infrastruktur dan konektivitas layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan, peningkatan kapasitas dan profesionalisme pendidik melalui sistem pembinaan berkelanjutan, integrasi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja dan revolusi industri 5.0, serta penguatan kolaborasi multipihak secara partisipatif untuk mewujudkan generasi emas Gresik yang cerdas, unggul, dan berdaya saing global.
	2.	Meningkatkan kualitas dan aksesbilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan	Transformasi layanan kesehatan primer yang holistik dan berkelanjutan melalui penguatan sistem layanan berbasis keluarga dan komunitas, pemerataan infrastruktur dan tenaga kesehatan hingga wilayah terpencil, digitalisasi layanan dan integrasi data kesehatan untuk deteksi dini dan respons cepat, peningkatan kapasitas SDM kesehatan yang profesional dan humanis, serta sinergi lintas sektor

Tujuan	No	Sasaran	Strategi
			dalam mendorong perilaku hidup sehat dan ketahanan kesehatan masyarakat menuju Gresik yang sehat, tangguh, dan inklusif.
	3.	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa	Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam seluruh siklus pembangunan melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender, penguatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi kelompok rentan, pemenuhan hak-hak dasar serta akses terhadap sumber daya ekonomi dan layanan publik, serta kolaborasi multipihak yang menjamin ruang partisipatif, non diskriminatif, dan berkeadilan sosial dalam setiap kebijakan dan program pembangunan menuju Gresik yang setara, inklusif, dan berdaya.
	4.	Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif	Penguatan sistem perlindungan anak berbasis keluarga, sekolah, dan komunitas; peningkatan kualitas layanan ramah anak di berbagai sektor; pemenuhan hak-hak sipil, kesehatan, pendidikan, dan partisipasi anak tanpa diskriminasi; serta kolaborasi lintas sektor dan multipihak untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan inklusif guna memastikan setiap anak tumbuh dan berkembang secara optimal, terlindungi, serta berdaya sebagai subjek pembangunan masa depan.
	5.	Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan	Penguatan nilai-nilai kearifan lokal, peningkatan literasi budaya dan toleransi antar kelompok, revitalisasi peran lembaga adat dan komunitas budaya, serta fasilitasi ruang-ruang

Tujuan	No	Sasaran	Strategi
		masyarakat yang berbudaya	interaksi sosial yang inklusif dan partisipatif, guna membangun solidaritas, saling menghargai, dan identitas kolektif yang kokoh dalam kerangka masyarakat madani yang berkeadaban.
Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung optimalisasi potensi Daerah yang berdaya saing *(advanced indigenous economy)*	6.	Meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju	Pengembangan ekosistem industri berbasis riset dan inovasi, akselerasi adopsi teknologi industri 4.0, peningkatan kualitas SDM industri melalui kemitraan vokasi dan dunia usaha, insentif investasi sektor bernilai tambah tinggi, serta penguatan infrastruktur pendukung dan jaringan logistik terpadu guna menciptakan iklim industri yang adaptif, produktif, dan berorientasi ekspor.
	7.	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal	Penguatan ekosistem wirausaha lokal, digitalisasi rantai pasok dan pemasaran UMKM, pengembangan pusat distribusi dan pasar rakyat modern berbasis kawasan, fasilitasi sertifikasi dan standarisasi produk unggulan daerah, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dan kemitraan strategis untuk mendorong ekspansi pasar yang inklusif dan berkelanjutan.
	8.	Meningkatkan kualitas pengelolaan dan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah dalam mendukung perekonomian Daerah	Penguatan transformasi tata kelola BUMD berbasis prinsip good corporate governance, optimalisasi lini bisnis yang selaras dengan potensi dan kebutuhan strategis daerah, peningkatan kompetensi manajerial dan profesionalisme SDM BUMD, penguatan modal dan akses pembiayaan inovatif, serta perluasan sinergi usaha dengan sektor swasta

Tujuan	No	Sasaran	Strategi
			dan antar BUMD untuk mendorong kinerja yang sehat, kompetitif, dan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
	9.	Meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi	Penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi dan percepatan perizinan, pengembangan kawasan industri yang terintegrasi dan berkelanjutan, peningkatan kapasitas infrastruktur penunjang investasi, fasilitasi kemitraan antara investor dan pelaku usaha lokal, serta insentif investasi yang mendorong adopsi teknologi tinggi, keberlanjutan lingkungan, dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.
Terwujudnya pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang berkelanjutan (*strategic infrastructure resilience*)	10.	Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah	Percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan melalui penguatan perencanaan terpadu lintas sektor dan wilayah, optimalisasi pembiayaan kreatif, penguatan sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta pelibatan aktif masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi, konektivitas wilayah, dan pelayanan publik yang prima.
	11.	Menguatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas Daerah yang berdaya saing	Pembangunan dan modernisasi infrastruktur dasar dan strategis secara merata dan terintegrasi, peningkatan konektivitas antar wilayah dan kawasan industri, penguatan sistem logistik daerah, serta pemanfaatan teknologi cerdas dan ramah lingkungan untuk

Tujuan	No	Sasaran	Strategi
			mendukung mobilitas, efisiensi ekonomi, dan pengembangan wilayah secara berkelanjutan dan kompetitif.
	12.	Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah	Penguatan daya tahan infrastruktur terhadap bencana dan perubahan iklim, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dan *green infrastructure*, peningkatan kapasitas adaptif wilayah, serta integrasi sistem manajemen risiko dalam perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur guna menjamin keberlangsungan pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan daerah.
	13.	Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Integrasi kebijakan rendah karbon dalam seluruh sektor pembangunan, optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan dan teknologi hijau, peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat dan kelembagaan, serta penguatan tata kelola lingkungan hidup yang partisipatif, kolaboratif, dan berbasis data guna menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat.
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntabel, dan melayani (*smart governance*)	14.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM	Percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik dan manajemen pemerintahan, penguatan sinergi kolaboratif lintas sektor dan pemangku kepentingan, serta pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang profesional, akuntabel, dan berbasis sistem merit guna mewujudkan birokrasi yang lincah, responsif, dan berorientasi pada hasil.

Tujuan	No	Sasaran	Strategi
		aparatur berbasis sistem merit	
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dalam berbagai bidang secara berkelanjutan dan inklusif (*Sustainable Society Empowerment*)	15.	Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan	Perluasan dan percepatan pengurangan kemiskinan multidimensi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar secara menyeluruh, penguatan perlindungan sosial terhadap kelompok rentan, perbaikan deprivasi sosial-materiil, peningkatan kapabilitas dan ketahanan keluarga miskin, serta perluasan akses terhadap keadilan, pemberdayaan hukum, dan partisipasi dalam pembangunan, yang didukung dengan integrasi data kemiskinan terpadu, serta tata kelola program pengentasan kemiskinan yang inklusif dan berbasis bukti hingga tingkat desa.
	16.	Memperluas partisipasi dan inklusivitas perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan	Pembangunan sistem perlindungan sosial yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan melalui perluasan cakupan program perlindungan sosial berbasis data terpadu, penguatan kapasitas kelembagaan dan komunitas dalam menjangkau kelompok miskin dan rentan, penyediaan akses yang adil terhadap bantuan sosial, layanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan program perlindungan sosial secara transparan dan berkeadilan sosial di seluruh wilayah Kabupaten Gresik.

Tujuan	No	Sasaran	Strategi
	17.	Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi	Percepatan transformasi sosial ekonomi yang berkeadilan melalui pemerataan akses terhadap sumber daya, layanan dasar, dan peluang ekonomi di seluruh wilayah, penguatan kebijakan afirmatif bagi kelompok marginal dan wilayah tertinggal, optimalisasi distribusi program perlindungan dan pemberdayaan sosial berbasis data terpadu, serta peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan guna memastikan tidak ada kelompok atau wilayah yang tertinggal dalam proses pembangunan Kabupaten Gresik.
	18.	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal	Mengintegrasikan pengembangan kompetensi tenaga kerja lokal berbasis kebutuhan industri dengan perluasan kesempatan kerja yang berkualitas melalui peningkatan akses pelatihan vokasi, pemagangan, dan sertifikasi kompetensi; penguatan ekosistem kewirausahaan dan UMKM; optimalisasi penempatan tenaga kerja lokal dalam investasi daerah; serta kemitraan strategis antara dunia usaha, dunia industri, dan lembaga pelatihan kerja yang adaptif terhadap transformasi ekonomi dan teknologi.

Untuk mengetahui tercapainya tujuan dan sasaran tersebut diatas tentunya dibutuhkan tolak ukur yang dapat megukur pencapaian keberhasilannya dalam bentuk indikator kinerja. Indikator kinerja pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4. Target Tujuan Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2027

	TUJUAN	INDIKATOR	REALISASI 2025	TARGET RPJMD 2027	TARGET RKPD 2027
1	Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia	Indeks Pembangunan Manusia	79,69	80,17-81,00	80,17-81,00
		Indeks Pembangunan Gender	92,01	91,16-91,76	92,11
		Indeks Kesalehan Sosial	81,10	80,92-82,72	80,92-82,72
2	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Perekonomian Gresik didukung optimalisasi potensi Daerah yang berdaya saing	Pertumbuhan Ekonomi	4,91	4,80 - 5,88	4,80 - 5,88
3	Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang tangguh dan berkelanjutan	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	23,88*	22,86-23,60	22,86-23,60
		Penurunan Emisi GRK Kumulatif	52.525,84	41.960,69	41.960,69
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntabel, dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	88,01	87,24	87,24
5	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dalam berbagai bidang secara berkelanjutan	Tingkat kemiskinan	9,95	8,26-9,21	8,26-9,21
		Tingkat Pengangguran Terbuka	5,47	6,88-5,39	6,88-5,39

Tabel 4.5. Target Sasaran Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2027

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2025	TARGET RPJMD 2027	TAHUN 2027
Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia					
1	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan	Rata - Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun	10,35	10,62	10,62
2		Harapan Lama Sekolah	13,99	14,08	14,08
3	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	74,90	75,08	75,08
4	Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif	Indeks Perlindungan Anak	81,39*	71,72-73,00	81,63
5	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa	Indeks Pemberdayaan Gender	62,32*	72,42-73,50	72,42-73,50
6		Indeks Ketimpangan Gender	0,335*	0,369	0,369
7		Indeks Inklusi (GEDSI)	63,41	68	68
8	Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	Indeks Harmoni	3,56	3,8	3,8
Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Perekonomian Gresik didukung optimalisasi potensi Daerah yang berdaya saing					
9	Meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju	Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur	51,86*	50,54-52,00	50,54-52,00
10	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan	Rasio Net Ekspor	62,88	10,84-12,20	10,84-12,20

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2025	TARGET RPJMD 2027	TAHUN 2027
	berbasis potensi lokal				
11	Meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi	*Incremental Capital - Output Ratio (ICOR)*	4,90*	5,11	5,11
Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang tangguh dan berkelanjutan					
12	Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daera	*Rasio Government Expenditure*	2,75*	2,05	2,05
13	Menguatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas Daerah yang berdaya saing	Indeks Daya Saing Daerah	3,76	3,95	3,95
14	Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah	Indeks Infrastruktur	63,47	69,07	69,07
15		Indeks Konektivitas Wilayah	0,75	0,785	0,785
16	Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah	Indeks Risiko Bencana	119,66	129,42-126,42	118,1 -118,9
17	Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,81	65,24	65,24

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2025	TARGET RPJMD 2027	TAHUN 2027
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntabel, dan melayani					
18	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	Indeks Pemerintah Digital	4,65 (spbe)	1,89 - 2,25	1,89 - 2,25
19		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan	77,15	81,5	81,5
20		Indeks Sistem Merit	310,5	345	345
21		Indeks Pelayanan Publik	4,35	2,75	2,75
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dalam berbagai bidang secara berkelanjutan					
22	Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan	Indeks Kemiskinan Multidimensi	43,79	44	43,5
23	Memperluas partisipasi dan inklusifitas perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan	Persentase Partisipasi Perlindungan Sosial oleh Keluarga Miskin	100	90-95	100
24	Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi	Rasio Gini	0,327	0,295-0,335	0,295 -0,335
25	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	30,62	40-45	40-45

*Keterangan : *) Nilai sementara per Maret 2026*

Sumber : Bappeda Kabupaten Gresik

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2027 disusun sebagai penjabaran tahunan dari arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 dengan tetap memperhatikan sinkronisasi terhadap prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur. Penetapan prioritas pembangunan dilakukan secara adaptif dengan mempertimbangkan dinamika kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, serta tantangan tata kelola pemerintahan yang berkembang di masyarakat.

Prioritas pembangunan tahun 2027 diarahkan untuk mempercepat transformasi sosial dan ekonomi daerah melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan daya saing ekonomi berbasis potensi unggulan daerah, pemerataan pembangunan infrastruktur dan layanan dasar, penguatan ketahanan lingkungan hidup, serta reformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan berbasis digital. Upaya tersebut dilaksanakan secara terpadu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan daerah, serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.

Selanjutnya, sasaran pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2027 difokuskan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengurangan kesenjangan wilayah dan kemiskinan, peningkatan produktivitas dan kesempatan kerja, penguatan daya saing daerah, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat. Seluruh sasaran tersebut dijabarkan ke dalam Prioritas Pembangunan Nawakarsa untuk pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2027 sebagai berikut :

Tabel 4.6 Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Gresik Nawakarsa Sesuai RPJMD Tahun 2025-2029

No.	Navigasi	No.	Sub Navigasi	KETERANGAN
1.	Gresik Tuntas Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntable, dan Sustainable	1.	*Gresik Integrated Smart System*	Sistem satu data terpadu yang mengintegrasi seluruh data pembangunan baik layanan dasar maupun sektoral secara numerik dan spasial serta membentuk big data yang dapat dimanfaatkan dengan lugas, cepat, aman, dan mudahuntuk menunjang

No.	Navigasi	No.	Sub Navigasi	KETERANGAN
				seluruh pelayanan publik, demi terciptanya transparansi tata kelola pemerintahan daerah *(One Data, One Portal, And Open Access)*
		2.	Gresik Rembug Akur	Membangun pemerintahan yang kolaboratif dengan terus bertemu dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi demi Gresik Baru Lebih Maju.
		3.	Kios Pelayanan Publik (KPP) Tingkat Kecamatan	Program pelayanan publik di tingkat kecamatan meliputi Adminduk, Perizinan UMKM, PIRT, NIB, Pojok OSS.
2.	Gresik Seger Sejahtera, Bahagia, dan Berdikari	1.	Gresik Santri	Program santunan kehormatan untuk guru ngaji, marbot dan imam masjid, penjaga makam, situs religi, dan situs budaya
		2.	Bantuan Operasional Panti Kesejahteraan Sosial	Program bantuan operasional yang berfokus pada panti jompo, napza
		3.	Gresik Bunda Puspa	Bantuan untuk Pemberdayaan Perempuan Usaha dan Pendidikan Anak
		4.	Bumi Gresik (Peduli Buruh Migran Gresik)	Program kepedulian terhadap buruh migran asli kabupaten gresik
		5.	Program Keluarga Harapan (PKH) Inklusif	Perduasan bantuan sosial pada lansia dan perempuan kepala keluarga
3.	Gresik Mapan Maju, Pintar, dan Aman	1.	Gresik Bebas Banjir Tahap ke-2	Optimalisası program bebas banjir dan hilir hingga perkotaan
		2.	Pembangunan Jalan Lintas Utara-Selatan	Program membangun jalan alternatif dari gresik bagian utara hingga ke bagian selatan
		31.	Pembangunan Jalan Kualitas Beton	Program betonisasi jalan yang berfokus pada jalan lintas desa dan kecamatan
		42.	Gresik Ramah Keluarga	Membangun taman tematik ramah keluarga yang tenntegrasi dengan pengembangan edukasi anak gaya hidup sehat, serta memfasilitasi ekonomi mikro
		53.	Sistem Transportasi Gresik Terpadu	Revitalisasi angkudes menjadi *feeder* Transjatim
		64.	Memastikan Ketersediaan Air Bersih	Pembangunan saluran air PDAM ke seluruh desa

No.	Navigasi	No.	Sub Navigasi	KETERANGAN
4.	Gresik Agropolitan	15.	GOTani (Gresik Ayo Bertani)	Menjamin kesejahteraan petani dengan memastikan ketersediaan pupuk dan pemberian asuransi
		16.	Peningkatan Kualitas RPH (Rumah Potong Hewan) dan RPU (Rumah Potong Unggas)	Program penambahan dan revitalisasi RPH dan RPU
		17.	Nelayan Gresik Berdaulat	Program pemberian subsisi BBM, pembangunan SPBUN, serta asuransi jiwa untuk nelayan laut
		18.	Pengembangan Komoditas Tanaman Perkebunan Alternatif	Pengembangan komoditas tanaman perkebunan contoh tembakau di Bawean, dan biofarmaka
		19.	Pembangunan *Techno Park* berbasis Minapolitan	Peningkatan kualitas sarana prasarana kampung bandeng, penguatan UPI (unit pengelolaan ikan), serta udang
5.	Gema Karya Gresik mandiri dan berkarya	10.	Program 3B (Bela, Beli, Bagi) Gresik	Program keberpihakan pada produk asli Gresik dengan memberikan modal penguatan manajemen serta memperkuat branding produk UMKM, UKM dan IKM Gresik
		21.	Program Pelatihan Intensif Bersertifikat BNSP	Peningkatan kemampuan generasi muda dengan konsep: mengajarkan kedisiplinan, pelatihan skill vokasional yang bersertifikan BNSP (contohnya, instrumen mesin), orientasi pengenalan dunia industri
		32.	Penguatan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Pereraan kebutuhan tenaga kerja berbasis kebutuhan dunia usana dan industri *(deman driven)*
6.	Gresik Cemerlang Cerdas, efisien, menarik, relevan, global	13.	Insentif Pendidikan untuk Siswa SD dan SMP diluar BOS dan BOSDA	Pemberian beasiswa pada siswa SD dan SMP berprestasi
		24.	Beasiswa Tenaga Medis Spesialis	Beasiswa tenaga medis spesialis dengan ikatan dinas
		3.	Memberikan Insentif Kinerja Kepada Guru PAUD Dan TK Yang Non Sertifikasi	Meningkatkan insentif kinerja untuk guru tidak tetap dan non sertifikasi serta untuk guru pembimbing siswa inklusi

No.	Navigasi	No.	Sub Navigasi	KETERANGAN
		46.	JAKETKU (Kejar Paket Tuntaskan Putus Sekolah)	Program penuntasan anak putus sekolah yang berkolaborasi dengan PKK
		57.	Program Beasiswa S1 untuk Anak Yatim Piatu, Huffadz, dan Disabilitas	Memberikan Beasiswa S1 untuk anak yatim patu, huffadz dan disabilitas
		68.	Peningkatan Gaji Guru Honorer dan ASN Non Sertifikasi	Peningkatan kesejahteraan guru honorer atau guru non ASN yang belum sertifikasi dengan perbaikan gaji
		79.	BOP (Biaya Operasional Pesantren) untuk TPQ dan Madin	Program bantuan biaya operasional untuk TPQ dan Madin
		80.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan
		91.	Layanan Antar Jemput Siswa Inklusi / Disabilitas / Berkebutuhan Khusus	Dilakukan setiap 2 minggu sekali, mendatangi kecamatan berbeda dalam satu kali beroprasi
7.	Gresik Sehati Pelayanan kesehatan integratif	12.	Peningkatan Kualitas Puskesmas	Meningkatkan fasilitas kesehatan dan menyiapkan tenaga medis spesialis pada pusat layanan kesehatan masyarakat (PUSKESMAS) Gresik. Target menjadi PUSKESMAS dengan tingkatan pelayanan di atasnya.
		23.	Puskesmas Sebagai Ujung Tombak Komunitas Rumah Sehat	Menjadikan PUSKESMAS sebagai ujung tombak program komunitas rumah sehat
		34.	Memperkuat Posyandu, Polindes, dan Poskestren	Pelibatan masyarakat dalam memperkuat program penanggulangan dan pencegahan penyakit melalui posyandu, polindes dan poskestren
		45.	Program Makanan Bergizi	Kolaborasi UMKM asli Gresik untuk program makanan bergizi
		56.	Lahir Pulang Bawa Akta Elektronik (E-Akte)	Program percepatan pembuatan akta lahir melalui digital.
		67.	Cakupan Kesehatan	Sistem penjaminan kesehatan yang memastikan

No.	Navigasi	No.	Sub Navigasi	KETERANGAN
			Universal (UHC)	setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.
8.	Gresik Barokah	18.	Mendorong Kesalehan dan Tanggung Jawab Sosial Masyarakat dan Dunia Usaha	
		29.	Melindungi Segenap Generasi Muda dari Penyalahgunaan Narkoba dan HIV/AIDS	
		30.	Peningkatan Peran Serta Tokoh Agama, TokohMasyarakat Tokoh Budaya dan Lembaga Keagamaan untuk Memberikan Tauladan Kesalehan Sosial	
		41.	Gresik *Probono*	Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan
9.	Pesona Gresik Pelestarian dan naturalisasi alam	12.	Membangun sistem pengelolaan sampah terpadu di tingkat kecamatan	

Sumber : Bappeda Kabupaten Gresik, 2026

Tabel 4.7 Program Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2027

No	Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi	Program Prioritas Kabupaten	Arah Kebijakan	No	Program Kerja Prioritas		Program Prioritas Nomenklatur	Urusan
1.	PN 7 — Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	PP 7 — Jatim Berkah-Amanah PP 8 — Jatim Harmoni	Gresik Tuntas (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntable, dan Sustainable)	14. Penyempurnaan pengelolaan SDM aparatur dengan berbasis sistem merit, peningkatan kompetensi, serta pembinaan profesionalisme dan etika pejabat publik 15. Penguatan kapasitas daerah dalam mengelola dan mengintegrasikan data kemiskinan yang terpadu dan berbasis bukti guna merancang kebijakan yang tepat sasaran.	1.	Gresik Integrated Smart System	Sistem satu data terpadu yang mengintegrasi seluruh data pembangunan baik layanan dasar maupun sektoral secara numerik dan spasial serta membentuk big data yang dapat dimanfaatkan dengan lugas, cepat, aman, dan mudahuntuk menunjang seluruh pelayanan publik, demi terciptanya transparansi tata kelola pemerintahan daerah (One Data, One Portal, And Open Access)	Program Pengeloaan Aplikasi Informatika	Komunikasi dan Informatika
								Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
								Program Kawasan Permukiman	Perumahan dan Kawasan Permukiman
								Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan
								Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh Perangkat Daerah
				14. Penyempurnaan	2.	Gresik Rembug Akur	Membangun pemerintahan	Program Pemerintahan dan	Sekretariat Daerah

No	Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi	Program Prioritas Kabupaten	Arah Kebijakan	No	Program Kerja Prioritas		Program Prioritas Nomenklatur	Urusan
				pengelolaan SDM aparatur dengan berbasis sistem merit, peningkatan kompetensi, serta pembinaan profesionalisme dan etika pejabat publik			yang kolaboratif dengan terus bertemu dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi demi Gresik Baru Lebih Maju.	Kesejahteraan Rakyat	
								Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kesatuan Bangsa dan Politik
								Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh Perangkat Daerah
				16. Penyediaan akses yang adil terhadap bantuan sosial dan layanan dasar, serta pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	3.	Kios Pelayanan Publik (KPP) Tingkat Kecamatan	Program pelayanan publik di tingkat kecamatan meliputi Adminduk, Perizinan UMKM, PIRT, NIB, Pojok OSS.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan
								Program Pendaftaran Penduduk	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
								Program Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
								Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal
2.	PN 6 — Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk	PP 1 — Jatim Sejahtera PP 2 — Jatim Kerja	Gresik Seger Sejahtera, Bahagia, dan Berdikari	5. Penguatan peran lembaga adat, komunitas budaya, dan	1.	Gresik Santri	Program santunan kehormatan untuk guru	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah

No	Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi	Program Prioritas Kabupaten	Arah Kebijakan	No	Program Kerja Prioritas		Program Prioritas Nomenklatur	Urusan
	Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan			organisasi keagamaan dalam menjaga tradisi, mediasi sosial, serta pelestarian nilai-nilai harmoni dan keberagaman.			ngaji, marbot dan imam masjid, penjaga makam, situs religi, dan situs budaya	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Perumahan dan Kawasan Permukiman
								Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Kebudayaan
								Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
								Program Pemberdayaan Sosial	Sosial
				16. Penyediaan akses yang adil terhadap bantuan sosial dan layanan dasar, serta pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	2.	Bantuan Operasional Panti Kesejahteraan Sosial	Program bantuan operasional yang berfokus pada panti jompo, napza	Program Pemberdayaan Sosial	Sosial
				3. Pemenuhan hak-hak dasar kelompok rentan dan marjinal melalui perluasan akses layanan dasar yang inklusif, penghapusan	3.	Gresik Bunda Puspa	Bantuan untuk Pemberdayaan Perempuan Usaha dan Pendidikan Anak	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi	Program Prioritas Kabupaten	Arah Kebijakan	No	Program Kerja Prioritas		Program Prioritas Nomenklatur	Urusan
				praktik diskriminatif, serta penguatan sistem perlindungan sosial berbasis komunitas.					
				3. Pemenuhan hak-hak dasar kelompok rentan dan marjinal melalui perluasan akses layanan dasar yang inklusif, penghapusan praktik diskriminatif, serta penguatan sistem perlindungan sosial berbasis komunitas.	4.	Bumi Gresik (Peduli Buruh Migran Gresik)	Program kepedulian terhadap buruh migran asli kabupaten gresik	Program Penempatan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
								Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Sosial
								Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial
								Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
								Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan

No	Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi	Program Prioritas Kabupaten	Arah Kebijakan	No	Program Kerja Prioritas		Program Prioritas Nomenklatur	Urusan
								Program Perlindungan Khusus Anak	Pemberdayaana Perempuan dan Perlindungan Anak
								Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
								Program Pendaftaran Penduduk	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
								Program Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				16. Penyediaan akses yang adil terhadap bantuan sosial dan layanan dasar, serta pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	5.	Program Keluarga Harapan (PKH) Inklusif	Perduasan bantuan sosial pada lansia dan perempuan kepala keluarga	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial

No	Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi	Program Prioritas Kabupaten	Arah Kebijakan	No	Program Kerja Prioritas		Program Prioritas Nomenklatur	Urusan
3.	PN 3 — Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Agromaritim Industri	PP 3 — Jatim Akses	Gresik Mapan (Maju, Pintar, dan Aman)	12. Peningkatan kapasitas adaptif wilayah melalui penguatan kelembagaan, tata kelola risiko bencana, serta partisipasi masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi.	1.	Gresik Bebas Banjir Tahap ke-2	Optimalisası program bebas banjir dan hilir hingga perkotaan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
								Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Pertanahan
				9. Peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur penunjang investasi, termasuk energi, air, transportasi, dan digitalisasi logistik untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha.	2.	Pembangunan Jalan Lintas Utara-Selatan	Program membangun jalan alternatif dari Gresik bagian utara hingga ke bagian selatan	Program Penyelenggaraan Jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				10. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan strategis di wilayah prioritas melalui koordinasi lintas sektor, percepatan proses perizinan, dan	3.	Pembangunan Jalan Kualitas Beton	Program betonisasi jalan yang berfokus pada jalan lintas desa dan kecamatan	Program Penyelenggaraan Jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi	Program Prioritas Kabupaten	Arah Kebijakan	No	Program Kerja Prioritas		Program Prioritas Nomenklatur	Urusan
				pengawasan berbasis digital					
				4. Pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh yang mencakup hak sipil, identitas, kesehatan, pendidikan, dan partisipasi melalui program terpadu yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.	4.	Gresik Ramah Keluarga	Membangun taman tematik ramah keluarga yang tenntegrasi dengan pengembangan edukasi anak gaya hidup sehat, serta memfasilitasi ekonomi mikro	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Lingkungan Hidup
								Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
								Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kesehatan
								Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
								Program Pengembangan Umkm	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
								Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pariwisata

No	Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi	Program Prioritas Kabupaten	Arah Kebijakan	No	Program Kerja Prioritas		Program Prioritas Nomenklatur	Urusan
				11. Penguatan sistem logistik daerah melalui pengembangan jaringan transportasi multimoda, fasilitas distribusi, dan konektivitas pelabuhan serta kawasan industri.	5.	Sistem Transportasi Gresik Terpadu	Revitalisasi angkudes menjadi feeder Transjatim	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Perhubungan
				10. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan strategis di wilayah prioritas melalui koordinasi lintas sektor, percepatan proses perizinan, dan pengawasan berbasis digital.	6.	Memastikan KetersediaanAir Bersih	Pembangunan saluran air PDAM ke seluruh desa	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang BUMD
4.	PN 5 — Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam NegerSwasembada	PP 2 — Jatim Kerja PP 4 — Jatim Agro PP 9 — Jatim Lestari	Gresik Agropolitan	17. Pengembangan sistem pemberdayaan sosial yang berbasis pada keadilan dan pemerataan kesempatan ekonomi di setiap wilayah dan	1.	GOTani (Gresik Ayo Bertani)	Menjamin kesejahteraan petani dengan memastikan ketersediaan pupuk dan pemberian asuransi	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pertanian

No	Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi	Program Prioritas Kabupaten	Arah Kebijakan	No	Program Kerja Prioritas		Program Prioritas Nomenklatur	Urusan
	Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru			kelompok masyarakat.					
				7. Pengembangan pusat distribusi dan pasar rakyat modern berbasis kawasan strategis guna memperluas akses pasar dan memperkuat daya saing produk lokal.	2.	Peningkatan Kualitas RPH (Rumah Potong Hewan) dan RPU (Rumah Potong Unggas)	Program penambahan dan revitalisasi RPH dan RPU	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterine	Pertanian
				17. Pengembangan sistem pemberdayaan sosial yang berbasis pada keadilan dan pemerataan kesempatan ekonomi di setiap wilayah dan kelompok masyarakat.	3	Nelayan Gresik Berdaulat	Program pemberian subsisi BBM, pembangunan SPBUN, serta asuransi jiwa untuk nelayan laut	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kelautan dan Perikanan

No	Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi	Program Prioritas Kabupaten	Arah Kebijakan	No	Program Kerja Prioritas		Program Prioritas Nomenklatur	Urusan
				18. Penguatan ekosistem kewirausahaan dan UMKM sebagai alternatif penciptaan lapangan kerja yang mandiri dan berkelanjutan.	4.	Pengembangan Komoditas Tanaman Perkebunan Alternatif	Pengembangan komoditas tanaman perkebunan contoh tembakau di Bawean, dan biofarmaka	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pertanian
				18. Penguatan ekosistem kewirausahaan dan UMKM sebagai alternatif penciptaan lapangan kerja yang mandiri dan berkelanjutan.	5.	Pembangunan Techno Park berbasis Minapolitan	Peningkatan kualitas sarana prasarana kampung bandeng, penguatan UPI (unit pengelolaan ikan), serta udang	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan
								Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kelautan dan Perikanan
5.	PN 3 — Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri	PP 2 — Jatim Kerja	Gema Karya (Gresik mandiri dan berkarya)	18. Penguatan ekosistem kewirausahaan dan UMKM sebagai alternatif penciptaan lapangan kerja yang mandiri dan berkelanjutan.	1.	Program 3B (Bela, Beli, Bagi) Gresik	Program keberpihakan pada produk asli Gresik dengan memberikan modal penguatan manajemen serta memperkuat branding	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
								Program Pengembangan UMKM	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

No	Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi	Program Prioritas Kabupaten	Arah Kebijakan	No	Program Kerja Prioritas		Program Prioritas Nomenklatur	Urusan
	Kreatif serta Agromaritim Industri						produk UMKM, UKM dan IKM Gresik	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
								Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Perdagangan
				6. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia industri melalui program vokasi, sertifikasi, dan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia pendidikan.	2.	Program Pelatihan Intensif Bersertifikat BNSP	Peningkatan kemampuan generasi muda dengan konsep: mengajarkan kedisiplinan, pelatihan skill vokasional yang bersertifikan BNSP (contohnya, instrumen mesin), orientasi pengenalan dunia industri	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
				6. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia industri melalui program vokasi,	3.	Penguatan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Pereraan kebutuhan tenaga kerja berbasis kebutuhan dunia usana	Program Penempatan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
								Program Perencanaan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja

No	Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi	Program Prioritas Kabupaten	Arah Kebijakan	No	Program Kerja Prioritas		Program Prioritas Nomenklatur	Urusan
				sertifikasi, dan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia pendidikan.			dan industri (deman driven)	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
6.	PN 4 — Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	PP 5 — Jatim Cerdas	Gresik Cemerlang (Cerdas, efisien, menarik, relevan, global)	4. Pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh yang mencakup hak sipil, identitas, kesehatan, pendidikan, dan partisipasi melalui program terpadu yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.	1.	Insentif Pendidikan untuk Siswa SD dan SMP diluar BOS dan BOSDA	Pemberian beasiswa pada siswa SD dan SMP berprestasi	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
				2. Pengembangan dan penerapan sistem digitalisasi layanan kesehatan berbasis interoperabilitas data untuk mendukung deteksi dini, manajemen penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan efisiensi pelayanan di	2.	Beasiswa Tenaga Medis Spesialis	Beasiswa tenaga medis spesialis dengan ikatan dinas	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kesehatan

No	Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi	Program Prioritas Kabupaten	Arah Kebijakan	No	Program Kerja Prioritas		Program Prioritas Nomenklatur	Urusan
				seluruh level fasilitas kesehatan.					
				1. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme pendidik melalui sistem pembinaan berkelanjutan yang berorientasi pada penguasaan teknologi pembelajaran, pendidikan karakter, dan kompetensi abad ke-21, dalam rangka menciptakan tenaga pengajar yang unggul dan responsif.	3.	Memberikan Insentif Kinerja Kepada Guru PAUD dan TK Yang Non Sertifikasi	Meningkatkan insentif kinerja untuk guru tidak tetap dan non sertifikasi serta untuk guru pembimbing siswa inklusi	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan

No	Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi	Program Prioritas Kabupaten	Arah Kebijakan	No	Program Kerja Prioritas		Program Prioritas Nomenklatur	Urusan
				4. Pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh yang mencakup hak sipil, identitas, kesehatan, pendidikan, dan partisipasi melalui program terpadu yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.	4.	JAKETKU (Kejar Paket Tuntaskan Putus Sekolah)	Program penuntasan anak putus sekolah yang berkolaborasi dengan PKK	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
				3. Pemenuhan hak-hak dasar kelompok rentan dan marjinal melalui perluasan akses layanan dasar yang inklusif, penghapusan praktik diskriminatif, serta penguatan sistem perlindungan sosial berbasis komunitas.	5.	Program Beasiswa S1 untuk Anak Yatim Piatu, Huffadz, dan Disabilitas	Memberikan Beasiswa S1 untuk anak yatim patu, huffadz dan disabilitas	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
								Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
								Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial

No	Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi	Program Prioritas Kabupaten	Arah Kebijakan	No	Program Kerja Prioritas		Program Prioritas Nomenklatur	Urusan
				1. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme pendidik melalui sistem pembinaan berkelanjutan yang berorientasi pada penguasaan teknologi pembelajaran, pendidikan karakter, dan kompetensi abad ke-21, dalam rangka menciptakan tenaga pengajar yang unggul dan responsif.	6.	Peningkatan Gaji Guru Honorer dan ASN Non Sertifikasi	Peningkatan kesejahteraan guru honorer atau guru non ASN yang belum sertifikasi dengan perbaikan gaji	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
				5. Penguatan peran lembaga adat, komunitas budaya, dan organisasi keagamaan dalam menjaga tradisi, mediasi sosial, serta pelestarian nilai-nilai harmoni dan keberagaman.	7.	BOP (Biaya Operasional Pesantren) untuk TPQ dan Madin	Program bantuan biaya operasional untuk TPQ dan Madin	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
								Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah

No	Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi	Program Prioritas Kabupaten	Arah Kebijakan	No	Program Kerja Prioritas		Program Prioritas Nomenklatur	Urusan
				4. Pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh yang mencakup hak sipil, identitas, kesehatan, pendidikan, dan partisipasi melalui program terpadu yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.	8.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan
				3. Pemenuhan hak-hak dasar kelompok rentan dan marjinal melalui perluasan akses layanan dasar yang inklusif, penghapusan praktik diskriminatif, serta penguatan sistem perlindungan sosial berbasis komunitas.	9.	Layanan Antar Jemput Siswa Inklusi / Disabilitas / Berkebutuhan Khusus	Dilakukan setiap 2 minggu sekali, mendatangi kecamatan berbeda dalam satu kali beroprasi	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan

No	Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi	Program Prioritas Kabupaten	Arah Kebijakan	No	Program Kerja Prioritas		Program Prioritas Nomenklatur	Urusan
7.	PN 4 — Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	PP 6 — Jatim Sehat	Gresik Sehati (Pelayanan kesehatan integratif)	2. Pengembangan dan penerapan sistem digitalisasi layanan kesehatan berbasis interoperabilitas data untuk mendukung deteksi dini, manajemen penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan efisiensi pelayanan di seluruh level fasilitas kesehatan.	1.	Peningkatan Kualitas Puskesmas	Meningkatkan fasilitas kesehatan dan menyiapkan tenaga medis spesialis pada pusat layanan kesehatan masyarakat (PUSKESMAS) Gresik. Target menjadi PUSKESMAS dengan tingkatan pelayanan di atasnya.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kesehatan
				2. Pengembangan dan penerapan sistem digitalisasi layanan kesehatan berbasis interoperabilitas data untuk mendukung deteksi dini, manajemen penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan efisiensi pelayanan di	2.	Puskesmas Sebagai Ujung Tombak Komunitas Rumah Sehat	Menjadikan PUSKESMAS sebagai ujung tombak program komunitas rumah sehat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan

No	Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi	Program Prioritas Kabupaten	Arah Kebijakan	No	Program Kerja Prioritas		Program Prioritas Nomenklatur	Urusan
				seluruh level fasilitas kesehatan.					
				2. Pengembangan dan penerapan sistem digitalisasi layanan kesehatan berbasis interoperabilitas data untuk mendukung deteksi dini, manajemen penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan efisiensi pelayanan di seluruh level fasilitas kesehatan.	3.	Memperkuat Posyandu, Polindes, dan Poskestren	Pelibatan masyarakat dalam memperkuat program penanggulangan dan pencegahan penyakit melalui posyandu, polindes dan poskestren	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kesehatan
				4. Pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh yang	4.	Program Makanan Bergizi	Kolaborasi UMKM asli Gresik untuk program	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kesehatan

No	Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi	Program Prioritas Kabupaten	Arah Kebijakan	No	Program Kerja Prioritas		Program Prioritas Nomenklatur	Urusan
				mencakup hak sipil, identitas, kesehatan, pendidikan, dan partisipasi melalui program terpadu yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.			makanan bergizi	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
								Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
								Program Pengembangan Umkm	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
								Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
				4. Pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh yang mencakup hak sipil, identitas, kesehatan, pendidikan, dan partisipasi melalui program terpadu yang menjangkau	5.	Lahir Pulang Bawa Akta Elektronik (E-Akte)	Program percepatan pembuatan akta lahir melalui digital.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
								Program Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi	Program Prioritas Kabupaten	Arah Kebijakan	No	Program Kerja Prioritas		Program Prioritas Nomenklatur	Urusan
				seluruh lapisan masyarakat.					
				2. Pengembangan dan penerapan sistem digitalisasi layanan kesehatan berbasis interoperabilitas data untuk mendukung deteksi dini, manajemen penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan efisiensi pelayanan di seluruh level fasilitas kesehatan.	6.	Cakupan Kesehatan Universal (UHC)	Sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
8.	PN — 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia PN 8 — Memperkuat Penyelarasan	PP 7 — Jatim Berkah-Amanah PP 8 — Jatim Harmoni	Gresik Barokah	5. Penguatan peran lembaga adat, komunitas budaya, dan organisasi keagamaan dalam menjaga tradisi, mediasi sosial, serta pelestarian	1.	Mendorong Kesalehan dan Tanggung Jawab Sosial Masyarakat dan Dunia Usaha		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi	Program Prioritas Kabupaten	Arah Kebijakan	No	Program Kerja Prioritas		Program Prioritas Nomenklatur	Urusan
	Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama			nilai-nilai harmoni dan keberagaman.				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan
				2. Pengembangan dan penerapan sistem digitalisasi layanan kesehatan berbasis interoperabilitas data untuk mendukung deteksi dini, manajemen penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan efisiensi pelayanan di seluruh level fasilitas kesehatan.	2.	Melindungi Segenap Generasi Muda dari Penyalahgunaan Narkoba dan HIV/AIDS		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kesehatan
				5. Penguatan peran lembaga adat, komunitas budaya, dan organisasi keagamaan dalam menjaga tradisi, mediasi sosial, serta pelestarian	3.	Peningkatan Peran Serta Tokoh Agama, TokohMasyarakat Tokoh Budaya dan Lembaga Keagamaan untuk Memberikan Tauladan Kesalehan Sosial		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kesatuan Bangsa dan Politik
								Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Kepemudaan dan Olahraga

No	Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi	Program Prioritas Kabupaten	Arah Kebijakan	No	Program Kerja Prioritas		Program Prioritas Nomenklatur	Urusan
				nilai-nilai harmoni dan keberagaman.					
				16. Penyediaan akses yang adil terhadap bantuan sosial dan layanan dasar, serta pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	4.	Gresik Probono	Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
9.	PN 8 — Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama	PP 9 — Jatim Lestari	Pesona Gresik (Pelestarian dan naturalisasi alam)	13. Peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat dan kelembagaan terhadap perubahan iklim melalui pendidikan dan pelatihan berbasis perubahan iklim	1.	Membangun Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu di Tingkat Kecamatan		Program Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup

Sumber : Bappeda Kabupaten Gresi

4.3 Keselarasan Dokumen Perencanaan

Keselarasan dokumen perencanaan daerah digunakan untuk menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan secara berjenjang, efektif, terarah, dan berkelanjutan. Adapun untuk dokumen perencanaan daerah tahunan juga harus selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang.

Selain itu, keselarasan tersebut menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan daerah.

Tabel 4.8 Keselarasan dan Konsistensi RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2027 dengan RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2025-2029

No.	RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029	RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2027
Prioritas Pembangunan Kabupaten Gresik		
1.	Gresik Tuntas (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntable, dan Sustainable), mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel melalui transformasi digital dan tata kelola yang terbuka.	Gresik Tuntas (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntable, dan Sustainable), mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel melalui transformasi digital dan tata kelola yang terbuka.
2.	Gresik Seger (Sejahtera, Bahagia, dan Berdikari), mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan yang merata dengan menitik beratkan pada keadilan sosial bagi kelompok rentan dan marjinal	Gresik Seger (Sejahtera, Bahagia, dan Berdikari), mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan yang merata dengan menitik beratkan pada keadilan sosial bagi kelompok rentan dan marjinal
3.	Gresik Mapan (Maju, Pintar, dan Aman), merepresentasikan pembangunan fisik yang selaras dengan kebutuhan masyarakat menuju kemajuan infrastruktur yang merata dan berkualitas.	Gresik Mapan (Maju, Pintar, dan Aman), merepresentasikan pembangunan fisik yang selaras dengan kebutuhan masyarakat menuju kemajuan infrastruktur yang merata dan berkualitas.

No.	RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029	RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2027
4.	Gresik Agropolitan, merupakan manifestasi pembangunan sektor pertanian, kelautan, dan perikanan berbasis teknologi dan keberlanjutan.	Gresik Agropolitan, merupakan manifestasi pembangunan sektor pertanian, kelautan, dan perikanan berbasis teknologi dan keberlanjutan.
5.	Gema Karya, Gresik mandiri dan berkarya), mengutamakan pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi kreatif melalui pelatihan, inkubasi, dan dukungan pada UMKM.	Gema Karya, Gresik mandiri dan berkarya), mengutamakan pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi kreatif melalui pelatihan, inkubasi, dan dukungan pada UMKM.
6.	Gresik Cemerlang (Cerdas, efisien, menarik, relevan, global), menekankan pembangunan sektor pendidikan yang inklusif, merata, dan berorientasi masa depan.	Gresik Cemerlang (Cerdas, efisien, menarik, relevan, global), menekankan pembangunan sektor pendidikan yang inklusif, merata, dan berorientasi masa depan.
7.	Gresik Sehati (Pelayanan kesehatan integratif), meningkatkan kesehatan masyarakat dengan pendekatan holistik dan berbasis komunitas.	Gresik Sehati (Pelayanan kesehatan integratif), meningkatkan kesehatan masyarakat dengan pendekatan holistik dan berbasis komunitas.
8.	Gresik Barokah, memperkuat identitas sosial dan spiritual masyarakat, Gresik Barokah berfokus pada pembangunan karakter dan harmoni sosial.	Gresik Barokah, memperkuat identitas sosial dan spiritual masyarakat, Gresik Barokah berfokus pada pembangunan karakter dan harmoni sosial.
9.	Pesona Gresik (Pelestarian dan naturalisasi alam), merangkul kekayaan alam dan budaya lokal sebagai daya tarik wisata dan daya dukung lingkungan.	Pesona Gresik (Pelestarian dan naturalisasi alam), merangkul kekayaan alam dan budaya lokal sebagai daya tarik wisata dan daya dukung lingkungan.

Cascading permasalahan, isu strategis, dan program prioritas merupakan proses penjabaran secara berjenjang dari kondisi nyata yang dihadapi daerah hingga menjadi arah kebijakan dan intervensi pembangunan yang konkret.

Tabel 4.9. Cascading Permasalahan – Permasalahan, Isu Strategis dan Program dan Program Prioritas

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis daerah	Program Prioritas
Lemahnya Ketahanan Ekologi dan Mitigasi Bencana Hidrometeorologi	Penguatan Ketangguhan Daerah terhadap Perubahan Iklim dan Bencana Hidrometeorologi	Pesona Gresik (Pelestarian dan naturalisasi alam), merangkul kekayaan alam dan budaya lokal sebagai daya tarik wisata dan daya dukung lingkungan.
Keterbatasan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia berbasis GEDSI dan SDG's	Gresik Cemerlang (Cerdas, efisien, menarik, relevan, global), menekankan pembangunan sektor pendidikan yang inklusif, merata, dan berorientasi masa depan.
		Gresik Sehati (Pelayanan kesehatan integratif), meningkatkan kesehatan masyarakat dengan pendekatan holistik dan berbasis komunitas.
Kemiskinan Kronis Perkotaan dan Kemiskinan Multidimensi	Penanggulangan Kemiskinan Kronis dan Multidimensi	Gresik Seger (Sejahtera, Bahagia, dan Berdikari), mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan yang merata dengan menitik beratkan pada keadilan sosial bagi kelompok rentan dan marjinal
Tingkat Pengangguran dan Ketidaksesuaian Keterampilan dengan Kebutuhan Industri	Pertumbuhan Ekonomi Inklusif berbasis Keunggulan Daerah dan Mitigasi Eksternalitas Industri Smelter	Gema Karya, Gresik mandiri dan berkarya), mengutamakan pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi kreatif melalui pelatihan, inkubasi, dan dukungan pada UMKM.
		Gresik Agropolitan, merupakan manifestasi pembangunan sektor pertanian, kelautan, dan perikanan berbasis teknologi dan keberlanjutan.
Keterbatasan Pembangunan Konektivitas dan Infrastruktur Daerah	Keselarasan Pembangunan Wialayah diodukung Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah	Gresik Mapan (Maju, Pintar, dan Aman), merepresentasikan pembangunan fisik yang selaras dengan kebutuhan masyarakat menuju kemajuan infrastruktur yang merata dan berkualitas.
Rendahnya Kemandirian Desa	Pembangunan Desa berbasis Kebutuhan Lokal (Village Demand Driven) dan pengembangan Pariwisata Religi dan Kelestarian Budaya	Gresik Barokah, memperkuat identitas sosial dan spiritual masyarakat, Gresik Barokah berfokus pada pembangunan karakter dan harmoni sosial.
Ketidakoptimalan implementasi Smart City	Transformasi Digital dan Implementasi Smart City	Gresik Cemerlang (Cerdas, efisien, menarik, relevan, global), menekankan pembangunan sektor

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis daerah	Program Prioritas
		pendidikan yang inklusif, merata, dan berorientasi masa depan.
Perlambatan Reformasi Birokrasi	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Efektif, Transparan, dan Responsif	Gresik Tuntas (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntable, dan Sustainable), mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel melalui transformasi digital dan tata kelola yang terbuka.
Keterbatasan Kapasitas Fiskal untuk Pembangunan Daerah	Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah dan Optimalisasi Pendanaan Inovatif	Gresik Tuntas (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntable, dan Sustainable), mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel melalui transformasi digital dan tata kelola yang terbuka.

4.3.1 Keselarasan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur

Pembangunan Kabupaten Gresik dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip keterpaduan dan keselarasan antara kebijakan pembangunan nasional, pembangunan Provinsi Jawa Timur, dan pembangunan daerah. Keselarasan tersebut diwujudkan melalui sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan nasional dan provinsi, sehingga arah kebijakan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan Kabupaten Gresik dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan nasional maupun Provinsi Jawa Timur.

Dalam proses perencanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Gresik telah mengintegrasikan berbagai prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur ke dalam dokumen RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah. Integrasi tersebut antara lain mencakup upaya penguatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas infrastruktur, pengendalian inflasi daerah, penguatan investasi, pengembangan industri dan UMKM, serta reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan.

Tabel 4.10. Keselarasan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Provinsi dan Pembangunan Nasional Tahun 2027

Tema Pembangunan Nasional Tahun 2027	Tema Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2027	Tema Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2027
Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri	Penguatan Pelayanan Dasar untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Penguatan infrastruktur dan layanan dasar serta fondasi pembangunan yang menjadi prasyarat bagi kemajuan di tahun-tahun berikutnya
PN — 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia	PP 8 — Jatim Harmoni PP 7 — Jatim Berkah-Amanah	Gresik Barokah, memperkuat identitas sosial dan spiritual masyarakat, Gresik Barokah berfokus pada pembangunan karakter dan harmoni sosial.
PN — 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	PP 2 — Jatim Kerja PP 4 — Jatim Agro PP 9 — Jatim Lestari	Gresik Agropolitan, merupakan manifestasi pembangunan sektor pertanian, kelautan, dan perikanan berbasis teknologi dan keberlanjutan.
PN 3 — Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Agromaritim Industri	PP 2 — Jatim Kerja PP 3 — Jatim Akses	Gresik Mapan (Maju, Pintar, dan Aman), merepresentasikan pembangunan fisik yang selaras dengan kebutuhan masyarakat menuju kemajuan infrastruktur yang merata dan berkualitas. Gema Karya, Gresik mandiri dan berkarya), mengutamakan pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi kreatif melalui pelatihan, inkubasi, dan dukungan pada UMKM.

Tema Pembangunan Nasional Tahun 2027	Tema Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2027	Tema Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2027
PN 4 — Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	PP 1 — Jatim Sejahtera PP 5 — Jatim Cerdas PP 6 — Jatim Sehat PP 8 — Jatim Harmoni	Gresik Cemerlang (Cerdas, efisien, menarik, relevan, global), menekankan pembangunan sektor pendidikan yang inklusif, merata, dan berorientasi masa depan. Gresik Sehati (Pelayanan kesehatan integratif), meningkatkan kesehatan masyarakat dengan pendekatan holistik dan berbasis komunitas.
PN 5 — Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PP 4 — Jatim Agro PP 9 — Jatim Lestari	Gresik Agropolitan, merupakan manifestasi pembangunan sektor pertanian, kelautan, dan perikanan berbasis teknologi dan keberlanjutan.
PN 6 — Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PP 1 — Jatim Sejahtera PP 2 — Jatim Kerja	Gresik Seger (Sejahtera, Bahagia, dan Berdikari), mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan yang merata dengan menitik beratkan pada keadilan sosial bagi kelompok rentan dan marjinal
PN 7 — Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	PP 7 — Jatim Berkah-Amanah PP 8 — Jatim Harmoni	Gresik Tuntas (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntable, dan Sustainable), mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel melalui transformasi digital dan tata kelola yang terbuka.
PN 8 — Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama	PP 8 — Jatim Harmoni PP 9 — Jatim Lestari	Gresik Barokah, memperkuat identitas sosial dan spiritual masyarakat, Gresik Barokah berfokus pada pembangunan karakter dan harmoni sosial. Pesona Gresik (Pelestarian dan naturalisasi alam), merangkul kekayaan alam dan budaya lokal sebagai daya tarik wisata dan daya dukung lingkungan.

Tabel 4.11. Keselarasan Indikator Makro Kabupaten Gresik dalam Rancangan RKPD Provinsi Jawa Timur dengan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2027

No	Indikator Makro	Target Kabupaten dalam RKPD Jawa timur Tahun 2027	Target RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2027
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,80-5,88	4,80-5,88
2	Tingkat Kemiskinan (%)	8,26-9,21	8,26-9,21
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,88-5,39	6,88-5,39
4	Rasio Gini (nilai)	0,295-0,335	0,295-0,335
5	Indeks Pembangunan Manusia	80,17-81,07	80,17-81,07
6	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO2 eq)	57.867,25	41.960,69

4.4 Keselarasan dengan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)

Kabupaten Gresik sebagai bagian dari Wilayah Metropolitan (WM) Surabaya, kawasan pengembangan industri nasional, serta wilayah pendukung Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Surabaya memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan kewilayahan yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2027. Keselarasan intervensi pembangunan diwujudkan melalui sinkronisasi program dan kegiatan daerah dengan prioritas nasional, khususnya pada bidang peningkatan produktivitas dan daya beli masyarakat, penguatan infrastruktur dan konektivitas ekonomi, pengembangan investasi berorientasi industri dan ekspor, swasembada pangan, energi dan air, penguatan industri nasional, serta hilirisasi sumber daya alam strategis.

Selain itu, pendetailan highlight intervensi kewilayahan juga memetakan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sebagai bentuk sinkronisasi antara prioritas pembangunan nasional dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintah Kabupaten Gresik sesuai dengan kewenangan daerah. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan konektivitas transportasi dan logistik, penguatan iklim investasi, pengembangan sumber daya manusia, serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan guna memperkuat peran Kabupaten Gresik sebagai simpul industri, perdagangan, dan jasa di kawasan Gerbangkertosusila serta mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan nasional yang inklusif dan berdaya saing.

Tabel 4.12 Keselarasan dengan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Tahun 2027

NO	KODE	RANCANGAN RKP 2027		RKPD 2027		KETERANGAN
		LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	B1	Stimulus Untuk Produktivitas dan Daya Beli Masyarakat B1: WM Surabaya dan Kawasan Pengembangan Industri Gresik-Surabaya-Sidoarjo-Mojokerto-Pasuruan • Kab. Gresik	Program 3 Juta Rumah: 1 Juta Rumah Baru & 2 Juta Renovasi Rumah (Samesta Driyorejo)*	Wilayah Kabupaten Gresik yang memiliki kebutuhan perumahan dan penanganan permukiman yang tinggi, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan kawasan kumuh yang memerlukan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.	Program : Kawasan Permukiman, Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-
2	B1	Infrastruktur dan Konektivitas Ekonomi B1: WM Surabaya dan Kawasan Pengembangan Industri Gresik-Surabaya-Sidoarjo-Mojokerto- Pasuruan • Kota Surabaya • Kab. Gresik • Kab. Sidoarjo • Kab. Pasuruan	• SPAM Umbulan* • Jalan Tol Pandaan – Malang*	Kabupaten Gresik		Pada pembahasan Desk PKPN SPAM yg dibahas adalah Mojolagres tetapi berdasarkan hasil desk untuk usulan tersebut tidak direkomendasikan karena tidak tercantum dalam konreg. Usulan SPAM Mojolagres juga diusulkan melalui loan GII yang saat ini dalam tahap pembahasan usulan dan pemenuhan RC (belum pada tahap usulan tersebut diterima atau tidak) Adapun untuk SPAM Umbulan saat ini kendala pada

NO	KODE	RANCANGAN RKP 2027		RKPD 2027		KETERANGAN
		LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						penurunan debit air dari sumber
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan:Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan - Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan - Rehabilitasi SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan - Pengembangan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Mendukung keterhubungan dan pemerataan layanan air minum regional melalui penguatan jaringan distribusi dan layanan air minum perkotaan/industri
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: - Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana air minum kawasan strategis daerah	Pemanfaatan dukungan air baku regional untuk mendukung kawasan industri dan pusat pertumbuhan ekonomi Gresik
					Program Penyelenggaraan Jalan Kegiatan:Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: - Rekonstruksi Jalan Kabupaten/Kota - Rehabilitasi Jalan Kabupaten/Kota - Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten/Kota	Mendukung konektivitas koridor industri Gresik–Surabaya–Sidoarjo–Mojokerto–Pasuruan melalui peningkatan jaringan jalan

NO	KODE	RANCANGAN RKP 2027		RKPD 2027		KETERANGAN
		LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					- Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten/Kota	kabupaten dan akses kawasan ekonomi
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kegiatan:Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Sub Kegiatan :- Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Penguatan konektivitas distribusi barang/logistik dari kawasan industri Gresik menuju jaringan transportasi regional
					Program Promosi Penanaman Modal Promosi Penanaman Modal - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Memperkuat posisi Gresik sebagai simpul industri regional melalui penyediaan iklim investasi yang kondusif, fasilitasi kemudahan berusaha, dan dukungan infrastruktur dasar kawasan ekonomi.
3	B1	Investasi Berorientasi Industri dan Ekspor B1: WM Surabaya dan Kawasan Pengembangan Industri Gresik-Surabaya-Sidoarjo-Mojokerto-Pasuruan • Kab. Gresik	Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik*	Kecamatan Manyar	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Sub Kegiatan: Penyusunan dan pemutakhiran kebijakan pengembangan iklim penanaman modal; penyediaan informasi peluang investasi daerah	Mendukung KEK Gresik melalui kebijakan daerah yang kondusif, penyediaan informasi investasi, dan sinkronisasi kebijakan kawasan industri
					Program Promosi Penanaman Modal Kegiatan Promosi Penanaman Modal Sub Kegiatan: Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota; penyusunan materi promosi investasi	Memperkuat posisi Gresik sebagai tujuan investasi industri melalui promosi potensi kawasan dan peluang usaha

NO	KODE	RANCANGAN RKP 2027		RKPD 2027		KETERANGAN
		LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Program Pelayanan Penanaman Modal Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Sub Kegiatan: Pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS; fasilitasi pelayanan penanaman modal	Mendukung percepatan realisasi investasi KEK melalui layanan perizinan yang cepat, mudah, dan terintegrasi
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Sub Kegiatan: Koordinasi/sinkronisasi kebijakan tata ruang kawasan strategis	Menjamin pengembangan KEK sesuai tata ruang daerah dan mendukung kepastian lokasi investasi
					Program Penyelenggaraan Jalan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Rekonstruksi jalan kabupaten/kota; rehabilitasi jalan kabupaten/kota; pemeliharaan jalan kabupaten/kota	Mendukung kelancaran arus barang industri dari KEK menuju pelabuhan, jalan nasional, dan pusat distribusi
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Pembangunan/Peningkatan SPAM jaringan perpipaan	Mendukung kesiapan infrastruktur dasar kawasan untuk kebutuhan industri dan permukiman pendukung
					Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Sub Kegiatan: Pencegahan	Mendukung pengembangan industri hijau dan keberlanjutan investasi KEK

NO	KODE	RANCANGAN RKP 2027		RKPD 2027		KETERANGAN
		LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					pencemaran dan pemantauan kualitas lingkungan	
					Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan: Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi	Menyiapkan tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan industri KEK dan sektor ekspor
4	B1	Swasembada Pangan, Energi, dan Air B1: WM Surabaya dan Kawasan Pengembangan Industri Gresik-Surabaya-Sidoarjo-Mojokerto-Pasuruan • Kab. Gresik • Kab. Lamongan	Pembangunan Tanggul Laut Pantai Utara Jawa (Giant Sea Wall)*	Kecamatan Kebomas, Kecamatan Manyar, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Bungah, Kecamatan Ujungpangkah, Kecamatan Panceng	-	Berdasarkan draft dokumen program nasional ketangguhan banjir perkotaan yang telah disusun oleh Bappenas, skema alternatif pembiayaan melalui APBN, PPP, PINJAMAN JICA/ADB, Green Climate Fund, blended finance
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (sesuai kewenangan) Sub Kegiatan: Operasi dan pemeliharaan sistem drainase/pengendali banjir daerah	Mendukung efektivitas Giant Sea Wall melalui penguatan sistem drainase kabupaten dan pengendalian genangan pada kawasan permukiman, industri, dan pertanian
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Sub Kegiatan: Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sistem drainase	Menyiapkan infrastruktur drainase wilayah sebagai bagian dari adaptasi terhadap risiko banjir/rob
					Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan Pangan	Menjaga keberlanjutan produksi pangan

NO	KODE	RANCANGAN RKP 2027		RKPD 2027		KETERANGAN
		LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sub Kegiatan: Penyediaan prasarana pendukung pertanian/perikanan	melalui dukungan sarana prasarana pertanian dan perikanan yang berada dalam kewenangan kabupaten
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Sub Kegiatan: Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil; penyediaan sarana prasarana budidaya ikan	Mendukung keberlanjutan ekonomi pesisir melalui peningkatan produktivitas tambak dan usaha perikanan budidaya
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Sub Kegiatan: Koordinasi pelaksanaan penataan ruang	Mengarahkan pemanfaatan ruang pesisir agar selaras dengan pembangunan infrastruktur pengendali risiko dan kawasan ekonomi
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi SPAM jaringan perpipaan	Memperkuat ketahanan air masyarakat dan kawasan ekonomi yang berada di wilayah terdampak risiko pesisir
					Program Penyelenggaraan Jalan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Rekonstruksi/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Kabupaten/Kota	Mendukung konektivitas kawasan produksi pangan, tambak, permukiman, dan pusat ekonomi pesisir

NO	KODE	RANCANGAN RKP 2027		RKPD 2027		KETERANGAN
		LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	B1	Industri Nasional B1: WM Surabaya dan Kawasan Pengembangan Industri Gresik-Surabaya-Sidoarjo-Mojokerto-Pasuruan • Kota Surabaya • Kab. Gresik • Kab. Lamongan • Kab. Sidoarjo	Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Surabaya Raya	Kabupaten Gresik	Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan: Pengurangan Sampah; Penanganan Sampah	Mendukung ekosistem PSEL melalui peningkatan pengelolaan sampah daerah, pengurangan sampah dari sumber, dan peningkatan kualitas layanan persampahan
					Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan: Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Memperkuat rantai pengelolaan sampah agar sampah yang masuk ke sistem regional lebih terkendali dan memenuhi standar pengolahan
					Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan: Pengoperasian dan pemeliharaan TPA/TPS3R	Mendukung transisi pengelolaan sampah dari pola pembuangan akhir menuju pengolahan yang lebih ramah lingkungan
					Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah Sub Kegiatan: Pembinaan pengurangan sampah melalui 3R (Reduce, Reuse, Recycle)	Mengurangi beban sampah menuju fasilitas pengolahan regional melalui penguatan bank sampah, pemilahan, dan ekonomi sirkular
					Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Mendukung pemanfaatan sampah sebagai sumber energi sekaligus mengurangi dampak lingkungan

NO	KODE	RANCANGAN RKP 2027		RKPD 2027		KETERANGAN
		LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Sub Kegiatan: Pencegahan pencemaran dan pemulihan kualitas lingkungan	dari pengelolaan sampah
					Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Sub Kegiatan: Pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup	Menjaga standar lingkungan daerah sebagai bagian dari pengembangan WM Surabaya yang berkelanjutan
6	B1	Hilirisasi SDA Strategis B1: WM Surabaya dan Kawasan Pengembangan Industri Gresik-Surabaya-Sidoarjo-Mojokerto-Pasuruan • Kota Surabaya • Kab. Gresik	• Hilirisasi Industri Strategis di Sektor Minerba • Kawasan Pesisir Terpadu Surabaya Waterfront Land (SWL)*	Kabupaten Gresik	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Sub Kegiatan: Penyediaan informasi peluang investasi daerah; penyusunan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal	Mendukung penguatan rantai nilai industri melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dan penyediaan informasi potensi industri daerah
					Program Promosi Penanaman Modal Kegiatan Promosi Penanaman Modal Sub Kegiatan: Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota; penyusunan materi promosi investasi	Mendorong Gresik sebagai simpul industri pengolahan dan kawasan ekonomi yang terintegrasi dengan WM Surabaya
					Program Pelayanan Penanaman ModalKegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Sub Kegiatan: Pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS; fasilitasi pelayanan penanaman modal Sub Kegiatan: Pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS dan fasilitasi pelayanan penanaman modal	Mempercepat realisasi investasi industri melalui layanan perizinan daerah yang efektif

NO	KODE	RANCANGAN RKP 2027		RKPD 2027		KETERANGAN
		LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Program Penyelenggaraan Jalan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Rekonstruksi jalan kabupaten/kota; rehabilitasi jalan kabupaten/kota; pemeliharaan jalan kabupaten/kota	Mendukung konektivitas kawasan industri Gresik menuju pelabuhan, kawasan logistik, dan pusat distribusi regional
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Sub Kegiatan: Koordinasi pelaksanaan penataan ruang daerah	Menjamin pengembangan kawasan industri dan pesisir selaras dengan RTRW/RDTR serta daya dukung lingkungan
					Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Sub Kegiatan: Pencegahan pencemaran dan pemulihan kualitas lingkungan hidup	Mendukung pembangunan kawasan pesisir terpadu melalui penguatan perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi SPAM jaringan perpipaan	Menyiapkan layanan dasar kawasan untuk mendukung aktivitas industri, permukiman, dan ekonomi pesisir
					Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan: Pelaksanaan pelatihan	Menyiapkan tenaga kerja lokal agar sesuai kebutuhan industri hilirisasi dan sektor manufaktur

NO	KODE	RANCANGAN RKP 2027		RKPD 2027		KETERANGAN
		LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi	
	Fokus Pembangunan Kewilayahan Prioritas Lainnya					
7		Infrastruktur dan Konektivitas Ekonomi	Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional	Kabupaten Gresik	Program Pengelolaan Perkeretaapian Kegiatan Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Perlintasan KA Sebidang yaitu Pengadaan Rambu KA dan Pemeliharaan Palang Pintu KA
			Perluasan coverage jaringan transportasi melalui penyediaan feeder	Kabupaten Gresik	Program Penyelengaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Angkutan Feeder (Penyediaan Prasarana Awal Feeder)
			Pembangunan /peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan lokal	Kabupaten Gresik	Program Pengelolaan Pelayaran Kegiatan Pembangunan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Penyediaan Fasilitas Pelabuhan Penyebrangan Bawean, Jasa Konsultasi Perencanaan Rehab Dermaga
			Peningkatan konektivitas jalan menuju/dari kawasan strategis pariwisata, kawasan industri dan ekonomi kreatif melalui penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa	Kabupaten Gresik	Program Penyelenggaraan Jalan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Rekonstruksi jalan kabupaten/kota; rehabilitasi jalan kabupaten/kota; pemeliharaan jalan kabupaten/kota	Mendukung kelancaran menuju kawasan strategis pariwisata, industri dan ekonomi krearif

4.5 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Tabel 4.13 Pokok Pokok Pikiran DPRD

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Prambon Desa Klotok Kecamatan Balongpanggang, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			METER		1.062.517.720			
2	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Jombangdelik RT 002 RW 001 Desa Jombangdelik Kecamatan Balongpanggang, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		237.383.200			
3	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Juwet RT 002 RW 001 Desa Pinggir Kec Balongpanggang, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		449.005.000			
4	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Desa Wahas Kecamatan Balongpanggang, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		734.206.000			
5	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Ganggang RT. 01 RW. 01Desa Ganggang Kecamatan Balongpanggang, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		782.800.000			
6	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Dapet RT 001 RW 001 Desa Dapet Kecamatan Balongpanggang, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		316.938.400			
7	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Ngablak RT.10 Desa Kedungrukem Kecamatan Benjeng, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		436.843.750			
8	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Kedungrukem RT. 05 Desa Kedungrukem Kecamatan Benjeng, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		567.250.000			
9	#PBP_Jembatan Jalan Desa /Jalan Lingkungan	Dusun Balongmojo Sawahan RT 01 RW 03 Desa Balongmojo Kecamatan Benjeng, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		87.721.200			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Balongmojo Sawahan RT 01 RW 03 Desa Balongmojo Kecamatan Benjeng, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		1.092.253.000			
11	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Balongmojo Kulon RT 01 RW 01 Desa Balongmojo Kecamatan Benjeng, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		722.884.000			
12	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Balongmojo Krajan RT 06 RW 02 Desa Balongmojo Kecamatan Benjeng, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			METER		435.700.000			
13	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Balongmojo Sawahan RT 02 RW 03 Desa Balongmojo Kecamatan Benjeng, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			METER		435.700.000			
14	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DUSUN JATISARI DESA BABATAN KECAMATAN BALONGPANGGANG, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		409.000.000			
15	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DUSUN KEDUNGJATI DESA BABATAN KECAMATAN BALONGPANGGANG, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		435.700.000			
16	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DUSUN KEDONDONG DESA NGAMPEL KECAMATAN BALONGPANGGANG, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		2.715.685.600			
17	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DUSUN KARANGASEM DESA KARANGSEMANDING KECAMATAN BALONGPANGGANG, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		926.980.000			
18	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DUSUN MENGANTI DESA KARANGSEMANDING KECAMATAN BALONGPANGGANG, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		561.724.000			
19	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DUSUN KARANGMALANG DESA KARANGSEMANDING KECAMATAN BALONGPANGGANG, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		504.052.000			
20	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DUSUN GADEL DESA PACUH KECAMATAN BALONGPANGGANG, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		7.996.612.000			
21	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DUSUN BANGGLE DESA TENGGOR KECAMATAN	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		2.192.857.600			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		BALONGPANGGANG, Kab. Gresik			KAWASAN PERMUKIMAN												
22	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DUSUN BANGGLE DESA TENGGOR KECAMATAN BALONGPANGGANG, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		1.076.500.000			
23	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DUSUN TENGGOR DESA TENGGOR KECAMATAN BALONGPANGGANG, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		2.004.161.920			
24	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	RT 001-RT 006, Desa Tiremenggal, Kecamatan Dukun, Kab. Gresik	06-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		119.038.000			
25	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	RT 016 RW 008, Desa Sawo, Kecamatan Dukun, Kab. Gresik	06-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		117.436.000			
26	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	RT 018, Desa Petung, Kecamatan Panceng, Kab. Gresik	06-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		168.700.000			
27	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	RT 004-RT 005, Desa Gedongkedoan, Kecamatan Dukun, Kab. Gresik	06-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		633.280.000			
28	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 007 RW 004, Desa Bangeran, Kecamatan Dukun, Kab. Gresik	06-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		2.117.495.200			
29	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	RT 006 RW 002, Desa Petiyintunggal, Kecamatan Dukun, Kab. Gresik	06-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		382.967.500			
30	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	RT 006 RW 001, Desa Tebuwung, Kecamatan Dukun, Kab. Gresik	06-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		172.705.000			
31	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Rejodadi, RT 015 RW 005, Desa Campurejo, Kecamatan Panceng, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		248.800.000			
32	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Wonorejo, RW 008, Desa Dalegan, Kecamatan Panceng, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		248.800.000			
33	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Jl. Kapten Dulasim XI G/28 RT. 04 RW. 01 Desa Kramatinggil	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		8.500.000			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Kec. Gresik , Kab. Gresik			DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									
34	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 05 RW 06 Desa Sidorukun Kec. Gresik , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		558.520.000			
35	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DSN MUNGGU RT 07 RW 02 DESA MUNGGUGIANTI KEC. BENJENG , Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		204.062.500			
36	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DSN MUNGGU RT 07 RW 02 DESA MUNGGUGIANTI KEC. BENJENG , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		703.847.290			
37	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 04 RW 01 DSN MUNGGU DESA MUNGGUGIANTI KEC. BENJENG , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		410.341.000			
38	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DSN PURWOREJO RT 05 RW 02 DESA METATU BENJENG , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		180.608.125			
39	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DSN METATU RT 12 RW 03 DESA METATU BENJENG , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		181.153.750			
40	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DUSUN TRATE RT 02 DESA PUNDUTTRATE BENJENG , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		305.322.880			
41	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DUSUN PUNDUT TRATE RT 05 DESA PUNDUTTRATE BENJENG , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		226.384.038			
42	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DSN RANDUPUKAH RT 14 RW 04 DESA GADUNG KECAMATAN DRIYOREJO, Kab. Gresik	06-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M2		367.532.800			
43	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DS. TANJUNGAN RT 03 RW 01 KEC DRIYOREJO, Kab. Gresik	06-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		346.921.600			
44	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DSN RANDEGAN RT 03 RW 03 DS RANDEGANSARI KEC DRIYOREJO, Kab. Gresik	06-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		205.366.800			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
45	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DSN WATES RT 09 RW 02 DS CANGKIR KEC DRIYOREJO, Kab. Gresik	06-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		656.316.400			
46	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DSN BURENG LOR RT 03 RW 02 DS SUMBERWARU KEC WRINGINANOM, Kab. Gresik	06-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		689.700.000			
47	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DS. BANJARAN RT 03 RW 02 KEC. DRIYOREJO, Kab. Gresik	07-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		280.840.000			
48	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DSN SUMPUT ASRI DS SUMPUT KEC DRIYOREJO, Kab. Gresik	07-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		457.060.000			
49	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DS MOJOSARIREJO RW 04 KEC DRIYOREJO, Kab. Gresik	07-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		653.572.000			
50	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DS KESAMBEN WETAN RT 10 RW 02 KEC DRIYOREJO, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		662.650.000			
51	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DS N WATES RT 10 RW 06 DS CANGKIR KEC DRIYOREJO, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		858.628.000			
52	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DSN KALANGAN RT 01 - RT 03 RW 02 DS KARANGANDONG KEC DRIYOREJO, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		542.500.000			
53	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dsun Laut Sungai Desa Dekatagung Sangkapura , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		839.360.000			
54	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dsn Sumber Desa Kepuh Teluk Tambak , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		7.741.808.000			
55	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Pinang Tanam Desa Pekalongan Tambak , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		819.014.600			
56	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dsn Sumber Desa Kepuh Teluk Kepuhteluk Tambak , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		818.000.000			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					KAWASAN PERMUKIMAN												
57	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dsb sukaoneng Desa Sukaoneng Tambak , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		273.320.000			
58	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Gunungsoka Desa Gunung teguh sangkapura , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		350.750.000			
59	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Daun Barat Desa Daun Sangkapura , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		173.948.480			
60	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Gununglaok Desa Daun Sangkapura , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		465.773.600			
61	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dsn Legundi Desa Kepuhlegundi Tambak , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		253.496.000			
62	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dsn Sungai Olo Desa Kepuhlegundi Tambak , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		476.348.000			
63	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dsn. Gunung Barat Desa Pekalongan Kec.Tambak , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		875.672.000			
64	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 08 RW 02 Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kebomas, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		175.630.000			
65	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 06 RW 03 Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kebomas , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		115.463.200			
66	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 004 RW 002 Desa Kembangan Kecamatan Kebomas , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		128.567.200			
67	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 003 RW 003 Desa Kembangan Kecamatan Kebomas , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		165.406.000			
68	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 07 RW 01 DESA SEGOROMADU	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		357.274.400			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		KEBOMAS , Kab. Gresik			DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									
69	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 07 RW 01 DESA DESA SEGOROMADU KEBOMAS , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		107.440.960			
70	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 001 RW 02 DESA SEGOROMADU KEBOMAS , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		3.470.358.400			
71	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RW 08 DESA KEDANYANG KEBOMAS , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		765.445.000			
72	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RW 07 DESA KEDANYANG KEBOMAS , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		1.541.200.000			
73	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 02 RW 02 DESA KEDANYANG KEBOMAS , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		442.642.000			
74	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RW 001 DESA SEKARKURUNG KEBOMAS , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		334.737.760			
75	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RW 03 DAN RW 05 DESA SIDOMORO KEBOMAS , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		97.488.844			
76	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DUSUN SINGOREJO DESA DAHANREJO KEBOMAS , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		392.980.000			
77	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DUSUN DAHANREJO KIDUL RT 01 RW 03 DESA DAHANREJO KEC.KEBOMAS , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		211.954.000			
78	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DUSUN WONOSARI RT. 002 RW. 002 DESA BANYUURIP KECAMATAN KEDAMEAN, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		1.980.241.600			
79	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT. 26 RW. 08 DESA KARANGTURI KECAMATAN MENGANTI, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		324.094.000			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DUSUN MENUNGGAL RT. 004 RW. 001 DESA MENUNGGAL KECAMATAN KEDAMEAN, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		322.492.000			
81	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DUSUN MOJOTENGAH RT. 12 S/D. RT. 15 DESA MOJOTENGAH KECAMATAN MENGANTI, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		215.959.000			
82	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DUSUN LABAN WETAN RT. 018 RW. 006 DESA LABAN KECAMATAN MENGANTI, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		144.269.500			
83	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DUSUN SIDOMULYO RW. 01 DESA HULAAN KECAMATAN MENGANTI, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		208.856.800			
84	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DUSUN MOJOWUKU RT. 011 RW. 004 - RT. 07 RW. 03 DESA MOJOWUKU KECAMATAN KEDAMEAN, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		2.251.300.000			
85	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT. 003 RW. 005 DUSUN SAWEN DESA TANJUNG KECAMATAN KEDAMEAN, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		341.887.600			
86	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DUSUN DUKUHAN DESA TANJUNG KECAMATAN KEDAMEAN, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		435.700.000			
87	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DUSUN SUMBERJAMBE RT. 006 RW. 005 DESA SIDORAHARJO KECAMATAN KEDAMEAN, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		165.496.000			
88	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DUSUN GOREKAN KIDUL RT. 04 DESA CERMEN KECAMATAN KEDAMEAN, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		685.016.590			
89	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	RT. 04 RW. 02 DUSUN NGEPUNG DESA NGEPUNG KECAMATAN KEDAMEAN, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		344.920.000			
90	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DUSUN KASIYAN DESA LAMPAH KECAMATAN KEDAMEAN, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		764.644.000			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
91	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT. 03 RW. 01 KELURAHAN KROMAN KECAMATAN GRESIK, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		309.946.720			
92	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT. 07 RW. 02 KELURAHAN KROMAN KECAMATAN GRESIK, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		134.198.680			
93	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT. 08, 12, 13, 17, DAN 18 KELURAHAN KROMAN KECAMATAN GRESIK, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		317.365.600			
94	#PBP_Infrastruktur Kesehatan	KELURAHAN KROMAN KECAMATAN GRESIK, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			M2		69.000.000			
95	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT. 01 RW. 03 KELURAHAN KEBOMAS KECAMATAN KEBOMAS, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		394.211.200			
96	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT. 01 B RW. 03 KELURAHAN KEBOMAS KECAMATAN KEBOMAS, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		176.866.000			
97	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT. 004 RW. 003 KELURAHAN KARANGPOH KECAMATAN GRESIK, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		307.273.120			
98	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Jl. Kapten Darmosugondo GG XII/B. RT 05 RW 02 Kelurahan Indro Kecamatan Kebomas, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		433.030.000			
99	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Dayasungai, Desa Sungairujing, Kecamatan Sangkapura, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		277.436.384			
100	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Gunung Lanjang, Desa Bululanjang, Kecamatan Sangkapura, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		1.619.000.000			
101	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Balibakhilir, Desa Balikterus, Kecamatan Sangkapura, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		225.260.000			
102	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Bakung, Desa Suwari, Kecamatan Sangkapura, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		433.520.000			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					KAWASAN PERMUKIMAN												
103	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Sumarna, Desa Tanjungori, Kecamatan Tambak, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		719.530.400			
104	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Buluar Selatan, Desa Bululanjang, Kecamatan Sangkapura, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		471.800.000			
105	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Tajung, RT 001 RW 005, Desa Sungairujing, Kecamatan Sangkapura, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		978.200.000			
106	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Tajungkima, Desa Kumalasa, Kecamatan Sangkapura, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		517.280.000			
107	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Sumberrejo, RT 001 RW 001, Desa Pudakittimur, Kecamatan Sangkapura, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		355.826.000			
108	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Paginda, Desa Sukaoneng, Kecamatan Tambak, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		655.172.000			
109	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Dedawang, Desa Telukjatidawang, Kecamatan Tambak , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		437.792.000			
110	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Sumber, Desa Kepuhteluk, Kecamatan Tambak, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		1.158.478.400			
111	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Pagedangan, Desa Diponggo, Kecamatan Tambak, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		637.445.000			
112	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 07 Rw 03 Desa Hendrosari Kec.MENGANTI, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		222.100.000			
113	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Desa Randupadngan Rt 04 Rw 02 Kec. MENGANTI, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		298.195.000			
114	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dsn Ngablakrejo Rt 06 Rw 03 Desa Gempolkurung Kec.	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		288.850.000			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Menganti, Kab. Gresik			DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									
115	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dsn Ngablakrejo Rt 03 Rw 03 Desa Gempolkurung Kec. MENGANTI, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		288.850.000			
116	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	RT 19 RW 04 DESA PENGALANGAN KEC. MENGANTI, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		243.460.000			
117	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DSN SIDOWAREG RT 15 RW 05 DESA SIDOJANGKUNG MENGANTI, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		136.726.000			
118	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 03 RW 01 DESA KATIMOHO KEDAMEAN, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		447.422.560			
119	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 17 RW 03 DESA BELAHANREJO KEDAMEAN, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		369.483.040			
120	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DSN BEJAN DS SIWALAN KEC PANCENG, Kab. Gresik	06-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		893.787.520			
121	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DS IMA'AN RT 01 - RT 04 KEC DUKUN, Kab. Gresik	06-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		900.952.960			
122	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DS TIREM ENGGAL RT 11 RW 07 KEC DUKUN, Kab. Gresik	06-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		273.898.000			
123	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DS PETIYIN TUNGGAL RT 06 RW 02 KEC DUKUN, Kab. Gresik	06-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		382.967.500			
124	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DSN SIDOBANGUN RT 03 RW 04 DS MENTARAS KEC DUKUN, Kab. Gresik	06-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		469.635.700			
125	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DS SAWO RT 16 RW 08 KEC DUKUN, Kab. Gresik	06-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		82.213.360			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
126	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DS SUKODONO RT 02 KEC PANCENG, Kab. Gresik	06-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		339.580.000			
127	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DS PRUPUH RT 02 RW 01 KEC PANCENG, Kab. Gresik	06-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		116.635.000			
128	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DSN BRAYO RT 02 RW 02 DS JREBENG KEC DUKUN, Kab. Gresik	06-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		151.478.500			
129	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DS WONOKERTO RT 05 - RT 014 KEC DUKUN, Kab. Gresik	06-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		604.379.920			
130	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DS PETUNG RT 18 KEC PANCENG, Kab. Gresik	06-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		670.660.000			
131	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 13 RW 06 Desa Serah (Jln ke lokasi KDMP) KEC PANCENG, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		328.900.000			
132	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DESA 11 B RW 06 KETANEN KECAMATAN PANCENG, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		124.474.000			
133	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	RT.006 RW.003 Desa Sembungan Kidul Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M2		243.460.000			
134	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	RT.16 RW.08 DESA SAWO KECAMATAN DUKUN, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		105.821.500			
135	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT.12 RW.06 DESA KETANEN KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK, Kab. Gresik	07-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M2		435.700.000			
136	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT.11 RW.06 DESA KETANEN KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK, Kab. Gresik	07-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M2		258.412.000			
137	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DUSUN GOPA'AN RT.05 S/D RT.07 RW.03 DESA SAMBUNGANYAR KECAMATAN DUKUN	07-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M2		756.100.000			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		KABUPATEN GRESIK, Kab. Gresik			KAWASAN PERMUKIMAN												
138	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT.05 RW.03 DESA BABAKSARI KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK, Kab. Gresik	07-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M2		240.108.000			
139	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	RT.04 RW.02 DESA TIREMENGGAL KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK, Kab. Gresik	07-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M2		89.961.700			
140	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	RT.10 RW.02 DESA PADANGBANDUNG KECAMATAN DUKUN, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		230.911.000			
141	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT.005 RW.002 DESA SUKODONO KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M2		435.700.000			
142	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	RT 001 RW 001 - RT 009 RW 002 Desa Peganden Kec. Manyar, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		542.500.000			
143	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 004 RW 002 Desa Kemangi Kec. Bungah, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		645.538.000			
144	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 009 RW 001 Desa Pongangan Kec. Manyar, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		670.660.000			
145	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RW 004 Desa Suci Kec. Manyar, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		649.300.000			
146	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RW 005 Desa Suci Kec. Manyar, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		409.000.000			
147	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	RT 001, 002 / RW 001 Desa Gedangan Kec. Sidayu, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		352.930.000			
148	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 004 RW 002 (Gang Selatan) Desa Golokan Kec. Sidayu, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		191.662.000			
149	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 001 RW 001 Desa Mriyunan Kec. Sidayu, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		252.004.000			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									
150	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 004 RW 002 Desa Racitengah kec. Sidayu, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		252.310.000			
151	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 001 RW 001 s/d RT 003 RW 002 Desa Wadeng Kec. Sidayu, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		175.630.000			
152	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RW 003 Desa Bunderan Kec. Sidayu, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		213.160.000			
153	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 001 RW 003 Desa Ngawen Kec. Sidayu, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		441.700.960			
154	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RW 002 Desa Purwodadi Kec. Sidayu, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		667.224.400			
155	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 001 RW 006 Desa Cangaan Kec. Ujungpangkah, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		496.120.000			
156	#PBP_Infrastruktur Kesehatan	RW 003 Desa Lasem Kec. Sidayu, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	ya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			M2		513.000.000			
157	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	JL. USMAN SADAR GG. VIII RT. 02 RW. 02 KELURAHAN KARANGTURI KECAMATAN GRESIK , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		93.566.200			
158	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	JL. USMAN SADAR GG. 14 RT. 07 RW. 01 KELURAHAN KARANGTURI KECAMATAN GRESIK, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		167.365.000			
159	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	PERTIGAAN GIRI ASRI, KELURAHAN NGARGOSARI KECAMATAN KEBOMAS, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		496.180.000			
160	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	JL. K.H. ZUBAIR Gg. 11 RW. 004 DESA PULOPANCIKAN KECAMATAN GRESIK, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		132.760.480			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
161	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RW. 002 DESA PRAMBANGAN KECAMATAN KEBOMAS, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		234.916.000			
162	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	JL. MALIK IBRAHIM GG. 1 RW. 001 DESA PULOPANCIKAN KECAMATAN GRESIK, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		8.500.000			
163	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	JL. HARUN THOHIR GG. 23 RW. 003 DESA PILOPANCIKAN KECAMATAN GRESIK, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		94.168.750			
164	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RW. 001 DESA PRAMBANGAN KECAMATAN KEBOMAS, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		438.754.000			
165	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	JL. MALIK IBRAHIM GG. 3 RW. 001 DESA PULOPANCIKAN KECAMATAN GRESIK, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		222.426.400			
166	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	JL. HARUN THOHIR GG. 21 RW. 003 DESA PULOPANCIKAN KECAMATAN GRESIK, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		94.168.750			
167	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	JL. MALIK IBRAHIM GG. 3 RW. 001 DESA PULOPANCIKAN KECAMATAN GRESIK, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		99.308.875			
168	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT. 02 RW. 02 JL. MALIK IBRAHIM GANG 13 DESA SUKOLILO KECAMATAN GRESIK, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		8.500.000			
169	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT. 03 RW. 02 JL. AGUS SALIM DESA GAPUROSUKOLILO KECAMATAN GRESIK, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		68.666.800			
170	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	JL. KH. ZUBAIR GANG 9 RT. 003 RW. 003 DESA PULOPANCIKAN KECAMATAN GRESIK, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		73.381.000			
171	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	JL. MALIK IBRAHIM GG. 1 RW. 001 DESA PULOPANCIKAN KECAMATAN GRESIK, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		69.324.813			
172	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT. 01 dan RT. 02 RW. 02 DUSUN PANDU DESA PANDU KECAMATAN CERME, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		248.800.000			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					KAWASAN PERMUKIMAN												
173	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DUSUN CAGAK DESA CAGAK AGUNG KECAMATAN CERME, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		625.270.000			
174	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DESA WADAK KIDUL KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		647.125.000			
175	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DESA TEBALOAN KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		202.181.800			
176	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	RW.001, Desa Racikulon, Kecamatan Sidayu, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		969.700.000			
177	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 002 RW 001, Desa Kebonagung, Kecamatan Ujungpangkah, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		649.300.000			
178	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RW 002, Desa Mriyunan, Kecamatan Sidayu, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		90.420.160			
179	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 005 RW 002, Desa Glatik, Kecamatan Ujungpangkah, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		337.444.000			
180	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 003, Desa Mojoasem, Kecamatan Sidayu, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		179.167.000			
181	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 003, Desa Mojoasem, Kecamatan Sidayu, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		435.700.000			
182	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Jalan Njero Embong, Desa Golokan, Kecamatan Sidayu, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		1.007.014.000			
183	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 002 RW 004, Desa Ngawen, Kecamatan Sidayu, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		577.390.000			
184	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Jl. Desa Petiken RT 4 RW 2 Desa Petiken	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		288.850.000			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		DRIYOREJO , Kab. Gresik			DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									
185	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dsn Bunut RT 1 RW 6 DESA RANDEGANSARI DRIYOREJO , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		435.700.000			
186	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Jl. Raya Tenaru RT 3 RW 1 DESA TENARUDRIYOREJO , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		499.780.000			
187	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 5 RW 1 DESA KESAMBEN WETAN DRIYOREJO , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		589.063.000			
188	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DRT 8 RW 2 DESA KESAMBEN WETAN DRIYOREJO , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		382.342.000			
189	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Jl. Desa Petiken RT 4 RW 2 DESA PETIKEN DRIYOREJO , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		468.310.000			
190	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dsn. Karanglo RT 5 RW 3 DESA DRIYOREJO KEC. DRIYOREJO , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		347.350.000			
191	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dsn. Karanglo RT 4 RW 3 DESA DRIYOREJO KEC DRIYOREJO , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		234.177.760			
192	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dsun Paras RT 03 RW 02 Desa Mulung DRIYOREJO , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		306.311.008			
193	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dsun Mojokopek RT 02 RW 01 Desa Mulung DRIYOREJO , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		251.206.400			
194	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Desa Sambogunung Kec. Dukun , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		1.429.244.080			
195	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dsn. Rejosari Desa Mentaras Dukun , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		556.686.400			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
196	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Rt 19 Desa Petung Kec. Panceng, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		168.700.000			
197	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Desa Ima'an Kec. Dukun, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		223.007.800			
198	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Rt 01 Rw 01 Desa Gedongkodoan Kec. Dukun, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		853.188.000			
199	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Rt 11 Rw 04 Desa Wotan Kec. Panceng, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		328.900.000			
200	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Rt 05 Rw 02 Desa Dukunanyar Kec. Dukun, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		185.872.000			
201	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Rt 04 Rw 02 Desa Mojopetung Kec. Dukun, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		406.401.760			
202	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Rw 01 Desa Kalirejo Kec. Dukun, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		75.463.600			
203	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	RT.05/RW.02 Desa Sembungan Kidul Kec. Dukun, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		168.700.000			
204	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Siraman Rt 01 Rw 01 Desa Sembunganyar Kec. Dukun, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		218.762.500			
205	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT.07/RW.03 Desa Madumulyorejo Kec. Dukun, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		435.700.000			
206	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Kejambon RT 03 RW 01 Desa Ngabetan Cerme, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		168.700.000			
207	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dsn Ngembung Rt 01 Rw 01 Desa Ngembung Kec. Cerme , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		402.592.000			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					KAWASAN PERMUKIMAN												
208	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	RT 01 RW 01 Dsn Dadapkuning Desa Dadapkuning Cerme , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		275.500.000			
209	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 02 Desa Lengkong Cerme , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		291.520.000			
210	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Rt 01 Rw 01 dan Rt 02 Rw 01 Desa Dooro Cerme , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		688.549.000			
211	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Rt 01 Rw 02 dan Rt 02 Rw 02 Desa Dampaan Cerme , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		614.590.000			
212	#PBP_Jembatan Jalan Desa /Jalan Lingkungan	Dsn. Sukoanyar RT 02 RW 01 Desa Sukoanyar Cerme , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		116.615.000			
213	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Tandegan Rt 02 Rw 05 Desa Morowudi Cerme , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		8.500.000			
214	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dsn. Gurang Kulon Rt 01 Rw 02 dan Rt 02 Rw 02 Desa Guranganyar Cerme , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		399.388.000			
215	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dsn Gatul RT 01 RW 06 Desa Pandu Cerme , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		272.830.000			
216	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Amburan Rt 2 Rw 1 Desa Kandangan Kec. Duduksampean, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		316.885.000			
217	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Desa Wadak Lor Kec. Duduksampean, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		156.685.000			
218	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Desa Panjunan Rt 01 Rw 04 Kec. Duduksampean, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		307.540.000			
219	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Kaliombo Rt 17 Desa Tambakrejo	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		254.140.000			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Kec. Duduksampean, Kab. Gresik			DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									
220	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Ds]esa Kramat Kec. Duduksampean, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		297.618.280			
221	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Desa Wadak Kiudl Kec. Duduksampean, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		355.386.400			
222	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Pandanan Rt 04 Rw 01 Desa Pandanan Kec. Duduksampean, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		537.160.000			
223	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	RT 12 RW 04 Desa Sumengko Kec. Duduksampean, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		309.409.000			
224	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DSN WARENG DS BABATAN KEC BALONGPANGGANG, Kab. Gresik	06-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		756.100.000			
225	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DSN PATUK RT 11 RW 06 DS LUNDO KEC BENJENG, Kab. Gresik	06-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M2		209.650.000			
226	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DSN GEMPAL RT 15 RW 08 DS LUNDO KEC BENJENG, Kab. Gresik	06-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M2		80.590.000			
227	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DSN TANAH DS TANAHLANDEAN KEC BALONGPANGGANG, Kab. Gresik	06-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		980.380.000			
228	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DSN LANDEAN DS TANAHLANDEAN KEC BALONGPANGGANG, Kab. Gresik	06-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		734.740.000			
229	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DSN TANAH RT 01 RW 01 DS TANAHLANDEAN KEC BALONGPANGGANG, Kab. Gresik	06-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		1.455.127.600			
230	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DSN KALANGANYAR DS KARANGANKIDUL KEC BENJENG, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		336.325.000			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
231	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Ngembung Desa Ngembung Kec. Cerme, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		529.618.000			
232	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 001 RW 003 Desa Cagak Agung Kec. Cerme, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		739.120.000			
233	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RW 006 Desa Cerme Lor Kec. Cerme, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		402.233.600			
234	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Mando Desa Pandu Kec. Cerme, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		299.263.000			
235	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Tambak Beras RT 002 RW 002 Desa Tambak Beras Kec. Cerme, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		316.885.000			
236	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Padeg Utara Desa Padeg Kec. Cerme, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		729.400.000			
237	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 04 Rw 01 Desa Ngawen Kec. SIDAYU , Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		595.840.000			
238	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 04 RW 02 Desa Racitengah Kec.SIDAYU , Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		352.396.000			
239	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Desa Bolo RT 03 RW 01 Kec. UJUNGPANGKAH , Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		544.882.000			
240	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Desa Bolo RT 02 RW 05 Kec. Ujungpangkah , Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		983.017.600			
241	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 02 RW 02 Desa Bolo Kec.UJUNGPANGKAH , Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		310.824.400			
242	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 01 RW 01 Desa Ketapanglor Kec, Ujungpangkah , Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		236.889.063			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					KAWASAN PERMUKIMAN												
243	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RW 01 Desa Ketapanglor Kec. Ujungpangkah , Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		2.063.977.600			
244	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 01 RW 14 Desa Pangkahwetan Kec. Ujungpangkah, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		485.500.720			
245	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Jl Tampomas Timur RT 03 RW 07 Desa Pangkahwetan Kec, Ujungpangkah, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		396.184.000			
246	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Desa Cangaan Kec. Ujungpangkah, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		382.300.000			
247	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dsn Mulyosari RT 01 RW 03 Desa Banyuurip Kec, Ujungpangkah , Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		439.705.000			
248	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT.012 RW.003 Dusun Wates Desa Cangkir Kecamatan Driyorejo, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		437.836.000			
249	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT.03 RW.01 Desa Tenaru Kecamatan Driyorejo, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		700.564.000			
250	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT.01 RW.01 Desa Tenaru Kecamatan Driyorejo, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		401.524.000			
251	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT.11 - RW.12 Desa Tenaru Kecamatan Driyorejo, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		1.503.700.000			
252	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT.03 RW.01 Desa Tenaru Kecamatan Driyorejo, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		623.984.800			
253	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT.03 - RT.04 Desa Tenaru Kecamatan Driyorejo, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		485.340.000			
254	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT.004 RW.004 Dusun Cangkir Desa Cangkir Kecamatan	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		220.325.000			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Driyorejo, Kab. Gresik			DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									
255	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT.013 RW.003 Dusun Gading Desa Cangkir Kecamatan Driyorejo, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		25.187.500			
256	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT.018 RW.003 Dusun Gading Desa Cangkir Kecamatan Driyorejo, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		548.347.000			
257	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT.004 RW.004 Dusun Cangkir, Desa Cangkir Kecamatan Driyorejo, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		343.773.400			
258	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT.19 RW.06 Dusun Wates Desa Cangkir Kecamatan Driyorejo, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		473.080.000			
259	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT. 12 s/d. RT. 13 RW. 04 DESA BABAKBAWO KECAMATAN DUKUN, Kab. Gresik	07-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		569.200.000			
260	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT. 01 RW. 01 DESA BABAKBAWO KECAMATAN DUKUN, Kab. Gresik	07-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		223.435.000			
261	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RW. 02 DAN RW. 03 DESA BABAKBAWO KECAMATAN DUKUN, Kab. Gresik	07-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		506.455.000			
262	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT. 02 - RW. 01 DESA GEDONGKEDOAN KECAMATAN DUKUN , Kab. Gresik	07-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		919.605.000			
263	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	JL. JARAN GOYANG RT. 35 DESA LOWAYU KECAMATAN DUKUN, Kab. Gresik	07-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		216.760.000			
264	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT. 001 RW. 001 DESA MOJOPETUNG KECAMATAN DUKUN, Kab. Gresik	07-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		147.553.600			
265	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RW. 02 S/D. RW. 05 TENGAH DESA SAWO KECAMATAN DUKUN, Kab. Gresik	07-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		187.924.000			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
266	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	RT. 05 RW. 02 DESA SEKARGADUNG KECAMATAN DUKUN, Kab. Gresik	07-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		299.263.000			
267	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	UTARA TANGKIS / RT. 004 RW. 002 DESA TIREMENGGAL KECAMATAN DUKUN, Kab. Gresik	07-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		204.208.760			
268	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Randupukah RT 015 RW 004 Desa Gadung Kecamatan Kecamatan Driyorejo, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		529.150.000			
269	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Randupukah RT 16-18 RW 004 Desa Gadung Kecamatan Driyorejo , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		460.300.000			
270	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Randupukah RT 015 RW 004 Desa Gadung Kecamatan Driyorejo, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		238.405.000			
271	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Mulung RT 013 RW 07 Desa Mulung Kecamatan Driyorejo , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		106.592.800			
272	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Paras RT 03 RW 02 Desa Mulung Kecamatan Driyorejo, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		88.200.400			
273	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Bunut RT 01 RW 07 Desa Randegansari Kecamatan Driyorejo, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		302.778.400			
274	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	RT 04 RW 02 Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		649.300.000			
275	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Desa Bunut RT 02 RW 06 Desa Randegansari Kecamatan Driyorejo, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		357.274.400			
276	#PBP_Jembatan Jalan Desa /Jalan Lingkungan	Dusun Paras RT 003 RW 002 Desa Mulung Kecamatan Driyorejo , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		132.498.400			
277	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 01-02 RW 01 Desa Tenaru Kecamatan Driyorejo , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		385.290.400			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					KAWASAN PERMUKIMAN												
278	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 001 RW 001 Desa Bambe Kec. Driyorejo , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		213.661.600			
279	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 02-03 RW 01 Desa Tenaru Kecamatan Driyorejo, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		322.492.000			
280	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DS BANYUWANGI KEC MANYAR, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		1.456.050.000			
281	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DS KEMANGI RT 06 RW 03 KEC BUNGAH, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		921.640.000			
282	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	jl pelangi DS PEGANDEN KEC MANYAR, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		344.386.000			
283	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DSN MASANGAN TIMUR DS MASANGAN KEC BUNGAH, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		147.464.800			
284	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DS BUNGAH RT 22 RW 08 KEC BUNGAH, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		122.242.000			
285	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DSN GROROL RT 14 RW 07 DS MASANGAN KEC BUNGAH, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		335.476.000			
286	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DUSUN PASARTELAGA, DESA BALIKTERUS Kecamatan Sangkapura, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		416.432.000			
287	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DUSUN ALASTIMUR, DESA DAUN KECAMATAN SANGKAPURA, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		577.700.000			
288	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DUSUN PAMASARAN, DESA DEKATAGUNG KECAMATAN SANGKAPURA, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		1.341.320.000			
289	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	JALAN LINGKUNGAN RT 3, DUSUN GUNUNGTINGGI,	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		956.840.000			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		DESA GUNUNGTEGUH SANGKAPURA , Kab. Gresik			DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									
290	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	RT 1, RW 15, DUSUN TEBUSALAH, DESA SIDOGEDUNGBATU SANGKAPURA , Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		473.890.400			
291	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	RT 4, RW 16, DUSUN GUNTUNG, DESA SIDOGEDUNGBATU , Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		473.890.400			
292	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	RT 2, RW 4, DUSUN DUKU, DESA SUNGAIRUJING SANGKAPURA , Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		818.000.000			
293	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	RT2, RW 6, DUSUN TAUBAT, DESA SUNGAIRUJING, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		222.056.000			
294	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DUSUN MANINJU, DESA SUWARI SANGKAPURA , Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		623.196.800			
295	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	JALING GUNUNG MALANG PATARSELAMAT SANGKAPURA, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		459.152.000			
296	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	JL. RABAT, GUNTUNG, SIDOGEDUNG BATU SANGKAPURA, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		598.429.880			
297	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	JALIN TELUKEMUR KEPUHTELUK TAMBAK, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		753.920.000			
298	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Randusongo RT 04 RW 07 Desa Kesambenkulon Kecamatan Wringinanom, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		253.445.800			
299	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Kulon RT 02 RW 05 Desa Kesambenkulon Kecamatan Wringinanom, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		550.789.696			
300	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Krajan Utara Desa Kesambenkulon Kecamatan Wringinanom, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		378.722.200			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
301	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RW 004 Dusun Sumberjalin Desa Sumberame Kecamatan Wringinanom, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		1.106.594.400			
302	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	RT 02 RW 03 Dusun Karanggayam Desa Sumberame Kecamatan Wringinanom, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		477.850.000			
303	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	RT 11 Dusun Buku Desa Mondoluku Kecamatan Wringinanom, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		669.378.400			
304	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Lemahputih RT 007 RW 002 Desa Pasinan Lemahputih Kecamatan Wringinanom , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		409.000.000			
305	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Juwet RT 003 RW 004 Desa Wringinanom Kecamatan Wringinanom , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		686.252.800			
306	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Kepuh Desa Kepuhklagen Kecamatan Wringinanom, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		1.049.800.000			
307	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Desa Sumengko Pedukuhan RT 015 RW 006 Kecamatan Wringinanom, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		251.363.200			
308	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Jl.Kebun Juwet RT 001 RW 007 Desa Peganden Kecamatan Manyar, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		382.300.000			
309	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT.008 RW.005 Perum Griya Peganden Asri Desa Peganden Kecamatan Manyar, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		601.240.000			
310	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Kedung RW.003 Desa Leran Kecamatan Manyar, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		127.048.000			
311	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Jl. Mangga V RT.004 RW.002 Desa Manyarejo Kecamatan Manyar, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		236.354.800			
312	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT.005 RW.001 Desa Manyarrejo Kecamatan Manyar, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		151.612.000			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					KAWASAN PERMUKIMAN												
313	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RW.003 Desa Abar Abir Kecamatan Bungah, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		534.490.000			
314	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Jl. Kyai Sahlan 5 RT.005 RW.001 Desa Manyarrejo Kecamatan Manyar, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		507.790.000			
315	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	jl ky sahlan 9 RT.09 RW.01 Desa Manyarsidomukti Kecamatan Manyar, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		140.011.600			
316	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RW 001 Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujungpangkah, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		1.131.759.760			
317	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Tajungrejo RT 002 RW 013 Desa Pangkahwetan Kecamatan Ujungpangkah, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		388.975.000			
318	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Kalingapuri RT 002 RW 009 Desa Pangkahkulon Desa Pangkahkulon, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		296.860.000			
319	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Desa Kesamben wetan RT.08 RW 02 Driyorejo , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		943.000.000			
320	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	RT 01 RW 04 Dusun Dlangu ds Mondoluku Wringinanom , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		264.267.813			
321	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT.11 RW 02 Dsn Patoman Desa Kedunganyar Wringinanom , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		324.094.000			
322	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dsn lemah Putih RT.05 RW.02 Desa Pasinan Lemahputih Wringinanom , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		229.576.000			
323	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT. 16 RW.04 Desa Lebanisuko Wringinanom , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		196.414.600			
324	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Sumengko Utara RT 13 RW 05 Desa Sumengko	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		393.178.000			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Wringinanom , Kab. Gresik			DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									
325	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dsn Sumberploso RT 01 RW 04 Desa Sembung Wringinanom , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		399.388.000			
326	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dsn Juwet Desa Sembung Wringinanom , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		237.719.200			
327	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Glindah Lor RT 002 dan 004 RW 001 Desa Glindah Kecamatan Kedamean, Kab. Gresik	06-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		242.392.000			
328	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Bakung RT 16 RW 05 Desa Belahanrejo Kecamatan Kedamean, Kab. Gresik	06-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		172.228.000			
329	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Turi Desa Turirejo Kecamatan Kedamean, Kab. Gresik	06-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		489.100.000			
330	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Lingsir RT 022 RW 004 Desa Slempit Kecamatan Kedamean, Kab. Gresik	06-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		882.142.000			
331	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Tulung RT 01 RW 01 Desa Tulung Kecamatan Kedamean, Kab. Gresik	06-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		382.940.800			
332	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Kemorogan Desa Pranti Kecamatan Menganti, Kab. Gresik	06-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		825.940.000			
333	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 01 RW 03 Desa Pranti Kecamatan Menganti, Kab. Gresik	06-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		204.685.600			
334	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Glindah Kidul RT 011 RW 003 Desa Glindah Kecamatan Kedamean, Kab. Gresik	06-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		644.310.400			
335	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Lempung Desa Turirejo Kecamatan Kedamean, Kab. Gresik	06-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		1.312.495.960			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
336	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Medeo Desa Cermen Kecamatan Kedamean, Kab. Gresik	06-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		568.991.360			
337	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Katimoho - Talun Desa Katimoho Kecamatan kedamean, Kab. Gresik	07-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		238.745.600			
338	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Gempol RT 009 RW 006 Desa Gempolkurung Kecamatan menganti, Kab. Gresik	07-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		248.800.000			
339	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Doro Rt 002 RW 006 Desa Lampah Kecamatan Kedamean, Kab. Gresik	07-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		518.753.020			
340	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT. 011 RW. 004 DESA BEDANTEN KECAMATAN BUNGAH, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		114.552.400			
341	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT. 24 B RW. 09 GANG H. NUR HAYAT DESA BUNGAH KECAMATAN BUNGAH, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		99.814.000			
342	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT. 24 B RW. 09 GANG H. SYAIFUL ARIF DESA BUNGAH KECAMATAN BUNGAH, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		113.164.000			
343	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	JL. RUKUN SENTOSO DESA GUMENG KECAMATAN BUNGAH, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		124.304.000			
344	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DUSUN PUCUNG RT.09 RW. 05 DESA SIDOMUKTI KECAMATAN BUNGAH, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		435.700.000			
345	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	JL SENTONO DESA SUKOREJO KECAMATAN BUNGAH, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		89.770.000			
346	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DUSUN UJUNG INDAH RT. 001 RW. 001 DESA TAJUNGWIDORO KECAMATAN BUNGAH, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		437.836.000			
347	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT. 12 RW. 04 DESA BEDANTEN KECAMATAN	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		169.501.000			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		BUNGAH, Kab. Gresik			DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									
348	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DUSUN KALI BANJAR RT. 011 RW. 006 DESA MOJOPUROWETAN KECAMATAN BUNGAH, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		753.430.000			
349	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RW. 02 DESA SIDOKUMPUL KECAMATAN BUNGAH, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		195.934.000			
350	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DUSUN TEGALSARI RT. 12 RW. 06 DESA SIDOMUKTI KECAMATAN BUNGAH, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		272.830.000			
351	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	(ANTAR DUSUN) DESA SIDOMUKTI KECAMATAN BUNGAH, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		569.200.000			
352	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Tambak Rejo - Segunting Desa Tambak Beras, Kec. Cerme, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			METER		1.135.240.000			
353	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Duduk Rt 08 Rw 05 Desa Duduksampeyan, Kec. Duduksampeyan, Kab. Gresik Jawa Timur, Indonesia 61162, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			METER		260.914.000			
354	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dsn. Krajan Rt.01 Rw. 01 Desa Tanjung Kedamean , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		542.500.000			
355	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Rt 01 Rw 09 Dsn Gluran Ds. Lampah Kedamean , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		775.324.000			
356	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dsn. Kikbo Rejo Rt 09 Desa Cermen Kedamean , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		1.126.162.000			
357	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	RT 6 RW 2 Dsn Ngepung Ds. Ngepung Kedamean , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		226.115.680			
358	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dsn Menunggal Rt 08 Rw 02 Desa Sidoraharjo	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		88.600.000			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Kedamean , Kab. Gresik			KAWASAN PERMUKIMAN												
359	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 7 RW 3 Desa Katimoho Kedamean , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		442.108.000			
360	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Desa Sidoraharjo RT 04 RW 02 Kedamean , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		219.964.000			
361	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dsn. Lingsir RT 21 RW 4 Ds. Slempit Kedamean , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		376.960.000			
362	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dsn. Gelindah Lor RT 1 RW 1 Ds. Gelindah Kedamean , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		261.531.740			
363	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dsn. Gorekan kidul Rt 3 dan Rt 4 Desa Cermen Kedamean , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		417.170.734			
364	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dsn Plosokerep Rt 32 Desa Menganti Kec. Menganti, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		145.871.500			
365	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 16 RW 01 Desa Laban Kec. Menganti, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		70.711.000			
366	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dsn Gempol Rt 08 Rw 06 Desa Gempolkurung Kec. Menganti, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		288.850.000			
367	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Balongjrambah Ds. Kedamean Kec. Menganti, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		403.660.000			
368	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Rw 2 Desa Hulaan Kec. Menganti, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		127.097.500			
369	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Ds. Drancang RT 011 RW 005 Kec. Menganti , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		154.624.000			
370	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dsn. Pakupari RT 001 RW 001 Desa Mojotengah Kec.	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		232.780.000			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Menganti, Kab. Gresik			DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									
371	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Kepatihan Rt 03 Rw 02 Desa Kepatihan Kec. Menganti, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		125.980.000			
372	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT. 02 RW. VII Kelurahan Singosari Kecamatan Kebomas , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		270.252.400			
373	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 005 / RW 001 dan RT 005 RW 002 Kelurahan Lumpur Kecamatan Gresik, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		298.996.000			
374	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 001 / RW 002 Kelurahan Karangpoh, Jl. KH. Abdul Karim gang II Kecamatan Gresik, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		123.310.000			
375	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RW. 03 Kelurahan Singosari Kecamatan Kebomas, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		1.026.745.600			
376	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT. 002 RW 005 Kelurahan Singosari Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		744.858.400			
377	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 01 RW 01 Dusun Gunungsari Kelurahan Ngargosari Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		309.946.720			
378	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Margonoto RT 04 RW 01 Kelurahan Ngargosari Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		943.106.400			
379	#PBP_Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan (Banjir Perkotaan)	Jalan Poros Selatan RT. 02 RW. 01 (sepanjang 150 meter), Kelurahan Ngargosari Kecamatan Kebomas, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		485.119.480			
380	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Jl. Siti Fatimah Binti Maimun GG. 1 serta di Jl. Perintis Taman 2 dan 7 RT 008 dan 009 RW 007 Desa Randuagung Kecamatan Kebomas, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		677.068.000			
381	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Jl. Sumatra, Setingi, RW 007 Randuagung,	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		316.156.000			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Kecamatan Kebomas, Kab. Gresik			KAWASAN PERMUKIMAN												
382	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT. 03 RW.04 Kelurahan Kebomas Kecamatan Kebomas, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		122.242.000			
383	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT. 02 RW. 04 Kelurahan Kebomas Kecamatan Kebomas , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		229.982.800			
384	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 03 RW 03 RT 02 RW 03 dan RT 03 RW 02 Kelurahan Kebungson, Kecamatan Gresik, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		1.169.178.400			
385	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Jl. Sindujoyo RT 01 RW 01 Kelurahan Sukodono Kecamatan Gresik , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		88.600.000			
386	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Watupasang Desa Kedamean Kec. Kedamean, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		295.339.696			
387	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Wringin Kurung RT 005 RW 004 Desa Gempolkurung Kec. Menganti, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		288.850.000			
388	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 003 RW 003 Dusun Prambon Desa Boboh Kec. Menganti, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		130.750.240			
389	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 002 RW 003 Dusun Prambon Desa Boboh Kec. Menganti, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		213.160.000			
390	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Gempol RT 006 RW 006 Desa Gempolkurung Kec. Menganti, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		248.800.000			
391	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Sidojangkung RT 001 RW 001 Desa Sidojangkung Kec. Menganti, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		400.871.200			
392	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 004 RW 002 Desa Randupadangan Kec. Menganti, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		58.198.000			
393	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Bodin RT 003 RW 007 Desa Sidoraharjo Kec.	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		993.196.000			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Kedamean, Kab. Gresik			DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									
394	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Gantang RT 002 RW 002 Desa Boboh Kec. Menganti, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		171.040.000			
395	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Barat Desa Klotok Kecamatan Balongpanggang, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		200.740.000			
396	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Kricak RT 01 RW 01 Desa Karangankidul Kecamatan Benjeng, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		172.412.500			
397	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Moroto RT 02 RW 01 Desa Balongpanggang Kecamatan Balongpanggang, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		147.340.000			
398	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Jl Dusun Ploso Desa Gluranploso Kecamatan Benjeng, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		200.398.000			
399	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Jl. Lingkungan Dusun Patuk Desa Banjaragung Kecamatan Balongpanggang, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		61.900.000			
400	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Jl. Lingkungan RT 3 Dusun Karangasem Desa Karangsemanding Kecamatan Balongpanggang, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		168.700.000			
401	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Jl. Dusun Kalipang RT 3 Desa Wahas Kecamatan Balongpanggang, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		971.051.260			
402	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Jl. Lingkungan Dusun Pucung RT 01 Desa Pucung Kecamatan Balongpanggang, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		489.618.400			
403	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Jl. Lingkungan Dusun Kedungsekar kidul Desa Kedungsekar Kecamatan Benjeng, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		293.656.000			
404	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DUSUN JUWET RT. 02 RW. 04 DESA WRINGINANOM KECAMATAN WRINGINANOM, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		563.646.400			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
405	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT.09 S/D. RT.10 RW.03 DESA TENARU KECAMATAN DRIYOREJO, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		713.380.000			
406	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT. 02 DUSUN PUTING DESA SEMBUNG KECAMATAN WRINGINANOM, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		546.772.000			
407	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT.04 DUSUN SUMBERPLOSO DESA SEMBUNG KECAMATAN WRINGINANOM, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		386.358.400			
408	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT. 02 RW. 06 DESA BANJARAN KECAMATAN DRIYOREJO, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		328.900.000			
409	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT.01 RW. 02 DESA BANJARAN KECAMATAN DRIYOREJO, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		119.705.500			
410	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DUSUN GUNUNGANYAR RT.004/RW. 001 DESA KEDUNGANYAR KECAMATNA WRINGINANOM, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		969.700.000			
411	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT. 009 RW. 002 DESA KESAMBEN WETAN KECAMATAN DRIYOREJO, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		662.650.000			
412	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DUSUN RANDUSONGO RT. 005 RW. 007 DESA KESAMBEN KULON KECAMATAN WIRINGINANOM, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		342.073.750			
413	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 05 RW 02 Lumpur Gresik , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		308.234.200			
414	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Jl. KH. Zubair Ds. Gapurasukolilo Gresik , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		88.722.400			
415	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 03 RW 04 DAN RT 04 RW 04 KEL. BEDILAN Gresik , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		79.363.120			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
416	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Jalan Lingkar Timur Desa Pegundan Kecamatan Bungah, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		101.416.000			
417	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun kepatihan RT 06 RW 03 Desa kepatihan kec menganti , Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		222.100.000			
418	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	dusun Boboh RT 6 RW 01 desa Boboh kec menganti, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		188.725.000			
419	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	desa Pranti RT 02 RW 04desa pranti kec Menganti, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		744.196.000			
420	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	desa Katimoho RT 8 RW 03 Kec Kedamean Kab Gresik, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		247.732.000			
421	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Desa Randu Padangan RT 15 RW 05 Desa Randu Padangan Kec MEnganti, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		521.140.000			
422	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun pelem watu RW 03 Desa Pelemwatu Kec Menganti , Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		475.750.000			
423	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Songgat RT 05 RW 02 Desa pengalangan Kec Menganti, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		104.620.000			
424	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Bongso Kulon RT 01 RW01 Desa pengalangan Kec Menganti, Kab. Gresik	08-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		207.148.000			
425	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Dukuh RT 11 RW05 Desa pengalangan Kec Menganti , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		192.196.000			
426	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun masangan - Grogol, Desa Masangan Kecamatan Bungah, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		140.264.500			
427	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Desa Pejangganan RT 03 RW 01 Kecamatan Manyar , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		577.744.000			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					KAWASAN PERMUKIMAN												
428	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 8, 9, 10 Desa Gumeno Kecamatan Manyar, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		1.597.603.360			
429	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	RT 001 RW 001 Desa Kemangi Kecamatan Bungah , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		873.580.000			
430	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Jl RA Kartini RT 010 RW 002 Desa Sukorejo , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		212.488.000			
431	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Lawo RT 12 Rw 06 Desa Karangrejo Kecamatan Manyar , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		531.014.460			
432	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 04 - RT 10 Desa Karangrejo Kecamatan Manyar , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		455.500.000			
433	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Drainase RT 03 RW 07 Desa Pongangan Kecamatan Manyar, Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			km		3.727.054.000			
434	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 05 RW 02 Desa Morobakung Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik , Kab. Gresik	09-03-2026		DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	ya	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		1.305.777.280			
435	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	Jalan Poros Desa Arah Dusun Gerabakan - Desa Soko, Desa Dohoagung Kecamatan Balongpanggang, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			METER		-			
436	#PBP_Jembatan Jalan Desa /Jalan Lingkungan	Dusun Balongmojo Krajan RT 01 RW 02 Desa Balongmojo Kecamatan Benjeng, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
437	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Balongmojo Krajan RT 01 RW 02 Desa Balongmojo Kecamatan Benjeng, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			METER		-			
438	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	Desa Ganggang Kecamatan Balongpanggang, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			M		-			
439	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DUSUN KARANGPILANG DESA NGAMPEL KECAMATAN			-		Tidak		-			M		-			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		BALONGPANGGANG, Kab. Gresik															
440	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	DUSUN MOJOROTO - DUSUN SAMBIROTO DESA BALONGPANGGANG KECAMATAN BALONGPANGGANG , Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			M		-			
441	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DUSUN KARANGSEMANDING DESA KARANGSEMANDING KECAMATAN BALONGPANGGANG, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
442	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DUSUN KEDUNGRUKUN RT. 02 DESA KEDUNGPRING KECAMATAN BALONGPANGGANG, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
443	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DUSUN GRIDI DESA PACUH KECAMATAN BALONGPANGGANG, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
444	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DUSUN TENGGOR DESA TENGGOR KECAMATAN BALONGPANGGANG, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
445	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	RT 011 RW 003, Desa Sekargadung, Kecamatan Dukun, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
446	#PBP_Infrastruktur Kesehatan	RW 12 Kel. Singosari , Kab. Gresik			DINAS KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tidak	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-			Paket		-			
447	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Jl. Perum jaya shakti RT 03 RW 02 Desa Gapurosukolilo Kec. Gresik , Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-			Paket		-			
448	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Jl. Perum GKGA RT 04 RW 06 Desa Kedanyang Kec. Kebomas , Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-			Paket		-			
449	#PBP_Infrastruktur Kesehatan	Jl. Mayjend Sungkono RT 05 Rw 02 Desa Prambangan Kec. Kebomas , Kab. Gresik			DINAS KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tidak	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			Paket		-			
450	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 09 RW 07 Desa Randuagung Kec. Kebomas , Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-			Paket		-			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					KAWASAN PERMUKIMAN												
451	#PBP_Infrastruktur Kesehatan	Rt 03 Rw. 06 Kel Sidomoro Kec. Kebomas, Kab. Gresik			DINAS KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tidak	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			Paket		-			
452	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DSN TRATE RT 12 DESA PUNDUTTRATE BENJENG , Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		-			
453	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DUSUN KRICAK RT 04 DESA KARANGAN KIDUL BENJENG , Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
454	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DUSUN PUNDUT RT 05 DESA DESA MUNGGUGIANTI BENJENG , Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		-			
455	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DUSUN PUNDUT RT 02 DESA MUNGGUGIANTI KEC. BENJENG , Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
456	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DSN DRIYOREJO RT 05 RW 02 DS DRIYOREJO KEC DRIYOREJO, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M2		-			
457	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DS MOJOSARIREJO RW 04 KEC DRIYOREJO, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M2		-			
458	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DSN. KARANGGAYAM RT 02 RW 03 DS. SUMBERAME KEC. WRINGINANOM, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M2		-			
459	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DSN SUMPUT ASRI DS SUMPUT KEC DRIYOREJO, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M2		-			
460	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DS. BANJARAN RT 03 RW 02 KEC. DRIYOREJO, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M2		-			
461	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DSN DRIYOREJO RT 05 RW 02 DS DRIYOREJO KEC DRIYOREJO, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
462	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	DS. MOJOSARIREJO KEC DRIYOREJO, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			Paket		-			
463	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	DSN. BURENG DS. SUMBERWARU KEC. WRINGIN ANOM, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			METER		-			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
464	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 08 RW 02 Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kebomas, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
465	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Jl. Sunan Giri 13-G RT 02 RW Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kebomas, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
466	#PBP_Infrastruktur Kesehatan	KEBUNGSON RT 03 RW 02 GRESIK , Kab. Gresik			DINAS KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tidak	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			Paket		-			
467	#PBP_Infrastruktur Kesehatan	KELURAHAN PEKAUMAN KEC. GRESIK , Kab. Gresik			DINAS KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tidak	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			Paket		-			
468	#PBP_Infrastruktur Kesehatan	JL .KH. FAKIH USMAN DESA KEMUTERAN, Kab. Gresik			DINAS KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tidak	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			Paket		-			
469	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RW. 02 DESA HULAAN KECAMATAN MENGANTI, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
470	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	RT. 09 RW. 03 DESA KATIMOHO KECAMATAN KEDAMEAN, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
471	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Kelurahan Ngargosari Kecamatan Kebomas , Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
472	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 05 RW 02 Desa Segoromadu Kecamatan Kebomas, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
473	#PBP_Infrastruktur Kesehatan	RT. 007 RW. 002 KELURAHAN KARANGPOH KECAMATAN GRESIK, Kab. Gresik			DINAS KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tidak	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			M2		-			
474	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Kelbung, Desa Gunungteguh, Kecamatan Sangkapura, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
475	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Suwari Barat, Desa Suwari, Kecamatan			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Sangkapura, Kab. Gresik			DAN KAWASAN PERMUKIMAN			Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									
476	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DSN PELEMWATU RW 04 DESA PELEMWATU MENGANTI, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		-			
477	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Rt 01 Rw 02 Dsn Gantang Desa Boboh Kec MENGANTI, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
478	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Rt 02 Rw 01 Dsn Kepatihan Desa Kepatihan Menganti, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
479	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DS SAWO RT 16 RW 08 KEC DUKUN, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
480	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DS SUKODONO RT 02 KEC PANCENG, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
481	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DS PRUPUH RT 02 RW 01 KEC PANCENG, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
482	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DSN BRAYO RT 02 RW 02 DS JREBENG KEC DUKUN, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
483	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DSN SIDOBANGUN RT 03 RW 04 DS MENTARAS KEC DUKUN, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
484	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	DESA GEDONGKEDOAN KEC DUKUN, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			Paket		-			
485	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	DESA TEBUWUNG - DESA TIREM ENGGAL KEC DUKUN, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			Paket		-			
486	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RW.01 DESA PANTENAN KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M2		-			
487	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DESA PANTENAN KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M2		-			
488	#PBP_Infrastruktur Kesehatan	JL. SOEKARNO HATTA NO.26 DESA DOUDO KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M2		-			
489	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	JALAN KRAJAN BARAT DESA SEKARGADUNG KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M2		-			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
490	#PBP_Infrastruktur Kesehatan	DESA PRUPUH KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M2		-			
491	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT.016 RW.006 DESA SIWALAN KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M2		-			
492	#PBP_Infrastruktur Kesehatan	DESA SUROWITI KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M2		-			
493	#PBP_Infrastruktur Kesehatan	DESA WOTAN KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M2		-			
494	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	DESA BABAKSARI KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			M2		-			
495	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	DESA KETANEN KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			M2		-			
496	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	DESA KALIREJO KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			M2		-			
497	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	DESA SAMBOGUNUNG KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			M2		-			
498	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	DESA DELEGAN KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M2		-			
499	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	DESA KETANEN KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M2		-			
500	#PBP_Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan (Banjir Perkotaan)	Jl. Kalimantan Desa Yosowilangun Kec. Manyar, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-			M		-			
501	#PBP_Infrastruktur Kesehatan	RW 005 Desa Yosowilangun Kec. Manyar, Kab. Gresik			DINAS KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tidak	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			Paket		-			
502	#PBP_Infrastruktur Kesehatan	RW 004 Desa Suci Kec. Manyar, Kab. Gresik			DINAS KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tidak	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			Paket		-			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
503	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	Desa Pejanggangan Kec. Manyar, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			M		-			
504	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	Jalan Kng Brotonegoro Desa Yosowilangun Kec. Manyar, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			M		-			
505	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	Desa Pongangan Kec. Manyar, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			M		-			
506	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RW 001 Desa Suci Kec. Manyar, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-			M		-			
507	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Gang Gambus RT 003 RW 004 Desa Suci, Kec. Manyar, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-			M		-			
508	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 006 RW 001 Desa Suci Kec. Manyar, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-			M		-			
509	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Gang Gambus RT 003 RW 004 Desa Suci Kec. Manyar, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-			M		-			
510	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	Desa Gosari - Kebonagung Desa Gosari Kec. Ujungpangkah, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			M		-			
511	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	Racikulon - Purwodadi Desa Racikulon Kec. Sidayu, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			M		-			
512	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	Desa Racitengah - Purwodadi Desa Racitengah Kec. Sidayu, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			M		-			
513	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	Desa Purwodadi - Racitengah Desa Purwodadi Kec. Sidayu, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			M		-			
514	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	Golokan - Kertosono Desa Golokan Kec. Sidayu, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			M		-			
515	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	CERME LOR KE CERME KIDUL, RT. 02 RW. 02 DESA CERME LOR KECAMATAN CERME, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			M		-			
516	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	DESA BETITING KECAMATAN CERME, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			M		-			
517	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	DESA KRAMAT KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			M		-			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
518	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	WADAK KIDUL - PETIS BENEM, DESA WADAK KIDUL KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			M		-			
519	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	DESA PANJUNAN KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			M		-			
520	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DUSUN PANDANAN RT. 03 RW. 01 Desa Pandanan Kecamatan Duduksampeyan, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
521	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	DESA TEBALOAN KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			M		-			
522	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	Sumengko - Tambak Menjangan, DESA SUMENGKO KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			M		-			
523	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	DESA GLANGGANG KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			M		-			
524	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DUSUN MOROWUDI WETAN DESA MOROWUDI KECAMATAN CERME, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
525	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	DESA PETISBENEM KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			M		-			
526	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			M		-			
527	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	Desa Kertosono-Golokan, Desa Kertosono, Kecamatan Sidayu, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			M		-			
528	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dsn Bunut RT 2 RW 6 RANDEGANSARI DRIYOREJO , Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
529	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Rw 2 Desa Galnggangan Kec. Duduksampean, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
530	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Gancung Desa Pandanan Kec. Duduksampean, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
531	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DSN KEDUNGPRING RT 02 DS KEDUNGPRING KEC			-		Tidak		-			M		-			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		BALONGPANGGANG, Kab. Gresik															
532	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	dsn kedungjati DS BABATAN KEC BALONGPANGGANG, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
533	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DSN TANAH GANG DS TANAHLANDEAN KEC BALONGPANGGANG, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
534	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	DSN JATI - DSN MOJOPURO DS BABATAN KEC BALONGPANGGANG, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			Paket		-			
535	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	DS BRANGKAL KEC BALONGPANGGANG, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			M		-			
536	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DS BULANGKULON RT 002 RW 004 KEC BENJENG, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-			M		-			
537	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	DS TANAHLANDEHAN KEC BALONGPANGANG, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			METER		-			
538	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	DS BULANGKULON KEC BENJENG, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
539	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 001 RW 007 Desa Cerme Kidul Kec. Cerme, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
540	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	Desa Padeg Kec. Cerme, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			M		-			
541	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	Desa Sumengko, Kec. Duduksampeyan, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			M		-			
542	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dsn Sumbersuci RT 02 RW 016 Desa Pangkahwetan Kec. Ujungpangkah, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
543	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	Jalan Raya Tenaru Kecamatan Driyorejo, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			M		-			
544	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT. 01 RW. 01 DESA SEKARGADUNG KECAMATAN DUKUN, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
545	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Mojokopek RT 02 RW 01 Desa Mulung Kecamatan			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Driyorejo, Kab. Gresik			KAWASAN PERMUKIMAN												
546	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Mulung RT 08 RW 04 Desa Mulung Kec. Driyorejo , Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
547	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Mojokepek RT 01 RW 01 Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik , Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
548	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	RT 01 RW 06 Desa Randegansari Kecamatan Driyorejo , Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			M		-			
549	#PBP_Infrastruktur Kesehatan	Desa Tenaru Kecamatan Driyorejo, Kab. Gresik			DINAS KESEHATAN		Tidak		-			Paket		-			
550	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	jl rukun sentosa DS GUMENG KEC BUNGAH, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
551	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DS SUKOWATI RT 04 KEC BUNGAH, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-			M		-			
552	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DS NGAMPEL KEC MANYAR, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
553	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DS BUNGAH RT 05 RW 02, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-			M2		-			
554	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	DS INDRODELIK KEC BUNGAH, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			Paket		-			
555	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	DS masangan - DS sukowati KEC BUNGAH, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			METER		-			
556	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	DS MOROBAKUNG KEC MANYAR, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			Paket		-			
557	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	DS BANYUWANGI KEC MANYAR, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			Paket		-			
558	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	DS PEGANDEN KEC MANYAR, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			Paket		-			
559	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 1/ RW 1, DUSUN LEBAK, DESA LEBAK , Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
560	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	JPD DUSUN SUWARI TIMUR DUSUN MANINJU DESA			DINAS PEKERJAAN		Tidak		-			Paket		-			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		SUWARI SANGKAPURA , Kab. Gresik			UMUM DAN TATA RUANG												
561	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	JPD MANINJU DESA SUWARI KECAMATAN SANGKAPURA, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			Paket		-			
562	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	JPD DUSUN GREJEG SELATAN DESA GREJEG KECAMATAN TAMBAK , Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			Paket		-			
563	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	JALAN DESA LANGKAP KEPUHTELUK TAMBAK, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
564	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	JALING PANYALPANGAN KEPUHLEGUNDI TAMBAK, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
565	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	JALING PINANG TANAM PEKALONGAN TAMBAK, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
566	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	JALAN PEMUKIMAN SUKALELA DESA SUKALELA TAMBAK, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
567	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	JALING DUSUN TAMBILUNG, DESA SUKAONENG TAMBAK , Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
568	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	JPD DUSUN NANGGER, DESA SUKAONENG KECAMATAN TAMBAK, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
569	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	JPD DUSUN PASIRPANJANG DESA SUKAONENG KECAMATAN TAMBAK , Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
570	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	JALIN DUSUN TAMBAK GUNUNG, DESA TAMBAK , Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
571	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	JALING DUSUN PEGARANGAN, DESA TANJUNGORI TAMBAK , Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
572	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	JALING DUSUN TANJUNGORI, DESA TANJUNGORI TAMBAK, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
573	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	JPD DUSUN SUMARNA, DESA TANJUNGORI TAMBAK , Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
574	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DUSUN TIMURSUNGAI, DESA TANJUNGORI KECAMATAN TAMBAK , Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
575	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	JALING DUSUN PINANG GUNUNG, DESA TELUKJATIDAWANG , Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
576	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DUSUN TELUK KELOMPANG, DESA TELUKJATIDAWANG , Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
577	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DUSUN SUMBER LANAS, DESA TELUKJATIDAWANG TAMBAK , Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
578	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	DUSUN GREJEG UTARA DESA GREJEG TAMBAK , Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
579	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DUSUN GUNUNG BARAT DESA PEKALONGAN KECAMATAN TAMBAK , Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
580	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	DUSUN PEKALONGAN, DESA PEKALONGAN TAMBAK , Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
581	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DUSUN PAGERUNG, DESA SUKALELA TAMBAK , Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
582	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DUSUN BHINTENG, DESA SUKALELA TAMBAK , Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
583	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DUSUN SUNGAITERUS DEJE, DESA BALIKTERUS SANGKAPURA , Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
584	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DUSUN BALIKBAKHILIR, DESA BALIKTERUS SANGKAPURA , Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
585	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DUSUN DAUN TIMUR DESA DAUN KECAMATAN SANGKAPURA , Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
586	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DUSUN DAUN LAUT DESA DAUN KECAMATAN SANGKAPURA , Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
587	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DUSUN KELBUNG, DESA GUNUNGTEGUH SANGKAPURA , Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
588	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	JALING DUSUN KELBUNG, DESA GUNUNGTEGUH SANGKAPURA , Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
589	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DUSUN GUNUNGMENUR, DESA GUNUNGTEGUH SANGKAPURA , Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
590	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	JALING DUSUN BARATSAWAH, DESA GUNUNGTEGUH SANGKAPURA, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
591	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DUSUB PADEK, DESA LEBAK SANGKAPURA , Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
592	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DUSUN LAOKSAWAH, DESA PUDAKITBARAT SANGKAPURA , Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
593	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	DUSUN SUMBERREJO, DESA PUDAKITTIMUR SANGKAPURA , Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
594	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DUSUN DUKU, DESA SUNGAIRUJING SANGKAPURA , Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
595	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	DUSUN DUKU, DESA SUNGAIRUJING SANGKAPURA, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
596	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DSN. SUNGAITIRTA RT. 002 RW. 001 DESA SUNGAIRUJING KEC. SANGKAPURA , Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
597	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	DSN. SUNGAITIRTA RT. 002 RW. 001 DESA SUNGAIRUJING KEC. SANGKAPURA , Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
598	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DUSUN SUWARI TIMUR, DESA SUWARI SANGKAPURA , Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
599	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	Jalan Poros Desa Sumbergede - Betro Desa Sumbergede Kecamatan Wringinanom, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			M		-			
600	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	Jalan Poros Desa Watestanjung - Sumengko Desa Watestanjung Kecamatan Wringinanom, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			M		-			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
601	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	Jalan Poros Desa Watestanjung - Lebanisuko Desa Watestanjung Kecamatan Wringinanom, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			M		-			
602	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Randusongo RT 02 RW 07 Desa Kesambenkulon Kecamatan Wringinanom, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
603	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Krajan Kidul Rt 03 RW 01 Desa Kesambenkulon Kecamatan Wringinanom, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
604	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Kluwung Desa Kesambenkulon Kecamatan Wringinanom, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
605	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	Jalan Poros Desa Klagen - Sumberwaru Desa Kepuhklagen Kecamatan Wringinanom, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			M		-			
606	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT.16 RW.04 Desa Peganden Kecamatan Manyar, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-			M		-			
607	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	Dusun Banyutami Desa Banyuwangi Kecamatan Manyar, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
608	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	Jl. Airlangga Desa Abar - Abir Kecamatan Bungah, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			M		-			
609	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	jl ky sahlan 12 RT.09 RW.01 manyarsidomukti Kecamatan Manyar, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M2		-			
610	#PBP_Infrastruktur Kesehatan	Dsn. Bunut Ds Randegansari Kec .Wringinanom , Kab. Gresik			DINAS KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tidak	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-			Paket		-			
611	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dsn Tlanak RT 01 Desa Sembung Wringinanom , Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		-			
612	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Lundo RT 05 RW 02 Desa Belahanrejo , Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
613	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Bunton Desa Turirejo Kecamatan Kedamean, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
614	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	Desa Putatlor Kecamatan Menganti, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
615	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Sepat RT 01 RW 01 Desa Belahanrejo Kecamatan Kedamean, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
616	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Kasiyan Desa Lampah Kecamatan Kedamean, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M2		-			
617	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Slempit RT 011 RW 003 Desa Slempit Kecamatan Kedamean, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
618	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Pojok Desa Turirejo Kecamatan Kedamean, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
619	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Lingsir RT 019 RW 004 Desa Slempit Kecamatan Kedamean, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
620	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Glindah Tengah RT 006 RW 002 Desa Glindah Kecamatan Kedamean, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
621	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Belahanrejo RT 12 RW 04 Desa Belahanrejo Kecamatan KeEdamean, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
622	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Tulung RT 008 RW 004 Desa Tulung Kecamatan Kedamean, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
623	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Kecipik Desa Boteng Kecamatan Menganti, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
624	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Tulung RT 01 RW 01 Desa Tulung Kecamatan Kedamean , Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
625	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 03 RW 07 Desa Pranti Kecamatan Menganti, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
626	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 014 RW 005 Desa Sidojangkung Kecamatan Menganti, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
627	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Karang Mangu RT 016 RW 005 Desa Glindah Kecamatan			-		Tidak		-			M		-			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Kedamean, Kab. Gresik															
628	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Balong Tambak RT 019 RW 006 Desa Glindah Kecamatan kedamean, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
629	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Rt 06 RW 05 Desa Pranti Kecamatan Menganti, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
630	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Glintung RW 05 Desa Kepatihan Kecamatan Menganti, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
631	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Masek RT 031 RW 003 Desa Boteng Kecamatan Menganti, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
632	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Glundung RT 004 RW 002 Desa Pranti Kecamatan Menganti, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
633	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Tegal Sari RT 013 dan 014 RW 004 Desa Glindah Kecamatan Kedamean, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
634	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	RT 001 RW 001 Desa Randupadangan Kecamatan Menganti, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
635	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Ngasinan RT 004 RW 007 Desa Kepatihan Kecamatan Menganti, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
636	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Rt 008 RW 003 Desa Randupadangan Kecamatan Menganti, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
637	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 011 RW 005 Desa Laban Kecamatan Menganti, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
638	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Beton RT 01 RW 01 Desa Beton Kecamatan Menganti, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
639	#PBP_Infrastruktur Kesehatan	Dusun Boteng Desa Boteng Kecamatan Menganti, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M2		-			
640	#PBP_Infrastruktur Kesehatan	Dusun Kecipik Desa B0teng Kecamatan Menganti, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M2		-			
641	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Gorekan Lor Desa Cermen Kecamatan Kedamean, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
642	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Biyodo RT 012 RW 004 Desa Beton Kecamatan Menganti, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
643	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Biyodo RT 014 RW 004 Desa Beton Kecamatan Menganti, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
644	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Beton Rt 002 RW 001 Desa Beton Kecamatan Menganti, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
645	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Rayung Desa turirejo Kecamatan Kedamean, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
646	#PBP_Infrastruktur Kesehatan	Dusun Glindah lor Desa Glindah kecamatan kedamean, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Unit		-			
647	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Turi DesaTururejo Kecamatan Kedamean, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
648	#PBP_Infrastruktur Kesehatan	Dusun Glindah kidul Desa Glindah kecamatan Kedamean, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Unit		-			
649	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Balongsri desa Lampah Kecamatan Kedamean, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
650	#PBP_Infrastruktur Kesehatan	Dusun Balong Tambak Desa Glindah Kecamatan Kedamean, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Unit		-			
651	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Balong Dinding Desa Sidowungu Kecamatan Menganti, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
652	#PBP_Jembatan Jalan Desa /Jalan Lingkungan	Desa Hulaan Kecamatan Menganti, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
653	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 027 RW 005 Dusun kecipik Desa Boteng Kecamatan Menganti, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
654	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Rt 002 RW 001 Dusun Kecipik Desa Boteng kecamatan Menganti, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
655	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Kecipik Desa Boteng, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
656	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Kecipik RT 002 RW 001 Desa Boteng Kecmatan			-		Tidak		-			Paket		-			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Menganti, Kab. Gresik															
657	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 003 RW 001 Dusun Kecipik Desa Boteng Kecamatan Menganti, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
658	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 6 RW 2 Desa Domas Kecamatan Menganti, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
659	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 10 RW 3 Desa Domas Kecamatan Menganti, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
660	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Lampah Desa Lampah Kecamatan Kedamean, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
661	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Kendayaan Desa Lampah Kecamatan Kedamean, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
662	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Rt 7 RW 2 Drsa Domas Kecamatan Menganti, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
663	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RW 06 Desa Sidowungu Kecamatan Menganti, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
664	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 12 Rw 4 Desa Domas Kecamatan Menganti, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
665	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Pelemwatu RT 003 RW 002 Desa Pelemwatu Kecamatan Menganti, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
666	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	RT 017 RW 006 Desa Randupadangan Kecamatan Menganti, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
667	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	Desa Mojotengah Kecamatan Menganti, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
668	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	Desa Pranti Kecamatan Menganti, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
669	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	Dusun Kembangan Desa Turirejo Kecamatan Kedamean, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
670	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 05 RW 01 Dusun Boboh Desa Boboh Kecamatan Menganti, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
671	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 04 RW 02 Dusun Gantang Desa Boboh Kecamatan Menganti, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
672	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 02 RW 02 Dusun Gantang Desa Boboh Kecamatan Menganti, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
673	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Rt 03 RW 01 Desa Katimoho Kecamatan Kedamean, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
674	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Kutil RT 005 RW 001, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
675	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Wringin Kurung Rt 002RW 004 Desa Gempolkurung Kecamatan Menganti, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
676	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Gempol RT 005 RW 002 Desa Gempolkurung Kecamatan Menganti, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
677	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Medeo RT 10 Desa Cermen Kecamatan Kedamean, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
678	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Cermen Desa Cermen Kecamatan Kedamean, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
679	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DUSUN MENUNGGAL RT 2 RW 1 DESA MENUNGGAL KECAMATAN KEDAMEAN, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
680	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DUSUN MENUnGGAL RT 12 RW 3 DESA MENUNGGAL KECAMATAN KEDAMEAN, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		-			
681	#PBP_Jembatan Jalan Desa /Jalan Lingkungan	DUSUN MENUnGGAL RT 15 RW 4 DESA MENUNGGAL KECAMATAN KEDAMEAN , Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
682	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 07 DESA DOMAS KECAMATAN MENGANTI, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
683	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 13 RW 07 DESA SETRO KECAMATAN MENGANTI, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
684	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	RT 13 MENUJU RT 12 GANG MANGGA DESA SETRO KECAMATAN MENGANTI, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
685	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DUSUN MENGANTI RT 02 RW 01 DESA MENGANTI KECAMATAN MENGANTI, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
686	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DUSUN DORO DESA LAMPAH KECAMATAN KEDAMEAN, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
687	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	RT 04 RW 01 DESA LAMPAH KECAMATAN KEDAMEAN, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
688	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 01 RW 01 DESA DOMAS KECAMATAN MENGANTI, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
689	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DUSUN LINGSIR RT 24 RW 04 DESA SLEMPIT KECAMATAN KEDAMEAN, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
690	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DUSUN GEMPOL RT 08 RW 06 DESA GEMPOLKURUNG KECAMATAN MENGANTI, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
691	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	RW 04 DUSUN GLINTUNG DESA KEPATIHAN KECAMATAN MENGANTI, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
692	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DUSUN GEMPOL RT 06 RW 06 DESA GEMPOLKURUNG KECAMATAN MENGANTI, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
693	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 12 RW 06 DESA SETRO KECAMATAN MENGANTI, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
694	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	RT 06 RW 02 DESA KATIMOHO KECAMATAN KEDAMEAN, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
695	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 04 RW 02 DESA BOBOH KECAMATAN MENGANTI, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
696	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	DESA MOJOTENGAH KECAMATAN MENGANTI, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			M2		-			
697	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 06 RW 02 DESA PUTATLOR KECAMATAN MENGANTI, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
698	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DUSUN SLEMPIT RT 16 RW 03 DESA SLEMPIT			-		Tidak		-			M		-			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		KECAMATAN KEDAMEAN, Kab. Gresik															
699	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 03 RW 03 DESA GADINGWATU KECAMATAN MENGANTI, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
700	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 05 RW 04 DESA GADINGWATU KECAMATAN MENGANTI, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
701	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DUSUN LINGSIR RT 21 RW 4 DESA SLEMPIT KECAMATAN KEDAMEAN, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
702	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DUSUN SLEMPIT RT 08 RW 02 DESA SLEMPIT KECAMATAN KEDAMEAN, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
703	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 13 RW 07 GANG ANGGUR DESA SETRO KECAMATAN MENGANTI, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
704	#PBP_Infrastruktur Kesehatan	DESA KEPATIHAN KECAMATAN MENGANTI, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
705	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 06 RW 02 DESA PUTATLOR KECAMATAN MENGANTI.,, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
706	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RW 04 DUSUN GLINTUNG DESA KEPATIHAN KECAMATAN MENGANTI, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
707	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	DUSUN BALONG DINDING DESA SIDOWUNGU KECAMATAN MENGANTI, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
708	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	DESA OUTATLOR KECAMATAN MENGANTI, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
709	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	DUSUN BANDUT DESA DRANCANG KECAMATAN MENGANTI, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
710	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DESA HENDROSARI KECAMATAN MENGANTI, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
711	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DUSUN MENGANTI RT 02 RW 01 DESA MENGANTI KECAMATAN MENGANTI, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
712	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 07 DESA PUTAT LOR KECAMATAN MENGANTI, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
713	#PBP_Infrastruktur Kesehatan	DESA SIDOWUNGU KECAMATAN MENGANTI, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
714	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	DUSUN BALONG DINDING DESA SIDOWUNGU KECAMATAN MENGANTI, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
715	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DUSUN MENGANTI RT 05 RW 02 DESA MENGANTI KECAMATAN MENGANTI, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
716	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DUSUN NGEMPLAK WONOAYU CEPER RT 06 RW 02 DESA MOJOTENGAH KECAMATAN MENGANTI, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
717	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 14 RW 07 DESA SETRO KECAMATAN MENGANTI , Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
718	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	DESA ABAR-ABIR KECAMATAN BUNGAH, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			M		-			
719	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	JL. AHMAD YANI RT. 04 RW. 06 DESA SUNGONLEGOWO KECAMATAN BUNGAH, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
720	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	DUSUN UJUNGSAWO DESA KRAMAT KECAMATAN BUNGAH, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
721	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Rt 01 Rw 01 Desa Pelemwatu kec. Menganti, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-			M		-			
722	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Rt 07 Rw 03 Desa Katimoho Kec. kedamean, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-			Paket		-			
723	#PBP_Infrastruktur Kesehatan	JL/ Kapten Dulasim RT. 003 RW 0-05 Kelurahan Singosari Kecamatan Kebomas , Kab. Gresik			DINAS KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tidak	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-			M		-			
724	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Wilayah Bagian Barat RT. 02 RW. 01, Kelurahan Ngargosari,			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Kecamatan Kebomas , Kab. Gresik			KAWASAN PERMUKIMAN												
725	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	Desa Domas Kec. Menganti, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			M		-			
726	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	Poros Desa Sidojangkung - Menganti, Desa Sidojangkung Kec. Menganti, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			M		-			
727	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Watupasang RT 012 RW 005 Desa Kedamean Kec. Kedamean, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
728	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	RT 003 RW 002 Dusun Kepatihan Desa Kepatihan Kec. Menganti, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
729	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Pelemwatu RW 002 Desa Pelemwatu Kec. Menganti, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
730	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 002 RW 001 Desa Putatlor Kec. Menganti, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
731	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	jl. Lingkungan Dusun Kampung RT 003 RW 01 Desa Pucung Kecamatan Balongpanggang, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
732	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Pucung RT 01 RW 01 Desa Pucung Kecamatan Balongpanggang, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
733	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Jl Dusun Pucung - Kedungploso Desa Pucung Kecamatan Balongpanggang, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
734	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	Jl. Poros Desa Dusun Kedungploso Desa Sedapurklagen Kecamatan Benjeng, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			M		-			
735	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Jl. Dusun Kedungpring RT 01 Desa Kedungpring Kecamatan Balongpanggang, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
736	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	RT 005 / RW 001 dan RT 005 RW 002 Kelurahan Lumpur Kecamatan Gresik, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
737	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 001 / RW 002 Kelurahan Karangpoh, Jl. KH. Abdul Karim gang II Kecamatan Gresik, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
738	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT. 016 RW. 004 DESA PASINAN LEMAHPUTIH KECAMATAN WRINGINANOM, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
739	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	JALAN POROS DESA, DUSUN LEMAHPUTIH RT. 002 RW. 001 DESA PASINAN LEMAHPUTIH KECAMATAN WRINGINANOM, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			M		-			
740	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DUSUN SUMBERWARU DESA SUMBERWARU KECAMATAN WRINGINANOM, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
741	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	JALAN POROS DESA DUSUN SIDOMUKTI RT. 01 RW. 05 DESA SUMBERAME KECAMATAN WRINGINANOM, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			M		-			
742	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	JL. POROS DESA DI DUSUN JUBEL RT.21/RW.07 DESA KEDUNGANYAR KECAMATAN WRINGINANOM, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			M		-			
743	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RW.2- Indro KEBOMAS , Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
744	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Jl. KH. Abd. Karim (Toko Gajah) Kel. Karangpoh GRESIK , Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
745	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Kel. Karangpoh GRESIK , Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
746	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	jl. Hasyim Asy'ari Jl. Samanhudi GRESIK KEL KARANGPOH , Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		-			
747	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RW 07 Kedanyang Kebomas , Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					KAWASAN PERMUKIMAN												
748	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	RT 02 rw 01 Kel. Pekauman Gresik , Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-			Paket		-			
749	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Kelurahan Bedilan Gresik , Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
750	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Kali Anyar Jl. Masjid Baiturrohim RT. 03 RW 02 Desa Betoyokauman Kecamatan Manyar , Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
751	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	DSN PENGALANGAN RT 07 RW 04 KEC MENGANTI, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
752	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	jalan Bongso Wetan - Setro Desa pengalangan Kec Menganti, Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			Paket		-			
753	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	jalan Sumur Geger - Bongso Wetan Desa pengalangan Kec Menganti , Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			Paket		-			
754	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	Dusun bongso kulon desa pengalangan kec menganti, Kab. Gresik			-		Tidak		-			Paket		-			
755	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Glindah Tengah RT 05 RW 02 Desa Glindah Kec Kedamean, Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
756	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	dusun miru RT 08 RW 04 Desa Banyu Urip kec kedamean , Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
757	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Slempit RT 09 RW 02 Desa Slempit RT 09 RW 02 Kec kedamean , Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
758	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	dusun Bongso wetan RT 13 RW 06 desa pengalangan Kec Menganti , Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
759	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	dusun Bongso wetan RT 16 RW 07 desa pengalangan Kec Menganti , Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
760	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Mojo Tengah RT 011 Rw 05 Desa mojotengah Kec Menganti , Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			Paket		-			

NO	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	LOKASI POKIR	TANGGAL PENGUSULAN POKIR	TANGGAL PELAKSAAN MUSRENBANG	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	PROGRAM PRIORITAS (ya/tidak)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SUB KEGIATAN	PAGU SUB KEGIATAN	REVIU APIP		
															SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
761	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	dusun Drancang desa Drancang Keb drancang , Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
762	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	RT 01 RW 01 Desa Gumeno Kecamatan Manyar , Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			M		-			
763	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	RT 15 RW 07 Desa Gumeno Kecamatan Manyar , Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
764	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	Desa RT 01 RW 01 Desa Gumeno Kecamatan Manyar , Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			M		-			
765	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	Jalan Poros Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah , Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
766	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Jl. Sidorukun Desa Gumeng Kecamatan Bungah, Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
767	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Dusun Kiring Desa Sidomukti Kecamatan Bungah , Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
768	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Jl Rukun Sentosa Desa Gumeng Kecamatan Bungah , Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
769	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	Jl Gunung Pendil RT 006 RW 001 Desa Sukorejo Kecamatan Bungah , Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			
770	#PBP_Infrastruktur Saluran/Plengsengan Jalan Lingkungan/Jalan Desa	Dusun Lawo RT 011 Desa Karangrejo Kecamatan Manyar , Kab. Gresik			-		Tidak		-			M		-			
771	#PBP_Infrastruktur Jalan/Saluran/Plengsengan Jalan Poros Desa	Jalan Poros Desa (Pongangan - Peganden) Desa Pongangan Kecamatan Manyar , Kab. Gresik			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		Tidak		-			M		-			
772	#PBP_Infrastruktur Jalan Desa /Jalan Lingkungan Cor Beton	RT 01 Desa Ngampel Kecamatan Manyar , Kab. Gresik			DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Tidak	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh			M		-			

Sumber : Bappeda Kabupaten Gresik, 2026

BAB 5
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Pelaksanaan pembangunan tahun 2027 terlepas dari kerangka pendanaan yang diproyeksikan sebagaimana tertuang dalam Bab III. Pendapatan Daerah diproyeksikan akan mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh penerapan Undang-undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada tahun 2027, maka dialokasikan anggaran Belanja Daerah yang digunakan untuk mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik untuk tahun 2027.

5.2 Rencana Program, Kegiatan Perangkat Daerah dan Prakiraan Maju 2027

RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2027 merupakan dokumen rencana tahunan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. rencana program. kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan menengah daerah. Arah Kebijakan dalam RPJPD. isu strategis yang berkembang. aspirasi masyarakat serta Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi Rencana Kerja Tahunan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi. dunia usaha. komunitas. pemerintahan. dan masyarakat. Berikut Pagu Indikatif Perangkat Daerah dalam RKPD.

Tabel 5.1 Rekapitulasi Anggaran Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2027

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF
1	Dinas Pendidikan	986.606.637.600,00
2	Dinas Kesehatan	788.264.974.959,00

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	363.691.377.752,00
4	Dinas Cipta Karya Perumahan Dan Kawasan Permukiman	271.548.938.674,00
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	27.415.094.774,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	12.726.051.091,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.370.482.571,00
8	Dinas Sosial	17.358.228.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja	12.879.029.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	48.829.254.171,00
11	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	12.322.007.748,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	24.164.963.656,00
13	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	24.963.476.100,00
14	Dinas Perhubungan	71.490.470.515,00
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	20.950.812.659,00
16	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian Dan Perdagangan	16.443.696.164,00
17	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.594.345.567,00
18	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	8.296.168.000,00
19	Dinas Perikanan	9.153.697.952,00
20	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kebudayaan Kepemudaan Dan Olah Raga	34.262.000.000,00
21	Dinas Pertanian	24.749.909.540,00
22	Sekretariat Daerah	106.257.284.481,00
23	Sekretariat Dewan	104.432.396.374,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	17.062.701.459,00
25	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	733.058.815.453,00
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16.972.767.904,00
27	Inspektorat	27.831.267.005,00
28	Kecamatan Gresik	24.820.208.883,00
29	Kecamatan Kebomas	18.906.085.140,00

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF
30	Kecamatan Manyar	4.514.920.305,00
31	Kecamatan Cerme	4.249.673.521,00
32	Kecamatan Benjeng	4.932.955.550,00
33	Kecamatan Balongpanggang	4.610.232.701,00
34	Kecamatan Duduksampeyan	4.453.618.462,00
35	Kecamatan Driyorejo	3.872.989.887,00
36	Kecamatan Wringinanom	3.805.213.475,00
37	Kecamatan Kedamean	3.933.249.184,00
38	Kecamatan Menganti	3.942.506.174,00
39	Kecamatan Sidayu	4.985.145.881,00
40	Kecamatan Ujungpangkah	3.895.482.490,00
41	Kecamatan Panceng	4.466.630.134,00
42	Kecamatan Bungah	4.074.811.812,00
43	Kecamatan Dukun	4.620.038.594,00
44	Kecamatan Sangkapura	4.214.507.439,00
45	Kecamatan Tambak	3.510.305.893,00
46	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	54.604.918.001,00

Sumber : Bappeda Kabupaten Gresik, 2026

Pagu Anggaran berdasarkan Perangkat tersebut kemudian dijabarkan kedalam Rencana Program. Kegiatan. Sub Kegiatan. dan Kerangka Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2027 yang sudah dirincikan dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD.RI) sebagaimana terlampir pada lampiran Bab V.

5.3 Program Prioritas Pembangunan Tahun 2027

Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2027 disusun untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD melalui penguatan sumber daya manusia, infrastruktur, perekonomian, tata kelola pemerintahan, lingkungan hidup, dan pemerataan pembangunan. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 5.2 Rekapitulasi Anggaran Program Prioritas Tahun 2027

No	Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi	Program Prioritas Kabupaten	Arah Kebijakan	No	Program Kerja Prioritas	Uraian Program Kerja Prioritas	Program Prioritas Nomenklatur	Urusan	PAGU
1.	PN 7 — Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	PP 7 — Jatim Berkah-Amanah PP 8 — Jatim Harmoni	Gresik Tuntas (Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntable, dan Sustainable)	14. Penyempurnaan pengelolaan SDM aparatur dengan berbasis sistem merit, peningkatan kompetensi, serta pembinaan profesionalisme dan etika pejabat publik 15. Penguatan kapasitas daerah dalam mengelola dan mengintegrasikan data kemiskinan yang terpadu dan berbasis bukti guna merancang kebijakan yang tepat sasaran.	1.	Gresik Integrated Smart System	Sistem satu data terpadu yang mengintegrasi seluruh data pembangunan baik layanan dasar maupun sektoral secara numerik dan spasial serta membentuk big data yang dapat dimanfaatkan dengan lugas, cepat, aman, dan mudahuntuk menunjang seluruh pelayanan publik, demi terciptanya transparansi tata kelola pemerintahan daerah (One Data, One Portal, And Open Access)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Komunikasi dan Informatika	5.858.871.133,00
								Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.000.000.000,00
								Program Kawasan Permukiman	Perumahan dan Kawasan Permukiman	367.870.103.289,00
								Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan	3.170.867.800,00
								Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh Perangkat Daerah	22.074.426.142.433,30
				14. Penyempurnaan pengelolaan SDM aparatur dengan berbasis sistem merit, peningkatan kompetensi, serta pembinaan profesionalisme dan etika pejabat publik	2.	Gresik Rembug Akur	Membangun pemerintahan yang kolaboratif dengan terus bertemu dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi demi Gresik Baru Lebih Maju.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	90.271.830.744,00
								Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kesatuan Bangsa dan Politik	2.344.072.000,00
								Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh Perangkat Daerah	22.074.426.142.433,30

No	Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi	Program Prioritas Kabupaten	Arah Kebijakan	No	Program Kerja Prioritas	Uraian Program Kerja Prioritas	Program Prioritas Nomenklatur	Urusan	PAGU
				16. Penyediaan akses yang adil terhadap bantuan sosial dan layanan dasar, serta pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	3.	Kios Pelayanan Publik (KPP) Tingkat Kecamatan	Program pelayanan publik di tingkat kecamatan meliputi Adminduk, Perizinan UMKM, PIRT, NIB, Pojok OSS.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan	40.613.384.570,00
								Program Pendaftaran Penduduk	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	176.234.800,00
								Program Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	68.779.300,00
								Program Pelayanan Penanaman Modal	Penanaman Modal	120.000.000,00
2.	PN 6 — Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	PP 1 — Jatim Sejahtera PP 2 — Jatim Kerja	Gresik Seger Sejahtera, Bahagia, dan Berdikari	5. Penguatan peran lembaga adat, komunitas budaya, dan organisasi keagamaan dalam menjaga tradisi, mediasi sosial, serta pelestarian nilai-nilai harmoni dan keberagaman.	1.	Gresik Santri	Program santunan kehormatan untuk guru ngaji, marbot dan imam masjid, penjaga makam, situs religi, dan situs budaya	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	90.271.830.744,00
								Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.950.000.000,00
								Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Kebudayaan	488.835.718,00
								Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan	164.128.237.339.870,00
								Program Pemberdayaan Sosial	Sosial	3.666.846.200,00
				16. Penyediaan akses yang adil terhadap bantuan sosial dan layanan dasar, serta pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	2.	Bantuan Operasional Panti Kesejahteraan Sosial	Program bantuan operasional yang berfokus pada panti jompo, napza	Program Pemberdayaan Sosial	Sosial	3.666.846.200,00

No	Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi	Program Prioritas Kabupaten	Arah Kebijakan	No	Program Kerja Prioritas	Uraian Program Kerja Prioritas	Program Prioritas Nomenklatur	Urusan	PAGU
				3. Pemenuhan hak-hak dasar kelompok rentan dan marjinal melalui perluasan akses layanan dasar yang inklusif, penghapusan praktik diskriminatif, serta penguatan sistem perlindungan sosial berbasis komunitas.	3.	Gresik Bunda Puspa	Bantuan untuk Pemberdayaan Perempuan Usaha dan Pendidikan Anak	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.373.905.400,00
				3. Pemenuhan hak-hak dasar kelompok rentan dan marjinal melalui perluasan akses layanan dasar yang inklusif, penghapusan praktik diskriminatif, serta penguatan sistem perlindungan sosial berbasis komunitas.	4.	Bumi Gresik (Peduli Buruh Migran Gresik)	Program kepedulian terhadap buruh migran asli kabupaten gresik	Program Penempatan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	482.875.000,00
								Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Sosial	368.199.000,00
								Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial	4.469.769.000,00
										4.469.769.000,00
								Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	8.472.182.431.900,52
								Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan	164.128.237.339.870,00
								Program Perlindungan Khusus Anak	Pemberdayaana Perempuan dan Perlindungan Anak	1.156.153.250,00
								Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.219.225.858,00
								Program Pendaftaran Penduduk	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	176.234.800,00
								Program Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	68.779.300,00

No	Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi	Program Prioritas Kabupaten	Arah Kebijakan	No	Program Kerja Prioritas	Uraian Program Kerja Prioritas	Program Prioritas Nomenklatur	Urusan	PAGU
				16. Penyediaan akses yang adil terhadap bantuan sosial dan layanan dasar, serta pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	5.	Program Keluarga Harapan (PKH) Inklusif	Perduasan bantuan sosial pada lansia dan perempuan kepala keluarga	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial	4.469.769.000,00
3.	PN 3 — Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Agromaritim Industri	PP 3 — Jatim Akses	Gresik Mapan (Maju, Pintar, dan Aman)	12. Peningkatan kapasitas adaptif wilayah melalui penguatan kelembagaan, tata kelola risiko bencana, serta partisipasi masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi.	1.	Gresik Bebas Banjir Tahap ke-2	Optimalisası program bebas banjir dan hilir hingga perkotaan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	87.927.834.400,00
								Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Pertanahan	61.880.000.000,00
				9. Peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur penunjang investasi, termasuk energi, air, transportasi, dan digitalisasi logistik untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha.	2.	Pembangunan Jalan Lintas Utara-Selatan	Program membangun jalan alternatif dari Gresik bagian utara hingga ke bagian selatan	Program Penyelenggaraan Jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	961.788.993.508,00

No	Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi	Program Prioritas Kabupaten	Arah Kebijakan	No	Program Kerja Prioritas	Uraian Program Kerja Prioritas	Program Prioritas Nomenklatur	Urusan	PAGU
				10. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan strategis di wilayah prioritas melalui koordinasi lintas sektor, percepatan proses perizinan, dan pengawasan berbasis digital	3.	Pembangunan Jalan Kualitas Beton	Program betonisasi jalan yang berfokus pada jalan lintas desa dan kecamatan	Program Penyelenggaraan Jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	961.788.993.508,00
				4. Pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh yang mencakup hak sipil, identitas, kesehatan, pendidikan, dan partisipasi melalui program terpadu yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.	4.	Gresik Ramah Keluarga	Membangun taman tematik ramah keluarga yang tenntegrasi dengan pengembangan edukasi anak gaya hidup sehat, serta memfasilitasi ekonomi mikro	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Lingkungan Hidup	6.893.370.100,00
								Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan	164.128.237.339.870,00
								Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kesehatan	52.201.866.750,00
								Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	154.766.000,00
								Program Pengembangan Umkm	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	536.688.254,76
								Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pariwisata	672.944.700,00
				11. Penguatan sistem logistik daerah melalui pengembangan jaringan transportasi multimoda, fasilitas distribusi, dan konektivitas pelabuhan serta kawasan industri.	5.	Sistem Transportasi Gresik Terpadu	Revitalisasi angkudes menjadi feeder Transjatim	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Perhubungan	44.376.096.893,00

No	Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi	Program Prioritas Kabupaten	Arah Kebijakan	No	Program Kerja Prioritas	Uraian Program Kerja Prioritas	Program Prioritas Nomenklatur	Urusan	PAGU
				10. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan strategis di wilayah prioritas melalui koordinasi lintas sektor, percepatan proses perizinan, dan pengawasan berbasis digital.	6.	Memastikan Ketersediaan Air Bersih	Pembangunan saluran air PDAM ke seluruh desa	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34.403.542.436,82
									BUMD	34.403.542.436,82
4.	PN 5 — Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam NegerSwasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	PP 2 — Jatim Kerja PP 4 — Jatim Agro PP 9 — Jatim Lestari	Gresik Agropolitan	17. Pengembangan sistem pemberdayaan sosial yang berbasis pada keadilan dan pemerataan kesempatan ekonomi di setiap wilayah dan kelompok masyarakat.	1.	GOTani (Gresik Ayo Bertani)	Menjamin kesejahteraan petani dengan memastikan ketersediaan pupuk dan pemberian asuransi	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pertanian	4.692.677.997,76
				7. Pengembangan pusat distribusi dan pasar rakyat modern berbasis kawasan strategis guna memperluas akses pasar dan memperkuat daya saing produk lokal.	2.	Peningkatan Kualitas RPH (Rumah Potong Hewan) dan RPU (Rumah Potong Unggas)	Program penambahan dan revitalisasi RPH dan RPU	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterine	Pertanian	857.345.400,00

No	Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi	Program Prioritas Kabupaten	Arah Kebijakan	No	Program Kerja Prioritas	Uraian Program Kerja Prioritas	Program Prioritas Nomenklatur	Urusan	PAGU
				17. Pengembangan sistem pemberdayaan sosial yang berbasis pada keadilan dan pemerataan kesempatan ekonomi di setiap wilayah dan kelompok masyarakat.	3	Nelayan Gresik Berdaulat	Program pemberian subsisi BBM, pembangunan SPBUN, serta asuransi jiwa untuk nelayan laut	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Kelautan dan Perikanan	429.082.690,00
				18. Penguatan ekosistem kewirausahaan dan UMKM sebagai alternatif penciptaan lapangan kerja yang mandiri dan berkelanjutan.	4.	Pengembangan Komoditas Tanaman Perkebunan Alternatif	Pengembangan komoditas tanaman perkebunan contoh tembakau di Bawean, dan biofarmaka	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pertanian	8.031.349.950,00
				18. Penguatan ekosistem kewirausahaan dan UMKM sebagai alternatif penciptaan lapangan kerja yang mandiri dan berkelanjutan.	5.	Pembangunan Techno Park berbasis Minapolitan	Peningkatan kualitas sarana prasarana kampung bandeng, penguatan UPI (unit pengelolaan ikan), serta udang	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan	200.000.000,00
								Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kelautan dan Perikanan	275.000.000,00
5.	PN 3 — Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong	PP 2 — Jatim Kerja	Gema Karya (Gresik mandiri dan berkarya)	18. Penguatan ekosistem kewirausahaan dan UMKM sebagai alternatif penciptaan lapangan kerja yang mandiri dan berkelanjutan.	1.	Program 3B (Bela, Beli, Bagi) Gresik	Program keberpihakan pada produk asli Gresik dengan memberikan modal penguatan manajemen serta	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	154.766.000,00

No	Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi	Program Prioritas Kabupaten	Arah Kebijakan	No	Program Kerja Prioritas	Uraian Program Kerja Prioritas	Program Prioritas Nomenklatur	Urusan	PAGU
	Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Agromaritim Industri						memperkuat branding produk UMKM, UKM dan IKM Gresik	Program Pengembangan UMKM	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	536.688.254,76
								Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	998.430.471,00
								Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Perdagangan	660.892.150,00
				6. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia industri melalui program vokasi, sertifikasi, dan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia pendidikan.	2.	Program Pelatihan Intensif Bersertifikat BNSP	Peningkatan kemampuan generasi muda dengan konsep: mengajarkan kedisiplinan, pelatihan skill vokasional yang bersertifikan BNSP (contohnya, instrumen mesin), orientasi pengenalan dunia industri	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	1.600.000.000,00
				6. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia industri melalui program vokasi, sertifikasi, dan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia pendidikan.	3.	Penguatan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Pereraan kebutuhan tenaga kerja berbasis kebutuhan dunia usana dan industri (deman driven)	Program Penempatan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	482.875.000,00
								Program Perencanaan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	39.123.700,00
								Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	1.600.000.000,00

No	Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi	Program Prioritas Kabupaten	Arah Kebijakan	No	Program Kerja Prioritas	Uraian Program Kerja Prioritas	Program Prioritas Nomenklatur	Urusan	PAGU
6.	PN 4 — Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	PP 5 — Jatim Cerdas	Gresik Cemerlang (Cerdas, efisien, menarik, relevan, global)	4. Pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh yang mencakup hak sipil, identitas, kesehatan, pendidikan, dan partisipasi melalui program terpadu yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.	1.	Insentif Pendidikan untuk Siswa SD dan SMP diluar BOS dan BOSDA	Pemberian beasiswa pada siswa SD dan SMP berprestasi	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan	164.128.237.339.870,00
				2. Pengembangan dan penerapan sistem digitalisasi layanan kesehatan berbasis interoperabilitas data untuk mendukung deteksi dini, manajemen penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan efisiensi pelayanan di seluruh level fasilitas kesehatan.	2.	Beasiswa Tenaga Medis Spesialis	Beasiswa tenaga medis spesialis dengan ikatan dinas	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kesehatan	2.288.078.000,00

No	Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi	Program Prioritas Kabupaten	Arah Kebijakan	No	Program Kerja Prioritas	Uraian Program Kerja Prioritas	Program Prioritas Nomenklatur	Urusan	PAGU
				1. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme pendidik melalui sistem pembinaan berkelanjutan yang berorientasi pada penguasaan teknologi pembelajaran, pendidikan karakter, dan kompetensi abad ke-21, dalam rangka menciptakan tenaga pengajar yang unggul dan responsif.	3.	Memberikan Insentif Kinerja Kepada Guru PAUD dan TK Yang Non Sertifikasi	Meningkatkan insentif kinerja untuk guru tidak tetap dan non sertifikasi serta untuk guru pembimbing siswa inklusi	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	81.403.848.000,00
				4. Pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh yang mencakup hak sipil, identitas, kesehatan, pendidikan, dan partisipasi melalui program terpadu yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.	4.	JAKETKU (Kejar Paket Tuntaskan Putus Sekolah)	Program penuntasan anak putus sekolah yang berkolaborasi dengan PKK	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan	164.128.237.339.870,00
				3. Pemenuhan hak-hak dasar kelompok rentan dan marjinal melalui perluasan akses layanan dasar yang inklusif, penghapusan praktik	5.	Program Beasiswa S1 untuk Anak Yatim Piatu, Huffadz, dan Disabilitas	Memberikan Beasiswa S1 untuk anak yatim patu, huffadz dan disabilitas	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan	164.128.237.339.870,00
								Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	90.271.830.744,00
								Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sosial	4.469.769.000,00

No	Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi	Program Prioritas Kabupaten	Arah Kebijakan	No	Program Kerja Prioritas	Uraian Program Kerja Prioritas	Program Prioritas Nomenklatur	Urusan	PAGU
				diskriminatif, serta penguatan sistem perlindungan sosial berbasis komunitas.						
				1. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme pendidik melalui sistem pembinaan berkelanjutan yang berorientasi pada penguasaan teknologi pembelajaran, pendidikan karakter, dan kompetensi abad ke-21, dalam rangka menciptakan tenaga pengajar yang unggul dan responsif.	6.	Peningkatan Gaji Guru Honorer dan ASN Non Sertifikasi	Peningkatan kesejahteraan guru honorer atau guru non ASN yang belum sertifikasi dengan perbaikan gaji	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan	164.128.237.339.870,00
				5. Penguatan peran lembaga adat, komunitas budaya, dan organisasi keagamaan dalam menjaga tradisi, mediasi sosial, serta pelestarian nilai-nilai harmoni dan keberagaman.	7.	BOP (Biaya Operasional Pesantren) untuk TPQ dan Madin	Program bantuan biaya operasional untuk TPQ dan Madin	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan	164.128.237.339.870,00
								Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	90.271.830.744,00

No	Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi	Program Prioritas Kabupaten	Arah Kebijakan	No	Program Kerja Prioritas	Uraian Program Kerja Prioritas	Program Prioritas Nomenklatur	Urusan	PAGU
				4. Pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh yang mencakup hak sipil, identitas, kesehatan, pendidikan, dan partisipasi melalui program terpadu yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.	8.	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan	164.128.237.339.870,00
				3. Pemenuhan hak-hak dasar kelompok rentan dan marjinal melalui perluasan akses layanan dasar yang inklusif, penghapusan praktik diskriminatif, serta penguatan sistem perlindungan sosial berbasis komunitas.	9.	Layanan Antar Jemput Siswa Inklusi / Disabilitas / Berkebutuhan Khusus	Dilakukan setiap 2 minggu sekali, mendatangi kecamatan berbeda dalam satu kali beroprasi	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan	164.128.237.339.870,00
7.	PN 4 — Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan	PP 6 — Jatim Sehat	Gresik Sehati (Pelayanan kesehatan integratif)	2. Pengembangan dan penerapan sistem digitalisasi layanan kesehatan berbasis interoperabilitas data untuk mendukung deteksi dini, manajemen penyakit menular dan	1.	Peningkatan Kualitas Puskesmas	Meningkatkan fasilitas kesehatan dan menyiapkan tenaga medis spesialis pada pusat layanan kesehatan masyarakat (PUSKESMAS) Gresik. Target menjadi PUSKESMAS dengan tingkatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	8.472.182.431.900,52
								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kesehatan	2.288.078.000,00

No	Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi	Program Prioritas Kabupaten	Arah Kebijakan	No	Program Kerja Prioritas	Uraian Program Kerja Prioritas	Program Prioritas Nomenklatur	Urusan	PAGU
	Penyandang Disabilitas			tidak menular, serta peningkatan efisiensi pelayanan di seluruh level fasilitas kesehatan.			pelayanan di atasnya.			
				2. Pengembangan dan penerapan sistem digitalisasi layanan kesehatan berbasis interoperabilitas data untuk mendukung deteksi dini, manajemen penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan efisiensi pelayanan di seluruh level fasilitas kesehatan.	2.	Puskesmas Sebagai Ujung Tombak Komunitas Rumah Sehat	Menjadikan PUSKESMAS sebagai ujung tombak program komunitas rumah sehat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	8.472.182.431.900,52

No	Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi	Program Prioritas Kabupaten	Arah Kebijakan	No	Program Kerja Prioritas	Uraian Program Kerja Prioritas	Program Prioritas Nomenklatur	Urusan	PAGU
				2. Pengembangan dan penerapan sistem digitalisasi layanan kesehatan berbasis interoperabilitas data untuk mendukung deteksi dini, manajemen penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan efisiensi pelayanan di seluruh level fasilitas kesehatan.	3.	Memperkuat Posyandu, Polindes, dan Poskestren	Pelibatan masyarakat dalam memperkuat program penanggulangan dan pencegahan penyakit melalui posyandu, polindes dan poskestren	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kesehatan	52.201.866.750,00
				4. Pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh yang mencakup hak sipil, identitas, kesehatan, pendidikan, dan partisipasi melalui program terpadu yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.	4.	Program Makanan Bergizi	Kolaborasi UMKM asli Gresik untuk program makanan bergizi	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kesehatan	52.201.866.750,00
								Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.219.225.858,00
								Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	154.766.000,00
								Program Pengembangan Umkm	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	536.688.254,76
								Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	998.430.471,00
				4. Pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh yang	5.	Lahir Pulang Bawa Akta Elektronik (E-Akte)	Program percepatan pembuatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	8.472.182.431.900,52

No	Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi	Program Prioritas Kabupaten	Arah Kebijakan	No	Program Kerja Prioritas	Uraian Program Kerja Prioritas	Program Prioritas Nomenklatur	Urusan	PAGU
				mencakup hak sipil, identitas, kesehatan, pendidikan, dan partisipasi melalui program terpadu yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.			akta lahir melalui digital.	Program Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	68.779.300,00
				2. Pengembangan dan penerapan sistem digitalisasi layanan kesehatan berbasis interoperabilitas data untuk mendukung deteksi dini, manajemen penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan efisiensi pelayanan di seluruh level fasilitas kesehatan.	6.	Cakupan Kesehatan Universal (UHC)	Sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	8.472.182.431.900,52
8.	PN — 1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia PN 8 — Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis	PP 7 — Jatim Berkah-Amanah PP 8 — Jatim Harmoni	Gresik Barokah	5. Penguatan peran lembaga adat, komunitas budaya, dan organisasi keagamaan dalam menjaga tradisi, mediasi sosial, serta pelestarian nilai-nilai harmoni	1.	Mendorong Kesalehan dan Tanggung Jawab Sosial Masyarakat dan Dunia Usaha		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik	2.880.454.795,20

No	Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi	Program Prioritas Kabupaten	Arah Kebijakan	No	Program Kerja Prioritas	Uraian Program Kerja Prioritas	Program Prioritas Nomenklatur	Urusan	PAGU
	dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama			dan keberagaman.				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan	3.170.867.800,00
				2. Pengembangan dan penerapan sistem digitalisasi layanan kesehatan berbasis interoperabilitas data untuk mendukung deteksi dini, manajemen penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan efisiensi pelayanan di seluruh level fasilitas kesehatan.	2.	Melindungi Segenap Generasi Muda dari Penyalahgunaan Narkoba dan HIV/AIDS		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Kesehatan	52.201.866.750,00
				5. Penguatan peran lembaga adat, komunitas budaya, dan organisasi keagamaan dalam menjaga tradisi, mediasi sosial, serta pelestarian nilai-nilai harmoni dan keberagaman.	3.	Peningkatan Peran Serta Tokoh Agama, TokohMasyarakat Tokoh Budaya dan Lembaga Keagamaan untuk Memberikan Tauladan Kesalehan Sosial		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kesatuan Bangsa dan Politik	2.344.072.000,00
								Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Kepemudaan dan Olahraga	416.801.300,00

No	Program Prioritas Nasional	Program Prioritas Provinsi	Program Prioritas Kabupaten	Arah Kebijakan	No	Program Kerja Prioritas	Uraian Program Kerja Prioritas	Program Prioritas Nomenklatur	Urusan	PAGU
				16. Penyediaan akses yang adil terhadap bantuan sosial dan layanan dasar, serta pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	4.	Gresik Probono	Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	90.271.830.744,00
9.	PN 8 — Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama	PP 9 — Jatim Lestari	Pesona Gresik (Pelestarian dan naturalisasi alam)	13. Peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat dan kelembagaan terhadap perubahan iklim melalui pendidikan dan pelatihan berbasis perubahan iklim	1.	Membangun Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu di Tingkat Kecamatan		Program Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	38.610.056.012,00
									TOTAL	**1.731.263.788.903.050,00**

Sumber : Bappeda Kabupaten Gresik, 2026 (diolah)

BAB 6
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Penetapan indikator kinerja merupakan bagian penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pemerintahan daerah, karena berfungsi sebagai alat ukur terhadap capaian pembangunan yang telah ditetapkan. Bagi Kabupaten Gresik, penyusunan indikator kinerja Tahun 2027 menjadi sarana strategis untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah dilaksanakan secara efektif, terukur, dan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional maupun kebutuhan masyarakat daerah. Selain sebagai alat evaluasi, indikator kinerja juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan serta penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Secara umum, indikator kinerja daerah dikelompokkan ke dalam dua jenis utama, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). IKU berperan dalam mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah, sedangkan IKD digunakan untuk memberikan gambaran kinerja pembangunan secara lebih luas dan sektoral. Melalui penyusunan IKU dan IKD yang tepat, terukur, dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Gresik diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah secara berkesinambungan dan berorientasi pada hasil.

6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) memiliki peran yang sangat penting karena menjadi representasi capaian terhadap tujuan dan sasaran strategis pembangunan jangka menengah daerah, sekaligus sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama. Dalam kerangka penjenjangan kinerja, IKU pada tingkat tujuan RPJMD diposisikan sebagai ultimate outcome yang pencapaiannya dijabarkan melalui sasaran-sasaran pembangunan sebagai critical success factor. Selanjutnya, indikator tersebut diterjemahkan lebih operasional dalam sasaran Renstra Perangkat Daerah sebagai penghubung antara dokumen perencanaan strategis daerah dengan perangkat daerah, yang kemudian diturunkan ke dalam capaian immediate outcome pada program pembangunan hingga capaian operasional pada kegiatan dan subkegiatan.

Selain itu, ketentuan Pasal 170 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menegaskan bahwa sasaran RPJMD dan RKPD menjadi dasar dalam penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa indikator yang melekat pada sasaran RPJMD akan sangat menentukan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintahan daerah secara menyeluruh. Oleh karena itu, dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029, penetapan IKU harus dirancang secara relevan, terukur, berorientasi pada hasil (outcome-based), serta selaras dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dengan tersusunnya IKU yang tepat, sistematis, dan terintegrasi, Pemerintah Kabupaten Gresik diharapkan memiliki arah dan pedoman strategis dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, hingga evaluasi pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Perumusan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gresik Tahun 2026 dirumuskan sebagaimana berikut:

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Utama RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2027

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target RPJMD 2027	Target RPKD 2027	Keterangan
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka (0-100)	79,69	80,17 - 81,00	80,17 - 81,00	
2	Indeks Pembangunan Gender	Angka (0-100)	92,01	91.16-91.76	92,11	
3	Indeks Kesalehan Sosial	Angka (0-100)	81,10	80.92-82.72	80.92-82.72	
4	Pertumbuhan ekonomi	Persen (%)	4,91*	4,80-5,88	4,80-5,88	
5	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen (%)	23,88*	22,86-23,60	22,86-23,60	
6	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2eq per tahun	52.525,84	41.960,69	41.960,69	
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka (0-100)	88,01	87,24	88,20	
8	Tingkat kemiskinan	Persen (%) (Burden)	9,95	8,26-9,21	8,26-9,21	

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target RPJMD 2027	Target RPKD 2027	Keterangan
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen (%) (Burden)	5,47	6,88-5,39	6,88-5,39	
10	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun	Tahun	10,35	10,62	10,62	
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,99	14,08	14,08	
12	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,90	75,08	75,08	
13	Indeks Perlindungan Anak	Angka (0-100)	81,39*	71,72-73,00	81,63	
14	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka (0-100)	62,32*	72,42-73,50	72,42-73,50	
15	Indeks Ketimpangan Gender	Angka (0-1)	0,310	0,369	0,369	
16	Indeks Inklusi (GEDSI)	Angka (0-100)	63,41	68	68	
17	Indeks Harmoni	Angka (1-5)	3,56	3,8	3,8	
18	Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur	Persen (%)	51,86*	50.54-52.00	50.54-52.00	
19	Rasio Net Ekspor	Persen (%)	10,27	10,84-12,20	10,10-11,82	
20	Incremental Capital - Output Ratio (ICOR)	Angka (<3->6)	4,90*	5,11	5,11	
21	Rasio Government Expenditure	Persen (%)	2,75*	2,05	2,05	
22	Indeks Daya Saing Daerah	Angka (0-5)	3,76	3,95	3,95	
23	Indeks Infrastruktur	Angka (0-100)	63,47	69,07	69,07	
24	Indeks Konektivitas Wilayah	Angka (0-1)	0,75	0,785	0,785	
25	Indeks Risiko Bencana	Angka (>100-0) (Burden)	119,66	29,42-126,42	118,1-118,9	

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2025	Target RPJMD 2027	Target RPKD 2027	Keterangan
26	Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka (0-100)	65,81	65,24	65,24	
27	Indeks Pemerintah Digital	Angka (0-5)	4,65 (PM SPBE)	1,89-2,25	1,89-2,25	
28	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan	Angka	77,15	81,5	81,5	
29	Indeks Sistem Merit	Angka (0-410)	310,5	345	345	
30	Indeks Pelayanan Publik	Angka (>2,01)	4,35	2,75	4,45	
31	Indeks Kemiskinan Multidimensi	100-0 (Burden)	43,79	44	44	
32	Persentase Partisipasi Perlindungan Sosial oleh Keluarga Miskin	Persen (%)	100	90-95	100	
33	Rasio gini	1-0 (Burden)	0,327	0,295-0,335	0,295-0,335	
34	Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Persen (%)	30,62	35-45	30-40	

Keterangan:
* angka sementara
Sumber : RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

6.2 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Perinatal Daerah

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan daerah, pelayanan publik, serta pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah berjalan efektif, efisien, akuntabel, dan selaras dengan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029.

Indikator tersebut disusun berdasarkan urusan pemerintahan daerah, target pelayanan publik, capaian standar pelayanan minimal, serta indikator kinerja perangkat daerah yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Selain sebagai alat pengukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, indikator ini juga digunakan sebagai dasar pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan kinerja pemerintah daerah secara berkelanjutan. Dengan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terukur dan relevan, diharapkan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, serta efektivitas pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Gresik dapat terus meningkat.

Tabel 6.2

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun				Keterangan
				2025	2026	2027	2028	
1	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI							
	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen (%)	23.41	23.41	25.35	27.3	29.25	Sasaran PD
	Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	Persen (%)	24.44	25.66	26.65	27.63	28.61	Sasaran PD
	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen (%)	58.7	58.72	58.92	59.12	59.32	Sasaran PD
	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik untuk kebutuhan rumah tangga dasar	Persen (%)	98	98	98	98	98	Program PD
	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Persen (%)	2.9	2.88	2.85	2.83	2.8	Sasaran PD
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen (%)	78.81	78.81	80.14	81.46	82.79	Sasaran PD
	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	Indeks	105.07	135,90-132,58	132,58-129,42	118,1-118,9	126,42-123,55	Sasaran PD
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	Indeks	60.12	65.09	65.16	65.24	65.32	Sasaran PD
	Penurunan Emisi GRK	Ton CO_2eq per tahun	39.540,50	40.331,31	41.137,93	41.960,69	42.799,90	Tujuan Kab
2	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun				Keterangan
				2025	2026	2027	2028	
2.1	Kesejahteraan Ekonomi							
	Pertumbuhan ekonomi	Persen (%)	4,79	4,72-5,32	4,78 – 5,35	4,80-5,88	4,82-5,50	Tujuan Kab
	PDRB per kapita	Juta Rupiah	87,44	139,48 - 144,93	140,94 - 148,85	142,14 - 150,01	142,14 - 150,01	Indikator Program
	Tingkat kemiskinan	Persen (%) (Burden)	10,32	8,47-9,95	8,42-9,64	8,26-9,21	8,08-8,9	Tujuan Kab
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen (%) (Burden)	6,45	6,91 - 6,00	6,90-5,70	6,88-5,39	6,74-5,16	Tujuan Kab
	Rasio gini	1-0 (burden)	0,33	0,311 -0,351	0,303 -0,343	0,295 -0,335	0,287 -0,327	Tujuan Kab
	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	78,93	79,84 - 80,19	79,91 - 80,51	80,17 - 81,07	80,44 - 81,64	Tujuan Kab
2.2	Kesehatan untuk Semua							
	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.48	74,57	74,82	75,08	75,33	Sasaran Kab
	Angka Kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	77.59	76.59-86.99	74.59-85.99	72.59-84.99	70.59-83.99	Sasaran PD
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Persen (%)	15.40	11.03	10.64	10.24	9.85	Sasaran PD
	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 Penduduk	265	250	235	220	205	Sasaran PD
	Persentase penduduk yang menjadi peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan kepesertaan mandiri	Persen (%)	100	60	62	64	66	Program PD
2.3	Pendidikan Berkualitas yang Merata							
	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Tahun	10.01	10.37	10.49	10.62	10.81	Sasaran Kab

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun				Keterangan
				2025	2026	2027	2028	
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,98	13,99	14,01	14,08	14,17	Sasaran Kab
	Rata-rata APM Perempuan Terhadap Laki-Laki Pada Jenjang SD dan SMP di Wilayah Rentan	Persen (%)	93.07	93.09	93.11	93.12	93.15	Sasaran PD
2.4	Perlindungan sosial yang adaptif							
	Rasio Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Penerima Upah (Rasio)	Persen (%)	47.64	47.64	48.59	49.56	50.56	Sasaran PD
	Persentase Partisipasi Perlindungan Sosial oleh Keluarga Miskin	Persen (%)	80-95	80-95	85-95	90-95	95-100	Sasaran Kab
2.5	Beragama, maslahat dan berkebudayaan maju							
	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	82,43	80.52-81.12	80.72-81.92	80.92-82.72	81.12-83.52	Tujuan Kab
	Indeks Harmoni	Indeks	3.77	3.78	3.79	3.80	3.81	Sasaran Kab
2.6	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif							
	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	81,39	71,62-72,00	71,67-72,50	81,63	71,77-73,50	Sasaran Kab
	Indeks Pembangunan Keluarga (Indeks)	Indeks	65.72	66.72	67.72	68.72	69.72	Sasaran PD
	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,335	0,402	0,38	0,369	0,358	Sasaran Kab
	Persentase Pemuda Berprestasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga (%)	Persen (%)	42.98	43	43	43	44	Sasaran PD
	Rasio pekerja penyandang disabilitas (Rasio)	Persen (%)	0.0012	0.0013	0.0014	0.0014	0.0015	Sasaran PD

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun				Keterangan
				2025	2026	2027	2028	
3	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
3.1	Daya Saing Sumber Daya Manusia							
3.1.1	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen (%)	10,45	11,22	11,32	11,46	11,61	Sasaran Renstra
3.2	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi							
	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	54.53	54.71	55.79	56.88	58.00	Sasaran Renstra
	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Persen (%)	90	93	94	95	96	Sasaran Renstra
	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen (%)	1,63	0,73 - 2,30	0,85 - 2,60	0,92 - 2,90	0,99 - 3,20	Sasaran Renstra
	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen (%)	1,44	1,39 - 1,55	1,40 - 1,62	1,41 - 1,67	1,49 - 1,72	Indikator Program
	Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen (%)	5	7	2	2	2	Sasaran Renstra
	Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif unggulan daerah	Persen (%)	2	2	2	2	2	Sasaran Renstra
	Pertumbuhan Usaha Mikro	Persen (%)	33,81	0,63	0,72	0,77	0,89	Sasaran Renstra
	ICOR	Persen (%)	4,96	4,6	5,11	5,11	5,1	Sasaran RPJMD
	Kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota terhadap Provinsi	Persen (%)	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	Sasaran RPJMD
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persen (%)	56,37	56,84	57,3	57,76	58,23	Sasaran Renstra

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun				Keterangan
				2025	2026	2027	2028	
3.5	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global							
	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	Persen (%)	37,29	22,77-23,48	22,80-23,59	22,86-23,60	22,90-23,61	Sasaran RPJMD
3.6	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi							
	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persen (%)	82,4	82,4	83,28	84,82	86,36	Sasaran Renstra
	Persentase Desa Mandiri (%)	Persen (%)	100	47.58	49.39	51.52	53.03	Sasaran Renstra
3.7	Stabilitas Ekonomi Makro							
	Angka Inflasi	Angka	1,85	3,5	3,5	3,5	3,5	Sasaran Renstra
	Rasio Pajak terhadap PDBB	Persen (%)	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	Sasaran Renstra
4	ASPEK PELAYANAN UMUM							
4.1	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif							
	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	96,24	96,3	96,35	96,4	96,45	Indikator Program
	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	85,94	86,17	86,71	88,20	87,76	Tujuan Kab
	Indeks Pemerintah Digital	Indeks	4,32	4,37	1,79-2,1	1,89-2,25	1,99-2,39	Sasaran Kab
	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	1,66	2,25	2,51	2,75	3,01	Sasaran Kab
4.2	Hukum, Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, Demokrasi Substansial							
	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks	7,05	7,15	7,25	7,35	7,45	Indiukator Program

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun				Keterangan
				2025	2026	2027	2028	
	Persentase Pemenuhan Kebijakan Peduli HAM yang difasilitasi	Persen (%)	100	100	100	100	100	Indikator Program
	Rasio Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perbup (Rasio)	Persen (%)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	Sasaran Renstra
4.3	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan							
	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,77	3,75	3,85	3,95	4,05	Sasaran Kab
4.4	Kinerja setiap urusan pemerintah daerah							
4.4.1	Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Dasar							
4.4.1.1	Pendidikan							
	Angka Partisipasi Sekolah (5-6) PAUD	Persen (%)	77,79	80,76	83,73	86,7	89,67	Sasaran Renstra
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 SD/SMP	Persen (%)	99,29	99,4	99,52	99,63	99,74	Sasaran Renstra
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	Persen (%)	24,54	29,51	34,49	39,47	44,44	Sasaran Renstra
	Rata-rata Kemampuan Literasi	Persen (%)	75,62	77,42	79,22	81,02	82,82	Sasaran Renstra
	Rata-rata Kemampuan Numerasi	Persen (%)	64,66	66,86	69,06	71,31	73,46	Sasaran Renstra
	Iklim Inklusivitas SD	Persen (%)	78,00	78,90	79,80	80,70	81,60	Sasaran Renstra
	Iklim Inklusivitas SMP	Persen (%)	73,00	74,50	76,00	77,50	79,00	Sasaran Renstra
	Iklim Kebinekaan SD	Persen (%)	75,57	76,57	77,57	78,57	79,57	Sasaran Renstra
	Iklim Kebinekaan SMP	Persen (%)	72,67	73,67	74,67	75,67	76,67	Sasaran Renstra
	Iklim Keamanan SD	Persen (%)	62,30	64,80	67,30	69,80	72,30	Sasaran Renstra
	Iklim Keamanan SMP	Persen (%)	61,11	63,51	65,91	68,31	70,17	Sasaran Renstra

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun				Keterangan
				2025	2026	2027	2028	
	Angka Putus Sekolah	Persen (%)	1,44	1,42	1,4	1,38	1,36	Sasaran Renstra
	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	Persen (%)	91,51	94,28	94,78	95,28	95,78	Sasaran Renstra
	Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Tenaga Pendidik dan Kependidikannya sesuai dengan SNP	Persen (%)	98,78	98,8	98,82	98,84	98,86	Sasaran Renstra
	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	Persen (%)	91,36	91,77	92,18	92,59	93	Sasaran Renstra
	Rata-rata satuan pendidikan SD, SMP yang memiliki Standar Isi sesuai SNP	Persen (%)	98,78	98,8	98,82	98,84	98,86	Sasaran Renstra
	Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Prosesnya sesuai dengan SNP	Persen (%)	98,78	98,8	98,82	98,84	98,86	Sasaran Renstra
	Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Penilaian sesuai dengan SNP	Persen (%)	98,78	98,8	98,82	98,84	98,86	Sasaran Renstra
	Rata-rata satuan pendidikan tingkat SD, SMP yang Standar Kelulusannya sesuai dengan SNP	Persen (%)	100	100	100	100	100	Sasaran Renstra
4.4.1.2	Kesehatan							
	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup (Per 1000)	Per 1000 kelahiran hidup	4.29	4.25	4.20	4.15	4.10	Sasaran Renstra
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	Persen (%)	100	95	95	96	97	Sasaran Renstra

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun				Keterangan
				2025	2026	2027	2028	
	Cakupan Deteksi Dini Diabetes Melitus (%)	Persen (%)	103.3	60	62	64	66	Sasaran Renstra
	Cakupan Deteksi Dini Hipertensi (%)	Persen (%)	93.4	70	72	74	76	Sasaran Renstra
	Net Death Rate (NDR) (%)	Persen (%)	39	37	35	33	31	Sasaran Renstra
	Cakupan Universal Health Coverage (%)	Persen (%)	100	100	100	100	100	Sasaran Renstra
	Gross Death Rate (GDR) (%)	Persen (%)	66	62	59	56	53	Sasaran Renstra
	Persentase Posyandu Siklus Hidup Aktif (%)	Persen (%)	91.9	92.4	92.7	93	93.4	Sasaran Renstra
	Persentase Desa/Kelurahan STBM (%)	Persen (%)	21.91	25	29	36	42	Sasaran Renstra
	Persentase Fasilitas Pelayanan kesehatan pemerintah dengan nilai SKM >=80% (%)	Persen (%)	100	100	100	100	100	Sasaran Renstra
	Rasio Puskesmas Ramah Anak (Rasio)	Persen (%)	18:32	26:32	32:32	32:32	32:32	Sasaran Renstra
	Persentase Perlindungan Sosial untuk Kelompok Rentan (%)	Persen (%)	100	100	100	100	100	Sasaran Renstra
	Realisasi Belanja Infrastruktur Urusan Kesehatan (%)	Persen (%)	100	100	100	100	100	Sasaran Renstra
	Persentase Kematian Ibu dari Keluarga Miskin (%)	Persen (%)	0.13	0.125	0.120	0.115	0.110	Sasaran Renstra
	Persentase Kematian Bayi dari Keluarga Miskin (%)	Persen (%)	0.698	0.680	0.670	0.660	0.650	Sasaran Renstra
	Angka Kasus Stunting dari Keluarga Miskin (Angka)	Angka	317	317	300	285	270	Sasaran Renstra

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun				Keterangan
				2025	2026	2027	2028	
	Persentase keluarga miskin yg telah dijamin dalam UHC dengan status PBIJK dan PBPU BP Pemda (%)	Persen (%)	100	100	100	100	100	Sasaran Renstra
	Cakupan ODHIV on ART (%)	Persen (%)	70	72	74	76	78	Sasaran Renstra
4.4.1.3	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang							
	Rerata Realisasi Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Jalan (%)	Persen (%)	72.88	73	74	75	76	Sasaran Renstra
	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%)	Persen (%)	49.85	50.47	51.09	51.71	52.33	Sasaran Renstra
	Persentase Kapasitas daya tampung air Waduk Kabupaten (%)	Persen (%)	65.86	66.37	66.88	67.39	67.90	Sasaran Renstra
	Persentase Realisasi Penanggulangan Banjir Kali Lamong (%)	Persen (%)	9.82	9.82	22.77	26.34	36.16	Sasaran Renstra
	Persentase Kemantapan Jalan Kabupaten (%)	Persen (%)	70.74	70.94	70.29	70.54	70.79	Sasaran Renstra
	Persentase Kemantapan Jalan Poros Desa (%)	Persen (%)	69.86	69.48	69.58	69.68	69.78	Sasaran Renstra
	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (%)	Persen (%)	1.34	3.33	5.32	7.31	9.30	Sasaran Renstra
	Persentase penerbitan SPPST Bangunan Gedung (%)	Persen (%)	56.98	50.11	15.57	15.57	15.57	Sasaran Renstra
	Persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik (%)	Persen (%)	56.96	64.13	71.30	78.48	85.65	Sasaran Renstra

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun				Keterangan
				2025	2026	2027	2028	
4.4.1.4	Perumahan dan Kawasan Permukiman							
	Persentase PSU Perumahan dan permukiman tertangani (%)	Persen (%)	0.06	0.06	0.06	0.10	0.11	Sasaran Renstra
	Persentase Capaian Penurunan Backlog Perumahan (%)	Persen (%)	26.05	7	7.63	8.38	9.28	Sasaran Renstra
	Persentase korban bencana atau masyarakat terdampak relokasi yang mendapatkan hunian layak dan aman (%)	Persen (%)	100	100	100	100	100	Sasaran Renstra
	Persentase Capaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (%)	Persen (%)	11.32	0.01	0.01	0.02	0.03	Sasaran Renstra
4.4.1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat							
	Persentase Penangangan Gangguan Tibumtranmas yang Diselesaikan (%)	Persen (%)	100	100	100	100	100	Sasaran Renstra
	Rasio Linmas terhadap RT (per RT) (Rasio)	Persen (%)	1.	1.1	1.2	1.4	1.6	Sasaran Renstra
	Rerata respon time rate penanganan kebakaran (menit)	Menit	48,83	48,83	48,83	48,83	48,83	Sasaran Renstra
	penurunan kerugian pasca bencana (%)	Persen (%)	30	30	32.5	35	37.5	Sasaran Renstra
	Rasio Desa Tangguh Bencana (Rasio)	Persen (%)	0.40	0.46	0.52	0.57	0.63	Sasaran Renstra
	Rasio Partisipasi Mitigasi Bencana (Rasio)	Persen (%)	0.28	0.28	0.29	0.31	0.32	Sasaran Renstra

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun				Keterangan
				2025	2026	2027	2028	
4.4.1.6	Sosial							
	Persentase Perlindungan Sosial untuk Kelompok Rentan (%)	Persen (%)	28	28	37	45	53	Sasaran Renstra
	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan sosial sektoral (%)	Persen (%)	3	-	3	5	7	Sasaran Renstra
	Persentase penyandang disabilitas yang mendapat Program Perlindungan Sosial (%)	Persen (%)	15	16	27	29	38	Sasaran Renstra
	Persentase Lansia Miskin yang mendapat Program Perlindungan Sosial (%)	Persen (%)	18	22	30	37	43	Sasaran Renstra
	Persentase Desil 1-2 dibandingkan dengan jumlah penduduk (%)	Persen (%)	21	20	19	18	17	Sasaran Renstra
4.4.2	Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Non Dasar							
4.4.2.1	Tenaga Kerja							
	Rasio pencari kerja perempuan yang mendapatkan pekerjaan di sektor formal dan informal (Rasio)	Persen (%)	30.00	30.60	31.21	31.84	32.47	Sasaran Renstra
	Rasio pelatihan tenaga kerja terhadap kebutuhan tenaga kerja bersertifikasi (Rasio)	Persen (%)	13	13.33	13.33	13.33	13.33	Sasaran Renstra
	Rasio penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur (Rasio)	Persen (%)	21.65	42.11	42.78	44.44	47.22	Sasaran Renstra

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun				Keterangan
				2025	2026	2027	2028	
	Tingkat produktivitas tenaga kerja (%)	Persen (%)	1.15	1.17	1.20	1.22	1.24	Sasaran Renstra
	Rasio penempatan kerja terhadap tenaga kerja dilatih (%)	Persen (%)	72.12	70-73	70.5-73.5	71-74	71.5-74.5	Sasaran Renstra
	Rasio pekerja dari keluarga miskin yang telah dijamin dalam jaminan sosial ketenagakerjaan (Rasio)	Persen (%)	40.0	40.0	40.8	41.6	42.4	Sasaran Renstra
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	Persen (%)	71.61	72.16	72.72	73.28	73.84	Sasaran Renstra
	Persentase Penyelesaian Hubungan Industrial (%)	Persen (%)	97.5	98.5	99.5	100	100	Sasaran Renstra
	Rasio Perusahaan yang telah membayar gaji karyawan sesuai Upah Minimum (Rasio)	Persen (%)	100	90-100	90-100	90-100	90-100	Sasaran Renstra
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	Persen (%)	52.69	52.69	55.23	59.39	61.93	Sasaran Renstra
4.4.2.2	Lingkungan Hidup							
	Persentase RTH (Persentase)	Persen (%)	11.65	12.07	12.49	12.91	13.33	Sasaran Renstra
	Persentase Infrastruktur Publik Ramah Lingkungan untuk Kelompok Rentan (%)	Persen (%)	14	14	29	29	29	Sasaran Renstra
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	Indeks	82.94	77.83	77.85	77.87	77.89	Sasaran Renstra
	Indeks Kualitas Air (Indeks)	Indeks	50	50	50.01	50.02	50.03	Sasaran Renstra
	Rasio Perusahaan yang menerapkan Green Industry (Rasio)	Persen (%)	5.26	6.67	7.14	8.33	9.09	Sasaran Renstra
	Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	Indeks	35.3	44.8	44.8	44.8	44.8	Sasaran Renstra

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun				Keterangan
				2025	2026	2027	2028	
	Persentase Rumah Tangga Miskin yang terlayani Pengelolaan Persampahan (%)	Persen (%)	67	67	67	67	68	Sasaran Renstra
	Realisasi Belanja Infrastruktur Urusan Lingkungan Hidup (%)	Persen (%)	80	80	80	80	80	Sasaran Renstra
4.4.2.3	Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil							
	Pertumbuhan Kepemilikan KIA (%)	Persen (%)	0.08	0.024	0.026	0.028	0.030	Sasaran Renstra
	Persentase pemutakhiran data dan dokumen kependudukan (%)	Persen (%)	83.00	84.00	85.00	86.00	87.00	Sasaran Renstra
	Persentase Kepemilikan e-KTP (%)	Persen (%)	99.53	99.56	99.58	99.60	99.61	Sasaran Renstra
	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran (%)	Persen (%)	61.04	65.00	68.00	70.00	71.00	Sasaran Renstra
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan (Indeks)	Indeks	90.60	90.61	90.62	90.63	90.64	Sasaran Renstra
	Persentase Kepemilikan e-KTP untuk Keluarga Miskin (%)	Persen (%)	88.33	88.33	88.70	90.39	92.65	Sasaran Renstra
	Persentase kepemilikan AKta Kelahiran untuk Keluarga Miskin (%)	Persen (%)	88.67	88.67	88.70	88.72	88.75	Sasaran Renstra
	Persentase pekerja migran yang terfasilitasi pelayanan Adminduk (%)	Persen (%)	100	100	100	100	100	Sasaran Renstra
4.4.2.4	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
	Return of Aset Usaha Desa (BUMDesa dan Koperasi Merah Putih) (%)	Persen (%)	1.94	2.09	2.24	2.39	2.54	Sasaran Renstra

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun				Keterangan
				2025	2026	2027	2028	
	Rasio Pendapatan Asli Desa (Rasio)	Persen (%)	0.0534	0.0541	0.0549	0.0557	0.0564	Sasaran Renstra
	Return of Investment Usaha Desa (BUM Desa dan Koperasi Merah Putih) (%)	Persen (%)	25.07	25.29	25.51	25.73	25.95	Sasaran Renstra
	Indeks Profesionalitas Aparatur Pemerintah Desa (Indeks)	Indeks	60	60	64	68	72	Sasaran Renstra
	Realisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan Desa (%)	Persen (%)	91.81	91.81	92.26	93.08	93.40	Sasaran Renstra
	Rasio Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Ekosistem Desa (Rasio)	Persen (%)	0.84	0.84	0.86	0.88	0.9	Sasaran Renstra
4.4.2.5	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
	Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun (%)	Persen (%)	9.27	9.27	9.07	8.87	8.67	Sasaran Renstra
	Total Fertility Rate (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	(Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	1.92	1.92-2	1.92-2	1.92-2	1.92-2	Sasaran Renstra
	Unmet Need ber - KB (Angka)	Persen	9,18	9,17	9,16	9,15	9,14	Sasaran Renstra
4.4.2.6	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
	Penurunan Kasus Perkawinan Usia Anak dihitung dari pengajuan dispensasi kawin (%)	Persen (%)	10	5,1	5,2	5,3	5,4	Sasaran Renstrakoperasi

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun				Keterangan
				2025	2026	2027	2028	
	Rasio anak pekerja migran yang mendapatkan perlindungan pasca pemulangan (Rasio)	Persen (%)	100	100	100	100	100	Sasaran Renstra
	Persentase Usia Kawin Pertama dibawah sama dengan 20 Tahun dari keluarga miskin (%)	Persen (%)	9	9	9	9	9	Sasaran Renstra
	Persentase Kasus Anak Dalam Situasi Khusus yang Mendapat Layanan Konprehensif (%)	Persen (%)	100	100	100	100	100	Sasaran Renstra
	Rasio Kepala Rumah Tangga perempuan miskin yang mendapatkan akses program pemberdayaan (Rasio)	Persen (%)	6.86	6.86	6.86	6.86	6.86	Sasaran Renstra
	Rasio realisasi usulan perempuan yang diakomodasi dalam perencanaan pembangunan (%)	Persen (%)	40	30	40	40	40	Sasaran Renstra
	Persentase PD yang minimal 30% kegiatannya dilengkapi dokumen Analisa Responsif gender (%)	Persen (%)	30.43	30	40	50	60	Sasaran Renstra
	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Mendapat Layanan Konprehensif (%)	Persen (%)	100	100	100	100	100	Sasaran Renstra
4.4.2.7	Perhubungan							
	Cakupan layanan transportasi (%)	Persen (%)	36.31	36.31	40.78	40.78	43.58	Sasaran Renstra
	Nilai volume to capacity (VC) ratio jalan kabupaten gresik (%)	Persen (%)	80.43	80.43	82.61	84.78	86.96	Sasaran Renstra

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun				Keterangan
				2025	2026	2027	2028	
	Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang ramah energi (%)	Persen (%)	50	50	60	70	80	Sasaran Renstra
4.4.2.8	Persandian							
	Persentase digitalisasi layanan yang menerapkan Persandian (%)	Persen (%)	15.78	15.78	20	23.80	27.27	Sasaran Renstra
4.4.2.9	Statistik							
	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (%)	Persen (%)	100	100	100	100	100	Sasaran Renstra
4.4.2.10	Komunikasi dan Informatika							
	Nilai keterbukaan informasi publik (Nilai)	Nilai	35.77	40	45	50	60	Sasaran Renstra
	persentase pengaduan pelayanan publik yang diselesaikan (%)	Persen (%)	97.10	97.10	97.10	97.10	97.10	Sasaran Renstra
	Persentase digitalisasi layanan (%)	Persen (%)	41	43	45	48	50	Sasaran Renstra
4.4.2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
	Pertumbuhan Koperasi aktif (%)	Persen (%)	8.96	1.84	2.05	2.24	2.31	Sasaran Renstra
4.4.2.12	Penanaman Modal							
	Realisasi investasi sektor manufaktor (triliun rupiah)	Triliun Rupiah	32.5	13.00	13.13	13.33	13.59	Sasaran Renstra
	Pertumbuhan realisasi investasi (%)	Persen (%)	22.66	0.50	1.00	1.49	1.95	Sasaran Renstra
	Pertumbuhan investasi sektor manufaktur (%)	Persen (%)	-28.52	65	65	65	65	Sasaran Renstra

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun				Keterangan
				2025	2026	2027	2028	
	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan (%)	Persen (%)	51.25	50.33	51.28	51.29	51.30	Sasaran Renstra
	Rasio Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM (Rasio)	Persen (%)	0:0	25:800	35:800	40:800	45:800	Sasaran Renstra
	Nilai survey kepuasan masyarakat untuk layanan perijinan dan penanaman modal (Predikat)	Predikat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sasaran Renstra
4.4.2.13	Perpustakaan							
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	Nilai	67.51	69.51	71.51	73.51	75.51	Sasaran Renstra
	Tingkat ketercukupan bahan pustaka (%)	Persen (%)	0.27	2	2.04	2.08	2.12	Sasaran Renstra
4.4.2.14	Kearsipan							
	Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal (Nilai)	Nilai	88.41	90-100	90-100	90-100	90-100	Sasaran Renstra
4.4.2.15	Pangan							
	Rasio ketersediaan pangan per kapita (Kg/KAP/TH)	(Kg/KAP/TH)	184.04	184.88	185.73	186.59	187.46	Sasaran Renstra
	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	Nilai	93.6	94.17	94.75	95.32	95.89	Sasaran Renstra
	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	Indeks	90.9	80.61	81.32	82.03	82.75	Sasaran Renstra
	stabilitas harga pangan utama (%)	Persen (%)	9.39	4.68	4.68	4.7	4.72	Sasaran Renstra
4.4.2.16	Pertanahanan							

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun				Keterangan
				2025	2026	2027	2028	
	Persentase Lokasi tanah yang dibebaskan (%)	Persen (%)	50	60	60	60	60	Sasaran Renstra
4.4.3	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan							
4.4.3.1	Kelautan dan Perikanan							
	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	(Kg/KAP/TH)	56.6	57.73	58.94	60.24	61.63	Sasaran Renstra
	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap (%)	Persen (%)	3.22	3.23	3.24	3.25	3.26	Sasaran Renstra
	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya (%)	Persen (%)	2.24	2.43	2.44	2.45	2.46	Sasaran Renstra
	Pertumbuhan produksi usaha garam rakyat (%)	Persen (%)	-31.2	0.96	1.21	1.30	1.48	Sasaran Renstra
	Persentase penurunan konflik nelayan (%)	Persen (%)	-18.29	2.78	2.86	2.94	3.03	Sasaran Renstra
	Pengawasan pengelolaan perairan umum dan darat (jumlah pelaku usaha) (Angka)	Angka	15	20	25	30	35	Sasaran Renstra
	Persentase pelatihan terhadap kelompok nelayan (%)	Persen (%)	42.8	43	43.2	43.5	43.9	Sasaran Renstra
	Persentase fasilitasi kebijakan peningkatan kesejahteraan nelayan (%)	Persen (%)	58.8	17.6	65	68	70	Sasaran Renstra
4.4.3.2	Pariwisata							
	Persentase Pembinaan Atlit Disabilitas (%)	Persen (%)	10	10	10	10	11	Sasaran Renstra

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun				Keterangan
				2025	2026	2027	2028	
	Persentase Warisan Budaya Yang Dilestarikan (%)	Persen (%)	4	4	6.25	6.25	8.3	Sasaran Renstra
	Pertumbuhan Kunjungan Wisata (%)	Persen (%)	5	7	2	2	2	Sasaran Renstra
4.4.3.3	Pertanian							
	Pertumbuhan produksi komoditas unggulan pertanian (%)	Persen (%)	2.87	0.46	0.46	0.47	0.47	Sasaran Renstra
	Pertumbuhan produksi komoditas unggulan perkebunan (%)	Persen (%)	0.46	0.45	0.48	0.52	0.55	Sasaran Renstra
	Pertumbuhan Produksi Komoditas Unggulan Peternakan (%)	Persen (%)	2.02	1.85	1.87	1.9	1.92	Sasaran Renstra
	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	Persen (%)	0.73-2.30	0.73-2.30	0.85-2.60	0.92-2.90	0.99-3.20	Sasaran Renstra
4.4.3.4	Perdagangan							
	Pertumbuhan Nilai Neraca Perdagangan (%)	Persen (%)	33.34	0.05	0.03	0.03	0.03	Sasaran Renstra
4.4.3.5	Perindustrian							
	Pertumbuhan IKM (%)	Persen (%)	1.14	0.92	0.97	0.20	0.20	Sasaran Renstra
4.4.4	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Penunjang Urusan							
4.4.4.1	Kesekretariatan Daerah							
	Rasio Perangkat Daerah dengan Nilai AKIP (Rasio)	Persen (%)	0.87	0.87	0.89	0.91	0.93	Sasaran Renstra
	Hasil Evaluasi Kelembagaan (Angka)	Angka	96.8	96.8	97	97.2	97.4	Sasaran Renstra
	Hasil penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	Angka	95.88	96	96.25	96.50	96.75	Sasaran Renstra

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun				Keterangan
				2025	2026	2027	2028	
	Nilai LPPD (Nilai)	Nilai	3.3	3.4	3.410	3.415	3.420	Sasaran Renstra
	Indeks Kualitas Kebijakan (Indeks (Skala 0-100))	Indeks	84.45	84.50	84.55	84.60	84.65	Sasaran Renstra
	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah (Indeks (Skala 0-100))	Indeks	88.19	88.23	88.25	88.28	88.31	Sasaran Renstra
	Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indeks (Skala 0-100))	Indeks	76.93	77	78	79	80	Sasaran Renstra
	Nilai Peduli HAM (Nilai)	Nilai	90.95	90.96	90.97	90.98	90.99	Sasaran Renstra
	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	4.58	4.62	4.64	4.66	4.68	Sasaran Renstra
4.4.4.2	Sekretariat Dewan							
	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kesekretariatan dan Keuangan (%)	Persen (%)	100	100	100	100	100	Sasaran Renstra
	Persentase Dukungan Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Fungsi DPRD (%)	Persen (%)	100	100	100	100	100	Sasaran Renstra
	Persentase Dukungan Fasilitasi Terhadap Pelaksanaan Tugas DPRD (%)	Persen (%)	100	100	100	100	100	Sasaran Renstra
	Nilai Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Nilai)	Persen (%)	96.25	96.25	96.50	96.75	97	Sasaran Renstra
4.4.4.3	Perencanaan Pembangunan							

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun				Keterangan
				2025	2026	2027	2028	
	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)	Indeks	80	80.5	81	81.5	82	Sasaran Renstra
4.4.4.4	Keuangan							
	Persentase Realisasi Pendapatan Pemanfaatan Aset Daerah (%)	Persen (%)	70	70	70	70	70	Sasaran Renstra
	Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rasio)	Persen (%)	85	85	85	85	85	Sasaran Renstra
	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Sasaran Renstra
4.4.4.5	Kepegawaian							
	Rasio Perempuan dalam Jabatan Pemerintah Daerah (%)	Persen (%)	30.57	31	31.5	32	32.5	Sasaran Renstra
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks (Skala 0-100))	Indeks	88.87	89	89.25	89.5	89.75	Sasaran Renstra
4.4.4.6	Pengawasan							
	Persentase Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal (%)	Persen (%)	88.41	90.05	90.10	90.15	90.20	Sasaran Renstra
	Rata-rata kategori hasil Evaluasi SAKIP OPD (Nilai)	Nilai	86.37	86.57	86.77	86.97	87.17	Sasaran Renstra
	Nilai maturitas SPIP (Nilai)	Nilai	3.34	3.35	3.40	3.45	3.50	Sasaran Renstra
	Nilai kapabilitas APIP (Nilai)	Nilai	3.085	3.095	3.105	3.115	3.125	Sasaran Renstra
4.4.4.7	Kewilayahan							
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	Indeks	85	90	91	92	93	Sasaran Renstra

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun				Keterangan
				2025	2026	2027	2028	
	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	Sasaran Renstra
	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	Sasaran Renstra
	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	Sasaran Renstra
	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	Sasaran Renstra
	Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	Sasaran Renstra
	Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa (Rasio)	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	Sasaran Renstra
4.4.4.8	Kesatuan Bangsa dan Politik							
	Indeks Kesadaran Berbangsa (Indeks)	Indeks	72,89	73,09	73,29	73,49	73,69	Sasaran Renstra
	Indeks Kemandirian Partisipatif (Indeks)	Indeks	3.94	3.95	3.96	3.97	3.98	Sasaran Renstra

BAB 7
PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025–2045. Selain itu, secara substantif, prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2027 diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2026-2046 serta memperhatikan berbagai isu strategis dan permasalahan pembangunan, baik pada lingkup lokal, regional, nasional, maupun global.

Penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2027 dilaksanakan secara sistematis, terpadu, terarah, transparan, dan responsif terhadap berbagai dinamika serta perubahan lingkungan strategis. Proses tersebut diarahkan untuk memperkuat sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan daerah, sekaligus mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah.

RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2027 menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pelaksanaan pembangunan diarahkan berdasarkan tema pembangunan daerah yang selaras dengan tema pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur, yaitu "Penguatan Pelayanan Dasar untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas."

Penyusunan RKPD yang berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi merupakan bagian dari upaya untuk menjaga konsistensi, keterpaduan, dan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah agar lebih efektif, efisien, terukur, dan optimal dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, akan terwujud dokumen perencanaan pembangunan yang konsisten, terintegrasi, dan saling berkaitan mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, hingga perencanaan tahunan.

Keberhasilan pelaksanaan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2027 memerlukan komitmen, sinergi, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan diharapkan dapat mengawal dan melaksanakan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2027 secara konsisten, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Gresik mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Melalui komitmen bersama, koordinasi yang efektif, serta partisipasi seluruh unsur pembangunan, diharapkan pelaksanaan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2027 dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya pemantapan daya saing daerah menuju masyarakat Gresik yang mandiri dan berkualitas.

BUPATI GRESIK,

BUPATI GRESIK

FANDI AKHMAD YANI